RKPD 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah



Pemerintah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2022

BAPPELITBANG TANGGAMUS
Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas

BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappelitbang adalah perangkat daerah kabupaten yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Tanggamus adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

17. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD.

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi daerah;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi *corona virus disease 2019* di daerah;

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2023 memuat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan Rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN;

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;

Bab VII: PENUTUP.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022 NOMOR 777

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023



PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan untuk pembangunan selama periode satu tahun dan Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen RKPD ini. Secara substansi, dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2023 ini tetap memedomani Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018–2023, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa : *Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.* Pada pasal 263 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa :

> *RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan*

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 ini dilakukan di saat pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, perkembangan dampak penyebaran wabah pandemi global Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan kondisi sosial-ekonomi, tentunya secara otomatis akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus di tahun 2023.

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ini adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023. Selanjutnya KUA - PPAS tersebut setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA Perangkat Daerah kemudian akan dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBD tahun 2023.

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif diawali dengan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Pekon, Tingkat Kecamatan, Konsultasi Publik, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan dilanjutkan Musrenbang Kabupaten Tanggamus dengan melibatkan Perangkat Daerah dan *stakeholders*.

Diharapkan program kerja yang telah dan sementara ini dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang tentu saja terlalu dini untuk mengatakan *impact*-nya kepada masyarakat sudah berhasil. Namun itulah yang memacu eksekutif, legislatif, dan seluruh *stakeholders* agar tidak puas dulu dengan apa yang sudah ada sekarang, tetapi kemajuan-kemajuan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta bagaimana seluruh kekuatan ini dapat bersatu untuk merespon seluruh hambatan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekaligus menjadi alat ukur internal bagai

penyelenggara pemerintahan dan menjadikannya *strength of spirit* bagi kita semua untuk selalu berbuat dan bekerja lebih keras lagi.

Akhirnya kepada seluruh unsur yang terkait dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas yang kita lakukan dalam membangun Kabupaten Tanggamus yang kita cintai ini.

Kota Agung, 7 Juli 2022

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR GAMBAR		vi
DAFTAR TABEL		x
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 8
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 12
	1.4 Maksud dan Tujuan	I - 16
	1.5 Sistematika Dokumen	I - 17
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II - 1
	2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah.....	II - 1
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Realisasi RPJMD.....	II - 157
	2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 377
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III - 1
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III - 48

		Halaman
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV - 2
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV - 11
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V - 1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VI - 1
BAB VII	PENUTUP.....	VII - 1

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1.	Proses penyusunan RKPD Tahun 2023.....	I - 4
Gambar I.2.	Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerinatahan Daerah.....	I - 6
Gambar I.3.	Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah.....	I - 13
Gambar II.1.	Peta Wilayah Kabupaten Tanggamus.....	II - 2
Gambar II.2.	Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 6
Gambar II.3.	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II - 8
Gambar II.4.	Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II - 10
Gambar II.5.	Peta Geologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 14
Gambar II.6.	Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 15
Gambar II.7.	Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II - 16
Gambar II.8.	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus....	II - 19
Gambar II.9.	Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	II - 29
Gambar II.10.	Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus	II - 38
Gambar II.11.	Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus.....	II - 39
Gambar II.12.	Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus.....	II - 39

		Halaman
Gambar II.13.	Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus.....	II - 40
Gambar II.14	Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus	II - 41
Gambar II.15.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 50
Gambar II.16.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2016-2021.....	II - 51
Gambar II.17.	Nilai Gini Rasio Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2021.....	II - 55
Gambar II.18.	Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 55
Gambar II.19.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 56
Gambar II.20	Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2021.....	II - 60
Gambar II.21	IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2021.....	II - 61
Gambar II.22	Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Tanggamus.....	II - 65
Gambar II.23	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.....	II - 67
Gambar II.24	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.....	II - 68
Gambar II.25	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2021.....	II - 69
Gambar II.26	Komparasi TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II - 71
Gambar II.27	Komparasi TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021.....	II - 72

		Halaman
Gambar II.28	Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 85
Gambar II.29	Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..	II - 86
Gambar II.30	Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 88
Gambar II.31	Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 150
Gambar II.32	Nilai Tukar Petani Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional.....	II - 153
Gambar II.33	Persentase Capaian TPB Pilar Sosial.....	II - 189
Gambar II.34	Persentase Capaian TPB Pilar Ekonomi.....	II - 190
Gambar II.35	Persentase Capaian TPB Pilar Lingkungan.....	II - 191
Gambar II.36	Persentase Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola.....	II - 193
Gambar III.1.	Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2022.....	III - 5
Gambar III.2.	Peta Pembangunan Wilayah Sumatera	III - 20
Gambar III.3.	Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	III - 24
Gambar III.4.	Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 Berdasarkan Seri 2000 dan 2010.....	III - 25
Gambar III.5.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021	III - 26
Gambar III.6.	Distribusi PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021.....	III - 27
Gambar IV.1.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1.....	IV - 5
Gambar IV.2.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2.....	IV - 6
Gambar IV.3.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3.....	IV - 6
Gambar IV.4.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4.....	IV - 7

Halaman

Gambar IV.5.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5.....	IV - 7
Gambar IV. 6.	Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6.....	IV - 8
Gambar IV.7.	Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023.....	IV - 11
Gambar IV.8.	Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas.....	IV - 12
Gambar IV.9.	Kerangka Pikir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.....	IV - 14
Gambar IV.10.	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 15
Gambar IV.11.	Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 16
Gambar IV.12.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV - 17
Gambar IV.13.	Highlight Major Project RKP Tahun 2023.....	IV - 22
Gambar IV.14.	Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	IV - 65
Gambar IV.15.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I.....	IV - 65
Gambar IV.16.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II.....	IV - 66
Gambar IV.17.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III.....	IV - 66
Gambar IV.18.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV.....	IV - 67
Gambar IV.19.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V.....	IV - 67
Gambar IV.20.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI.....	IV - 68
Gambar V.1.	Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus.....	V - 4
Gambar.VI.1.	Bangun Visi, Misi dan Prioritas.....	VI - 2

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel II.1.	Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II - 6
Tabel II.2.	Penutupan Lahan Tahun 2021 Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 7
Tabel II.3.	Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus	II - 9
Tabel II.4.	Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus.....	II - 17
Tabel II.5.	Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031.....	II - 18
Tabel II.6.	Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus.....	II - 20
Tabel II.7.	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031.....	II - 21
Tabel II.8.	Luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II - 22
Tabel II.9.	Luas Lahan Cadangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Plp2b)Kabupaten Tanggamus.....	II - 23
Tabel II.10.	Luas Baku Sawah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.....	II - 24
Tabel II.11.	Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus	II - 27
Tabel II.12.	Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus	II - 30
Tabel II.13.	Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus.....	II - 31
Tabel II.14.	Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus	II - 32
Tabel II.15.	Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus.....	II - 32

		Halaman
Tabel II.16.	Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus	II - 33
Tabel II.17.	Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus.....	II - 33
Tabel II.18.	Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus.....	II - 33
Tabel II.19.	Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.....	II - 42
Tabel II.20.	Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus	II - 44
Tabel II.21.	Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah).....	II - 46
Tabel II.22.	Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.....	II - 47
Tabel II.23.	Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021.....	II - 48
Tabel II.24.	Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021.....	II - 48
Tabel II.25.	Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.....	II - 49
Tabel II.26.	Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus (persen), 2017-2021.....	II - 49
Tabel II.27.	Nilai Inflasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 – 2016.....	II - 52
Tabel II.28.	PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021.....	II - 53
Tabel II.29.	Perkembangan PDRB Per kapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021.....	II - 53
Tabel II.30.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus (ribu) Tahun 2016 – 2021.....	II - 56
Tabel II.31.	Persentase Penduduk Miskin 2016-2021 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.....	II - 57

Halaman

Tabel II.32.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021.....	II - 58
Tabel II.33.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021.....	II - 58
Tabel II.34.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021.....	II - 61
Tabel II.35.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 62
Tabel II.36.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2021	II - 63
Tabel II.37.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.....	II - 69
Tabel II.38.	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 – 2021	II - 70
Tabel II.39.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 73
Tabel II.40.	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tanggamus Tahun 20162021.....	II - 73
Tabel II.41.	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 per Kecamatan.....	II - 74
Tabel II.43.	Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 per Kecamatan.....	II - 75
Tabel II.44.	Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 77
Tabel II.45.	Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021.....	II - 78
Tabel II.46.	Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 20162021.....	II - 79
Tabel II.47.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 79
Tabel II.48.	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 20162021.....	II - 80
Tabel II.49.	Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 81
Tabel II.50.	Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021	II - 81

Halaman

Tabel II.51. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 82

Tabel II.52. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 ..... II - 82

Tabel II.53. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 ..... II - 83

Tabel II.54. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 83

Tabel II.55. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017- 2021 ..... II - 90

Tabel II.56. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2021..... II - 91

Tabel II.57. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2021 di Kabupaten Tanggamus..... II - 92

Tabel II.58. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2021 ..... II - 94

Tabel II.59. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus..... II - 94

Tabel II.60. Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi 2017-2021 di Kabupaten Tanggamus ..... II - 95

Tabel II.61. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 95

Tabel II.62. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2021 Menurut Kecamatan diKabupaten Tanggamus..... II - 96

Tabel II.63. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan ..... II - 97

Tabel II.64. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus..... II - 98

Tabel II.65. Kasus Covid-19 Kabupaten Tanggamus Tahun 2021..... II - 100

Tabel II.66. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 101

Tabel II.67. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 102

Halaman

Tabel II.68. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 103

Tabel II.69. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 104

Tabel II.70. Perkembangan capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 107

Tabel II.71. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 20172021..... II - 106

Tabel II.72. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 107

Tabel II.73. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 107

Tabel II.74. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 109

Tabel II.75. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak ..... II - 111

Tabel II.76. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021..... II - 111

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 113

Tabel II.78. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..... II - 114

Tabel II.79. Capaian Pengurangan Dan Penanganan Sampah Tahun 2021..... II - 116

Tabel II.80. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021 ..... II - 116

Tabel II.81. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 118

Tabel II.82. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..... II - 119

Tabel II.83. Data Badan Usaha Milik Desa (Bum-Des) Kabupaten Tanggamus ..... II - 120

Halaman

Tabel II.84.	Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 121
Tabel II.85.	Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 122
Tabel II.86.	Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 123
Tabel II.87.	Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 124
Tabel II.88.	Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 125
Tabel II.89.	Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 126
Tabel II.90.	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 128
Tabel II.91.	Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 129
Tabel II.92.	Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 130
Tabel II.93.	Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.....	II - 130
Tabel II.94.	Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 131
Tabel II.95.	Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 134
Tabel II.96.	Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 135
Tabel II.97.	Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 136
Tabel II.98.	Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 137
Tabel II.99.	Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 138
Tabel II.100.	Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.....	II - 140

Halaman

Tabel II.101. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 141

Tabel II.102. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..... II - 142

Tabel II.103. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020..... II - 143

Tabel II.104. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 144

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 145

Tabel II.106. Rincian Aspek Penilaian lndeks Daya Saing Daerah tahun 2020-2021..... II - 146

Tabel II.107. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2020..... II - 147

Tabel II.108. Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TanggamusTahun 2017-2021..... II - 148

Tabel II.109. Perkembangan Indikator Penerapan SIDa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 ..... II - 148

Tabel II.110. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020..... II - 149

Tabel II.111. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten TanggamusTahun 2017-2021..... II - 149

Tabel II.112. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 152

Tabel II.113. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tanggamu Tahun 2016-2021 ..... II - 153

Tabel II.114. Persentase Luas Wilayah Produktif Sektor Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..... II - 154

Tabel II.115. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020..... II - 154

Tabel II.116. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021..... II - 155

Halaman

Tabel II.117. Kualitas Tenaga Kerja Berdasarkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2021..... II - 156

Tabel II.118. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021..... II - 157

Tabel II.119. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Dasar..... II - 159

Tabel II.120. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)..... II - 167

Tabel II.121 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Kesetaraan..... II - 170

Tabel II.122. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus..... II - 180

Tabel II.123 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021..... II - 182

Tabel II.124 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021..... II - 183

Tabel II.125 Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2021..... II - 184

Tabel II.126 Target SPM Bidang Sosial Tahun 2021..... II - 186

Tabel II.127 Capaian TPB Pilar Sosial..... II - 188

Tabel II.128 Capaian TPB Pilar Ekonomi..... II - 189

Tabel II.129 Capaian TPB Pilar Lingkungan..... II - 191

Tabel II.130 Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola..... II - 191

Tabel II.131 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus..... II - 194

Tabel II.132 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan (2021) Kabupaten Tanggamus..... II - 202

Tabel II.132 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus..... II - 381

		Halaman
Tabel III.1.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen).....	III - 10
Tabel III.2.	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2023 (Persen).....	III - 14
Tabel III.3.	Target Pengembangan Wilayah SumateraPer Provinsi Tahun 2023 (Persen).....	III - 19
Tabel III.4.	Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Tanggamus	III - 32
Tabel III.5.	Capaian dan Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	III - 36
Tabel III.6.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III - 53
Tabel III.7.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III - 77
Tabel III.8.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III - 109
Tabel III.9.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2024.....	III - 121
Tabel IV.1.	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.....	IV - 9
Tabel IV.2.	Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023.....	IV - 25
Tabel IV.3.	Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	IV - 26
Tabel IV.4.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus.....	IV - 26
Tabel IV.5.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung.....	IV - 42
Tabel IV.6.	Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	IV - 50
Tabel V.1.	Pemetaan Integrasi Agenda Politik Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018-2023.....	V - 7

		Halaman
Tabel V.2.	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Skpd Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana Apbd Kabupaten Tanggamus.....	V - 10
Tabel V.3.	Rekapitulasi Belanja Daerah Setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023	V - 160
Tabel V.4.	Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SPM Tahun 2023	V - 164
Tabel V.5.	Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SDGs Tahun 2023	V - 170
Tabel VI.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	VI - 6
Tabel VI.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	VI - 9
Tabel VI.3.	Sinergisitas Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	VI - 18
Tabel VI.4.	Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021	VI - 35

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya, lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Melalui perencanaan yang dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat

memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, serta dinamika lingkungan global yang terjadi diantaranya pasca pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu RKPD Tahun 2023 juga menerapkan peraturan perundangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang dijabarkan melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dalamm Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Tahun 2023 menjadi tahun kelima dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2023. Rencana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD merupakan dokumen yang menerjemahkan dan menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan dalam RPJMD dalam program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahun kelima dalam periode jangka menengah tahun 2018-2023, RKPD Tahun 2023 diupayakan agar mampu mencapai target pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam RKPD Tahun 2023, diatur tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023.

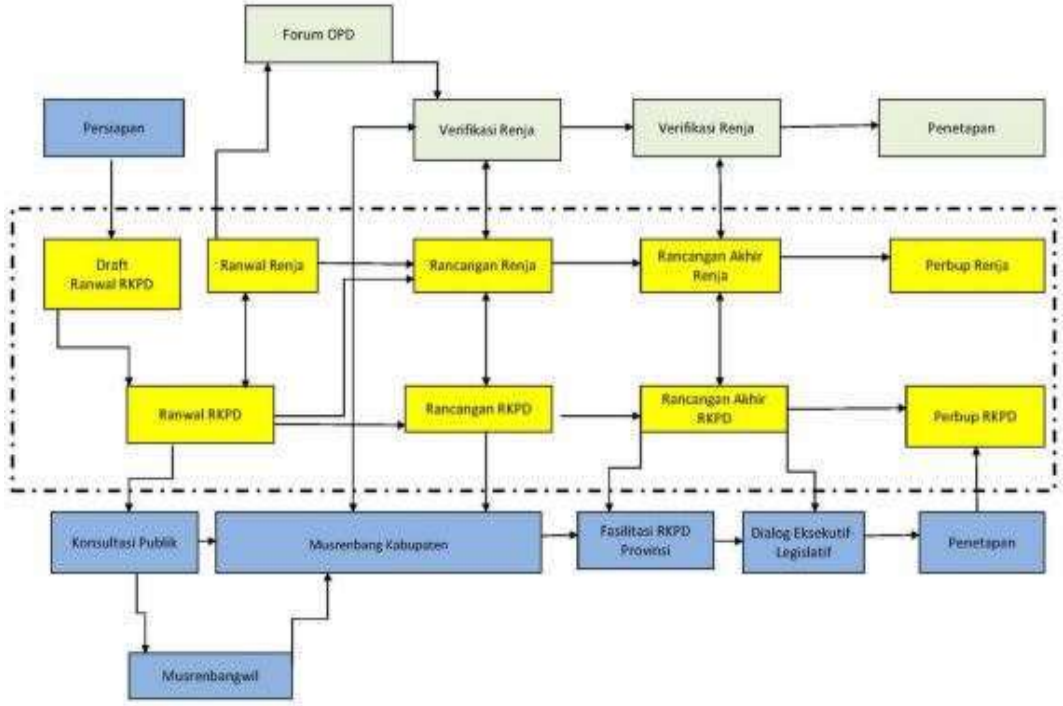
Penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dilakukan dengan menerapkan pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*, serta dilakukan dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari pekon/kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Perumusan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 mengakomodir program prioritas bupati dan wakil bupati terpilih, perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum tahapan dan proses penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan RKPD antara lain pembentukan tim penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data serta informasi;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD antara lain pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis kondisi perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021, telaah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan permasalahan pembangunan daerah, perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta pagu indikatif, perumusan program prioritas dan pagu indikatif, penyajian dan sosialisasi Rancangan RKPD;

3. Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD;
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang RKPD; dan
6. Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Gambar 1.I Proses Penyusunan RKPD Tahun 2023



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

a) Persiapan Penyusunan RKPD

Tahapan persiapan penyusunan Rancangan RKPD meliputi pembentukan Tim Penyusun Rancangan RKPD, orientasi mengenai Rancangan RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b) Pembentukan Tim Penyusunan RKPD;

Tim Penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/41/08/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.

c) Orientasi Mengenai RKPD;

Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya utamanya RPJMD, teknis penyusunan dokumen RKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun RKPD.

d) Penyusunan Agenda Kerja;

Jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD sangat ketat dan padat, untuk itu perlu disusun agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Agenda kerja tersebut dapat dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.

e) Pengumpulan Data dan Informasi;

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen Rancangan RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

f) Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perumusan Rancangan Awal RKPD merupakan dari seluruh proses penyusunan Rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun Rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada proses penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tahapan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi Rancangan, melalui Arahan Bupati Tanggamus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Arahan Bupati Tanggamus kepada Perangkat Daerah. Arahan Bupati Tanggamus tersebut selanjutnya menjadi bahan Rancangan Awal (Rancangan Teknokratis) RKPD yang kemudian dikonsultasikan dengan publik melalui Forum Konsultasi Publik.

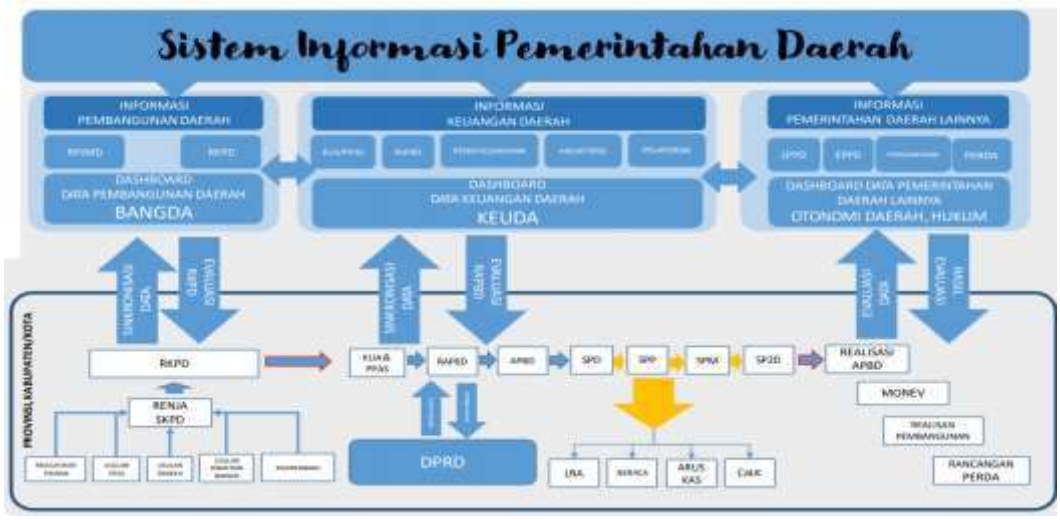
g) Penyusunan Rancangan RKPD

Tahapan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Tanggamus mencakup kegiatan-kegiatan seperti evaluasi Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal RKPD tahun rencana; verifikasi dan integrasi Rancangan Renja-PD; dan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD.

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, serta Rancangan program/kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Penyusunan Rancangan RKPD di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dengan menggunakan *e-planning* yang diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi antara perencanaan dengan penganggaran. SIPD merupakan sistem informasi pembangunan yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan sistem ini maka dokumen perencanaan mulai dari Musrenbang Tingkat Pekon/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Renja-PD, RKPD, RPJMD, KUA-PPAS dan APBD telah terintegrasi, sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan tetap *on the track* dan mempermudah dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Gambar I.2.Konsep Integrasi Sistem Informasi Pemerinatahan Daerah



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

h) Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Pekon/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

1) Musrenbang Pekon/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 4 – 28 Januari 2022 di 299 Pekon dan 3 Kelurahan se-Kabupaten Tanggamus.
2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 3 – 17 Februari 2022 di 20 Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus.
3) Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 di Aula Serumpun Padi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
4) Forum Gabungan Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 7 – 10 Maret 2022 di Aula Hotel 21 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
5) Musrenbang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2022 di Gedung Olahraga Gelora Tanggamus.

Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk :

1) Mensinkronisasikan prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari hasil musrenbang Pekon/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, dan Forum Gabungan Perangkat Daerah dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
2) Merumuskan dan memformulasikan isu-isu dan permasalahan pokok pembanguanan yang berkembang dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
3) Mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Tanggamus;
4) Menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
5) Merumuskan dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang bersinergi dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional.

i) Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD mencakup kegiatan-kegiatan antara lain evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP; sinkronisasi musrenbang RKPD; dan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD. Dengan demikian, diharapkan apa yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanggamus memenuhi tujuan sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung.

j) Penetapan RKPD

RKPD Kabupaten Tanggamus ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Lampung ditetapkan atau paling lambat minggu pertama bulan Juli yang selanjutnya dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja-PD Kabupaten Tanggamus.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 ten tang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15) Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

16) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
20) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

27) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pem bangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tam bahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
28) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);
29) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 27);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 55);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 97);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
c) Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
d) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
e) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 di atas, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut mengatur perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi :

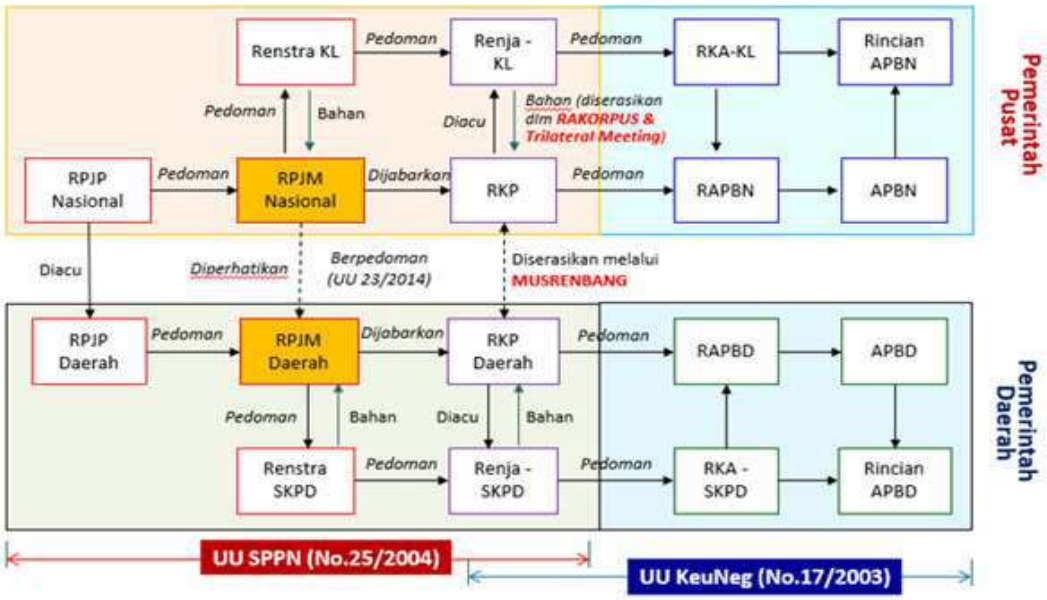
a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku 20 (dua puluh) tahun;
b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 5 (lima) tahun;
c) Rencana Strategis (Renstra) PD yang berlaku 5 (lima) tahun untuk PD;
d) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun; dan
e) Rencana Kerja (Renja) PD yang berlaku 1 (satu) tahun untuk PD.

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut harus disinkronkan dan diselaraskan sehingga dapat terwujud sinergitas, keterkaitan, konsistensi, dan keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping keterpaduan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut perencanaan pembangunan juga harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan kebijakan penanganan pandemik *corona virus disease 2019* di daerah dengan berpedoman pada RKP Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi serta memuat Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Gambar I.3. Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan Perangkat Daerah



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Dari segi kerangka waktu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 104 penyusunan dokumen RKPD Kabupaten harus diselesaikan dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, sedangkan RKPD Provinsi ditetapkan setelah RKP ditetapkan. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 Pasal 5 menyatakan bahwa dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 maka RKPD provinsi ditetapkan paling lambat 30 Juni tahun 2022, selanjutnya RKPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2022, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja-PD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

1.3.2 Hubungan RKPD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 saat ini direvisi melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019. Pada Peraturan Daerah tersebut tercantum Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus, yaitu:

1) Kawasan Strategis Ekonomi yaitu Kawasan Agropolitan Gisting di Kecamatan Gisting;
2) Kawasan Strategis Lingkungan Hidup meliputi :
   a. Kawasan Waduk Batu Tegi di Kecamatan Air Naningan; dan
   b. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kecamatan Pematang Sawa dan Semaka.

Pola ruang Provinsi Lampung yang terkait dengan Kabupaten Tanggamus meliputi :

1) Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, Kabupaten Tanggamus banyak terkait dengan keberadaan Hutan Lindung, Kawasan rawan

bencana terutama daerah rawan longsor, Kawasan perlindungan setempat terutama daerah *Catchment Area* Bendungan Batutegi.

2) Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, terutama di Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.
3) Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya, antara lain arahan rencana Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri.

1.3.3 Hubungan RKPD Kabupaten Tanggamus dengan RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011, didalam peraturan tersebut telah ditetapkan bahwa rencana sistem pusat kegiatan terdiri atas:

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di perkotaan Kota Agung, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, perikanan dan minapolitan, dan industri.
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di perkotaan Wonosobo, yang berfungsi sebagai Pertanian, Perdagangan dan Jasa, Kehutanan dan Minapolitan.
3) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
   a. Perkotaan Talang Padang, yang befungsi sebagai Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Pendukung Kegiatan Pertanian; dan
   b. Perkotaan Gisting, yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan Jasa dan Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian.
4) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
   a. Perkotaan Srikuncoro (Semaka), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Lindung;
   b. Perkotaan Putih Doh (Cukuh Balak), yang berfungsi sebagai Permukiman, Perdagangan dan Jasa, dan Pertanian; dan
   c. Tekad Kecamatan Pulau Panggung yang berfungsi Perdagangan.
5) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Ngarib Kecamatan Ulu Belu, Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Sukamara Kecamatan Bulok, Kuripan Kecamatan Limau, Napal Kecamatan Kelumbayan, dan Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, RKPD disusun dengan maksud untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengangggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD, dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Tanggamus. Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappelitbang dengan seluruh *stakeholders* terkait.

Dengan filosofi fungsi dokumen RKPD, agar lebih operasional dalam penyusunan RAPBD, maka RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang diacu dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan dokumen Rancangan RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang memuat prioritas pembangunan, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya disusun dengan tujuan :

1) Mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanggamus yang sejalan, selaras, seimbang dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah;
2) Memberikan arah bagi seluruh *stakeholders* pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2023;
3) Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
4) Memberikan arah dan pedoman kepada semua Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menyusun rencana kerja dan menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
5) Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
6) Memudahkan jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional tahun 2023;
7) Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPKD

RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra-PD, Renja-PD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diuraikan kedalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing PD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis sub bab sebelumnya yaitu isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah, berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Memberikan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Mengemukakan menangani penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak dal memfungsikan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD merupakan kebijakan program kegiatan daerah yang berkelanjutan tiap tahunnya sehingga hasil evaluasi realisasi tahun sebelumnya menjadi landasan yang penting. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Tercapainya sasaran RKPD tahun sebelumnya dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program yang baru, sedangkan target RKPD tahun sebelumnya yang belum tercapai menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk menyempurnakan kebijakan yang baru.

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

Sebelum menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi umum daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

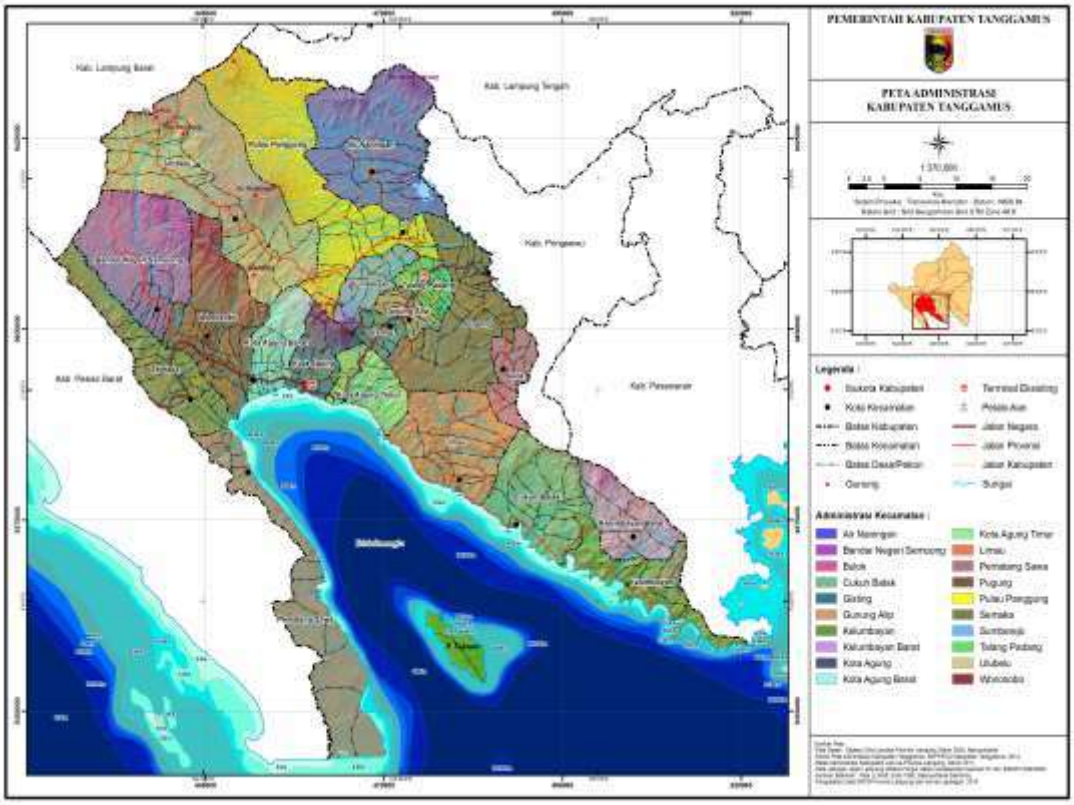
Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus, yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997.

Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.654,96 Km^2 yang terdiri dari daratan 2.855,46 Km^2 dan lautan 1.799,50 Km^2 yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar II.1. Peta Wilayah Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Wilayah Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat

imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemeritahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang disebut Marga yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung, 5 (lima) Marga tersebut adalah :

1) Marga Gunung Alip.
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.
4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.

Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga.

Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung. Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya

merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu :

1) Marga Gunung Alip (Talang Padang).
2) Marga Benawang.
3) Marga Belunguh.
4) Marga Pematang Sawa.
5) Marga Ngarip.
6) Marga Negara Batin.

Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003, kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. H. Fauzan Sya'ie, M.Sc. dan Bambang Kurniawan, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2008 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Sujadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008-2013 hasil Pilkada langsung yang pertama dilakukan di kabupaten ini. Kemudian sesuai hasil Pilkada kedua di Kabupaten Tanggamus tahun 2012, pada tanggal 15 Februari 2013 dilantik H. Bambang Kurniawan, S.T. dan H. Samsul Hadi, S.Pd.I sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2013-2018.

Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2017, Gubernur Lampung secara resmi melantik H. Samsul Hadi, M.Pd.I sebagai Bupati Tanggamus defenitif sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Bupati Tanggamus Tahun 2013-2018 yaitu pada tanggal 14 Februari 2018. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan maka Sekretaris Daerah Andi Wijaya, S.T., M.M. ditunjuk menjadi Plh. Bupati Tanggamus dari tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2018, selanjutnya Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Lampung Didik Suprayitno melantik Ir. Zainal Abidin, M.T. menjadi Penjabat Bupati Tanggamus sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 21 September 2018.

Berdasarkan hasil Pemilukada Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Juni 2018 maka telah dilantik Kepala Daerah Terpilih Hj. Dewi

Handajani, S.E., M.M. dan Hi. AM. Syafi'i, S.Ag. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 oleh Gubernur Lampung pada tanggal 20 September 2018 dan dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 21 September 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tanggamus.

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan (6) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Gambar II.2. Peta Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2022

Tabel II.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209.63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170.90	3.67
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98.12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76.93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185.29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73.33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101.30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437.21	9.39
9	Ulu Belu	Ngarip	323.08	6.94
10	Air Naningan	Air Naningan	186.35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45.13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56.77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalom	32.53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25.68	0.55
15	Pugung	Rantau Tijang	232.40	4.99

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km²)	% TERHADAP LUAS KABUPATEN
16	Bulok	Sukamara	51.68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	133.76	2.87
18	Kelumbayan	Napal	121.09	2.60
19	Limau	Kuripan	240.61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	53.67	1.15
		LUAS DARATAN	**2,855.46**	
		LUAS LAUTAN	**1,799.50**	
		LUAS KABUPATEN TANGGAMUS	**4,654.96**	

Sumber : Tanggamus Dalam Angka, 2022

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104⁰18' BT – 105⁰12' BT dan 5⁰05' LS – 5⁰56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yangmerupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan.

Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan sekunder, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering/semak, semak belukar, tambak dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 62%.

Sedangkan jenis tutupan lahan sawah memiliki prosentase 5% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan tambak sebesar 1%. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

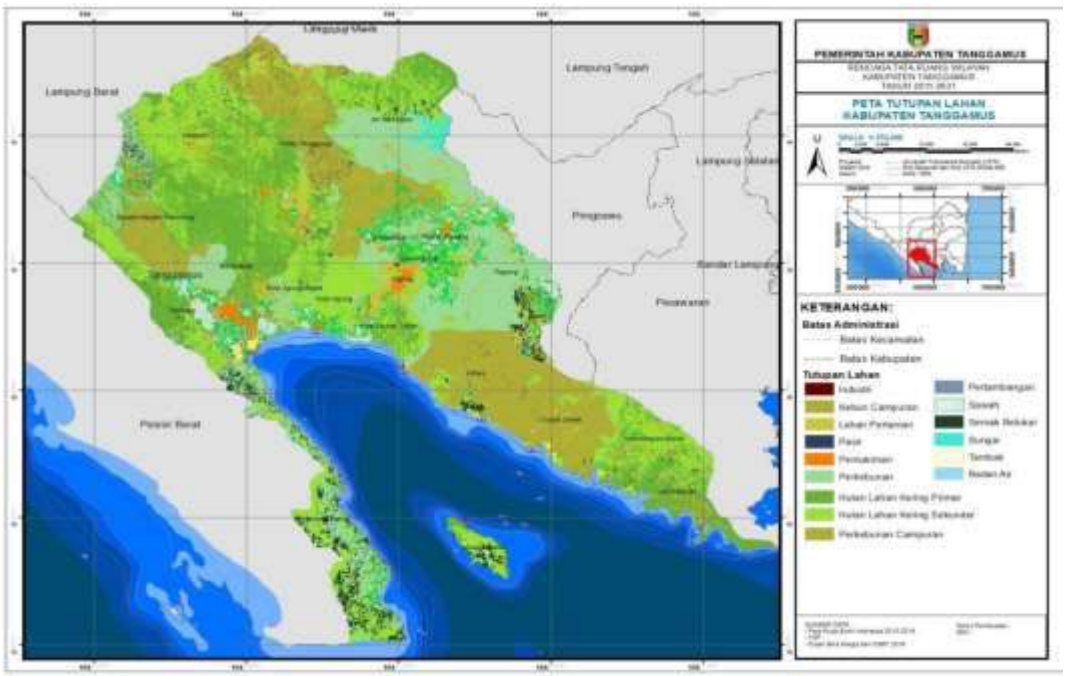
Tabel II.2. Penutupan Lahan Tahun 2021 Di Kabupaten Tanggamus

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
1	Hutan lahan kering primer	287,17
2	Hutan lahan kering sekunder	28.331,60
3	Hutan mangrove sekunder	69,00
4	Perkebunan	485,48

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)
5	Pemukiman	8.541,77
6	Pertambangan	71,74
7	Pertambangan	3.267,16
8	Pertanian lahan kering campur semak	226.626,97
9	Sawah	16.584,13
10	Semak belukar	6.783,44
11	Semak belukar rawa	140,28
12	Tambak	402,25
13	Tanah terbuka	206,15
14	Tubuh air	1.067,43
	Total Luas (Ha)	**292.864,58**

Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2022

Gambar II.3. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, 2021

2.1.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter diatas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan

kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

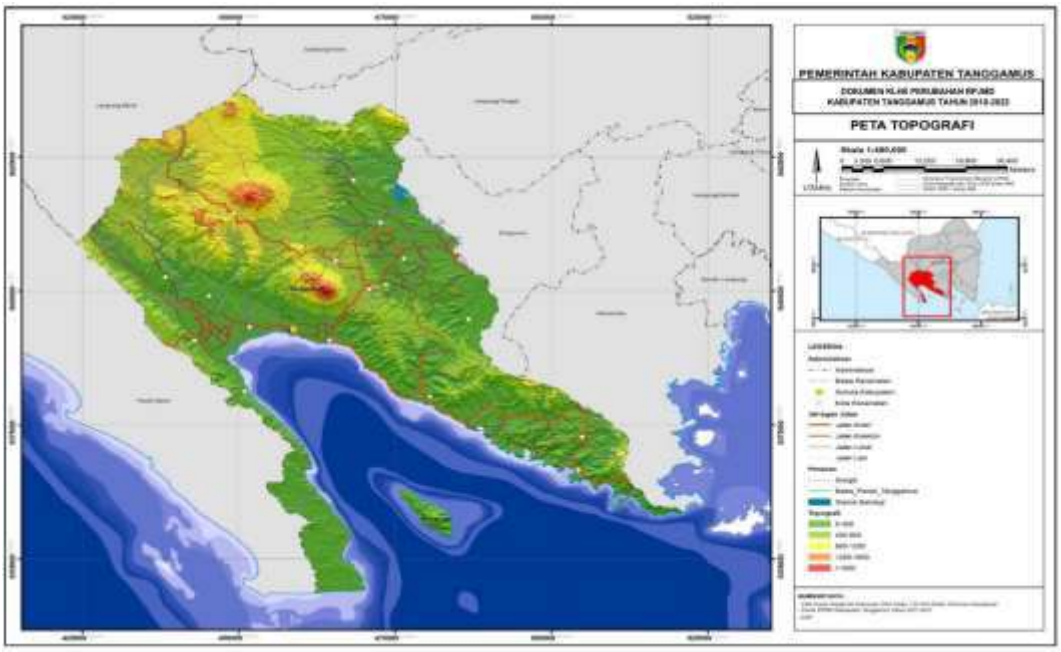
Tabel II.3. Kemiringan Lereng Yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untukperkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%.

Gambar II.4. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus



Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1..4. Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwarter berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwarter tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Panggung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

1) Klasifikasi menurut USDA (United States Dept. of Agriculture)
2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT)
3) Versi unit lahan menurut Repport

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.
5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1) Biji Besi

   Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.

2) Mangan

   Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral purolusit dengan kadar Mn anatara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.

3) Emas

Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semong.

4) Galena

Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.

5) Pasir Besi

Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6) Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Naningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7) Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m^3), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m^3) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m^3).

8) Andesit

Batu Andesit diKabupaten Tanggamus tersebar merata dibeberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Naningan (sumber daya tereka 2.000.000 m3), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m3), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m3), Pekon

Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m3), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m3), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m3), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m3), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m3), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m3), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m3).

9) Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m3) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m3).

10) Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m^3

11) Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12) Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13) Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di temui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14) Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m^3 dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15) Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m^3

16) Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m3) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17) Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

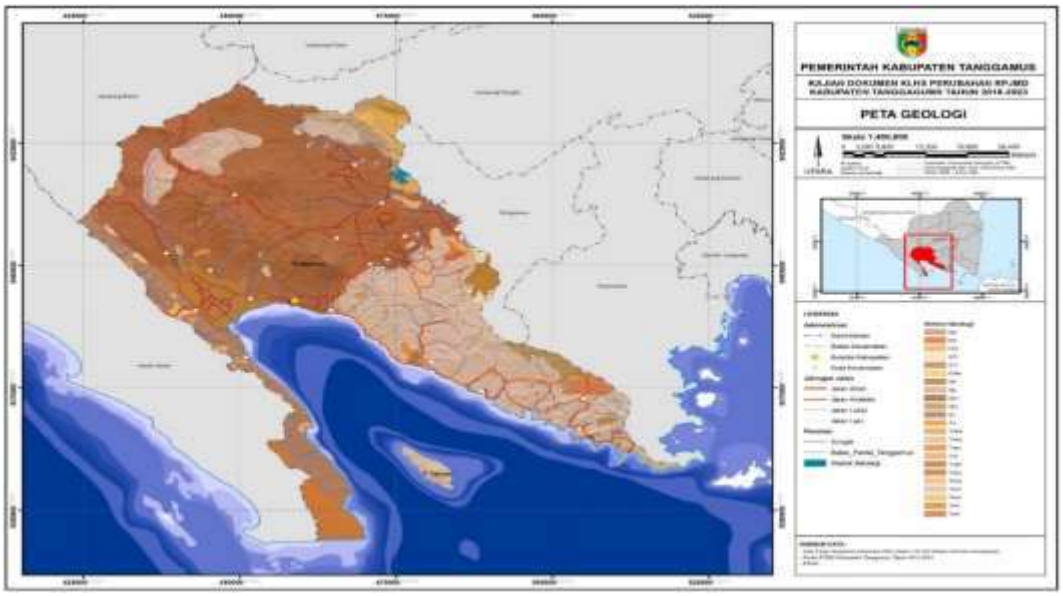
18) Marmer

Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m3) dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m3).

19) Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar II.5. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus



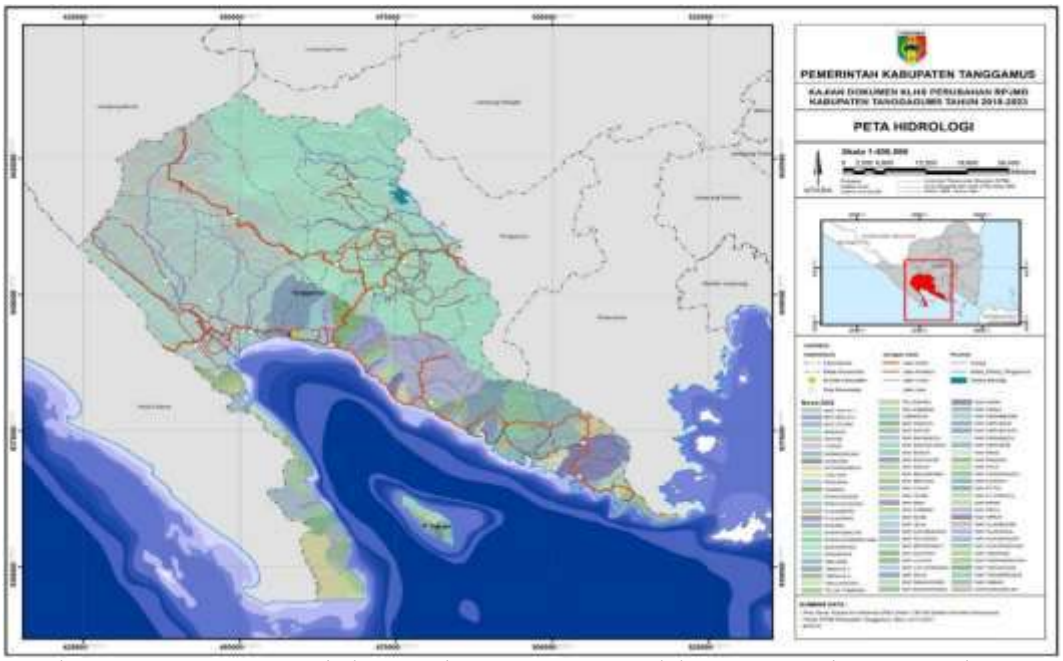
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993

2.1.1..5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang manjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk adalah sungai Way Sekampung termasuk daerah-daerah aliran sungainya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 Km^2, yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengedalian banjir dan pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung adalah 479.252 Km^2.

Gambar II.6. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus



Sumber : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2022

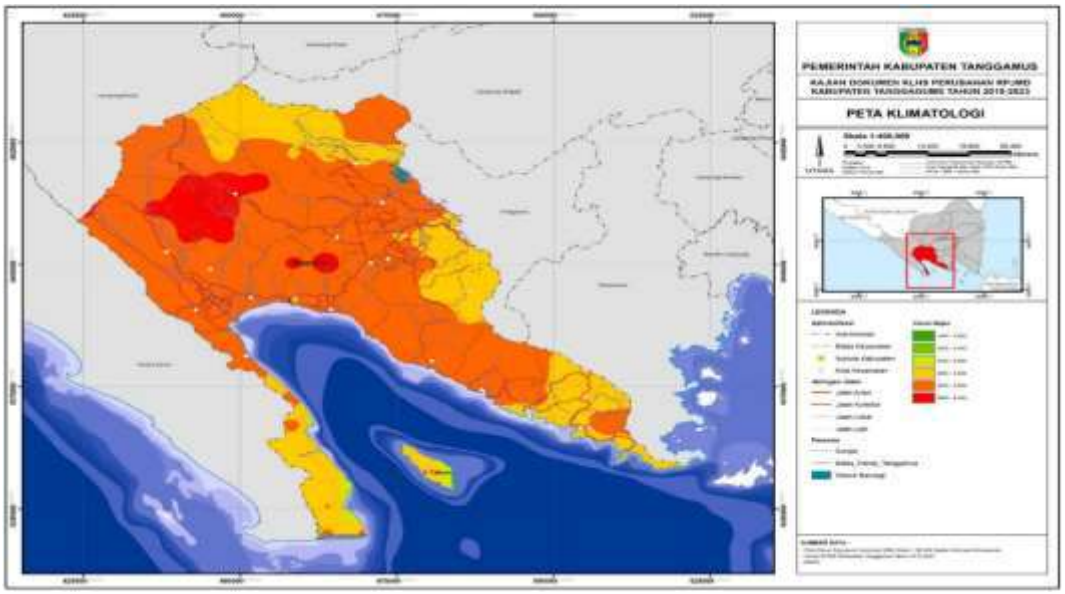
2.1.1..6. Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 ^{o}C (Derajat Celcius) sampai 30 ^{o}C pada ketinggian 20 - 60 m diatas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 ^{o}C.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu 80 % - 88 %. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun.

Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B – 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar II.7. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Tangggamus, 2022

2.1.1..7. Penggunaan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitasnya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan dan sumberdaya air ini akan menentukkan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Penetapan daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengkonversi lahan-lahan yang tidak termasuk dalam kategori kawasan lindung dan sawah beririgasi teknis.
Didasarkan pada kondisi dan analisa potensi lahan serta bangunan maka daya tampung lahan di Kabupaten Tanggamus sampai dengan Tahun 2031 masih tercukupi. Luas daya tampung lahan untuk perkembangan wilayah di masa yang akan datang adalah 115.360 Ha atau 40%. Untuk lebih jelasnya ketersediaan dan daya tampung lahan Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4. Daya Tampung Lahan Di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMUKIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
1	Wonosobo	20.963	218	3.183	11.295	6.267	5,4
2	Semaka	17.090	220	2.420	1.505	12.945	11,2
3	B. Negeri Semuong	9.812	113	-	-	9.699	8,4
4	Kota Agung	7.693	238	1.465	-	5.990	5,2
5	Pematang Sawa	18.529	110	1.298	-	17.121	14,8
6	Kota Agung Timur	7.333	116	3.358	2.013	1.846	1,6
7	Kota Agung Barat	10.130	115	2.917	3.765	3.333	2,9
8	Pulau Panggung	43.721	184	2.404	38.211	2.077	1,8
9	Air Naningan	32.308	162	-	29.562	2.584	2,2
10	Ulu Belu	18.635	229	1.200	15.203	2.003	1,7
11	Talang Padang	4.513	270	2.000	2.013	230	0,2

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)	PERMUKIMAN	SAWAH	HUTAN	DAYA TAMPUNG LAHAN	%
12	Sumberejo	5.677	188	1.388	-	4.101	3,6
13	Gisting	3.253	211	793	-	2.249	1,9
14	Gunung Alip	2.568	116	2.100	-	352	0,3
15	Pugung	23.240	336	3.544	15.156	4.204	3,6
16	Bulok	5.168	125	-	-	5.043	4,4
17	Cukuh Balak	13.376	142	1.425	11.546	263	0,2
18	Kelumbayan	12.108,6	70	1.223	4.054	6.762	5,9
19	Limau	24.061	122	953	-	22.986	19,9
20	Kelumbayan Barat	5.367,40	62	-	-	5.306	4,6
	JUMLAH	**285.546**	**3.347**	**31.671**	**134.324**	**116.204**	**100**

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

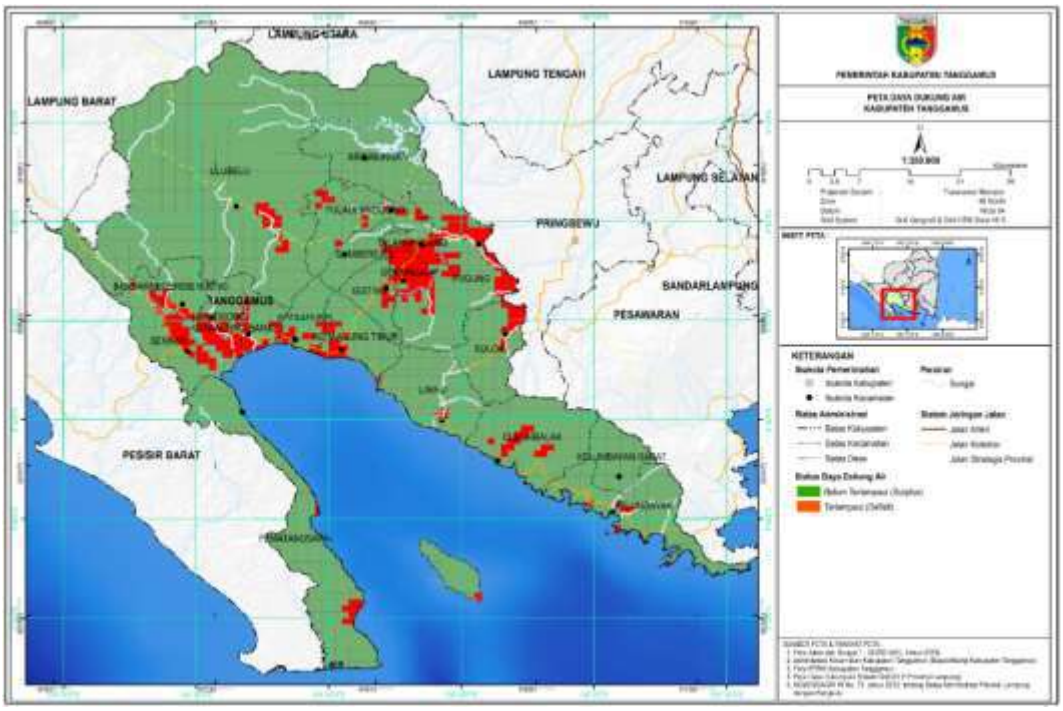
Berdasarkan hasil analisa, kebutuhan pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus sampai dengan tahun 2031 adalah untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung sebesar 30% dari luas wilayah menjadi prioritas dalam pengalokasiannya. Untuk kawasan budidaya terdiri atas kebutuhan pengembangan perumahan seluas 5.185 Ha dan pengembangan prasarana dan sarana seluas 3.486 Ha.

Tabel II.5. Alokasi Kebutuhan Lahan Tahun 2031

NO	JENIS KEGIATAN	KEBUTUHAN LAHAN (Ha)	KETERANGAN
I	Daya Tampung	116.204	
II	Kebutuhan Pengembangan		
1	Kawasan Lindung	85.664	Dari luas wilayah 30%
2	Kawasan Budidaya		
	- *Perumahan*	5.185	
	- *Prasarana*	2.324	Dari luas perumahan 30%
	- *Sarana*	1.162	Dari luas perumahan 20%
III	Jumlah (1+2)	94.335	
IV	Cadangan (I – (1+2))	21.869	

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Gambar II.8. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus, 2021

2.1.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunat Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
   a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan

Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tijang - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi

b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi;

Tabel II.6. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	**196,528**			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	• Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri
2	Wonosobo	PKL	• Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan
3	Talang Padang	PKLp	• Perdagangan dan Jasa • Pertanian • Pendukung Kegiatan Pertanian
4	Gisting	PKLp	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian
5	Sri Kuncoro Kecamatan Semaka	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Kawasan Lindung
6	Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
7	Pulau Panggung	PPK	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
8	Ngarip Kecamatan Ulu Belu	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
9	Margoyoso Kecamatan Sumberejo	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
10	Sukamara Kecamatan Bulok	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
11	Kuripan Kecamatan Limau	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
12	Napal Kecamatan Kelumbayan	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
13	Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat	PPL	• Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Wilayah perdesaan sebagai *hinterland* kawasan perkotaan dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan

Lokal (PPL). Untuk kebutuhan yang lebih besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Tanggamus.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

- **Kawasan Hutan Rakyat**

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Hamerupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

- **Kawasan Peruntukan Pertanian**

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Penruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut dan saat ini sedang dilakukan updating dengan cara pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang .

Tabel II.8. Luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	2.471	
2	Bandar Negeri Semuong	785	
3	Wonosobo	1.244	
4	Kota Agung Barat	1.165	
5	Kota Agung	519	
6	Kota Agung Timur	1.390	
7	Gisting	399	
8	Gunung Alip	1.095	
9	Talang Padang	926	

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
10	Sumberejo	685	
11	Pulau Panggung	1.105	
12	Air Naningan	305	
13	Limau	365	
14	Cukuh Balak	720	
15	Bulok	1.271	
16	Kelumbayan	510	
17	Kelumbayan Barat	335	
18	Ulu Belu	475	
19	Pematang Sawa	1.072	
20	Pugung	1.853	
	Jumlah	**18.690**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luas PLP2B, ditetapkan luas lahan cadangan PLP2B seluas 4.390 Ha.

Tabel II.9. Luas Lahan Cadangan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(PLP2B)Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	583	
2	Bandar Negeri Semuong	165	
3	Wonosobo	340	
4	Kota Agung Barat	250	
5	Kota Agung	250	
6	Kota Agung Timur	500	
7	Gisting	100	
8	Gunung Alip	235	
9	Talang Padang	230	
10	Sumberejo	148	
11	Pulau Panggung	275	
12	Air Naningan	56	
13	Limau	28	
14	Cukuh Balak	127	
15	Bulok	274	
16	Kelumbayan	127	
17	Kelumbayan Barat	70	
18	Ulu Belu	108	
19	Pematang Sawa	96	

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
20	Pugung	428	
	Jumlah	**4.390**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2021

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 686/SK-PG-03.03/XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, maka sesuai data informasi geospasial lahan baku sawah Kabupaten Tanggamus seluas 16.842,67 Ha dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II.10. Luas Baku Sawah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Semaka	1,992.7	
2	Bandar Negeri Semuong	638.7	
3	Wonosobo	1,804.0	
4	Kota Agung Barat	802.5	
5	Kota Agung	491.0	
6	Kota Agung Timur	833.2	
7	Gisting	509.8	
8	Gunung Alip	1,149.5	
9	Talang Padang	980.2	
10	Sumberejo	735.2	
11	Pulau Panggung	1,033.5	
12	Air Naningan	241.7	
13	Limau	194.7	
14	Cukuh Balak	671.2	
15	Bulok	804.1	
16	Kelumbayan	453.8	
17	Kelumbayan Barat	307.3	
18	Ulu Belu	1,001.8	
19	Pematang Sawa	415.4	
20	Pugung	1,782.2	
	Jumlah	**16,842.4**	

Sumber : Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional, 2021

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
   Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Hortikultura
   Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan
   Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lannnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan.
   Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan
   Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

e) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan
   Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu

ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Panggung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah, bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

- **Kawasan Peruntukan Perikanan**

Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap menurut subsektor tahun 2021 yaitu perikanan laut (5.704 rumah tangga), terdapat peningkatan daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 5.698 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung (1.389 rumah tangga). Sedangkan perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus terdiri dari perikanan budidaya tambak (202 rumah tangga), dan kolam (2.603 rumah tangga). Produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 202 di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 32.036,45 ton ton, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi perikanan sebesar 32.671,84 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak, dan kolam terdapat di Kecamatan Pugung. Jumlah perahu di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor (135 perahu), perahu motor temple (1.415 perahu) dan kapal motor (291 perahu).

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembung, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan Talang Padang yang didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

- **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral
   Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencanadi Kabupaten Tanggamus.
b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara
   Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Naningan.
c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi
   Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel II.11. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Naningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2022

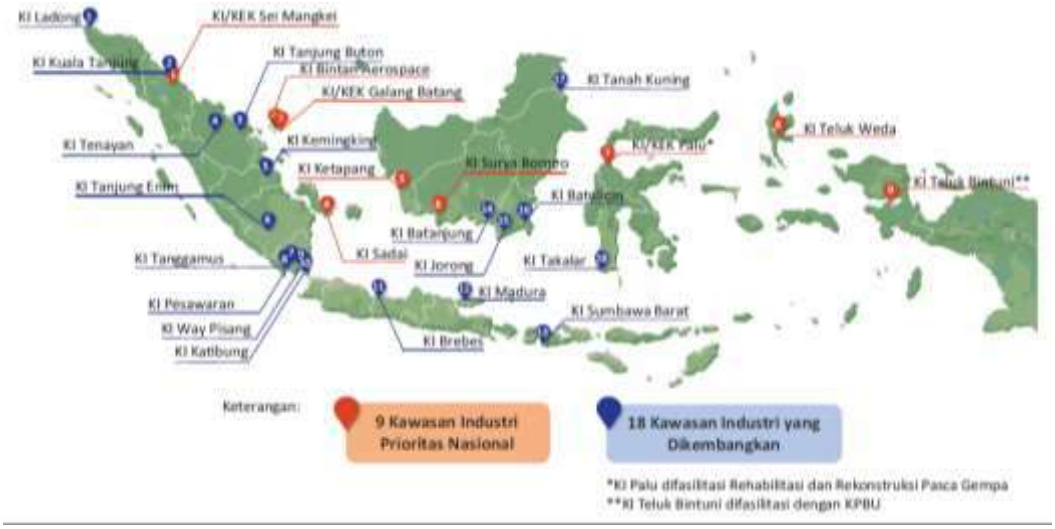
- **Kawasan Peruntukan Industri**

Industri di Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Industir Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa jenis, yaitu industri pangan, kerajinan umum, kimia bahan bangunan, jasa, logam dan industry pengolahan lainnya. Nilai investasi paling besar terserap pada kegiatan konveksi dengan tingginya nilai investai tersebut tentunya diharapkan sektor industri tersebut dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Untuk kedepannya perlu pemantauan terhadap sektor-sektor industri yang memiliki nilai investasi paling tinggi, sehingga kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh sektor industri dapat terus berjalan dengan baik.

Industri pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah 841 industri, mulai dari industri perkebunan, hingga kehutanan. Jenis industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus adalah industri pengolahan kebutuhan pokok, dan sisanya adalah industri kehutanan yang berkaitan dengan kebutuhan peralatanrumah tangga. Industri yang banyak dilakukan di Kabupaten Tanggamus adalah industri anyaman bambu dengan jumlah 598 unit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 27 Kawasan Industri yang ada dibagi menjadi 9 Kawasan Industri Prioritas Nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan, pada Pulau Sumatera terdapat 10 KI dan 4 KEK, dimana Kawasan Industri Tanggamus (KIT) menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.

Gambar II.9. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI, 2021

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIM atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertanahan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

a) Kawasan peruntukan industri besar, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.
b) Kawasan peruntukan industri sedang, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
c) Kawasan peruntukan industri kecil, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

➢ **Kawasan Peruntukan Pariwisata**

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umunya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel II.12. Obyek Wisata Bahari Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
		Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.13. Obyek Wisata Alam Buatan Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Naningan
2	Dam Margo Tirto	Lands Baw Kec Gisting

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.14. Obyek Wisata Tirta Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Naningan

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kecamatan Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Naningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec.Air Naningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.15. Obyek Wisata Alam Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Ke. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu
12	Pulau Tanjungan	Air Naningan Kec. Air Naningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Naningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Naningan

Sumber :Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.16. Obyek Wisata Kolam Renang Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	VIP	Gisting Bawah Kec. Gisting
5	Villa Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec.Kota Agung

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.17. Obyek Wisata Budaya Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalom	Karangbrak	Pematang Sawa

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.18. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah Kabupaten Tanggamus

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

- **Kawasan Peruntukan Permukiman**

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman perdesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan pemukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

- **Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya**

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor

informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan

pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang.

Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah "Terwujudnya Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat"

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi
Rencana ruang dalam bumi meliputi :

- Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/ eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;

- Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
- Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

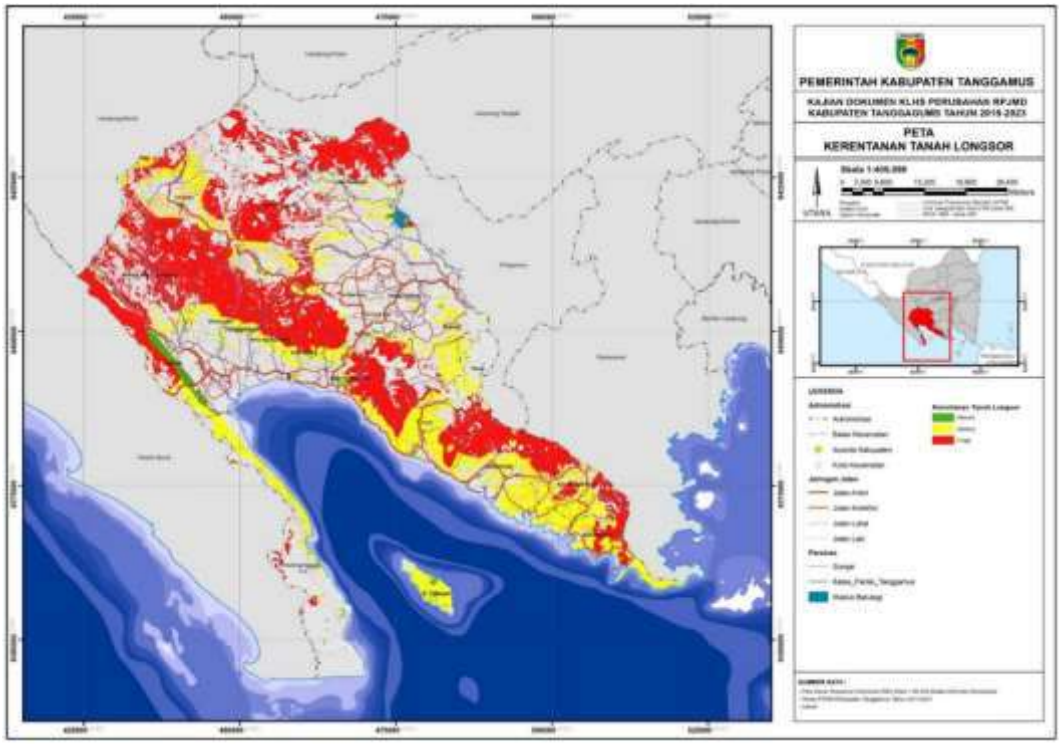
2.1.1..1. Wilayah Rawan Bencana

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar. Dibawah ini adalah jenis bencana alam dan perkiraan daerah yang terkena dampak bencana tersebut.

a) Bencana Longsor dan Pergerakan Tanah

Merupakan pepindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, dan atau material lain yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Umumnya longsor yang terjadi adalah longsor bahan rombakan (*debrisavalanches*) dan nendatan (*slumps/rotational slides*). Topogafi alam Kabupaten Tanggamus lebih banyak berkarakter pegunungan dan perbukitan dengan struktur tanah yang rata-rata labil, dan hal ini membawa konsekuensi bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki banyak daerah rawan bencana pergerakan tanah.Kecamatan yang memiliki daerah rawan bencana longsor/pergerakan tanah antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, Ulu Belu, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Bulok, dan Air Naningan, Gisting

Gambar II.10. Peta Kerentanan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus

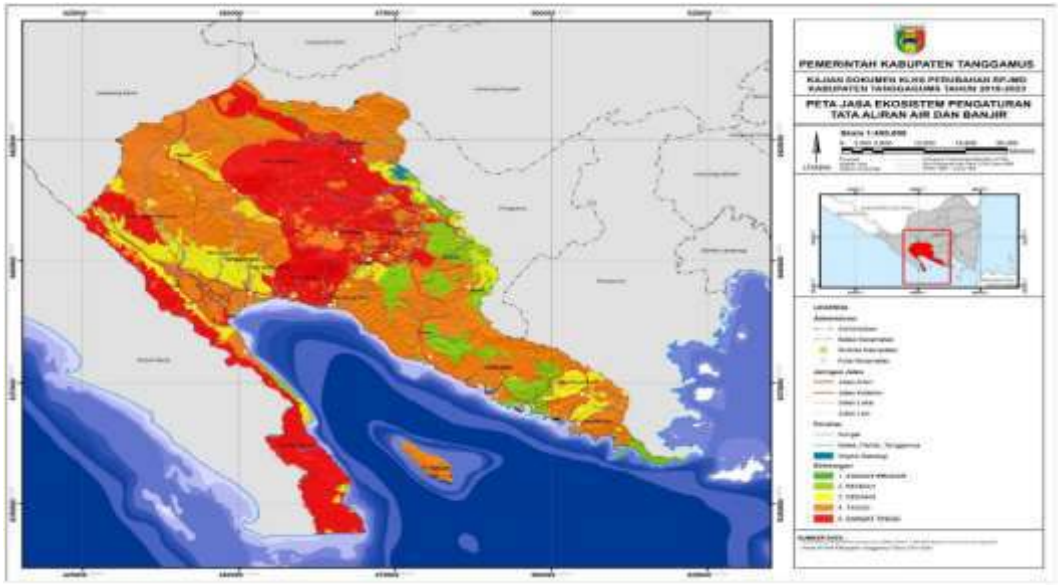


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

b) Bencana Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun makin meningkat, baik luasan areal terdampaknya maupun frekuensi terjadinya. Beberapa penyebab terjadinya peningkatan tersebut antaralain adalah maraknya alih fungsi lahan, berkurangnya luasan ruang terbuka hijau, perilaku tidak tertib masyarakat akibat rendahnya kesadaran masyarakat, pesatnya pembangunan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, dan sebagainya. Daerah potensial banjir di Kabupaten Tanggamus antara lain adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo,Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau, untuk Tahun 2018 yang sering terjadi banjir yaitu di daerah Semaka danBandar Negeri Semuong yang mengakibatkan putusnya jalan Nasional.

Gambar II.11. Peta Tata Aliran Air dan Banjir di Kabupaten Tanggamus

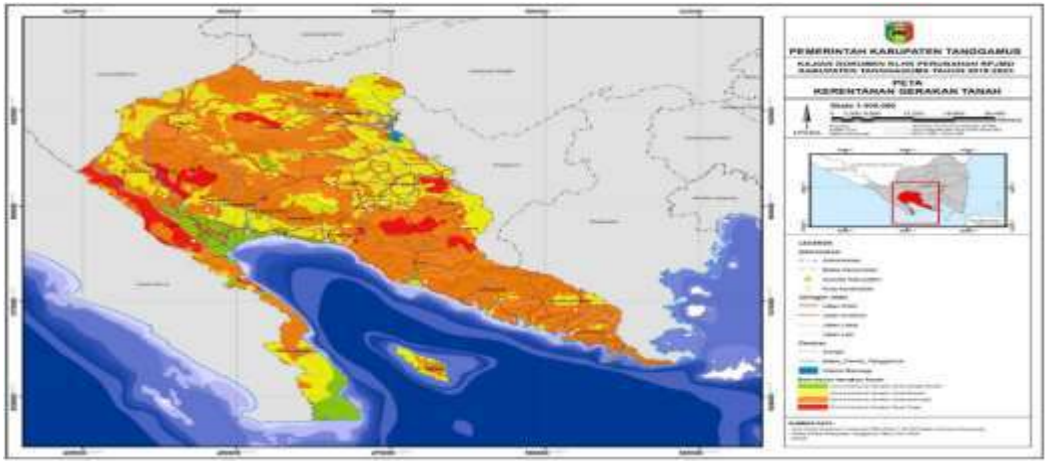


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

c) Gempa Bumi

Gempa bumi disebabkan oleh baik aktivitas kegunung apian (*vulkanik*) maupun akibat dari tumbukan beberapa lempeng bumi, ataupun reruntuhan batuan(*tektonik*). Kabupaten Tanggamus juga tidak luput dari kerawanan gempa bumi karena dilewati oleh patahan/sesar Semangko. Beberapa kecamatan yang terlewati oleh sesar ini adalah Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Semaka, Wonosobo, Pematang Sawa, dan Kota Agung Barat. Daerah lain yang juga potensial akan terjadinya bencana gempa bumi adalah Ulu Belu, Kota Agung Barat, Kota Agung, Limau, Cukuh Balak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan.

Gambar II.12. Peta Kerentanan Gerakan Tanah di Kabupaten Tanggamus

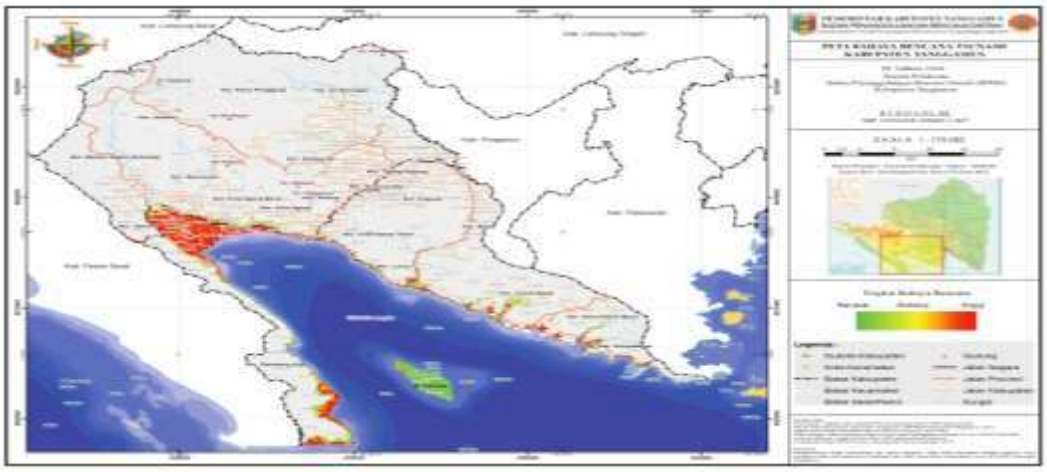


Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

d) Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang air laut dengan periode panjang yang menghantam daratan dan disebabkan adanya gangguan impulsif. Gangguan impulsif ini sendiri dipicu oleh beberapa sebab antara lain seperti gempa bumi dasar laut, dan erupsi vulkanik/gunung meletus, longsoran dan hantaman material dengan volume besar ke laut. Tsunami besar yang pernah menghantam daerah pesisir Kabupaten Tanggamus adalah ketika terjadi letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Beberapa daerah yang rawan terjadi bencana tsunami adalah Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Kota Agung Timur, Limau, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

Gambar II.13. Peta Bahaya Bencana Tsunami di Kabupaten Tanggamus



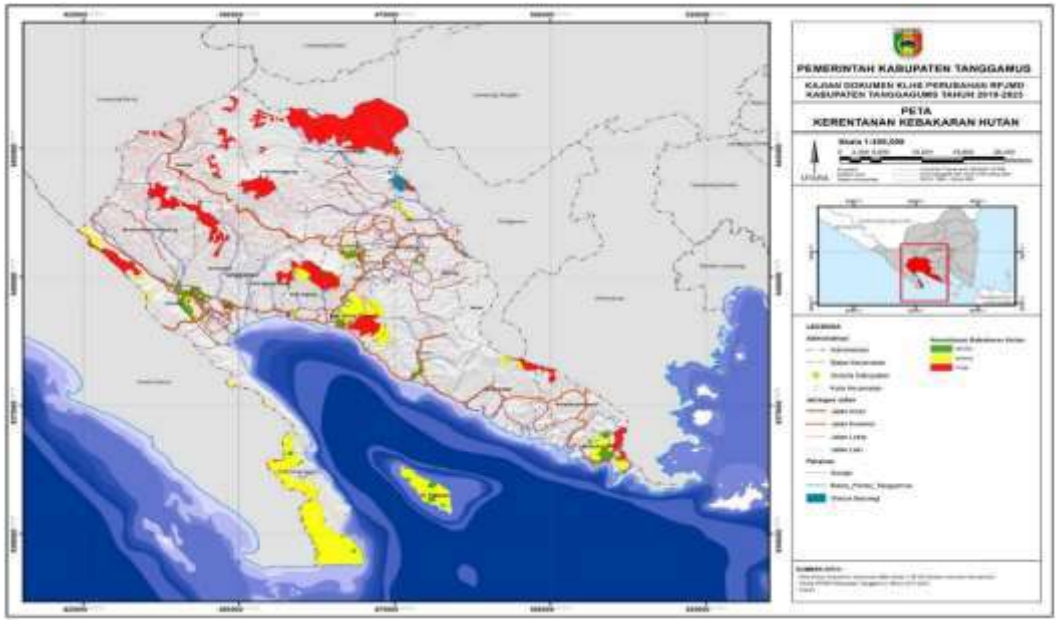
Sumber : BPBD Kabupaten Tanggamus, 2021

e) Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran yang mungkin menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah bencana kebakaran hutan dan bangunan. Untuk kebakaran hutan, potensi pencetus kebakaran paling mungkin disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari lahan kritis/bongkor berisi semak/alang-alang yang berada di sekitar hutan. Untuk bencana kebarakaran bangunan/rumah, daerah yang paling potensial terjadi kebakaran adalah daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dengan pola tata letak bangunan yang rapat. Hal ini bisa terlihat di kecamatan perkotaan seperti Talang Padang, Kota Agung, dan Gisting, juga di kecamatan-kecamatan padat seperti Wonosobo dan Kota Agung Barat.

Berdasarkan Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus diketahui bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan kebakaran hutan lindung dengan kelas resiko 1 yaitu rendah. Kemudian tingkat kerentanan kebakaran terhadap hutan alam dengan kelas resiko 2 yaitu sedang dan hutan bakau dengan kelas resiko 1 yaitu rendah.

Gambar II.14. Peta Kerentanan Kebakaran Lahan dan Hutan di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

f) Bencana Gelombang Tinggi Air Laut

Potensi bencana gelombang tinggi air laut yang terjadi adalah akibat gelombang pasang laut yang menyebabkan beberapa wilayah sekitarnya mengalami gangguan akibat arus pasang laut. Kawasan rawan bencana gelombang pasang laut terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Hanya beberapa kecamatan yang mengalami gelombang pasang laut, yaitu Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka serta Pematang Sawa.

- **Demografi**

Salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya

manusia (SDM). Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

1) Distribusi Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebanyak 645.807 jiwa. Dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah 138 jiwa per km².

Distribusi jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.19 . Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LUAS (Km²)	JUMLAH	KEPADATAN
1	Wonosobo	209.63	41,638	198.63
2	Semaka	170.9	39,839	233.11
3	Bandar Negeri Semuong	98.12	17,431	177.65
4	Kota Agung	76.93	47,554	618.15

NO	KECAMATAN	LUAS (Km²)	JUMLAH	KEPADATAN
5	Pematang Sawa	185.29	17,986	97.07
6	Kota Agung Timur	73.33	21,767	296.84
7	Kota Agung Barat	101.3	23,036	227.40
8	Pulau Panggung	437.21	40,658	92.99
9	Ulu Belu	323.08	44,181	136.75
10	Air Naningan	186.35	31,507	169.07
11	Talang Padang	45.13	53,757	1,191.16
12	Sumberejo	56.77	36,368	640.62
13	Gisting	32.53	43,421	1,334.80
14	Gunung Alip	25.68	22,342	870.02
15	Pugung	232.4	66,758	287.25
16	Bulok	51.68	24,348	471.13
17	Cukuh Balak	133.76	25,061	187.36
18	Kelumbayan	121.09	12,342	101.92
19	Limau	240.61	21,852	90.82
20	Kelumbayan Barat	53.67	13,961	260.13
	JUMLAH	**2,855.46**	**645,807**	**138.74**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022, data diolah.

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Gisting dengan kepadatan 1.334 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan paling rendah adalah Kecamatan Limau dengan kepadatan sebesar 90 jiwa/Km².

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh masyarakat usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia produktif (15-64) pada tahun 2021 yang mencapai 68,31% (441.174 jiwa) dari total jumlah penduduk. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan. Pada tabel berikut menunjukan secara rinci jumlah dan persentase penduduk kelompok umur pada tahun 2021.

Tabel II.20. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

Kelompok Umur *Age Groups*	Jenis Kelamin/*Sex*		
	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	28 323	26 953	55 276
5–9	28 738	27 239	55 977
10–14	26 587	25 419	52 006
15–19	27 404	25 462	52 866
20–24	28 402	26 285	54 687
25–29	27 628	24 985	52 613
30–34	28 689	25 568	54 257
35–39	25 526	22 922	48 448
40–44	24 366	22 141	46 507
45–49	20 916	19 663	40 579
50–54	18 570	17 985	36 555
55–59	15 636	14 723	30 359
60–64	12 562	11 741	24 303
65–69	9 138	8 480	17 618
70–74	5 916	5 854	11 770
75+	5 741	6 245	11 986
Tanggamus	**334 142**	**311 665**	**645 807**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah kota melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifi kan jika pemerintah tidak melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apabila mayoritas penduduk yang berusia produktif memiliki kualitas yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam tata kelola pembangunan, kesejahteraan dan pemerataan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah agar dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi ditangan

segelintir golongan. Hal ini kelak akan turut menimbulkan kestabilan dalam upaya membangun atau menumbuhkan kesejahteraan.

Muara pembangunan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dan stakeholder ditujukan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat dengan pemerataan pembangunan yang adil. Terdapat beberapa indikator utama untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator tersebut secara detail akan menggambarkan aspek kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tanggamus. Berikut gambaran aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestic suatu Negara yang timbul akibat pelbagai aktivitas ekonomi dalam satu periode tertentu. Terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan pada saat ini adalah tahun 2010. PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

Tabel II.21. Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)									
		2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.361,55	44,24	4.465,07	43,13	4.511,11	41,49	4.411,69	41,31	4.315,83	39,50
2	Pertambangan dan Penggalian	702,48	7,13	727,90	7,03	768,75	7,07	787,98	7,38	740,07	6,77
3	Industri Pengolahan	649,41	6,59	681,37	6,58	715,75	6,58	691,05	6,47	723,85	6,63
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,39	0,07	8,00	0,08	8,93	0,08	9,28	0,09	8,35	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,79	0,11	11,36	0,11	12,31	0,11	13,43	0,13	13,94	0,13
6	Konstruksi	643,42	6,53	705,91	6,82	773,85	7,12	754,42	7,06	826,81	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	978,67	9,93	1.063,22	10,27	1.176,37	10,82	1.079,90	10,11	1.241,87	11,37
8	Transportasi dan Pergudangan	487,17	4,94	518,04	5,00	567,14	5,22	538,51	5,04	569,66	5,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	159,92	1,62	176,88	1,71	194,64	1,79	182,41	1,71	179,81	1,65
10	Informasi dan Komunikasi	351,34	3,56	382,81	3,70	419,89	3,86	455,74	4,27	486,00	4,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	183,85	1,86	189,56	1,83	196,40	1,81	202,30	1,89	207,84	1,90
12	Real Estate	292,36	2,97	309,48	2,99	330,10	3,04	319,10	2,99	324,28	2,97
13	Jasa Perusahaan	7,89	0,08	8,34	0,08	8,61	0,08	8,49	0,08	8,54	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	403,10	4,09	429,70	4,15	452,09	4,16	469,70	4,40	491,26	4,50
15	Jasa Pendidikan	387,18	3,93	423,35	4,09	465,07	4,28	476,85	4,47	484,55	4,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,86	1,24	130,26	1,26	138,85	1,28	153,55	1,44	179,82	1,65
17	Jasa Lainnya	110,26	1,12	120,85	1,17	132,24	1,22	124,93	1,17	122,31	1,12
	PDRB Dengan Migas	9.858,64		10.352,10		10.872,10		10.679,33		10.924,79	
	PDRB Tanpa Migas	9.496,66		9.991,35		10.499,31		10.310,16		10.605,25	

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 mencapai Rp.10,924 triliun meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.10,679 triliun. Hal ini menunjukkan, meskipun dampak pandemi masih cukup terasa di tahun

2021, namun secara total lapangan usaha ekonomi sudah mengalami pertumbuhan positif. Dari segi konstribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 39,50% sedangkan konstribusi yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0.08%.

Tabel II.22. Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

NO	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.792.575,12	43.18	6,185,476.39	42,62	6,507,735.22	41,79	6,606,092.04	42,51	6.482.994,83	39,68
2	Pertambangan dan Penggalian	918,423.10	6.85	1,015,251.87	6.99	1,064,145.83	6.83	982,784.04	6,32	1.159.436,04	7,10
3	Industri Pengolahan	956.954,34	7.13	1,026,053.03	7.07	1,077,214.02	6,92	1,049,428.40	6,75	1.155.824,69	7,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,020.71	0.07	10,951.02	0.08	12,447.54	0.08	12,828.44	0.08	11.054,47	0,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,806.15	0.12	17,019.15	0.12	17,810.46	0.11	19,585.38	0,13	21.334,17	0,13
6	Konstruksi	870,144.40	6.49	968,594.40	6.67	1,066,144.35	6.85	1,008,958.00	6,49	1.179.800,10	7,22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,252.217,36	9.33	1,390,278.36	9.58	1,577,114.94	10,13	1,501,364.24	9,66	1.748.986,57	10,71
8	Transportasi dan Pergudangan	702,916.29	5.24	748,799.29	5,16	798,316.63	5,13	793,004.91	5,10	857.168,66	5,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250,537.04	1.87	280,686.04	1,93	308 703,44	1,98	296 661,06	1,91	294.130,96	1,80
10	Informasi dan Komunikasi	487,272.49	3.63	533,328.49	3,67	581,222.98	3.73	638,181.19	4,11	659.999,55	4,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	265,549.92	1.98	280,920.08	1.94	296,737.07	1.91	305,101.73	1,96	328.464,17	2,01
12	Real Estate	380,220.11	2.83	412,100.00	2.84	479,895.30	3,08	464,004.33	2,99	468.936,00	2,87
13	Jasa Perusahaan	11,822.13	0.09	12,669.66	0.09	13,190.21	0.08	13,444.75	0,09	13.632,75	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	644,423.81	4.80	692,721.87	4,77	734,802.25	4,72	768,861.67	4,95	802.385,93	4,91
15	Jasa Pendidikan	530.828,32	3.96	585,429.19	4,03	646,332.95	4,15	680,154.42	4,38	710.239,95	4,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	171,458.30	1.28	184,875.34	1.27	201,249.41	1.29	223,503.53	1,44	266.854,49	1,63
17	Jasa Lainnya	153,870.67	1.15	169,297.76	1.17	187,994.15	1,21	176,791.73	1,14	176.230,14	1,08
	PDRB Dengan Migas	**13,414,930.28**	**100**	**14,514,451.95**	**100**	**15,571,056.75**	**100**	**15,540,749.86**	**100.00**	**16.337.473,47**	**100**
	PDRB Tanpa Migas	**13,009,202.97**	**96,98**	**14,059,150.61**	**96,86**	**15,098,043.48**	**96,96**	**15,196,912.35**	**97,79**	**15 094 118,35**	**92,39**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai Rp. 16.337.473,47 meningkat dari tahun 2020 dengan PDRB sebesar Rp. 15,540,749.86 Konstribusi lapangan usaha yang paling tinggi berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 39,68% sedangkan konstribusi

yang paling rendah berasal dari Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya sebesar 0,07%.

Tabel II.23. Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.175.236,99	68,40	10,053,520.36	69,27	10.952.881,98	70,25	11.089.609,13	71,69	11.554.542,60	70,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	183.594,11	1,37	224,120.11	1,54	250.712,66	1,61	244.004,69	1,58	260.382,40	1,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.521.109,82	11,34	1,589,275.63	10,95	1.665.140,96	10,68	1.641.689,66	10,61	1.667.877,05	10,21
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	3.331.166,77	24,83	3,685,878.78	25,39	3.981.789,18	25,54	3.876.632,58	25,06	4.204.256,18	25,73
5	Perubahan Inventori	41.831,73	0,31	43.152,96	0,30	3.722,11	0,02	65.851,53	0,43	29.042,67	0,18
6	Net Ekspor	-838.009,14	-6,25	-1,081,495.90	-7,45	-1.263.315,89	-8,10	-1.448.831,73	-9,37	-1.378.627,45	-8,44
	PDRB PENGELUARAN	**13.414.930,28**	**100.00**	**14,514,451.95**	**100.00**	**15.590.931,00**	**100,00**	**15.468.955,86**	**100,00**	**16.337.473,45**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Sedangkan untuk PDRB atas harga berlaku menurut Pengeluaran pada tahun 2021 mencapai Rp. 16.337.473,45 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 15.468.955,86 Konstribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 70,72% sedangkan konstribusi yang paling rendah berasal dari Net Ekspor sebesar -8,44%.

Tabel II.24. Nilai dan Konstribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	2017		2018		2019		2020*		2021**	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.649.835,24	61,76	7020753,63	67,82	7.395.773,61	68,03	7.311.142,03	68,46	7.421.814,60	67,94
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	126.712,11	1,18	147814,11	1,43	162.451,87	1,49	155.852,39	1,46	162.824,09	1,49
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.001.804,20	9,30	1022248,2	9,87	1.052.487,01	9,68	1.024.517,57	9,59	1.026.433,76	9,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	2.519.954,23	23,41	2700153,23	26,08	2.839.154,57	26,11	2.668.592,74	24,99	2.801.345,71	25,64
5	Perubahan Inventori	14.337,43	0,13	14683,43	0,14	(36.549,64)	(0,34)	28.027,99	0,26	11.221,11	0,10
6	Net Ekspor	453.999,45	4,22	-553553,51	(5,35)	(541.215,17)	(4,98)	(508.812,02)	(4,76)	(498.857,30)	(4,57)
	PDRB PENGELUARAN	**10.766.642,66**	**100,00**	**10352099,1**	**100,00**	**10.872.102,25**	**100,00**	**10.679.320,70**	**100,00**	**10.924.781,97**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Sebagaimana tertera dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 10.924.781,97 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. 10.679.320,70.

Konstribusi Pengeluaran yang paling tinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 67,94% sedangkan konstribusi Pengeluaran yang paling rendah berasal dari Net Ekspor sebesar -4,57.

Tabel II.25. Laju Pertumbuhan Riel PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

NO	LAPANGAN USAHA	PERTUMBUHAN				
		2017	2018	2019*	2020**	2021**
		%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,21	2,37	41.18	41.46	39.68
2	Pertambangan dan Penggalian	6.50	3,62	6.97	6.73	7.10
3	Industri Pengolahan	2,41	4,92	7.06	6.95	7.07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.08	8,20	0.08	0.08	0.07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.01	5,26	0.12	0.13	0.13
6	Konstruksi	12,71	9,71	6.89	6.75	7.22
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,14	8,46	10.24	9.70	10.71
8	Transportasi dan Pergudangan	6.47	6,34	5.27	5.15	5.25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,00	10,60	2.01	1.92	1.80
10	Informasi dan Komunikasi	11.19	8,96	3.77	4.11	4.04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.74	3,11	1.90	1.97	2.01
12	Real Estate	5.83	5,85	6,66	2.96	2.87
13	Jasa Perusahaan	5.62	5,70	0.09	0.09	0.08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.63	6,60	4.71	4.97	4.91
15	Jasa Pendidikan	6.61	9,34	4.24	4.43	4.35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.49	6,89	1.28	1.44	1.63
17	Jasa Lainnya	8.64	9,60	1.23	1.16	1.08
	PDRB Dengan Migas	**5.19**	**5,01**	**5,02**	**-1,77**	**2,30**
	PDRB Tanpa Migas	**5,27**	**5,21**	**5,08**	**-1,80**	**2,86**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.26. Laju Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tanggamus (persen), 2017-2021

NO	LAPANGAN PENGELUARAN	PERTUMBUHAN				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
		%	%	%	%	%
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,48	3,77	3,42	2,42	2,64
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,08	4, ,65	1,79	1,45	2,14
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,72	2,39	1,76	1,28	1,41
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,06	3,26	2,74	3,58	3,31
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	
6	Net Ekspor	-	-	-	-	
	PDRB PENGELUARAN	**3,45**	**3,04**	**2,28**	**1,01**	**3,24**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

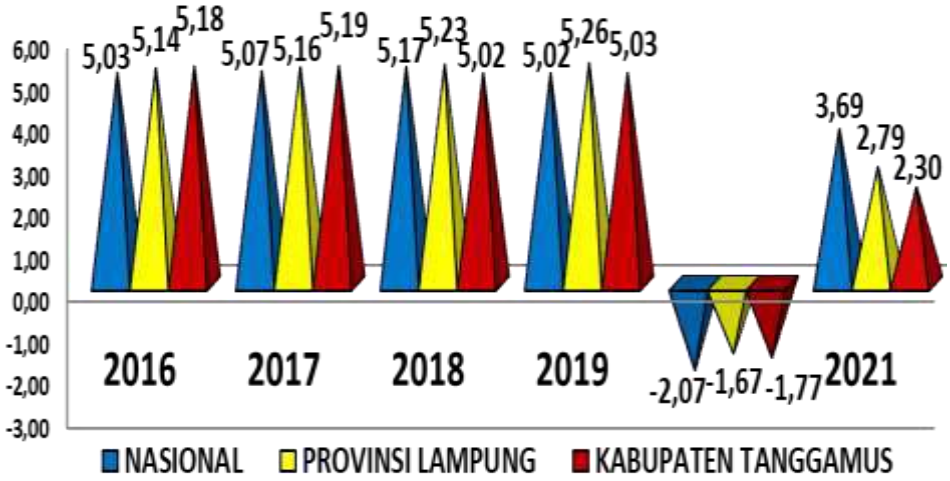
Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat dilihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun

2021 telah mencapai Rp. 15,094 tirliun angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan PDRB tahun 2020 yang nilainya hanya sebesar Rp. 15,196 triliun sedangkan jika dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 telah mencapai Rp. 10,924 triliun meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp.10,679 triliun. Sedangkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2021 telah mencapai Rp. 16.337 triliun, meningkat dari tahun 2020 RP. 15,468 triliun . Demikian pula halnya jika dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 telah mencapai Rp. 10,924 triliun meningkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar Rp. 10,679 triliun. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan dilakukannya kebijakan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

2.1.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut :

Gambar II.15 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



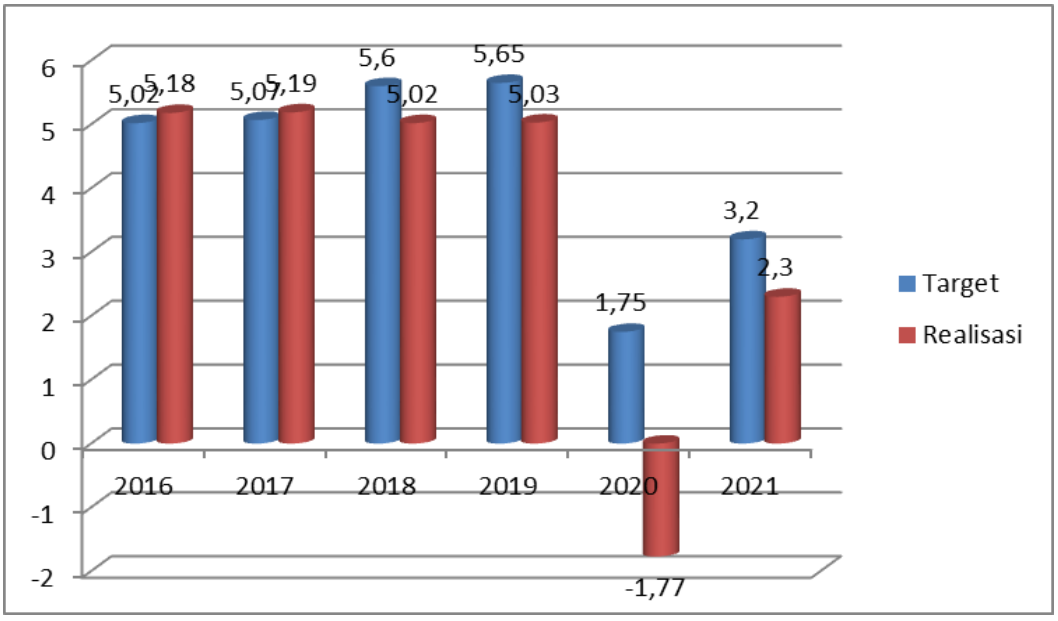
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 5,19 persen. Namun sejak tahun 2018-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tidak mencapai target yang ditentukan. Pada Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan sebesar 0,17 persen yang berada pada angka 5,02 persen, namun pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 5,03 persen. Pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 6,8 persen yakni turun pada angka -1,77 persen. Hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang berada pada angka -1,67 persen dan Nasional pada angka -2,07 persen.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus mengalami perbaikan menjadi 2,3 persen. Namun tingkat pertumbuhan ekonomi ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing sebesar 2,79 persen dan 3,69 persen.

Fenomena penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kinerja berbagai sektor lapangan usaha. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan aktivitas para pelaku ekonomi yakni rumah tangga, perusahaan dan pemerintah melalui regulasi pemerintah daerah segbagai upaya preventif dan kekhawatiran para pelaku ekonomi akan penularan Covid-19.

Gambar.II.16 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.1.3. Laju Inflasi

Selama tahun 2016 tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 2,51%, angka ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 yang mencapai 3,71%. Inflasi di Kabupaten Tanggamus sepanjang tahun 2016 berfluktuasi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa indeks komoditas disektor makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, pendidikan, rekreasi, dan olah raga, transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami kenaikan. Dengan tingkat inflasi sebesar 2,51% ditahun 2016, maka tingkat inflasi di Kabupaten Tanggamus jauh lebih rendah dibandingkan inflasi Bandar Lampung sebesar 2,75% dan inflasi Nasional sebesar 3,02%. Sedangkan mulai tahun 2017, BPS Kabupaten Tanggamus tidak melakukan perhitungan inflasi.

Tabel II.27. Nilai Inflasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 – 2016

URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inflasi	11,52	4,09	4,70	4,05	5,31	3,71	2,51

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2017
Keterangan : Mulai Tahun 2017 BPS Kabupaten Tanggamus tidak lagi melakukan perhitungan inflasi.

2.1.2.1.4. PDRB Perkapita

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif karena masalah aspek multidimensi yang melatarbelakanginya.

Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita. PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di

daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel II.28. PDRB Per kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019-2021

NO.	WILAYAH	PDRB PER KAPITA KABUPATEN/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU (RUPIAH)		
		2019	2020	2021
1	Lampung Barat	23,404,088.00	23,614,681.00	24,714,990.00
2	Tanggamus	26,034,307.00	24,224,635.00	25,297,765.00
3	Lampung Selatan	44,129,169.00	41,704,922.00	43,307,952.00
4	Lampung Timur	39,797,485.00	36,710,498.00	38,323,275.00
5	Lampung Tengah	55,368,656.00	48,861,769.00	50,315,555.00
6	Lampung Utara	38,512,596.00	37,549,879.00	39,212,125.00
7	Way Kanan	31,022,091.00	29,594,040.00	30,746,033.00
8	Tulang Bawang	51,065,626.00	53,691,359.00	56,118,778.00
9	Pesawaran	36,433,510.00	34,047,403.00	34,965,125.00
10	Pringsewu	27,851,928.00	27,563,217.00	28,666,813.00
11	Mesuji	51,934,466.00	45,812,389.00	47,414,096.00
12	Tulang Bawang Barat	41,859,787.00	39,971,513.00	41,571,981.00
13	Pesisir Barat	30,246,494.00	28,889,489.00	30,062,936.00
14	Bandar Lampung	56,217,749.00	50,753,356.00	51,903,009.00
15	Metro	37,683,219.00	37,361,032.00	38,737,510.00
	Provinsi Lampung	42,172,315.00	39,346,531.00	40,950,417.00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Nilai PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga berlaku mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga tahun 2021. Pada tahun 2016, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 21.241.150,- dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 menjadi Rp. 26.034.307,-. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus mengalami penurunan menjadi Rp. 24.224.635,- (-6,95%). Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 25.297.765,- atau meningkat sebesar 4,43%.

Tabel II.29. Perkembangan PDRB Per kapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021

NO	TAHUN	PDRB ADHB	PERTUMBUHAN (%)
1	2016	21,241,150.00	9.52
2	2017	22,868,022.00	7.66
3	2018	24,535,780.00	7.29
4	2019	26,034,307.00	6.11
5	2020	24,224,635.00	-6.95
6	2021	25,297,765.00	4.43

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan perkapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber aya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.1.5. Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk.

Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- 0.3 ≤ Gini Rasio ≤ 0.5 : artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Rasio Gini Kabupaten Tanggamus masih tergolong pada kisaran ketimpangan yang rendah. Pada Tahun 2019 rasio gini sebesar 0,314 (ketimpangan sedang) meningkat sebesar 0,025 poin dari tahun 2018. Pada tahun 2020, rasio gini Kabupaten Tanggamus menurun menjadi 0,293. Untuk menekan ketimpangan pendapatan masyarakat, telah dilakukan beberapa upaya untuk seperti perluasan perlaksanaan perlindungan sosial. Gini ratio pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan mencapai angka 0.29. Berikut merupakan rasio gini di Kabupaten Tanggamus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

Gambar II.17 Nilai Gini Rasio Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2021



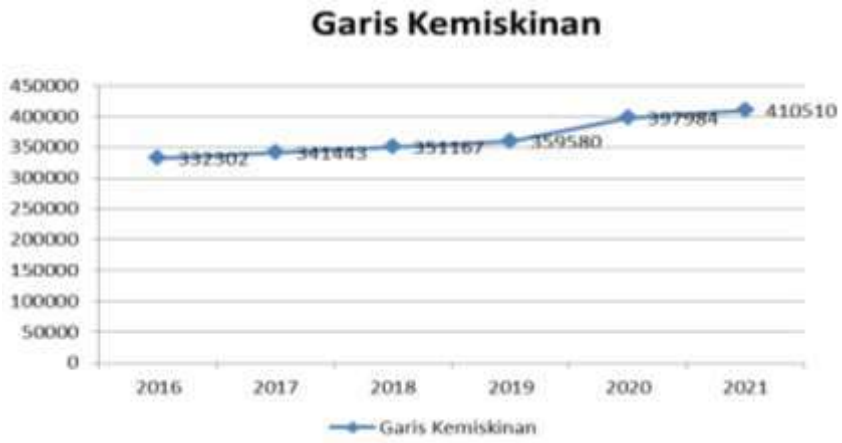
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.1.6. Kemiskinan Kabupaten Tanggamus

Kemiskinan adalah kondisi multidimensional pada keterbatasan akses terhadap pemenuhan hak pada dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, sipil, politik, ketimpangan gender, kesenjangan geografis, maupun beban kependudukan. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih diukur pada dimensi ekonomi dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Besaran garis kemiskinan di Kabupaten Tanggamus selama enam tahun terakhir relatif mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021 garis kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) mencapai Rp410.510 per Kapita per Bulan. Kenaikan besaran garis kemiskinan menunjukkan beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk miskin juga semakin meningkat.

Gambar II.18 Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Peningkatan garis kemiskinan tidak selaras dengan jumlah penduduk miskin selama tahun 2016 sampai dengan 2020 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 81,34 ribu jiwa turun sebesar 10,97 ribu jiwa selama empat tahun terakhir mencapai 70,37 ribu jiwa pada tahun 2020. Akan tetapi pada Tahun 2021, Peningkatan garis kemiskinan selaras dengan Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus di tahun tersebut. Jumlah penduduk miskin di Tahun 2021 meningkat sebanyak 1,52 ribu jiwa mencapai 71,89 ribu jiwa.

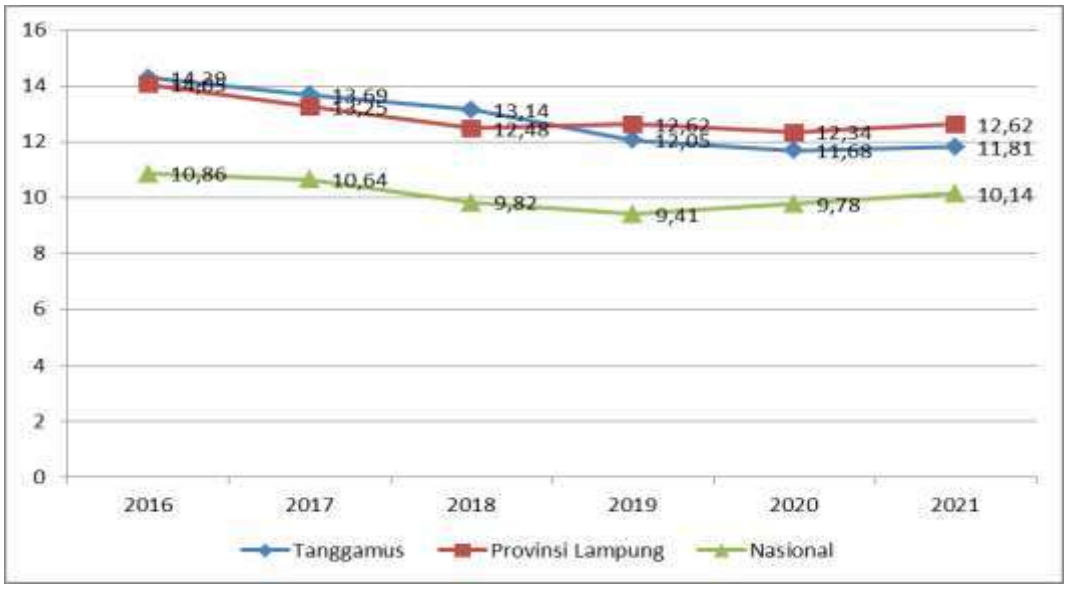
Tabel II.30. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus (ribu) Tahun 2016 – 2021

WILAYAH	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Tanggamus	81,34	77,53	73,77	71,90	70,37	71,89

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 sebesar 14.29% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 11.68%, namun mengalami kenaikan pada tahun 2021 11,81%.

Gambar II.19. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



Sumber : BPS, Bappeda Provinsi Lampung dan Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan

pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Di Kabupaten Tanggamus sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 dan Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.67/41/08/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangn Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021.

Tabel II.31. Persentase Penduduk Miskin 2016-2021 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

No	Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lampung Barat	15.06	14.32	13.54	12.92	12.52	12.82
2	Tanggamus	14.05	13.25	12.48	12.05	11.68	11.81
3	Lampung Selatan	16.16	15.16	14.86	14.31	14.08	14.19
4	Lampung Timur	16.98	16.35	15.76	15.24	14.62	15.08
5	Lampung Tengah	13.28	12.90	12.62	12.03	11.82	11.99
6	Lampung Utara	22.92	21.55	20.85	19.90	19.30	19.63
7	Way Kanan	14.58	14.06	13.52	13.07	12.90	13.09
8	Tulang Bawang	10.20	10.09	9.70	9.35	9.33	9.67
9	Pesawaran	17.31	16.48	15.97	15.19	14.76	15.11
10	Pringsewu	11.73	11.30	10.50	10.15	9.97	10.11
11	Mesuji	8.00	7.66	7.55	7.47	7.33	7.54
12	Tulang Bawang Barat	8.40	8.11	8.10	7.75	7.39	8.32
13	Pesisir Barat	15.91	15.61	14.98	14.48	14.29	14.81
14	Bandar Lampung	10.15	9.94	9.04	8.71	8.81	9.11
15	Metro	10.15	9.89	9.14	8.68	8.47	8.93
16	Provinsi Lampung	14.29	13.69	13.14	12.62	12.34	12.62

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah index kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) atau P1 dan index keparahan kemiskinan (*distritutionally sensitive index*) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. Indikator P1 mengukur kesenjangan (jarak) rata-rata antara pengeluaran masing-masing penduduk

miskin dan GK. Semakin tinggi P1 berarti semakin jauh jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 yang sama tetapi daerah A memiliki P1 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini menunjukkan bahwa walau persentase penduduk miskin dikedua daerah tersebut sama, penduduk miskin di daerah A secara rata-rata lebih miskin dibanding penduduk miskin di daerah B.

Tabel II.32. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021

WILAYAH	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) (PERSEN)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanggamus	2.01	1.81	2.36	1.24	2,01	2,13

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tanggamus tahun 2020 sebesar 2,01 menjadi 2,13 pada tahun 2021, atau bertambah sebesar 0,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Tanggamus masih belum sepenuhya ternentaskan.

Indikator P2 merupakan ukuran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2 berarti pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menyebar dari nilai rata-ratanya. Sebagai contoh, dua daerah A dan B memiliki P0 dan P1 yang sama tetapi daerah A memiliki P2 yang lebih tinggi dibanding daerah B. Hal ini berarti persentase penduduk daerah miskin kedua daerah tersebut berarti sama dan secara rata-rata penduduk miskin di kedua daerah tersebut sama miskinnya. Namun demikian tingkat kemiskinan penduduk miskin di daerah A lebih beragam dibanding daerah B. Dengan demikian P2 merupakan ukuran tingkat keparahan kemiskinan.

Tabel II.33. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 – 2021

WILAYAH	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) (PERSEN)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanggamus	0.43	0.35	0.62	0.21	0.55	0,45

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

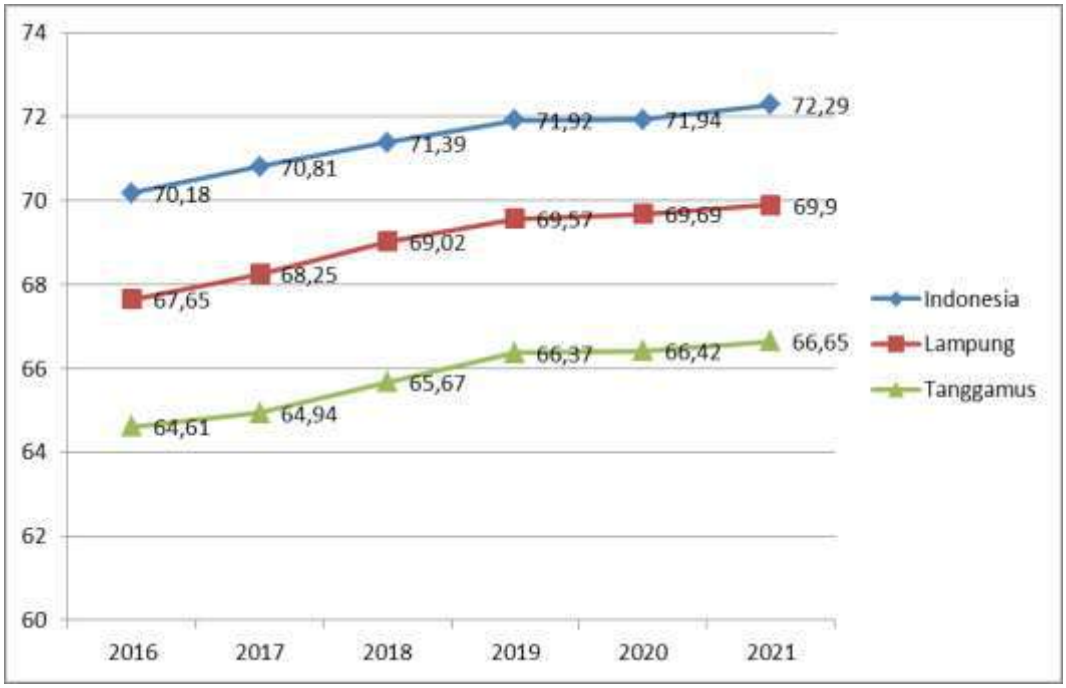
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,43 dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 0,45.

2.1.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi (IPM ≥80), kategori tinggi (70≤IPM<80), kategori sedang (60≤IPM<70), dan kategori rendah (IPM<60).

Secara umum, pembangunan Manusia di Kabupaten Tanggamus menunjukkan arah yang positif. Selama lima tahun terakhir ini nilai IPM Kabupaten Tanggamus terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 IPM Kabupaten Tanggamus mencapai 64,61 dan kemudian terus meningkat menjadi 66,65 pada tahun 2021, termasuk dalam kategori sedang. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM nasional dan Provinsi Lampung, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah. Angka IPM Nasional pada tahun 2021 mencapai 72,29 sedangkan angka IPM Provinsi Lampung mencapai 69,90. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar II.20 baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan.

Gambar II.20. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2021, bersama 10 kabupaten lainnya di Provinsi Lampung termasuk dalam kategori sedang dengan perkembangan yang cukup baik. Sedangkan yang memiliki status pembangunan manusia berkategori tinggi adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Tengah.

Pada tahun 2021 diantara 15 kabupaten/kota di provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung tercatat memiliki nilai IPM tertinggi yakni 77,58, sedangkan IPM terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan IPM sebesar 64,04. Kabupaten Tanggamus sendiri, dengan IPM sebesar 66,65, merupakan kabupaten dengan nilai IPM urutan ke-11 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia baik di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Perbandingan IPM kabupaten Tanggamus dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar II.21 berikut :

Gambar II.21. IPM Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, 2021



Sumber : BPS & Bappeda Provinsi Lampung, 2022

Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Mesuji (0,64%) menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi dan Kabupaten Pesisir Barat tertinggi kedua untuk tahun 2021 (0,61%). Sedangkan Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pringsewu memiliki rata-rata laju pertumbuhan IPM yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung sebagaimana dapat dilihat pada Gambar II.21 berikut :

Tabel II.34. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2021

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia						Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020-2021
1	Lampung Tengah	68,33	68,95	69,73	70,04	70,16	70,23	0,10
2	Lampung Barat	65,45	66,06	66,74	67,5	67,8	67,9	0,15
3	Bandar Lampung	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44	77,58	0,18
4	Lampung Selatan	66,19	66,95	67,68	68,22	68,36	68,49	0,19
5	Way Kanan	65,74	65,97	66,63	67,19	67,44	67,57	0,19
6	Pringsewu	68,26	68,61	69,42	69,97	70,3	70,45	0,21
7	Provinsi Lampung	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	0,30
8	Tulang Bawang	66,74	67,07	67,7	68,23	68,52	68,73	0,31
9	Lampung Utara	65,95	66,58	67,17	67,63	67,67	67,89	0,33
10	Tanggamus	64,41	64,94	65,67	66,37	66,42	66,65	0,35
11	Tulang Bawang Barat	63,77	64,58	65,3	65,93	65,97	66,22	0,38

No	Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia						Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020-2021
12	Metro	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	77,49	0,39
13	Lampung Timur	67,88	68,05	69,04	69,34	69,37	69,66	0,42
14	Pesawaran	63,47	64,43	64,97	65,75	65,79	66,14	0,53
15	Pesisir Barat	61,5	62,2	62,96	63,79	63,91	64,3	0,61
16	Mesuji	60,72	61,87	62,88	63,52	63,63	64,04	0,64

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

2.1.2.1.8. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur dalam Pendapatan Daerah adalah PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Tabel II.35. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	3.510%	4.652%	5.431%	4,831%	6,71%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022.

2.1.2.1.9. Opini BPK

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tanggamus pada kurun waktu 2016-2021 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel II.36. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2013-2021

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2021.

2.1.2.1.10. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam Bidang Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan yaitu :

1) Ketersediaan dan Cadangan Pangan

   Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang Pemantapan Ketahanan Pangan, memiliki potensi dan peluang untuk mendorong pemantapan ketersediaan pangan, yaitu Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah.

2) Distribusi dan Harga Pangan.

   Dalam rangka mengendalikan tingkat harga pangan pokok terutama beras dipasaran, maka diadakan kegiatan diantaranya pemberian dana talangan P–LDPM (Pengutan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat) yang dibiayai oleh Dekonsentrasi. Adapun tujuan pengucuran dana tersebut adalah :

   a) Memperkuat modal usaha gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelola (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan).
   b) Untuk dapat mengembangkan sarana penyimpanan, melakukan pembelian hasil produksi petani anggotanya dan tersedianya cadangan pangan disaat menghadapi musim panceklik (kemarau panjang) serta tercapainya stabilitas harga ditempat petani saat panen raya.

c) Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah dengan melakukan musyawarah rencana kegiatan bersama anggota kelompoknya, melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, pemasaran sesuai rencana, kebutuhan anggota, kebutuhan pasar serta mempunyai nilai tambah bagi khususnya unit usaha gapoktan yang mengelolanya.

d) Memperluas jaringan kerjasama pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya.

3) Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Guna mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, yaitu berperan pada Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan konsumsi dan keamanan Pangan, Penyempurnaan program dan kegiatan dalam rangka Pengembangan konsumsi dan keamanan pangan melalui peningkatan pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan serta membina pengembangan kelembagaan pedesaan dalam diversifikasi konsumsi pangan, keamanan dan prefensi pangan masyarakat, maka telah melaksanakan Program Penanganan Keamanan Pangan Segar, dengan cara Uji Residu Pestisida Terhadap Pangan Segar.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengenali dan mengetahui sumber pangan yang ada di wilayahnya atau di sekitarnya. Pemamfaatan pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaaman, ternak dan ikan sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 KWT yaitu :

a) Mekar sari I, Pekon Negeri Agung
b) Melati, Pekon Sinar Petir
c) Bunga Lestari, Pekon Campang
d) Sebabangan, Pekon Banjar Manis
e) Ayu Lestari, Pekon Gisting Bawah
f) Lestari II, Pekon Way Jaha
g) Mawar, Pekon Kemuning

h) Kartini, Pekon Argopeni

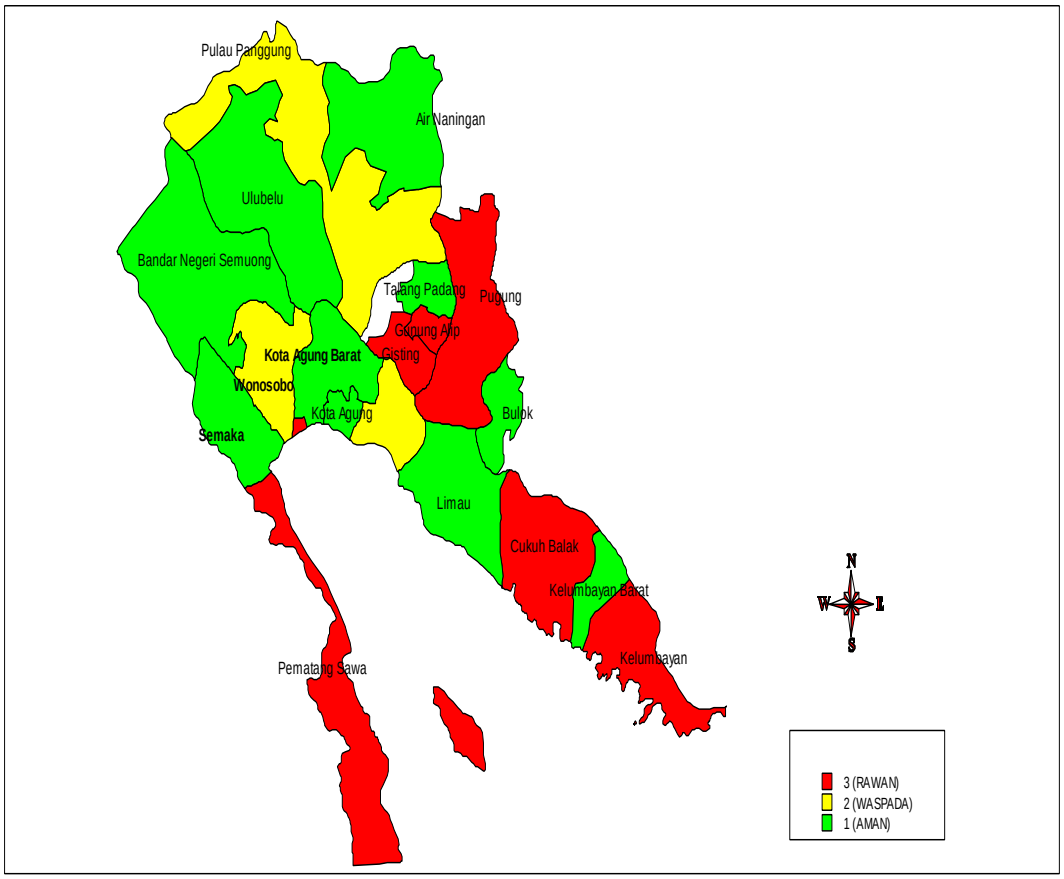
i) Mekar Jaya, Pekon Dadapan

j) Sri Lestari, Pekon Wonoharjo

4) Penanganan Kerawanan Pangan

Daerah rawan pangan di Kabupaten Tanggamus yang mengacu pada KK miskin diatas 30%, daerah rawan pangan tersebut dapa ditindaklanjuti dengan kegiatan Desa Mandiri Pangan.

Gambar II.22. Peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Tanggamus



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022

Daerah yang mengalami Rawan Pangan antara lain Gisting, Gunung Alip, Pugung, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Pematang Sawa. Langkah antisipasi Kerawanan Pangan Transien (Akibat Bencana)
dengan Cadangan Pangan yaitu :

1) Akan dialokasikan Cadangan Pangan Kabupaten sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan bahwa Kabupaten berkewajiban menyediakan Cadangan Pangan sebanyak 100 Ton.
2) Model pengelolaan cadangan pangan ini akan dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Lampung sebagai gudang cadangan pangan daerah dengan lokasi gudang yang terdekat dengan Kabupaten Tanggamus.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator baru sebagai pengganti Angka Melek Huruf (AMH). Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

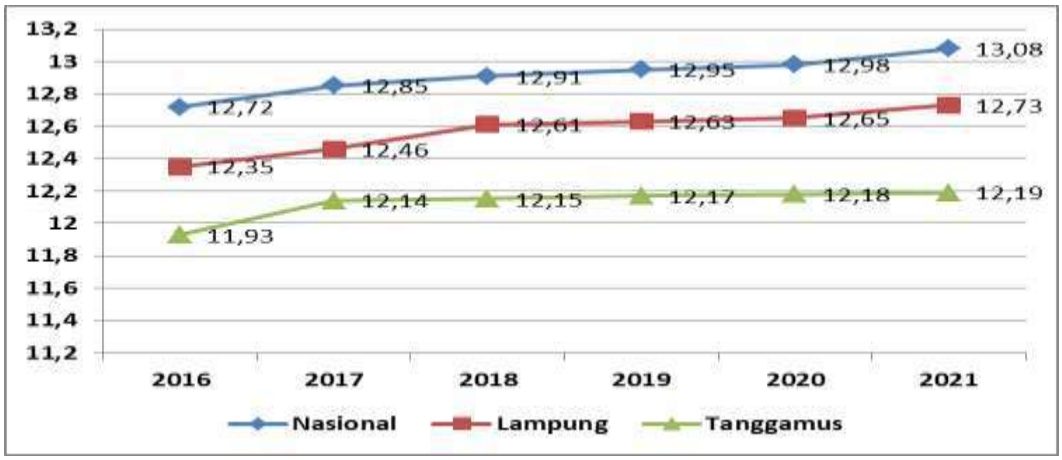
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2021 adalah sebesar 12,19 tahun. Ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung dan Nasional sebesar 12,73. Dan angka HLS Lampung berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 13,08 tahun, yang berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk secara Nasional adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

Perkembangan HLS Kabupaten Tanggamus dari tahun 2016 ke tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Bila di tahun 2016

HLS Kabupaten Tanggamus masih 11,93 dan pada tahun 2021 telah mencapai 12,19 tahun.

Sebagaimana pula terlihat pada Gambar II.21 HLS Kabupaten Tanggamus semakin menyusul ketertinggalan dengan HLS Provinsi Lampung. Gambar II.21 menunjukkan adanya perkembang antara HLS Kabupaten Tanggamus, HLS Provinsi Lampung dan HLS Nasional dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi pacuan untuk terus meningkatkan HLS KabupatenTanggamus.

Gambar II.23. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021



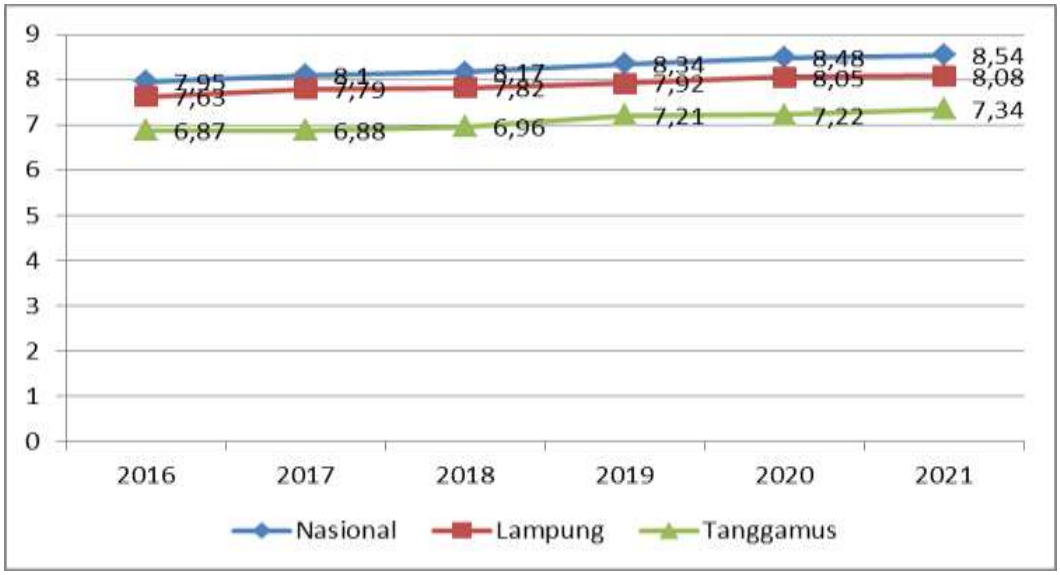
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2021 baru mencapai 7,34 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,08 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS

yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kondisi ini sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini.

Gambar II.24. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021



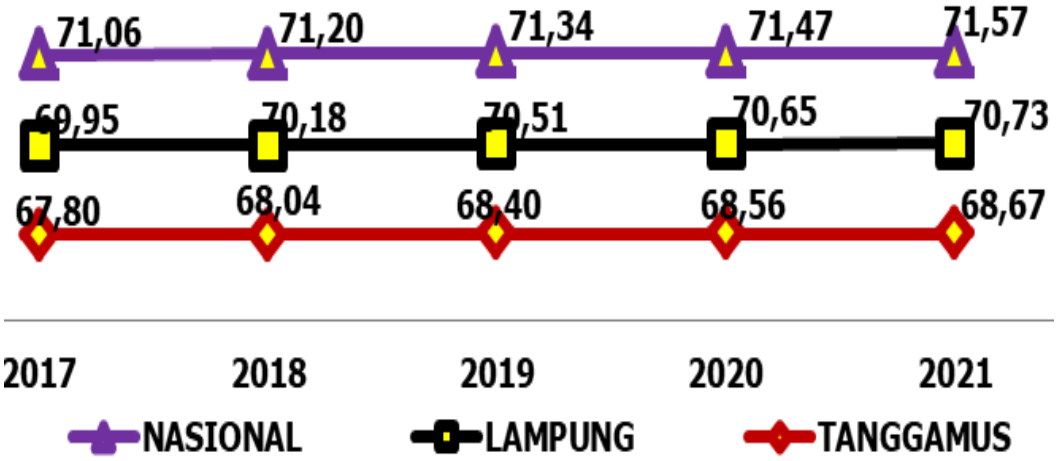
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.2.3. Angka Harapan Hidup (AHH)

Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

AHH Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 adalah 67,80 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 68,67. Sementara itu, selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai AHH Kabupaten Tanggamus berada di bawah level Provinsi Lampung maupun Nasional, meskipun nilai AHH Kabupaten Tanggamus secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus dibanding dengan capaian AHH Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar II.25 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Di tahun 2021, Kabupaten yang memiliki AHH paling rendah di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Pesisir Barat dengan nilai AHH 63,66, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki AHH paling tinggi adalah Kota Metro dengan nilai 71,66. Kabupaten Tanggamus sendiri masuk dalam 4 (empat) Kabupaten yang memiliki AHH paling rendah di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel II.37 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Angka Harapan Hidup Penduduk (Tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pesisir Barat	62.29	62.54	62.85	63.27	63.50	63.66
2	Lampung Barat	66.64	66.86	67.09	67.43	67.58	67.65
3	Mesuji	67.32	67.49	67.71	68.04	68.19	68.26
4	Tanggamus	67.61	67.80	68.04	68.40	68.56	68.67
5	Pesawaran	68.05	68.29	68.53	68.88	69.04	69.15
6	Lampung Utara	68.30	68.48	68.71	69.05	69.21	69.30
7	Lampung Selatan	68.49	68.65	68.87	69.20	69.33	69.42
8	Way Kanan	68.58	68.74	68.95	69.27	69.40	69.46
9	Lampung Tengah	69.15	69.28	69.46	69.75	69.84	69.87
10	Tulang Bawang	69.28	69.41	69.59	69.88	69.97	70.01
11	Tulang Bawang Barat	69.21	69.35	69.56	69.88	70.00	70.03
12	Pringsewu	68.88	69.14	69.44	69.85	70.08	70.27
13	Provinsi Lampung	69.94	69.95	70.18	70.51	70.65	70.73
14	Lampung Timur	69.92	70.11	70.31	70.61	70.73	70.78
15	Kota Bandar Lampung	70.75	70.84	71.01	71.28	71.37	71.42
16	Kota Metro	71.05	71.13	71.29	71.55	71.63	71.66

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.2.4. Balita Gizi Buruk

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 terdapat 17,7% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan gizi kurang sebesar 13,8%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Tanggamus. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Tanggamus tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak terdapat kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tanggamus, namun di tahun 2020 dan 2021 ditemukan masing-masing 2 Kasus Gizi Buruk. Seluruh penderita gizi buruk mendapatkan penanganan (100%) sesuai target SPM.

Tabel II.38. Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 – 2021

URAIAN	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Balita Gizi Buruk	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	O Kasus (100%)	O Kasus (100%)	O Kasus (100%)	2 Kasus (100%)	2 Kasus (100%)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022.

2.1.2.2.5. Ketenagakerjaan

A. Partisipasi Angkatan Kerja

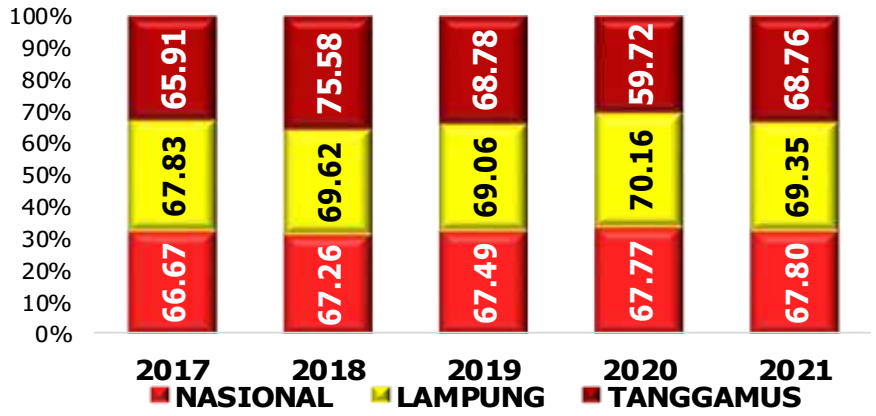
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus berjumlah 313.906 jiwa terdiri dari 205.709 laki-laki dan 108.197 perempuan. Sedangkan untuk bukan angkata kerja sebanyak 142.626 orang yang terdiri dari 33.163 laki-laki dan 109.463 perempuan perempuan.

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja ada 97,07% dan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja ada 68,76%. Berdasarkan status pekerjaannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2021 mayoritas berstatus berusaha sendiri, yakni sebanyak 74.085 orang.

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2021 ada sebanyak 3.649 orang. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.031 orang. Mayoritas pencari kerja merupakan lulusan SMA/SMK/sederajat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021) cenderung fluktuatif, berbeda halnya dengan TPAK Provinsi Lampung dan Nasional yang terus mengalami peningkatan. Secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar II.26. Komparasi TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

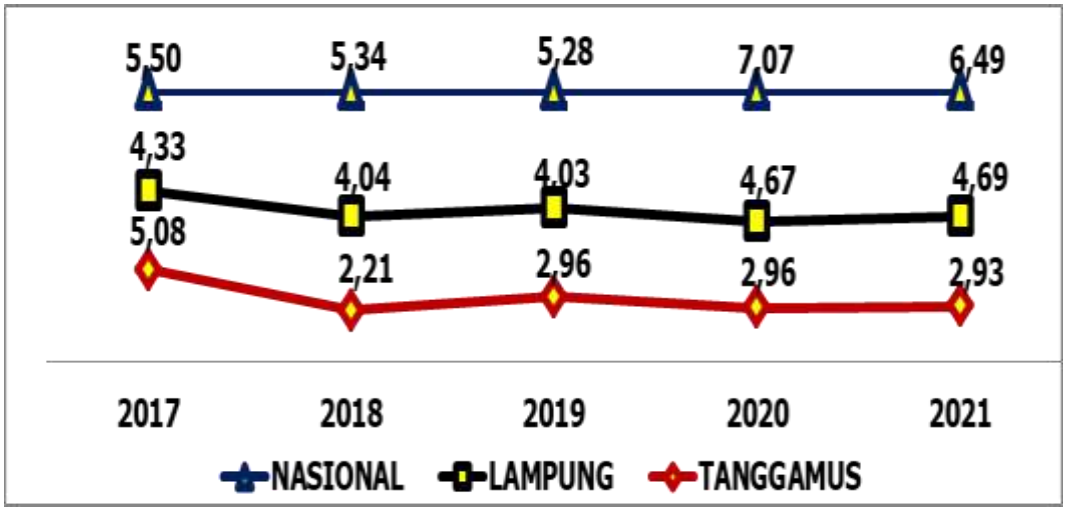
Salah satu Penilaian terhadap Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah adalah Tingkat Pengggangguran Terbuka (TPT) yaitu merupakan ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Terjadinya pendemi Covid-19 yang bersifat global, membawa dampak buruk pada perekonomian dan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan pekerja yang bersifat masal, hal ini terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka pada Provinsi Lampung dan Nasional di tahun 2020. Namun Tingkat pengangguran Kabupaten Tanggamus di tahun tersebut cenderung tetap dari tahun sebelumnya yakni sebesar 2,96 persen.. Hal ini karena mayoritas Pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, sehingga tidak terlalu terdampak dengan pengurangan pekerja.

Begitu pula di tahun 2021, TPT di Kabupaten Tanggamus kembali mengalami penurunan 0,03 poin atau menjadi 2,93% berada di bawah angka pengangguran Provinsi Lampung sebesar 4,69% dan Nasional sebesar 6,49%.

Secara lebih rinci, perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar II.27. Komparasi TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.2.2.6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan Hasil Survey pada Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berada pada Indeks 86,43 dengan Kategori "B" mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 70,93 (Kategori "C"). Perkembangan IKM Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.39. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	WILAYAH	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Tanggamus	73.30	73.47	77.14	75,27	70,93	86,43

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1. Seni Budaya

Indikator kinerja pada fokus seni budaya disajikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.40 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	CAPAIAN PEMBANGUNAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	3	38	13	39	7	1
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	2	-	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.41 Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 per Kecamatan

NO	Kecamatan	Capaian	
		Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Wonosobo	2	-
2	Semaka	12	-
3	Bandar Negeri Semuong	3	1
4	Kota Agung	3	-
5	Pematang Sawa	6	-
6	Kota Agung Timur	3	-
7	Kota Agung Barat	2	-
8	Pulau Panggung	13	-
9	Ulu Belu	18	-
10	Air Naningan	-	-
11	Talang Padang	4	-
12	Sumberejo	10	-
13	Gisting	19	-
14	Gunung Alip	-	-
15	Pugung	5	1
16	Bulok	-	-
17	Cukuh Balak	1	-
18	Kelumbayan	-	-
19	Limau	-	-
20	Kelumbayan Barat	-	-
	Jumlah	101	2

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Kecamatan yang paling banyak memiliki grup kesenian di Kabupaten Tanggamus yaitu Kecamatan Gisting Dengan jumlah 19 grup kesenian. Sedangkan di Kabupaten Tanggamus hanya dua Kecamatan yang memiliki gedung kesenian yaitu Kecamatan Bandr Negeri Semuong dan KecamatanPugung.

2.1.2.3.2. Olahraga

Tabel II.43 Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 per Kecamatan

NO	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
1	Wonosobo	40
2	Semaka	71
3	Bandar Negeri Semuong	17
4	Kota Agung	44
5	Pematang Sawa	41
6	Kota Agung Timur	17
7	Kota Agung Barat	58
8	Pulau Panggung	20
9	Ulu Belu	58
10	Air Naningan	106
11	Talang Padang	68
12	Sumberejo	83
13	Gisting	35
14	Gunung Alip	10
15	Pugung	43
16	Bulok	12

NO	Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
17	Cukuh Balak	48
18	Kelumbayan	40
19	Limau	4
20	Kelumbayan Barat	20
	Jumlah	836

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus, 2022

Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang terbanyak di Kabupaten Tanggamus yaitu Kecamatan Air Naningan dengan jumlah 106 unit. Sedangkan di Kabupaten Tanggamus baru memiliki 1 Gedung Olahraga yaitu GOR Ratu yang berada di Kecamatan Kota Agung.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu :

pengelolaan pendidikan dasar; pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel II.44. Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program KOBER	10%	10.5%	35,0 %	28,85%	47,07%
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti program SPS	58%	61%	2,0 %	2,70%	2,72%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 sebesar 47,07% mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 18,22% menjadi 47,07%. Dari table data di atas menandakan peningkatan minat masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menyekolahkan anak-anaknya sejak jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD).

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat mengambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah

penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Pada tahun 2021, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang untuk jenjang SD mengalami penurunan dari 105,93% pada tahun 2020 menjadi 104,69% di tahun 2021. Meski demikian, APK jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan. Pada jenjang SMP/MTs, APK meningkat sebesar 0,11 poin, dari 92,78% pada tahun 2020 menjadi 92,89% di tahun 2021. Sementara APK SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan sebesar 0,2 poin dari 77,91% pada tahun 2020 menjadi 78,11% di tahun 2021. Sehingga,

Perkembangan APK Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.45. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI (%)	11.87	113.63	108,80	107,80	105,93	104,69
2	SMP/MTs (%)	105.4	91.67	92,95	90,09	92,78	92,89
3	SMA/SMK/MA (%)	75.8	78.86	82,57	77,99	77,91	78,11

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022.

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020).

APM Kabupaten Tanggamus untuk jenjang SD/MI pada tahun 2021 sebesar 97,27%, mengalami penurunan sebesar 0,9 poin dari tahun 2020 dengan APM sebesar 98,17%. Terjadinya penurunan APM jenjang SD/MI ini disinyalir disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya peserta didik yang berselolah tidak sesuai umurnya karena baru masuk sekolah ketika umurnya di atas tujuh tahun dan masih berada di bangku SD padahal sudah 13 tahun atau lebih. Penurunan APM juga terjadi untuk jenjang SMA/SMK/MA, APM mengalami penurunan dari 56,96% pada tahun 2020 menjadi 56,34% pada tahun 2021.

Tabel II.46. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI (%)	99.04	100.00	97,83	98,33	98,17	97,27
2	SMP/MTs (%)	80.4	78.44	77,40	77,33	78,88	80,79
3	SMA/SMK/MA (%)	55.57	53.87	57,94	57,17	56,96	56,34

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022.

D. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Persentase pendidikan yang ditamatkan dilihat dari persentase penduduk memiliki ijazah tertinggi.

Tabel II.47. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	97.23%	102.1%	94,93 %	95,47%	73,23%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebesar 73,23%, mengalami penurunan sebesar 22,24% dari tahun 2020.

E. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan disektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Bisa jadi kenaikan tersebut karena dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah. Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di lingkup Kabupaten Tanggamus dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.48. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	90%	94.5%	98,58%	95,90%	94,41%
2	SMP	46%	48.0%	88,00%	86,85%	87,08%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

F. Angka Putus Sekolah dan Mengulang

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Rumus AptS adalah jumlah siswa yang tidak melajutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%. Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun

mendatang. Perkembangan Angka Putus Sekolah dan Mengulang di lingkup Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut :

Tabel II.49. Angka Putus Sekolah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN PUTUS SEKOLAH				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	0,11%	0,16%	0,12%	0,02%	0,17%
2	SMP	0,14%	0,94%	1,00%	0,09%	0,49%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.50. Angka Mengulang Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN MENGULANG				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	1,71%	1,14%	0,96%	0,09%	0,30%
2	SMP	0,09%	0,04%	0,33%	0,00%	0,01%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

Angka putus sekolah yang terbesar di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 terdapat pada jenjang SMP sebesar 0,01% orang sedangkan putus sekolah pada jenjang SD sebesar 0,30%.

G. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolahan. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta pendidik.

Pada tahun 2017 kondisi ruang kelas pendidikan dasar dengan kondisi baik sebesar 52,54% dan mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 menjadi 66,59%. Namun pada tahun 2021 Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik mengalami penurunan yang signifikan menjadi 33,35%.

Tabel II.51. Jumlah dan Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik	52,54%	54%	66,86%	66,59%	33,35%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

H. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2017 - 2019, ketersedian jumlah ketersediaan sekolah SD tidak ada penambahan sekolah. Sejak tahun 2020, mengalami peningkatan hingga sebesar 66,66% di tahun 2021. Sedangkan jumlah ketersediaan sekolah untuk SMP, terjadi peningkatan di tahun 2018 dan 2019 menjadi 16%, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya hingga di tahun 2021 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar mencapai 39,67%.

Tabel II.52. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan Dasar	4%	4%	4%	66,28%	66,66%
2	Pendidikan Menengah Pertama	15%	16%	16%	39,30%	39,67%

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

I. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Rasio ini menggambarkan pemenuhan kuantitas

atau jumlah tenaga kependidikan dan sarana pendidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Khusus di Kabupaten Tanggamus, pemenuhan jumlah guru maupun jumlah sekolah terhadap murid sudah memenuhi syarat. Namun permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Tanggamus adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

Tabel II.53. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Guru/Murid	1:20	1:20	1:12	1:13	1:11
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:28	1:28	1:22	1:21	1:20

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 Rasio Guru/Murid maupun Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Tanggamus tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2019 mengalami perbaikan dengan rasio masing-masing 1:12 dan 1:22. Di tahun 2021, rasio guru/murid dan rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar kembali mengalami perbaikan menjadi masing-masing 1:11 dan 1:20.

J. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama

Tabel II.54. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Guru/Murid	1:30	1:20	1:11	1:12	1:11
2	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	1:25	1:28	1:29	1;28	1:29

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Rasio Guru/Murid sebesar 1:30, dan mengalami perbaikan sejak tahun 2018

sehingga menjadi 1:11 pada tahun 2021. Berbeda halnya dengan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017 mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 dengan rasio 1:29.

2.1.3.1.2. Kesehatan

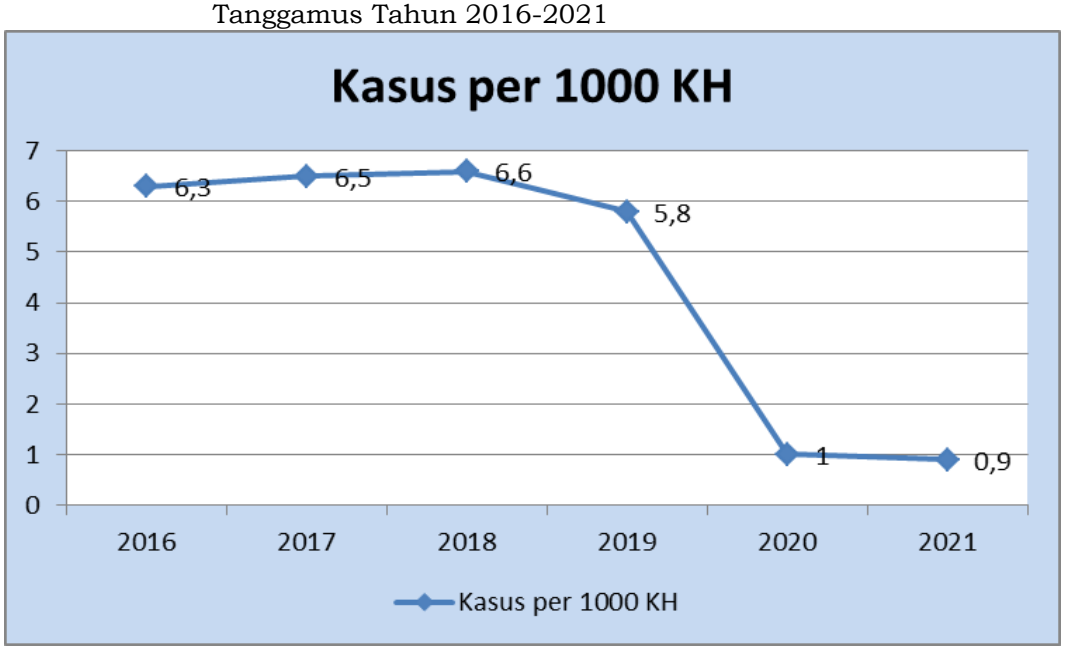
A. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia. AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri. Kematian bayi sangat berkaitan dengan kondisi kehamilan ibu, pertolongan persalinan yang aman dan perawatan bayi yang baru lahir. Penyebab langsung kematian bayi baru lahir adalah infeksi serta bayi baru lahir dengan berat rendah. Sedangkan penyebab tidak langsungnya antara lain tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat ekonomi yang masih rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung gizi ibu hamil.

Pada Tahun 2021 kelahiran hidup di Kabupaten Tanggamus sebesar 10.299 jiwa, terjadi 10 kasus kematian bayi termasuk neonatal, yaitu 2 bayi laki-laki dan 8 bayi perempuan, menurun dibandingkan Tahun 2020 yaitu 13 kasus. Dari 10.299 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 0,9 per 1.000 KH. Jika dibandingkan dengan target AKB Tahun 2021 pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus (1,2 per 1.000 kelahiran hidup), capaian AKB Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat baik.

Gambaran trend angka kematian bayi per 1.000 KH Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.28 Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2022

Beberapa penyebab kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O2) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (*neonatal*), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (*post neonatal*) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare .

Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Kabupaten Tanggamus yaitu peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi, Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan, Melakukan Audit MaternalPerinatal (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal dan pelaksanaan Program “Bumil Ceria” yang melibatkan lintas-sektor. Bumil Ceria adalah layanan yang diberikan bukan hanya sebatas pelayanan ibu hamil sampai dengan melahirkan dengan selamat, akan tetapi diintegrasikan juga dengan upaya pencegahan *stunting* sejak ibu mengandung yang tumbuh kembangnya dipantau secara berkala, sehingga dengan pelaksanaan program ini dapat

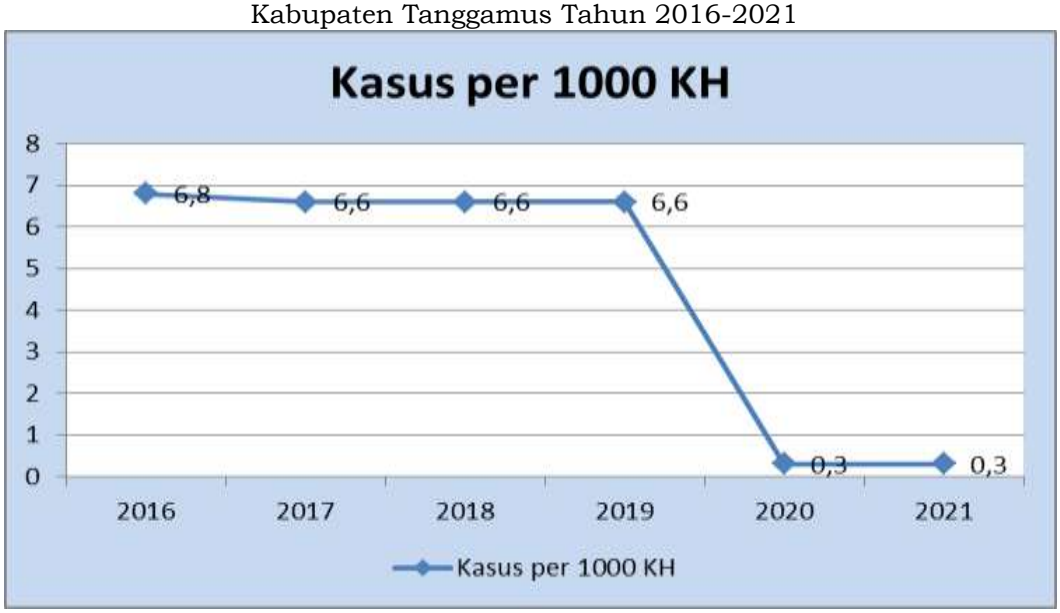
mengoptimalkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan *prevelansi stunting*.

B. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah jumlah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan dengan angka per 1.000 KH dalam satu tahun tertentu. Angka Kematian Balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanggamus dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini mengambarkan turunnya tingkat permasalahan kesehatan anak balita. Pada Tahun 2021 terjadi 3 kasus kematian balita yang terjadi pada 3 balita perempuan. Angka kematian balita sebesar 0,3 per 1.000 KH. Gambaran angka kematian balita per 1.000 KH Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II.29 Trend Angka Kematian Balita (AKBA) Per 1.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2022

C. Angka Kematian Ibu

Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok seorang ibu yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah. AKI

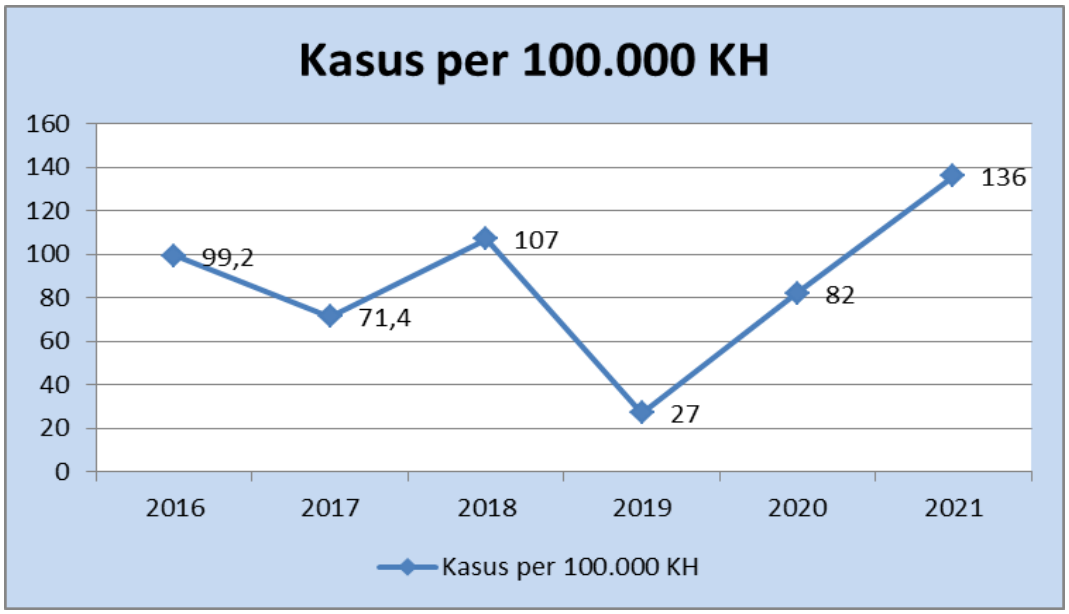
adalah banyaknya kematian ibu yang dinyatakan dalam per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada tahun yang sama. Suatu kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan pada perempuan.

Dari hasil pencatatan dan pelaporan di wilayah Kabupaten Tanggamus, AKI telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu, namun demikian upaya untuk mewujudkan target tujuan pembangunan kesehatan masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Upaya Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir senantiasa menjadi prioritas dalam pembangunan, dimana hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain pelatihan dukun bayi, pengembangan Puskesmas, pengembangan klinik kesehatan ibu dan anak, pembangunan rumah sakit, pondok bersalin desa (polindes) dan posyandu, penempatan bidan di desa, gerakan masyarakat untuk menyelamatkan ibu hamil dan bersalin, Audit Maternal Perinatal (AMP) dan pengadaan alat kesehatan berupa bidan KIT serta monitoring pelaksanaan kegiatan KIA dan pemasangan stiker ibu hamil. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan nifas.

Pada Tahun 2021 terjadi 14 kasus kematian ibu dengan AKI 136 per 100.000 KH meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 3 kasus kematian ibu dengan AKI 82 per 100.000 KH. Adapun penyebab kematian adalah perdarahan 35,7 %, hipertensi 21,5 %, gangguan system peredaran darah 7,1 % dan jantung 35,7 %. Masa kematian 35,7 % di masa nifas dan 64,3 % di masa kehamilan. Melihat penyebab kematian ibu diatas, perlu peningkatan upaya promotif pencegahan perdarahan dan hipertensi pada ibu hamil, peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah (Fe), peningkatan kunjungan ibu bersalin dan ibu nifas, serta monitoring pada ibu pasca persalinan yang mempunyai penyakit penyulit yang memungkinkan resiko penyebab kematian ibu nifas.

Gambaran AKI antara Tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

Gambar II.30 Trend Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 KH Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2022

D. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus

1. Tuberculosis

Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 577 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 367 kasus dan perempuan sebanyak 210 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 51 kasus. Dari seluruh kasus Tuberkulosis yang terdaftar dan mendapat pengobatan, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 185 orang dengan akan kesembuhan (*cure rate*) 33,6 % dan penderita yang melalukan pengobatan lengkap (*complete rate*) sebanyak 582 orang (69,7 %). Sedangkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan mendapat pengobatan lengkap atau *Success rate* TB sebesar 767 (91,9%) sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis sebanyak 49 jiwa (5,9 %).

2. HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular seksual yang mempunyai dampak social sangat berat bagi penderitanya, karena

dimasyarakat orang mengidap penyakit HIV/AIDS (ODHA) cenderungnya terkucilkan sebab itu penemuan penderita penyakit HIV/AIDS sangat sulit sekali. Jumlah kasus HIV di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 berjumlah 36 kasus, sedangkan untuk jumlah kasus baru AIDS sebanyak 2 orang. Jumlah kematian akibat AIDS 0 kasus.

3. Kusta

Pada Tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus ditemukan kasus baru yaitu 2 orang penderita kusta basah (Multi Basiler/MB). Penemuan kasus baru kusta termasuk sulit karena masih banyak penderita yang memilih bersembunyi atau disembunyikan oleh keluarga. Hal ini disebabkan adanya anggapan di masyarakat bahwa kusta adalah penyakit keturunan atau kutukan. Sedangkan kasus lama kusta yang tercatat sebanyak 12 kasus, yang terdiri atas 10 laki-laki dan 2 perempuan. Seluruh kasus tersebut merupakan kusta basah (MB) 12 orang. Angka prevalensi kusta di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 adalah 0,2 per 10.000 penduduk.

4. Demam Berdarah Dengue

Penyakit DBD di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh masih adanya daerah Endemis DBD, dan faktor mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga faktor penularan DBD akan semakin tinggi. Pada Tahun 2021 terjadi 124 kasus DBD, dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, Kasus tertinggi DBD ada di Kecamatan Negara Batin 30 kasus, Kecamatan Kota Agung 26 kasus dan Kecamatan Siring Betik 16 kasus. Ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi.

5. Malaria

Penyakit malaria di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh kondisi geografis dimana masih banyak tempat perindukan nyamuk penular malaria, disamping itu pencegahan dan penanggulangan malaria belum dilaksanakan secara komprehensif. Penanganan malaria hanya terbatas pada penemuan kasus secara pasif di Puskesmas dan pengobatan, belum melihat dari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit malaria tersebut diantaranya

adalah intervensi terhadap tempat perindukan vektor dan perbaikan perilaku masyarakat khususnya dalam pencegahan dan perilaku minum obat yang kurang terkontrol sehingga menyebabkan resistensi terhadap obat malaria.

Konfirmasi terhadap penderita dengan gejala klinis malaria (suspek) yang berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu indikator pelaksanaan program malaria. Konfirmasi dilakukan secara mikroskopis dan rapid diagnost Test (RDT). Pada Tahun 2021 terdapat 1 suspek yang dilakukan pemeriksaan sediaan darah tidak ada kasus positif malaria dan tidak ada kejadian kasus meninggal.

6. Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan Edukasi.

Pada Tahun 2021 sasaran penderita hipertensi sebanyak 120.278 jiwa, pelayanan telah diberikan pada 42.295 jiwa (35,1%), sehingga masih ada kesenjangan sebesar 64,9 %. Belum tercapainya terget pelayanan ini antara lain karena :

- Target/sasaran merupakan perkiraan/estimasi, belum ada sasaran riil penderita hipertensi.
- Belum terinventarisirnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Swasta/Klinik Swasta
- Tingkat kepatuhan Petugas dalam pencatatan dan pelaporan kurang.

Tabel II.55. Cakupan P2M dan PTM Kabupaten Tanggamus Tahun 2017- 2021

No.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tb-Paru	412	729	725	822	577
2	HIV-AIDS	7	37	43	31	36
3	Kusta	7	16	-	4	12
4	DBD	40	108	257	167	124

No.	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Malaria	1	-	8	2	1
6	Hipertensi	38.294	12.336	33.894	24.220	42.295

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2022.

E. Rasio Posyandu, Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagipembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang di lakukan melalui penimbangan balita.

Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor, kantor RW.

Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistem pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat menjangkau semua sasaran.

Tabel II.56. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah posyandu	672	686	689	690	693

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
2	Jumlah balita	55.504	54.742	53.966	44.445	43.043
3	Rasio per 100 balita	1,21	1.25	1,28	1,55	1,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

Rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 adalah 1,21 kemudian meningkat menjadi 1,25 pada tahun 2018. Rasio ini terus meningkat sehingga pada tahun 2021 rasio Posyandu per 100 Balita di Kabupaten Tanggamus menjadi 1 : 1,61.

2. Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu per Satuan Penduduk

Tabel II.57. Jumlah dan Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu Tahun 2017-2021 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Puskesmas	23	23	24	24	24
2	Jumlah Klinik	16	18	16	17	17
3	Jumlah Pustu	55	54	54	54	54
4	Jumlah Penduduk	586,624	592.603	598,299	603.706	645.807
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	1:25.505,4	1:25.765,3	1:24.929,1	1:25.154,4	1:26.908,6
6	Rasio Klinik per Jumlah Penduduk	1:36.664.0	1:32.922,4	1:37.393,7	1:35.512,1	1:30.752,7
7	Rasio Pustu per Jumlah Penduduk	1:10.665,9	1:10.974,1	1:11.079,6	1:11.179,7	1:11.959,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai program kesehatan yang dilaksanakan puskesmas. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar proses diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutu mudah di akses dan terjangkau oleh msyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu satu jenis fasilitas pelayanan tingkat pertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Tanggamus cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah Puskesmas dan Pustu. Berbeda halnya dengan rasio klinik terhadap jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel II.58. Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Oleh Kementerian Kesehatan RI Sampai Dengan Tahun 2021

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
I.	**Puskesmas Tidak Rawat Inap**	
	1.Puskesmas Wonosobo	Madya
	2. Puskesmas Sudimoro	Madya
	3. Puskesmas Kota Agung	Utama
	4. Puskesmas Pasar Simpang	Utama
	5. Puskesmas Negara Batin	Utama
	6. Puskesmas Kedaloman	Madya
	7. Puskesmas Sumberejo	Belum Terakreditasi
	8. Puskesmas Martanda	Belum Terakreditasi
II.	**Puskesmas Rawat Inap**	
	1. Puskesmas Putihdoh	Madya
	2.Puskesmas Antabrak	Madya
	3. Puskesmas Talang Padang	Utama
	4. Puskesmas Gisting	Madya
	5. Puskesmas Ngarip	Madya
	6. Puskesmas Siring Betik	Madya
	7. Puskesmas Air Naningan	Madya
	8. Puskesmas Sukaraja	Madya
	9. Puskesmas Kelumbayan	Madya
	10. Puskesmas Kelumbayan Barat	Madya
	11. Puskesmas Bulok Sukamara	Madya

NO	PUSKESMAS	AKREDITASI KEMENTERIAN KESEHATAN
	12. Puskesmas Sumanda	Madya
	13. Puskesmas Rantau Tijang	Madya
	14. Puskesmas Pulau Panggung	Madya
	15. Puskesmas Margoyoso	Madya
	16. Puskesmas Sanggi	Madya
	17. Puskesmas Way Nipah	Dasar
	18. Puskesmas Gunung Sari	Belum Terakreditasi

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2021, terdapat 4 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Utama, 18 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Madya, 1 Puskesmas yang mendapatkan akreditasi Dasar dan 3 Puskesmas yang Belum Terakreditasi.

3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh dibagi pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel II.59. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4	Jumlah Rumah Sakit Swasta	1	1	1	1	1

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
6	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807
7	Rasio per per Jumlah Penduduk	1:293.312	1:296.301	1:299.149	1:301853	1: 322.904

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2021

4. Rasio Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada.

Jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di Kabupaten Tanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata serta kualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Tabel II.60. Jumlah Tenaga Medis Dokter Sepesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi 2017-2021 di Kabupaten Tanggamus

NO	URAIAN	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Dokter	68	83	80	75	91
2	Jumlah Penduduk	586.624	592.603	598.299	603.706	645.807
3	Rasio Per per Jumlah Penduduk	1:8626,8	1:7139,8	1:7139,8	1:8049,4	1:7096,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga medis. Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.61. Jumlah Dokter Spesialis Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN				
		2017 (orang)	2018 (orang)	2019 (orang)	2020 (orang)	2021
1	Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	3

NO	DOKTER SPESIALIS	TAHUN				
		2017 (orang)	2018 (orang)	2019 (orang)	2020 (orang)	2021
2	Spesialis Kandungan	3	3	3	3	3
3	Spesialis Anak	2	2	2	2	2
4	Spesialis Bedah	1	1	1	1	2
5	Spesialis Anastesi	1	1	1	1	2
6	Specialis Radiologi	1	1	1	1	2
7	Specialis Orthopedi	1	1	1	1	0
8	Specialis Paru	0	1	1	1	1
9	Specialis Patologi	0	0	1	1	2

Sumber : RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus, 2022

Tabel II.62. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2021 Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TENAGA MEDIS	RASIO PER 100,000 PENDUDUK
[1]	[2]	[3]	[4]	(5=4/3)
1	Wonosobo	41638	2	4,80
2	Semaka	39839	1	2,51
3	Bandar Negeri Semuong	17431	2	11,47
4	Kota Agung	47554	31	65,19
5	Pematang Sawa	17986	2	11,12
6	Kota Agung Timur	21767	2	9,19
7	Kota Agung Barat	23036	2	8,68
8	Pulau Panggung	40658	3	7,38
9	Ulu Belu	44181	1	2,26
10	Air Naningan	31507	2	6,35
11	Talang Padang	53757	3	5,58
12	Sumberejo	36368	3	8,25
13	Gisting	43421	14	32,24

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH TENAGA MEDIS	RASIO PER 100,000 PENDUDUK
[1]	[2]	[3]	[4]	(5=4/3)
14	Gunung Alip	22342	1	4,48
15	Pugung	66758	4	5,99
16	Bulok	24348	2	8,21
17	Cukuh Balak	25061	2	7,98
18	Kelumbayan	12342	3	24,31
19	Limau	21852	3	13,73
20	Kelumbayan Barat	13961	2	14,33
	Jumlah	645.807	**85**	13,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

5. Analisis Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Berikut analisis ketercukupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun SDM Kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

Tabel II.63. Ketercukuapn Fasilitas Kesehatan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Dokter Umum	1 : 2.500	1:10.091	Kurang
2	Dokter Spesialis	1 :16.000	1 : 29.354	Kurang
3	Rumah Sakit	>1	>1	Cukup
4	Puskesmas	1 : 16000	1:26.908,6	Kurang
5	Puskesmas Pembantu	1 : 1500	1:11.959,4	Kurang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

6. Prevalensi Balita Stunting

Stunting merupakan bentuk kegagalan pertumbuhan akibat akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama mulai dai kehamilan sampai anak usia 24 bulan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dengan EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) tahun 2021. Berdasarkan SSGI, prevalensi stunting masih tinggi yaitu 25%. Sedangkan berdasarkan EPPGBM, prevalensi stunting Kabupaten Tanggamus sudah dibawah target penurunan stunting nasional yakni 3,31 sebagaimana tertera dalam Tabel berikut :

Tabel II.64. Prevalensi Stunting Kabupaten Tanggamus

TAHUN LOKUS	JUMLAH BALITA	STATUS PENDEK + SANGAT PENDEK	PREVALANSI STUNTING
2018	53.892	2.089	4,87
2019	49.873	1.675	3,80
2020	43.430	2.019	5,18
2021	41.442	1.371	3,31

Sumber : Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, 2021.

SSGI merupakan sebuah riset yang dilakukan sebagai amanat yang diberikan kepada Kementrian Kesehatan untuk mempublikasikan data stunting per tahun yang merupakan salah satu bentuk pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting. Pengukuran dilakukan kepada sampel balita sebanyak 10 balita di setiap Blok Sensus (BS), dari 33 BS didapatkan 216 sampel dengan hasil sebanyak 54 balita mengalami stunting (25%). Indikator dalam penentuan stunting yaitu TB/U atau PB/U. EPPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan menggambarkan tiap individu yang dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil penimbangan dan pengukuran balita di posyandu.

Hasil SSGI digunakan untuk pengambilan Kebijakan terkait stunting sedangkan hasil EPPGBM digunakan untuk intervensi stunting yang akan diberikan.

Strategi intervensi penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus adalah :

- Pendataan cepat stunting di 10 desa lokus Kabupaten Tanggamus;
- Menjalin komitmen dan dukungan lintas program dan lintas sektor di tingkat kabupaten dan kecamatan ;
- Sosialisasi dan pelaksanaan 1000 hari pertama kehidupan kepada lintas sektor dan masyarakat ;
- Program Jaminan Persalinan;
- Pelaksanaan Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA);

7. Kasus Covid-19 di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV), jenis baru coronavirus yang pada manusia menyebabkan penyakit mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan 2019-nCov, yaitu Coronavirus Disease (COVID-19).

Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Seseorang juga bisa terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.
Gejala umum berupa demam ≥38°C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

RKPD Kabupaten Tanggamus 2023

Jumlah Kasus Covid-19 Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 sebanyak 2.238 orang. Jumlah Kasus Sembuh sebanyak 2.114 Orang (94,46 %) dan meningggal 124 Orang (5,54 %).

Tabel II.65. Kasus Covid-19 Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	Tanggamus	2.238	2.114	124	1.634,24	122,12
TOTAL		2.238	2.114	124	1.634,24	122,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022.
Keterangan : Kasus Covid-19 Pertanggal 31 Desember 2021

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan upaya terpadu dalam rangka kegiatan :

a. Penguatan 3 T (Tracing , Testing dan Treatment)
b. Percepatan Vaksinasi
c. Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Kebijakan dalam penanganan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati yaitu :

- Surat Edaran No. 360/766/01/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Pencegahan Covid-19 dilevel pekon/kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tanggamus;
- Edaran Nomor 420/758/20/2022 tentang Penghentian Sementara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas diKabupaten Tanggamus;
- SE Bupati Nomor 360/4924/25/2021tentang Vaksinasi Terpadu.

Sesuai SE Bupati tentang Percepatan Vaksinasi dilakukan metode keterpaduan mulai dari distribusi vaksin, pelaksanaan dan penentuan lokus dikoordinasikan melalui Dinkes bersama Polri dan TNI. Disamping itu, untuk memantau keberhasilan pelaksanaan program vaksinasi, dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi oleh OPD berdasarkan Wilayah binaan.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemantapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan untuk mendukung distribusi lalu lintas barang maupun manusia dan membentuk struktur ruang wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur memiliki 2 (dua) sisi yaitu : tujuan pembangunan dan dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum.

Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang kondisi jalan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.66. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	KEADAAN JALAN	2018		2019		2020		2021	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
I	**Panjang Tiap Kondisi Jalan**								
	1. Baik	426,93	31,88	468,91	35,01	255,09	19,05	395,67	29,54
	2. Sedang	197,92	14,78	226	16,87	249,07	18,60	288,64	21,55
	3. Rusak Ringan	237,58	17,74	541	40,39	122,76	9,17	235,05	17,55
	4. Rusak Berat	476,94	35,61	103,46	7,72	712,45	53,19	420,01	31,36
	Jumlah	1339,37		1339,37		1339,37		1339,37	
	Jalan Mantap	**624,85**	**46,65**	**694,91**	**51,88**	**504,16**	**37,64**	**684,31**	**51,09**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022.

Dari tabel diatas diketahui bahwa persentase kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten mengalami fluktuasi. Persentase jalan mantap mengalami peningkatan dari 46,65% pada tahun 2018 menjadi 51,88% di tahun 2019. Namun pada tahun 2020, persentase jalan mantap semakin menurun menjadi 37,64%. Hal ini dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2020 jalan dengan kondisi rusak berat semakin bertambah menjadi 712,45 Km atau sebesar 53,19%. Baru di tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 13,45% menjadi 684,31 Km (51,09%) jalan yang masuk dalam kategori mantap. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terdapat keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan sebagai dampak dari refocusing anggaran akibat pandemi Covid 19, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelalaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan total panjang jembatan Kabupaten.

Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2021 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 44 Km dibagi dengan panjang jembatan Kabupaten yakni 148 Km dengan persentase 29,73%. Jembatan berkondisi baik ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 16,89%. Adapun kondisi infrastruktur jalan se-Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2021 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel II.67. Kondisi Infrastruktur Jembatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	KEADAAN JEMBATAN	2018		2019		2020		2021	
		Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
I	**Kondisi Jembatan**								
	1. Baik	22	14,86%	25	16,89%	25	16,89%	44	29,73%
	2. Sedang	50	33,78%	50	33,78%	49	33,11%	40	27,03%
	3. Rusak Ringan	64	43,24%	62	41,89%	63	42,57%	53	35,81%
	4. Rusak Berat	12	8,11%	11	7,43%	11	7,43%	11	7,43%
	Jumlah	**148**		**148**		**148**		**148**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022.

2. Infrastruktur Irigasi

Pengelolaan irigasi merupakan salah satu sektor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian, terutama dalam rangka meningkatkan produksi pangan khususnya beras. Namun dalam perkembangannya, kinerja pengelolaan irigasi telah mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kegiatan perawatan, perbaikan atau pemeliharaan jaringan irigasi yang tertunda (*divert maintenance*), kerusakan karena ulah manusia dan bencana alam. Keterbatasan dana, fasilitas, petugas operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah untuk pengelolaan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat juga berpotensi menjadi penyebab penurunan kondisi jaringan irigasi dan pada tingkat lanjut dapat menyebabkan terganggungnya fungsi jaringan irigasi dalam pendistribusian air, tentunya kondisi tersebut akan memberikan konsekuensi yang lebih mahal karena jaringan irigasi tersebut harus direhabilitasi.

Berikut ini adalah tabel rincian kondisi irigasi di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.68. Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	KEADAAN IRIGASI	2018		2019		2020		2021	
		Panjang (m)	%	Panjang (m)	%	Panjang (m)	%	Panjang (m)	%
I	**Kondisi Irigasi**								
	1. Baik	41.522,15	28,28	42.524,15	28,96	44.624,04	30,39	54.604,00	37,19
	2. Rusak Ringan	33.412,24	22,75	33.321,67	22,69	34.285,11	23,35	34.081,53	23,21
	3. Rusak Sedang	49.453,42	33,68	49.941,42	34,01	48.510,38	33,04	39.690,00	27,03
	4. Rusak Berat	22.454,00	15,29	21.054,57	14,34	19.422,28	13,23	18.466,28	12,58
	Jumlah	**146.841,81**		**146.841,81**		**146.841,81**		**146.841,81**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022.

Dari tabel di atas, terdata total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Tanggamus mulai tahun 2018-2021 sepanjang 146.841,81 meter. Kondisi irigasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2018, irigasi dengan kondisi baik sepanjang 41.522,15 meter atau sebesar 28,28% dan terus mengalami peningkatan hingga sepanjang 54.604 meter atau sebesar 37,19% di tahun 2021. Namun demikian, meskipun terus mengalami peningkatan, irigasi dalam kondisi rusak sedang sampai berat masih cukup besar, yakni sepanjang 58.156,28 meter atau sebesar 39,6%.

3. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel II.69. Rumah Layak Huni Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	2018		2019		2020		2021	
		Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
I	**Pembangunan Rumah Layak Huni**								
	1. Jumlah Rumah yang ditangani	455	3,85	1.336	11,75	2.151	21,44	2.433	30,87
	2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	11.368	96,15	10.032	88,25	7.881	78,56	5.448	69,13

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 455 rumah rumah yang ditangani. Persentase rumah yang tertangani terus mengalami trend yang meningkat di tiap tahunnya. Hal ini berdampak terhadap penurunan rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanggamus.

Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Kegiatan penanganan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar PERMENPERA No. 22/PERMEN/M/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) rumah layak huni (RLH), rumah dikatakan tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Dalam aspek penyediaan sarana pemukiman yaitu hunian, tantangan yang dihadapi adalah mencukupi kebutuhan hunian baru bagi penduduk

Kabupaten Tanggamus. Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan pemukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan-kawasan pemukiman yang padat.

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar pemukiman khususnya kawasan pemukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan pemukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar pemukiman yang ada di lingkungannya.

Berikut ini adalah tabel penjelasan tentang perkembangan capaian indikator perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.70. Perkembangan capaian Indikator Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio rumah layak huni	52,0%	54,1%	56,2%	58,7%	60,0%
2	Rasio permukiman layak huni	70,0%	75,0%	76,7%	78,0%	78,5%
3	Persentase pemukiman yang tertata	70,0%	73,0%	74,0%	75,0%	75,5%
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	60,0%	63,0%	65,0%	67,0%	67,5%
5	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	72,0%	73,0%	74,1%	75,0%	75,2%
6	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	60,0%	55,0%	51,0%	51,5%	52,0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen). Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kondisi ketentraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Perkembangan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dan Keberadaan ancaman terorisme, konflik SARA di Kabupaten Tanggamus disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.71. Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	80%	85%	70%	80%	87%
2	Keberadaan ancaman terorisme, konflik SARA	0%	0%	25%	0%	0%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2022

A. Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus hingga saat ini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan

persentase PMKS skala kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

Tabel II.72. Perkembangan Indikator Sosial Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PMKS yang ditangani	70	75	86	96,21	99,91
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif	65	73	75	78	71

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan capaian kinerja pelayanan urusan sosial di Kabupaten Tanggamus menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Yang perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi diperlukan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara umum mengingat kompleksnya permasalahan ini. Berikut data Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Kabupaten Tanggamus bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus:

Tabel II.73. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	JENIS PMKS	JUMLAH PERMASALAHAN				KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	10	7	0	0	Bidang Rehsos
2	Anak Telantar (AT)	73	67	300	466	Bidang Rehsos
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3	3	32	3	Bidang Rehsos
4	Anak Jalanan	26	23	0	0	Bidang Rehsos
5	Anak Dengan Kesabilitasan (ADK)	77	70	0	0	Bidang Rehsos
6	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan Salah	18	18	0	0	Bidang Rehsos
7	Anak yang Memerlukan kebutuhan khusus	10	10	0	0	Bidang Rehsos
8	Lanjut Usia Terlantar	2903	1.903	1806	1792	Bidang Rehsos
9	Penyandang Disabilitas	978	2.086	744	1528	Bidang Rehsos
10	Tuna Susila	0	0	0	0	Bidang Rehsos
11	Gelandangan	8	5	1	4	Bidang Rehsos

NO	JENIS PMKS	JUMLAH PERMASALAHAN				KETERANGAN
		2018	2019	2020	2021	
12	Pengemis	1	2	0	0	Bidang Rehsos
13	Pemulung	2	2	0	0	Bidang Rehsos
14	Kelompok Minoritas	1	1	0	0	Bidang Rehsos
15	Berkas warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	1	1	0	0	Bidang Rehsos
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	0	0	Bidang Rehsos
17	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	2	5	0	0	Bidang Rehsos
18	Korban Trafiking	4	0	0	0	Bidang Rehsos
19	Korban Tindak Kekerasan	18	10	0	0	Bidang Bansos
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	50	50	0	0	Bidang Pemberdayaan
21	Korban Bencana alam	675	151	603	8	Bidang Bansos
22	Korban Bencana Sosial	1	7	69	76	Bidang Bansos
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	60	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
24	Fakir Miskin	82.159	81.325	82.675	82.675	Bidang Pengembangan
25	Komunitas Adat terpencil	0	0	0	0	Bidang Pemberdayaan
26	Keluarga Bermasalah Sosial Pisikologis	60	60	100	60	Bidang Pemberdayaan
	Jumlah Jiwa	**87.140**	**85.806**	**86.330**	**86.612**	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkaitan erat dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan percepatan pertumbuhan lapangan kerja. Laju pertumbuhan pembangunan ketenagakerjaan, merupakan bagian dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan keahlian serta rasa percaya diri masyarakat melalui pendidikan dan latihan serta pembinaan tenaga kerja yang terprogram.

Berikut capaian kinerja urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan pada tahun 2021.

Tabel II.74. Perkembangan Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pencari Kerja	4.220	4.758	4.007	3.031	3.649
2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	94,92%	95,50%	95,90%	59.72%	96,7%
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 %	100 %	100%	0%	0%
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 %	100 %	100%	0%	0%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebanyak 4.220 orang meningkat menjadi 4.758 orang pada tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 4.007 orang (2019) dan 3.031 orang (2020). Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 3.649 orang. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2017 sebesar 94,92% dan terus meningkat hingga mencapai 95,90% pada tahun 2019. Namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 59,72%. Hal ini merupakan dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020. Sedangkan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi serta besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 0%. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana terutama disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang memaksa Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan refocusing APBD sehingga kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan pelaksanaannya menjadi terhambat.

Sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Tanggamus menghadapi permasalahan mengatasi pengaguran yang ada di Kabupaten Tanggamus, sementara ini pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus melakukan kegiatan pelatihan kerja untuk masyarakat yang berpontensi untuk bekerja.

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan

gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Kualitas SDM perempuan harus tetap perlu ditingkatkan, terutama dalam hal: (1) perempuan akan menjadi mitra kerja aktif bagi laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi,dan politik; dan (2) perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerus karena fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan SDM di masa mendatang. Berikut perkembangan capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2021.

Tabel II.75. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

NO	INDIKATOR	Jumlah Kasus			
		2018	2019	2020	2021
1	Kekerasan Terahadap Anak	34	23	22	33
2	Kekerasan Terahadap Perempuan	16	10	1	2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus,2022.

Tabel II.76. Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2018	2019	2020	2021
1	Persentase perempuan yang meningkat pendapatannya dalam keluarga	51%	62,1%	87,73%	96,57%
2	Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	100%	100%	100%	100%
3	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	47%	51,84%	53,63	55,45%
4	Nilai Layak Anak	647	729,90	776	959
5	persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	100%	100%	100%	100%
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.90	56.97	56.80	56.39
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.140	90.880	91.130	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus,2022.

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa Persentase perempuan yang meningkat pendapatannya dalam keluarga tahun 2018 sebesar 51% meningkat menjadi 96,57% di tahun 2021. Persentase kekerasan terhadap perempuan yang tertangani meningkat menjadi 100% pada tahun 2021. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah meingkat menjadi 55,45% pada tahun 2021. Nilai Layak Anak pada tahun 2018 sebesar 647 dan meningkat tajam pada tahun 2021 mencapai 959. Sedangkan persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

2.1.3.2.3. Pangan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Kecukupan pangan merupakan salah satu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta kedaulatan suatu bangsa. Pemenuhan hak atas pangan menurut amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pangan daerah merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang selalu meningkat dirasakan sangat perlu memperhatikan stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel II.77. Perkembangan Indikator Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ketersediaan pangan utama (ton)	147.689	201.846	366.248	225.338	191.426
2	Ketersediaan energy dan protein perkapita	85%	88%	105%	141%	158%
3	Pola Pangan Harapan (PPH)	83,28	83,50	84,60	85,20	86,40

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura KabupatenTanggamus, 2022.

Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Dari tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama selalu meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 hingga menjadi 191.426 ton di tahun 2021. Peningkatan ini merupakan dampak dari dilaksanakannya Program Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi yang dimulai sejak tahun 2016. Sedangkan penurunan ketersediaan pangan utama sejak tahun 2020 disebabkan terjadinya pengurangan luas baku sawah berdasarkan data pengamatan segmen dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA). Terkait dengan persentase ketersediaan energi dan protein per Kapita pada tahun 2017 sebesar 85% dan terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2021 mencapai 158%. Demikian pula halnya dengan Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2017 PPH di Kabupaten Tanggamus sebesar 83,28 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 86,40 di tahun 2021.

2.1.3.2.4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.78. Perkembangan Indikator Pertanahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase luas lahan bersertifikat	50%	58%	62%	65%	66,5%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tanggamus ditahun 2017 sebesar 50% dan terus meningkat hingga mencapai 66,5% ditahun 2021.

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2007 telah mengembangkan Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) untuk 30 ibu kota provinsi. Selain itu pada tahun 2009 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan *Dannish International Development Agency* (DANIDA) juga mulai mengembangkan indeks lingkungan berbasis provinsi yang pada dasarnya merupakan modifikasi dari EPI (*Environmental Performance Index*). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihakdalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Selain IKLH, masalah yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Tanggamus adalah masalah persampahan. Pemerintaah Kabupaten Tanggamus sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengumpulan data timbulan dan komposisi sampah, pengurangan sampah di sumber dan penanganan oleh masyarakat. Hal ini tentuya mempengaruhi kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karena itu pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Tanggamus meluncurkan sebuah aplikasi yang diberi nama Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus Ramah Amanah Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU). SIPESTA RATU merupakan Aplikasi yang dibangun untuk mengatasi permasalahan pengumpulan data sampah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain itu SIPESTA RATU juga bertujuan untuk mendapatkan data sampah guna mengetahui persentase sampah terkelola yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk

menentukan target dan strategi penanganan sampah kedepannya. Berikut data capaian pengurangan dan penanganan sampah dalam Aplikasi SIPESTA RATU :

Tabel II.79. Capaian Pengurangan Dan Penanganan Sampah Tahun 2021

No	Indikator	Capaian		Jenis Sampah	
		Kg	%	Organik (Kg)	Anorganik (Kg)
1.	Timbulan	22.002		6.691	15.311
2.	Pemanfaatan	14.215	64,61%	4.695	9.520
3.	Tidak Termanfaatkan	7.787	35,39%	1.996	5.791

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2022

Selain SIPESTA RATU, Pemerintah Kabupaten Tanggamus juga mengembangkan inovasi lain dalam rangka optimalisasi pengelolaan persampahan yakni Eco ENZYME. Eco ENZYME merupakan salah satu solusi pengolahan sampah organik menjadi produk yang sangat bermanfaat baik untuk kehidupan sehari-hari, kesehatan, air, udara dan tanah serta lahan pertanian dengan sistem pembuatan yang sangat mudah dan sederhana. 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik yang dapat menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan. Pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana. Dengan Eco ENZYME, sebagian besar sampah dapat diolah dan mengurangi beban TPA.

Selain yang telah disebutkan di atas, capaian kinerja lingkungan hidup Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.80. Perkembangan Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terselenggaranya KLHS	-	Ada	-		

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	untuk K/R/P tingkat daerahkabupaten				-	Ada
4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten	66,5	66,5	62,5	63,73	63,42
5	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	59	60	50	53,33	57,92
6	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara	0 – 50	0 - 50	0-50	83,11	84,22
7	Hasil Pengukuran Kualitas tutupan lahan .	30	30	30	53,37	34,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup KabupatenTanggamus, 2021

Berdasarkan data diatas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus terjadi fluktuatif dimana pada tahun 2017 masuk kedalam klasifikasi Kurang.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Informasi tentang jumlah penduduk serta komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan dan lain-lain penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, social, politik, lingkungan dan lainnya yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia.

Perkembangan capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.81. Perkembangan Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	58,76%	61,35%	62,88%	66,17%	74,09%
2	Rasio bayi berakte kelahiran	7,81 %	3,60%	32,78%	29,08%	99,29%
3	Rasio pasangan berakte nikah	0,75 %	0,89%	10,99%	20,11%	100,00%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	78,39 %	84,71%	86,71%	91,81%	104,23%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	84,62%	95,04%	103,37%	92,72%	102,90%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017, rasio penduduk berKTP per satuan penduduk di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 58,76%. Rasio ini terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 74,09% pada tahun 2021.

Demikian pula halnya dengan rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah maupun cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang setiap tahun mengalami trend positif (meningkat). Sedangkan capaian untuk Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran melebihi 100%.

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah Desa.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengenai pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan peranan desa dan kelurahan. Karena desa dan kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana desa dan kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan serta pelayanan. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran desa dan kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada seperti dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ditambah dengan pembangunan fisik yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perkembangan capaian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.82. Perkembangan Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayan masyarakat(LPM)	58%	60%	65%	70%	85%	85%
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68%	70%	78%	85%	90%	95%
3	Persentase LSM aktif	66%	70%	75%	78%	-	-
4	Persentase LPM Berprestasi	57%	60%	78%	80%	-	-
5	Persentase PKK aktif	66%	70%	75%	85%	90%	100%
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayan masyarakat	60%	65%	75%	78%	80%	80%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum indikator terkait pemberdayaan masyarakat dan desa semakin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes). Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk itu pendirian BUM Desa harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).

Tabel II.83. Data Badan Usaha Milik Desa (Bum-Des) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUM-DES MENURUT JENIS USAHA					
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH
1	Air Naningan	6	2		1		9
2	Bulok	3		1		1	5
3	Bandar Negeri Semuong	1					1
4	Cukuh Balak	2	2		1		5
5	Gisting	5	2			4	11
6	Gunung Alip	2	1		2		5
7	Kota Agung Timur	4				1	5
8	Kelumbayan	4					4
9	Kelumbayan Barat	2	2				4
10	Kota Agung	5					5
11	Kotaagung	5	2				7

NO	KECAMATAN	JUMLAH BUM-DES MENURUT JENIS USAHA					
		TOKO PERTANIAN, TOKO, PERDAGANGAN, PERBENGKELAN	SIMPAN PINJAM	HOME INDUSTRI	PARIWISATA	PENGOLAHAN SAMPAH	JUMLAH
	Barat						
12	Pugung	6					6
13	Pematang Sawa	2					2
14	Pulau Panggung	4	1				5
15	Semaka	21	1				22
16	Sumberejo	9	1		2		12
17	Talang Padang	14	4				18
18	Wonosobo	10	5				15
19	Limau	4	1		1		6
20	Ulu Belu	4					4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, 2022

Disamping hal yang telah disebutkan di atas, keberhasilan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari indikator Indeks Desa Membangun (IDM). Perkembangan capaian IDM Kabupaten Tanggamus untuk periode tahun 2018-2021 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel II.84. Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pekon Sangat Tertinggal	25	37	4	0	0
2	Jumlah Pekon Tertinggal	173	174	53	24	6
3	Jumlah Pekon Berkembang	95	81	218	236	242
4	Jumlah Pekon Maju	6	7	24	39	51
5	Jumlah Pekon Mandiri	0	0	0	0	0
	Total Pekon	**299**	**299**	**299**	**299**	**299**

Sumber : Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, 2022.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanggamus pada tahun 2017 terdapat 25 desa/pekon sangat tertinggal, 173 desa/pekon tertinggal dan hanya terdapat 6 pekon dengan status maju. Kondisi ini semakin memburuk di tahun 2018, dimana terjadi peningkatan jumlah pekon sangat tertinggal menjadi 37 pekon dan jumlah pekon tertinggal menjadi 174 pekon. Namun sejak tahun 2019, IDM Kabupaten Tanggamus mengalami kemajuan yang signifikan, dimana jumlah pekon sangat tertinggal hanya tersisa 4 pekon dan pekon tertinggal berjumlah 53

pekon. Sejak tahun 2019, IDM Kabupaten Tanggamus semakin menunjukkan peningkatan, dimana sudah tidak ada lagi pekon sangat tertinggal di Kabupaten Tanggamus. Di tahun 2021, jumlah pekon berkembang sudah mencapai 242 pekon dan pekon dengan status maju sudah mencapai 51 pekon.

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Sasaran dari program Keluarga Berencana, diarahkan : menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kematian total, menurunnya PUS yang ingin ber KB namun tidak terlayani, meningkatan penggunaan metode kontrasepsi efektif dan efisien, meningkatnya usia kawin pertama perempuan menjadi 21 tahun, meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, serta meningkatnya jumlah institusi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Capaian kinerja pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.85. Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,72 %	2,5 %	2,4%	1,72%	1,15%
2	Persentase akseptor KB MKJP	28,12 %	30,9 %	33.95%	34,26%	38,39%
3	Persentase angka kelahiran pada remaja	34, 1%	32,09%	13,11%	0,0037%	0,0021%

Sumber : Dinas Perberdayaan Perempuan,Perlindunagan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, 2022.

2.1.3.2.9. Perhubungan

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dalam Kabupaten Tanggamus, maka penyediaan sarana dan prasarana perhubungan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, karena secara langsung maupun tidak langsung akan dapat memperlancar arus barang, jasa dan orang.

Sistem transportasi haruslah dikembangkan dan dikelola secara terpadu untuk mewujudkan sistem distribusi yang mantap dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Selain jalan dalam kondisi mantap, sarana dan prasarana perhubungan lainnya sangat berperan penting terhadap lancarnya mobilitas barang, penumpang dan jasa termasuk informasi antar kecamatan maupun antar daerah. Capaian kinerja perhubungan Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.86. Perkembangan Indikator Perhubungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	6	6	6	6	6
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	70%	73%	4,3%	71,13%	74,20
3	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	1300	1350	1450	1570	16.400
4	Jumlah kecelakaan transportasi	239	226	232	70	99

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus dan Polres Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2021 jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 6 buah/lokasi.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2017 perentase kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 70% meningkat 3 poin di tahun 2018, namun terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2019 menjadi 4,3%. Hal ini disebabkan tidak beroperasinya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di tahun 2019. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan KIR kembali meningkat menjadi 71,13% dan di tahun 2021 mencapai sebesar 74,20%. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama tahun 2017 sebanyak 1300 kemudian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun

sampai dengan tahun 2021 sebesar 16.400. Jumlah kejadian kecelakan transportasi mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kasus kejadian kecelakaana transportasi yang paling rendah selama lima tahun terakhir sebanyak 70 kejadian di tahun 2020.

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia.

Perkembangan capaian indikator komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.87. Perkembangan Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	58%	60%	63%	24%	26%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	68%	70%	75%	63%	66%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2021

Berdasarkan data dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan pada Kabupaten Tanggamus memiliki trend positif. Pada tahun 2016 cakupan KIM hanya sebesr 58% dan meningkat menjadi 63% pada tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Cakupan Layanan Telekomunikasi pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti bahwa cakupan wilayah yang ter*coverage* oleh layanan telekomunikasi di Kabupaten Tanggamus semakin luas.

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah. UMKM aktif adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin/kontinyu didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha.

Sasaran Revitalisasi Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi adalah mewujudkan kesadaran pengurus, pengelola dan anggota dalam mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi Aktif; dan Koperasi yang lebih besar.

Perkembangan capaian indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.88. Perkembangan Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi aktif	40,48%	40,91%	42,73	50,73%	37,45%
2	Persentase UKM non BPR/LKM	50,74%	53,75%	96,27	96,27%	96,30%

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	aktif					
3	Persentase BPR/LKM aktif	80,95%	81,82%	3,73	3,73%	4,21%
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,69%	99,71%	98,61%	99,01%	99,30%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, 2022

Dari tabel di atas, persentase koperasi aktif di Kabupaten Tanggamus menunjukkan tren yang positif. Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 mencapai 40.48% dan terus meningkat hingga mencapai 50,73% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021, persentase koperasi aktif mengalami penurunan menjadi 37,45%. Demikian pula terjadi pada Persentase UKM non BPR/LKM aktif terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021. Untuk BPR/LKM aktif sejak tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sangat drastis menjadi 4,21%. Sedangkan persentase untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada tahun 2017 sebesar 99,69% kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 99,71%. Namun di tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 98,61% dan meningkat kembali menjadi 99,30% di tahun 2021.

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untukmenghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.

Capaian kinerja penanaman modal Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.89. Perkembangan Indikator Penanaman Modal Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah investor	14	13	13	13	13

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	berskala nasional (PMDN/PMA)					
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	8,65 T	6,39 T	9,17 T	9,64 T	14,45 T
3	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN	4 %	-26,13 %	43,46 %	5.15 %	49,88 %

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Jumlah investor berskala nasional maupun daya serap tenaga kerja menunjukkan peningkatan. Demikian pula halnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2017 Rp.8.450.569.360.181 dan nilai investasi ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 mencapai 14.449.625.007.118.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan kepemudaan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Secara kelembagaan sudah ada pola-pola sebagai langkah untuk mengembangkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan, hanya saja yang perlu diperhatikan secara terus menerus adalah memberikan kesempatan pemuda dalam memperoleh pendidikan dan pelatihan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda. Disamping diarahkan untuk berkiprah dalam kesempatan berusaha yang tidak kalah penting adalah memberikan pembekalan pemahaman yang baik agar mereka mampu meningkatkan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

Secara internasional telah diakui bahwa olah raga mempunyai peran penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping mampu meningkatkan kualitas fisik dan kesehatan juga peningkatan sportifitas, disiplin dan semangat juang yang kesemuanya merupakan elemen penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keunggulan daya saing. Pembinaan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan membentuk watak dan kepribadian, disiplin sportivitas dan etos kerja yang tinggi serta peningkatan prestasi sehingga mampu membawa harum nama bangsa.

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.90. Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,25%	35%	40%	42%	52%
2	Cakupan pembinaan olahraga	48%	60%	78%	78%	80%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2021

Data yang tersaji menggambarkan masih perlu dioptimalkannya kinerja dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus. Rendahnya persentase organisasi pemuda yang aktif mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan masih kurang.

Sedangkan dari segi cakupan pembinaan olahraga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Tanggamus sebesar 48% dan meningkat hingga 80% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Tanggamus terhadap jumlah cabang olahraga yang terdaftar semakin banyak.

2.1.3.2.14. Statistik

Pengembangan statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.Berikut capaian indikator statistik Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.91. Perkembangan Indikator Statistik Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku"PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, 2022

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2017 s.d 2021 telah terpenuhi. Diharapkan keberadaan dua dokumen tersebut dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.

2.1.3.2.15. Persandian

Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan pada industri teknologi informasi mengklaim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu.

Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan

teknologi. Capaian indikator persandian Kabupaten Tanggamus tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.92. Perkembangan Indikator Persandian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	10	12	12	12	12

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional. Berikut perkembangan capaian indikator kebudayaan Kabupaten Tanggamus tahun 2016-2020.

Tabel II.93. Perkembangan Indikator Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	0
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	66%	66%	66%	67%	67%
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2021

Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2016-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah

memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya.

2.1.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, peneitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka, yang bertujuan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan menyebarluaskan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.Berikut perkembangan capaianindikator perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020.

Tabel II.94. Perkembangan Indikator Perpustakaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	5340	7771	7136	4992	2.879
2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	1200	1500	1595	1632	1439
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	1660	1607	2465	7230	561
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis,dan penilai yang memiliki sertifikat	6%	6%	6%	6%	6%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2017 mencapai 5340 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi 7136 orang. Namun pada tahun 2020 dan 2021, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan masing-masing menjadi 4992 dan 2879 orang.

Demikian pula halnya dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun, jumlah koleksi judul buku perpustakaan serta jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat yang sejak

tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Namun di tahun 2021 mengalami penurunan.

Setelah ditetapkannya Kabupaten Tanggamus sebagai Kabupaten Literasi berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.56/34/08/2020 dan sebagai Kabupaten Penerima Manfaat Transportasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor : 2675/1/PPM.00.00/III/2020 tentang Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, maka dalam rangka mendukung Program Gubernur Lampung, Kabupaten Tanggamus melaksanakan program literasi dan program *Smart Village* yang pada tahun 2021 akan dilaksnakan pada 5 (lima) pekon yaitu:

- Perpustakaan Rumah Baca Berlian Pekon Kanoman Kecamatan Semaka.
- Perpustakaan Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat.
- Perpustakaan Pekon Suka Negeri Jaya Kecamatan Talang Padang.
- Perpustakaan Jalosi Sanak Negeri Pekon Air Kubang Kecamatan Air Naningan.
- Perpustakaan Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting.

Tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub system sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Perubahan paradigm perpustakaan berbasisi inklusi sosial adalah mentransformasikan fungsi-fungsi perpustakaan menjadi :

1. Koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan tidak lagi menjadi koleksi yang usang dan jarang dalam pemanfaatannya oleh masyarakat

karena dalam proses pengadaan bahan pustaka tidak memperhatikan kebutuhan informasi kelompok masyarakat yang dilayaninya, namun beralih menjadi wahana rujukan informasi untuk pencarian solusi permasalahan karena proses pengadaan koleksi bahan pustaka yang mementingkan kebutuhan informasi pengguna dalam rumus pengadaanya.

2. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat menyimpan buku-buku dalam rak-rak panjang karena perpustakaan hadir sebagai fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan informasi yang relevan.
3. Perpustakaan tidak lagi menjadi tempat yang sunyi karena jarang ada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan namun keberadaan perpustakaan sendiri sudahlah menjadi makerspace atau tempat masyarakat mengembangkan potensi diri (*makerspace*).
4. Perpustakaan berubah dari yang awalnya sebuah lembaga yang minim sentuhan teknologi informasi menjadi perpustakaan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melayani masyarakat yang berkedudukan jauh dari lokasi perpustakaan. Untuk bisa mengakses sumberdaya informasi yang ada diperpustakaan sudahlah bukan menjadi barang yang sulit karena perpustakaan bias melayani masyarakat yang berlokasi jauh dari lokasi perpustakaan dengan menggunakan internet sebagai media hubungnya.
5. Merubah paradigma pustakawan yang pasif menjadi perpustakaan aktif yang berperan sebagai agen informasi. Pustakawan dituntut untuk selalu bisa menjembatani antara masyarakat dengan informasi yang dibutuhkannya (Konsep pustakawan bergerak). Pustakawan menjadi sosok sentral yang menjadi penentu berhasil ataupun tidaknya program ini. Ledakan informasi yang pesat menuntut pustakawan untuk berkolaborasi atau bekerja tidak hanya dengan sesama pustakawan saja, melainkan menuntut pustakawan untuk bekerjasama dengan bidang profesi lain dalam mengelola informasi.

2.1.3.2.18. Kearsipan

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah melalui pengelolaan kearsipan secara baik dan efisien. Hal ini mengingat bahwa

arsip sebagai sumber informasi otentik khususnya terkait dengan bukti kinerja pemerintah dalam melaksanaan pembangunan.

Kinerja kearsipan ini terwakili oleh indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan Peningkatan SDM pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip adalah sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, dan ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsup merupakan alat bukti yang sah.

Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi serta bernilai kesejarahan, apabila terekam informasinya (*recorded of information*) pada arsip dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK, maka arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut wajib diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan atau pemanfaatannya untuk publik. Keberadaan arsip-arsip kesejarahan atau atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara. Berikut ini disajikan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku dan kondisi SDM kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai Tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel II.95. Perkembangan Indikator Kearsipan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25%	30%	40%	40%	40%
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	1	2	2	2

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.3 Fokus Urusan Layanan Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukungoleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri

jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan.

Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, dan petualangan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus.Perkembangan capaian indikator pariwisata Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.96. Perkembangan Indikator Pariwisata Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Kunjungan wisata	75%	75%	120%	17%	45%
2	Lama kunjungan Wisata	193 hari	200 hari	240 hari	35 hari	90 hari
3	PAD sektor pariwisata	0.008%	0.132%	0,11%	0,014%	64,5%

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanggamus, 2022

Kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Tanggamus. Dengan kekayaan alam, seni dan budaya, serta ekonomi kreatif di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus, menjadi daya tarik yang besar untuk industri pariwisata. Kunjungan wisata pada tahun 2017 sebesar 75% dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat sehingga mempunyai imbas penurunan secara siginifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Namun di tahun 2021, kunjungan wisata sudah mulai kembali meningkat menjadi 45%. Demikian pula dengan lama kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata di tahun 2020 juga mengalami penurunan yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19. Dan mulai kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 64,5%.

2.1.3.3.2 Partanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Ketersediaan pangan daerah merupakan salah satu perhatian pemerintah demi terciptanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang cenderung terus meningkat, stabilitas produksi berbagai jenis bahan pangan yang dapat dikembangkan sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Tanggamus.Perkembangan capaianindikator pertanian Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.97. Perkembangan Indikator Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	43.07 %	43.01 %	33,85%	42,51%	43,48%
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	56,20%	57,50%	57,31%	55,87%	57,30%
3	Cakupan bina kelompok petani	59%	60%	65,00%	65%	68%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022

Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 43,07% dan terus menurun hingga hanya mencapai 33,85% di tahun 2019. Hal ini disebabkan meningkatnya kontribusi sektor lain terhadap PDRB. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian /perkebunan kembali meningkat di tahun 2020 hingga tahun 2021 menjadi 43,48%. Pada tahun 2017 produktivitas padi sebesar 56,20% dan terus meningkat hingga mencapai 57,50% pada tahun 2018 dan terjadi penurun pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing menjadi 57,31% dan 55,87%. Di tahun 2021, produktivitas padi kembali meningkat menjadi 57,30%. Sedangkan cakupan bina kelompok tani terus meningkat setiap tahunnya. Yang mana pada tahun 2017 cakupan bina kelompok petani sebesar 59% dan meningkat menjadi 68,00% pada tahun 2021.

2.1.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan: geologi, mineral dan batubara, energi baru dan terbarukan, dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun dipedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.Perkembangan capaian indikator energi dan sumber daya mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.98. Perkembangan Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase rumah tangga Pengguna listrik	79.4 %	89.6 %	95.3%	96.88%	97,05%
2	Rasio ketersediaan daya listrik	79.55 %	89.75 %	95,6%	95.65	96,65%
3	Jumlah EBT yang terbangun	0	0	271	0	180

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga penggu listrik adalah sebesar 769,4% dan terus meningkat hingga mencapai angka 97,05% di tahun 2021. Persentase ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Demikian pula halnya dengan rasio ketersediaan daya listrik yang semakin

meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017 rasio daya listrik adalah 79,55% dan pada tahun 2021 rasionya meningkat menjadi 96,65%. Sedangkan pembangunan EBT terlaksana pada tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebanyak 271 dan 180.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Majunya sistem perdagangan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Di samping itu, bidang ini diharapkan mampu bersaing, bertumpu pada sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh, berorientasi pasar global sehingga mampu bersaing baik dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, perdagangan berfungsi sebagai penyedia kebutuhan bahan pokok, dengan sistem distribusi yang efesien, efektif dan berkelanjutan, sehingga terbentuk harga yang wajar dan stabil, yang difokuskan pada peningkatan kemampuan berusaha bagi pelaku ekonomi lemah yang berbasis ekonomi kerakyatan.Perkembangan Capaian Indikator Perdagangan di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.99. Perkembangan Indikator Perdagangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	-838.009,14	-1.081.495,90	-1.263.315,89	-1.448.831,73	-1.378.627,45
2	Ekspor Bersih Perdagangan Atas Dasar Harga Konstan (juta rupiah)	-453.999,45	-553.553,51	-541.215,17	-508.812,02	-498.857,30

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	9.66%	10.42%	11.38%	11,54%	12,03%

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2021 mencapai 12,03%. Sedangkan Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2017-2021, nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukan nilai negative sebesar Rp.-1.378.627,45 (PDRB ADHB) dan Rp.-498.857,30 (PDRB ADHK) yang berarti nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Pelaksanaan pembangunan daerah di era otonomi tidak terlepas dari peranan bidang industri. Oleh sebab itu pembangunan bidang industri sangat dibutuhkan untuk mewujudkan terciptanya lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah bagi sumber daya yang ada di daerah serta mengembangkan potensi lokal.

Pembangunan bidang industri di Kabupaten Tanggamus diupayakan melalui pemberdayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia, di samping itu terus mengupayakan laju pertumbuhan industri kecil dan menengah. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan sektor ini bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu karena masih terbatasnya modal usaha bagi pelaku industri kecil dan menengah maka perlu mengupayakan kemitraan, baik melalui BUMN maupun dengan bank penyandang dana serta antara produsen bahan baku dengan pelaku industri kecil dan menengah.Berikut capaian indikator perindustrian Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021.

Tabel II.100. Perkembangan Indikator Perindustrian Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021.

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	10,61%	11,76%	12,50%	13,10%	14,21%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdaganagan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah keseluruhan kelompok pengrajin. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan sebesar 10,61% dan terus meningkat hingga mencapai 14,21% pada tahun 2021.

2.1.3.3.6 Transmigrasi

Pembangunan Transmigrasi ke depan masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi perlu diperbaharui, dan disesuaikan dengan kecenderungan (trend) perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama perubahan pada tata pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan peranan pemerintah maupun secara swadana. Pelaksanaannya harus memegang prinsip demokrasi, mendorong peran serta masyarakat, mengupayakan keseimbangan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan karakteristik daerah.

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang berupaya melakukan pemerataan penduduk dengan cara memindahkan penduduk di daerah-daerah padat ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Penduduk yang sering menjadi sasaran transmigrasi adalah yang bermukim di pulau Jawa dipindahkan ke daerah tujuan transmigrasi.

Tujuan pelaksanaan urusan transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.Perkembangan indikator transmigrasi Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.101. Perkembangan Indikator Transmigrasi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR					
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentasetransmigran swakarsa	0%	0%	0%	0%	0%
2	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	5 kk	-	-	-	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa di Kabupaten Tanggamus tidak pernah dilaksanakan transmigrasi secara swakarsa. Transmigrasi yang dilaksanakan adalah transmigrasi umum yang merupakan program dari pemerintah. Tingkat keikutsertaan transmigrasi di Kabupaten Tanggamus fluktuatif. Pada tahun 2017 masyarakat yang mengikuti program ini sebanyak 5 KK sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi ini.

2.1.3.3.7 Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Potensi kelautan dan perikanan cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan. Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus. Capaian indikator kelautan dan perikanan Kabupaten Tanggamus tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.102. Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi perikanan Tangkap dan Budidaya (Ton)	31.726,80	31.402,78	33.000	32.031,21	32.671,84	32.036,45
2	Cakupan bina kelompok nelayan	35%	22%	24%	26%	28%	27%
3	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	64%	50%	54%	57%	60%	62%
4	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	90	75	85	86%	87%	88%

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

2.1.3.4 Fokus Urusan Layanan Penunjang

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel II.103. Perkembangan Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yang telah ditetapkan denganPERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telahditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	69 %	70 %	70%	72%	72%	72%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2022.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus Nomor 12 tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daearah pada saat kampanye dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah telah tersedia atau ada, dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031. Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah Jumlah Program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 penjabaran mencapai persentase sebesar 100 persen. Demikian pula dengan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100 persen. Sedangkan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW pada tahun 2017 adalah sebesar 70% dan terus meningkat hingga mencapai 72% pada tahun 2021.

2.1.3.4.2 Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanserta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. engelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Tabel II.104. Perkembangan Indikator Keuangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	0.30 %	0,98%	0,94%	2,70%	
3	Persentase program yang tidak terlaksana	0 %	0 %	0%	0%	0%
4	Persentase belanja pendidikan(20%)	33,34%	32,33%	30,35%	43,31%	
5	Persentase belanja kesehatan(10%)	8,49%	9,38%	9,94%	15,85%	
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	39,02 % : 60,98 %	36,48 % : 63,52 %	38,65% : 61,35%	48,06% : 81,87%	

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
7	Bagihasil kabupaten/kota dan desa	80%	100%	100%	100%	100%
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022.

Sejak tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak (WTP) 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

2.1.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya Aparatur menjadi prioritas utama sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, pembelajaran lansung di tempat bekerja secara informal, guna meningkatkan kompetensi seorang Pegawai Negeri Sipil.

Undang undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, mempunyai Kompetensi di bidangnya, profesional dalam bekerja serta berdaya saing tinggi dalam mengejar kualitas kerja. Sehingga kedepannya pemerintah tidak akan ragu merancang program khususnya sumber daya aparatur yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.105. Perkembangan Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	65%	53%	45%	35%	25%
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	68%	50%	13,86%	15%	25%
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi	40 ASN	38 ASN	30 ASN	30 ASN	35 ASN

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	pemerintah					
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu padainstansi pemerintah	1023	1320	2370	4060	3588

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2022.

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun *corporate*. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021, posisi Kabupaten Tanggamus berada pada posisi 8 dari 415 Kabupaten dengan nilai 62,32 dengan Kategori Sangat Inovatif.

Terkait lndeks Daya Saing Daerah (IDSD), berdasarkan Pemetaan lndeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2021, Kabupaten Tanggamus mendapatkan Nilai 2,429 (predikat berdaya saing SEDANG), nilai IDSD meningkat dari tahun 2020 yakni 1,85055. Penilaian IDSD ini terdiri dari 4 (empat) aspek, yakni Aspek Ekosistem Inovasi, aspek Penguat, aspek SDM dan aspek Pasar sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. di bawah ini :

Tabel II.106 Rincian Aspek Penilaian lndeks Daya Saing Daerah tahun 2020-2021

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai	
		2020	2021
1	Aspek Ekosistem Inovasi	1,17901	1,568
2	Aspek Penguat	2,16071	2,254
3	Aspek Sumber daya Manusia	2,16667	3,438
4	Aspek Pasar	1,89583	2,458
	Nilai Indeks	**1,85055**	**2,429**
	Predikat	**SEDANG**	**SEDANG**

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2021

Selain IID dan IDSD, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD bertujuan untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah. IPKD Provinsi diukur oleh Menteri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/Kota diukur oleh Gubernur. Kemendagri telah mengembangkan aplikasi untuk pengukuran IPKD Provinsi dan Kabupaten. Hasil penilaian dikelompokan dalam 3 kategori yaitu :

- Kategori A : Baik
- Kategori B : Perlu Perbaikan
- Kategori C : Sangat perlu Perbaikan

Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.107. Perkembangan IPKD Kabupaten Tanggamus tahun 2018-2020

No	Tahun	IPKD	Kategori	Klaster
1	2018	72,9389	Baik	Sedang
2	2019	67,8997	Baik	Sedang
3	2020	77,2524	Baik	Sedang

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/725/VI.06/HK/2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2019, nilai IPKD mengalami penurunan dari 72,9389 di tahun 2018 menjadi 67,8997 pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 77,2524. IPKD Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 termasuk dalam kategori BAIK untuk klaster sedang.

Pelaksanaan Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, dengan salah satu fokus utama adalah mendorong seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Kinerja penelitian dan pengembangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.108. Perkembangan Indikator Penelitian dan Pengembangan Kabupaten TanggamusTahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	75 %	79%	80%	83%	87%
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	68%	70%	72%	75%	77%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.4.5 Penerapan SIDa

Tabel II.109. Perkembangan Indikator Penerapan SIDa Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	75%	65 %	69%	73%	76%
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	65%	66%	68%	71%	74%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2022

2.1.3.4.6 Pengawasan

Dalamupaya menuju terciptanya *good government*, maka penting adanya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk mencapai tujuan dari organisasi secara optimal, maka diperlukannya aspekmanajemen suatu organisai tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu pula pengawasan merupakan salah satu

fungsi manajemen yang harus dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan. Melalui pengawasan dapat diperoleh informasi mengenai kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Kinerja pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.110. Perkembangan Indikator Pengawasan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase tindak lanjut temuan	88,81%	84,49%	83,8%	96,7%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan selama tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, tindak lanjut yang paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 83,8%, sedangkan tindak lanjut temuan tertinggi dilakukan pada tahun 2020 sebesar 96,7%.

2.1.3.4.7 Sekretariat Dewan

Kinerja Sekretariat Dewan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.111. Perkembangan Indikator Sekretariat Dewan Kabupaten TanggamusTahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tersedianya Rencana KerjaTahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinyaProgram-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi PembentukanPerda, danFungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana LimaTahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan(RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	INDIKATOR	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukanPerdadan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan danDokumenAnggaran SetwanDPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2021

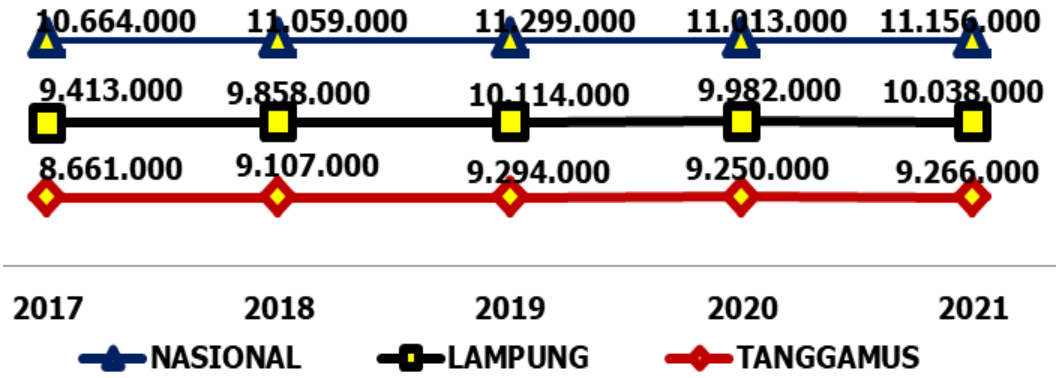
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 yaitu Rp. 9.250.000.00,- mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp.9.266.000.00,-

Gambar II.31. Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat pengeluaran per kapita yang merupakan representasi dimensi standar hidup layak senantiasa mengalami tren peningkatan, yang mana pada tahun 2017 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai Rp. 8611.000,- dan terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 9.294.000,-. Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 9.250.000,- karena mewabahnya pandemi Covid-19, yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus kembali mengalami peningkatan menjadi Rp. 9.266.000,-. Demikian pula halnya dengan pengeluaran perkapita Provinsi Lampung dan Nasional yang mengalmai penurunan ditahun 2020 akibat dampak Pandemi COVID-19 dan kembali mengalami peningkatan di Tahun 2021.

2.1.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar *(term of trade)* antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu kewaktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkatkesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga

barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel II.112. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

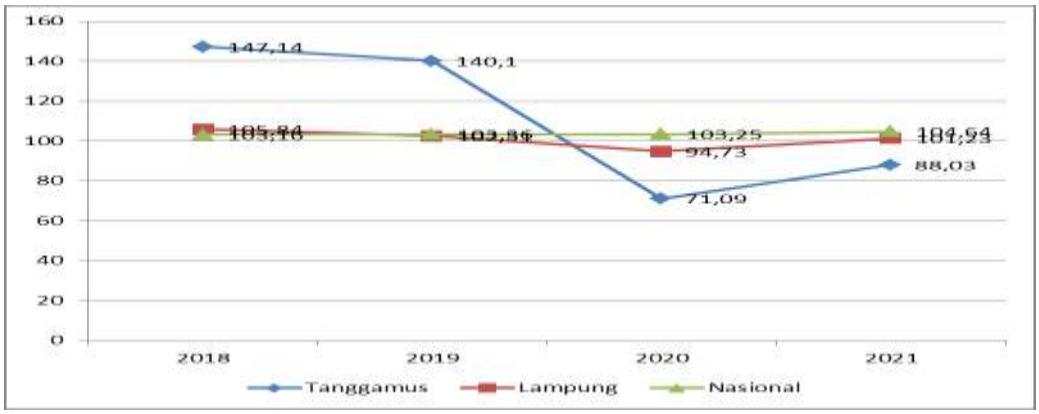
NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Cukuh Balak	143.88	195.87	165.74	46,83	64,10
2	Pugung	140.22	76.99	64.23	71,17	73,49
3	Talang Padang	140.12	181.57	174.03	77,09	78,95
4	Pulau Panggung	133.20	122.00	146.62	81,28	81,77
5	Kota Agung	141.37	221.26	204.41	39,50	78,95
6	Wonosobo	133.39	144.50	153.30	93,24	95,49
7	Kelumbayan	136.74	297.54	189.99	54,58	59,95
8	Sumberejo	138.79	200.77	181.71	37,72	75,57
9	Ulu Belu	130.61	413.17	303.41	32,62	80,97
10	Pematang Sawa	148.97	115.44	102.01	41,52	68,38
11	Semaka	143.23	53.89	60.25	95,65	95,98
12	Gisting	142.41	361.05	403.58	66,23	129,53
13	Kota Agung Timur	139.84	105.78	92.60	178,75	135,14
14	Kota Agung Barat	132.72	102.84	124.48	123,45	116,73
15	Air Naningan	136.31	698.23	442.22	23,77	89,69
16	Limau	135.26	555.50	404.24	17,00	80,97
17	Gunung Alip	138.62	120.80	103.30	125,51	131,69
18	Bandar Negeri Semong	135.34	120.16	181.02	69,06	73,86
19	Bulok	138.59	95.73	124.25	119,01	119,20
20	Kelumbayan Barat	136.21	496.99	275.97	47,57	81,63
	Jumlah Rata-Rata	**140.72**	**147.14**	**140.10**	**71,09**	**88,03**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Tukar Petani di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mempunyai nilai yang lebih besar dari 100 (surplus). Namun pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan menjadi 71,09 (defisit). Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak pada sector ekonomi. Pada tahun 2021, nilai NTP kembali meningkat walaupun masih bernilai dibawah 100.

Sedangkan perbandingan Nilai Tukar Petani untuk Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar II.32. Nilai Tukar Petani Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus dan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022.

Dari Grafik di atas, dapat dilihat NTP Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan dari 140,1 pada tahun 2019 menjadi 71,09 pada tahun 2020. Ditahun 2021, NTP Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan sebesar 16,94 menjadi 88,03 pada tahun 2021. Sedangkan NTP Provinsi Lampung pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 6,5 menjadi 101,23. Demikian pula halnya dengan NTP Nasional mengalami peningkatan sebesar 1,39 menjadi 104,64 di tahun 2021.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menghitung ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.113. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Tanggamu Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi RTRW	-	-	15	14	8	18
2	Rencana Peruntukan RTRW	13	13	13	13	13	13
3	Rasio (1/2)	-	-	1,15	1,08	0,62	1,38

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat Kabupaten Tanggamus, 2022.

Rasio ketaatan RTRW di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mana sekarang menjadi 18 pada tahun 2021.

2.1.4.2.2 Luas Wilayah Produktif

Untuk menghitung luas wilayah produktif disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.114. Persentase Luas Wilayah Produktif Sektor Pertanian Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Produktif	76.228	105.566	99.314	99.314	99.316	99.316
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	166.359	173.617	118.019	118.019	117.778	117.778
3	Rasio (1/2) (%)	46	60	84	84	84	84

Sumber : Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2022.

Persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya 46% menjadi 84% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Tanggamus cenderung tetap yakni 84%.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.1.4.3.1 Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.115. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2020

NO	JENIS KRIMINAL	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah kasus	70	78	79	105	89	103

NO	JENIS KRIMINAL	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	narkoba						
2	Jumlah kasus pembunuhan	2	2	2	1	-	2
3	Jumlah kejahatan seksual	23	17	21	8	36	22
4	Jumlah Kasus penganiayaan	29	36	35	13	41	40
5	Jumlah kasus pencurian	12	21	23	23	46	39
6	Jumlah kasus penipuan	9	27	30	29	32	30
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	1	-	1	-
8	Jumlah tindak criminal selama satu tahun (1+2+3+4+5+6+7)	145	181	191	179	245	236
9	Jumlah penduduk	757.430	757.430	757.430	757.430	757.430	2.170.218
10	Angka kriminalitas (8/9)	0,19	0,23	0,25	0,23	0,32	0,10

Sumber : Polres Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif. Namun sejak tahun 2018, angka kriminalitas menurun secara signifikan dari tahun 2017 (35%) menjadi 11 % pada tahun 2020.

2.1.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Data mengenai perkembangan jumlah demonstrasi pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.116. Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

NO	URAIAN	CAPAIAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Demonstrsi Bidang politik	3	-	-	1	-	-
2	Jumlah Demonstrsi Bidang ekonomi	23	16	2	11	-	2
3	Jumlah Demonstrsi Kasus pemogokan kerja	2	-	1	6	-	-
4	Jumlah unjuk rasa (1+2+3)	**28**	**16**	**3**	**18**	**0**	**2**

Sumber : Polres Kabupaten Tanggamus, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah demonstrasi di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif dan yang paling sering terjadi pada tahun 2016 sebanyak 3

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Tabel II.117 Kualitas Tenaga Kerja Berdasarkan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2021

No	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Angkatan kerja			Persentase bekerja terhadap angkatan kerj
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah angkatan kerja	
1	SD	142.915	2.520	145.435	98,27
2	SMP	73.292	3.149	76.441	95,88
3	SMA	73.127	3.531	76.658	95,39
4	Perguruan Tinggi	15.372	0	15.372	100,00
	Jumlah	**304.706**	**9.200**	**313.906**	**97.04**

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel diatas, angkatan kerja di kabupaten tanggamus paling banyak pendidikan tinggi yang ditamatkan pada jenjang Sekolah Dasar yang mencapai 145.435 orang.

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Tabel II.118. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021

NO	WILAYAH	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Tanggamus	46,47	46,31	46,18	46,08	46,01

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022.

Dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun. Apabila pada tahun 2017 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 46,47 maka pada tahun 2021 menjadi 46,01. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan.

Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022 dan realisasi RPJMD Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat dari pencapaian target-target kinerja yang berhasil dicapai. Telaahannya dilakukan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil pelaksanaan Renja-PD tahun lalu dan realisasi Renstra-PD oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi tersebut mencakup :

1) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2.1. Standar Pelayanan Minimal

Pada Sub Bab khusus Standar Pelayanan Minimal ini akan diuraikan terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan target yang SPM yang akan dicapai pada tahun 2019-2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal terdapat 6 jenis SPM yaitu :

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum;
4) Perumahan Rakyat;
5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
6) Sosial.

2.2.1.1. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pendidikan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : Pendidikan Dasar, Pendidikan kesetaraan, dan Pendidikan anak usia dini. Target dan capaian SPM Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.119. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Dasar

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
1	IP-1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	Pemukiman	492	100.00%	TERCAPAI
	IP-1.1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Pemukiman	409	100.00%	TERCAPAI
	IP-1.2	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Pemukiman	83	100.00%	TERCAPAI
2	IP-2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP tidak melebihi 32 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	Sekolah	492	100.00%	TERCAPAI
	IP-2.1	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 28 orang.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
	IP-2.2	Untuk setiap rombongan belajar SD tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
	IP-2.3	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 32 orang.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100.00%	TERCAPAI
	IP-2.4	Untuk setiap rombongan belajar SMP tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100.00%	TERCAPAI
3	IP-3	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah			
	IP-3.1	Di setiap SMP tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 peserta didik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	60	72,29%	Tercapai, Karna diatas 50 % Sekolah yang memiliki sarana prasarana LAB IPA, sementara

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
										masih ada 23 sekolah yang belum memiliki LAB IPA
	IP-3.2	Di setiap SMP tersedia minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	23	27,71%	Belum Tercapai Karena masih dibawah 50 % Sekolah yang masih belum lengkap sarana prasarana LAB IPA/masih ada 60 sekolah yang belum tersedia peralatan Lab

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
4	IP-4	Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	Sekolah			
	IP-4.1	Di setiap SD tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100%	TERCAPAI
	IP-4.2	Di setiap SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100%	TERCAPAI
	IP-4.3	Di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	73	87,95%	Belum tercapai karena masih terdapat 10 sekolah SMP ruang kepala sekolah menyatu dalam ruang guru.

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
5	IP-5	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 9 (sembilan) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah			
	IP-5.1	Di setiap SD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
	IP-5.2	Di setiap SD memiliki 9 (Sembilan) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 6 (enam) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
6	IP-6	Di setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran (11 mata pelajaran), dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (7 rumpun).	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	73	87.95%	Belum Tercapai karena masih ada 10 sekolah yang belum terpenuhi 1 orang guru untuk setiap maple
7	IP-7	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah			

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
	IP-7.1	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
	IP-7.2	Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
8	IP-8	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah			
	IP-8.1	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih).	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100.00%	TERCAPAI
	IP-8.2	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan 35% atau lebih (untuk daerah khusus 20% atau lebih) dari keseluruhan guru telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100.00%	TERCAPAI
9	IP-9	Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan PKn.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	63	75.90%	Belum tercapai dikarenakan masih ada sebanyak 20 yang belum lengkap guru

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIMPULAN
										berserti fikat pendidi kan untuk satu mata pelajar an
10	IP-10	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Kepala Sekolah	409	100.00%	TERCAPAI
11	IP-11	Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Kepala Sekolah	83	100%	TERCAPAI.
12	IP-12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SD	100%	Kabupaten/ Kota	34	Pengawas	34	100.00%	TERCAPAI
	IP-12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	9	Pengawas	9	100.00%	TERCAPAI
13	IP-13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	1	Kabupaten	1	100.00%	TERCAPAI

NO.	IP	DESKRIPSI	JENJANG	TARGET	KELOMPOK LAYANAN	TOTAL	SATUAN	CAPAIAN SPM	CAPAIAN %	KESIM PULAN
14	IP-14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	SD & SMP	100%	Kabupaten/ Kota	492	Sekolah			
	IP-14.1	Jumlah SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SD	100%	Kabupaten/ Kota	409	Sekolah	409	100.00%	TERCA PAI
	IP-14.2	Jumlah SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	SMP	100%	Kabupaten/ Kota	83	Sekolah	83	100.00%	TERCA PAI

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Tabel II.120. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Target	Kelompok Layanan	Capaian SPM	CAPAIAN (%)	Kesimpulan
1	**Peserta Didik**	1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	21.846	Kab/Kota	17.066	78.11%	Belum tercapai, dikarenakan anak usia dini banyak yang tidak bersekolah PAUD/RA
		1.2	Angka Partisipasi Murni (APM)	21.846	Kab/Kota	16.775	76.78%	Belum tercapai, dikarenakan masih banyaknya anak usia 4-6 tahun yang tidak menempuh Pendidikan PAUD/RA
2.	**Ketenagaan**	2.1	Kepala PAUD + Guru a. Berpendidikan D.IV/S.1	1.374	Kab/Kota	596	43.34%	Belum tercapai dikarenaka masih kurangnya kepala PAUD/RA dan tenaga pendidik yang berijazahD.IV/S1
			b. Memiliki Sertifikat Pendidik	1.374	Kab/Kota	76	5.53%	Belum tercapai, dikerenakan masih ada nya kepala PAUD/RA dan tenaga pendidik PAUD/RA yang belum memiliki sertifikat

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Target	Kelompok Layanan	Capaian SPM	CAPAIAN (%)	Kesimpulan
								pendidik
		2.2	Rasio Guru dengan anak didik	15	Kab/Kota	12	80.00%	Belum tercapai, dikarenakan rasio guru dan murid masih dibawah standarisasi pendidikan PAUD/RA, lebih banyak guru dibandingkan peserta didik
3.	Sarana Prasarana	3.1	Halaman bermain	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
		3.2	Bangunan/Gedung	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
		3.3	Alat bermain/alat peraga	1.374	Kab/Kota	1.374	100%	Tercapai
		3.4	Buku perpustakaan untuk guru	1.374	Kab/Kota	1.374	100%	Tercapai
		3.5	Buku perpustakaan untuk anak: a. Jumlah Buku Gambar yg dimiliki	16.775	Kab/Kota	16.775	100%	Tercapai
			b. Jumlah Alat Mewarnai yg dimiliki	16.775	Kab/Kota	16.775	100%	Tercapai
		3.6	Alat bermain/ Perabot PAUD	462	Kab/Kota	351	75,97%	Belum Tercapai, dikarenakan masih adanya lembaga PAUD yang belum memiliki alat bermain/perabot PAUD
4.	Organisasi	4.1	Struktur	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
		4.2	Personalia	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
		4.3	Uraian Tugas	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
5.	Pembiayaan	5.1	Anggaran pemerintah	9.939.860.000	Kab/Kota	9.939.860.000	100%	Tercapai
		5.2	Anggaran swadaya	462	Kab/Kota	91	19%	Belum Tercapai, dikarenakan masih

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Target	Kelompok Layanan	Capaian SPM	CAPAIAN (%)	Kesimpulan
								banyaknya lembaga PAUD yang tidak memiliki Anggaran Swadaya
		5.3	Pengelolaan dana Pendidikan	487	Kab/Kota	487	100%	Tercapai
6.	Manajemen Sekolah	6.1	Tingkat kehadiran Kepala PAUD + Guru	1.374	Kab/Kota	1.374	100%	Tercapai
		6.2	Tingkat kehadiran anak didik	16.775	Kab/Kota	16.775	100%	Tercapai
		6.3	Kinerja sekolah (Akreditasi)	462	Kab/Kota	39	8,44%	Belum Tercapai, dikarenakan masih banyaknya lembaga PAUD yang belum terakreditasi.
7.	Peran serta Masyarakat	7.1	Dukungan komite sekolah	462	Kab/Kota	462	100%	Tercapai
		7.2	Perhatian orang tua	16.775	Kab/Kota	16.775	100%	Tercapai
		7.3	Peran serta orang tua	16.775	Kab/Kota	16.775	100%	Tercapai
		7.4	Peran serta tokoh masyarakat	100	Kab/Kota	100	100%	Tercapai

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Tabel II.121. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Tanggamus Jenjang Pendidikan Kesetaraan

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
1	**Kurikulum**	1.1	Ketersediaan Kurikulum Dokumen 1 , 2 dan 3	ADA	20	20	100,00%	Tercapai
		1.2	Keterlaksanaan Kurikulum a. Dokumen standar kompetensi kelulusan	ADA	60 (*3)	59	98,33%	Belum Tercapai, dikarenakan jumlah maksimal 3 dokumen per lembaga sehingga target 60 dokumen, sementara capaiannya hanya 42 dokumen
			b. Efektivitas kegiatan pembelajaran	ADA	480 (*24)	318	66,25%	Belum Tercapai, dikarenakan dari target480 (24 per lembaga) capaian nya hanya 318

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
			c. Dokumen Penilaian	ADA	60 (*3)	52	86,66%	Belum Tercapai, dikarenakan per lembaga wajib memilikiminimal 3 dokumen sehingga target SPM 60 Dokumen, sementara capaian SPM 52 Dokumen.
		1.3	Persentasi daya serap Kurikulum Nasional	ADA	300 (*15)	174	58,00%	Belum Tercapai, dikarenakan target SPM300 (15/lembaga) sementara capaian hanya 174 kurikulum nasional.
2	**Ketenagaan**	2.1	Ketua Lembaga Berpendidikan D.IV/S.1	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
		2.2	Tutor / Istruktur Berpendidikan Akta IV/ D.IV /S.1	ADA	400 (*20)	179	44,75%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memilikiminimal 20 tutor / Istruktur Berpendidikan Akta IV/ D.IV /S.1 sehingga target SPM 400 tutor / Istruktur, sementara capaian SPM hanya 179 tutor
		2.3	Tenaga Kependidikan (Operator, Tata Usaha, dan Penjaga): Pendidikan SMA/ Sederajat	ADA	81 (*3)	47	58,02%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki3 Tenaga Kependidikan sehingga target SPM 81Tenaga

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
								Kependidikan, sementara capaian SPMhanya 47 Tenaga Kependidikan
3	Sarana Prasarana	3.1	Laboratorium	TIDAK ADA	20(*1)	13	65,00%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki1 Lab sehingga target SPM 20 Leb, sementaracapaian SPM hanya 13 Lab
		3.2	Bangunan/Gedung	ADA	120 (*6)	66	55,00%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki6 bangunan /gedung, target 120 bangunan/gedung sementara capaian

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
								SPMhanya 66 banguna/Gedung
		3.3	Alat bermain/alat peraga pendidikan	ADA	620 (*31)	246	39,67%	Belum Tercapai, dikarenakan setiap lembaga wajib memiliki minimal 31 alat peraga disetiap lembaganya masing masing sehingga target SPM 620 alat peraga, sementara capaian SPM hanya 246alat peraga

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
		3.4	Buku perpustakaan untuk Tutor/Istruktur	ADA	1860 (*93)	1860	100,00%	Tercapai, Namun TidakMerata
		3.5	Buku untuk anak: a. Jumlah Buku Modul yg dimiliki	ADA	12400 (*620)	7204	58,09%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memiliki minimal 620 buku modul, sehingga target SPM 12400 buku modul. Sedangkan capaian SPMhanya 7204 buku modul

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
			b. Jumlah Perlengkapan Belajar (Buku Tulis)	ADA	12400 (*620)	9339	75,31%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memilikiminimal 620 buku tulis,sehingga target SPM 12400 buku Tulis. Sedangkan capaian SPMhanya 9339 buku Tulis
		3.6	Peralatan	ADA	12400 (*620)	9339	75,31%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memilikiminimal 620 buku tulis,sehingga target SPM 12400 buku Tulis. Sedangkan capaian SPMhanya 9339 buku

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
								Tulis peralatan.
4	Organisasi	4.1	Struktur	ADA	60 (*3)	49	81,66%	Belum Tercapai, setiap lembaga wajib memiliki3 Struktur, sehingga total struktur dari lembaga berjumlah 60 sementara capaian SPM hanya 49
		4.2	Personalia	ADA	20	20	100%	Tercapai
		4.3	Uraian Tugas	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
5	Pembiayaan	5.1	Anggaran pemerintah	ADA	2.837.300.000	2.837.300.000	100%	Tercapai
		5.2	Anggaran swadaya	Tidak Ada	-	-	0%	idak ada nilai SPM karena tidak memiliki

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
								Anggaran Swadaya sehingga tidak ada target dan capaian SPM
		5.3	Pengelolaan dana Pendidikan	ADA	2.837.300.000	2.837.300.000	100%	Tercapai
6	Manajemen Lembaga	6.1	Tingkat kehadiran Ketua Lembaga	ADA	40 (*2)	40	100%	Tercapai
		6.2	Tingkat kehadiran Tutor/instruktur	ADA	40 (*2)	40	100%	Tercapai
		6.3	Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lain	ADA	40 (*2)	40	100%	Tercapai
		6.4	Tingkat kehadiran Warga Belajar	ADA	40 (*2)	40	100%	Tercapai
		6.5	Kinerja Lembaga (Akreditasi)	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
		6.6	Pengawasan	ADA	40 (*2)	40	100%	Tercapai
7	Peran serta Masyarakat	7.1	Dukungan komite Lembaga	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
		7.2	Perhatian orang tua	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
		7.3	Peran serta orang tua	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
		7.4	Peran serta tokoh masyarakat	ADA	20 (*1)	20	100%	Tercapai
		7.5	Peran serta dunia usaha	ADA	20 (*1)	12	60%	Belum Tercapai Setiap lembaga wajib memiliki minimal 1 peran serta dunia usaha, sehingga menjadi 20.

No	Komponen SPM	IP	Indikator	KETERCAPAIAN MINIMAL				
				Ada/Tdk	Target	CAPAIAN SPM	CAPAIAN (%)	Keterangan
								Sementara capaian SPM hanya 12

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Permasalah yang dihadapi dalam pemenuhan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan Tahun 2021 di Kabupaten Tanggamus adalah :

Belum adanya Indikator yang jelas tentang penerapan dan Pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Yang sesuai dengan Permendikbud 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dapat terlaksana sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku.
Sedangkan solusi yang dapat dilakukan terhadap permasalah di atas antara yaitu :

Perlu adanya perumusan tentang Indikator indikator SPM yang akan digunakan dalam Pendidikan dan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pengempu kebijakan. Untuk sementara ini Indikator yang digunakan masih menggunakan indikator yang dipakai oleh provinsi lain.

2.2.1.2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel II.122. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Tanggamus

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	PENERIMA LAYANAN		
			SASARAN	DILAYANI	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	11.329	11.329	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	10.814	10.814	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.820	9.820	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	50.253	50.253	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94.136	94.136	100

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	PENERIMA LAYANAN		
			SASARAN	DILAYANI	%
6	Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	391.267	391.267	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 th ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	42.533	42.533	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	43.874	43.874	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetus melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.645	3.645	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa standar	1.037	1.037	100
11	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberculosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	10.508	10.508	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai standar	14.009	14.009	100

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 adalah :

1. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda indonesia, mengakibatkan beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan.
2. masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan dan kurangnya sarana dan prasarana untuk pendukung pencapaian SPM.
3. Penganggaran yang kurang untuk melakukan sosialisasi dan advokasi SPM kesehatan.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah diatas adalah :

1. Penerapan SPM tetap dilakukan secara optimal meskipun Kondisi pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta petugas puskemas menggunakan APD lengkap.

2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dengan melakukan bimtek dan pelatihan.
3. Menganggarkan kebutuhan puskesmas untuk mencapai SPM sesuai kebutuhan.

2.2.1.3.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi : pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Target dan realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.123. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Jumlah warga negara yang memperoleh Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2000 Rumah Tangga (KK)	1230 Rumah Tangga (KK)	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	1750 Rumah Tangga (KK)	1650 Rumah Tangga (KK)	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 adalah :

Kurangnya SDM tenaga pekerja untuk bukti Pelaksanaan pekerja di Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tenaga pendukung pelaksanaan SPM di daerah.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah Penambahan SDM tenaga Pekerja di Dinas untuk Bakti Pekerja Sebagai pendukung pelaksanaan Penerapan SPM bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.2.1.4.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi : penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.124. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagikorban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	43 Rumah Korban Bencana Yang Memenuhi Kriteria	43 Rumah Korban Bencana Yang Memenuhi Kriteria	100%
2	Fasilitas Penyediaan rumah yang layak hunibagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	10 Rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	10 Rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 adalah Kurangnya ketersediaan dana untuk kegiatan pencapaian SPM wajib Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawaasan Permukiman baik bersumber dari dana APBD maupun APBN, Dukungan sumber daya baik dana, sarana prasarana maupun tenaga teknis masih kurang untuk pencapaian target SPM wajib Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Masih adanya keterbatasan pencatatan dan pelaporan pelaksana kegiatan di lapangan sehingga berpengaruh pada pelaporan, Data akurat nama-nama warga/orang yang terkena dampak bencana tidak kami memiliki dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Data yang ada adalah data tahun lalu, sehingga penanganan agak terlambat.

Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah Dukungan pembiayaan untuk kegiatan SPM wajib Bidang Penyediaan Perumahan, Peningkatan

dukungan sumber daya baik dana, sarana dan prasarana, dan tenaga teknis. Peningkatan koordinasi dengan Propinsi/Pusat untuk mendapatkan dukungan dana dan lainnya guna percepatan pencapaian SPM. Ada tim khusus yang langsung mendata warga korban dampak bencana dan langsung melapor kepada sekda untuk penanganan segera.

2.2.1.5.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

b. Pelayanan informasi rawan bencana

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

d. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dengan target dan realisasi pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.125. Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.116 Orang dalam 36 Kali x 31 orng Patroli	100%	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan informasi bencana kurang lebih 650.900 jiwa.	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Desa Tangguh Bencana 0 Orang	0 %	0 %
4	Pelayanan penyelamatan Dan evakuasi korban Bencana	Jumlah Evakuasi masyarakat/warga sebanyak kurang lebih 3.334 Jiwa yang terdampar	100%	100%
5	Pelayanan penyelamatan Dan evakuasi korban kebakaran	28 Kasus Kebakaran Rumah/ Bangunan Semester II 2021 dan Kendaraan di Wilayah Kabupaten Tanggamus	100%	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 adalah ;

1. Kurangnya anggaran operasional BBM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan dalam penerapan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Kurangnya Personil pendukung anggota Satpol PP dalam penerapan SPM bidang urusan kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Kurangnya sarana prasarana pendukung satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus, mobil patroli dalam Penerapan SPM bidang urusan kententraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
4. Kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Tanggamus.
5. Kurangnya sumber daya manusia khususnya penyidik pegawai negeri sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah diatas adalah :

- Penambahan anggaran oleh Pemerintah Daerah untuk membantu penerapan SPM bidang urusan kententraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Ditambahnya personil pendukung untuk membantu penerapan SPM bidang urusan kententraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SPM bidang urusan kententraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- Diadakanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada yang ada di Kabupaten Tanggamus
- Adanya diklat penyidik pegawai negeri sipil bagi anggota Satuan Polisi Polisi Pamong Praja.

2.2.1.6.Target dan Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Sosial diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel II.126. Target SPM Bidang Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosialdi Luar Panti	1.422	1.422	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	425	425	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti social	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	1.632	1.632	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti social	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial diluar panti	4	4	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	36	36	100%

Sumber : Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2021 adalah Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan, penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2021 pada semester II (Dua) waktu pelaksaan pembagianRehabilitasi Sosial terkait dengan kontrak pihak ke tiga yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan solusi yang dapat dilakukan adalah Percepatan proses penyelesaian berkas kontrak dengan pihak ke tiga sehingga secepatnya menyelesaikan pembagian Rehabilitasi Sosial.

2.2.2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015–2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum), 17 tujuan dari SDGs tersebut yaitu:

1) Menghapus kemiskinan;
2) Mengakhiri kelaparan;
3) Kesehatan dan kesejahteraan;
4) Kualitas pendidikan yang baik;
5) Kesetaraan gender;
6) Air bersih dan sanitasi;
7) Akses ke energi yang terjangkau;
8) Pertumbuhan ekonomi;
9) Inovasi dan infrastruktur;
10) Mengurangi ketimpangan;
11) Pembangunan berkelanjutan;
12) Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13) Mencegah dampak perubahan iklim;
14) Menjaga sumberdaya laut;
15) Menjaga ekosistem darat;
16) Perdamaian dan keadilan; dan
17) Revitalisasi kemitraan global.

SDGs ditetapkan oleh PBB pada akhir September 2015 di New York dengan masa berlaku mulai Januari 2016 hingga Desember 2030 dan ada sekitar 193 negara anggota PBB yang berkomitmen untuk melaksanakan SDGs.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals.*

2.2.2.1. Capaian Target Indikator TPB Pilar Sosial

Pembangunan Sosial adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar sosial terdiri dari 5 TPB yaitu TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), dan TPB 5 (Kesetaraan Gender). Capaian TPB Pilar Sosial sebagai berikut :

Tabel II.127. Capaian TPB Pilar Sosial

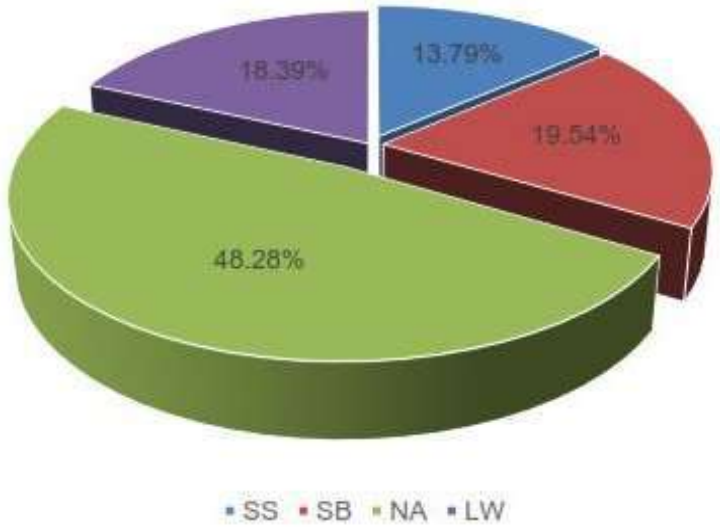
TPB	Dalam Wilayah Kajian				Diluar Wilayah Kajian (LW)
	Jumlah dikator TPB	Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak ada/belum ada data (NA)	
1	12	0	2	10	2
2	14	3	1	10	2
3	24	7	8	9	7
4	12	0	3	9	2
5	9	2	3	4	3
Jumlah	**71**	**12**	**17**	**42**	**16**
Persentase		**13,79%**	**13,79%**	**13,79%**	**13,79%**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

PB pilar sosial terdiri dari 87 indikator, dari 87 indikator tersebut Kabupaten Tanggamus melaksanakan 71 indikator, dimana yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebanyak 12 indiaktor (13,79%), yang sudah dilaksanakan belum mencapai target (SB) sebanyak 17 indikator (19,54%), dan yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 42 indikator (48,28%), sedangkan yang di luar wilayah kajian (LW) sebanyak 16 indikator (18,39%).

Persentase capaian indikator TPB pilar sosial ditunjukkan pada gambar 4.3 di bawah ini. Indikator yang memiliki persentase paling besar adalah indicator yang tidak ada/belum ada data (NA) yaitu sebesar 48,28%. Indikator TPB Pilar Sosial yang tidak ada/belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan bagian indikator yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.33 Persentase Capaian TPB Pilar Sosial



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

2.2.2.2. Capaian Target Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pembangunan Ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar ekonomi terdiri dari 5 TPB yaitu TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Capaian TPB Pilar Ekonomi sebagai berikut :

Tabel II.128. Capaian TPB Pilar Ekonomi

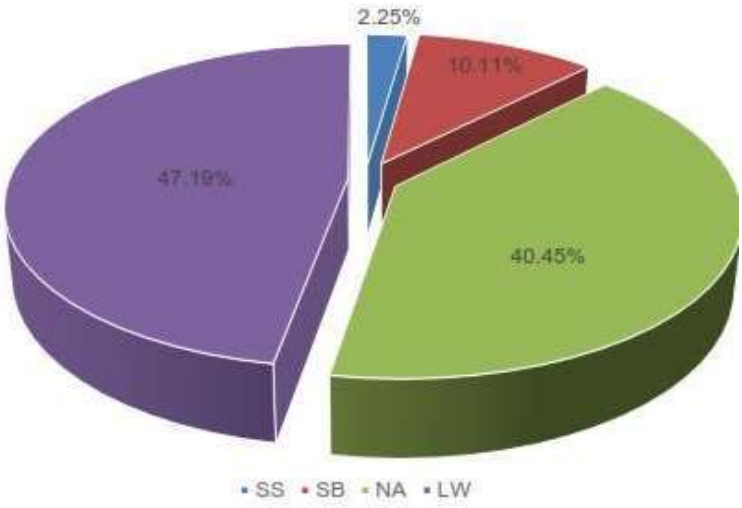
TPB	Dalam Wilayah Kajian				Diluar Wilayah Kajian (LW)
	Jumlah Indikator TPB	Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak ada/belum ada data (NA)	
7	4	0	0	4	3
8	14	0	5	9	5
9	10	0	0	10	11
10	7	1	3	3	10
17	12	1	1	10	13
Jumlah	**47**	**2**	**9**	**36**	**42**
Persentase		**2,25%**	**10,11%**	**40,45%**	**47,19%**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TPB pilar ekonomi terdiri dari 89 indikator, dari 89 indikator tersebut Kabupaten Tanggamus melaksanakan 47 indikator, dimana yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebanyak 2 indikator (2,25%), yang sudah dilaksanakan belum mencapai target (SB) sebanyak 9 indikator (10,11%), dan yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 36 indikator (40,45%), sedangkan yang di luar wilayah kajian (LW) sebanyak 42 indikator (47,19%).

Persentase capaian indikator TPB pilar ekonomi ditunjukkan pada gambar 4.4 di bawah ini. Indikator yang memiliki persentase paling besar adalah indicator yang tidak ada / belum ada data (NA) yaitu sebesar 40,45%, karena itu Indikator TPB Pilar Ekonomi yang tidak ada/belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan bagian indikator yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.34 Persentase Capaian TPB Pilar Ekonomi



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

2.2.2.3. Capaian Target Indikator TPB Pilar Lingkungan

Pembangunan Lingkungan adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar lingkungan terdiri dari 6 TPB yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), TPB 13 (Penanggulangan Perubahan Iklim), TPB 14 (Ekosistem Laut), dan TPB 15 (Ekosistem Darat). Capaian TPB Pilar Lingkungan sebagai berikut :

Tabel II.129. Capaian TPB Pilar Lingkungan

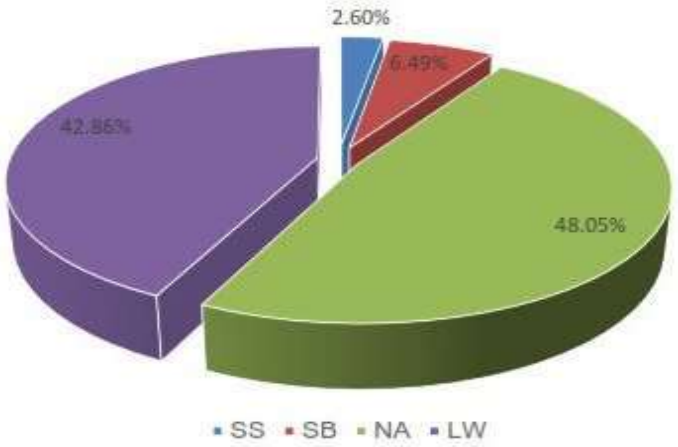
TPB	Dalam Wilayah Kajian				Diluar Wilayah Kajian (LW)
	Jumlah Indikator TPB	Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak ada/belum ada data (NA)	
6	9	0	2	7	1
11	11	0	0	11	6
12	11	1	1	9	6
13	6	0	1	5	3
14	2	0	0	2	8
15	5	0	0	5	9
Jumlah	**44**	**2**	**5**	**37**	**33**
Persentase		**2,60%**	**6,49%**	**48,05%**	**42,86%**

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TPB pilar Lingkungan terdiri dari 77 indikator, dari 77 indikator tersebut Kabupaten Tanggamus melaksanakan 44 indikator, dimana yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebanyak 2 indikator (2,6%), yang sudah dilaksanakan belum mencapai target (SB) sebanyak 5 indikator (6,49%), dan yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 37 indikator (48,05%), sedangkan yang di luar wilayah kajian (LW) sebanyak 33 indikator (42,86%).

Persentase capaian indikator TPB pilar Lingkungan ditunjukkan pada gambar 4.5 dibawah ini. Indikator yang memiliki persentase paling besar adalah indikator yang tidak ada / belum ada data (NA) yaitu sebesar 48,05%, karena itu Indikator TPB Pilar lingkungan yang tidak ada/belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan bagian indikator yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.35 Persentase Capaian TPB Pilar Lingkungan



Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

2.2.2.4. Capaian Target Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pembangunan Hukum dan Tata Kelola adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar lingkungan hanya terdiri dari 1 TPB yaitu TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian TPB Pilar Hukum dan tata Kelola sebagai berikut :

Tabel II.130. Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola

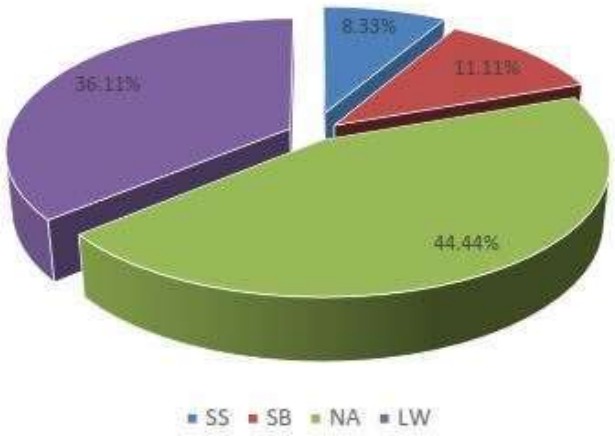
TPB	Dalam Wilayah Kajian				Diluar Wilayah Kajian (LW)
	Jumlah Indikator TPB	Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak ada/belum ada data (NA)	
16	23	3	3	17	13
Jumlah	23	3	4	16	13
Persentase		8,33%	11,11%	44,44%	36,11%

Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

TPB pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri 36 Indikator, dari 36 indikator tersebut Kabupaten Tanggamus melaksanakan 23 indikator, dimana yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebanyak 3 indikator (8,33%), yang sudah dilaksanakan belum mencapai target (SB) sebanyak 4 indikator (11,11%), dan yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 16 indikator (44,44%), sedangkan yang di luar wilayah kajian (LW) sebanyak 13 indikator (36,11%).

Persentase capaian indikator TPB pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada gambar 4.6 di bawah ini. Indikator yang memiliki persentase paling besar adalah indikator yang tidak ada / belum ada data (NA) yaitu sebesar 44.44%, karena itu Indikator TPB Pilar lingkungan yang tidak ada/belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan bagian indikator yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Gambar II.36 Persentase Capaian TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola



Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

Tabel II.131 Skenario Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tanggamus

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
PILAR SOSIAL													
TUJUAN : 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan													
1	Tersusunnya Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	%	0	100	Naik	-	100	-	100	100	100	100	100
2	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus	%	14.05	12.48	Turun	8	-1.05	-1	12.00	10.52	9.91	9.33	8.79
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	2.01	1.81	Turun	-	-0.2	-	1.61	1.41	1.21	1.01	0.81
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0.43	0.35	Turun	-	-0.08	-	0.27	0.19	0.11	0.03	0
5	Pendampingan Program perlindungan sosial	N/A	N/A	100	Naik	-	0	-	100	100	100	100	100
6	Pemgembangan sistem pengaduan masyarakat miskin	N/A	N/A	100	Naik	-	0	-	100	100	100	100	100
7	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	%	8.23	8.50	Naik	-	0.27	-	8.77	9.04	9.31	9.58	9.85
8	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89	89	Naik	-	0	-	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
9	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	44	45	Naik	-	1	-	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	1	1	Naik	-	0	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	%	91	91	Naik	-	0	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00
12	Rasio Bayi berakte kelahiran	%	35	35.64	Naik	-	0.64	-	36.27	36.91	37.55	38.19	38.82
13	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per100.000 orang	per 100000 penduduk	-	-	Turun	-	0	-	-	-	-	-	-
14	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	Desa Sigap Bencana	5	10	Naik	-	5	-	15	20	25	30	35
15	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	%	100	100	Naik	-	0	-	100	100	100	100	100
16	Berkurangnya Wilayah Rawan Banjir	Kecamatan	3	2	Turun	-	-1	-	1	0	0	0	0
TUJUAN : 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan													
1	Prevalensi Kasus Gizi Buruk	%	1	1	Turun	17	0	3.2	0	0	0	0	0
2	Rasio Ahli Gizi per 1000 penduduk	per 1000 penduduk	0.03	0.03	Naik	-	0	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala Pengalaman Kerawanan Pangan	%	N/A	100.00	Naik	-	0	-	100	100	100	100	100
4	Luas areal lahan sawah (Ha)	Hektar	23080	23080	Naik	-	0	-	23080	23080	23080	23080	23080
5	Luasan panen tanaman padi (sawah/ladang)	Hektar	24884	24884	Naik	-	0	-	24884	24884	24884	24884	24884

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
6	Luasan panen tanaman jagung dan kedelai (Ha)	Hektar	3615	3977	Naik	-	362	-	4338	4700	5061	5423	5784
7	Luasan panen tanaman ubi kayu dan ubi jalar (Ha)	Hektar	618	607	Naik	-	-11	-	596	585	574	563	552
8	Luasan panen tanaman sayuran (Ha)	Hektar	485	534	Naik	-	49	-	582	631	679	728	776
9	Produksi ikan budidaya (ton)	Ton	17732	19370	Naik	-	1638	-	21008	22646	24284	25922	27560
TUJUAN : 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia													
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	%	39.3	30	Turun	0	-9	-6	20.70	11.40	2.10	0.00	0.00
2	Proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan terampil	%	93	94	Naik	100	1	1.2	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00
3	Angka Kematian Bayi (0-1 th) per 1000 KH	Kasus	11.50	11.00	Turun	0	-1	-2.2	10.50	10.00	9.50	9.00	8.5
4	Angka Kematian Balita (0-5 Th) per 1000 KH	Kasus	5	5	Turun	0	0	-1	0	0	0	0	0
5	Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia >dari 15 tahun	%	0	0	Turun	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kejadian Malaria per 1.000 orang	API per 1000 penduduk	-	-	Turun	-	0	-	0	0	0	0	0
7	Angka Kesakitan DBD	Jumlah	398	358	Turun	-	-40	-	318	278	238	198	158
8	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	Orang	0	0	Turun	-	0	-	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
9	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	49	55	Naik	71.8	6	3.36	61.00	67.00	73.00	79.00	85.00
10	Rasio Puslesmas per 100.000 penduduk	Puskesmas	1 : 24641	1 : 24641	Naik	-	0	-	3 : 24641	2 : 24641	1 : 24641	0 : 24641	1 : 24641
11	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	100	100	Naik	-	0	-	100	100	100	100	100
12	Rasio dokter per 100.000 penduduk	Dokter/ 100.000 penduduk	7.24	7.42	Naik	-	0	-	7.60	7.78	7.96	8.14	8.32
13	Rasio Tenaga Apoteker per 100.000 penduduk	Apoteker/ 100.000 penduduk	2.76	2.83	Naik	-	0	-	2.89	2.96	3.03	3.10	3.17
14	Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk	Perawat/ 100.000 penduduk	49.45	50.69	Naik	-	1	-	51.92	53.16	54.40	55.63	56.87
15	Rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk	Bidan/ 100.000 penduduk	90.46	90.46	Naik	-	0	-	90.46	90.46	90.46	90.46	90.46
TUJUAN : 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua													
1	APK SD/MI	%	97.05	92.43	Naik	111.43	0.10	0.584	97.05	97.05	97.05	97.05	97.05
2	APM SD/MI	%	99.05	79.8	Naik	-	0.05	-	83.7	87.9	92.3	96.9	98.0
3	APK SMP/MTS	%	93.00	61.12	Naik	105.29	0.05	0.058	64.18	67.38	70.75	74.29	78.01
4	APM SMP/MTS	%	90.06	34.7	Naik	-	0.05	-	36.4	38.2	40.1	42.1	44.2
5	Rasio Guru/Murid (SD)	%	1 : 30	1 : 20	Naik	-	-1	-	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20	1 : 20
6	Rasio Guru/Murid (SMP)	-	1 : 30	1 : 20	Naik	-	0	-	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30	1 : 30

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	46.5	47.5	Naik	77.2	1	5.94	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5
8	Angka Melek Huruf	%	95.90	97.22	Naik	-	1	-	98.19	98.69	98.78	99.28	99.78
TUJUAN : 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan Kaum Perempuan													
1	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38.50	39	Naik	-	0.01	-	39.01	39.01	39.02	39.02	39.03
2	Proporsi kursi yang dididuki perempuan di parlemen pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	%	20	20	-	-	0	-	20	20	20	30	30
3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah KDRT	Kasus	4	4	Turun	-	0	-	0	0	0	0	0
PILAR EKONOMI													
TUJUAN : 7. Menjamin Akses Energi Bersih dan Terjangkau													
1	Rasio elektrifikasi rumah tangga	%	68.5	79.4	Naik	96.6	3.43	4.935	95.3	96.1	97.0	98.0	99.0
2	Rasio elektrifikasi perdesaan	%	95	96	Naik	100	1	0.8	97.0	97.5	98.0	98.5	99.0
TUJUAN : 8. Meningkatan Pertumbuhan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi													
1	Laju Pertumbuhan PDRB	%	5.18	5.60	Naik	-	0.26	-	5.65	5.68	5.70	4.0	5.756
2	PDRB Perkapita (Berlaku)	Juta Rp	21.24	21.77	Naik	50	0.53	5.65	22.30	22.83	23.36	27.51	24.43
3	PDRB atas harga	Juta Rp	9021365.22	9246899.35	Naik	-	225534.1	-	9472433.48	9697967.61	9923501.74	10149035.87	10374570

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
	Konstan												
4	Persentase Kontribusi sub sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1.86	1.91	Naik	8	0.05	1.22	1.95	2.00	2.05	2.09	2.14
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68.46	75.67	Naik	-	1.71	-	75.88	76.00	76.59	61.28	78.73
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.72	2.23	Turun	2.0	-0.14	-0.02	2.23	2.22	2.22	2.90	2.20
7	Jumlah Bank yang beroperasi di Kab Tanggamus	Unit	-	-	Naik	-	0	-	-	-	-	-	-
TUJUAN : 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi													
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	27.45	31.88	Naik	100	5.49	8	32.38	45.00	50.00	55.00	60.00
2	Jalan Kondisi Terpelihara (%)	%	75	75	Naik	100	0	5	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00
3	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	6.82	6.97	Naik	-	0.07	-	7.00	7.03	7.06	7.09	7.12
4	Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan	%	8.88	8.97	Naik	-	0.09	-	9.06	9.15	9.24	9.32	9.41
5	Persentase tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan	%	75.40	79.17	Naik	-	3.77	-	82.94	86.71	90.48	94.25	98.02
TUJUAN :10. Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara													
1	Jumlah desa tertinggal	Desa	58	54	Turun	-	-4	-	50	46	42	38	34
2	Jumlah desa mandiri	Desa	30	34	Naik	-	4	-	38	42	46	50	54

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
3	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	81340	73770	Turun	-	-6188	-	111381	105193	99006	67310	86630
PILAR LINGKUNGAN													
TUJUAN : 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua													
1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	65	66.63	Naik	83.30	1.63	3.33	68.26	69.89	71.52	73.15	74.78
2	Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	%	52.70	55	Naik	100.00	2.3	9	57.30	59.60	61.90	64.20	66.50
3	Penangan Limbah	%	NA	10	Naik	100.00	10	18	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00
TUJUAN :11. Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan													
1	Luas Kawasan Kumuh	%	25	23.75	Turun	0	-1.25	-4.75	22.50	21.25	20.00	18.75	17.5
2	Persentase sampah yang dapat diangkut	%	69	70.67	Naik	65.83	1.67	-0.97	72.34	74.01	75.68	77.35	79.02
PILAR HUKUM													
TUJUAN :16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh													
1	Jumlah kasus kejahatan	Kasus	284	281	Turun	0	-3	-56.2	278	275	272	269	266
2	Persentase kasus kejahatan yang tertangani	%	48.5	53.35	Naik	45	4.85	-1.67	58.20	63.05	67.90	72.75	77.60
3	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	Naik	-	0	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Skor	CC	CC	Naik	-	0	-	B	B	BB	BB	BB

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		TARGET TPB		RATE		TARGET				
			2016	2018	TARGET	2030	BAU	TPB	2019	2020	2021	2022	2023
5	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%	64.00	67.20	Naik	85.00	3.2	3.56	70.40	73.60	76.80	80.00	83.20

Sumber : Hasil analisis, 2021

Secara umum kondisi Kabupaten Tanggamus dapat dijelaskan dalam tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun 2022 dan realiasai RPJMD sebagai berikut :

Tabel : II.131. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan (2021) Kabupaten Tanggamus

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																						
			PENDIDIKAN																						
			DINAS PENDIDIKAN																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**2,251,759,475,295**	**WTP**	**1,351,055,685,177**	**WTP**	**445,420,252,899**	**WTP**	**58,315,575,766**	***WTP***	**142,476,425,150**	***WTP***	**98,368,598,119**	***WTP***	**124,855,559,880**	**- *WTP***	***424,016,158,915***	**- *WTP***	***1,775,071,844,092***		***78.83%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**	**100 %**	**3,191,617,000**	**60 %**	**1,914,970,200**	**%**	**313,486,600**	**%**	**-**	**%**	**145,589,600**	**%**	**4,560,000**	**%**	**34,500,000**	**- %**	***184,649,600***	***60 %***	***2,099,619,800***	***60.00%***	***65.79%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	530 Dokumen	202,067,500	318 Dokumen	121,240,500	106 Dokumen	55,793,500	0 Dokumen	-	Dokumen	23,405,000	50 Dokumen	-	56 Dokumen	3,000,000	*106 Dokumen*	*26,405,000*	*424 Dokumen*	*147,645,500*	***80.00%***	*73.07%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	661,436,000	318 Eksemplar Dokumen	396,861,600	106 Eksemplar Dokumen	104,964,200	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen	54,804,200	Eksemplar Dokumen	-	106 Eksemplar Dokumen	-	*106 Eksemplar Dokum*	*54,804,200*	*424 Eksemplar Dokume*	*451,665,800*	***80.00%***	*68.29%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	530 Buku	213,050,000	318 Buku	127,830,000	106 Buku	20,910,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*318 Buku*	*127,830,000*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	530 Buku	149,380,000	318 Buku	89,628,000	106 Buku	26,156,000	0 Buku	-	- Buku	26,100,000	106 Buku	-	- Buku	-	*106 Buku*	*26,100,000*	*424 Buku*	*115,728,000*	***80.00%***	*77.47%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	530 Eksemplar Dokumen	150,000,000	318 Eksemplar Dokumen	90,000,000	106 Eksemplar Dokumen	27,550,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	106 Eksemplar Dokumen	17,750,000	*106 Eksemplar Dokum*	*17,750,000*	*424 Eksemplar Dokume*	*107,750,000*	***80.00%***	*71.83%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ,PROFIL Perangkat Daerah	530 Eksemplar Dokumen	729,250,500	318 Eksemplar Dokumen	437,550,300	106 Eksemplar Dokumen	11,534,500	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	-	*318 Eksemplar Dokumen*	*437,550,300*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	300 Eksemplar Dokumen	1,086,433,000	180 Eksemplar Dokumen	651,859,800	60 Eksemplar Dokumen	66,578,400	0 Eksemplar Dokumen		30 Eksemplar Dokumen	41,280,400	15 Eksemplar Dokumen	4,560,000	15 Eksemplar Dokumen	13,750,000	*60 Eksemplar Dokum*	*59,590,400*	*240 Eksemplar Dokume*	*711,450,200*	***80.00%***	*65.48%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**	**100 %**	**2,233,464,847,545**	**%**	**1,340,078,908,527**	**%**	**439,611,155,679**	**%**	**58,315,575,766**	**%**	**141,545,741,816**	**%**	**96,824,626,453**	**%**	**123,805,349,367**	**- %**	***420,491,293,402***	**- %**	***1,760,570,201,929***		***78.83%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	2,069,597,447,545	36 Orang	1,241,758,468,527	12 Bulan	408,833,415,779	3 Bulan	53,151,865,766	3 Bulan	135,381,241,816	3 Bulan	87,721,178,053	3 Bulan	115,279,542,717	*12 Bulan*	*391,533,828,352*	*48 Bulan*	*1,633,292,296,879*	***80.00%***	*78.92%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegaw ai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	51495 Orang	162,767,400,000	30897 Orang	97,660,440,000	10299 Orang	30,565,740,000	2575 Orang	5,163,710,000	2,575 Orang	6,093,000,000	2575 Orang	9,040,540,000	2,574 Orang	8,458,025,000	*10,299 Orang*	*28,755,275,000*	*41,196 Orang*	*126,415,715,000*	***80.00%***	*77.67%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	870,000,000	36 Kali	522,000,000	12 Kali	174,000,000	0 Kali	-	6 Kali	71,200,000	3 Kali	42,620,000	3 Kali	57,880,000	*12 Kali*	*171,700,000*	*48 Kali*	*693,700,000*	***80.00%***	*79.74%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1200 Eksemplar	230,000,000		138,000,000	240 0	37,999,900	0 0	-	10 0.00	300,000	87 0.00	20,288,400	143 0.00	9,901,650	*240 -*	*30,490,050*	*240 -*	*168,490,050*	***20.00%***	*73.26%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persntase Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	**100 %**	**994,000,000**	**%**	**596,400,000**	**%**	**160,920,000**	**0 %**	**-**	**%**	**5,050,000**	**%**	**84,208,150**	**%**	**25,581,300**	**- %**	***114,839,450***	**- %**	***711,239,450***	***0.00%***	***71.55%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Eksemplar	707,500,000	720 Eksemplar	424,500,000	240 Eksemplar	117,285,000	0 Eksemplar	-	50 Eksemplar	5,050,000	124 Eksemplar	80,219,950	66 Eksemplar	18,030,000	*240 Eksemplar*	*103,299,950*	*960 Eksemplar*	*527,799,950*	***80.00%***	*74.60%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1200 Eksemplar	286,500,000	720 Eksemplar	171,900,000	240 Eksemplar	43,635,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	Eksemplar	3,988,200	Eksemplar	7,551,300	*- Eksemplar*	*11,539,500*	*720 Eksemplar*	*183,439,500*	***60.00%***	*64.03%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	500	623,775,000	300	374,265,000		**89,620,600**	**%**	**-**	**%**	**78,828,400**	**%**	**-**	**%**	**9,000,000**	**- %**	***87,828,400***	***300 %***	***462,093,400***	***60.00%***	***74.08%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500 Stel	193,400,000	300 Stel	116,040,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		*- Stel*	-	***300 Stel***	***116,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1200 Eksemplar	189,600,000	720 Eksemplar	113,760,000	240 Eksemplar	41,465,600	0 Eksemplar		127 Eksemplar	39,703,400	58 Eksemplar	-	55 Eksemplar	-	***240 Eksemplar***	***39,703,400***	***960 Eksemplar***	***153,463,400***	***80.00%***	***80.94%***	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50 Orang	240,775,000	30 Orang	144,465,000	10 Orang	48,155,000	0 Orang		- Orang	39,125,000	3 Orang	-	7 Orang	9,000,000	***10 Orang***	***48,125,000***	***40 Orang***	***192,590,000***	***80.00%***	***79.99%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**4,557,010,750**	**85 %**	**2,734,206,450**	**%**	**1,097,580,300**	**%**	-	**%**	**152,231,450**	**%**	**446,103,100**	**%**	**111,191,960**	***- %***	***709,526,510***	***43 %***	***3,443,732,960***	***42.50%***	***75.57%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30 Unit	100,000,000	18 Unit	60,000,000	6 Unit	20,000,000	0 Unit		1 Unit	4,910,500	2 Unit	5,481,500	3 Unit	-	*6 Unit*	*10,392,000*	*24 Unit*	*70,392,000*	***80.00%***	*70.39%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1750 Unit	193,207,000	1050 Unit	115,924,200	350 Unit	39,790,400	0 Unit		79 Unit	8,679,000	221 Unit	25,382,500	50 Unit	-	*350 Unit*	*34,061,500*	*1,400 Unit*	*149,985,700*	***80.00%***	*77.63%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	600 Porsi	483,570,000	360 Porsi	290,142,000	120 Porsi	37,415,000	0 Porsi		18 Porsi	14,200,450	19 Porsi	6,825,500	83 Porsi	-	*120 Porsi*	*21,025,950*	*480 Porsi*	*311,167,950*	***80.00%***	*64.35%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6000 Eksemplar	557,593,750	3600 Eksemplar	334,556,250	1200 Eksemplar	342,907,900	0 Eksemplar		882 Eksemplar	82,005,000	72 Eksemplar	212,014,500	246 Eksemplar	11,640,000	*1,200 Eksemplar*	*305,659,500*	*4,800 Eksemplar*	*640,215,750*	***80.00%***	*114.82%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	1625 Buah	20,932,500	975 Buah	12,559,500	325 Buah	190,139,000	0 Buah		150 Buah	4,186,500	131 Buah	173,449,100	44 Buah	-	*325 Buah*	*177,635,600*	*1,300 Buah*	*190,195,100*	***80.00%***	*908.61%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	140 Kali	90,000,000	84 Kali	54,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*84 Kali*	*54,000,000*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	1,000,707,500	180 Kali	600,424,500	60 Kali	143,828,000	0 Kali		- Kali	-	20 Kali	-	40 Kali	46,751,960	*60 Kali*	*46,751,960*	*240 Kali*	*647,176,460*	***80.00%***	*64.67%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Aplikasi	2,111,000,000	12 Aplikasi	1,266,600,000	4 Aplikasi	323,500,000	0 Aplikasi		- Aplikasi	38,250,000	1 Aplikasi	22,950,000	3 Aplikasi	52,800,000	*4 Aplikasi*	*114,000,000*	*16 Aplikasi*	*1,380,600,000*	***80.00%***	*65.40%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1,937,700,000**	**75 %**	**1,162,620,000**	**%**	**541,430,000**	**%**	-	%	218,666,764	%	141,299,771	%	**54,726,064**	***- %***	***414,692,599***	***38 %***	***1,577,312,599***	***37.50%***	***81.40%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	20 Unit	225,850,000	12 Unit	135,510,000	4 Unit	49,170,000	0 Unit		1 Unit	16,641,115	2 Unit	18,216,383	1 Unit	12,335,604	*4 Unit*	*47,193,102*	*16 Unit*	*182,703,102*	***80.00%***	*80.90%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	763,050,000	72 Unit	457,830,000	24 Unit	195,230,000	0 Unit		7 Unit	40,765,649	3 Unit	43,409,000	14 Unit	35,405,460	*24 Unit*	*119,580,109*	*96 Unit*	*577,410,109*	***80.00%***	*75.67%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	120 Unit	595,000,000	72 Unit	357,000,000	24 Unit	196,120,000	0 Unit		12 Unit	119,000,000	7 Unit	28,600,000	5 Unit	-	*24 Unit*	*147,600,000*	*96 Unit*	*504,600,000*	***80.00%***	*84.81%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	211,300,000	18 Unit	126,780,000	6 Unit	76,410,000	0 Unit		1 Unit	42,260,000	3 Unit	33,679,388	2 Unit	-	*6 Unit*	*75,939,388*	*24 Unit*	*202,719,388*	***80.00%***	*95.94%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	142,500,000	18 Unit	85,500,000	6 Unit	24,500,000	0 Unit		1 Unit	-	3 Unit	17,395,000	2 Unit	6,985,000	*6 Unit*	*24,380,000*	*24 Unit*	*109,880,000*	***80.00%***	*77.11%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 Kali**	**2,593,475,000**	**36 Kali**	**1,556,085,000**	**Kali**	**2,122,760,000**	**Kali**	-	Kali	168,317,120	Kali	643,508,645	Kali	**770,211,189**	***- Kali***	***1,582,036,954***	***36 Kali***	***3,138,121,954***	***60.00%***	***121.00%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	725,975,000	36 Kali	435,585,000	12 Kali	1,736,860,000	0 Kali		1 Kali	145,195,000	5 Kali	616,958,645	6 Kali	756,406,189	*12 Kali*	*1,518,559,834*	*48 Kali*	*1,954,144,834*	***80.00%***	*269.18%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	1,867,500,000	36 Kali	1,120,500,000	12 Kali	385,900,000	0 Kali		1 Kali	23,122,120	2 Kali	26,550,000	9 Kali	13,805,000	*12 Kali*	*63,477,120*	*48 Kali*	*1,183,977,120*	***80.00%***	*63.40%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**100 %**	**6,334,750,000**	**85 %**	**3,800,850,000**	**%**	**2,024,729,720**	**%**	-	%	162,000,000	%	224,292,000	%	**45,000,000**	***- %***	***431,292,000***	***43 %***	***4,232,142,000***	***42.50%***	***66.81%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	-	3 Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*3 Unit*	-	***60.00%***		**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	500 Unit	-	300 Unit	-	100 Unit	50,094,720	0 Unit		- Unit	-	50 Unit	49,742,000	50 Unit	-	*100 Unit*	*49,742,000*	*400 Unit*	*49,742,000*	***80.00%***		**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115 Unit	310,000,000	69 Unit	186,000,000	23 Unit	234,500,000	0 Unit		15 Unit	62,000,000	5 Unit	169,550,000	3 Unit	-	*23 Unit*	*231,550,000*	*92 Unit*	*417,550,000*	***80.00%***	*134.69%*	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30 Unit	6,024,750,000	18 Unit	3,614,850,000	6 Unit	1,740,135,000	0 Unit		1 Unit	100,000,000	1 Unit	5,000,000	4 Unit	45,000,000	*6 Unit*	*150,000,000*	*24 Unit*	*3,764,850,000*	***80.00%***	*62.49%*	**DINAS PENDIDIKAN**
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**9.08**	**13.09**	**13.98**	31.99	12.57	22.08	13.03	**28.03**	**48.66**	**95.19**					
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	***R***	***ST***					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Angka Partisipasi Murni (APM) SMP**	**5**	**786,455,804,245**	**3**	**471,873,482,547**		**158,112,625,063**		-		**1,622,170,380**		**16,496,078,575**		**76,352,993,501**	*-*	***94,471,242,456***	***3***	***566,344,725,003***	***60.00%***	***72.01%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**100 %**	**535,590,064,285**	**%**	**321,354,038,571**	**%**	**106,066,559,906**	**%**	-	%	**1,590,758,380**		6,140,370,575		**50,466,213,720**	*-*	***58,197,342,675***	*-*	***379,551,381,246***	***0.00%***	***70.87%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	50 Ruang	45,671,420,060	30 Ruang	27,402,852,036	10 Ruang	9,153,080,430	0 Ruang	-	- Ruang	1,535,328,530	2 Ruang	538,635,500	8 Ruang	-	*10 Ruang*	*2,073,964,030*	*40 Ruang*	*29,476,816,066*	***80.00%***	*64.54%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Sarana,	75 Paket/ Unit	127,279,875,000	41 Paket/ Unit	76,367,925,000	1 3 Paket/ Unit	25,482,232,750	0 Paket/ Unit	-	- Paket/ Unit	28,148,000	3 Paket/ Unit	5,587,911,075	10 Paket/ Unit	16,176,142,524	*13 Paket/ Unit*	*21,792,201,599*	*54 Paket/Unit*	*98,160,126,599*		*77.12%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Prasarana dan Utilitas Sekolah	20 Kegiatan	348,750,656,525	12 Kegiatan	209,250,393,915	4 Kegiatan	71,015,768,226	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	34,252,290,046	*4 Kegiatan*	*34,252,290,046*	*16 Kegiatan*	*243,502,683,961*	***80.00%***	*69.82%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	5 Ruang	878,591,100	3 Ruang	527,154,660	1 Ruang	60,000,200	0 Ruang	-	- Ruang	-	0 Ruang	-	- Ruang	-	*- Ruang*	-	*3 Ruang*	*527,154,660*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	15 Kegiatan	1,033,109,500	9 Kegiatan	619,865,700	3 Kegiatan	206,621,900	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	*- Kegiatan*	-	*9 Kegiatan*	*619,865,700*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	45 Kegiatan	3,499,286,400	27 Kegiatan	2,099,571,840	9 Kegiatan	69,949,900	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	9 Kegiatan	8,033,000	*9 Kegiatan*	*8,033,000*	*36 Kegiatan*	*2,107,604,840*	***80.00%***	*60.23%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	60 Kegiatan	8,477,125,700	36 Kegiatan	5,086,275,420	12 Kegiatan	78,906,500	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	27,281,850	7 Kegiatan	13,824,000	5 Kegiatan	29,748,150	*12 Kegiatan*	*70,854,000*	*48 Kegiatan*	*5,157,129,420*	***80.00%***	*60.84%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah Pertama**	**100 %**	**193,401,719,210**	**%**	**116,041,031,526**	**%**	**38,882,983,407**	%	-	%	25,592,000	%	3,932,498,200	%	**19,400,185,481**	*-*	***23,358,275,681***	*-*	***139,399,307,207***	***0.00%***	***72.08%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Tepeneuhinya Pengelolaan Pendidikan Sekoalah Menengah Pertama	500 %	8,617,273,750	300 %	5,170,364,250	100 %	1,765,828,000	0 %	-	0.57 %	9,908,000	4.11 %	76,049,400	95.32 %	80,902,800	*100 %*	*166,860,200*	*400 %*	*5,337,224,450*		*61.94%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	95 Ruang	80,484,058,750	57 Ruang	48,290,435,250	19 Ruang	16,079,124,250	0 Ruang	-	- Ruang	15,684,000	5 Ruang	3,837,889,800	14 Ruang	10,333,466,045	*19 Ruang*	*14,187,039,845*	*76 Ruang*	*62,477,475,095*	***80.00%***	*77.63%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri)	500 %	101,848,569,000	300 %	61,109,141,400	100 %	20,941,711,957	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	8,985,816,636	*- %*	*8,985,816,636*	*300 %*	*70,094,958,036*		*68.82%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	500 %	546,000,000	300 %	327,600,000	100 %	53,630,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	*- %*	-	*300 %*	*327,600,000*		*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	PersentasePembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500 %	1,905,817,710	300 %	1,143,490,626	100 %	42,689,200	0 %	-	- %	-	41.24 %	18,559,000	58.76 %	-	*100 %*	*18,559,000*	*400 %*	*1,162,049,626*		*60.97%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			**51,792,503,500**		**31,075,502,100**		**9,839,465,000**		-		-		4,953,300,000		**4,690,793,000**	*-*	***9,644,093,000***	*-*	***40,719,595,100***		***78.62%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1160 Peserta Didik	49,699,300,000	696 Peserta Didik	29,819,580,000	232 Peserta Didik	9,797,400,000	0 Peserta Didik	-	- Peserta Didik	-	126 Peserta Didik	4,953,300,000	Peserta Didik	4,676,400,000	*126 Peserta Didik*	*9,629,700,000*	*822 Peserta Didik*	*39,449,280,000*	***70.86%***	*79.38%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20 KegiatanK Negeri	649,180,000	12 KegiatanK Negeri	389,508,000	4 KegiatanK Negeri	42,065,000	0 KegiatanK Negeri	-	- KegiatanK Negeri	-	0 KegiatanK Negeri	-	KegiatanK Negeri	14,393,000	*- KegiatanK*	*14,393,000*	*12 KegiatanK*	*403,901,000*	***60.00%***	*62.22%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	15 Kegiatan	1,444,023,500	9 Kegiatan	866,414,100	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		*- Kegiatan*	-	*9 Kegiatan*	*866,414,100*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**5,671,517,250**		**3,402,910,350**		**3,323,616,750**		-		**5,820,000**		**1,469,909,800**		**1,795,801,300**	*-*	***3,271,531,100***	*-*	***6,674,441,450***		***117.68%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 Ruang	1,237,396,250	3 Ruang	742,437,750	1 Ruang	446,316,750	0 Ruang	-	- Ruang	5,820,000	0 Ruang	27,297,300	1 Ruang	377,151,300	*1 Ruang*	*410,268,600*	*4 Ruang*	*1,152,706,350*		*93.16%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5 Kegiatan	3,745,600,000	3 Kegiatan	2,247,360,000	1 Kegiatan	2,837,300,000	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	1,418,650,000	1 Kegiatan	1,418,650,000	*1 Kegiatan*	*2,837,300,000*	*4 Kegiatan*	*5,084,660,000*	***80.00%***	*135.75%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	225,001,000	6 Kegiatan	135,000,600	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		*- Kegiatan*	-	*6 Kegiatan*	*135,000,600*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan	Jumlah Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	144,782,500	6 Kegiatan	86,869,500	2 Kegiatan	40,000,000	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	0 Kegiatan	23,962,500	2 Kegiatan	-	*2 Kegiatan*	*23,962,500*	*8 Kegiatan*	*110,832,000*	***80.00%***	*76.55%*	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetar aan	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Kegiatan	318,737,500	6 Kegiatan	191,242,500	Kegiatan		Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan		Kegiatan		- *Kegiatan*	-	*6 Kegiatan*	*191,242,500*	***60.00%***	*60.00%*	**DINAS PENDIDIKAN**
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0.08**	1.03	**26.98**	50.34	**29.81**	**47.67**	*56.88*	*99.04*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**R**	**ST**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		0	326,632,500	0	195,979,500		-		-		-		-		-	-	-	-	***195,979,500***		***60.00%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			326,632,500		195,979,500		-		-		-		-		-	-	-	-	***195,979,500***		***60.00%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah: Publikasi Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Paket	126,632,000	3 Paket	75,979,200	Paket		Paket		Paket	-	Paket		Paket		- ***Paket***	-	***3 Paket***	***75,979,200***	***60.00%***	***60.00%***	**DINAS PENDIDIKAN**
			Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Paket	200,000,500	3 Paket	120,000,300	Paket		Paket		Paket	-	Paket		Paket		- ***Paket***	-	***3 Paket***	***120,000,300***	***60.00%***	***60.00%***	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-						
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SD	**SR**	**SR**	**SR**					
			DINAS KESEHATAN																						
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**		**323,156,639,330**		**193,893,983,598**		**102,763,643,777**	**0**	**12,537,180,481**	**0.00**	**19,267,686,663**		**13,468,686,271**		**13,834,339,356**	- -	***59,107,892,771***	- -	***253,001,876,369***	***#DIV/0!***	***78.29%***	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	500 %	1,424,056,000	300 %	854,433,600	%	**215,634,400**	%	-	%	46,661,350	%	21,730,750	%	**19,243,250**	- *%*	***87,635,350***	***300 %***	***942,068,950***	***60.00%***	***66.15%***	DINAS KESEHATAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra, Renja dan Perubahannya)	150 Buku	202,006,000	90 Buku	121,203,600	30 Buku	15,001,200	0 Buku	-	10 Buku	6,267,600	0 Buku	-	20 Buku	-	***30 Buku***	***6,267,600***	***120 Buku***	***127,471,200***	***80.00%***	***63.10%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD	200 Dokumen	161,100,000	120 Dokumen	96,660,000	40 Dokumen	37,220,200	0 Dokumen	-	15 Dokumen	11,540,000	0 Dokumen	1,270,000	25 Dokumen	1,995,000	***40 Dokumen***	***14,805,000***	***160 Dokumen***	***111,465,000***	***80.00%***	***69.19%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	200 Dokumen	69,750,000	120 Dokumen	41,850,000	40 Dokumen	14,457,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	40 Dokumen	4,500,000	***40 Dokumen***	***4,500,000***	***160 Dokumen***	***46,350,000***	***80.00%***	***66.45%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buah	37,500,000	60 Buah	22,500,000	20 Buah	7,500,000	0 Buah	-	20 Buah	7,500,000	0 Buah	-	- Buah	-	***20 Buah***	***7,500,000***	***80 Buah***	***30,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buah	37,500,000	60 Buah	22,500,000	20 Buah	7,915,100	0 Buah	-	5 Buah	2,540,000	0 Buah	-	15 Buah	-	***20 Buah***	***2,540,000***	***80 Buah***	***25,040,000***	***80.00%***	***66.77%***	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian KInerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Dokumen	91,200,000	30 Dokumen	54,720,000	10 Dokumen	18,240,000	0 Dokumen	-	3 Dokumen	1,661,250	0 Dokumen	360,000	7 Dokumen	1,361,250	***10 Dokumen***	***3,382,500***	***40 Dokumen***	***58,102,500***	***80.00%***	***63.71%***	DINAS KESEHATAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat daerah	600 Buku	825,000,000	360 Buku	495,000,000	120 Buku	115,300,000	0 Buku	-	- Buku	17,152,500	0 Buku	20,100,750	120 Buku	11,387,000	***120 Buku***	***48,640,250***	***480 Buku***	***543,640,250***	***80.00%***	***65.90%***	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	500 %	272,709,697,065	300 %	163,625,818,239	%	**59,845,292,895**	%	**12,537,180,481**	%	18,276,296,243	%	12,836,757,959	%	**12,797,011,881**	- *%*	***56,447,246,564***	***300 %***	***220,073,064,803***	***60.00%***	***80.70%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	70 Bulan	227,309,097,065	42 Bulan	136,385,458,239	14 Bulan	50,941,762,895	3 Bulan	10,029,744,385	5 Bulan	16,740,682,339	2 Bulan	10,842,287,959	4 Bulan	10,760,971,881	***14 Bulan***	***48,373,686,564***	***56 Bulan***	***184,759,144,803***	***80.00%***	***81.28%***	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan Tugas ASN	3195 Orang	44,064,300,000	1917 Orang	26,438,580,000	639 Orang	8,642,340,000	159 Orang	2,507,436,096	159 Orang	1,450,233,904	160 Orang	1,964,190,000	161 Orang	1,976,080,000	***639 Orang***	***7,897,940,000***	***2,556 Orang***	***34,336,520,000***	***80.00%***	***77.92%***	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	25 Kali	1,276,850,000	15 Kali	766,110,000	5 Kali	249,300,000	0 Kali	-	2 Kali	85,380,000	0 Kali	30,280,000	3 Kali	59,960,000	*5 Kali*	*175,620,000*	*20 Kali*	*941,730,000*	*80.00%*	*73.75%*	DINAS KESEHATAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Paket	59,450,000	3 Paket	35,670,000	1 Paket	11,890,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	*- Paket*	*-*	*3 Paket*	*35,670,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500 %**	**793,430,000**	**300 %**	**476,058,000**	**%**	**158,686,000**	**%**	**-**	**%**	**118,975,000**	**%**	**-**	**%**	**23,500,000**	*- %*	*142,475,000*	*300 %*	*618,533,000*	*60.00%*	*77.96%*	**DINAS KESEHATAN**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1500 Stel	326,750,000	900 Stel	196,050,000	300 Stel	65,350,000	0 Stel	-	300 Stel	65,350,000	0 Stel	-	- Stel	-	*300 Stel*	*65,350,000*	*1,200 Stel*	*261,400,000*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	195 Orang	466,680,000	117 Orang	280,008,000	39 Orang	93,336,000	0 Orang	-	15 Orang	53,625,000	0 Orang	-	24 Orang	23,500,000	*39 Orang*	*77,125,000*	*156 Orang*	*357,133,000*	*80.00%*	*76.53%*	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	500 %	14,969,419,040	300 %	8,981,651,424	%	**2,483,535,808**	%	-	%	**444,923,636**	%	**314,232,666**	%	49,352,000	*- %*	*808,508,302*	*300 %*	*9,790,159,726*	*60.00%*	*65.40%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor	25 item	34,897,500	15 item	20,938,500	5 item	7,563,500	0 item	-	3 item	6,879,500	0 item	-	2 item	-	*5 item*	*6,879,500*	*20 item*	*27,818,000*	*80.00%*	*79.71%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Item	341,853,750	15 Item	205,112,250	5 Item	194,648,750	0 Item	-	2 Item	4,985,000	0 Item	24,000,000	3 Item	-	*5 Item*	*28,985,000*	*20 Item*	*234,097,250*	*80.00%*	*68.48%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	35 unit	115,920,600	21 unit	69,552,360	7 unit	30,335,420	0 unit	-	5 unit	8,471,000	0 unit	-	2 unit	-	*7 unit*	*8,471,000*	*28 unit*	*78,023,360*	*80.00%*	*67.31%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	35 kegiatan	2,099,058,500	21 kegiatan	1,259,435,100	7 kegiatan	333,486,300	0 kegiatan	-	4 kegiatan	90,128,500	0 kegiatan	98,893,550	3 kegiatan	-	*7 kegiatan*	*189,022,050*	*28 kegiatan*	*1,448,457,150*	*80.00%*	*69.01%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan Rutin kantor	500 Dokumen	4,546,153,750	300 Dokumen	2,727,692,250	100 Dokumen	1,015,316,750	0 Dokumen	-	20 Dokumen	101,323,000	0 Dokumen	21,965,000	80 Dokumen	9,600,000	*100 Dokumen*	*132,888,000*	*400 Dokumen*	*2,860,580,250*	*80.00%*	*62.92%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat Tulis kantor dan bahan material lainnya untuk keperluan rutin kantor	1000 Item	567,507,940	600 Item	340,504,764	200 Item	101,461,688	0 Item	-	60 Item	32,105,000	0 Item	47,587,500	140 Item	4,762,000	*200 Item*	*84,454,500*	*800 Item*	*424,959,264*	*80.00%*	*74.88%*	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	3155 perjalanan	7,035,690,000	1893 perjalanan	4,221,414,000	631 perjalanan	765,506,000	0 perjalanan	-	200 perjalanan	201,031,636	0 perjalanan	106,105,816	431 perjalanan	34,990,000	*631 perjalanan*	*342,127,452*	*2,524 perjalanan*	*4,563,541,452*	*80.00%*	*64.86%*	DINAS KESEHATAN
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pertemuan ASPAK	10 Kali	228,337,000	6 Kali	137,002,200	2 Kali	35,217,400	0 Kali	-	Kali	-	0 Kali	15,680,800	2 Kali	-	*2 Kali*	*15,680,800*	*8 Kali*	*152,683,000*	*80.00%*	*66.87%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500 %**	**10,235,750,000**	**300 %**	**6,141,450,000**	**100 %**	**2,065,400,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**9,000,000**	**%**	**-**	*- %*	*9,000,000*	*300 %*	*6,150,450,000*	*60.00%*	*60.09%*	**DINAS KESEHATAN**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	25 Unit	3,493,500,000	15 Unit	2,096,100,000	5 Unit	720,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*15 Unit*	*2,096,100,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meja, kursi lemari dan mebel lainnya	385 unit	359,000,000	231 unit	215,400,000	77 unit	71,800,000	0 unit	-	- unit	-	0 unit	-	- unit	-	*- unit*	*-*	*231 unit*	*215,400,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan USG Puskesmas	30 Unit	6,383,250,000	18 Unit	3,829,950,000	6 Unit	1,273,600,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	9,000,000	6 Unit	-	*6 Unit*	*9,000,000*	*24 Unit*	*3,838,950,000*	*80.00%*	*60.14%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500 %**	**7,960,526,225**	**300 %**	**4,776,315,735**	**100 %**	**1,459,155,745**	**%**	**-**	**%**	**195,423,887**	**%**	**90,165,396**	**%**	**503,483,520**	*- %*	*789,072,803*	*300 %*	*5,565,388,538*	*60.00%*	*69.91%*	**DINAS KESEHATAN**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 Bulan	7,023,026,225	36 Bulan	4,213,815,735	12 Bulan	1,309,335,745	0 Bulan	-	4 Bulan	193,903,887	2 Bulan	90,165,396	6 Bulan	503,483,520	*12 Bulan*	*787,552,803*	*48 Bulan*	*5,001,368,538*	*80.00%*	*71.21%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor PSC-119	25 unit	487,500,000	15 unit	292,500,000	5 unit	61,620,000	0 unit	-	- unit	1,520,000	1 unit	-	4 unit	-	*5 unit*	*1,520,000*	*20 unit*	*294,020,000*	*80.00%*	*60.31%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Operasional Mobil Combad Covid-19	5 Paket	450,000,000	3 Paket	270,000,000	1 Paket	88,200,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	*- Paket*	*-*	*3 Paket*	*270,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500 %**	**13,727,961,000**	**300 %**	**8,236,776,600**	**100 %**	**2,725,256,600**	**%**	**-**	**%**	**169,406,547**	**%**	**159,555,000**	**%**	**427,192,405**	*- %*	*756,153,952*	*300 %*	*8,992,930,552*	*60.00%*	*65.51%*	**DINAS KESEHATAN**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	115 unit	3,447,266,000	69 unit	2,068,359,600	23 unit	654,117,600	0 unit	-	unit	167,256,547	1 unit	59,705,000	22 unit	110,961,655	*23 unit*	*337,923,202*	*92 unit*	*2,406,282,802*	*80.00%*	*69.80%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	85 unit	225,600,000	51 unit	135,360,000	17 unit	45,120,000	0 unit		- unit	2,150,000	0 unit	-	10 unit	14,720,000	*10 unit*	*16,870,000*	*61 unit*	*152,230,000*	*71.76%*	*67.48%*	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	20 Unit	10,055,095,000	12 Unit	6,033,057,000	4 Unit	2,026,019,000	0 Unit		- Unit	-	0 Unit	99,850,000	4 Unit	301,510,750	*4 Unit*	*401,360,750*	*16 Unit*	*6,434,417,750*	*80.00%*	*63.99%*	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD**	**500 %**	**575,300,000**	**300 %**	**345,180,000**	**%**	**33,658,582,329**	**%**	**-**	**%**	**16,000,000**	**%**	**22,000,000**	**%**	**1,089,000**	*- %*	*39,089,000*	*300 %*	*384,269,000*	*60.00%*	*66.79%*	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	10 Item	575,300,000	6 Item	345,180,000	2 Item	33,658,582,329	0 Item	-	- Item	16,000,000	0 Item	22,000,000	2 Item	1,089,000	*2 Item*	*39,089,000*	*8 Item*	*384,269,000*	*80.00%*	*66.79%*	DINAS KESEHATAN
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check up**	**500 %**	**30,000,000**	**300 %**	**18,000,000**	**%**	**6,000,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**1,300,100**	*- %*	*1,300,100*	*300 %*	*19,300,100*	*60.00%*	*64.33%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mendapatkan Pelayanan Medical Check Up	15 Orang	30,000,000	9 Orang	18,000,000	3 Orang	6,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	3 Orang	1,300,100	*3 Orang*	*1,300,100*	*12 Orang*	*19,300,100*	*80.00%*	*64.33%*	DINAS KESEHATAN
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Persentase Anggota DPRD Mendapatkan Pelayanan Medical Check Up**	**500 %**	**730,500,000**	**300 %**	**438,300,000**	**%**	**146,100,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**15,244,500**	**%**	**12,167,200**	*- %*	*27,411,700*	*300 %*	*465,711,700*	*60.00%*	*63.75%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up	235 Orang	730,500,000	141 Orang	438,300,000	47 Orang	146,100,000	0 Orang	-	- Orang	-	20 Orang	15,244,500	27 Orang	12,167,200	*47 Orang*	*27,411,700*	*188 Orang*	*465,711,700*	*80.00%*	*63.75%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5.92**	**12.20**	**30.40**	18.75	**6.80**	13.11	**42.60**	13.46	85.71	57.52	-				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**R**	**ST**	**R**					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	15 %	303,392,509,150	9 %	182,035,505,490	%	**62,705,487,787**	**%**	**-**	**%**	**15,014,346,256**	**%**	**18,059,736,320**	**%**	**15,482,013,516**	*- %*	*15,014,346,256*	*9 %*	*197,049,851,746*	*60.00%*	*64.95%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota**	500 %	71,200,590,210	300 %	42,720,354,126	%	**13,801,303,042**	**%**	**-**	**%**	**1,052,384,300**	**%**	**2,936,683,580**	**%**	**5,539,393,524**	*- %*	*9,528,461,404*	*300 %*	*52,248,815,530*	*60.00%*	*73.38%*	DINAS KESEHATAN
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	15 unit	7,549,922,000	9 unit	4,529,953,200	3 unit	1,432,184,400	0 unit	-	- unit	-	1 unit	245,375,000	2 unit	245,375,000	*3 unit*	*490,750,000*	*12 unit*	*5,020,703,200*	*80.00%*	*66.50%*	DINAS KESEHATAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang mendapatkan rehabilitasi dan pemeliharaan	15 Item	34,344,911,500	9 Item	20,606,946,900	3 Item	6,569,097,300	0 Item	-	- Item	1,002,969,300	0 Item	1,782,246,080	3 Item	2,634,758,867	*3 Item*	*5,419,974,247*	*12 Item*	*26,026,921,147*	*80.00%*	*75.78%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	15 unit	1,523,369,500	9 unit	914,021,700	3 unit	304,673,900	0 unit	-	- unit	-	0 unit	-	3 unit	299,550,000	*3 unit*	*299,550,000*	*12 unit*	*1,213,571,700*	*80.00%*	*79.66%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan	200 item	24,732,412,210	120 item	14,839,447,326	40 item	4,938,142,442	0 item	-	- item	18,520,000	0 item	603,570,000	40 item	2,350,209,657	*40 item*	*2,972,299,657*	*160 item*	*17,811,746,983*	*80.00%*	*72.02%*	DINAS KESEHATAN
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang diadakan	50 Item	3,049,975,000	30 Item	1,829,985,000	10 Item	557,205,000	0 Item	-	- Item	30,895,000	1 Item	305,492,500	9 Item	9,500,000	*10 Item*	*345,887,500*	*40 Item*	*2,175,872,500*	*80.00%*	*71.34%*	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat tingkat daerah kabupaten/kota**	**500 %**	**231,464,818,940**	**300 %**	**138,878,891,364**	**%**	**48,802,984,745**	**%**	**-**	**%**	**13,922,681,956**	**%**	**15,114,591,240**	**%**	9,918,619,992	*- %*	*38,955,893,188*	*300 %*	*177,834,784,552*	*60.00%*	*76.83%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Puskesmas yang memenuhi target dalam cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	500 pesen	324,375,000	300 pesen	194,625,000	100 pesen	5,150,000	0 pesen	-	25 pesen	2,540,000	50 pesen	1,270,000	100 pesen	-	*175 pesen*	*3,810,000*	*475 pesen*	*198,435,000*	*95.00%*	*61.17%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang menggunakan pembiayaan jaminan persalinan	6900 Bulin	7,040,470,000	4140 Bulin	4,224,282,000	1380 Bulin	1,426,644,000	0 Bulin	-	- Bulin	309,950,939	50 Bulin	2,410,000	824 Bulin	784,747,417	*874 Bulin*	*1,097,108,356*	*5,014 Bulin*	*5,321,390,356*	*72.67%*	*75.58%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah nakes yang mendapat orientasi tentang MTBS dan MTBM	240 Tenaga Kesehatan	215,125,000	144 Tenaga Kesehatan	129,075,000	48 Tenaga Kesehatan	33,565,000	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	*- Tenaga Kesehatan*	*-*	*144 Tenaga Kesehatan*	*129,075,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan SDIDTK	240 Tenaga Kesehatan	80,425,000	144 Tenaga Kesehatan	48,255,000	Tenaga Kesehatan		Tenaga Kesehatan		Tenaga Kesehatan	-	Tenaga Kesehatan		Tenaga Kesehatan		*- Tenaga Kesehatan*	*-*	*144 Tenaga Kesehatan*	*48,255,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah petugas puskesmas yang mendapat orientasi tata laksana pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar terintegrasi	240 Tenaga Kesehatan	99,650,000	144 Tenaga Kesehatan	59,790,000	48 Tenaga Kesehatan	11,870,000	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	0 Tenaga Kesehatan	-	- Tenaga Kesehatan	-	*- Tenaga Kesehatan*	*-*	*144 Tenaga Kesehatan*	*59,790,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase puskesmas yang meningkatkan pelayanan pada usia produktif	500 persen	139,825,000	300 persen	83,895,000	100 persen	14,825,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	- persen	-	300 persen	83,895,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah nakes mengikuti sosialisasi care giver berkualitas dan jumlah kartu lansia tanggamus yang di cetak	30000 lembar	70,250,000	18000 lembar	42,150,000	6000 lembar	14,050,000	0 lembar	-	- lembar	-	0 lembar	13,898,600	6,000 lembar	-	6,000 lembar	13,898,600	24,000 lembar	56,048,600	80.00%	79.78%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko hipertensi	500 persen	98,550,000	300 persen	59,130,000	100 persen	23,090,000	0 persen	-	68.00 persen	13,402,900	4.91 persen	3,431,000	27.09 persen	-	100 persen	16,833,900	400 persen	75,963,900	80.00%	77.08%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase petugas puskesmas yang dibina deteksi dini faktor resiko Diabetes Melitus	500 persen	78,275,000	300 persen	46,965,000	100 persen	15,655,000	0 persen	-	- persen	1,905,750	12.17 persen	-	87.83 persen	-	100 persen	1,905,750	400 persen	48,870,750	80.00%	62.43%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberku osis	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan orang terduga TB sesuai standar	500 persen	99,375,000	300 persen	59,625,000	100 persen	18,175,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	- persen	300 persen	59,625,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Puskesmas yang memenuhi target cakupan pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar	500 persen	99,375,000	300 persen	59,625,000	100 persen	19,875,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	- persen	300 persen	59,625,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 persen	171,750,000	300 persen	103,050,000	100 persen	39,430,000	0 persen	-	7.39 persen	2,540,000	5.49 persen	2,540,000	87.12 persen	-	100 persen	5,080,000	400 persen	108,130,000	80.00%	62.96%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan terdampak bencana mendapatkan pelayanan kesehatan	500 persen	341,140,000	300 persen	204,684,000	100 persen	5,943,465,883	0 persen	-	- persen	68,228,000	60.67 persen	3,629,901,880	39.33 persen	114,428,000	100 persen	3,812,557,880	400 persen	4,017,241,880	80.00%	1177.59%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang mendapatkan pembinaan	120 Orang	123,500,000	72 Orang	74,100,000	24 Orang	12,825,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	72 Orang	74,100,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	120 puskesmas	278,625,000	72 puskesmas	167,175,000	24 puskesmas	12,385,000	0 puskesmas	-	- puskesmas	-	0 puskesmas	-	- puskesmas	-	- puskesmas	-	72 puskesmas	167,175,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah petugas Puskesmas yang mendapatkan pembinaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	120 Puskesmas	401,850,000	72 Puskesmas	241,110,000	24 Puskesmas	70,760,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	13,893,600	10 Puskesmas	8,566,700	14 Puskesmas	22,460,300	24 Puskesmas	44,920,600	96 Puskesmas	286,030,600	80.00%	71.18%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah SBH, KPM (Kader Pembangunan Manusia), Ponpes, dan Sekolah yang menerapkan promosi kesehatan	100 Sekolah	1,528,575,000	60 Sekolah	917,145,000	20 Sekolah	289,150,000	0 Sekolah	-	5 Sekolah	95,000,000	5 Sekolah	-	5 Sekolah	60,000,000	15 Sekolah	155,000,000	75 Sekolah	1,072,145,000	75.00%	70.14%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah tempat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya yang mendapatkan pembinaan	120 fasyankes	183,200,000	72 fasyankes	109,920,000	24 fasyankes	36,640,000	0 fasyankes	-	- fasyankes	-	0 fasyankes	-	10 fasyankes	4,944,500	10 fasyankes	4,944,500	82 fasyankes	114,864,500	68.33%	62.70%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Petugas Kesehatan yang dilatih tentang Sistem Kewspadaan Dini Dan Respon serta penanggulangan	360 orang	155,500,000	216 orang	93,300,000	72 orang	31,100,000	0 orang	-	72 orang	31,004,000	0 orang	-	- orang	-	72 orang	31,004,000	288 orang	124,304,000	80.00%	79.94%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Petugas Puskesmas yang dibina pelayanan kesehatan jiwa	500 persen	250,300,000	300 persen	150,180,000	100 persen	19,650,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	- persen	300 persen	150,180,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase CJH mendapatkan pelayanan kesehatan haji tahap 1,lanjutan dan vaksinasi meningitis meningococus	500 %	838,450,000	300 %	503,070,000	100 %	200,120,000	0 %	-	- %	-	15.16 %	-	84.84 %	30,343,200	100 %	30,343,200	400 %	533,413,200	80.00%	63.62%	DINAS KESEHATAN
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang di bina dalam pelayanan penyakit menular dan tidak menular	120 Puskesmas	426,600,000	72 Puskesmas	255,960,000	24 Puskesmas	69,635,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	-	0 Puskesmas	-	10 Puskesmas	6,600,000	10 Puskesmas	6,600,000	82 Puskesmas	262,560,000	68.33%	61.55%	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD)	120 puskesmas	74,792,856,500	72 puskesmas	44,875,713,900	24 puskesmas	13,080,940,000	0 puskesmas	-	- puskesmas	694,770,600	10 puskesmas	9,813,519,500	14 puskesmas	3,730,000	24 puskesmas	10,512,020,100	96 puskesmas	55,387,734,000	80.00%	74.05%	DINAS KESEHATAN
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase spesimen kasus penyakit potensial wabah/KLB yang dikirim	500 persen	492,950,000	300 persen	295,770,000	100 persen	98,590,000	0 persen	-	- persen	11,040,000	15.70 persen	4,440,000	84.30 persen	-	100 persen	15,480,000	400 persen	311,250,000	80.00%	63.14%	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Forum Kab/Kota Sehat	5 Kelompok	494,800,000	3 Kelompok	296,880,000	1 Kelompok	22,315,000	0 Kelompok	-	- Kelompok	-	0 Kelompok	-	- Kelompok	-	- Kelomp	-	3 Kelomp	296,880,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan telemedicine	500 persen	269,650,000	300 persen	161,790,000	100 persen	49,330,000	0 persen	-	- persen	-	0 persen	-	- persen	-	- persen	-	300 persen	161,790,000	60.00%	60.00%	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana bantuan operasional puskesmas	120 puskesmas	132,799,016,780	72 puskesmas	79,679,410,068	24 puskesmas	25,497,716,862	0 puskesmas	-	- puskesmas	12,671,173,167	5 puskesmas	1,384,197,700	19 puskesmas	8,469,984,575	*24 puskesmas*	*22,525,355,442*	*96 puskesmas*	*102,204,765,510*	*80.00%*	*76.96%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Akreditasi Fas litas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan akreditasi puskesmas	120 puskesmas	8,348,573,010	72 puskesmas	5,009,143,806	24 puskesmas	1,667,133,000	0 puskesmas	-	- puskesmas	-	5 puskesmas	250,415,860	19 puskesmas	421,382,000	*24 puskesmas*	*671,797,860*	*96 puskesmas*	*5,680,941,666*	*80.00%*	*68.05%*	DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase KIPI yang dilakukan pelacakan dan penanganan kurang dari 24 jam	500 %	496,975,000	300 %	298,185,000	100 %	78,900,000	0 %	-	- %	7,233,000	9.17 %	-	90.83 %	-	*100 %*	*7,233,000*	*400 %*	*305,418,000*	*80.00%*	*61.46%*	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase kejadian/kasus potensial wabah yang dilakukan PE dan penanggulangan kurang dari 24 jam	500 persen	724,812,650	300 persen	434,887,590	persen		persen		persen	-	persen		persen		*- persen*	-	*300 persen*	*434,887,590*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Presentase kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten/kota**	500 %	727,100,000	300 %	436,260,000	%	**101,200,000**	**%**	**-**	**%**	**39,280,000**	**%**	**8,461,500**	**%**	**24,000,000**	*- %*	*39,280,000*	*300 %*	*475,540,000*	*60.00%*	*65.40%*	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menggunakan Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SIKDA Generik	120 Puskesmas	727,100,000	72 Puskesmas	436,260,000	24 Puskesmas	101,200,000	0 Puskesmas	-	- Puskesmas	39,280,000	3 Puskesmas	8,461,500	21 Puskesmas	24,000,000	*24 Puskesmas*	*71,741,500*	*96 Puskesmas*	*508,001,500*	*80.00%*	*69.87%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**-**	**1.94**	23.94	**2.88**	28.80	**83.05**	24.69	*87.87*	-				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	T	**SR**	**T**	**SR**				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	**45 %**	**353,145,000**	**27 %**	**211,887,000**	**%**	**8,187,704,396**	**%**		**%**	**-**	**%**	**1,207,371,460**	**%**	**953,874,756**	*- %*	*2,161,246,216*	*27 %*	*2,373,133,216*	*60.00%*	*672.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Jumlah Praktik tenaga kesehatan yang mendapatkan ijin**	**500 %**	**166,900,000**	**300 %**	**100,140,000**	**%**	**13,575,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	*- %*	*-*	*300 %*	*100,140,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan sosialisasi perizinan	120 Orang	166,900,000	72 Orang	100,140,000	24 Orang	13,575,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	*- Orang*	*-*	*72 Orang*	*100,140,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar**	**500 %**	**127,300,000**	**300 %**	**76,380,000**	**%**	**8,174,129,396**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**1,207,371,460**	**%**	**953,874,756**	*- %*	*2,161,246,216*	*300 %*	*2,237,626,216*	*60.00%*	*1757.76%*	DINAS KESEHATAN
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	240 orang	127,300,000	144 orang	76,380,000	orang	8,174,129,396	0 orang	-	- orang	-	0 orang	1,207,371,460	20 orang	953,874,756	*20 orang*	*2,161,246,216*	*164 orang*	*2,237,626,216*	*68.33%*	*1757.76%*	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peserta yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan perkesmas**	**500 %**	**58,945,000**	**300 %**	**35,367,000**	**%** **100**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	*- %*	*-*	*300 %*	*35,367,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	240 Orang	58,945,000	144 Orang	35,367,000	Orang		Orang	-	Orang	-	Orang		Orang		*- Orang*	*-*	*144 Orang*	*35,367,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	-	**-**	14.75	**16.13**	11.65	*16.13*	*26.40*				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan Yang Berizin Serta Produksi Pangan Pada P-IRT (Perusahaan Industri Rumah Tangga) Yang Bersertifikat**	**15 %**	**3,010,920,000**	**9 %**	**1,806,552,000**	**%**	**567,484,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**186,816,000**	**%**	**88,650,000**	*- %*	*275,466,000*	*9 %*	*2,082,018,000*	*60.00%*	*69.15%*	DINAS KESEHATAN
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Perizinan Apotek, Toko Obat yang mendapatkan Izin**	**500 %**	**-**	**300 %**	**-**	**%**		**%**	**-**	**%**	**-**	**%**		**%**		*- %*	*-*	*300 %*				DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase jumlah Penertiban Sertifikat Produksi Pangan dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**500 %**	**2,602,920,000**	**300 %**	**1,561,752,000**	**%**	**502,184,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**186,816,000**	**%**	**88,650,000**	*- %*	*275,466,000*	*300 %*	*1,837,218,000*	*60.00%*	*70.58%*	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	500 persen	2,602,920,000	300 persen	1,561,752,000	persen 100	502,184,000	persen 0	-	persen -	-	37.20 persen	186,816,000	63 persen	88,650,000	***100 persen***	***275,466,000***	***400 persen***	***1,837,218,000***	***80.00%***	***70.58%***	DINAS KESEHATAN
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Presentase Jumlah Penertiban Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**15 %**	**174,000,000**	**9 %**	**104,400,000**	**% 3**	**18,500,000**	%	-	%	-	%	-	%	-	***- %***	***-***	***9 %***	***104,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	25000 stiker	174,000,000	15000 stiker	104,400,000	stiker 5000	18,500,000	0 stiker	-	- stiker	-	0 stiker	-	- stiker	-	***- stiker***	***-***	***15,000 stiker***	***104,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Jumlah Pemeriksa dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makan dan minuman Industri Rumah Tangga**	**Item**	**234,000,000**	**Item**	**140,400,000**	**Item**	**46,800,000**	**Item**	-	**Item**	-	**Item**	-	**Item**	-	***- Item***	***-***	***- Item***	***140,400,000***		***60%***	DINAS KESEHATAN
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	25 item	234,000,000	15 item	140,400,000	item 5	46,800,000	0 item	-	- item	-	0 item	-	- item	-	***- item***	***-***	***15 item***	***140,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.73**	**32.92**	**1.23**	**15.62**	***1.96***	***48.54***					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase Kader Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan**	**40 %**	**16,516,475,000**	**24 %**	**9,909,885,000**	%	**3,292,965,000**	%	-	%	**968,611,850**	%	**5,560,000**	%	-	***- %***	***974,171,850***	***24 %***	***10,884,056,850***	***60.00%***	***65.90%***	DINAS KESEHATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lomba- lomba dan kebijakan kesehatan tingkat kabupaten yang disusun**	**40 %**	**97,975,000**	**24 %**	**58,785,000**	%	**10,385,000**	%	-	%	-	%	-	%	-	***- %***	***-***	***24 %***	***58,785,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lomba-Lomb yang diikuti	35 Event	97,975,000	21 Event	58,785,000	Event 7	10,385,000	0 Event	-	- Event	-	0 Event	-	- Event	-	***- Event***	***-***	***21 Event***	***58,785,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**500 %**	**398,425,000**	**300 %**	**239,055,000**	%	**79,685,000**	%	-	%	-	%	-	%	-	***- %***	***-***	***300 %***	***239,055,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah event kegiaatan promosi kesehatan dan Germas yang dilaksanakan	30 Event	398,425,000	18 Event	239,055,000	Event 6	79,685,000	0 Event	-	- Event	-	0 Event	-	- Event	-	***- Event***	***-***	***18 Event***	***239,055,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KESEHATAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan & Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)**	**500 %**	**16,020,075,000**	**300 %**	**9,612,045,000**	%	**3,202,895,000**	%	-	%	**968,611,850**	%	**5,560,000**	%	-	***- %***	***974,171,850***	***300 %***	***10,586,216,850***	***60.00%***	***66.08%***	DINAS KESEHATAN
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader kesehatan yang mendapatkan intensif dalam setahun	24415 kader	16,020,075,000	14649 kader	9,612,045,000	kader 4883	3,202,895,000	0 kader	-	30 kader	968,611,850	0 kader	5,560,000	- kader	-	***30 kader***	***974,171,850***	***14,679 kader***	***10,586,216,850***	***60.12%***	***66.08%***	DINAS KESEHATAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0**	**-**	**0.61**	29.41	**0.00**	0.17	**0.00**	-	***0.61***	***29.58***					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**SR**	**SR**					
			RSUD BATIN MANGUNANG			-																			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			-																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			-																			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**175,601,825,715**	**WTP**	**105,361,095,429**	**WTP**	**39,030,477,357**	**WTP**	**3,591,303,203**	**WTP**	**7,787,817,442**	**WTP**	**5,011,295,190**	**WTP**	**4,405,505,156**	***- WTP***	***20,795,920,991***	***- WTP***	***126,157,016,420***		***72%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Menjadi Acuan Dalam Meningkatkan Sistem Perencanaan Berbasis Kinerja**	**500 %**	**601,906,000**	**300 %**	**361,143,600**	**%**	**57,215,000**	**%**	**-**	**%**	**14,251,200**	**%**	**13,288,000**	**%**	**4,800,000**	***- %***	***32,339,200***	***300 %***	***393,482,800***	***60%***	***65%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	450 Buku	406,251,000	270 Buku	243,750,600	90 Buku	39,444,200	0 Buku	-	8 Buku	14,251,200	0 Buku	6,070,000	82 Buku	4,800,000	***90 Buku***	***25,121,200***	***360 Buku***	***268,871,800***	***80%***	***66%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45,400,000	360 Eksemplar Dokumen	27,240,000	120 Eksemplar Dokumen	3,454,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,500,000	60 Eksemplar Dokumen	-	***60 Eksemplar Dokum***	***1,500,000***	***420 Eksemplar Dokum***	***28,740,000***	***70%***	***63%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600 Eksemplar Dokumen	45,400,000	360 Eksemplar Dokumen	27,240,000	120 Eksemplar Dokumen	2,700,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	2,700,000	120 Eksemplar Dokumen	-	***120 Eksemplar Dokum***	***2,700,000***	***480 Eksemplar Dokum***	***29,940,000***	***80%***	***66%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6,000,000	90 Eksemplar Dokumen	3,600,000	30 Eksemplar Dokumen	1,500,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***90 Eksemplar Dokum***	***3,600,000***	***60%***	***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Eksemplar Dokumen	6,000,000	90 Eksemplar Dokumen	3,600,000	30 Eksemplar Dokumen	1,500,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***90 Eksemplar Dokum***	***3,600,000***	***60%***	***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	125 Eksemplar Dokumen	39,110,000	75 Eksemplar Dokumen	23,466,000	25 Eksemplar Dokumen	6,252,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	3,018,000	15 Eksemplar Dokumen	-	***15 Eksemplar Dokum***	***3,018,000***	***90 Eksemplar Dokum***	***26,484,000***	***72%***	***68%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	250 Eksemplar Dokumen	53,745,000	150 Eksemplar Dokumen	32,247,000	25 Eksemplar Dokumen	2,364,000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***150 Eksemplar Dokum***	***32,247,000***	***60%***	***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**87,838,866,715**	**300 %**	**52,703,320,029**	**%**	**17,427,816,774**	**%**	**3,364,495,795**	**%**	**4,884,363,503**	**%**	**3,868,320,117**	**%**	**3,822,900,089**	***- %***	***15,940,079,504***	***300 %***	***68,643,399,533***	***60%***	***78%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	69,791,967,715	36 Bulan	41,875,180,629	12 Bulan	13,755,152,774	3 Bulan	2,567,845,795	2 Bulan	4,021,378,503	3 Bulan	2,934,275,117	4 Bulan	2,932,508,089	***12 Bulan***	***12,456,007,504***	***48 Bulan***	***54,331,188,133***	***80%***	***78%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	975 Orang	17,224,500,000	585 Orang	10,334,700,000	195 Orang	3,514,700,000	25 Orang	796,650,000	40 Orang	862,985,000	60 Orang	844,125,000	70 Orang	842,400,000	***195 Orang***	***3,346,160,000***	***780 Orang***	***13,680,860,000***	***80%***	***79%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	60 Kali	697,200,000	36 Kali	418,320,000	12 Kali	137,920,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	89,920,000	12 Kali	43,440,000	***12 Kali***	***133,360,000***	***48 Kali***	***551,680,000***	***80%***	***79%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200 Buku	47,739,000	120 Buku	28,643,400	40 Buku	4,552,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***120 Buku***	***28,643,400***	***60%***	***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan/Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	75 Eksemplar Dokumen	77,460,000	45 Eksemplar Dokumen	46,476,000	15 Eksemplar Dokumen	15,492,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	4,552,000	***15 Eksemplar Dokumen***	***4,552,000***	***60 Eksemplar Dokumen***	***51,028,000***	***80%***	***66%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500 %**	**920,850,000**	**300 %**	**552,510,000**	**%**	**132,030,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**4,870,000**	**%**	**4,000,000**	***- %***	***8,870,000***	***300 %***	***561,380,000***	***60%***	***61%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1236 Stel	721,800,000	788 Stel	433,080,000	394 Stel	119,960,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	***- Stel***	***-***	***788 Stel***	***433,080,000***		***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	50 Orang	199,050,000	30 Orang	119,430,000	3 Orang	12,070,000	0 Orang	-	- Orang	-	0 Orang	4,870,000	3 Orang	4,000,000	***3 Orang***	***8,870,000***	***33 Orang***	***128,300,000***		***64%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**5,316,680,000**	**300 %**	**3,190,008,000**	**%**	**1,032,714,100**	**%**	**-**	**%**	**77,466,700**	**%**	**285,470,100**	**%**	**12,190,000**	***- %***	***375,126,800***	***300 %***	***3,565,134,800***	***60%***	***67%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1481 Unit	154,750,000	735 Unit	92,850,000	245 Unit	16,645,000	0 Unit	-	47 Unit	6,000,000	0 Unit	5,200,000	78 Unit	-	***125 Unit***	***11,200,000***	***860 Unit***	***104,050,000***		***67%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Unit	835,245,000	36 Unit	501,147,000	5 Unit	272,757,700	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	197,212,700	5 Unit	12,190,000	***5 Unit***	***209,402,700***	***41 Unit***	***710,549,700***		***85%***	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	335 Unit	164,500,000	201 Unit	98,700,000	67 Unit	28,400,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	***-***	***201 Unit***	***98,700,000***		***60%***	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	20510 Porsi	477,270,000	12275 Porsi	286,362,000	4102 Porsi	66,269,000	0 Porsi	-	702 Porsi	16,350,400	0 Porsi	6,149,900	298 Porsi	-	*1,000 Porsi*	*22,500,300*	*13,275 Porsi*	*308,862,300*		*65%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan untuk Keperluan Kantor	990000 Eksemplar	855,138,500	740250 Eksemplar	513,083,100	246750 Eksemplar	141,457,200	0 Eksemplar	-	2,470 Eksemplar	12,156,600	0 Eksemplar	-	530 Eksemplar	-	*3,000 Eksemplar*	*12,156,600*	*743,250 Eksemplar*	*525,239,700*		*61%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Kantor	27250 Buah	1,048,231,000	11700 Buah	628,938,600	5450 Buah	150,876,100	0 Buah	-	182 Buah	7,000,000	0 Buah	58,464,000	1,068 Buah	-	*1,250 Buah*	*65,464,000*	*12,950 Buah*	*694,402,600*		*66%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	962 Kali	1,781,545,500	376 Kali	1,068,927,300	192 Kali	356,309,100	0 Kali	-	3 Kali	35,959,700	1 Kali	18,443,500	46 Kali	-	*50 Kali*	*54,403,200*	*426 Kali*	*1,123,330,500*		*63%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500 %**	**168,000,000**	**300 %**	**100,800,000**	**% **	**9,950,000**	**% **	**-**	**% **	**-**	**% **	**-**	**% **	**-**	*- %*	*-*	*300 %*	*100,800,000*	*60%*	*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	50 Unit	168,000,000	25 Unit	100,800,000	10 Unit	9,950,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*25 Unit*	*100,800,000*		*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500 %**	**15,267,576,000**	**300 %**	**9,160,545,600**	**% **	**2,969,225,200**	**% **	**226,807,408**	**% **	**669,109,176**	**% **	**756,108,723**	**% **	**480,062,317**	*- %*	*2,132,087,624*	*300 %*	*11,292,633,224*	*60%*	*74%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Persentase Jasa Surat Menyurat	500 %	135,210,000	300 %	81,126,000	100 %	27,042,000	15 %	108,650,300	15 %	- 99,636,300	40 %	10,284,000	30 %	-	*100 %*	*19,298,000*	*400 %*	*100,424,000*		*74%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	60 Kali	3,423,600,000	36 Kali	2,054,160,000	12 Kali	640,680,000	0 Kali	-	4 Kali	234,182,099	4 Kali	139,046,768	4 Kali	126,823,677	*12 Kali*	*500,052,544*	*48 Kali*	*2,554,212,544*		*75%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520 Kali	345,000,000	296 Kali	207,000,000	105 Kali	28,750,000	0 Kali	-	- Kali	-	45 Kali	11,230,000	60 Kali	-	*105 Kali*	*11,230,000*	*401 Kali*	*218,230,000*		*63%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Persentase Pelayanan Umum Kantor	500 %	11,363,766,000	300 %	6,818,259,600	100 %	2,272,753,200	5 %	118,157,108	5 %	534,563,377	35 %	595,547,955	55 %	353,238,640	*100 %*	*1,601,507,080*	*400 %*	*8,419,766,680*		*74%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**2,987,947,000**	**300 %**	**1,792,768,200**	**% **	**521,942,400**	**% **	**-**	**% **	**61,127,000**	**% **	**83,238,250**	**% **	**81,552,750**	*- %*	*225,918,000*	*300 %*	*2,018,686,200*		*68%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	225 Unit	2,101,122,000	181 Unit	1,260,673,200	22 Unit	344,577,400	0 Unit	-	1 Unit	61,127,000	9 Unit	43,388,250	12 Unit	2,082,750	*22 Unit*	*106,598,000*	*203 Unit*	*1,367,271,200*		*65%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	25 Unit	886,825,000	12 Unit	532,095,000	5 Unit	177,365,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	39,850,000	4 Unit	79,470,000	*5 Unit*	*119,320,000*	*17 Unit*	*651,415,000*		*73%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD dengan Baik	**500 %**	**62,500,000,000**	**300 %**	**37,500,000,000**	**% **	**16,879,583,883**	**% **	**-**	**% **	**2,081,499,863**	**% **	**-**	**% **	**-**	*- %*	*2,081,499,863*	*300 %*	*39,581,499,863*	*60%*	*63%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60 Kali	62,500,000,000	36 Kali	37,500,000,000	12 Kali	16,879,583,883	0 Kali	-	6 Kali	2,081,499,863	3 Kali	-	3 Kali	-	*12 Kali*	*2,081,499,863*	*48 Kali*	*39,581,499,863*		*63%*	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.02**	**9.20**	**1.35**	19.95	**0.08**	12.84	**1.00**	11.29	*2.44*	*53.28*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**SR**	**R**					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**15 %**	**25,346,904,000**	**9 %**	**15,208,142,400**	**% **	**4,529,034,300**	**% **	**-**	**% **	**81,700,221**		**381,685,000**		**198,850,000**	*- %*	*662,235,221*	*9 %*	*15,870,377,621*	*60%*	*63%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Fasilitas Pelayanan di RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**17,737,554,000**	**300 %**	**10,642,532,400**	**% **	**3,360,470,800**	**% **	**-**	**% **	**-**	**% **	**138,493,300**	**% **	**198,850,000**	*- %*	*337,343,300*	*300 %*	*10,979,875,700*	*60%*	*62%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	25 Unit	5,282,889,500	15 Unit	3,169,733,700	5 Unit	893,437,900	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	138,493,300	4 Unit	198,850,000	*5 Unit*	*337,343,300*	*20 Unit*	*3,507,077,000*		*66%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	10 Unit	99,900,000	6 Unit	59,940,000	2 Unit	9,450,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*6 Unit*	*59,940,000*		*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	240 Unit	12,036,264,500	127 Unit	7,221,758,700	57 Unit	2,406,432,900	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*127 Unit*	*7,221,758,700*		*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	130 Unit	318,500,000	52 Unit	191,100,000	Unit 26	51,150,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*52 Unit*	*191,100,000*		*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**7,076,063,500**	**300 %**	**4,245,638,100**	**%**	**1,084,393,300**	**% 4**	**-**	**% 4**	**41,233,021**	**%**	**236,696,700**	**%**	**-**	*9 %*	*277,929,721*	*309 %*	*4,523,567,821*	*62%*	*64%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4,378,538,000	3 Dokumen	2,627,122,800	1 Dokumen	875,707,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	37,189,221	1 Dokumen	200,158,200	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*237,347,421*	*4 Dokumen*	*2,864,470,221*		*65%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Kali	204,875,000	3 Kali	122,925,000	Kali		Kali	-	Kali	-	Kali		Kali		*- Kali*	-	*3 Kali*	*122,925,000*		*60%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	400,101,000	3 Dokumen	240,060,600	1 Dokumen	19,113,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,143,800	1 Dokumen	6,284,000	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*9,427,800*	*4 Dokumen*	*249,488,400*		*62%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1545 Dokumen/Unit	828	828 Dokumen/Unit	196,211,100	276 Dokumen	98,412,700	0 Dokumen	-	100 Dokumen	900,000	150 Dokumen	30,254,500	26 Dokumen	-	*276 Dokumen*	*31,154,500*	*1,104 Dokumen*	*227,365,600*		*#######*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Kesehatan di RSUD Batin Mangunang	65 Pokja	1,765,531,000	48 Pokja	1,059,318,600	Pokja 1	91,159,200	Pokja 0	-	Pokja -	-	0 Pokja	-	- Pokja	-	*- Pokja*	-	*48 Pokja*	*1,059,318,600*		*60.00%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**500 %**	**533,286,500**	**300 %**	**319,971,900**	**%**	**84,170,200**	**%**	**-**	**%**	**40,467,200**	**%**	**6,495,000**	**%**	**-**	*- %*	*46,962,200*	*300 %*	*366,934,100*	*60.00%*	*68.81%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5 Dokumen	533,286,500	3 Dokumen	319,971,900	1 Dokumen	84,170,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	40,467,200	0 Dokumen	6,495,000	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*46,962,200*	*4 Dokumen*	*366,934,100*	*80.00%*	*68.81%*	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.15**	**-**	**28.18**	1.80	**41.35**	8.43	**8.38**	4.39	*79.05*	*14.62*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SD	**SR**	**T**	**SR**					
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya**	**450 %**	**192,700,000**	**270 %**	**115,620,000**	**%**	**987,153,992**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**479,723,800**	**%**	**435,882,527**	*- %*	*915,606,327*	*270 %*	*1,031,226,327*	*60.00%*	*535.15%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**500 %**	**4,893,419,960**	**300 %**	**2,936,051,976**	**%**	**978,683,992**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**479,723,800**	**%**	**429,882,527**	*- %*	*909,606,327*	*300 %*	*3,845,658,303*	*60.00%*	*78.59%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	5 Dokumen	4,893,419,960	3 Dokumen	2,936,051,976	1 Dokumen	978,683,992	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	479,723,800	1 Dokumen	429,882,527	*1 Dokumen*	*909,606,327*	*4 Dokumen*	*3,845,658,303*	*80.00%*	*78.59%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pengembangan dan Peningkatan Teknis SDM Kesehatan di RSUD Batin Mangunang**	**500 %**	**192,700,000**	**300 %**	**115,620,000**	**%**	**8,470,000**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**-**	**%**	**6,000,000**	*- %*	*6,000,000*	*300 %*	*121,620,000*	*60.00%*	*63.11%*	RSUD BATIN MANGUNANG
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM (Fungsional) di RSUD Batin Mangunang	50 Orang	192,700,000	30 Orang	115,620,000	Orang 10	8,470,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	10 Orang	6,000,000	*10 Orang*	*6,000,000*	*40 Orang*	*121,620,000*	*80.00%*	*63.11%*	RSUD BATIN MANGUNANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	48.60	**100.00**	44.16	*100.00*	*92.75*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST**	**ST**					
			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			-		-																	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			-		-																	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-		-																	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**80,407,080,405**	**WTP**	**48,244,248,243**	**WTP**	**15,111,869,880**	**WTP**	**2,505,485,999**	**WTP**	**4,026,532,292**	**WTP**	**2,718,901,706**	**WTP**	**3,367,963,176**	**- WTP**	***12,618,883,173***	***- WTP***	***60,863,131,416***		***75.69%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**500 %**	**2,013,547,000**	**300 %**	**1,208,128,200**	**%**	**353,170,100**	**%**	**18,308,800**	**%**	**64,334,200**	**%**	**28,160,200**	**%**	**9,460,000**	**- %**	***120,263,200***	***300 %***	***1,328,391,400***	***60.00%***	***65.97%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	20 Dokumen	125,000,000	12 Dokumen	75,000,000	4 Dokumen	14,131,000	0 Dokumen	6,600,500	1 Dokumen	2,760,000	1 Dokumen	3,970,500	2 Dokumen	-	***4 Dokumen***	***13,331,000***	***16 Dokumen***	***88,331,000***	***80.00%***	***70.66%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah yang disusun	10 Dokumen	253,209,000	6 Dokumen	151,925,400	2 Dokumen	56,293,800	0 Dokumen	3,703,800	- Dokumen	48,130,000	1 Dokumen	4,460,000	1 Dokumen	-	***2 Dokumen***	***56,293,800***	***8 Dokumen***	***208,219,200***	***80.00%***	***82.23%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	10 Dokumen	241,710,000	6 Dokumen	145,026,000	2 Dokumen	56,154,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	5,992,000	2 Dokumen	8,400,000	***2 Dokumen***	***14,392,000***	***8 Dokumen***	***159,418,000***	***80.00%***	***65.95%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	10 Dokumen	90,142,500	6 Dokumen	54,085,500	2 Dokumen	13,328,700	1 Dokumen	8,004,500	1 Dokumen	5,324,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***2 Dokumen***	***13,328,700***	***8 Dokumen***	***67,414,200***	***80.00%***	***74.79%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	10 Dokumen	89,683,500	6 Dokumen	53,810,100	2 Dokumen	13,644,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	7,184,200	2 Dokumen	400,000	***2 Dokumen***	***7,584,200***	***8 Dokumen***	***61,394,300***	***80.00%***	***68.46%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan SKPD yang disusun	40 Dokumen	223,802,000	24 Dokumen	134,281,200	8 Dokumen	17,278,400	0 Dokumen	-	1 Dokumen	6,410,000	2 Dokumen	1,320,000	5 Dokumen	660,000	***8 Dokumen***	***8,390,000***	***32 Dokumen***	***142,671,200***	***80.00%***	***63.75%***	DINAS PUPR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi SKPD yang disusun	30 Dokumen	990,000,000	18 Dokumen	594,000,000	6 Dokumen	182,340,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,710,000	1 Dokumen	5,233,500	5 Dokumen	-	***6 Dokumen***	***6,943,500***	***24 Dokumen***	***600,943,500***	***80.00%***	***60.70%***	DINAS PUPR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**500 %**	**57,214,228,355**	**300 %**	**34,328,537,013**	**%**	**11,128,666,620**	**%**	**2,193,370,789**	**%**	**3,350,022,971**	**%**	**2,303,256,610**	**%**	**2,466,652,088**	**- %**	***10,313,302,458***	***300 %***	***44,641,839,471***	***60.00%***	***78.03%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	41,515,253,355	42 Bulan	24,909,152,013	14 Bulan	8,219,581,620	3 Bulan	1,602,310,789	5 Bulan	2,571,894,971	3 Bulan	1,705,606,610	3 Bulan	1,666,834,088	***14 Bulan***	***7,546,646,458***	***56 Bulan***	***32,455,798,471***	***80.00%***	***78.18%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	60 Bulan	12,126,600,000	36 Bulan	7,275,960,000	12 Bulan	2,187,120,000	3 Bulan	524,700,000	3 Bulan	538,200,000	3 Bulan	528,750,000	3 Bulan	534,300,000	***12 Bulan***	***2,125,950,000***	***48 Bulan***	***9,401,910,000***	***80.00%***	***77.53%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Bulan	3,572,375,000	36 Bulan	2,143,425,000	12 Bulan	721,965,000	3 Bulan	66,360,000	3 Bulan	239,928,000	3 Bulan	68,900,000	3 Bulan	265,518,000	***12 Bulan***	***640,706,000***	***48 Bulan***	***2,784,131,000***	***80.00%***	***77.94%***	DINAS PUPR
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat**	**500 %**	**642,375,000**	**300 %**	**385,425,000**	**%**	**121,215,000**	**%**	**-**	**%**	**42,355,000**	**%**	**-**	**%**	**930,000**	**- %**	***43,285,000***	***300 %***	***428,710,000***	***60.00%***	***66.74%***	DINAS PUPR
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	25 Orang	642,375,000	15 Orang	385,425,000	5 Orang	121,215,000	0 Orang	-	2 Orang	42,355,000	0 Orang	-	3 Orang	930,000	***5 Orang***	***43,285,000***	***20 Orang***	***428,710,000***	***80.00%***	***66.74%***	DINAS PUPR
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**PersentasePenyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500 %**	**8,604,526,550**	**300 %**	**5,162,715,930**	**%**	**1,200,873,460**	**%**	**134,339,630**	**%**	**128,727,820**	**%**	**238,819,510**	**%**	**282,560,077**	**- %**	***784,447,037***	***300 %***	***5,947,162,967***	***60.00%***	***69.12%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 Unit	2,278,936,950	36 Unit	1,367,362,170	12 Unit	416,935,480	3 Unit	51,725,390	3 Unit	225,000	1 Unit	98,638,090	5 Unit	56,995,000	***12 Unit***	***207,583,480***	***48 Unit***	***1,574,945,650***	***80.00%***	***69.11%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	1,138,750,000	36 Bulan	683,250,000	12 Bulan	210,390,000	3 Bulan	24,948,000	3 Bulan	24,948,000	2 Bulan	37,422,000	4 Bulan	63,300,000	***12 Bulan***	***150,618,000***	***48 Bulan***	***833,868,000***	***80.00%***	***73.23%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	558,693,000	36 Bulan	335,215,800	12 Bulan	124,749,700	3 Bulan	30,784,600	3 Bulan	61,267,000	3 Bulan	29,598,100	3 Bulan	930,000	***12 Bulan***	***122,579,700***	***48 Bulan***	***457,795,500***	***80.00%***	***81.94%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor untuk keperluan rutin kantor	60 Bulan	479,071,600	36 Bulan	287,442,960	12 Bulan	84,325,280	3 Bulan	26,881,640	3 Bulan	27,161,820	3 Bulan	27,161,820	3 Bulan	780,000	***12 Bulan***	***81,985,280***	***48 Bulan***	***369,428,240***	***80.00%***	***77.11%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi urusan pemerintah daerah	3200 Kali	4,149,075,000	2000 Kali	2,489,445,000	400 Kali	364,473,000	0 Kali	-	- Kali	15,126,000	67 Kali	45,999,500	333 Kali	160,555,077	***400 Kali***	***221,680,577***	***2,400 Kali***	***2,711,125,577***	***75.00%***	***65.34%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**10 Unit**	**2,228,400,000**	**6 Unit**	**1,337,040,000**	**2 Unit**	**455,340,000**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	***- Unit***	***-***	***6 Unit***	***1,337,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PUPR
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	10 Unit	2,228,400,000	6 Unit	1,337,040,000	2 Unit	455,340,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	***-***	***6 Unit***	***1,337,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140 Bulan**	**5,390,603,500**	**84 Bulan**	**3,234,362,100**	**Bulan**	**884,494,700**	**Bulan**	**45,808,792**	**Bulan**	**116,307,851**	**Bulan**	**40,227,736**	**Bulan**	**266,553,173**	***- Bulan***	***468,897,552***	***84 Bulan***	***3,703,259,652***	***60.00%***	***68.70%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD	60 Bulan	410,880,000	36 Bulan	246,528,000	12 Bulan	39,540,000	0 Bulan	-	- Bulan		0 Bulan	-	- Bulan	780,000	*- Bulan*	*780,000*	*36 Bulan*	*247,308,000*	*60.00%*	*60.19%*	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	1,312,575,000	36 Kali	787,545,000	12 Kali	285,775,000	3 Kali	45,808,792	3 Kali	59,792,851	3 Kali	35,248,036	3 Kali	71,303,173	*12 Kali*	*212,152,852*	*48 Kali*	*999,697,852*	*80.00%*	*76.16%*	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pameran dan Expo Hasil Pembangunan SKPD	20 Kali	3,667,148,500	12 Kali	2,200,289,100	4 Kali	559,179,700	0 Kali	-	- Kali	56,515,000	1 Kali	4,979,700	3 Kali	194,470,000	*4 Kali*	*255,964,700*	*16 Kali*	*2,456,253,800*	*80.00%*	*66.98%*	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**360 Unit**	**4,313,400,000**	**240 Unit**	**2,588,040,000**	**Unit**	**968,110,000**	**Unit**	**113,657,988**	**Unit**	**324,784,450**	**Unit**	**108,437,650**	**Unit**	**341,807,838**	*- Unit*	*888,687,926*	*240 Unit*	*3,476,727,926*	*66.67%*	*80.60%*	DINAS PUPR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor yang dipelihara	360 Unit	4,313,400,000	240 Unit	2,588,040,000	40 Unit	968,110,000	3 Unit	113,657,988	17 Unit	324,784,450	10 Unit	108,437,650	10 Unit	341,807,838	*40 Unit*	*888,687,926*	*280 Unit*	*3,476,727,926*	*77.78%*	*80.60%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.75**	**16.58**	**8.15**	26.64	**17.66**	**17.99**	**66.72**	**22.29**	*97.28*	*83.50*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**15**	**304,914,414,330**	**9**	**182,948,648,598**		**59,624,710,146**		**42,974,600**		**3,007,651,121**		**10,925,954,531**		**15,793,038,058**	*-*	*29,769,618,310*	*9*	*212,718,266,908*	*60.00%*	*69.76%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya**		**46,895,759,895**		**28,137,455,937**		**8,880,609,203**		**-**		**43,719,300**		**918,340,800**		**6,350,000**	*-*	*968,410,100*	*-*	*29,105,866,037*	*#DIV/0!*	*62.07%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5 Dokumen	924,300,000	3 Dokumen	554,580,000	1 Dokumen	192,129,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	8,913,200	0 Dokumen	8,686,300	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*17,599,500*	*4 Dokumen*	*572,179,500*	*80.00%*	*61.90%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Penyusunan Rencana Air Tanah dan Air Baku	5 Dokumen	1,024,300,000	3 Dokumen	614,580,000	1 Dokumen	211,990,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	7,610,200	1 Dokumen	1,210,000	*1 Dokumen*	*8,820,200*	*4 Dokumen*	*623,400,200*	*80.00%*	*60.86%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Drainase dan Pengaman Pantai	5 Dokumen	1,303,900,000	3 Dokumen	782,340,000	1 Dokumen	264,106,700	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	8,086,700	1 Dokumen	1,540,000	*1 Dokumen*	*9,626,700*	*4 Dokumen*	*791,966,700*	*80.00%*	*60.74%*	DINAS PUPR
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan SDA WS Kab.Tanggamus	5 Dokumen	2,495,100,000	3 Dokumen	1,497,060,000	1 Dokumen	506,902,300	0 Dokumen	-	- Dokumen	19,972,300	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*19,972,300*	*4 Dokumen*	*1,517,032,300*	*80.00%*	*60.80%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Persentase Perkuatan Tebing	500 %	39,269,527,395	300 %	23,561,716,437	100 %	7,603,140,503	0 %	-	5 %	14,833,800	5 %	893,957,600	95.63 %	3,600,000	*106 %*	*912,391,400*	*406 %*	*24,474,107,837*	*81.13%*	*62.32%*	DINAS PUPR
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Petani Pemakai Air (P3A) dan GP3A	15 Kali	1,878,632,500	9 Kali	1,127,179,500	3 Kali	102,340,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*9 Kali*	*1,127,179,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha**		**258,018,654,435**		**154,811,192,661**		**50,744,100,943**		**42,974,600**		**2,963,931,821**		**10,007,613,731**	**0.00**	**15,786,688,058**	*- -*	*28,801,208,210*	*- -*	*183,612,400,871*		*71.16%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Pembangunan Infrastruktur Irigasi yang menggunakan dana DAK	500 %	20,503,938,525	300 %	12,302,363,115	100 %	4,076,935,705	0 %	-	8 %	17,487,400	2 %	803,112,023	90 %	2,268,051,281	*100 %*	*3,088,650,704*	*400 %*	*15,391,013,819*		*75.06%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	500 %	226,486,402,910	300 %	135,891,841,746	100 %	44,685,888,938	0 %	-	7 %	2,556,080,256	6 %	8,530,491,708	87 %	12,797,736,777	*100 %*	*23,884,308,741*	*400 %*	*159,776,150,487*		*70.55%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	30 Hibah Unit	7,175,000,000	18 Hibah Unit	4,305,000,000	6 Hibah Unit	1,460,000,000	0 Hibah Unit	-	- Hibah Unit	-	1 HibahUnit	667,500,000	5 HibahUnit	667,500,000	*6 HibahUnit*	*1,335,000,000*	*24 HibahUnit*	*5,640,000,000*	*80.00%*	*78.61%*	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Rehabilitas Jaringan Irigasi Kabupaten	12500 M2	1,450,000,000	7500 M2	870,000,000	2500 M2	280,220,000	500 M2	42,974,600	2,000 M2	237,117,865	0 M2	-	- M2	-	*2,500 M2*	*280,092,465*	*10,000 M2*	*1,150,092,465*	*80.00%*	*79.32%*	DINAS PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Perawatan Jaringan irigasi Kabupaten	150 Daerah Irigasi	2,403,313,000	90 Daerah Irigasi	1,441,987,800	30 Daerah Irigasi	241,056,300	0 Daerah Irigasi	-	15 Daerah Irigasi	153,246,300	2 Daerah Irigasi	6,510,000	13 Daerah Irigasi	53,400,000	*30 Daerah Irigasi*	*213,156,300*	*120 Daerah Irigasi*	*1,655,144,100*	*80.00%*	*68.87%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**17.59**	**0.07**	**71.58**	5.04	**0.60**	**18.32**	**10.33**	**26.49**	*100.09*	*49.93*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SD**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**ST**	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**30 %**	**89,275,140,000**	**18 %**	**53,565,084,000**	**%**	**17,739,821,600**	**%**	**1,001,362,847**	**%**	**140,959,082**	**%**	**3,422,834,300**	**%**	**6,580,010,181**	**- %**	*11,145,166,410*	*18 %*	*64,710,250,410*	*60.00%*	*72.48%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Beraksses Sanitasi Baik**	**500 %**	**89,275,140,000**	**300 %**	**53,565,084,000**	**% 100**	**17,739,821,600**	**%**	**1,001,362,847**	**%**	**140,959,082**	**%**	**3,422,834,300**	**%**	**6,580,010,181**	**- %**	*11,145,166,410*	*300 %*	*64,710,250,410*	*60.00%*	*72.48%*	DINAS PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Air Bersih	4250 Unit	17,324,461,000	2550 Unit	10,394,676,600	850 Unit	3,387,452,200	55 Unit	1,001,362,847	200 Unit	122,104,882	295 Unit	28,914,550	300 Unit	130,000	*850 Unit*	*1,152,512,279*	*3,400 Unit*	*11,547,188,879*	*80.00%*	*66.65%*	DINAS PUPR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Perluasan Jaringan Air Minum yang menggunakan Dana DAK	5000 Unit	71,950,679,000	3000 Unit	43,170,407,400	1000 Unit	14,352,369,400	0 Unit	-	100 Unit	18,854,200	30 Unit	3,393,919,750	870 Unit	6,579,880,181	*1,000 Unit*	*9,992,654,131*	*4,000 Unit*	*53,163,061,531*	*80.00%*	*73.89%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.82**	**5.64**	**15.38**	0.79	**16.67**	**19.29**	**60.00**	**37.09**	*94.87*	*62.83*					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	R	**SR**	**ST**	**R**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**30 %**	**77,958,909,000**	**18 %**	**46,775,345,400**	**%**	**15,585,420,550**	**%**	**-**	**%**	**158,109,200**	**%**	**3,919,546,950**	**%**	**10,338,030,000**	**- %**	*14,415,686,150*	*18 %*	*61,191,031,550*	*60.00%*	*78.49%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan KK Beraksses Sanitasi Baik**	**500 %**	**77,958,909,000**	**300 %**	**46,775,345,400**	**% 100**	**15,585,420,550**	**%**		**%**	**158,109,200**	**%**	**3,919,546,950**	**%**	**10,338,030,000**	**- %**	*14,415,686,150*	*300 %*	*61,191,031,550*	*60.00%*	*78.49%*	DINAS PUPR
			Pembangunan/Pen yediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Sanitasi/Sistem PengelolaanAir Limbah)	550 Unit	12,407,925,000	330 Unit	7,444,755,000	110 Unit	2,467,078,300	0 Unit	-	9 Unit	36,999,200	6 Unit	627,883,000	95 Unit	1,093,660,000	*110 Unit*	*1,758,542,200*	*440 Unit*	*9,203,297,200*	*80.00%*	*74.17%*	DINAS PUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Sistem Air Limbah yang menggunakan Dana DAK	750 KK	65,550,984,000	450 KK	39,330,590,400	150 KK	13,118,342,250	0 KK	-	9 KK	121,110,000	11 KK	3,291,663,950	130 KK	9,244,370,000	*150 KK*	*12,657,143,950*	*600 KK*	*51,987,734,350*	*80.00%*	*79.31%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**5.00**	1.01	**4.72**	25.15	**62.50**	66.33	72.22	92.49					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	R	**SD**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Percentase Pembangunan,Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**5 %**	**47,772,293,590**	**3 %**	**28,663,376,154**	**%**	**11,020,213,346**	**%**	**3,107,432,693**	**%**	**4,718,324,238**	**%**	**1,353,188,182**	**%**	**2,040,000**	**- %**	*9,180,985,113*	*3 %*	*37,844,361,267*	*60.00%*	*79.22%*	DINAS PUPR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penurunan Daerah Genangan Banjir**	**5000 Meter**	**47,772,293,590**	**3000 Meter**	**28,663,376,154**	**Meter 1000**	**11,020,213,346**	**Meter**	**3,107,432,693**	**Meter**	**4,718,324,238**	**Meter**	**1,353,188,182**	**Meter**	**2,040,000**	**- *Meter***	*9,180,985,113*	*3,000 Meter*	*37,844,361,267*	*60.00%*	*79.22%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Pembangunan Talud/Bronjong/Saluran Drainase dan Gorong- gorong	5000 Meter	47,772,293,590	3000 Meter	28,663,376,154	1000 Meter	11,020,213,346	0 Meter	3,107,432,693	350 Meter	4,718,324,238	450 Meter	1,353,188,182	200 Meter	2,040,000	*1,000 Meter*	*9,180,985,113*	*4,000 Meter*	*37,844,361,267*	*80.00%*	*79.22%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**28.20**	**17.50**	42.82	**22.50**	**12.28**	**10.00**	**0.02**	50.00	83.31					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan dan Pengembangan Permukiman**	**5 %**	**261,757,110,005**	**3 %**	**157,054,266,003**	**%**	**50,832,413,291**	**%**	**734,712,300**	**%**	**86,078,700**	**%**	**1,284,541,850**	**%**	**369,559,300**	**- %**	*2,474,892,150*	*3 %*	*159,529,158,153*	*60.00%*	*60.95%*	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Meter M**	**261,757,110,005**	**Meter M**	**157,054,266,003**	**Meter M**	**50,832,413,291**	**Meter M**	**734,712,300**	**Meter M**	**86,078,700**	**Meter M**	**1,284,541,850**	**Meter M**	**369,559,300**	**- *MeterM***	*2,474,892,150*	**- *MeterM***	*159,529,158,153*		*60.95%*	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Infrastruktur Permukiman	145000 Meter	247,513,638,505	87000 Meter	148,508,183,103	29000 Meter	48,063,762,991	0 Meter	317,190,500	2,320 Meter	21,476,000	7680 Meter	883,110,250	19,000 Meter	300,996,300	***29,000 Meter***	***1,522,773,050***	***116,000 Meter***	***150,030,956,153***	***80.00%***	***60.62%***	DINAS PUPR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman	1375 M	14,243,471,500	825 M	8,546,082,900	275 M2	2,768,650,300	0 M2	417,521,800	16 M2	64,602,700	134 M2	401,431,600	125 M2	68,563,000	***275 M2***	***952,119,100***	***1,100 M2***	***9,498,202,000***	***80.00%***	***66.68%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**1.45**	**7.98**	0.17	**26.69**	2.53	**65.33**	**0.73**	**100.00**	**4.87**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SD	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**	**5 %**	**68,986,129,620**	**3 %**	**41,391,677,772**	**%**	**13,819,681,130**	**%**	**716,439,954**	**%**	**13,430,400**	**%**	**2,116,316,036**	**%**	**1,739,870,150**	**- %**	***4,586,056,540***	***3 %***	***45,977,734,312***	***60.00%***	***66.65%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Percentase Bangunan Gedung Kabupaten**	**8750 M2**	**68,986,129,620**	**5250 M2**	**41,391,677,772**	**M2**	**13,819,681,130**	**M2**	**716,439,954**	**M2**	**13,430,400**	**M2**	**2,116,316,036**	**M2**	**1,739,870,150**	**- M2**	***4,586,056,540***	***5,250 M2***	***45,977,734,312***	***60.00%***	***66.65%***	DINAS PUPR
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus	8750 M2	68,986,129,620	5250 M2	41,391,677,772	1750 M2	13,819,681,130	0 M2	716,439,954	75 M2	13,430,400	45 M2	2,116,316,036	1,630 M2	1,739,870,150	***1,750 M2***	***4,586,056,540***	***7,000 M2***	***45,977,734,312***	***80.00%***	***66.65%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**5.18**	**4.29**	0.10	**2.57**	15.31	**93.14**	**12.59**	**100.00**	**33.18**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	**Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten**	**5 %**	**22,269,581,995**	**3 %**	**13,361,749,197**	**%**	**2,280,883,231**	**%**	**-**	**%**	**85,661,200**		**125,350,200**		**1,070,000**	**- %**	***212,081,400***	***3 %***	***13,573,830,597***	***60.00%***	***60.95%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pemenuhan Penataan Bangunan dan Lingkungannya**	**30 Dokumen**	**22,269,581,995**	**18 Dokumen**	**13,361,749,197**	**Dokumen**	**2,280,883,231**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**85,661,200**	**Dokumen**	**125,350,200**	**Dokumen**	**1,070,000**	**- Dokumen**	***212,081,400***	***18 Dokumen***	***13,573,830,597***	***60.00%***	***60.95%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten yang disusun	10 Dokumen	3,061,902,500	6 Dokumen	1,837,141,500	2 Dokumen	1,168,345,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	1 Dokumen	6,635,500	1 Dokumen	430,000	***2 Dokumen***	***7,065,500***	***8 Dokumen***	***1,844,207,000***	***80.00%***	***60.23%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan yang dilaksanakan secara swakelola	20 Wilayah	19,207,679,495	12 Wilayah	11,524,607,697	4 Wilayah	1,112,537,731	0 Wilayah	-	- Wilayah	85,661,200	1 Wilayah	118,714,700	3 Wilayah	640,000	***4 Wilayah***	***205,015,900***	***16 Wilayah***	***11,729,623,597***	***80.00%***	***61.07%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	3.76	**33.33**	5.50	**66.67**	**0.05**	**100.00**	**9.30**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SD	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)**	**3500 Km**	**466,846,015,540**	**2100 Km**	**280,107,609,324**	**Km**	**90,404,685,488**	**Km**	**-**	**Km**	**1,498,798,800**	**Km**	**12,894,873,176**	**Km**	**24,869,212,154**	**- Km**	***39,262,884,130***	***2,100 Km***	***319,370,493,454***	***60.00%***	***68.41%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Jumlah Infrastruktur Jalan Kabupaten Kondisi BaikJalan Kabupaten Kondisi Baik**	**343000 Meter**	**466,846,015,540**	**205800 Meter**	**280,107,609,324**	**Meter**	**90,404,685,488**	**Meter**	**-**	**Meter**	**1,498,798,800**	**Meter**	**12,894,873,176**	**Meter**	**24,869,212,154**	**- Meter**	***39,262,884,130***	***205,800 Meter***	***319,370,493,454***	***60.00%***	***68.41%***	DINAS PUPR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	5 Dokumen	3,362,093,000	3 Dokumen	2,017,255,800	1 Dokumen	678,748,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	21,218,600	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***21,218,600***	***4 Dokumen***	***2,038,474,400***	***80.00%***	***60.63%***	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan Kabupaten	175000 Meter	118,032,935,360	105000 Meter	70,819,761,216	35000 Meter	22,445,881,207	0 Meter	-	500 Meter	1,165,304,200	3000 Meter	4,019,606,800	31500 Meter	1,429,449,600	***35,000 Meter***	***6,614,360,600***	***140,000 Meter***	***77,434,121,816***	***80.00%***	***65.60%***	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	Jumlah Rehabilitas Jalan Kabupaten Tanggamus	85000 Meter	83,348,814,285	51000 Meter	50,009,288,571	17000 Meter	16,133,228,990	0 Meter	-	990 Meter	107,102,000	200 Meter	348,415,000	15810 Meter	2,920,000	***17,000 Meter***	***458,437,000***	***68,000 Meter***	***50,467,725,571***	***80.00%***	***60.55%***	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Melalui DAK Bidang Jalan	50000 Meter	204,063,609,040	30000 Meter	122,438,165,424	10000 Meter	40,751,533,000	0 Meter	-	100 Meter	42,310,300	900 Meter	8,218,982,626	9000 Meter	23,320,082,554	***10,000 Meter***	***31,581,375,480***	***40,000 Meter***	***154,019,540,904***	***80.00%***	***75.48%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten yang dilakukan secara swakelola	32500 Meter	11,929,572,000	19500 Meter	7,157,743,200	6500 Meter	1,303,360,800	0 Meter	-	100 Meter	152,854,400	485 Meter	40,033,000	5915 Meter	116,190,000	*6,500 Meter*	*309,077,400*	*26,000 Meter*	*7,466,820,600*	*80.000%*	*62.591%*	DINAS PUPR
			Pembangunan Jembatan	Jumlah Pembangunan Jembatan Kabupaten	20 Unit	46,108,991,855	12 Unit	27,665,395,113	4 Unit	9,091,932,890	0 Unit	-	- Unit	10,009,300	1 Unit	267,835,750	3 Unit	570,000	*4 Unit*	*278,415,050*	*16 Unit*	*27,943,810,163*	*80.000%*	*60.604%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	2.47	1.66	6.69	14.26	90.84	27.51	100.00	43.43					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST'	SR					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus**	**5**	**2,056,642,500**	**3**	**1,233,985,500**		**186,752,300**		**-**		**16,046,300**		**52,050,100**		**750,000**	**-**	***68,846,400***	***3***	***1,302,831,900***	***60.00%***	***63.35%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Pengembangan Jasa Konstruksi**	**1200 Orang**	**1,603,335,000**	**720 Orang**	**962,001,000**	**Orang**	**145,135,800**	**Orang**	**-**	**Orang**	**12,219,800**	**Orang**	**50,730,100**	**Orang**	**750,000**	**- *Orang***	***63,699,900***	***720 Orang***	***1,025,700,900***	***60.00%***	***63.97%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1200 Orang	1,603,335,000	720 Orang	962,001,000	240 Orang	145,135,800	0 Orang	-	5 Orang	12,219,800	17 Orang	50,730,100	218 Orang	750,000	***240 Orang***	***63,699,900***	***960 Orang***	***1,025,700,900***	***80.00%***	***63.97%***	DINAS PUPR
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, TertibPenyelenggaraan dan Tertib Pemanfaata Jasa Konstruksi**	**30 Unit**	**453,307,500**	**18 Unit**	**271,984,500**	**Unit**	**41,616,500**	**Unit**	**-**	**Unit**	**3,826,500**	**Unit**	**1,320,000**	**Unit**	**-**	**- *Unit***	***5,146,500***	***18 Unit***	***277,131,000***	***60.00%***	***61.14%***	DINAS PUPR
			Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya Rehab Papan Reklame Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus	30 Unit	453,307,500	18 Unit	271,984,500	6 Unit	41,616,500	0 Unit	-	- Unit	3,826,500	1 Unit	1,320,000	5 Unit	-	***6 Unit***	***5,146,500***	***24 Unit***	***277,131,000***	***80.00%***	***61.14%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	2.03	8.59	7.32	34.95	90.65	0.52	100.00	44.06					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah**	**5**	**12,095,460,000**	**3**	**7,257,276,000**		**2,503,170,300**		**513,209,360**		**90,094,100**		**247,410,700**		**26,957,000**	**-**	***877,671,160***	***3***	***8,134,947,160***	***60.00%***	***67.26%***	DINAS PUPR
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Wilayahnya**	**10 DokumenPaket**	**8,950,160,000**	**6 DokumenPaket**	**5,370,096,000**	**DokumenPaket**	**1,803,426,000**	**DokumenPaket**	**509,209,360**	**DokumenPaket**	**19,716,000**	**DokumenPaket**	**157,530,000**	**DokumenPaket**	**3,240,000**	**- *DokumenPaket***	***689,695,360***	***6 DokumenPaket***	***6,059,791,360***	***60.00%***	***67.71%***	DINAS PUPR
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan	10 Dokumen	8,950,160,000	6 Dokumen	5,370,096,000	2 Dokumen	1,803,426,000	0 Dokumen	509,209,360	- Dokumen	19,716,000	1 Dokumen	157,530,000	1 Dokumen	3,240,000	***2 Dokumen***	***689,695,360***	***8 Dokumen***	***6,059,791,360***	***80.00%***	***67.71%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**15 Dokumen**	**1,598,550,000**	**9 Dokumen**	**959,130,000**	**Dokumen**	**255,380,000**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**42,478,500**	**Dokumen**	**23,806,000**	**Dokumen**	**10,642,000**	**- *Dokumen***	***76,926,500***	***9 Dokumen***	***1,036,056,500***	***60.00%***	***64.81%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten Tanggamus	15 Kali	1,598,550,000	9 Kali	959,130,000	3 Kali	255,380,000	0 Kali	-	- Kali	42,478,500	1 Kali	23,806,000	2 Kali	10,642,000	***3 Kali***	***76,926,500***	***12 Kali***	***1,036,056,500***	***80.00%***	***64.81%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Informasi dan Publikasi Pemerintah Daerah**	**15 Paket**	**1,546,750,000**	**9 Paket**	**928,050,000**	**Paket 3**	**444,364,300**	**Paket 0**	**4,000,000**	**Paket 1**	**27,899,600**	**1 Paket**	**66,074,700**	**1 Paket**	**13,075,000**	***3 Paket***	***111,049,300***	***12 Paket***	***1,039,099,300***	***80.00%***	***67.18%***	DINAS PUPR
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem /Teknologi Informas dan Pameran Hasil Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	15 Aplikasi	1,546,750,000	9 Aplikasi	928,050,000	3 Aplikasi	444,364,300	0 Aplikasi	4,000,000	1 Aplikasi	27,899,600	1 Aplikasi	66,074,700	1 Aplikasi	13,075,000	***3 Aplikasi***	***111,049,300***	***12 Aplikasi***	***1,039,099,300***	***80.00%***	***67.18%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	20.50	18.18	3.60	36.36	9.88	45.45	1.08	100.00	35.06					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Luasan RTH Publik**	m	365,860,000	m	219,516,000	m	**60,039,500**	m	**-**	m	-	m	49,260,000	m	**-**	***- m***	***49,260,000***	***- m***	***268,776,000***		***73.46%***	DINAS PUPR
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah Pendataan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	5 Dokumen	365,860,000	3 Dokumen	219,516,000	Dokumen	**60,039,500**	Dokumen	**-**	Dokumen	-	Dokumen	49,260,000	Dokumen	**-**	***- Dokumen***	***49,260,000***	***3 Dokumen***	***268,776,000***	***60.00%***	***73.46%***	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi RTLH se- Kabupaten Tanggamus	5 Dokumen	365,860,000	3 Dokumen	219,516,000	Dokumen 1	60,039,500	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	49,260,000	1 Dokumen	-	*1 Dokumen*	*49,260,000*	*4 Dokumen*	*268,776,000*	*80.00%*	*73.46%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	82.05	**100.00**	-	**100.00**	**82.05**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**	**SR**	**ST'**	**T**				
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Percentase Pembangunan Kawasan Permukiman**	**5**	**29,140,732,000**	**3**	**17,484,439,200**		**5,609,855,000**		**550,045,000**		**2,672,613,000**		**183,964,500**		**2,014,002,000**	-	*5,420,624,500*	*3*	*22,905,063,700*	*60.00%*	*78.60%*	DINAS PUPR
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	**Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)**	**5 Dokumen**	**1,098,137,500**	**3 Dokumen**	**658,882,500**	**Dokumen**	**204,020,000**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**196,292,000**	*- Dokumen*	*196,292,000*	*3 Dokumen*	*855,174,500*	*60.00%*	*77.87%*	DINAS PUPR
			Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	5 Dokumen	1,098,137,500	3 Dokumen	658,882,500	Dokumen 1	204,020,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	196,292,000	*1 Dokumen*	*196,292,000*	*4 Dokumen*	*855,174,500*	*80.00%*	*77.87%*	DINAS PUPR
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**Jumlah Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**2915 Rumah**	**28,042,594,500**	**1749 Rumah**	**16,825,556,700**	**Rumah**	**5,405,835,000**	**Rumah**	**550,045,000**	**Rumah**	**2,672,613,000**	**Rumah**	**183,964,500**	**Rumah**	**1,817,710,000**	*- Rumah*	*5,224,332,500*	*1,749 Rumah*	*22,049,889,200*	*60.00%*	*78.63%*	DINAS PUPR
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5 Kali	27,166,655,000	3 Kali	16,299,993,000	Kali 1	5,350,202,500	Kali 0	550,045,000	Kali -	2,672,613,000	0 Kali	178,764,500	1 Kali	1,815,280,000	*1 Kali*	*5,216,702,500*	*4 Kali*	*21,516,695,500*	*80.00%*	*79.20%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	5 Kali	875,939,500	3 Kali	525,563,700	Kali 1	55,632,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	5,200,000	1 Kali	2,430,000	*1 Kali*	*7,630,000*	*4 Kali*	*533,193,700*	*80.00%*	*60.87%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**9.80**	-	47.64	-	3.28	**100.00**	35.90	**100.00**	**96.63**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST'**	**ST**				
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	**Percentase Penyelesaian Sengketa Tanah**	**5**	**513,327,500**	**3**	**307,996,500**		**85,725,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	*3*	*307,996,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Kabupaten**	**5 Dokumen**	**513,327,500**	**3 Dokumen**	**307,996,500**	**Dokumen**	**85,725,500**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**-**	**Dokumen**	**-**	*- Dokumen*	*-*	*3 Dokumen*	*307,996,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah	5 Kali	513,327,500	3 Kali	307,996,500	Kali 1	85,725,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*307,996,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**Percentase Penanganan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah**	**5**	**48,335,792,500**	**3**	**29,001,475,500**		**8,951,214,500**		**-**		**-**		**69,070,000**		**9,474,500**	-	*78,544,500*	*3*	*29,080,020,000*	*60.00%*	*60.16%*	DINAS PUPR
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**	**30 Dokumen/ Paket**	**48,335,792,500**	**18 Dokumen/ Paket**	**29,001,475,500**	**Dokumen/ Paket**	**8,951,214,500**	**Dokumen/ Paket**	**-**	**Dokumen/ Paket**	**-**	**Dokumen/Paket**	**69,070,000**	**Dokumen/Paket**	**9,474,500**	*- Dokumen/Paket*	*78,544,500*	*18 Dokumen/Paket*	*29,080,020,000*	*60.00%*	*60.16%*	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	25 Dokumen/Paket	48,335,792,500	15 Dokumen/Paket	29,001,475,500	Dokumen/Paket 5	8,951,214,500	Dokumen/Paket 0	-	Dokumen/Paket -	-	1 Dokumen/Paket	69,070,000	4 Dokumen/Paket	9,474,500	*5 Dokumen/Paket*	*78,544,500*	*20 Dokumen/Paket*	*29,080,020,000*	*80.00%*	*60.16%*	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**20.00**	0.77	**80.00**	**0.11**	**100.00**	**0.88**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	SR	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	**Percentase Pengelolaan Tanah Kabupaten**	5	2,276,792,500	3	1,366,075,500		**429,277,000**		**-**		-		183,132,900		**2,996,000**	-	*186,128,900*	*3*	*1,552,204,400*	*60.00%*	*68.18%*	DINAS PUPR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	**Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	5 Dokumen	2,276,792,500	3 Dokumen	1,366,075,500	Dokumen	**429,277,000**	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	183,132,900	Dokumen	**2,996,000**	- ***Dokumen***	***186,128,900***	***3 Dokumen***	***1,552,204,400***	***60.00%***	***68.18%***	DINAS PUPR
			Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Penataan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun	5 Dokumen	2,276,792,500	3 Dokumen	1,366,075,500	1 Dokumen	429,277,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	183,132,900	1 Dokumen	2,996,000	***1 Dokumen***	***186,128,900***	***4 Dokumen***	***1,552,204,400***	***80.00%***	***68.18%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	42.66	**100.00**	**0.70**	**100.00**	**43.36**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST***	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	**Percentase Inventarisir Izin Tanah Kabupaten**	**5**	**659,292,500**	**3**	**395,575,500**		**115,414,500**		-		-		**4,708,500**		**5,396,000**	-	***10,104,500***	***3***	***405,680,000***	***60.00%***	***61.53%***	DINAS PUPR
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	**Jumlah Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**1000 Legalitas**	**659,292,500**	**600 Legalitas**	**395,575,500**	**Legalitas**	**115,414,500**	**Legalitas**	-	**Legalitas**	-	**Legalitas**	**4,708,500**	**Legalitas**	**5,396,000**	- ***Legalit***	***10,104,500***	***600 Legalit***	***405,680,000***	***60.00%***	***61.53%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pembuatan Legalistas Tanah Milik Pemkab	1000 Legalitas	659,292,500	600 Legalitas	395,575,500	200 Legalitas	115,414,500	0 Legalitas	-	- Legalitas	-	18 Legalitas	4,708,500	182 Legalitas	5,396,000	***200 Legalitas***	***10,104,500***	***800 Legalitas***	***405,680,000***	***80.00%***	***61.53%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	**9.00**	4.08	**91.00**	**4.68**	**100.00**	**8.75**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST***	**SR**					
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**Percentase Penataan Tanah Kabupaten**	**5**	**596,942,500**	**3**	**358,165,500**		**101,850,500**		-		-		**4,708,500**		**1,841,000**	-	***6,549,500***	***3***	***364,715,000***	***60.00%***	***61.10%***	DINAS PUPR
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penatagunaan Tanah**	**5 Dokumen**	**596,942,500**	**3 Dokumen**	**358,165,500**	**Dokumen**	**101,850,500**	**Dokumen**	-	**Dokumen**	-	**Dokumen**	**4,708,500**	**Dokumen**	**1,841,000**	- ***Dokumen***	***6,549,500***	***3 Dokumen***	***364,715,000***	***60.00%***	***61.10%***	DINAS PUPR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Data Pertanahan	5 Dokumen	596,942,500	3 Dokumen	358,165,500	1 Dokumen	101,850,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	4,708,500	1 Dokumen	1,841,000	***1 Dokumen***	***6,549,500***	***4 Dokumen***	***364,715,000***	***80.00%***	***61.10%***	DINAS PUPR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	4.62	**100.00**	**1.81**	**100.00**	**6.43**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR	SR	ST	**SR**	**ST***	**SR**					
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**60,028,395,330**	**3 WTP**	**36,017,037,198**	**WTP**	**12,675,836,351**	**WTP**	**5,755,633,351**	**WTP**	**- 42,100,786**	**WTP**	**2,663,007,934**	**WTP**	**2,820,179,915**	- ***WTP***	***11,196,720,414***	***3 WTP***	***47,213,757,612***	***60.00%***	***78.65%***	SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**113,342,000**	**3**	**68,005,200**		**51,200,400**		-		**2,400,000**		**10,860,000**		**10,850,000**	-	***24,110,000***	***3***	***92,115,200***	***60.00%***	***81.27%***	SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	40 Buku	63,092,000	24 Buku	37,855,200	8 Buku	38,270,400	0 Buku	-	- Buku	2,400,000	3 Buku	10,860,000	5 Buku	9,850,000	***8 Buku***	***23,110,000***	***32 Buku***	***60,965,200***	***80.00%***	***96.63%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10 Dokumen	11,100,000	6 Dokumen	6,660,000	2 Dokumen	2,840,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***6 Dokumen***	***6,660,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	11,100,000	6 Dokumen	6,660,000	2 Dokumen	2,470,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	1,000,000	***2 Dokumen***	***1,000,000***	***8 Dokumen***	***7,660,000***	***80.00%***	***69.01%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	2,610,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***3 Dokumen***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	7,500,000	3 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	1,500,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- ***Dokumen***	-	***3 Dokumen***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	38 Eksemplar Dokumen	3,000,000	18 Eksemplar Dokumen	1,800,000	6 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***18 Eksemplar Dokumen***	***1,800,000***	***47.37%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ Perangkat Daerah	22 Eksemplar Dokumen	10,050,000	9 Eksemplar Dokumen	6,030,000	3 Eksemplar Dokumen	2,760,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***9 Eksemplar Dokum***	***6,030,000***	***40.91%***	***60.00%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**56,076,354,960**	**3**	**33,645,812,976**		**11,696,045,433**		**5,755,633,351**		**- 250,043,582**		**2,489,367,078**		**2,640,829,539**	-	*10,635,786,386*	*3*	*44,281,599,362*	*60.00%*	*78.97%*	SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	355 Orang	31,117,854,960	213 Orang	18,670,712,976	Orang 71	6,704,345,433	Orang 11	1,205,263,351	*Orang* 19	2,124,816,418	20 *Orang*	1,426,341,078	21 *Orang*	1,429,867,539	*71 Orang*	*6,186,288,386*	*284 Orang*	*24,857,001,362*	*80.00%*	*79.88%*	SATPOL PP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	60 Bulan	24,540,300,000	36 Bulan	14,724,180,000	Bulan 12	4,908,060,000	Bulan 2	4,529,460,000	*Bulan* 3	- 2,388,800,000	**3** *Bulan*	1,049,086,000	4 *Bulan*	1,176,112,000	*12 Bulan*	*4,365,858,000*	*48 Bulan*	*19,090,038,000*	*80.00%*	*77.79%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan	60 Bulan	418,200,000	36 Bulan	250,920,000	Bulan 12	83,640,000	Bulan 2	20,910,000	*Bulan* 2	13,940,000	**3** *Bulan*	13,940,000	5 *Bulan*	34,850,000	*12 Bulan*	*83,640,000*	*48 Bulan*	*334,560,000*	*80.00%*	*80.00%*	SATPOL PP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500**	**564,691,000**	**300**	**338,814,600**		**50,400,000**		**-**		**91,732,133**		**-**		**-**	-	*91,732,133*	*300*	*430,546,733*	*60.00%*	*76.24%*	SATPOL PP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pengadaan Pakaian bagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja	355 Stell	252,000,000	213 Stell	151,200,000	Stell 71	50,400,000	Stell 0	-	***Stell*** 71	50,040,000	0 ***Stell***	-	- ***Stell***	-	*71 Stell*	*50,040,000*	*284 Stell*	*201,240,000*	*80.00%*	*79.86%*	SATPOL PP
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		205 Orang	312,691,000	123 Orang	187,614,600	Orang		Orang		***Orang***	41,692,133	***Orang***		***Orang***		- *Orang*	*41,692,133*	*123 Orang*	*229,306,733*	*60.00%*	*73.33%*	SATPOL PP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**	**5**	**1,056,113,870**	**3**	**633,668,322**		**377,463,274**		**-**		**107,608,000**		**13,074,000**		**54,009,500**	-	*174,691,500*	*3*	*808,359,822*	*60.00%*	*76.54%*	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	318,797,500	36 Bulan	191,278,500	Bulan 12	123,900,000	Bulan 0	-	Bulan 6	85,530,000	3 Bulan	6,060,000	3 Bulan	3,030,000	*12 Bulan*	*94,620,000*	*48 Bulan*	*285,898,500*	*80.00%*	*89.68%*	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	81,000,000	36 Bulan	48,600,000	Bulan 12	123,900,000	Bulan 0	-	Bulan 4	2,079,000	5 Bulan	-	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*2,079,000*	*48 Bulan*	*50,679,000*	*80.00%*	*62.57%*	SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37,500,000	36 Bulan	22,500,000	Bulan 12	14,750,000	Bulan 0	-	Bulan 4	5,000,000	2 Bulan	978,000	6 Bulan	6,848,500	*12 Bulan*	*12,826,500*	*48 Bulan*	*35,326,500*	*80.00%*	*94.20%*	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	196,546,370	36 Bulan	117,927,822	Bulan 12	30,459,274	Bulan 0	-	Bulan 4	14,999,000	1 Bulan	1,356,000	7 Bulan	9,325,000	*12 Bulan*	*25,680,000*	*48 Bulan*	*143,607,822*	*80.00%*	*73.07%*	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasidan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	290 Kali	422,270,000	174 Kali	253,362,000	Kali 58	84,454,000	Kali 0	-	Kali -	-	10 Kali	4,680,000	48 Kali	34,806,000	*58 Kali*	*39,486,000*	*232 Kali*	*292,848,000*	*80.00%*	*69.35%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 Bulan**	**317,752,500**	**36 Bulan**	**190,651,500**	**Bulan**	**63,830,844**	**Bulan**		***Bulan***	**12,856,796**	***Bulan***	**6,403,856**	***Bulan***	**28,884,876**	*- Bulan*	*48,145,528*	*36 Bulan*	*238,797,028*	*60.00%*	*75.15%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	60 Kali	311,752,500	36 Kali	187,051,500	Kali 12	62,630,844	Kali 0	-	Kali 1	12,856,796	3 Kali	6,403,856	8 Kali	27,984,876	*12 Kali*	*47,245,528*	*48 Kali*	*234,297,028*	*80.00%*	*75.15%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kanto	60 Kali	6,000,000	36 Kali	3,600,000	Kali 12	1,200,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	12 Kali	900,000	*12 Kali*	*900,000*	*48 Kali*	*4,500,000*	*80.00%*	*75.00%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**5**	**2,464,832,000**	**3**	**1,478,899,200**		**487,296,400**				**85,078,000**		**143,303,000**		**85,606,000**	-	*313,987,000*	*3*	*1,792,886,200*	*60.00%*	*72.74%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Aset/Inventaris Kantor	40 Unit	2,194,832,000	24 Unit	1,316,899,200	Unit 8	407,166,400	Unit 0	-	Unit 1	19,078,000	1 Unit	143,303,000	6 Unit	85,606,000	*8 Unit*	*247,987,000*	*32 Unit*	*1,564,886,200*	*80.00%*	*71.30%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	270,000,000	36 Bulan	162,000,000	Bulan 12	80,130,000	Bulan 0	-	Bulan 6	66,000,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*66,000,000*	*48 Bulan*	*228,000,000*	*80.00%*	*84.44%*	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.42**	**45.41**	**35.69**	**- 0.33**	**16.81**	**21.01**	**39.23**	**22.25**	**96.17**	**88.33**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum**	**5**	**1,388,882,000**	**3**	**833,329,200**		**1,144,676,000**		**-**		**19,078,000**		**191,386,400**		**81,530,000**	-	*291,994,400*	*3*	*1,125,323,600*	*60.00%*	*81.02%*	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**1,388,882,000**	**3**	**833,329,200**		**1,144,676,000**		-		**19,078,000**		**191,386,400**		**81,530,000**	-	***291,994,400***	***3***	***1,125,323,600***	***60.00%***	***81.02%***	SATPOL PP
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Presentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keteriban Umum	55 Bulan	-	33 Bulan	-	Bulan 11	779,560,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	3 Bulan	167,210,000	8 Bulan	78,500,000	***11 Bulan***	***245,710,000***	***44 Bulan***	***245,710,000***	***80.00%***		SATPOL PP
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah HUT Polisi Pamong Praja Jumlah Operasional Ketertiban Umum dan Pengamanan Aset Daerah Jumlah Operasional Penertiban Pasar PKL dan Pekat	5 Kegiatan	587,375,000	3 Kegiatan	352,425,000	Kegiatan 1	117,476,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	19,078,000	0 Kegiatan	21,146,400	1 Kegiatan	3,030,000	***1 Kegiatan***	***43,254,400***	***4 Kegiatan***	***395,679,400***	***80.00%***	***67.36%***	SATPOL PP
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan Kantibmas Satlinmas	10 Hari	429,507,000	6 Hari	257,704,200	Hari		Hari		**Hari**		Hari		Hari		***- Hari***	-	***6 Hari***	***257,704,200***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Operasional Korps Musik Pemda Kabupaten Tanggamus	60 Bulan	372,000,000	36 Bulan	223,200,000	Bulan 12	74,400,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	***- Bulan***	-	***36 Bulan***	***223,200,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	"Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum"		-		-	% 100	173,240,000	% 0	-	**%** -	-	1.46 **%**	3,030,000	98.54 **%**	-	***100 %***	***3,030,000***	***100 %***	***3,030,000***			SATPOL PP
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**5**	**155,500,000**	**3**	**93,300,000**		**31,100,000**		-		**2,089,500**		**10,239,000**		**3,030,000**	-	***15,358,500***	***3***	***108,658,500***	***60.00%***	***69.88%***	SATPOL PP
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasional Penertiban Pelanggaran Perda	60 Bulan	155,500,000	36 Bulan	93,300,000	Bulan 12	31,100,000	Bulan 0	-	Bulan 1	2,089,500	4 Bulan	10,239,000	7 Bulan	3,030,000	***12 Bulan***	***15,358,500***	***48 Bulan***	***108,658,500***	***80.00%***	***69.88%***	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**0.74**	**1.67**	**6.22**	**16.72**	**84.22**	**7.12**	**91.18**	**25.51**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST'**	**SR**				
			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**4,611,192,300**	**WTP**	**2,766,715,380**	**WTP**	**1,695,060,051**	**WTP**	-	***WTP***	**532,843,380**	***WTP***	**501,233,972**	***WTP***	**557,973,448**	***- WTP***	***1,592,050,800***	***- WTP***	***4,358,766,180***		***94.53%***	SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**37,276,000**		**22,365,600**		**15,089,500**		-		**4,460,000**		**1,200,000**		**8,956,500**	-	***14,616,500***	-	***36,982,100***		***99.21%***	SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan	50 Buku	12,100,000	30 Buku	7,260,000	Buku 10	9,917,500	Buku 0	-	Buku 5	4,460,000	1 Buku	1,200,000	3 Buku	3,784,500	***9 Buku***	***9,444,500***	***39 Buku***	***16,704,500***	***78.00%***	***138.05%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	4,500,000	3 Dokumen	2,700,000	Dokumen 1	900,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000	***1 Dokumen***	***900,000***	***4 Dokumen***	***3,600,000***	***80.00%***	***80.00%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD	5 Dokumen	4,500,000	3 Dokumen	2,700,000	1 Dokumen	900,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000	*1 Dokumen*	*900,000*	*4 Dokumen*	*3,600,000*	*80.00%*	*80.00%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA SKPD	5 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	900,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000	*1 Dokumen*	*900,000*	*4 Dokumen*	*2,700,000*	*80.00%*	*90.00%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Penyusunan DPA Perubahan SKPD	5 Dokumen	3,000,000	3 Dokumen	1,800,000	1 Dokumen	900,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	900,000	*1 Dokumen*	*900,000*	*4 Dokumen*	*2,700,000*	*80.00%*	*90.00%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Pelaporan Keuangan SKPD Secara Berkala	500 Persen	2,250,000	300 Persen	1,350,000	100 Persen	600,000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	100 Persen	600,000	*100 Persen*	*600,000*	*400 Persen*	*1,950,000*	*80.00%*	*86.67%*	SATPOL PP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Evalusi SKPD Secara Tepat Waktu	500 Persen	7,926,000	300 Persen	4,755,600	100 Persen	972,000	0 Persen	-	- Persen	-	0 Persen	-	100 Persen	972,000	*100 Persen*	*972,000*	*400 Persen*	*5,727,600*	*80.00%*	*72.26%*	SATPOL PP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**	**500**	**3,843,386,800**	**300**	**2,306,032,080**		**1,593,416,151**				**520,258,721**		**480,862,972**		**507,110,648**	**-**	*1,508,232,341*	*300*	*3,814,264,421*	*60.00%*	*99.24%*	SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	135 Orang	3,508,286,800	81 Orang	2,104,972,080	27 Orang	508,521,151	0 Orang	-	14 Orang	168,488,721	6 Orang	135,142,972	7 Orang	133,260,648	*27 Orang*	*436,892,341*	*108 Orang*	*2,541,864,421*	*80.00%*	*72.45%*	SATPOL PP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak Non- PNSD	60 Bulan	705,000,000	36 Bulan	42,300,000	12 Bulan	1,019,100,000	0 Bulan	-	6 Bulan	335,100,000	3 Bulan	337,500,000	3 Bulan	343,200,000	*12 Bulan*	*1,015,800,000*	*48 Bulan*	*1,058,100,000*	*80.00%*	*150.09%*	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Penyedian Jasa Admintrasi Keuangang	60 Bulan	264,600,000	36 Bulan	158,760,000	12 Bulan	65,795,000	0 Bulan	-	6 Bulan	16,670,000	3 Bulan	8,220,000	2 Bulan	30,650,000	*11 Bulan*	*55,540,000*	*47 Bulan*	*214,300,000*	*78.33%*	*80.99%*	SATPOL PP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah											-											SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156 Unit	167,400,000			52 Unit	55,800,000	0 Unit	-	- Unit	-	29 Unit	41,407,250	11 Unit	900,000							SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	144 Porsi	1,584,000			48 Porsi	528,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	48 Porsi	528,000	- Porsi	-							SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	30 Eksemplar	2,803,500			10 Eksemplar	934,500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	10 Eksemplar	934,500							SATPOL PP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	561 Buah	13,386,600			187 Buah	4,462,200	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	187 Buah	4,462,200							SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**263,217,500**		**157,930,500**		**25,363,200**		**-**		**1,657,259**		**1,171,000**		**10,351,300**	**-**	*13,179,559*	**-**	*171,110,059*		*65.01%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	228,000,000	36 Bulan	136,800,000	12 Bulan	17,831,200	0 Bulan	-	1 Bulan	657,259	3 Bulan	1,171,000	1 Bulan	5,019,300	*5 Bulan*	*6,847,559*	*41 Bulan*	*143,647,559*	*68.33%*	*63.00%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	35,217,500	36 Bulan	21,130,500	12 Bulan	7,532,000	0 Bulan	-	2 Bulan	1,000,000	0 Bulan	-	8 Bulan	5,332,000	*10 Bulan*	*6,332,000*	*46 Bulan*	*27,462,500*	*76.67%*	*77.98%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**417,312,000**		**250,387,200**		**61,191,200**		**-**		**6,467,400**		**18,000,000**		**31,555,000**	**-**	*56,022,400*	**-**	*306,409,600*		*73.42%*	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan aset/inventaris kantor	60 Bulan	417,312,000	36 Bulan	250,387,200	12 Bulan	43,191,200	0 Bulan	-	1 Bulan	6,467,400	3 Bulan	-	7 Bulan	31,555,000	*11 Bulan*	*38,022,400*	*47 Bulan*	*288,409,600*	*78.33%*	*69.11%*	SATPOL PP
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara denganBaik		-		-	1 Unit	18,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	18,000,000	- Unit	-	*1 Unit*	*18,000,000*	*1 Unit*	*18,000,000*			SATPOL PP
			Penataan Organisasi	**Tersedianya Jasa Publikasi**		**50,000,000**		**30,000,000**		**-**				**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	*30,000,000*		*60.00%*	SATPOL PP
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Penyediaan Jasa Publikasi	60 Bulan	50,000,000	36 Bulan	30,000,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		*- Bulan*	*-*	*36 Bulan*	*30,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**5.84**	**31.44**	**16.19**	**29.57**	**73.96**	**32.92**	**95.99**		**93.92**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST***		**ST**				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani**	**475**	**5,215,505,000**	**285**	**3,129,303,000**		**1,011,759,600**		-		**368,497,107**		**211,553,411**		**177,171,208**	-	***757,221,726***	***285***	***3,886,524,726***	***60.0%***	***74.5%***	SATPOL PP
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Oprasiona Pemadam Kebakaran**	**500**	**5,136,680,000**	**300**	**3,082,008,000**		**1,011,759,600**		-		**359,695,107**		**211,553,411**		**177,171,208**	-	***748,419,726***	***300***	***3,830,427,726***	***60.0%***	***74.6%***	SATPOL PP
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Oprasional Pemadam Kebakaran	60 Bulan	5,136,680,000	36 Bulan	3,082,008,000	12 Bulan	1,011,759,600	0 Bulan	-	6 Bulan	359,695,107	3 Bulan	211,553,411	3 Bulan	177,171,208	***12 Bulan***	***748,419,726***	***48 Bulan***	***3,830,427,726***	***80.0%***	***74.6%***	SATPOL PP
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Terberdayakannya Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**500**	**78,825,000**	**300**	**47,295,000**		-		-		**8,802,000**		-		-	-	***8,802,000***	***300***	***56,097,000***	***60.0%***	***71.2%***	SATPOL PP
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran	5 Bulan	78,825,000	3 Bulan	47,295,000	Bulan		Bulan		***Bulan***	8,802,000	***Bulan***		***Bulan***		- ***Bulan***	***8,802,000***	***3 Bulan***	***56,097,000***	***60.0%***	***71.2%***	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**50.00**	**36.42**	**25.00**	**20.91**	**25.00**	**17.51**	**100.00**	**74.84**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**SD**				
																			- -	-	- -	-		
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									**3,035,974,595**		**3,313,770,231**					- -	***6,349,744,826***	- -	***6,349,744,826***		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**22,022,689,635**	**3 WTP**	**13,213,613,781**	**WTP**	**4,867,684,599**	**WTP**	**556,754,595**	***WTP***	**889,530,781**	***WTP***	**665,792,504**	***WTP***	**696,383,907**	- ***WTP***	***2,808,461,787***	***3 WTP***	***16,022,075,568***	***60.00%***	***72.75%***	SATPOL PP
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**168,190,000**	**3**	**100,914,000**		**1,029,547,200**		**3,410,000**		**5,321,000**		**3,410,000**		**10,511,000**	-	***22,652,000***	***3***	***123,566,000***	***60.00%***	***73.47%***	SATPOL PP
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	75 Buku/ Eksemplar	54,200,000	45 Buku/ Eksemplar	32,520,000	11 Buku/ Eksemplar	1,010,440,000	0 Buku/ Eksemplar	1,010,000	2 Buku/ Eksemplar	2,521,000	3 Buku/ Eksemplar	1,010,000	6 Buku/Eksemplar	1,010,000	***11 Buku/Eksempl***	***5,551,000***	***56 Buku/Eksempl***	***38,071,000***	***74.67%***	***70.24%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	89,500,000	15 Buku/ Eksemplar	53,700,000	3 Buku/ Eksemplar	16,207,200	0 Buku/ Eksemplar	2,400,000	1 Buku/ Eksemplar	2,400,000	1 Buku/ Eksemplar	2,400,000	1 Buku/Eksemplar	8,502,000	***3 Buku/Eksempl***	***15,702,000***	***18 Buku/Eksempl***	***69,402,000***	***72.00%***	***77.54%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Buku/ Eksemplar	7,000,000	15 Buku/ Eksemplar	4,200,000	3 Buku/ Eksemplar	1,200,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	3 Buku/Eksemplar	699,000	***3 Buku/Eksempl***	***699,000***	***18 Buku/Eksempl***	***4,899,000***	***72.00%***	***69.99%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	2,500,000	15 Buku/ Eksemplar	1,500,000	5 Buku/ Eksemplar	300,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	3 Buku/Eksemplar	300,000	***3 Buku/Eksempl***	***300,000***	***18 Buku/Eksempl***	***1,800,000***	***72.00%***	***72.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Buku/ Eksemplar	2,500,000	15 Buku/ Eksemplar	1,500,000	5 Buku/ Eksemplar	300,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/Eksemplar	-	- ***Buku/Eksempl***	-	***15 Buku/Eksempl***	***1,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	60 Buku/ Eksemplar	6,000,000	36 Buku/ Eksemplar	3,600,000	7 Buku/ Eksemplar	700,000	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/ Eksemplar	-	0 Buku/ Eksemplar	-	- Buku/Eksemplar	-	- ***Buku/Eksemplar***	-	***36 Buku/Eksemplar***	***3,600,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD,LKIP,LKPJ Perangkat Daerah	60 Eksemplar Dokumen	6,490,000	36 Eksemplar Dokumen	3,894,000	4 Eksemplar Dokumen	400,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	400,000	4 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***4 Eksemplar Dokum***	***400,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***4,294,000***	***66.67%***	***66.16%***	SATPOL PP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**13,199,162,135**	**3**	**7,919,497,281**		**2,712,118,699**		**526,529,331**		**773,456,455**		**578,345,942**		**579,299,131**	-	***2,457,630,859***	***3***	***10,377,128,140***	***60.00%***	***78.62%***	SATPOL PP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,139,762,135	60 Orang	6,083,857,281	20 Orang	2,100,238,699	5 Orang	390,049,331	5 Orang	620,376,455	5 Orang	436,425,942	5 Orang	435,559,131	***20 Orang***	***1,882,410,859***	***80 Orang***	***7,966,268,140***	***80.00%***	***78.56%***	SATPOL PP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	150 Orang	2,724,000,000	90 Orang	1,634,400,000	30 Orang	544,800,000	7 Orang	130,500,000	8 Orang	141,900,000	0 Orang	136,200,000	15 Orang	136,200,000	***30 Orang***	***544,800,000***	***120 Orang***	***2,179,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																					16
			Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan	60 Kali	335,400,000	36 Kali	201,240,000	Kali 12	67,080,000	Kali 3	5,980,000	Kali 2	11,180,000	1 Kali	5,720,000	6 Kali	7,540,000	***12 Kali***	***30,420,000***	***48 Kali***	***231,660,000***	***80.00%***	***69.07%***	SATPOL PP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**52 Stel**		-		-		-				-		-		-	-	-	-	-			SATPOL PP
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	260 Stel	-	156 Stel	-	Stel 52	-	Stel		***Stel***	-	***Stel***		***Stel***		***- Stel***	-	***156 Stel***	-	***60.00%***		SATPOL PP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**	**5** **3**	**657,232,500**		**394,339,500**		**112,208,900**				**2,378,350**		**12,910,540**		**6,123,000**	-	***21,411,890***	***3***	***415,751,390***	***60.00%***	***63.26%***	SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	-	9 Unit	-	Unit 1	2,800,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***9 Unit***	-	***60.00%***		SATPOL PP
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	87,500,000	3000 Kotak	52,500,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		***- Kotak***	-	***3,000 Kotak***	***52,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1560 Buah	68,361,000	936 Buah	41,016,600	Buah 166	1,660,000	Buah 0	-	Buah -	-	0 Buah	-	- Buah	-	***- Buah***	-	***936 Buah***	***41,016,600***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JJumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	3420 Buah	102,438,500	2052 Buah	61,463,100	Buah	12,437,200	Buah 0	-	Buah -	2,378,350	10 Buah	4,994,340	22 Buah	-	***32 Buah***	***7,372,690***	***2,084 Buah***	***68,835,790***	***60.94%***	***67.20%***	SATPOL PP
			Penyediaan Bahan Material	Jumlah Penyediaan Bahan Material	1660 Buah	398,933,000	996 Buah	239,359,800	Buah 684	18,985,700	Buah 132	5,972,900.00	Buah -	-	68 Buah	7,916,200	400 Buah	2,010,000	***600 Buah***	***15,899,100***	***1,596 Buah***	***255,258,900***	***96.14%***	***63.99%***	SATPOL PP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1660 Orang/ Kali	398,933,000	996 Orang/ Kali	239,359,800	Kali 100	76,326,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	100 Kali	4,113,000	***100 Kali***	***4,113,000***	***1,096 Kali***	***243,472,800***	***66.02%***	***61.03%***	SATPOL PP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15 Unit**	**5,465,550,000**	**9 Unit**	**3,279,330,000**	**Unit**	**558,110,000**	**Unit**		**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	***- Unit***	-	***9 Unit***	***3,279,330,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	2,675,000,000	6 Unit	1,605,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	***- Unit***	-	***6 Unit***	***1,605,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 Unit	2,790,550,000	3 Unit	1,674,330,000	Unit 1	558,110,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	Unit		***- Unit***	-	***3 Unit***	***1,674,330,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**60 Bulan**	**895,749,000**	**36 Bulan**	**537,449,400**	**Bulan**	**162,799,800**	**Bulan**	**7,244,864**	Bulan	25,992,176	Bulan	16,744,022	Bulan	55,062,456	***- Bulan***	***105,043,518***	***36 Bulan***	***642,492,918***	***60.00%***	***71.73%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahPenyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	813,999,000	36 Bulan	488,399,400	Bulan 12	162,799,800	Bulan 3	7,244,864	Bulan 3	25,992,176	3 Bulan	16,744,022	3 Bulan	55,062,456	***12 Bulan***	***105,043,518***	***48 Bulan***	***593,442,918***	***80.00%***	***72.90%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	15 Kali	81,750,000	9 Kali	49,050,000	Kali		Kali		Kali	-	Kali		Kali		***- Kali***	-	***9 Kali***	***49,050,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**5** **3**	**1,636,806,000**		**982,083,600**		**292,900,000**		**19,570,400**		**82,382,800**		**54,382,000**		**45,388,320**	-	***201,723,520***	***3***	***1,183,807,120***	***60.00%***	***72.32%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya emeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	5 Unit	200,850,000	3 Unit	120,510,000	Unit 1	40,170,000	Unit 0	2,816,000	***Unit*** 1	13,326,000	0 ***Unit***	5,632,000	***- Unit***	6,729,520	***1 Unit***	***28,503,520***	***4 Unit***	***149,013,520***	***80.00%***	***74.19%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Daerah	65 Unit	1,384,606,000	39 Unit	830,763,600	Unit 13	243,270,000	Unit 0	16,754,400	***Unit*** 13	67,596,800	0 ***Unit***	43,920,000	***- Unit***	38,658,800	***13 Unit***	***166,930,000***	***52 Unit***	***997,693,600***	***80.00%***	***72.06%***	SATPOL PP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik		-		-		-				-					-	-	-	-			SATPOL PP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	95 Unit	51,350,000	57 Unit	30,810,000	Unit 14	9,460,000	Unit 0	-	***Unit*** -	1,460,000	0 ***Unit***	4,830,000	9 ***Unit***	-	***9 Unit***	***6,290,000***	***66 Unit***	***37,100,000***	***69.47%***	***72.25%***	SATPOL PP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	13.11	11.44	3.06	18.27	8.30	13.68	50.09	14.31	74.56	57.70				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	R				
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Kawasan Rawan Bencana yang dibina**	**5**	**25,460,795,000**	**3**	**15,276,477,000**		**9,908,662,000**		**2,479,220,000**		**2,424,239,450**		**4,886,911,500**		**45,070,000**	**-**	***9,835,440,950***	***3***	***25,111,917,950***	***60.00%***	***98.63%***	SATPOL PP
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana**		**25,460,795,000**		**15,276,477,000**		**9,908,662,000**		**2,479,220,000**		**2,424,239,450**		**4,886,911,500**		**45,070,000**	**-**	***9,835,440,950***	**-**	***25,111,917,950***		***98.63%***	SATPOL PP
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapat Pelatihan Desa Tangguh Bencana	5 Pekon	317,995,000	3 Pekon	190,797,000	Pekon		Pekon		Pekon	34,449,450	Pekon		Pekon		- ***Pekon***	***34,449,450***	***3 Pekon***	***225,246,450***	***60.00%***	***70.83%***	SATPOL PP
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Operasional Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60 Bulan	1,031,250,000	36 Bulan	618,750,000	12 Bulan	202,110,000	1 Bulan	29,220,000	2 Bulan	17,480,000	2 Bulan	45,080,000	7 Bulan	45,070,000	***12 Bulan***	***136,850,000***	***48 Bulan***	***755,600,000***	***80.00%***	***73.27%***	SATPOL PP
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana	5 Dokumen	24,111,550,000	3 Dokumen	14,466,930,000	1 Dokumen	9,706,552,000	0 Dokumen	2,450,000,000	- Dokumen	2,372,310,000	1 Dokumen	4,841,831,500	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***9,664,141,500***	***4 Dokumen***	***24,131,071,500***		***100.08%***	SATPOL PP
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban**	**125**	**389,920,000**	**75**	**233,952,000**		**32,802,500**		**-**		**-**		**3,360,000**		**-**	**-**	***3,360,000***	***75***	***237,312,000***	***60.00%***	***60.86%***	SATPOL PP
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan operasional dalam pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	65 Kejadian	278,920,000	39 Kejadian	167,352,000	5 Kejadian	25,602,500	0 Kejadian	-	- Kejadian	-	0 Kejadian	-	- Kejadian	-	- ***Kejadian***	-	***39 Kejadian***	***167,352,000***	***60.00%***	***60.00%***	SATPOL PP
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik korban bencana	750 Paket Logistik	111,000,000	450 Paket Logistik	66,600,000	95 Paket Logistik	7,200,000	0 Paket Logistik	-	- Paket Logistik	-	29 Paket Logistik	3,360,000	19 Paket Logistik	-	***48 Paket Logistik***	***3,360,000***	***498 Paket Logistik***	***69,960,000***	***66.40%***	***63.03%***	SATPOL PP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.88	25.02	1.77	24.47	28.32	49.32	23.01	0.45	53.98	99.26				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	ST				
			DINAS SOSIAL																- -	-	- -	-		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																- -	-	- -	-		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**18,982,948,900**	**WTP**	**11,389,769,340**	**WTP**	**3,669,446,591**	**WTP**	**754,137,548**	***WTP***	**1,047,115,407**	***WTP***	**755,322,995**	***WTP***	**840,791,236**	- ***WTP***	***3,397,367,186***	- ***WTP***	***14,787,136,526***		***77.90%***	DINAS SOSIAL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**		**450,575,500**		**270,345,300**		**84,587,100**		**12,863,100**		**15,603,500**		**9,655,250**		**28,349,400**	**-**	***66,471,250***	**-**	***336,816,550***		***74.75%***	DINAS SOSIAL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan nya	150 Buku	192,442,000	90 Buku	115,465,200	30 Buku	38,488,400	0 Buku	6,265,500	- Buku	11,486,000	0 Buku	6,245,250	30 Buku	2,011,400	***30 Buku***	***26,008,150***	***120 Buku***	***141,473,350***	***80.00%***	***73.51%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	50 Eksemplar Dokumen	81,525,000	30 Eksemplar Dokumen	48,915,000	10 Eksemplar Dokumen	14,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	3,410,000	10 Eksemplar Dokumen	9,190,000	***10 Eksemplar Dokum***	***12,600,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***61,515,000***	***80.00%***	***75.46%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	50 Eksemplar Dokumen	76,125,000	30 Eksemplar Dokumen	45,675,000	10 Eksemplar Dokumen	14,190,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	12,420,000	***10 Eksemplar Dokum***	***12,420,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***58,095,000***	***80.00%***	***76.32%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10,950,000	60 Eksemplar Dokumen	6,570,000	20 Eksemplar Dokumen	2,190,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	975,000	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	975,000	***20 Eksemplar Dokum***	***1,950,000***	***80 Eksemplar Dokum***	***8,520,000***	***80.00%***	***77.81%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	10,650,000	60 Eksemplar Dokumen	6,390,000	20 Eksemplar Dokumen	2,130,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2,130,000	***20 Eksemplar Dokum***	***2,130,000***	***80 Eksemplar Dokum***	***8,520,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	12,900,000	30 Eksemplar Dokumen	7,740,000	10 Eksemplar Dokumen	2,932,000	2 Eksemplar Dokumen	346,500	- 2 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	805,500	***10 Eksemplar Dokum***	***1,152,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***8,892,000***	***80.00%***	***68.93%***	DINAS SOSIAL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj	100 Buku	65,983,500	60 Buku	39,590,100	20 Buku	10,556,700	20 Buku	6,251,100	- Buku	3,142,500	0 Buku	-	- Buku	817,500	***20 Buku***	***10,211,100***	***80 Buku***	***49,801,200***	***80.00%***	***75.48%***	DINAS SOSIAL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keungan Yang Disusun Tepat Waktu**		**15,247,755,200**		**9,148,653,120**		**3,038,631,041**		**604,562,048**		**900,538,847**		**668,749,157**		**687,061,802**	**-**	***2,860,911,854***	**-**	***12,009,564,974***		***78.76%***	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	125 Orang	12,887,255,200	75 Orang	7,732,353,120	25 Orang	2,561,181,041	5 Orang	498,922,048	7 Orang	782,128,847	6 Orang	562,274,157	7 Orang	558,936,802	***25 Orang***	***2,402,261,854***	***100 Orang***	***10,134,614,974***	***80.00%***	***78.64%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	1,952,900,000	75 Orang	1,171,740,000	25 Orang	395,040,000	5 Orang	94,200,000	7 Orang	101,250,000	6 Orang	93,495,000	7 Orang	97,725,000	***25 Orang***	***386,670,000***	***100 Orang***	***1,558,410,000***	***80.00%***	***79.80%***	DINAS SOSIAL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	60 Kali	381,600,000	36 Kali	228,960,000	12 Kali	78,960,000	0 Kali	11,440,000	2 Kali	17,160,000	2 Kali	12,980,000	8 Kali	29,700,000	***12 Kali***	***71,280,000***	***48 Kali***	***300,240,000***	***80.00%***	***78.68%***	DINAS SOSIAL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Buku	26,000,000	12 Buku	15,600,000	4 Buku	3,450,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	4 Buku	700,000	***4 Buku***	***700,000***	***16 Buku***	***16,300,000***	***80%***	***63%***	DINAS SOSIAL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyusunan Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**		**1,265,269,700**		**759,161,820**		**228,545,950**		**27,177,900**		**64,097,848**		**16,773,240**		**51,596,972**	-	***159,645,960***	-	***918,807,780***		***72.62%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275 Unit	71,635,000	165 Unit	42,981,000	55 Unit	14,327,000	0 Unit	4,576,000	- Unit	5,704,000	0 Unit	1,384,000	55 Unit	2,313,000	***55 Unit***	***13,977,000***	***220 Unit***	***56,958,000***	***80.00%***	***79.51%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	3250 Kotak	123,750,000	1950 Kotak	74,250,000	650 Kotak	17,050,000	65 Kotak	2,227,500	- Kotak	4,455,000	0 Kotak	-	585 Kotak	3,163,050	***650 Kotak***	***9,845,550***	***2,600 Kotak***	***84,095,550***	***80.00%***	***67.96%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	600 Buku	133,148,000	360 Buku	79,888,800	120 Buku	22,206,800	0 Buku	7,606,400	- Buku	4,965,000	0 Buku	2,070,000	120 Buku	4,294,500	***120 Buku***	***18,935,900***	***480 Buku***	***98,824,700***	***80.00%***	***74.22%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	369,141,700	36 Bulan	221,485,020	12 Bulan	41,070,150	1 Bulan	900,000	5 Bulan	6,903,500	1 Bulan	9,609,240	5 Bulan	22,774,422	***12 Bulan***	***40,187,162***	***48 Bulan***	***261,672,182***	***80.00%***	***70.89%***	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	500 Kali	567,595,000	300 Kali	340,557,000	100 Kali	133,892,000	1 Kali	11,868,000	1 Kali	42,070,348	23 Kali	3,710,000	75 Kali	19,052,000	***100 Kali***	***76,700,348***	***400 Kali***	***417,257,348***	***80.00%***	***73.51%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**655,564,500**		**393,338,700**		**83,452,900**		**83,452,900**		**21,563,212**		**4,969,248**		**21,476,562**	-	***131,461,922***	-	***524,800,622***		***80.05%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	488,650,000	36 Bulan	293,190,000	12 Bulan	63,370,000	1 Bulan	4,312,258	5 Bulan	12,044,412	1 Bulan	3,890,648	5 Bulan	18,404,662	***12 Bulan***	***38,651,980***	***48 Bulan***	***331,841,980***	***80.00%***	***67.91%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	166,914,500	36 Bulan	100,148,700	12 Bulan	20,082,900	1 Bulan	2,913,600	5 Bulan	9,518,800	1 Bulan	1,078,600	5 Bulan	3,071,900	***12 Bulan***	***16,582,900***	***48 Bulan***	***116,731,600***	***80.00%***	***69.93%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1,363,784,000**		**818,270,400**		**234,229,600**		**26,081,600**		**45,312,000**		**55,176,100**		**52,306,500**	-	***178,876,200***	-	***997,146,600***		***73.12%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			220,850,000		132,510,000	12 Bulan	50,920,000	1 Bulan	9,632,000	***Bulan*** 5	9,348,000	1 ***Bulan***	6,572,000	5 ***Bulan***	17,456,500	***12 Bulan***	***43,008,500***	***12 Bulan***	***175,518,500***		***79.47%***	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	35 Unit	940,934,000	21 Unit	564,560,400	7 Unit	130,604,600	1 Unit	14,419,600	***Unit*** 2	32,554,000	2 ***Unit***	19,054,100	2 ***Unit***	29,250,000	***7 Unit***	***95,277,700***	***28 Unit***	***659,838,100***	***80.00%***	***70.13%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	85 Unit	50,750,000	51 Unit	30,450,000	17 Unit	12,340,000	2 Unit	2,030,000	***Unit*** 5	3,410,000	0 ***Unit***	-	10 ***Unit***	5,600,000	***17 Unit***	***11,040,000***	***68 Unit***	***41,490,000***	***80.00%***	***81.75%***	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	151,250,000	3 Unit	90,750,000	1 Unit	40,365,000	0 Unit	-	***Unit*** -	-	0 ***Unit***	29,550,000	1 ***Unit***	-	***1 Unit***	***29,550,000***	***4 Unit***	***120,300,000***	***80.00%***	***79.54%***	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**8.87**	**20.55**	**3.55**	**28.54**	**3.63**	**20.58**	**83.95**	**22.91**	**100.00**	**92.59**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST'**	**ST**				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**		**2,862,687,500**		**1,717,612,500**		**529,691,500**		-		**165,480,000**		**52,050,000**		**68,126,500**	-	***285,656,500***	-	***2,003,269,000***		***69.98%***	DINAS SOSIAL
			Pengmpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang**		**36,172,500**		**21,703,500**		-		-		-		-		-	-	-	-	***21,703,500***		***60.00%***	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Peserta Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100 Orang	36,172,500	60 Orang	21,703,500	Orang		Orang		*Orang*		*Orang*		*Orang*		- *Orang*	-	*60 Orang*	*21,703,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**2,826,515,000**		**1,695,909,000**		**529,691,500**		-		**165,480,000**		**52,050,000**		**68,126,500**	-	*285,656,500*	-	*1,981,565,500*		*70.11%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Aktif	150 Orang	320,427,500	90 Orang	192,256,500	Orang 30	55,895,500	Orang 0	-	*Orang* 15	18,000,000	0 *Orang*	-	*Orang* 15	14,570,000	*30 Orang*	*32,570,000*	*120 Orang*	*224,826,500*	*80.00%*	*70.16%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang Aktif	150 Orang	619,352,500	90 Orang	371,611,500	Orang 30	117,818,000	Orang 0	-	*Orang* 15	40,000,000	0 *Orang*	20,000,000	*Orang* 15	5,500,000	*30 Orang*	*65,500,000*	*120 Orang*	*437,111,500*	*80.00%*	*70.58%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	825 Orang	1,570,965,000	495 Orang	942,579,000	Orang 165	309,899,000	Orang 0	-	*Orang* 84	95,300,000	0 *Orang*	32,050,000	*Orang* 81	42,206,500	*165 Orang*	*169,556,500*	*660 Orang*	*1,112,135,500*	*80.00%*	*70.79%*	DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	315,770,000	150 Orang	189,462,000	Orang 50	46,079,000	Orang 0	-	*Orang* -	12,180,000	25 *Orang*	-	*Orang* 25	5,850,000	*50 Orang*	*18,030,000*	*200 Orang*	*207,492,000*	*80.00%*	*65.71%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**41.4545**	**31.24**	**9.09**	**9.83**	**49.4545**	**12.86**	**100.00**	**53.93**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST***	**R**				
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani**	**500**	**69,247,500**	**300**	**41,548,500**		**12,349,500**		-		-		-		-	-	-	*300*	*41,548,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	**Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**500**	**69,247,500**	**300**	**41,548,500**		**12,349,500**		-		-		-		-	-	-	*300*	*41,548,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100 Orang	69,247,500	60 Orang	41,548,500	Orang 20	12,349,500	Orang 0	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	-	- *Orang*	-	- *Orang*	-	*60 Orang*	*41,548,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**2015**	**9,193,069,100**	**1209**	**5,515,841,460**		**1,404,464,900**		**52,198,300**		**38,858,300**		**76,208,100**		**282,533,500**	-	*449,798,200*	*1,209*	*5,965,639,660*	*60.00%*	*64.89%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**500**	**5,428,072,000**	**300**	**3,256,843,200**		**1,043,397,400**		-		**-**		**12,208,100**		**158,917,000**	-	*171,125,100*	*300*	*3,427,968,300*	*60.00%*	*63.15%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	17415 Orang	4,179,654,500	10449 Orang	2,507,792,700	Orang 100	856,920,900	Orang 0	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	12,208,100	- *Orang*	2,290,000	- *Orang*	*14,498,100*	*10,449 Orang*	*2,522,290,800*	*60.00%*	*60.35%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	500 Orang	774,830,000	300 Orang	464,898,000	Orang 100	97,729,000	Orang 0	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	-	100 *Orang*	84,379,000	*100 Orang*	*84,379,000*	*400 Orang*	*549,277,000*	*80.00%*	*70.89%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Penyediaan Alat Bantu	600 Orang	411,757,500	360 Orang	247,054,500	Orang 50	72,606,500	Orang 0	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	-	50 *Orang*	66,957,000	*50 Orang*	*66,957,000*	*410 Orang*	*314,011,500*	*68.33%*	*76.26%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Pelayanan dan Rujukan	25 Orang	61,830,000	15 Orang	37,098,000	5 Orang	16,141,000	0 Orang	-	- *Orang*	-	0 *Orang*	-	5 *Orang*	5,291,000	*5 Orang*	*5,291,000*	*20 Orang*	*42,389,000*	*80.00%*	*68.56%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**500**	**3,764,997,100**	**300**	**2,258,998,260**		**361,067,500**		**52,198,300**		**38,858,300**		**64,000,000**		**123,616,500**	-	*278,673,100*	*300*	*2,537,671,360*	*60.00%*	*67.40%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Layanan Kedaruratan			1,573,944,600		944,366,760	LS 1	60,000,000	LS 0	-	*LS* -	-	0 *LS*	50,000,000	*LS* 1	-	*1 LS*	*50,000,000*	*1 LS*	*994,366,760*		*63.18%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	400 Orang	360,200,000	240 Orang	216,120,000	80 Orang	83,525,000	0 Orang	-	*Orang* -	6,120,000	0 *Orang*	-	80 *Orang*	62,573,400	*80 Orang*	*68,693,400*	*320 Orang*	*284,813,400*	*80.00%*	*79.07%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	400 Orang	220,875,000	240 Orang	132,525,000	80 Orang	20,374,000	0 Orang	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	-	80 *Orang*	16,643,100	*80 Orang*	*16,643,100*	*320 Orang*	*149,168,100*	*80.00%*	*67.54%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	150 Orang	195,785,000	90 Orang	117,471,000	30 Orang	5,987,500	0 Orang	-	*Orang* -	-	0 *Orang*	-	0 *Orang*	-	*- Orang*	*-*	*90 Orang*	*117,471,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150 Orang	81,187,500	90 Orang	48,712,500	Orang		Orang		*Orang*		*Orang*		*Orang*		*- Orang*	*-*	*90 Orang*	*48,712,500*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	100 Orang	1,333,005,000	60 Orang	799,803,000	20 Orang	191,181,000	0 Orang	52,198,300	*Orang* -	32,738,300	0 *Orang*	14,000,000	*Orang* 20	44,400,000	*20 Orang*	*143,336,600*	*80 Orang*	*943,139,600*	*80.00%*	*70.75%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**3.72**	**0.00**	**2.77**	-	**5.43**	**72.10**	**20.12**	72.10	32.03					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	SD	SR					
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**500**	**3,178,773,000**	**300**	**1,907,263,800**		**490,985,400**		**860,500**		**121,990,000**		**104,623,500**		**16,384,000**	-	*243,858,000*	*300*	*2,151,121,800*	*60.00%*	*67.67%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Terlaksananya Pemeliharaan Anak Terlantar**	**500**	**413,398,000**	**300**	**248,038,800**		**49,129,600**		-		**17,139,000**		-		-	-	*17,139,000*	*300*	*265,177,800*	*60.00%*	*64.15%*	DINAS SOSIAL
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	250 Orang	174,248,000	150 Orang	104,548,800	50 Orang	20,849,600	0 Orang	-	*Orang* -	1,350,000	0 *Orang*	-	50 *Orang*	-	*50 Orang*	*1,350,000*	*200 Orang*	*105,898,800*	*80.00%*	*60.77%*	DINAS SOSIAL
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak- Anak Terlantar	150 Kali	97,750,000	90 Kali	58,650,000	Kali		Kali		*Kali*		*Kali*		*Kali*		*- Kali*	*-*	*90 Kali*	*58,650,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	100 Kali	141,400,000	60 Kali	84,840,000	Kali 20	28,280,000	Kali		*Kali*	15,789,000	*Kali*		*Kali*		*- Kali*	*15,789,000*	*60 Kali*	*100,629,000*	*60.00%*	*71.17%*	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Valid**	**500**	**2,765,375,000**	**300**	**1,659,225,000**		**441,855,800**		**860,500**		**104,851,000**		**104,623,500**		**16,384,000**	-	*226,719,000*	*300*	*1,885,944,000*	*60.00%*	*68.20%*	DINAS SOSIAL
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	633,365,000	36 Bulan	380,019,000	Bulan 12	54,155,800	Bulan 0	-	*Bulan* 6	4,890,000	0 *Bulan*	28,911,000	*Bulan* 6	-	*12 Bulan*	*33,801,000*	*48 Bulan*	*413,820,000*	*80.00%*	*65.34%*	DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	60 Bulan	2,132,010,000	36 Bulan	1,279,206,000	Bulan 12	387,700,000	Bulan 0	860,500	*Bulan* 6	99,961,000	0 *Bulan*	75,712,500	*Bulan* 6	16,384,000	*12 Bulan*	*192,918,000*	*48 Bulan*	*1,472,124,000*	*80.00%*	*69.05%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	**0.18**	**12.77**	**24.85**	-	**21.31**	**65.96**	**3.34**	78.72	49.67					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	T	SR					
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani**	**500**	**3,630,260,000**	**300**	**2,178,156,000**		**655,106,000**		-		**110,000,000**		**60,930,000**		**17,946,000**	-	*188,876,000*	*300*	*2,367,032,000*	*60.00%*	*65.20%*	DINAS SOSIAL
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**500**	**1,927,060,000**	**300**	**1,156,236,000**		**301,552,000**		-		-		**5,930,000**		**16,986,000**	-	*22,916,000*	*300*	*1,179,152,000*	*60.00%*	*61.19%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	2500 Paket	1,127,760,000	1500 Paket	676,656,000	Paket 500	211,082,000	Paket 0	-	*Paket* -	-	0 *Paket*	5,930,000	*Paket* 0	11,476,000	*- Paket*	*17,406,000*	*1,500 Paket*	*694,062,000*	*60.00%*	*61.54%*	DINAS SOSIAL
			Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	1250 Paket	284,300,000	750 Paket	170,580,000	Paket 250	49,360,000	Paket 0	-	*Paket* -	-	0 *Paket*	-	*Paket* 0	510,000	*- Paket*	*510,000*	*750 Paket*	*171,090,000*	*60.00%*	*60.18%*	DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5 Paket	388,750,000	3 Paket	233,250,000	1 Paket	29,250,000	0 Paket	-	- *Paket*	-	0 *Paket*	-	0 *Paket*	-	- *Paket*	-	*3 Paket*	*233,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS SOSIAL
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Peserta Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	10 Kelompok	126,250,000	6 Kelompok	75,750,000	2 Kelompok	11,860,000	0 Kelompok	-	- *Kelompok*	-	0 *Kelompok*	-	2 *Kelompok*	5,000,000	*2 Kelompok*	*5,000,000*	*8 Kelompok*	*80,750,000*	*80.00%*	*63.96%*	DINAS SOSIAL
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**500**	**1,703,200,000**	**300**	**1,021,920,000**		**353,554,000**		**-**		**110,000,000**		**55,000,000**		**960,000**	*-*	*165,960,000*	*300*	*1,187,880,000*	*60.00%*	*69.74%*	DINAS SOSIAL
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	305 Orang	1,703,200,000	183 Orang	1,021,920,000	61 Orang	353,554,000	0 Orang	-	- *Orang*	110,000,000	0 *Orang*	55,000,000	61 *Orang*	960,000	*61 Orang*	*165,960,000*	*244 Orang*	*1,187,880,000*	*80.00%*	*69.74%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**16.79**	**-**	**9.30**	**7.74**	**2.74**	**7.74**	**28.83**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara**	**500**	**600,483,800**	**300**	**360,290,280**		**118,886,760**		**-**		**92,563,800**		**7,012,252**		**4,125,432**	*-*	*103,701,484*	*300*	*463,991,764*	*60.00%*	*77.27%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Terpeliharanya aman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**500**	**600,483,800**	**300**	**360,290,280**		**118,886,760**		**-**		**92,563,800**		**7,012,252**		**4,125,432**	*-*	*103,701,484*	*300*	*463,991,764*	*60.00%*	*77.27%*	DINAS SOSIAL
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Unit	372,800,000	3 Unit	223,680,000	1 Unit	76,600,000	0 Unit	-	- *Unit*	68,800,000	0 *Unit*	-	1 *Unit*	1,690,000	*1 Unit*	*70,490,000*	*4 Unit*	*294,170,000*	*80.00%*	*78.91%*	DINAS SOSIAL
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60 Bulan	227,683,800	36 Bulan	136,610,280	12 Bulan	42,286,760	0 Bulan	-	- *Bulan*	23,763,800	6 *Bulan*	7,012,252	6 *Bulan*	2,435,432	*12 Bulan*	*33,211,484*	*48 Bulan*	*169,821,764*	*80.00%*	*74.59%*	DINAS SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**77.86**	**46.15**	**5.90**	**53.85**	**3.47**	**100.00**	**87.23**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**T**				
			DINAS TENAGA KERJA																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																- -	-	- -	-			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**19,108,625,865**	**WTP**	**11,465,175,519**	**WTP**	**4,164,599,579**	**WTP**	**448,824,815**	*WTP*	**1,114,554,782**	*WTP*	**568,907,690**	*WTP*	**1,535,771,931**	*- WTP*	*3,668,059,218*	*- WTP*	*15,133,234,737*		*79.20%*	DINAS TENAGA KERJA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Renja dan Perubahannya**	**5**	**390,156,500**	**3**	**234,093,900**		**101,155,700**		**6,767,000**		**16,847,300**		**13,213,250**		**23,372,700**	*-*	*60,200,250*	*3*	*294,294,150*	*60.00%*	*75.43%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	150 buku	228,121,000	90 buku	136,872,600	30 buku	52,363,800	10 buku	6,767,000	*buku* -	8,588,050	0 *buku*	8,332,500	20 *buku*	18,795,300	*30 buku*	*42,482,850*	*120 buku*	*179,355,450*	*80.00%*	*78.62%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	300 Eksemplar Dokumen	39,844,500	180 Eksemplar Dokumen	23,906,700	60 Eksemplar Dokumen	7,968,900	0 Eksemplar Dokumen	-	*Eksemplar Dokumen* -	5,290,000	0 *Eksemplar Dokumen*	-	20 *Eksemplar Dokumen*	626,900	*60 Eksemplar Dokum*	*5,916,900*	*240 Eksemplar Dokum*	*29,823,600*	*80.00%*	*74.85%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Eksemplar Dokumen	37,566,000	180 Eksemplar Dokumen	22,539,600	60 Eksemplar Dokumen	16,683,000	0 Eksemplar Dokumen	-	*Eksemplar Dokumen* -	-	0 *Eksemplar Dokumen*	-	60 *Eksemplar Dokumen*	-	*60 Eksemplar Dokum*	-	*240 Eksemplar Dokum*	*22,539,600*	*80.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksemplar Dokumen	6,750,000	300 Eksemplar Dokumen	4,050,000	60 Eksemplar Dokumen	1,350,000	0 Eksemplar Dokumen	-	*Eksemplar Dokumen* -	690,000	0 *Eksemplar Dokumen*	660,000	20 *Eksemplar Dokumen*	-	*60 Eksemplar Dokum*	*1,350,000*	*360 Eksemplar Dokum*	*5,400,000*	*72.00%*	*80.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500 Eksemplar Dokumen	6,750,000	300 Eksemplar Dokumen	4,050,000	100 Eksemplar Dokumen	6,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	*Eksemplar Dokumen* -	-	0 *Eksemplar Dokumen*	-	0 *Eksemplar Dokumen*	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*300 Eksemplar Dokum*	*4,050,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	500 Eksmplar Dokumen	24,706,000	300 Eksmplar Dokumen	14,823,600	100 Eksmplar Dokumen	7,506,200	0 Eksmplar Dokumen	-	- *Eksmplar Dokumen*	-	0 *Eksmplar Dokumen*	1,336,500	100 *Eksmplar Dokumen*	1,836,200	*100 Eksmplar Dokumen*	*3,172,700*	*400 Eksmplar Dokumen*	*17,996,300*	*80.00%*	*72.84%*	DINAS TENAGA KERJA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan, LAKIP,LKPJ, LPPD	125 Buku	46,419,000	75 Buku	27,851,400	25 Buku	9,283,800	0 Buku	-	10 *Buku*	2,279,250	0 *Buku*	2,884,250	15 *Buku*	2,114,300	*25 Buku*	*7,277,800*	*100 Buku*	*35,129,200*	*80.00%*	*75.68%*	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu**	**230 orang**	**16,006,531,645**	**138 orang**	**9,603,918,987**	**orang**	**3,181,570,525**	**orang**	**409,008,130**	*orang*	**876,475,919**	*orang*	**489,720,847**	*orang*	**1,108,832,957**	*- orang*	*2,884,037,853*	*138 orang*	*12,487,956,840*	*60.00%*	*78.02%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,291,566,945	60 Orang	6,174,940,167	20 Orang	2,050,921,425	0 Orang	398,128,130	*Orang* 10	640,846,369	5 *Orang*	439,495,397	*Orang* 5	415,537,857	*20 Orang*	*1,894,007,753*	*80 Orang*	*8,068,947,920*	*80.00%*	*78.40%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi pelaksana tugas ASN, Jumlah Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	60 Bulan	5,388,564,700	36 Bulan	3,233,138,820	12 Bulan	1,056,729,100	0 Bulan	-	*Bulan* 6	221,419,550	2 *Bulan*	38,355,450	*Bulan* 4	658,915,100	*12 Bulan*	*918,690,100*	*48 Bulan*	*4,151,828,920*	*80.00%*	*77.05%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan da PengujianVeraifikasi Keuangan SKPD	40 Orang	326,400,000	24 Orang	195,840,000	8 Orang	73,920,000	2 Orang	10,880,000	*Orang* 1	14,210,000	0 *Orang*	11,870,000	*Orang* 5	34,380,000	*8 Orang*	*71,340,000*	*32 Orang*	*267,180,000*	*80.00%*	*81.86%*	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5 3**	**100,250,000**		**60,150,000**		**20,050,000**		**-**		**20,050,000**		**-**		**20,050,000**	*-*	*40,100,000*	*3*	*100,250,000*	*60.00%*	*100.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kerlengkapannya	230 stel	100,250,000	138 stel	60,150,000	46 stel	20,050,000	0 stel	-	*stel* 46	20,050,000	0 *stel*	-	*stel* 0	20,050,000	*46 stel*	*40,100,000*	*184 stel*	*100,250,000*	*80.00%*	*100.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang di susun Tepat Waktu**	**5 3**	**1,045,065,000**		**627,039,000**		**364,705,050**		**5,500,000**		**129,280,850**		**20,042,750**		**59,200,444**	*-*	*214,024,044*	*3*	*841,063,044*	*60.00%*	*80.48%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	750 Buah	62,750,000	450 Buah	37,650,000	150 Buah	12,550,000	0 Buah	-	*Buah* -	910,000	0 *Buah*	-	*Buah* 0	-	*- Buah*	*910,000*	*450 Buah*	*38,560,000*	*60.00%*	*61.45%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit	199,800,000	3 unit	119,880,000	1 unit	175,530,450	0 unit	-	*unit* -	104,726,250	0 *unit*	330,000	*unit* 1	28,507,000	*1 unit*	*133,563,250*	*4 unit*	*253,443,250*	*80.00%*	*126.85%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan minuman untukkeperluan Rutin Kantor	2500 kotak	85,000,000	1500 kotak	51,000,000	500 kotak	27,260,000	0 kotak	-	*kotak* 150	5,673,200	0 *kotak*	5,192,550	*kotak* 150	7,103,250	*300 kotak*	*17,969,000*	*1,800 kotak*	*68,969,000*	*72.00%*	*81.14%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan rutin Kantor	45000 Eksemplar	57,529,000	27000 Eksemplar	34,517,400	9000 Eksemplar	15,015,800	0 Eksemplar	-	*Eksemplar* 3	2,682,800	0 *Eksemplar*	3,039,800	*Eksemplar* 4997	1,394,200	*5,000 Eksemplar*	*7,116,800*	*32,000 Eksemplar*	*41,634,200*	*71.11%*	*72.37%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan / Material Lainnya untuk keperluan rutin Kantor	17500 Buah	122,131,000	10500 Buah	73,278,600	3500 Buah	28,782,800	800 Buah	5,500,000	*Buah* -	8,748,600	0 *Buah*	4,280,400	*Buah* 2700	6,101,900	*3,500 Buah*	*24,630,900*	*14,000 Buah*	*97,909,500*	*80.00%*	*80.17%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	350 kali	517,855,000	210 kali	310,713,000	70 kali	105,566,000	0 kali	-	*kali* 5	6,540,000	3 *kali*	7,200,000	*kali* 12	16,094,094	*20 kali*	*29,834,094*	*230 kali*	*340,547,094*	*65.71%*	*65.76%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 3**	**186,733,750**		**112,040,250**		**75,021,550**		**-**		**30,864,750**		**-**		**44,156,800**	*-*	*75,021,550*	*3*	*187,061,800*	*60.00%*	*100.18%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pengadaan Mebel	jumlah pengadaan Meja,Kursi,Lemari dan Mebel laiinnya	5 unit	186,733,750	3 unit	112,040,250	1 unit	75,021,550	0 unit	-	*unit* -	30,864,750	0 *unit*	-	1 *unit*	44,156,800	*1 unit*	*75,021,550*	*4 unit*	*187,061,800*	*80.00%*	*100.18%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**5 3**	**461,756,970**		**277,054,182**		**98,070,354**		**9,848,085**		**14,429,463**		**15,775,343**		**51,525,803**	*-*	*91,578,694*	*3*	*368,632,876*	*60.00%*	*79.83%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	251,411,570	36 Bulan	150,846,942	12 Bulan	60,442,314	1 Bulan	4,848,085	*Bulan* 2	13,068,343	2 *Bulan*	15,775,343	7 *Bulan*	31,000,803	*12 Bulan*	*64,692,574*	*48 Bulan*	*215,539,516*	*80.00%*	*85.73%*	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan/ Kali	210,345,400	36 Bulan/ Kali	126,207,240	12 Bulan/ Kali	37,628,040	2 Bulan/ Kali	5,000,000	*Bulan - /Kali*	1,361,120	0 *Bulan/ Kali*	-	10 *Bulan/ Kali*	20,525,000	*12 Bulan/ Kali*	*26,886,120*	*48 Bulan/ Kali*	*153,093,360*		*72.78%*	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5 3**	**918,132,000**		**550,879,200**		**324,026,400**		**17,701,600**		**26,606,500**		**30,155,500**		**228,633,227**	*-*	*303,096,827*	*3*	*853,976,027*	*60.00%*	*93.01%*	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																					16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan baik	35 unit	710,552,000	21 unit	426,331,200	unit 7	142,110,400	unit 1	17,701,600	***unit*** 1	26,606,500	0 ***unit***	26,255,500	5 ***unit***	54,704,800	***7 unit***	***125,268,400***	***28 unit***	***551,599,600***	***80.00%***	***77.63%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Unit	49,950,000	36 Unit	29,970,000	Unit 12	8,160,000	Unit 0	-	***Unit*** -	-	3 ***Unit***	3,900,000	4 ***Unit***	1,460,000	***7 Unit***	***5,360,000***	***43 Unit***	***35,330,000***	***71.67%***	***70.73%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Laiinya yang dipelihara dengan baik	5 unit	157,630,000	3 unit	94,578,000	unit 1	173,756,000	unit 0	-	***unit***	-	0 ***unit***	-	1 ***unit***	172,468,427	***1 unit***	***172,468,427***	***4 unit***	***267,046,427***	***80.00%***	***169.41%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**5.92**	**10.78**	**2.28**	**26.76**	**0.11**	**13.66**	**59.02**	**36.88**	**67.32**	**88.08**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SD**	**T**					
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan dilaksana dengan baik**	**35825**	**66,331,500**	**21495**	**39,798,900**		-				-		-		-	-	-	***21,495***	***39,798,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja**	**50 Buku**	**66,331,500**	**30 Buku**	**39,798,900**	**Buku**	-	**Buku**		***Buku***	-	***Buku***	-	***Buku***	-	- ***Buku***	-	***30 Buku***	***39,798,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah penyusunan rencana tenaga kerja makro	25 buku	66,331,500	15 buku	39,798,900	buku		buku		***buku***	-	***buku***		***buku***		- ***buku***	-	***15 buku***	***39,798,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Pertumbuhan Produktifitas Tenaga Kerja Yang Diberi Pelatihan**	**33950**	**258,678,500**	**20370**	**155,207,100**		**34,124,200**				-		-		-	-	-	***20,370***	***155,207,100***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Tersedianya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi**	**250 Orang**	**170,621,000**	**150 Orang**	**102,372,600**	**Orang**	**34,124,200**	**Orang**		**Orang**	-	**Orang**	-	**Orang**	-	- ***Orang***	-	***150 Orang***	***102,372,600***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kalstre Kompetensi	250 Orang	170,621,000	150 Orang	102,372,600	Orang 50	34,124,200	Orang		Orang	-	Orang		Orang		- ***Orang***	-	***150 Orang***	***102,372,600***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**70 LPK**	**63,057,500**	**42 LPK**	**37,834,500**	**LPK**	-	**LPK**	-	**LPK**	-	**LPK**	-	**LPK**	-	- ***LPK***	-	***42 LPK***	***37,834,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Swasta	5 LPK	63,057,500	3 LPK	37,834,500						-					- -	-	***3 -***	***37,834,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengukuran Produktifitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**25,000,000**	**3**	**15,000,000**		-		-		-		-		-	-	-	***3***	***15,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penerima hibah	5	25,000,000	3	15,000,000			0 0	-	***0.00*** -	-	0 ***0.00***	-	- ***0.00***	-	- -	-	***3 -***	***15,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Yang Terdaftar**	**30025**	**214,572,500**	**18015**	**128,743,500**		**27,213,500**		-		**14,910,900**		**6,851,000**		**2,312,400**	-	***24,074,300***	***18,015***	***152,817,800***	***60.00%***	***71.22%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Jumlah Pelayanan Antar Kerja**	**32500 Orang**	**136,067,500**	**19500 Orang**	**81,640,500**	**Orang**	**27,213,500**	**Orang**	-	**Orang**	**14,910,900**	**Orang**	**6,851,000**	**Orang**	**2,312,400**	- ***Orang***	***24,074,300***	***19,500 Orang***	***105,714,800***	***60.00%***	***77.69%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pelayanan Antar Kerja	32500 Orang	136,067,500	19500 Orang	81,640,500	Orang 6500	27,213,500	Orang 0	-	Orang 3,500	14,910,900	0 Orang	6,851,000	2,500 Orang	2,312,400	***6,000 Orang***	***24,074,300***	***25,500 Orang***	***105,714,800***	***78.46%***	***77.69%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran**	**2500 orang**	**78,505,000**	**1500 orang**	**47,103,000**	**orang**	-	**orang**	-	**orang**	-	**orang**	-	**orang**	-	- ***orang***	-	***1,500 orang***	***47,103,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	2500 orang	78,505,000	1500 orang	47,103,000	orang		orang		orang	-	orang		orang		- ***orang***	-	***1,500 orang***	***47,103,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	**53.85**	**54.79**	-	**25.18**	**38.46**	**8.50**	**92.31**	**88.46**					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**R**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Penurunan Perselisihan Hubungan Industria**	30500	**409,810,000**	**18300**	**245,886,000**		**31,822,900**		-		-		**15,888,400**		**8,200,000**	-	***24,088,400***	***18,300***	***269,974,400***	***60.00%***	***65.88%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**	500 **persen**	**299,489,500**	**300 persen**	**179,693,700**	**persen**	**31,822,900**	**persen**	-	**persen**	-	**persen**	**15,888,400**	**persen**	**8,200,000**	- ***persen***	***24,088,400***	***300 persen***	***203,782,100***	***60.00%***	***68.04%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	10 buku	160,614,500	6 buku	96,368,700	2 buku	18,347,900	0 buku	-	- buku	-	0 buku	14,147,450	2 buku	-	***2 buku***	***14,147,450***	***8 buku***	***110,516,150***	***80.00%***	***68.81%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrialdan jaminan sosial tenaga kerja	10 buku	138,875,000	6 buku	83,325,000	2 buku	13,475,000	0 buku	-	- buku	-	0 buku	1,740,950	2 buku	8,200,000	***2 buku***	***9,940,950***	***8 buku***	***93,265,950***	***80.00%***	***67.16%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	**meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan harmonis**	**500 Persen**	**110,320,500**	**300 Persen**	**66,192,300**	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	- ***Persen***	-	***300 Persen***	***66,192,300***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	150 orang	110,320,500	90 orang	66,192,300	orang		orang		orang	-	orang		orang		- ***orang***	-	***90 orang***	***66,192,300***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	**49.93**	**100.00**	**25.77**	**100.00**	**75.70**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Baru Dan Terbarukan**	**47945**	**185,327,000**	**28767**	**111,196,200**		**37,065,400**		-		-		-		-	-	-	***28,767***	***111,196,200***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**	**500 Persen**	**185,327,000**	**300 Persen**	**111,196,200**	**Persen**	**37,065,400**	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	- ***Persen***	-	***300 Persen***	***111,196,200***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan dalamPelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	5 Dokumen	185,327,000	3 Dokumen	111,196,200	1 Dokumen	37,065,400	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		- ***Dokumen***	-	***3 Dokumen***	***111,196,200***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Transmigran Yang Berasal Dari Kabupaten Tanggamus**	**430**	**223,250,000**	**258**	**133,950,000**		-		-		-		-		-	-	-	***258***	***133,950,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Minat Keikutsertaan Masyarakat Bertransmigrasi**	**500 Persen**	**223,250,000**	**300 Persen**	**133,950,000**	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	**Persen**	-	- ***Persen***	-	***300 Persen***	***133,950,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	100 orang	93,250,000	60 orang	55,950,000	orang		orang		orang		orang		orang		- ***orang***	-	***60 orang***	***55,950,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 KK	130,000,000	15 KK	78,000,000	KK		KK		KK		KK		KK		- ***KK***	-	***15 KK***	***78,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-		-		-	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**					
			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																						
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Ratio Elektrifikasi**	**48500**	**4,648,095,640**	**29100**	**2,788,857,384**	**9700**	**705,449,128**		-		**18,892,600**		**7,761,800**		**3,601,900**	-	***30,256,300***	***29,100***	***2,819,113,684***	***60.00%***	***60.65%***	DINAS TENAGA KERJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Meningkatnya Rumah Tangga Pengguna Listrik**	**5**	**4,648,095,640**	**3**	**2,788,857,384**		**705,449,128**		-		**18,892,600**		**7,761,800**		**3,601,900**	-	*30,256,300*	*3*	*2,819,113,684*	*60.00%*	*60.65%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Dokumen	73,600,000	15 Dokumen	44,160,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*15 Dokumen*	*44,160,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS TENAGA KERJA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanEnergi Air	25 Dokumen	4,574,495,640	15 Dokumen	2,744,697,384	5 Dokumen	705,449,128	0 Dokumen	-	- Dokumen	18,892,600	0 Dokumen	7,761,800	- Dokumen	3,601,900	- *Dokumen*	*30,256,300*	*15 Dokumen*	*2,774,953,684*	*60.00%*	*60.66%*	DINAS TENAGA KERJA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**2.68**	-	**1.10**	-	**0.51**	-	**4.29**				
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																- -	-	- -	-			
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																- -	-	- -	-			
			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**25,870,168,250**	**3 WTP**	**15,522,100,950**	**WTP**	**4,826,907,883**	**WTP**	**1,030,843,230**	**WTP**	**1,288,811,996**	**WTP**	**1,079,848,893**	**WTP**	**935,696,253**	- *WTP*	*4,335,200,372*	*3 WTP*	*19,857,301,322*	*60.00%*	*76.76%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**500**	**387,343,750**	**300**	**232,406,250**		**101,914,650**		-		**14,147,350**		**10,243,200**		**23,340,600**	-	*47,731,150*	*300*	*280,137,400*	*60.00%*	*72.32%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan perubahannyaan	20 dokumen	154,724,250	12 dokumen	92,834,550	4 dokumen	42,945,250	0 dokumen	-	2 dokumen	12,747,550	0 dokumen	5,220,000	2 dokumen	1,800,000	*4 dokumen*	*19,767,550*	*16 dokumen*	*112,602,100*	*80.00%*	*72.78%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 Dokumen	62,485,000	3 Dokumen	37,491,000	1 Dokumen	12,540,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	7,379,400	*1 Dokumen*	*7,379,400*	*4 Dokumen*	*44,870,400*	*80.00%*	*71.81%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	62,485,000	3 Dokumen	37,491,000	1 Dokumen	17,142,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,400,000	*1 Dokumen*	*5,400,000*	*4 Dokumen*	*42,891,000*	*80.00%*	*68.64%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9,966,000	3 Dokumen	5,979,600	1 Dokumen	1,993,200	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	1,993,200	1 Dokumen	1,869,000	*1 Dokumen*	*3,862,200*	*4 Dokumen*	*9,841,800*	*80.00%*	*98.75%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	9,966,000	3 Dokumen	5,979,600	1 Dokumen	3,999,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	3,862,200	*1 Dokumen*	*3,862,200*	*4 Dokumen*	*9,841,800*	*80.00%*	*98.75%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen PK dan Laporan Kinerja Triwulan	20 Dokumen	32,667,500	11 Dokumen	19,600,500	4 Dokumen	10,263,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	3 Dokumen	-	1 Dokumen	3,030,000	*4 Dokumen*	*3,030,000*	*15 Dokumen*	*22,630,500*	*75.00%*	*69.28%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LPPD, Lakip, LKPJ perangkat daerah	12 Dokumen	55,050,000	9 Dokumen	33,030,000	3 Dokumen	13,030,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1,399,800	1 Dokumen	3,030,000	1 Dokumen	-	*3 Dokumen*	*4,429,800*	*12 Dokumen*	*37,459,800*	*100.00%*	*68.05%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**22,174,791,250**	**300**	**13,304,874,750**		**4,122,390,733**		**1,030,843,230**		**1,147,329,937**		**959,690,895**		**720,598,512**	-	*3,858,462,574*	*300*	*17,163,337,324*	*60.00%*	*77.40%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	120 orang	17,254,341,250	72 orang	10,352,604,750	24 orang	3,186,720,933	6 orang	760,643,230	6 orang	976,049,937	6 orang	672,400,895	6 orang	472,799,612	*24 orang*	*2,881,893,674*	*96 orang*	*13,234,498,424*	*80.00%*	*76.70%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	270 Orang	4,341,000,000	162 Orang	2,604,600,000	54 Orang	811,800,000	13 Orang	270,200,000	13 Orang	135,100,000	14 Orang	270,200,000	14 Orang	135,100,000	*54 Orang*	*810,600,000*	*216 Orang*	*3,415,200,000*	*80.00%*	*78.67%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	60 kali	579,450,000	36 kali	347,670,000	12 kali	123,869,800	0 kali	-	3 kali	36,180,000	6 kali	17,090,000	3 kali	112,698,900	*12 kali*	*165,968,900*	*48 kali*	*513,638,900*	*80.00%*	*88.64%*	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Untuk Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500**	**148,125,000**	**300**	**88,875,000**		**29,625,000**		**-**		**29,625,000**		**-**		**29,625,000**	**-**	***59,250,000***	***300***	***148,125,000***	***60.00%***	***100.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sumber Daya Manusia	5 orang	148,125,000	3 orang	88,875,000	1 orang	29,625,000	0 orang	-	- orang	29,625,000	1 orang	-	- orang	29,625,000	***1 orang***	***59,250,000***	***4 orang***	***148,125,000***	***80.00%***	***100.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**1,282,539,250**	**300**	**769,523,550**		**187,199,100**		**-**		**7,566,800**		**28,007,000**		**33,745,000**	**-**	***69,318,800***	***300***	***838,842,350***	***60.00%***	***65.40%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60 unit	230,403,250	36 unit	138,241,950	12 unit	31,962,900	0 unit	-	3 unit	3,546,800	6 unit	13,350,000	3 unit	-	***12 unit***	***16,896,800***	***48 unit***	***155,138,750***	***80.00%***	***67.33%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	1550 kotak	50,000,000	930 kotak	30,000,000	310 kotak	13,030,000	0 kotak	-	20 kotak	2,020,000	135 kotak	3,252,000	145 kotak	-	***300 kotak***	***5,272,000***	***1,230 kotak***	***35,272,000***	***79.35%***	***70.54%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan Rutin Kantor	24765 Lembar	65,001,000	14859 Lembar	39,000,600	4953 Lembar	3,000,200	0 Lembar	-	- Lembar	-	0 Lembar	-	4,500 Lembar	2,490,000	***4,500 Lembar***	***2,490,000***	***19,359 Lembar***	***41,490,600***	***78.17%***	***63.83%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan /Material Lainnya untuk keperluan Rutin	155 buah	9,000,000	93 buah	5,400,000	31 buah	1,800,000	0 buah	-	9 buah	1,000,000	22 buah	800,000	- buah	-	***31 buah***	***1,800,000***	***124 buah***	***7,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	965 kali	928,135,000	579 kali	556,881,000	193 kali	137,406,000	7 kali	-	17 kali	1,000,000	3 kali	10,605,000	73 kali	31,255,000	***100 kali***	***42,860,000***	***679 kali***	***599,741,000***	***70.36%***	***64.62%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**421,940,000**	**300**	**253,164,000**		**72,288,000**		**-**		**25,688,309**		**12,371,898**		**21,420,801**	**-**	***59,481,008***	***300***	***312,645,008***	***60.00%***	***74.10%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	60 Bulan	342,950,000	36 Bulan	205,770,000	12 Bulan	56,490,000	3 Bulan	-	3 Bulan	15,741,859	3 Bulan	10,996,898	3 Bulan	20,295,801	***12 Bulan***	***47,034,558***	***48 Bulan***	***252,804,558***	***80.00%***	***73.71%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 bulan	78,990,000	36 bulan	47,394,000	12 bulan	15,798,000	3 bulan	-	3 bulan	9,946,450	3 bulan	1,375,000	3 bulan	1,125,000	***12 bulan***	***12,446,450***	***48 bulan***	***59,840,450***	***80.00%***	***75.76%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**1,455,429,000**	**300**	**873,257,400**		**313,490,400**		**-**		**64,454,600**		**69,535,900**		**106,966,340**	**-**	***240,956,840***	***300***	***1,114,214,240***	***60.00%***	***76.56%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dengan baik	40 unit	1,455,429,000	24 unit	873,257,400	8 unit	313,490,400	0 unit	-	4 unit	64,454,600	2 unit	69,535,900	2 unit	106,966,340	***8 unit***	***240,956,840***	***32 unit***	***1,114,214,240***	***80.00%***	***76.56%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.57**	**21.36**	**1.49**	**26.70**	**3.64**	**22.37**	**84.44**	**19.39**	**90.14**	**89.81**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase peningkatan anggaran responsif gender terhadap belanja daerah**	**30**	**1,327,593,500**	**18**	**796,556,100**		**111,565,600**		**-**		**-**		**29,511,800**		**35,427,000**	**-**	***64,938,800***	***18***	***861,494,900***	***60.00%***	***64.89%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5**	**386,496,000**	**3**	**231,897,600**		**75,689,100**		**-**		**-**		**25,711,800**		**5,000,000**	**-**	***30,711,800***	***3***	***262,609,400***	***60.00%***	***67.95%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sinkronisasi pelaksanaan PUG	425 orang	125,062,500	255 orang	75,037,500	85 orang	29,352,300	0 orang	-	- orang	-	85 orang	25,711,800	- orang	-	***85 orang***	***25,711,800***	***340 orang***	***100,749,300***	***80.00%***	***80.56%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kebijakan PUG termasuk PPRG	250 orang	261,433,500	150 orang	156,860,100	50 orang	46,336,800	0 orang	-	- orang	-	0 orang	-	50 orang	5,000,000	***50 orang***	***5,000,000***	***200 orang***	***161,860,100***	***80.00%***	***61.91%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5**	**161,632,500**	**3**	**96,979,500**		**35,876,500**		**-**		**-**		**3,800,000**		**30,427,000**	**-**	***34,227,000***	***3***	***131,206,500***	***60.00%***	***81.18%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	300 orang	161,632,500	180 orang	96,979,500	60 orang	35,876,500	0 orang	-	- orang	-	0 orang	3,800,000	60 orang	30,427,000	***60 orang***	***34,227,000***	***240 orang***	***131,206,500***	***80.00%***	***81.18%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan**	**5**	**779,465,000**	**3**	**467,679,000**		-				-		-		-	-	-	***3***	***467,679,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga	Jumlah pendampingan pada korban kekerasan perempuan	5 Kali	779,465,000	3 Kali	467,679,000						-					- -	-	***3*** -	***467,679,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0**	-	**43.59**	**26.45**	**56.41**	**31.75**	**100**	**58.21**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**R**				
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Perempuan**	**425**	**807,349,500**	**255**	**484,409,700**	**%** **100**	**257,056,900**	**%**	-	**%**	**32,023,700**		**86,173,634**		**29,219,500**	- **%**	***147,416,834***	***255 %***	***631,826,534***	***60.00%***	***78.26%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**807,349,500**	**3**	**484,409,700**	**1**	**211,919,900**		-		**32,023,700**		**86,173,634**		**29,219,500**	-	***147,416,834***	***3***	***631,826,534***	***60.00%***	***78.26%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	150 kasus	267,000,000	90 kasus	160,200,000	kasus 30	53,400,000	kasus 0	-	- kasus	-	15 kasus	33,572,000	15 kasus	-	***30 kasus***	***33,572,000***	***120 kasus***	***193,772,000***	***80.00%***	***72.57%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya advokasi kebijakan dan pendampingan	60 Bulan	807,349,500	36 Bulan	484,409,700	Bulan 12	158,519,900	Bulan 0	-	3 Bulan	32,023,700	6 Bulan	52,601,634	3 Bulan	29,219,500	***12 Bulan***	***113,844,834***	***48 Bulan***	***598,254,534***	***80.00%***	***74.10%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		**45,137,000**		-		-		-		-	-	-	-	-			DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan bgi perempuan korban kekerasan	150 kasus	-	90 kasus	-	kasus 30	45,137,000	kasus 0	-	kasus -	-	8 kasus	807,900	22 kasus	10,291,500	***30 kasus***	***11,099,400***	***120 kasus***	***11,099,400***	***80.00%***		DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-						-		-		-	-	-	-	-			DINAS PPPA DALDUK KB
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah tersedianya layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan	150 kasus	-	90 kasus	-	kasus 30	26,856,000	kasus 0	-	kasus -	-	20 kasus	10,823,300	10 kasus	-	***30 kasus***	***10,823,300***	***120 kasus***	***10,823,300***	***80.00%***		DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**1.48**	**12.46**	**24.14**	**33.52**	**24.63**	**11.37**	**50.25**	**57.35**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**R**				
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase cakupan anggota keluarga UPPKS**	**5**	**187,711,500**	**3**	**112,626,900**		**36,152,300**				-		-		-	-	-	***3***	***112,626,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota**	**5**	**187,711,500**	**3**	**112,626,900**		**36,152,300**				-		-		-	-	-	***3***	***112,626,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Penguatan jejaring antar lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	450 orang	187,711,500	270 orang	112,626,900	orang 90	36,152,300	orang 0	-	orang -	-	0 orang	-	- orang	-	-	- ***orang***	-	***270 orang***	***112,626,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Hak Anak Pada Klaster Pendidikan**	**15**	**802,252,500**	**9**	**481,351,500**		**168,314,400**				**14,951,000**		**11,095,400**		**93,821,450**	**-**	***119,867,850***	***9***	***601,219,350***	***60.00%***	***74.94%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5**	**435,208,500**	**3**	**261,125,100**		**93,895,600**				**14,951,000**		**-**		**57,194,950**	**-**	***72,145,950***	***3***	***333,271,050***	***60.00%***	***76.58%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	500 orang	302,274,500	300 orang	181,364,700	orang 100	61,464,900	orang 0	-	orang -	-	0 orang	-	100 orang	42,406,150	***100 orang***	***42,406,150***	***400 orang***	***223,770,850***	***80.00%***	***74.03%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Kordinasi dan Sinkronisasi	325 orang	132,934,000	195 orang	79,760,400	orang 65	32,430,700	orang 0	-	orang 30	14,951,000	0 orang	-	35 orang	14,788,800	***65 orang***	***29,739,800***	***260 orang***	***109,500,200***	***80.00%***	***82.37%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**5**	**367,044,000**	**3**	**220,226,400**		**74,418,800**				**-**		**11,095,400**		**36,626,500**	**-**	***47,721,900***	***3***	***267,948,300***	***60.00%***	***73.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Jambore dan Forum Anak	900 orang	367,044,000	540 orang	220,226,400	orang 185	74,418,800	orang 0	-	orang -	-	30 orang	11,095,400	70 orang	36,626,500	***100 orang***	***47,721,900***	***640 orang***	***267,948,300***	***71.11%***	***73.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
				Rata-rata capaian kinerja (%)							-	-	9	8.88	8.57	6.59	58.57	55.74	75.71	71.22					
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	R	T	SD					
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase Penurunan Angka Kekerasan Anak**	**5**	**8,512,308,500**	**3**	**5,107,385,100**		**1,732,961,700**				**330,000,000**		**234,881,150**		**75,600,000**	**-**	***640,481,150***	***3***	***5,747,866,250***	***60.00%***	***67.52%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**532,808,500**	**3**	**319,685,100**		**106,561,700**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***3***	***319,685,100***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan	825 orang	420,234,000	495 orang	252,140,400	orang 165	84,046,800	orang	-	orang	-	orang		orang		**- *orang***	**-**	***495 orang***	***252,140,400***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak	200 orang	112,574,500	120 orang	67,544,700	orang 40	22,514,900	orang	-	orang	-	orang		orang		**- *orang***	**-**	***120 orang***	***67,544,700***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**7,979,500,000**	**3**	**4,787,700,000**		**1,577,450,000**				**330,000,000**		**234,881,150**		**75,600,000**	**-**	***640,481,150***	***3***	***5,428,181,150***	***60.00%***	***68.03%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasillitas penanganan tindakan kekerasan anak	500 %	1,152,000,000	300 %	691,200,000						-					**- -**	**-**	***300 -***	***691,200,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya pendampingan terhadaap kasus anak	150 kasus	-	90 kasus	-	kasus 30	211,950,000	kasus 0	-	kasus 8	-	14 kasus	24,881,150	8 kasus	15,600,000	***30 kasus***	***40,481,150***	***120 kasus***	***40,481,150***	***80.00%***	***#DIV/0!***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima hibah	5 Kegiatan	6,827,500,000	3 Kegiatan	4,096,500,000	Kegiatan 1	1,365,500,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	330,000,000	0 Kegiatan	210,000,000	1 Kegiatan	60,000,000	*1 Kegiatan*	*600,000,000*	*4 Kegiatan*	*4,696,500,000*	*80.00%*	*68.79%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**-**		**-**		**48,950,000**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			DINAS PPPA DALDUK KB
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan SDM pada lembaga penanganan korban kekerasan pada anak	150 Peserta	-	90 Peserta	-	Peserta 30	48,950,000	Peserta 0	-	Peserta -	-	22 Peserta	11,232,500	8 Peserta	-	*30 Peserta*	*11,232,500*	*120 Peserta*	*11,232,500*	*80.00%*		DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**3.01**	**19.04**	**13.53**	**13.55**	**6.39**	**32.19**	22.93	64.78				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP I**	**99,753,500**	**WTP I**	**59,852,100**	**WTP I**	**19,950,700**	**WTP I**	**19,950,700**	***WTP I***	**-**		**-**		**-**	**-** *WTP I*	***19,950,700***	**-** *WTP I*	***79,802,800***		***80.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**99,753,500**	**3**	**59,852,100**		**19,950,700**		**19,950,700**		**-**		**-**		**-**	**-**	***19,950,700***	***3***	***79,802,800***	***60.00%***	***80.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	99,753,500	3 Unit	59,852,100	Unit 1	19,950,700	Unit 1	19,950,700	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*19,950,700*	*4 Unit*	*79,802,800*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.0**	**100.00**	**0.00**	**-**		**-**		**-**	100.00	100.00				
										Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**ST**				
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Total Fertility Rate (TFR)**		**231,990,000**		**139,194,000**		**18,645,000**		**-**		**3,314,200**		**-**		**-**	**-**	***3,314,200***	**-**	***142,508,200***		***61.43%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota**	**5**	**77,390,000**	**3**	**46,434,000**		**-**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***3***	***46,434,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100 Dokumen	77,390,000	60 Dokumen	46,434,000	Dokumen		Dokumen		Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		- *Dokumen*	-	*60 Dokumen*	*46,434,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**154,600,000**	**3**	**92,760,000**		**18,645,000**		**-**		**3,314,200**		**-**		**-**	**-**	***3,314,200***	***3***	***96,074,200***	***60.00%***	***62.14%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Tersedianya Buku Pelaporan Data	125 Buku	100,000,000	75 Buku	60,000,000	Buku 25	18,645,000	Buku 0	-	Buku 5	3,314,200	0 Buku	-	20 Buku	-	*25 Buku*	*3,314,200*	*100 Buku*	*63,314,200*	*80.00%*	*63.31%*	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	115 Orang	54,600,000	69 Orang	32,760,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*69 Orang*	*32,760,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**20.00**	**17.78**	**-**	**-**	**80.00**	**-**	100.00	17.78				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase Partisipasi Keluarga Dalam Program KB**	**3875**	**34,691,706,750**	**2325**	**20,815,024,050**		**6,843,118,000**		**1,922,520,854**		**871,947,000**		**241,536,500**		**2,573,117,030**	**-**	***5,609,121,384***	***2,325***	***26,424,145,434***	***60.00%***	***76.17%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Menurunnya Presentase Stunting Kab. Tanggamus**	**160 unit**	**2,170,000,000**	**96 unit**	**1,302,000,000**	**unit**	**434,000,000**	**unit**	-	**unit**	-	**unit**	-	**unit**	**433,290,000**	**- unit**	***433,290,000***	***96 unit***	***1,735,290,000***	***60.00%***	***79.97%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Unit KIT anti Stunting	160 unit	2,170,000,000	96 unit	1,302,000,000	unit 32	434,000,000	unit 0	-	unit -	-	0 unit	-	32 unit	433,290,000	***32 unit***	***433,290,000***	***128 unit***	***1,735,290,000***	***80.00%***	***79.97%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Tercapainya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**5**	**2,049,615,500**	**3**	**1,229,769,300**		**376,081,000**		-		-		-		**334,538,500**	-	***334,538,500***	***3***	***1,564,307,800***	***60.00%***	***76.32%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Peserta Pembinaan IMP	250 orang	75,312,500	150 orang	45,187,500	orang		orang		orang	-	orang		orang		***- orang***	-	***150 orang***	***45,187,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah unit Sarana dan Prasarana	385 unit	1,798,700,000	231 unit	1,079,220,000	unit 77	359,740,000	unit 0	-	unit -	-	0 unit	-	77 unit	324,280,000	***77 unit***	***324,280,000***	***308 unit***	***1,403,500,000***	***80.00%***	***78.03%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah kegiatan harganas	10 kegiatan	175,603,000	6 kegiatan	105,361,800	kegiatan 2	16,341,000	kegiatan 0	-	- kegiatan	-	0 kegiatan	-	2 kegiatan	10,258,500	***2 kegiatan***	***10,258,500***	***8 kegiatan***	***115,620,300***	***80.00%***	***65.84%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Terkendalinya Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**5**	**30,472,091,250**	**3**	**18,283,254,750**		**6,033,037,000**		**1,922,520,854**		**871,947,000**		**241,536,500**		**1,805,288,530**	-	***4,841,292,884***	***3***	***23,124,547,634***	***60.00%***	***75.89%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana penunjang pelayanan Kb	50 Unit	102,778,000	30 Unit	61,666,800	Unit		Unit		Unit	-	Unit		Unit		***- Unit***	-	***30 Unit***	***61,666,800***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumllah Peserta Promosi dan Konseing Kespro	500 Peserta	204,128,250	300 Peserta	122,476,950	Peserta		Peserta		Peserta	-	Peserta		Peserta		***- Peserta***	-	***300 Peserta***	***122,476,950***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Pelayanan KB	100 Kecamatan	30,165,185,000	60 Kecamatan	18,099,111,000	20 Kecamatan	6,033,037,000	20 Kecamatan	1,922,520,854	- Kecamatan	871,947,000	0 Kecamatan	241,536,500	- Kecamatan	1,805,288,530	***20 Kecamatan***	***4,841,292,884***	***80 Kecamatan***	***22,940,403,884***	***80.00%***	***76.05%***	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**15.27**	**28.09**	**0.00**	**12.74**	**-**	**3.53**	**84.73**	**37.60**	**100.00**	**81.97**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST'**	**T**				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam tribina**	**10**	**1,422,806,500**	**6**	**853,683,900**		-		-		-		-		-	-	-	***6***	***853,683,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Tercapainya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5**	**1,422,806,500**	**3**	**853,683,900**		-		-		-		-		-	-	-	***3***	***853,683,900***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	500 Warga binaan	1,297,515,500	300 Warga binaan	778,509,300	Warga binaan		Warga binaan		Warga binaan		Warga binaan		Warga binaan		***- Warga binaan***	-	***300 Warga binaan***	***778,509,300***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PPPA DALDUK KB

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan	250 Orang	125,291,000	150 Orang	75,174,600	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	150 Orang	75,174,600	60.00%	60.00%	DINAS PPPA DALDUK KB
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR						
			DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			-		-											-	-	-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN			-		-											-	-	-	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERTANIAN			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**101,623,764,315**	**3 WTP**	**60,974,258,589**	**WTP**	**18,846,327,390**	**WTP**	**2,470,322,194**	**WTP**	**6,576,933,823**	**WTP**	**2,781,576,844**	**WTP**	**3,620,907,068**	- *WTP*	*15,449,739,929*	*3 WTP*	*76,423,998,518*	*60.00%*	*75.20%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**5**	**362,227,500**	**3**	**217,336,500**		**77,093,500**		-		**36,183,500**		**3,450,000**		**27,125,000**	-	*66,758,500*	*3*	*284,095,000*	*60.00%*	*78.43%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Eksemplar Dokumen	51,915,000	90 Eksemplar Dokumen	31,149,000	30 Eksemplar Dokumen	7,315,000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	1,925,000	10 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	1,925,000	*30 Eksemplar Dokum*	*3,850,000*	*120 Eksemplar Dokum*	*34,999,000*	*80.00%*	*67.42%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	375 Eksemplar Dokumen	213,982,500	225 Eksemplar Dokumen	128,389,500	75 Eksemplar Dokumen	52,568,500	0 Eksemplar Dokumen	-	35 Eksemplar Dokumen	29,218,500	15 Eksemplar Dokumen	3,450,000	25 Eksemplar Dokumen	19,200,000	*75 Eksemplar Dokum*	*51,868,500*	*300 Eksemplar Dokum*	*180,258,000*	*80.00%*	*84.24%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	38,640,000	150 Eksemplar Dokumen	23,184,000	50 Eksemplar Dokumen	6,700,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	6,000,000	*50 Eksemplar Dokum*	*6,000,000*	*200 Eksemplar Dokum*	*29,184,000*	*80.00%*	*75.53%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	105 Eksemplar Dokumen	15,600,000	63 Eksemplar Dokumen	9,360,000	25 Eksemplar Dokumen	3,120,000	0 Eksemplar Dokumen	-	25 Eksemplar Dokumen	3,120,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*25 Eksemplar Dokum*	*3,120,000*	*88 Eksemplar Dokum*	*12,480,000*	*83.81%*	*80.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,600,000	30 Eksemplar Dokumen	9,360,000	10 Eksemplar Dokumen	3,120,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*30 Eksemplar Dokum*	*9,360,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	150 Eksemplar Dokumen	8,250,000	90 Eksemplar Dokumen	4,950,000	30 Eksemplar Dokumen	1,650,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokumen*	-	*90 Eksemplar Dokumen*	*4,950,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahanya	50 Eksemplar Dokumen	18,240,000	30 Eksemplar Dokumen	10,944,000	10 Eksemplar Dokumen	2,620,000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	1,920,000	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokum*	*1,920,000*	*40 Eksemplar Dokum*	*12,864,000*	*80.00%*	*70.53%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu**	**500**	**96,564,037,565**	**300**	**57,938,422,539**		**17,641,078,040**		**2,470,322,194**		**6,324,494,686**		**2,567,468,416**		**3,400,054,128**	-	*14,762,339,424*	*300*	*72,700,761,963*	*60.00%*	*75.29%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	665 Orang	85,615,537,565	399 Orang	51,369,322,539	133 Orang	15,563,338,040	33 Orang	1,990,847,194	33 Orang	5,763,919,686	34 Orang	2,067,618,416	33 Orang	2,870,114,128	*133 Orang*	*12,692,499,424*	*532 Orang*	*64,061,821,963*	*80.00%*	*74.82%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	725 Orang	10,126,500,000	435 Orang	6,075,900,000	145 Orang	1,899,100,000	36 Orang	479,475,000	36 Orang	474,775,000	37 Orang	471,250,000	36 Orang	468,900,000	*145 Orang*	*1,894,400,000*	*580 Orang*	*7,970,300,000*	*80.00%*	*78.71%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	350 Orang	822,000,000	210 Orang	493,200,000	70 Orang	178,640,000	17 Orang	-	17 Orang	85,800,000	18 Orang	28,600,000	18 Orang	61,040,000	*70 Orang*	*175,440,000*	*280 Orang*	*668,640,000*	*80.00%*	*81.34%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik**	**500**	-	**300**	-		**75,000,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	-	***60.00%***		DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	605 Stel	144,400,000	121 Stel	41,382,000	Stel 121	75,000,000	Stel 0	-	Stel -	-	0 Stel	-	- Stel	-	***- Stel***	-	***121 Stel***	***41,382,000***	***20.00%***		DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**2,098,669,250**	**300**	**1,259,201,550**		**469,864,850**		-		**68,472,320**		**169,530,900**		**23,508,900**	-	***261,512,120***	***300***	***1,520,713,670***	***60.00%***	***72.46%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	457,988,000	30 Unit	274,792,800	Unit 10	274,227,600	Unit 0	-	Unit 2	11,948,520	5 Unit	149,800,000	- Unit	1,812,000	***7 Unit***	***163,560,520***	***37 Unit***	***438,353,320***	***74.00%***	***95.71%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	16750 Kotak	361,250,000	10050 Kotak	216,750,000	Kotak 3354	72,250,000	Kotak 0	0	Kotak 1,650	27,398,250	866 Kotak	10,023,750	838 Kotak	14,701,500	***3,354 Kotak***	***52,123,500***	***13,404 Kotak***	***268,873,500***	***80.02%***	***74.43%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6000 Buah	77,919,500	3600 Buah	46,751,700	Buah 1200	18,583,900	Buah 0	0	Buah 580	8,936,600	320 Buah	771,150	300 Buah	3,030,300	***1,200 Buah***	***12,738,050***	***4,800 Buah***	***59,489,750***	***80.00%***	***76.35%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	10355 Buah	322,281,750	6213 Buah	193,369,050	Buah 2071	28,295,350	Buah 0	0	Buah 800	20,188,950	753 Buah	2,623,200	518 Buah	3,965,100	***2,071 Buah***	***26,777,250***	***8,284 Buah***	***220,146,300***	***80.00%***	***68.31%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	960 Kali	879,230,000	576 Kali	527,538,000	Kali 192	76,508,000	Kali 0	0	Kali -	-	2 Kali	6,312,800	190 Kali	-	***192 Kali***	***6,312,800***	***768 Kali***	***533,850,800***	***80.00%***	***60.72%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**936,375,000**	**300**	**561,825,000**		**234,445,000**		-		**79,053,917**		**29,254,728**		**46,986,630**	-	***155,295,275***	***300***	***717,120,275***	***60.00%***	***76.58%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	389,250,000	36 Bulan	233,550,000	Bulan 12	79,050,000	Bulan 0	0	Bulan 6	21,728,917	3 Bulan	14,259,728	3 Bulan	34,511,630	***12 Bulan***	***70,500,275***	***48 Bulan***	***304,050,275***	***80.00%***	***78.11%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	40 Kali	547,125,000	24 Kali	328,275,000	Kali 8	155,395,000	Kali 0	0	Kali 4	57,325,000	2 Kali	14,995,000	2 Kali	12,475,000	***8 Kali***	***84,795,000***	***32 Kali***	***413,070,000***	***80.00%***	***75.50%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**1,662,455,000**	**300**	**997,473,000**		**348,846,000**		-		**68,729,400**		**11,872,800**		**123,232,410**	-	***203,834,610***	***300***	***1,201,307,610***	***60.00%***	***72.26%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	10 Unit	376,700,000	6 Unit	226,020,000	Unit 2	83,340,000	Unit 0	0	Unit 1	35,356,200	Unit 1	6,245,400	Unit 0	39,170,150	***2 Unit***	***80,771,750***	***8 Unit***	***306,791,750***	***80.00%***	***81.44%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	65 Unit	1,009,900,000	39 Unit	605,940,000	Unit 13	141,890,000	Unit 0	0	Unit 7	33,373,200	Unit 6	5,627,400	Unit 0	55,891,260	***13 Unit***	***94,891,860***	***52 Unit***	***700,831,860***	***80.00%***	***69.40%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	600 M2	275,855,000	200 M2	165,513,000	M2 200	123,616,000	M2 0	0	M2 -	-	M2 200	-	M2 0	28,171,000	***200 M2***	***28,171,000***	***400 M2***	***193,684,000***	***66.67%***	***70.21%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.11**	**13.11**	**41.31**	**34.90**	**29.27**	**14.76**	**26.20**	**19.21**	**97.89**	**81.98**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**	**80**	**3,013,230,500**	**48**	**1,807,938,300**		**602,646,100**		-		**148,603,300**		**38,899,550**		**256,615,600**	-	***444,118,450***	***48***	***2,252,056,750***	***60.00%***	***74.74%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok**	**5**	**1,725,000,000**	**3**	**1,035,000,000**		**345,000,000**		-		**125,000,000**		-		**197,000,000**	-	***322,000,000***	***3***	***1,357,000,000***	***60.00%***	***78.67%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pangan Pokok Lokal	10 Kelompok	1,725,000,000	6 Kelompok	1,035,000,000	2 Kelompok	345,000,000	0 Kelompok	-	2 Kelompok	125,000,000	0 Kelompok	-	- Kelompok	197,000,000	*2 Kelompok*	*322,000,000*	*8 Kelompok*	*1,357,000,000*	*80.00%*	*78.67%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sudah Terpenuhi**	**5**	**317,912,500**	**3**	**190,747,500**		**63,582,500**		**-**		**5,654,400**		**-**		**-**	-	*5,654,400*	*3*	*196,401,900*	*60.00%*	*61.78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten / kota	25000 Kg	317,912,500	15000 Kg	190,747,500	5000 Kg	63,582,500	0 Kg	-	2,500 Kg	5,654,400	0 Kg	-	2,500 Kg	-	*5,000 Kg*	*5,654,400*	*20,000 Kg*	*196,401,900*	*80.00%*	*61.78%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Tencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**5**	**970,318,000**	**3**	**582,190,800**	**1**	**194,063,600**		**-**		**17,948,900**		**38,899,550**		**59,615,600**	-	*116,464,050*	*3*	*698,654,850*	*60.00%*	*72.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi dan Pemanfaatan Pekarangan Masyarakat	10 Kali	970,318,000	6 Kali	582,190,800	2 Kali	194,063,600	0 Kali	-	- Kali	17,948,900	1 Kali	38,899,550	- Kali	59,615,600	*1 Kali*	*116,464,050*	*7 Kali*	*698,654,850*	*70.00%*	*72.00%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**49.99**	**24.66**	**0.02**	**6.45**	**49.95**	**42.58**	99.96	73.69					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	ST*	SD					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**345**	**862,806,500**	**207**	**517,683,900**	**%**	**403,250,442**	**%**	**-**	**%**	**26,191,400**		**-**		**181,252,600**	- %	*207,444,000*	*207 %*	*725,127,900*	*60.00%*	*84.04%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**5**	**862,806,500**	**3**	**517,683,900**		**403,250,442**		**-**		**26,191,400**		**-**		**181,252,600**	-	*207,444,000*	*3*	*725,127,900*	*60.00%*	*84.04%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bimtek dan pemberian bantuan bibit komoditas hortikultura kepada petani	18800 Batang	862,806,500	11280 Batang	517,683,900	5,010 Batang	403,250,442	0 Batang	-	- Batang	26,191,400	0 Batang	-	5,010 Batang	181,252,600	*5,010 Batang*	*207,444,000*	*16,290 Batang*	*725,127,900*	*86.65%*	*84.04%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**0**	**6.50**	**-**	**-**	**100.00**	**44.95**	100.00	51.44					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	ST*	R					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**	**120**	**18,342,518,230**	**72**	**11,005,510,938**		**3,313,268,546**		**-**		**21,250,400**		**576,213,000**		**1,647,627,000**	-	*2,245,090,400*	*72*	*13,250,601,338*	*60.00%*	*72.24%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengembangan Prasarana Pertanian	**Terlaksnanya Pengembangan Prasarana Pertanian secara maksimal**	**5**	**7,247,213,730**	**3**	**4,348,328,238**		**1,099,157,646**		**-**		**6,839,000**		**36,064,000**		**-**	-	*42,903,000*	*3*	*4,391,231,238*	*60.00%*	*60.59%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5 Peta	7,247,213,730	3 Peta	4,348,328,238	1 Peta	1,099,157,646	0 Peta	-	- Peta	6,839,000	0 Peta	36,064,000	- Peta	-	- *Peta*	*42,903,000*	*3 Peta*	*4,391,231,238*	*60.00%*	*60.59%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan Prasarana Pertanian	**Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian**	**5**	**11,095,304,500**	**3**	**6,657,182,700**	**1**	**2,214,110,900**		**-**		**14,411,400**		**540,149,000**		**1,647,627,000**	-	*2,202,187,400*	*3*	*8,859,370,100*	*60.00%*	*79.85%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	15 Unit	1,829,622,500	9 Unit	1,097,773,500	3 Unit	348,924,500	0 Unit	-	- Unit	2,868,500	3 Unit	88,269,000	- Unit	257,787,000	*3 Unit*	*348,924,500*	*12 Unit*	*1,446,698,000*	*80.00%*	*79.07%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dana, jumlah pembangunan dan perbaikan DAM Parit	10 Unit	1,222,000,000	6 Unit	733,200,000	2 Unit	244,400,000	0 Unit	-	- Unit	966,500	2 Unit	60,260,000	- Unit	180,130,000	*2 Unit*	*241,356,500*	*8 Unit*	*974,556,500*	*80.00%*	*79.75%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah dana dan pembangunan Sumur dalam	65 Unit	8,043,682,000	39 Unit	4,826,209,200	13 Unit	1,620,786,400	0 Unit	-	- Unit	10,576,400	13 Unit	391,620,000	- Unit	1,209,710,000	*13 Unit*	*1,611,906,400*	*52 Unit*	*6,438,115,600*	*80.00%*	*80.04%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**0.64**	**90.00**	**17.39**	**-**	**49.73**	90.00	67.76					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**SR**	**SR**	T	SD					
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian**	**40**	**2,844,146,500**	**24**	**1,706,487,900**		**704,328,300**		**-**		**65,983,900**		**55,215,250**		**3,320,000**	-	*124,519,150*	*24*	*1,831,007,050*	*60.00%*	*64.38%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dapat dilaksnakan dengan baik**	**5**	**2,844,146,500**	**3**	**1,706,487,900**		**704,328,300**		**-**		**65,983,900**		**55,215,250**		**3,320,000**	-	*124,519,150*	*3*	*1,831,007,050*	*60.00%*	*64.38%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3825 Orang	2,696,319,500	2295 Orang	1,617,791,700	765 Orang	674,762,900	Orang 0	-	Orang -	47,964,650	150 Orang	53,555,250	615 Orang	-	*765 Orang*	*101,519,900*	*3,060 Orang*	*1,719,311,600*	*80.00%*	*63.77%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah petani yang mengikuti program AUTP dan asuransi ternak	250 Orang	147,827,000	150 Orang	88,696,200	Orang 50	29,565,400	Orang 0	-	Orang 50	18,019,250	0 Orang	1,660,000	- Orang	3,320,000	*50 Orang*	*22,999,250*	*200 Orang*	*111,695,450*	*80.00%*	*75.56%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**6.13**	**9.37**	**18.40**	**7.84**	**75.46**	**0.47**	**100.00**	**17.68**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang dibina**	**5**	**31,085,250,000**	**3**	**18,651,150,000**		**5,152,199,374**		**-**		**725,866,500**		**313,436,274**		**709,850,000**	**-**	***1,749,152,774***	***3***	***20,400,302,774***	***60.00%***	***65.63%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Terwujudnya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**5**	**31,085,250,000**	**3**	**18,651,150,000**		**5,152,199,374**		**-**		**725,866,500**		**313,436,274**		**709,850,000**	**-**	***1,749,152,774***	***3***	***20,400,302,774***	***60.00%***	***65.63%***	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang mendapatkan Biaya Operasional	645 Orang	2,185,250,000	387 Orang	1,311,150,000	12 Bulan	1,598,343,774	Bulan 0	-	Bulan 6	267,880,000	3 Bulan	141,309,274	Bulan 3	51,300,000	*12 Bulan*	*460,489,274*	*399 Bulan*	*1,771,639,274*	*61.86%*	*81.07%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Hibah	5	2,400,000,000	3	1,440,000,000	% 100	465,000,000	% 0	-	% -	-	5 %	20,000,000	% 20	75,000,000	*25 %*	*95,000,000*	*28 %*	*1,535,000,000*	*560.00%*	*63.96%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan sekolah lapang peningkatan di 13 DI daerah irigasi pertanian IPDMIP	160 DI	26,500,000,000	96 DI	15,900,000,000	DI 31	3,088,855,600	DI 0	-	DI 5	457,986,500	0 DI	152,127,000	DI 8	583,550,000	*13 DI*	*1,193,663,500*	*109 DI*	*17,093,663,500*	*68.13%*	*64.50%*	DINAS KETAHANAN PANGAN TPH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**7.69**	**14.09**	**5.59**	**6.08**	**21.68**	**13.78**	**34.97**	**33.95**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP																- -	-	- -	-			
			LINGKUNGAN HIDUP																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**47,453,782,600**	**3 WTP**	**28,472,269,560**	**WTP**	**8,521,510,644**	**WTP**	**1,061,707,440**	**WTP**	**1,703,504,979**	**WTP**	**4,521,264,354**	**WTP**	**636,495,186**	**- *WTP***	***7,922,971,959***	***3 WTP***	***36,395,241,519***	***60.00%***	***76.70%***	DINAS LH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**500**	**178,900,000**	**300**	**107,340,000**		**35,780,000**		**-**		**3,030,000**		**2,020,000**		**1,000,000**	**-**	***6,050,000***	***300***	***113,390,000***	***60.00%***	***63.38%***	DINAS LH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Dokumen	53,100,000	9 Dokumen	31,860,000	3 Dokumen	10,620,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,030,000	0 Dokumen	2,020,000	0 Dokumen	1,000,000	*- Dokumen*	*6,050,000*	*9 Dokumen*	*37,910,000*	*60.00%*	*71.39%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	20 Eksemplar Dokumen	60,600,000	12 Eksemplar Dokumen	36,360,000	4 Eksemplar Dokumen	12,120,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		0 Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokum*	-	*12 Eksemplar Dokum*	*36,360,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		0 Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokum*	-	*3 Eksemplar Dokum*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		0 Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokum*	-	*3 Eksemplar Dokum*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	5 Eksemplar Dokumen	15,000,000	3 Eksemplar Dokumen	9,000,000	1 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		0 Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokum*	-	*3 Eksemplar Dokum*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	10,100,000	6 Eksemplar Dokumen	6,060,000	2 Eksemplar Dokumen	2,020,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen		0 Eksemplar Dokumen		*- Eksemplar Dokumen*	-	*6 Eksemplar Dokumen*	*6,060,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	15 Dokumen	10,100,000	9 Dokumen	6,060,000	3 Dokumen	2,020,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen		0 Dokumen		*- Dokumen*	-	*9 Dokumen*	*6,060,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**22,400,223,350**	**300**	**13,440,134,010**		**3,830,841,503**		**778,068,834**		**1,383,757,250**		**777,964,038**		**608,620,372**	**-**	***3,548,410,494***	***300***	***16,988,544,504***	***60.00%***	***75.84%***	DINAS LH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	150 ASN	17,916,923,350	90 ASN	10,750,154,010	30 ASN	2,941,161,503	7 ASN	573,263,834	7 ASN	1,086,917,250	8 ASN	563,389,038	8 ASN	463,750,372	***30 ASN***	***2,687,320,494***	***120 ASN***	***13,437,474,504***	***80.00%***	***75.00%***	DINAS LH
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan Tugas ASN	230 Orang	3,942,300,000	138 Orang	2,365,380,000	46 Orang	781,480,000	11 Orang	192,525,000	11 Orang	259,920,000	12 Orang	192,525,000	12 Orang	129,220,000	***46 Orang***	***774,190,000***	***184 Orang***	***3,139,570,000***	***80.00%***	***79.64%***	DINAS LH
			Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah pentausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	60 Bulan	541,000,000	36 Bulan	324,600,000	12 Bulan	108,200,000	3 Bulan	12,280,000	3 Bulan	36,920,000	2 Bulan	22,050,000	4 Bulan	15,650,000	***12 Bulan***	***86,900,000***	***48 Bulan***	***411,500,000***	***80.00%***	***76.06%***	DINAS LH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase dokumen laporan administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik**	**500**	**347,875,000**	**300**	**208,725,000**		**29,625,000**		**-**		**22,125,000**		**-**		**-**	**-**	***22,125,000***	***300***	***230,850,000***	***60.00%***	***66.36%***	DINAS LH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	380 Stell	199,750,000	228 Stell	119,850,000	Stell		Stell		Stell		Stell		Stell		***- Stell***	***-***	***228 Stell***	***119,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang	148,125,000	3 Orang	88,875,000	1 Orang	29,625,000	0 Orang	-	- Orang	22,125,000	1 Orang	-	- Orang	-	***1 Orang***	***22,125,000***	***4 Orang***	***111,000,000***	***80.00%***	***74.94%***	DINAS LH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**2,932,779,250**	**300**	**1,759,667,550**		**340,464,641**		**26,124,000**		**59,518,800**		**82,689,745**		**10,719,600**	**-**	***179,052,145***	***300***	***1,938,719,695***	***60.00%***	***66.11%***	DINAS LH
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	625 Buah	35,300,000	375 Buah	21,180,000	125 Buah	7,060,000	0 Buah	-	- Buah	3,914,000	0 Buah	-	60 Buah	-	***60 Buah***	***3,914,000***	***435 Buah***	***25,094,000***	***69.60%***	***71.09%***	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	205 Buah	684,366,250	123 Buah	410,619,750	41 Buah	106,535,041	2 Buah	18,000,000	- Buah	29,500,000	3 Buah	47,895,000	1 Buah	-	***6 Buah***	***95,395,000***	***129 Buah***	***506,014,750***	***62.93%***	***73.94%***	DINAS LH
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1010 buah	45,350,000	606 buah	27,210,000	202 buah	9,070,000	0 buah	-	- buah	1,500,000	0 buah	-	50 buah	1,988,000	***50 buah***	***3,488,000***	***656 buah***	***30,698,000***	***64.95%***	***67.69%***	DINAS LH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman untuk keperluan rutin kantor	8900 porsi	154,000,000	5340 porsi	92,400,000	1780 porsi	26,300,000	0 porsi	-	- porsi	-	0 porsi	-	- porsi	-	***- porsi***	***-***	***5,340 porsi***	***92,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	625 eksemplar	109,555,500	375 eksemplar	65,733,300	125 eksemplar	21,911,100	0 eksemplar	-	- eksemplar	1,999,800	0 eksemplar	1,750,000	34 eksemplar	2,331,600	***34 eksemplar***	***6,081,400***	***409 eksemplar***	***71,814,700***	***65.44%***	***65.55%***	DINAS LH
			Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor yang disediakan	750 eksemplar	214,492,500	450 eksemplar	128,695,500	2,036 eksemplar	42,918,500	0 eksemplar	8,124,000	546 eksemplar	8,365,000	0 eksemplar	6,920,500	14 eksemplar	500,000	***560 eksemplar***	***23,909,500***	***1,010 eksemplar***	***152,605,000***	***134.67%***	***71.15%***	DINAS LH
			Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	8265 orang/kali/hari	1,689,715,000	4959 orang/kali/hari	1,013,829,000	1,653 orang/kali/hari	126,670,000	0 orang/kali/hari	-	20 orang/kali/hari	14,240,000	70 orang/kali/hari	26,124,245	15 orang/kali/hari	5,900,000	***105 orang/kali***	***46,264,245***	***5,064 orang/kali***	***1,060,093,245***	***61.27%***	***62.74%***	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**853,280,000**	**300**	**511,968,000**		**151,056,000**		**6,914,606**		**51,157,551**		**11,942,692**		**-**	**-**	***70,014,849***	***300***	***581,982,849***	***60.00%***	***68.21%***	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	678,280,000	36 Bulan	406,968,000	12 Bulan	141,056,000	3 Bulan	6,914,606	- Bulan	41,157,551	2 Bulan	11,942,692	7 Bulan	-	***12 Bulan***	***60,014,849***	***48 Bulan***	***466,982,849***	***80.00%***	***68.85%***	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor yang disediakan	5 Kali	175,000,000	3 Kali	105,000,000	1 Kali	10,000,000	0 Kali	-	- Kali	10,000,000	1 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***10,000,000***	***4 Kali***	***115,000,000***	***80.00%***	***65.71%***	DINAS LH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah yang disusun dengan baik**	**500**	**21,088,600,000**	**300**	**12,653,160,000**		**4,163,368,500**		**250,600,000**		**206,041,378**		**3,646,647,879**		**16,155,214**	**-**	***4,119,444,471***	***300***	***16,772,604,471***	***60.00%***	***79.53%***	DINAS LH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang diaadakan	35 unit	1,330,000,000	21 unit	798,000,000	7 unit	250,600,000	7 unit	250,600,000	- unit	-	0 unit	-	- unit	-	***7 unit***	***250,600,000***	***28 unit***	***1,048,600,000***	***80.00%***	***78.84%***	DINAS LH
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	5 unit	17,750,000,000	3 unit	10,650,000,000	1 unit	3,550,000,000	0 unit	-	- unit	-	1 unit	3,540,900,000	- unit	-	***1 unit***	***3,540,900,000***	***4 unit***	***14,190,900,000***	***80.00%***	***79.95%***	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	2,008,600,000	12 unit	1,205,160,000	unit 4	362,768,500	unit 0	-	unit 3	206,041,378	0 unit	105,747,879	1 unit	16,155,214	*4 unit*	*327,944,471*	*16 unit*	*1,533,104,471*	*80.00%*	*76.33%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**3,089,265,000**	**300**	**1,853,559,000**		**584,413,000**		**26,001,400**		**173,013,150**		**85,154,600**		**65,988,400**	**-**	*350,157,550*	*300*	*2,203,716,550*	*60.00%*	*71.33%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dengan baik	5 Unit	220,850,000	3 Unit	132,510,000	Unit 1	44,170,000	Unit 1	2,816,000	Unit -	20,080,000	0 Unit	8,448,000	- Unit	2,416,000	*1 Unit*	*33,760,000*	*4 Unit*	*166,270,000*	*80.00%*	*75.29%*	DINAS LH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan oprasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	70 Unit	2,544,940,000	42 Unit	1,526,964,000	Unit 14	489,838,000	Unit 14	23,185,400	Unit -	127,293,150	0 Unit	65,346,600	- Unit	33,072,400	*14 Unit*	*248,897,550*	*56 Unit*	*1,775,861,550*	*80.00%*	*69.78%*	DINAS LH
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	205 Unit	172,950,000	123 Unit	103,770,000	Unit 41	20,300,000	Unit 0	-	Unit 8	5,640,000	0 Unit	1,460,000	2 Unit	600,000	*10 Unit*	*7,700,000*	*133 Unit*	*111,470,000*	*64.88%*	*64.45%*	DINAS LH
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	150,525,000	3 Unit	90,315,000	Unit 1	30,105,000	Unit 0	-	Unit 1	20,000,000	0 Unit	9,900,000	- Unit	29,900,000	*1 Unit*	*59,800,000*	*4 Unit*	*150,115,000*	*80.00%*	*99.73%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.78**	**12.46**	**9.74**	**19.99**	**1.63**	**53.06**	**3.38**	**7.47**	**15.53**	**92.98**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase Dokumen RPPLH dan KLHS yang Telah ditetapkan dan sesuai dengan Rencana Tataruang**	**15**	**3,761,700,000**	**9**	**2,257,020,000**		**726,840,000**		**-**		**750,000**		**703,615,000**		**1,410,000**	**-**	*705,775,000*	*9*	*2,962,795,000*	*60.00%*	*78.76%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persetase KLHS kabupaten yang terlaksana**	**45**	**3,761,700,000**	**27**	**2,257,020,000**		**726,840,000**		**-**		**750,000**		**703,615,000**		**1,410,000**	**-**	*705,775,000*	*27*	*2,962,795,000*	*60.00%*	*78.76%*	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHs Tata Ruang yang tersusun	5 Dokumen	1,906,250,000	3 Dokumen	1,143,750,000	Dokumen 1	370,750,000	Dokumen 0	-	Dokumen 1	750,000	0 Dokumen	360,552,500	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*361,302,500*	*4 Dokumen*	*1,505,052,500*	*80.00%*	*78.95%*	DINAS LH
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun	5 Dokumen	1,855,450,000	3 Dokumen	1,113,270,000	Dokumen 1	356,090,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	1 Dokumen	343,062,500	- Dokumen	1,410,000	*1 Dokumen*	*344,472,500*	*4 Dokumen*	*1,457,742,500*	*80.00%*	*78.57%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**50.00**	**0.10**	**50.00**	**96.80**	**-**	**0.19**	**100.00**	**97.10**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			**1,118,745,500**		**671,247,300**		**208,029,100**		**-**		**35,110,000**		**73,490,700**		**18,390,000**	**-**	*126,990,700*	**-**	*798,238,000*		*71.35%*	DINAS LH
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediaan informasi pencegahan pencemaran dan atau/ kerusakan lingkungan hidup kabupaten/Kota**	**40**	**571,300,500**	**24**	**342,780,300**		**114,260,100**		**-**		**24,300,000**		**21,595,700**		**18,390,000**	**-**	*64,285,700*	*24*	*407,066,000*	*60.00%*	*71.25%*	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air	385 sample	422,933,500	231 sample	253,760,100	sample 77	84,586,700	sample 0	-	sample 18	20,190,000	0 sample	2,470,000	59 sample	18,390,000	*77 sample*	*41,050,000*	*308 sample*	*294,810,100*	*80.00%*	*69.71%*	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	10 pekon	148,367,000	6 pekon	89,020,200	pekon 2	29,673,400	pekon 0	-	pekon 2	4,110,000	0 pekon	19,125,700	- pekon	-	*2 pekon*	*23,235,700*	*8 pekon*	*112,255,900*	*80.00%*	*75.66%*	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilaksanakan**	**40**	**242,422,500**	**24**	**145,453,500**		**32,764,500**		**-**		**10,810,000**		**3,440,000**		**-**	**-**	***14,250,000***	**24**	***159,703,500***	***60.00%***	***65.88%***	DINAS LH
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi peringatan pencemaran / atau kerusakan lingkungan hidup	75 Dokumen Analisa	242,422,500	45 Dokumen Analisa	145,453,500	15 Dokumen Analisa	32,764,500	0 Dokumen Analisa	-	14 Dokumen Analisa	10,810,000	0 Dokumen Analisa	3,440,000	- Dokumen Analisa	-	***14 Dokumen Analisa***	***14,250,000***	***59 Dokumen Analisa***	***159,703,500***	***78.67%***	***65.88%***	DINAS LH
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase Luasan lahan yang dilakukan pemulihan**	**15**	**305,022,500**	**9**	**183,013,500**		**61,004,500**		**-**		**-**		**48,455,000**		**-**	**-**	***48,455,000***	***9***	***231,468,500***	***60.00%***	***75.89%***	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Luas Lahan Pemulihan	5 ha	305,022,500	3 ha	183,013,500	1 ha	61,004,500	0 ha	-	- ha	-	1 ha	48,455,000	- ha	-	***1 ha***	***48,455,000***	***4 ha***	***231,468,500***	***80.00%***	***75.89%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**35.79**	**-**	**1.05**	**35.33**	**62.11**	**8.84**	**98.95**	**44.17**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase luasan lahan konservasi sumberdaya alam**	**10**	**1,395,271,500**	**6**	**837,162,900**	**%**	**209,054,300**	**%**		**%**	**-**		**94,089,600**		**100,326,136**	**- %**	***194,415,736***	***6.00 %***	***1,031,578,636***	***60.00%***	***73.93%***	DINAS LH
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi**	**30**	**1,395,271,500**	**18**	**837,162,900**		**209,054,300**				**-**		**94,089,600**		**100,326,136**	**-**	***194,415,736***	***18***	***1,031,578,636***	***60.00%***	***73.93%***	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaraga man Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah luasan keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikonservasi	5 Ha	497,421,500	3 Ha	298,452,900	Ha 1	99,484,300	Ha 0	-	Ha -	-	1 Ha	94,089,600	- Ha	1,010,000	***1 Ha***	***95,099,600***	***4 Ha***	***393,552,500***	***80.00%***	***79.12%***	DINAS LH
			Pengelolaan Taman Keanekaraga man Hayati Lainnya	Jumlah taman keanekaragaman hayati lainnya yang dipelihara	10 lokasi pengelolaan	897,850,000	6 lokasi pengelolaan	538,710,000	2 lokasi pengelolaan	109,570,000	0 lokasi pengelolaan	-	lokasi - pengelolaan	-	2 lokasi pengelolaan	-	- lokasi pengelolaan	99,316,136	***2 lokasi pengelolaan***	***99,316,136***	***8 lokasi pengelolaan***	***638,026,136***	***80.00%***	***71.06%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**0**	**-**	**100.00**	**45.01**	**-**	**47.99**	**100.00**	**93.00**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase jumlah TPS limbah B3 di Kabupaten Tanggamus**	**60**	**45,664,500**	**36**	**27,398,700**		**1,468,132,900**		**-**		**-**		**4,040,000**		**-**	**-**	***4,040,000***	***36***	***31,438,700***	***60.00%***	***68.85%***	DINAS LH
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	**Persentase kegiatan usaha yang memiliki TPS Limbah B3**	30	91,329,000	18	54,797,400		1,468,132,900		-		-		4,040,000		-	-	***4,040,000***	***18***	***58,837,400***	***60.00%***	***64.42%***	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah sarana dan prasarana limbah B3	150 usaha	45,664,500	90 usaha	27,398,700	usaha 7	1,459,000,000	usaha 0	-	usaha -	-	0 usaha	-	- usaha	-	***- usaha***	***-***	***90 usaha***	***27,398,700***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS LH
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang terverifikasi memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	150 usaha	45,664,500	90 usaha	27,398,700	usaha 30	9,132,900	usaha 0	-	usaha -	-	5 usaha	4,040,000	- usaha	-	***5 usaha***	***4,040,000***	***95 usaha***	***31,438,700***	***63.33%***	***68.85%***	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.51**	**0.28**	**-**	**-**	**13.51**	**0.28**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			**914,150,000**		**548,490,000**		**182,830,000**		**-**		**5,080,000**		**2,020,000**		**161,225,000**	**-**	***168,325,000***	**-**	***716,815,000***		***78.41%***	DINAS LH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp															16
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan usaha yang patuh terhadap undang undang lingkungan hidup dan peraturan peraturan lingkungan hidup**	**40**	**914,150,000**	**24**	**548,490,000**		**182,830,000**		-		**5,080,000**		**2,020,000**		**161,225,000**	-	*168,325,000*	*24*	*716,815,000*	*60.00%*	*78.41%*	DINAS LH
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Kegiatan Usaha Yang difasilitasi terkait pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan / izin PPLH	55 Usaha Kegiatan	863,700,000	33 Usaha Kegiatan	518,220,000	11 Usaha Kegiatan	172,740,000	0 Usaha Kegiatan	-	6 Usaha Kegiatan	2,540,000	0 Usaha Kegiatan	-	1 Usaha Kegiatan	161,225,000	*7 Usaha Kegiatan*	*163,765,000*	*40 Usaha Kegiatan*	*681,985,000*	*72.73%*	*78.96%*	DINAS LH
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Yang Mempunyai Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH	175 Usaha Kegiatan	50,450,000	105 Usaha Kegiatan	30,270,000	35 Usaha Kegiatan	10,090,000	0 Usaha Kegiatan	-	- Usaha Kegiatan	2,540,000	0 Usaha Kegiatan	2,020,000	6 Usaha Kegiatan	-	*6 Usaha Kegiatan*	*4,560,000*	*111 Usaha Kegiatan*	*34,830,000*	*63.43%*	*69.04%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**13.04**	**2.78**	-	**1.10**	**15.22**	**88.18**	**28.26**	**92.07**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST**					
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			**197,264,500**		**118,358,700**		**39,452,900**		**36,038,200**		**2,540,000**		**-**		**-**	-	*38,578,200*	-	*156,936,900*		*79.56%*	DINAS LH
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	**Persentase tersedianya informasi kearifan lokal terkait dengan PPLH**	**25**	**197,264,500**	**15**	**118,358,700**		**39,452,900**		**36,038,200**		**2,540,000**		**-**		**-**	-	*38,578,200*	*15*	*156,936,900*	*60.00%*	*79.56%*	DINAS LH
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	197,264,500	3 Dokumen	118,358,700	1 Dokumen	39,452,900	1 Dokumen	36,038,200	- Dokumen	2,540,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*38,578,200*	*4 Dokumen*	*156,936,900*	*80.00%*	*79.56%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**100.00**	**91.34**	-	**6.44**	-	-	-	-	**100.00**	**97.78**					
										Predikat kinerja	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase lembaga / kelompok masyarakat akan dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**5**	**637,350,000**		**382,410,000**		**76,470,000**		-		**3,040,000**		**37,020,000**		-	-	*40,060,000*	-	*422,470,000*	*0.00%*	*66.29%*	DINAS LH
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten yang mendapatkan pendidikan,pelatiha dan penyuluhan lingkungan hidup**	**15**	**637,350,000**		**382,410,000**		**76,470,000**		-		**3,040,000**		**37,020,000**		-	-	*40,060,000*	-	*422,470,000*	*0.00%*	*66.29%*	DINAS LH
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dankompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	25 Lembaga	325,000,000	15 Lembaga	195,000,000	5 Lembaga	65,000,000	0 Lembaga	-	- Lembaga	-	3 Lembaga	35,000,000	- Lembaga	-	*3 Lembaga*	*35,000,000*	*18 Lembaga*	*230,000,000*	*72.00%*	*70.77%*	DINAS LH
			Pendampinga n Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Unit Barang Yang Akan Diserahkan Dalam Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan yang dilaksanakan	20 Lembaga	312,350,000	12 Lembaga	187,410,000	4 Lembaga	11,470,000	0 Lembaga	-	- Lembaga	3,040,000	0 Lembaga	2,020,000	2 Lembaga	-	*2 Lembaga*	*5,060,000*	*14 Lembaga*	*192,470,000*	*70.00%*	*61.62%*	DINAS LH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**3.98**	**33.33**	**48.41**	**22.22**	-	**55.56**	**52.39**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**R**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			**382,187,500**		**229,312,500**		**51,637,500**		-		**3,140,000**		**2,020,000**		-	-	*5,160,000*	-	*234,472,500*		*61.35%*	DINAS LH
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kemitraan lingkungan hidup yang mendapat pengahargaan**	**15**	**382,187,500**		**229,312,500**		**51,637,500**		-		**3,140,000**		**2,020,000**		-	-	*5,160,000*	-	*234,472,500*	*0.00%*	*61.35%*	DINAS LH
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Penilaian kinerja	382,187,500	6 Penilaian kinerja	229,312,500	Penilaian kinerja 2	51,637,500	Penilaian kinerja 0	-	Penilaian kinerja -	3,140,000	0 Penilaian kinerja	2,020,000	- Penilaian kinerja	-	- *Penilaian kinerja*	*5,160,000*	*6 Penilaian kinerja*	*234,472,500*	*60.00%*	*61.35%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**6.08**	-	**3.91**	-	-	-	9.99					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			**88,434,500**		**53,060,700**		**17,686,900**		-		**710,000**		**2,540,000**		-	-	*3,250,000*	-	*56,310,700*		*63.68%*	DINAS LH
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase penanganan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan**	**5**	**88,434,500**	**3**	**53,060,700**		**17,686,900**		-		**710,000**		**2,540,000**		-	-	*3,250,000*	*3*	*56,310,700*	*60.00%*	*63.68%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Di Tindaklanjuti	40 Pengaduan	88,434,500	24 Pengaduan	53,060,700	Pengaduan 8	17,686,900	Pengaduan 0	-	Pengaduan -	710,000	0 Pengaduan	2,540,000	- Pengaduan	-	- *Pengaduan*	*3,250,000*	*24 Pengaduan*	*56,310,700*	*60.00%*	*63.68%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-		-	**4.01**	-	**14.36**	-	-	-	18.38					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			**6,707,962,455**		**4,024,777,473**		**1,217,841,200**				**50,300,000**		**259,495,000**		**471,408,200**		**305,514,000**	-	*1,086,717,200*	-	*5,111,494,673*		*76.20%*	DINAS LH
			Pengelolaan Sampah	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan hidup yang sesuai SPM**	**15**	**6,707,962,455**	**9**	**4,024,777,473**		**1,217,841,200**				**50,300,000**		**259,495,000**		**471,408,200**		**305,514,000**	-	*1,086,717,200*	*9*	*5,111,494,673*	*60.00%*	*76.20%*	DINAS LH
			Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Yang Disusun	5 Dokumen	2,376,300,000	3 Dokumen	1,425,780,000	Dokumen 463,260,000		Dokumen 0	-	Dokumen -	35,970,000	1 Dokumen	348,326,200	- Dokumen	60,950,000	*1 Dokumen*	*445,246,200*	*4 Dokumen*	*1,871,026,200*	*80.00%*	*78.74%*	DINAS LH
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Pengadaan Sarana Untuk Pengurangan Samapah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	7500 buah	169,650,000	4500 buah	101,790,000	buah 33,930,000		buah 0	-	buah -	-	950 buah	29,370,000	50 buah	1,010,000	*1,000 buah*	*30,380,000*	*5,500 buah*	*132,170,000*	*73.33%*	*77.91%*	DINAS LH
			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah daya Tampung TPA	185420 Kurang Dari Pertahun	3,262,012,455	111252 Kurang Dari Pertahun	1,957,207,473	Kurang Dari Pertahun 37,084	630,651,200	Kurang Dari Pertahun 2551	50,300,000	Kurang Dari Pertahun -	223,525,000	1000 Kurang Dari Pertahun	93,712,000	1,164 Kurang Dari Pertahun	154,014,000	*4,715 Kurang Dari Pertahun*	*521,551,000*	*115,967 Kurang Dari Pertahun*	*2,478,758,473*	*62.54%*	*75.99%*	DINAS LH
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	25 Unit	900,000,000	15 Unit	540,000,000	Unit 2	90,000,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	2 Unit	89,540,000	*2 Unit*	*89,540,000*	*17 Unit*	*629,540,000*	*68.00%*	*69.95%*	DINAS LH
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.61**		**4.13**	-	**21.31**	**5.06**	**38.71**	**3.15**	**25.09**	**14.82**					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**				
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-		-				**1,287,017,062**		**1,926,857,143**					-	*3,213,874,205*	-	*3,213,874,205*			
			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			-		-				**1,287,017,062**		**1,926,857,143**					-	*3,213,874,205*	-	*3,213,874,205*			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**33,220,270,650**	**3 WTP**	**19,932,162,390**	**WTP**	**8,470,839,851**	**WTP**	**1,287,017,062**	**WTP**	**1,892,470,643**	**WTP**	**2,459,196,184**	**WTP**	**1,052,138,562**	***- WTP***	***6,690,822,451***	***3 WTP***	***26,622,984,841***	***60.00%***	***80.14%***	DISDUK CAPIL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**500**	**189,704,000**	**300**	**113,822,400**		**116,262,300**		**3,600,000**		**40,138,850**		**35,984,150**		**20,841,600**	**-**	***100,564,600***	***300***	***214,387,000***	***60.00%***	***113.01%***	DISDUK CAPIL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahannya	15 Buku	159,399,500	9 Buku	95,639,700	3 Buku	30,161,100	0 Buku	3,600,000	1 Buku	10,238,700	0 Buku	7,154,400	2 Buku	441,600	***3 Buku***	***21,434,700***	***12 Buku***	***117,074,400***	***80.00%***	***73.45%***	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,550,000	90 Eksemplar Dokumen	3,330,000	0 Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen	***- Eksemplar Dokumen***	*-*	***90 Eksemplar Dokumen***	***3,330,000***	***60.00%***	***60.00%***	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,550,000	90 Eksemplar Dokumen	3,330,000	30 Eksemplar Dokumen	1,110,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,104,750	30 Eksemplar Dokumen	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***1,104,750***	***120 Eksemplar Dokumen***	***4,434,750***	***80.00%***	***79.91%***	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2,250,000	90 Eksemplar Dokumen	1,350,000	Eksemplar Dokumen	-	Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen		Eksemplar Dokumen	***- Eksemplar Dokumen***	*-*	***90 Eksemplar Dokumen***	***1,350,000***	***60.00%***	***60.00%***	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	150 Eksemplar Dokumen	2,250,000	90 Eksemplar Dokumen	1,350,000	30 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	450,000	- Eksemplar Dokumen	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***450,000***	***120 Eksemplar Dokumen***	***1,800,000***	***80.00%***	***80.00%***	DISDUK CAPIL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan	30 Eksemplar Dokumen	1,725,000	18 Eksemplar Dokumen	1,035,000	6 Eksemplar Dokumen	345,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	120,000	4 Eksemplar Dokumen	75,000	2 Eksemplar Dokumen	-	***6 Eksemplar Dokumen***	***195,000***	***24 Eksemplar Dokumen***	***1,230,000***	***80.00%***	***71.30%***	DISDUK CAPIL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	30 Eksemplar Dokumen	12,979,500	18 Eksemplar Dokumen	7,787,700	6 Eksemplar Dokumen	84,195,900	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	29,780,150	3 Eksemplar Dokumen	27,200,000	2 Eksemplar Dokumen	20,400,000	***6 Eksemplar Dokumen***	***77,380,150***	***24 Eksemplar Dokumen***	***85,167,850***	***80.00%***	***656.17%***	DISDUK CAPIL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu** **Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu** **Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**29,049,546,450**	**300**	**17,429,727,870**		**6,151,156,911**		**1,244,716,431**		**1,588,372,749**		**1,521,428,316**		**257,212,780**	**-**	***4,611,730,276***	***300***	***22,041,458,146***	***60.00%***	***75.88%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan/Kali	20,864,195,450	36 Bulan/Kali	12,518,517,270	12 Bulan/Kali	4,533,175,811	3 Bulan/Kali	850,891,431	3 Bulan/Kali	1,179,547,749	3 Bulan/Kali	1,132,662,616	3 Bulan/Kali	917,358,080	***12 Bulan/Kali***	***4,080,459,876***	***48 Bulan/Kali***	***16,598,977,146***	***80.00%***	***79.56%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	460 Orang	7,666,832,500	276 Orang	4,600,099,500	86 Orang	1,525,993,400	21 Orang	372,165,000	21 Orang	383,843,000	21 Orang	372,300,000	23 Orang	376,175,000	***86 Orang***	***1,504,483,000***	***362 Orang***	***6,104,582,500***	***78.70%***	***79.62%***	DISDUK CAPIL
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	518,518,500	36 Kali	311,111,100	Kali	91,987,700	2 Kali	21,660,000	4 Kali	24,982,000	2 Kali	16,465,700	4 Kali	(1,036,320,300)	***12 Kali***	***(973,212,600)***	***48 Kali***	***(662,101,500)***	***80.00%***	***-127.69%***	DISDUK CAPIL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**1,097,240,700**	**300**	**658,344,420**		**1,682,678,740**		**1,630,000**		**123,360,934**		**831,608,700**		**659,217,000**	**-**	***1,615,816,634***	***300***	***2,274,161,054***	***60.00%***	***207.26%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit	6,657,810,080	6 Unit	4,076,868,000	2 Unit	1,358,895,600	0 Unit	-	*Unit* -	-	1.00 Unit	780,350,700	1 Unit	557,611,000	***2 Unit***	***1,337,961,700***	***8 Unit***	***5,414,829,700***	***80.00%***		DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minuman untuk keperluan Rutin kantor	3750 Porsi	135,875,000	2250 Porsi	81,525,000	898 Porsi	27,175,000	10 Porsi	1,630,000	30 Porsi	3,685,000	72 Porsi	7,428,000	335 Porsi	7,186,000	***447 Porsi***	***19,929,000***	***2,697 Porsi***	***101,454,000***	***71.92%***	***74.67%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	25 Eksemplar	233,023,000	15 Eksemplar	139,813,800	5 Eksemplar	41,582,600	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	12,361,400	1 Eksemplar	1,000,000	2 Eksemplar	-	***3 Eksemplar***	***13,361,400***	***18 Eksemplar***	***153,175,200***	***72.00%***	***65.73%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	4635 Buah	289,992,700	2781 Buah	173,995,620	1566 Buah	53,118,540	0 Buah	-	100 Buah	52,118,540	834 Buah	1,000,000	429 Buah	-	***1,363 Buah***	***53,118,540***	***4,144 Buah***	***227,114,160***	***89.41%***	***78.32%***	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	420 Kali	438,350,000	252 Kali	263,010,000	84 Kali	201,907,000	0 Kali	-	20 Kali	55,195,994	14 Kali	41,830,000	54 Kali	94,420,000	***88 Kali***	***191,445,994***	***340 Kali***	***454,455,994***	***80.95%***	***103.67%***	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,709,179,500**	**300**	**1,025,507,700**		**301,071,900**		**11,699,431**		**64,744,660**		**37,781,268**		**59,394,582**	**-**	***173,619,941***	***300***	***1,199,127,641***	***60.00%***	***70.16%***	DISDUK CAPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	597,055,000	36 Kali	358,233,000	12 Kali	111,116,500	3 Kali	11,549,431	17 Kali	31,536,660	-14 Kali	13,051,268	6 Kali	28,944,582	*12 Kali*	*85,081,941*	*48 Kali*	*443,314,941*	*80.00%*	*74.25%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130 Unit	837,139,500	78 Unit	502,283,700	50 Unit	121,794,000	0 Unit	-	20 Unit	2,905,000	0 Unit	23,450,000	14 Unit	-	*34 Unit*	*26,355,000*	*112 Unit*	*528,638,700*	*86.15%*	*63.15%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Kali	274,985,000	36 Kali	164,991,000	12 Kali	68,161,400	0 Kali	150,000	6 Kali	30,303,000	1 Kali	1,280,000	5 Kali	30,450,000	*12 Kali*	*62,183,000*	*48 Kali*	*227,174,000*	*80.00%*	*82.61%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**1,174,600,000**	**300**	**704,760,000**		**219,670,000**		**25,371,200**		**75,853,450**		**32,393,750**		**55,472,600**	*-*	*189,091,000*	*300*	*893,851,000*	*60.00%*	*76.10%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan Baik	5 Unit	200,850,000	3 Unit	120,510,000	1 Unit	40,170,000	0 Unit	5,632,000	1 Unit	14,692,250	0 Unit	5,632,000	- Unit	14,080,000	*1 Unit*	*40,036,250*	*4 Unit*	*160,546,250*	*80.00%*	*79.93%*	DISDUK CAPIL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	20 Unit	703,400,000	12 Unit	422,040,000	4 Unit	140,680,000	0 Unit	19,739,200	1 Unit	37,731,200	1 Unit	26,761,750	2 Unit	31,202,600	*4 Unit*	*115,434,750*	*16 Unit*	*537,474,750*	*80.00%*	*76.41%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	170,450,000	48 unit	102,270,000	33 unit	18,840,000	0 unit	-	3 unit	3,450,000	4 unit	-	11 unit	10,190,000	*18 unit*	*13,640,000*	*66 unit*	*115,910,000*	*82.50%*	*68.00%*	DISDUK CAPIL
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara denngan Baik	5 Gedung	99,900,000	3 Gedung	59,940,000	1 Gedung	19,980,000	0 Gedung	-	1 Gedung	19,980,000	0 Gedung	-	- Gedung	-	*1 Gedung*	*19,980,000*	*4 Gedung*	*79,920,000*	*80.00%*	*80.00%*	DISDUK CAPIL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.37**	**15.19**	**8.03**	**22.34**	**34.24**	**29.03**	**32.42**	**12.42**	**76.06**	**78.99**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**47660**	**186,063,000**	**28596**	**111,637,800**		**30,392,600**		**-**		**21,000,000**		**8,347,600**		**-**	*-*	*29,347,600*	*28,596*	*140,985,400*	*60.00%*	*75.77%*	DISDUK CAPIL
			Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**500**	**186,063,000**	**300**	**111,637,800**		**30,392,600**		**-**		**21,000,000**		**8,347,600**		**-**	*-*	*29,347,600*	*300*	*140,985,400*	*60.00%*	*75.77%*	DISDUK CAPIL
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan (55 Aksi)	21000 Akta	186,063,000	12600 Akta	111,637,800	4200 Akta	30,392,600	0 Akta	-	2,170 Akta	21,000,000	1405 Akta	8,347,600	1,856 Akta	-	*5,431 Akta*	*29,347,600*	*18,031 Akta*	*140,985,400*	*85.86%*	*75.77%*	DISDUK CAPIL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**51.67**	**69.10**	**33.45**	**27.47**	**44.19**	**-**	**129.31**	**96.56**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**R**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase OPD yang Melakukan PKS**	**11290**	**146,765,000**	**6774**	**88,059,000**		**30,799,200**		**-**		**13,386,500**		**3,000,000**		**300,000**	*-*	*16,686,500*	*6,774*	*104,745,500*	*60.00%*	*71.37%*	DISDUK CAPIL
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Buku Laporan Data Kependudukan Pada Dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil**	**500**	**53,740,000**	**300**	**32,244,000**		**14,670,000**		**-**		**10,360,000**		**3,000,000**		**300,000**	*-*	*13,660,000*	*300*	*45,904,000*	*60.00%*	*85.42%*	DISDUK CAPIL
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Buku Pengolahan Data Kependudukan	10 Semester	53,740,000	6 Semester	32,244,000	2 Semester	14,670,000	0 Semester	-	1 Semester	10,360,000	0 Semester	3,000,000	1 Semester	300,000	*2 Semester*	*13,660,000*	*8 Semester*	*45,904,000*	*80.00%*	*85.42%*	DISDUK CAPIL
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	500	93,025,000	300	55,815,000	100	**16,129,200**				**3,026,500**					*-*	*3,026,500*	*300*	*58,841,500*	*60.00%*	*63.25%*	DISDUK CAPIL
			Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Penyajian Data Informasi yang disajikan melalui Website dan Sosial Media	100 Dokumen	93,025,000	60 Dokumen	55,815,000	20 Dokumen	16,129,200	0 Dokumen	1,691,000	4 Dokumen	3,026,500	3 Dokumen	3,285,700	10 Dokumen	3,530,000	*17 Dokumen*	*11,533,200*	*77 Dokumen*	*67,348,200*	*77.00%*	*72.40%*	DISDUK CAPIL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**4.10**	**43.46**	**2.46**	**9.74**	**9.02**	**0.97**	**15.57**	**54.18**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**19,425,134,475**	**3 WTP**	**11,655,080,685**	**WTP**	**3,816,426,872**	**WTP**	**576,951,847**	**WTP**	**1,019,933,476**	**WTP**	**737,146,190**	**WTP**	**869,395,986**	***- WTP***	***3,203,427,499***	***3 WTP***	***14,858,508,184***	***60.00%***	***76.49%***	DINAS PMD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**500**	**226,646,500**	**300**	**135,987,900**		**44,729,300**		-		**16,224,050**		**4,247,000**		**10,879,650**	-	***31,350,700***	***300***	***167,338,600***	***60.00%***	***73.83%***	DINAS PMD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	15 Buku	141,726,500	9 Buku	85,035,900	3 Buku	28,561,300	0 Buku	-	1 Buku	10,053,550	0 Buku	4,247,000	2 Buku	8,743,650	***3 Buku***	***23,044,200***	***12 Buku***	***108,080,100***	***80.00%***	***76.26%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1000 Eksemplar Dokumen	15,915,000	600 Eksemplar Dokumen	9,549,000	200 Eksemplar Dokumen	2,775,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***600 Eksemplar Dokumen***	***9,549,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	750 Eksemplar Dokumen	15,915,000	450 Eksemplar Dokumen	9,549,000	150 Eksemplar Dokumen	2,775,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***450 Eksemplar Dokumen***	***9,549,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	25 Dokumen	10,680,000	15 Dokumen	6,408,000	5 Dokumen	2,136,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,136,000	0 Dokumen	-	4 Dokumen	-	***5 Dokumen***	***2,136,000***	***20 Dokumen***	***8,544,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	25 Dokumen	10,680,000	15 Dokumen	6,408,000	5 Dokumen	2,136,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	2,136,000	***5 Dokumen***	***2,136,000***	***20 Dokumen***	***8,544,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PMD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksemplar Dokumen	14,115,000	60 Eksemplar Dokumen	8,469,000	20 Eksemplar Dokumen	2,823,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,742,250	10 Eksemplar Dokumen	-	(9) Eksemplar Dokumen	-	***2 Eksemplar Dokumen***	***1,742,250***	***62 Eksemplar Dokumen***	***10,211,250***	***62.00%***	***72.34%***	DINAS PMD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	15 Dokumen	17,615,000	9 Dokumen	10,569,000	3 Dokumen	3,523,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,292,250	0 Dokumen	-	2 Dokumen	-	***3 Dokumen***	***2,292,250***	***12 Dokumen***	***12,861,250***	***80.00%***	***73.01%***	DINAS PMD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tepat Waktu** **Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu** **Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**16,527,049,730**	**300**	**9,916,229,838**		**3,123,876,423**		**576,951,847**		**922,739,943**		**679,382,242**		**712,401,148**	-	***2,891,475,180***	***300***	***12,807,705,018***	***60.00%***	***77.50%***	DINAS PMD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	13,981,024,730	72 Orang	8,388,614,838	24 Orang	2,611,921,423	6 Orang	470,226,847	6 Orang	788,059,943	6 Orang	579,582,242	6 Orang	581,741,148	***24 Orang***	***2,419,610,180***	***96 Orang***	***10,808,225,018***	***80.00%***	***77.31%***	DINAS PMD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administras Pelaksanaan Tugas ASN	140 Orang	2,134,500,000	84 Orang	1,280,700,000	28 Orang	428,250,000	7 Orang	106,725,000	6 Orang	100,575,000	8 Orang	97,500,000	7 Orang	113,750,000	***28 Orang***	***418,550,000***	***112 Orang***	***1,699,250,000***	***80.00%***	***79.61%***	DINAS PMD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	60 Kali	411,525,000	36 Kali	246,915,000	12 Kali	83,705,000	0 Kali	-	5 Kali	34,105,000	0 Kali	2,300,000	7 Kali	16,910,000	***12 Kali***	***53,315,000***	***48 Kali***	***300,230,000***	***80.00%***	***72.96%***	DINAS PMD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**1,154,726,750**	**300**	**692,836,050**		**326,098,850**		-		**24,493,550**		**9,868,500**		**28,302,700**	-	***62,664,750***	***300***	***755,500,800***	***60.00%***	***65.43%***	DINAS PMD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	35 Unit	209,500,000	21 Unit	125,700,000	7 Unit	201,462,000	0 Unit	-	1 Unit	14,930,000	0 Unit	1,100,000	- Unit	2,950,000	***1 Unit***	***18,980,000***	***22 Unit***	***144,680,000***	***62.86%***	***69.06%***	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Kantor	2000 Porsi	20,000,000	1200 Porsi	12,000,000	Porsi		Porsi		Porsi		Porsi		Porsi		***- Porsi***	-	***1,200 Porsi***	***12,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PMD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	25000 Eksemplar	48,354,250	15000 Eksemplar	29,012,550	5000 Eksemplar	9,731,750	0 Eksemplar	-	5 Eksemplar	3,775,850	995 Eksemplar	2,358,000	567 Eksemplar	-	***1,567 Eksemplar***	***6,133,850***	***16,567 Eksemplar***	***35,146,400***	***66.27%***	***72.69%***	DINAS PMD
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	2015 Buah	60,062,500	1209 Buah	36,037,500	403 Buah	12,533,100	0 Buah	-	50 Buah	5,037,700	75 Buah	2,670,500	133 Buah	-	***258 Buah***	***7,708,200***	***1,467 Buah***	***43,745,700***	***72.80%***	***72.83%***	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelengara urusan Pemerintah Daerah	1250 Perjalanan Dinas	816,810,000	750 Perjalanan Dinas	490,086,000	250 Perjalanan Dinas	102,372,000	0 Perjalanan Dinas	-	5 Perjalanan Dinas	750,000	20 Perjalanan Dinas	3,740,000	54 Perjalanan Dinas	25,352,700	***79 Perjalanan Dinas***	***29,842,700***	***829 Perjalanan Dinas***	***519,928,700***	***66.32%***	***63.65%***	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**561,679,995**	**300**	**337,007,997**		**127,135,999**		-		**19,720,643**		**19,340,668**		**24,586,958**	-	***63,648,269***	***300***	***400,656,266***	***60.00%***	***71.33%***	DINAS PMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Kali	361,679,995	36 Kali	217,007,997	12 Kali	87,135,999	0 Kali	-	4 Kali	19,720,643	5 Kali	14,340,668	3 Kali	24,586,958	*12 Kali*	*58,648,269*	*48 Kali*	*275,656,266*	*80.00%*	*76.22%*	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	15 Kali Pameran	200,000,000	9 Kali Pameran	120,000,000	3 Kali Pameran	40,000,000	0 Kali Pameran	-	- Kali Pameran	-	2 Kali Pamera n	5,000,000	1 Kali Pamera n	-	*3 Kali Pameran*	*5,000,000*	*12 Kali Pameran*	*125,000,000*	*80.00%*	*62.50%*	DINAS PMD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**955,031,500**	**300**	**573,018,900**		**194,586,300**		**-**		**36,755,290**		**24,307,780**		**93,225,530**	-	*154,288,600*	*300*	*727,307,500*	*60.00%*	*76.16%*	DINAS PMD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik	26 Unit	955,031,500	15 Unit	573,018,900	6 Unit	194,586,300	0 Unit	-	1 Unit	36,755,290	1 Unit	24,307,780	4 Unit	93,225,530	*6 Unit*	*154,288,600*	*21 Unit*	*727,307,500*	*80.77%*	*76.16%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.21**	**15.12**	**1.44**	**26.72**	**18.30**	**19.32**	**12.80**	**22.78**	32.75	83.94					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SR	T					
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			**2,539,187,500**		**1,523,512,500**		**1,852,371,600**		**-**		**4,500,000**		**89,666,070**		**149,803,490**	-	*243,969,560*	-	*1,767,482,060*		*69.61%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa**	**500**	**2,539,187,500**	**300**	**1,523,512,500**		**1,852,371,600**		**-**		**4,500,000**		**89,666,070**		**149,803,490**	-	*243,969,560*	*300*	*1,767,482,060*	*60.00%*	*69.61%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	BPJS Pekon	897 Pekon	3,900,000,000	Pekon	-	299 Pekon	1,300,000,000	0 Pekon	-	- Pekon	-	2 Pekon	14,008,320	45 Pekon	77,629,440	*47 Pekon*	*91,637,760*	*47 Pekon*	*91,637,760*			DINAS PMD
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon yang termonitor dalam menggunakan Alokasi Dana Pekon Kabupaten Tanggamus		212,112,500		127,267,500	299 Pekon	76,297,300	0 Pekon	-	- Pekon	-	0 Pekon	-	- Pekon	-	- *Pekon*	-	- *Pekon*	*127,267,500*		*60.00%*	DINAS PMD
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	1495 Pekon	440,250,000	897 Pekon	264,150,000	299 Pekon	73,786,300	0 Pekon	-	- Pekon	4,500,000	0 Pekon	6,500,000	- Pekon	-	- *Pekon*	*11,000,000*	*897 Pekon*	*275,150,000*	*60.00%*	*62.50%*	DINAS PMD
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1495 Pekon	483,500,000	897 Pekon	290,100,000	299 Pekon	23,558,000	0 Pekon	-	- Pekon	-	0 Pekon	1,782,000	- Pekon	-	- *Pekon*	*1,782,000*	*897 Pekon*	*291,882,000*	*60.00%*	*60.37%*	DINAS PMD
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	1495 Pekon	291,925,000	897 Pekon	175,155,000	299 Pekon	58,385,000	0 Pekon	-	- Pekon	-	148 Pekon	30,191,700	151 Pekon	3,030,000	*299 Pekon*	*33,221,700*	*1,196 Pekon*	*208,376,700*	*80.00%*	*71.38%*	DINAS PMD
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Diokue mn	1,111,400,000	3 Diokue mn	666,840,000	1 Diokue mn	222,280,000	0 Diokue mn	-	- Diokue mn	-	0 Diokue mn	-	1 Diokue mn	25,900,000	*1 Diokue mn*	*25,900,000*	*4 Diokue mn*	*692,740,000*	*80.00%*	*62.33%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Lomba /Pembinaan	1,111,400,000	3 Lomba /Pembinaan	666,840,000	1 Lomba /Pembinaan	98,065,000	0 Lomba /Pembinaan	-	- Lomba /Pembinaan	-	0 Lomba /Pembinaan	37,184,050	1 Lomba/ Pembinaan	43,244,050	*1 Lomba /Pembi*	*80,428,100*	*4 Lomba /Pembi*	*747,268,100*	*80.00%*	*67.24%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**0.24**	**10.02**	**4.84**	**13.23**	**8.09**	23.25	13.17					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	SR	SR					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartispasi dalam proses pembangunan pekon**	**400**	**18,171,029,500**	**240**	**10,902,617,700**		**5,583,005,900**		**-**		**450,000,000**		**490,000,000**		**2,374,097,500**	-	*3,314,097,500*	*240*	*14,216,715,200*	*60.00%*	*78.24%*	DINAS PMD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa**	**500**	**18,104,229,500**	**300**	**10,862,537,700**		**5,550,565,900**		-		**450,000,000**		**490,000,000**		**2,374,097,500**	-	*3,314,097,500*	*300*	*14,176,635,200*	*60.00%*	*78.31%*	DINAS PMD
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (PKK,Posyandu dan LPM)	15 Sosialisasi	205,000,000	9 Sosialisasi	123,000,000	Sosialisasi 3	32,440,000	Sosialisasi 0	-	Sosialisasi -	-	0 Sosialisasi	-	- Sosialisasi	-	- *Sosialisasi*	-	*9 Sosialisasi*	*123,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Sosialisasi	15,916,500,000	3 Sosialisasi	9,549,900,000	Sosialisasi 1	3,871,500,000	Sosialisasi 0	-	Sosialisasi -	450,000,000	0 Sosialisasi	490,000,000	1 Sosialisasi	1,000,000,000	*1 Sosialisasi*	*1,940,000,000*	*4 Sosialisasi*	*11,489,900,000*	*80.00%*	*72.19%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Simpan pinjam Khusus Perempuan (SPP)	5 Sosialisasi	66,800,000	3 Sosialisasi	40,080,000	Sosialisasi 1	32,440,000	Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		Sosialisasi		- *Sosialisasi*	-	*3 Sosialisasi*	*40,080,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Inovatif dan Aplikatif	15 Workshop	1,518,354,500	9 Workshop	911,012,700	Workshop 3	243,670,900	Workshop 0	-	Workshop -		0 Workshop	-	- Workshop	4,040,000	- *Workshop*	*4,040,000*	*9 Workshop*	*915,052,700*	*60.00%*	*60.27%*	DINAS PMD
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Melalui Program Karya Bhakti TNI	5 Kecamatan	397,575,000	3 Kecamatan	238,545,000	Kecamatan 1	1,370,515,000	Kecamatan 0	-	Kecamatan -		0 Kecamatan	-	1 Kecamatan	1,370,057,500	*1 Kecamatan*	*1,370,057,500*	*4 Kecamatan*	*1,608,602,500*	*80.00%*	*404.60%*	DINAS PMD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**8.06**	-	**8.78**	**22.22**	**42.52**	**22.22**	**59.36**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**				
			DINAS PERHUBUNGAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**29,007,355,085**	**3 WTP**	**17,404,413,051**	**WTP**	**5,515,595,519**	**WTP**	**890,959,310**	**WTP**	**1,292,355,312**	**WTP**	**1,050,440,589**	**WTP**	**1,168,268,559**	- *WTP*	*4,402,023,770*	*3 WTP*	*21,806,436,821*	*60.00%*	*75.18%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, evaluasi, informasi dan kinerja yang disusun tepat waktu**	**500**	**269,798,780**	**300**	**161,879,268**		**45,871,092**		**3,528,162**		**10,387,200**		**8,838,000**		**4,276,716**	-	*27,030,078*	*300*	*188,909,346*	*60.00%*	*70.02%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Renja dan Perubahan Renja Jumlah Dokumen RKA RKPA DPA DPPA	10 Dokumen	4,060,500	6 Dokumen	2,436,300	Dokumen 2	812,100	Dokumen 0	-	Dokumen 2	812,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*2 Dokumen*	*812,100*	*8 Dokumen*	*3,248,400*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	75 Dokumen	6,000,000	45 Dokumen	3,600,000	15 Dokumen	600,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	15 Dokumen	300,000	*15 Dokumen*	*300,000*	*60 Dokumen*	*3,900,000*	*80.00%*	*65.00%*	DINAS PERHUBUNGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah DOkumen RKA- SKPD	50 Dokumen	6,335,000	30 Dokumen	3,801,000	10 Dokumen	615,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	10 Dokumen	300,000	*10 Dokumen*	*300,000*	*40 Dokumen*	*4,101,000*	*80.00%*	*64.74%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA -SKPD	150 Dokumen	7,500,000	90 Dokumen	4,500,000	30 Dokumen	1,500,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	30 Dokumen	1,500,000	- Dokumen	-	*30 Dokumen*	*1,500,000*	*120 Dokumen*	*6,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	150 Dokumen	7,681,500	90 Dokumen	4,608,900	30 Dokumen	768,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	30 Dokumen	300,000	*30 Dokumen*	*300,000*	*120 Dokumen*	*4,908,900*	*80.00%*	*63.91%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja triwulan	25 Dokumen	3,025,500	15 Dokumen	1,815,300	5 Dokumen	515,100	0 Dokumen	-	3 Dokumen	515,100	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	*5 Dokumen*	*515,100*	*20 Dokumen*	*2,330,400*	*80.00%*	*77.03%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD LAKIP LKPJ Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Triwulan TR	20 Dokumen	235,196,280	12 Dokumen	141,117,768	4 Dokumen	41,060,892	1 Dokumen	3,528,162	- Dokumen	9,060,000	1 Dokumen	7,338,000	2 Dokumen	3,376,716	*4 Dokumen*	*23,302,878*	*16 Dokumen*	*164,420,646*	*80.00%*	*69.91%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu, Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	500	20,871,243,305	300	12,522,745,983		**3,983,033,527**		**835,009,841**		**1,136,770,407**		**837,528,683**		**874,512,403**	-	*3,683,821,334*	*300*	*16,206,567,317*	*60.00%*	*77.65%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan Gaji dan ASN	60 Bulan	11,928,693,305	36 Bulan	7,157,215,983	12 Bulan	2,271,823,527	3 Bulan	428,744,841	3 Bulan	685,005,407	3 Bulan	449,928,683	3 Bulan	461,352,403	*12 Bulan*	*2,025,031,334*	*48 Bulan*	*9,182,247,317*	*80.00%*	*76.98%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Non PNS, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 Bulan	8,521,350,000	36 Bulan	5,112,810,000	12 Bulan	1,605,370,000	3 Bulan	406,265,000	3 Bulan	402,445,000	3 Bulan	387,600,000	3 Bulan	389,150,000	*12 Bulan*	*1,585,460,000*	*48 Bulan*	*6,698,270,000*	*80.00%*	*78.61%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	421,200,000	36 Kali	252,720,000	12 Kali	105,840,000	0 Kali	-	5 Kali	49,320,000	2 Kali	-	5 Kali	24,010,000	*12 Kali*	*73,330,000*	*48 Kali*	*326,050,000*	*80.00%*	*77.41%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum**	**500**	**1,572,393,000**	**300**	**943,435,800**		**316,264,600**		**-**		**43,656,700**		**91,352,065**		**62,470,533**	-	*197,479,298*	*300*	*1,140,915,098*	*60.00%*	*72.56%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	456,740,000	3 Paket	274,044,000	1 Paket	178,548,000	0 Paket	-	- Paket	18,988,000	1 Paket	79,925,000	- Paket	16,160,000	*1 Paket*	*115,073,000*	*4 Paket*	*389,117,000*	*80.00%*	*85.19%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minu	25 Kali	259,860,000	15 Kali	155,916,000	5 Kali	15,532,000	0 Kali	-	1 Kali	792,000	1 Kali	2,227,500	2 Kali	8,442,688	*4 Kali*	*11,462,188*	*19 Kali*	*167,378,188*	*76.00%*	*64.41%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	50000 Eksapler	256,250,000	30000 Eksapler	153,750,000	10000 Eksapler	44,368,000	0 Eksapler	-	1,385 Eksapler	12,115,500	2935 Eksapler	845,765	2,330 Eksapler	16,652,700	*6,650 Eksapler*	*29,613,965*	*36,650 Eksapler*	*183,363,965*	*73.30%*	*71.56%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	204,113,000	36 Bulan	122,467,800	12 Bulan	36,822,600	0 Bulan	-	3 Bulan	11,761,200	3 Bulan	8,353,800	6 Bulan	16,707,600	*12 Bulan*	*36,822,600*	*48 Bulan*	*159,290,400*	*80.00%*	*78.04%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinas dan Konsultasi Luar Daerah	500 Kali	395,430,000	300 Kali	237,258,000	27 Kali	40,994,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	4,507,545	*5 Kali*	*4,507,545*	*305 Kali*	*241,765,545*	*61.00%*	*61.14%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**2,121,000,000**	**300**	**1,272,600,000**		**424,200,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	*300*	*1,272,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	5 Unit	2,121,000,000	3 Unit	1,272,600,000	1 Unit	424,200,000	Unit		Unit	-	Unit		Unit		*- Unit*	-	*3 Unit*	*1,272,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,053,995,000**	**300**	**632,397,000**		**145,820,500**		**8,982,992**		**43,305,705**		**22,714,041**		**44,918,707**	-	*119,921,445*	*300*	*752,318,445*	*60.00%*	*71.38%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	753,495,000	36 Bulan	452,097,000	12 Bulan	145,820,500	2 Bulan	8,982,992	3 Bulan	43,305,705	1 Bulan	22,714,041	6 Bulan	44,918,707	*12 Bulan*	*119,921,445*	*48 Bulan*	*572,018,445*	*80.00%*	*75.92%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pameran	5 Kali	300,500,000	3 Kali	180,300,000	Kali		Kali		Kali	-	Kali		Kali		*- Kali*	-	*3 Kali*	*180,300,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang di Susun Tepat Waktu**	**500**	**3,118,925,000**	**300**	**1,871,355,000**		**600,405,800**		**43,438,315**		**58,235,300**		**90,007,800**		**182,090,200**	-	*373,771,615*	*300*	*2,245,126,615*	*60.00%*	*71.98%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	5 Gedung bulan	2,322,545,000	3 Gedung bulan	1,393,527,000	1 Gedung bulan	457,065,800	0 Gedung bulan	43,438,315	- Gedung bulan	58,235,300	0 Gedung bulan	60,607,800	1 Gedung bulan	106,750,200	*1 Gedung bulan*	*269,031,615*	*4 Gedung bulan*	*1,662,558,615*	*80.00%*	*71.58%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Gedung PKB	5 Unit	796,380,000	3 Unit	477,828,000	1 Unit	143,340,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	29,400,000	1 Unit	75,340,000	*1 Unit*	*104,740,000*	*4 Unit*	*582,568,000*	*80.00%*	*73.15%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.09**	**16.15**	**13.81**	**23.43**	**29.25**	**19.04**	**23.74**	**21.18**	**66.90**	**79.81**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Yang Tersedia**	**35**	**6,878,314,750**	**21**	**4,126,988,850**		**1,335,708,690**		**4,059,000**		**353,294,350**		**634,948,262**		**177,220,500**	-	*1,169,522,112*	*21*	*5,296,510,962*	*60.00%*	*77.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Tersedianya Perlengkapan Jalan**	**500**	**2,968,113,250**	**300**	**1,780,867,950**		**671,002,590**		-		**196,616,450**		**321,624,262**		**106,356,300**	-	*624,597,012*	*300*	*2,405,464,962*	*60.00%*	*81.04%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lampu Jalan	125 unit	2,007,500,000	75 unit	1,204,500,000	23 unit	373,599,340	0 unit	-	1 unit	29,920,000	4 unit	316,547,262	18 unit	-	*23 unit*	*346,467,262*	*98 unit*	*1,550,967,262*	*78.40%*	*77.26%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pemeliharaan Trafic dan Warning	10 Paket	170,081,250	6 Paket	102,048,750	2 Paket	32,996,250	0 Paket	-	1 Paket	7,867,450	0 Paket	5,077,000	1 Paket	7,824,000	*2 Paket*	*20,768,450*	*8 Paket*	*122,817,200*	*80.00%*	*72.21%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan lampu jalan	2250 lampu	790,532,000	1350 lampu	474,319,200	1655 lampu	264,407,000	0 lampu	-	350 lampu	158,829,000	545 lampu	-	558 lampu	98,532,300	*1,453 lampu*	*257,361,300*	*2,803 lampu*	*731,680,500*	*124.58%*	*92.56%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**500**	**2,001,910,000**	**300**	**1,201,146,000**		**364,982,500**		**4,059,000**		**27,020,000**		**264,324,000**		**46,644,500**	-	*342,047,500*	*300*	*1,543,193,500*	*60.00%*	*77.09%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	5 Perda	293,544,500	3 Perda	176,126,700	1 Perda	2,020,000	0 Perda	-	- Perda	2,020,000	1 Perda	-	- Perda	-	*1 Perda*	*2,020,000*	*4 Perda*	*178,146,700*	*80.00%*	*60.69%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Berkala PKB	20000 Uji	305,302,500	12000 Uji	183,181,500	4000 Uji	84,312,500	600 Uji	4,059,000	200 Uji	25,000,000	400 Uji	5,559,000	2,800 Uji	46,644,500	*4,000 Uji*	*81,262,500*	*16,000 Uji*	*264,444,000*	*80.00%*	*86.62%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	5 Unit	1,403,063,000	3 Unit	841,837,800	1 Unit	278,650,000	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	258,765,000	- Unit	-	*1 Unit*	*258,765,000*	*4 Unit*	*1,100,602,800*	*80.00%*	*78.44%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Manajemen Pelaksanakan Rekayasa Lalu Lintas**	**500**	**795,470,500**	**300**	**477,282,300**		**138,960,000**		-		**103,440,000**		-		**10,642,500**	-	*114,082,500*	*300*	*591,364,800*	*60.00%*	*74.34%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan Pemasangan RPPJ	50 Unit	572,650,000	30 Unit	343,590,000	6 Unit	110,370,000	0 Unit	-	4 Unit	101,020,000	1 Unit	-	1 Unit	-	*6 Unit*	*101,020,000*	*36 Unit*	*444,610,000*	*72.00%*	*77.64%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengepaman	60 Bulan	197,820,500	36 Bulan	118,692,300	12 Bulan	23,590,000	0 Bulan	-	3 Bulan	2,420,000	0 Bulan	-	9 Bulan	10,642,500	*12 Bulan*	*13,062,500*	*48 Bulan*	*131,754,800*	*80.00%*	*66.60%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Hibah	5 Kali	25,000,000	3 Kali	15,000,000	1 Kali	5,000,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*15,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya Penyediaan Angkutan Sekolah**	**5**	**1,112,821,000**	**3**	**667,692,600**		**160,763,600**		-		**26,217,900**		**49,000,000**		**13,577,200**	-	*88,795,100*	*3*	*756,487,700*	*60.00%*	*67.98%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Jasa Angkutan Sekola	60 Bulan	521,774,500	36 Bulan	313,064,700	12 Bulan	82,731,200	0 Bulan	-	- Bulan	-	1 Bulan	-	1 Bulan	13,577,200	*2 Bulan*	*13,577,200*	*38 Bulan*	*326,641,900*	*63.33%*	*62.60%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Angkutan Darat	15 Kali	591,046,500	9 Kali	354,627,900	3 Kali	78,032,400	0 Kali	-	- Kali	26,217,900	2 Kali	49,000,000	- Kali	-	*2 Kali*	*75,217,900*	*11 Kali*	*429,845,800*	*73.33%*	*72.73%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	10.50	0.30	9.78	26.45	16.71	47.54	59.27	13.27	96.26	87.56					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST'	T					
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran**	**40**	**1,661,000,000**	**24**	**996,600,000**		**300,940,000**		**13,950,000**		**78,420,000**		**34,550,000**		**55,800,000**	-	*182,720,000*	*24*	*1,179,320,000*	*60.00%*	*71.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Terselenggaranya Pengoprasian dan Pemeliharaan Kapal**	**5**	**1,661,000,000**	**3**	**996,600,000**		**300,940,000**		**13,950,000**		**78,420,000**		**34,550,000**		**55,800,000**	-	*182,720,000*	*3*	*1,179,320,000*	*60.00%*	*71.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Kapal	60 Bulan	1,661,000,000	36 Bulan	996,600,000	12 Bulan	300,940,000	1 Bulan	13,950,000	4 Bulan	78,420,000	3 Bulan	34,550,000	4 Bulan	55,800,000	*12 Bulan*	*182,720,000*	*48 Bulan*	*1,179,320,000*	*80.00%*	*71.00%*	DINAS PERHUBUNGAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	8.33	4.64	33.33	26.06	25.00	11.48	33.33	18.54	100.00	60.72					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
				Predikat kinerja							SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST*	R					
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	WTP	**21,081,238,600**	WTP	**12,648,743,160**	**WTP**	**4,016,804,489**	**WTP**	**682,851,324**	**WTP**	**1,083,299,914**	**WTP**	**871,370,219**	**WTP**	**931,514,898**	**- *WTP***	***3,569,036,355***	**- *WTP***	***16,217,779,515***		***76.93%***	DINAS KOMINFO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**119,500,000**	**3**	**71,700,000**		**23,900,000**		**1,100,000**		**6,890,000**		**5,930,000**		**9,980,000**	-	***23,900,000***	***3***	***95,600,000***	***60.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, dan perubahannya	15 Buku	86,500,000	9 Buku	51,900,000	3 Buku	17,300,000	0 Buku	-	- Buku	5,790,000	0 Buku	4,830,000	3 Buku	6,680,000	***3 Buku***	***17,300,000***	***12 Buku***	***69,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	3 Eksemplar Dokumen	3,300,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	***1 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***4 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	3 Eksemplar Dokumen	3,300,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	1,100,000	- Eksemplar Dokumen	- 1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	***1 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***4 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	3 Eksemplar Dokumen	3,300,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	-	***1 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***4 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,500,000	3 Eksemplar Dokumen	3,300,000	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	1,100,000	***1 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***4 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	10 Eksemplar Dokumen	5,500,000	6 Eksemplar Dokumen	3,300,000	2 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,100,000	2 Eksemplar Dokumen	-	***2 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***8 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ, Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	5,500,000	9 Eksemplar Dokumen	3,300,000	3 Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,100,000	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	-	***3 Eksemplar Dokumen***	***1,100,000***	***12 Eksemplar Dokumen***	***4,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5**	**17,298,645,845**	**3**	**10,379,187,507**		**3,283,821,029**		**613,833,380**		**1,041,558,374**		**751,933,319**		**761,058,698**	-	***3,168,383,771***	***3***	***13,547,571,278***	***60.00%***	***78.32%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 ASN	14,986,770,845	78 ASN	8,992,062,507	26 ASN	2,839,546,029	6 ASN	532,083,380	6 ASN	898,533,374	7 ASN	653,713,319	7 ASN	649,178,698	***26 ASN***	***2,733,508,771***	***104 ASN***	***11,725,571,278***	***80.00%***	***78.24%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan tugas ASN	115 orang	1,856,625,000	69 orang	1,113,975,000	23 orang	353,225,000	5 orang	81,750,000	5 orang	112,675,000	7 orang	74,700,000	6 orang	74,700,000	***23 orang***	***343,825,000***	***92 orang***	***1,457,800,000***	***80.00%***	***78.52%***	DINAS KOMINFO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/verivikasi Keuangan SKPD	60 kali	455,250,000	36 kali	273,150,000	12 kali	91,050,000	0 kali	-	5 kali	30,350,000	4 kali	23,520,000	3 kali	37,180,000	***12 kali***	***91,050,000***	***48 kali***	***364,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS KOMINFO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**1,719,721,250**	**3**	**1,031,832,750**		**260,528,900**		**20,805,000**		**17,243,050**		**69,269,500**		**108,526,000**	-	***215,843,550***	***3***	***1,247,676,300***	***60.00%***	***72.55%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Mebeleur Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570 unit unit bulan	402,761,250	342 unit unit bulan	241,656,750	114 unit unit bulan	54,684,500	5 unit unit bulan	3,540,000	6 unit unit bulan	1,520,000	46 unit unit bulan	5,310,000	57 unit unit bulan	23,310,000	***114 unit unit bulan***	***33,680,000***	***456 unit unit bulan***	***275,336,750***	***80.00%***	***68.36%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk keperlun rutin kantor Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	400 Porsi	140,650,000	240 Porsi	84,390,000	80 Porsi	23,040,000	6 Porsi	2,225,000	12 Porsi	-	28 Porsi	4,009,500	34 Porsi	8,118,000	***80 Porsi***	***14,352,500***	***320 Porsi***	***98,742,500***	***80.00%***	***70.20%***	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk keperluan rutin kantor	250 Eksemplar	362,110,000	150 Eksemplar	217,266,000	50 Eksemplar	55,666,400	2 Eksemplar	3,000,000	9 Eksemplar	6,000,000	27 Eksemplar	30,340,000	12 Eksemplar	14,188,000	***50 Eksemplar***	***53,528,000***	***200 Eksemplar***	***270,794,000***	***80.00%***	***74.78%***	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah	1750 kali	814,200,000	1050 kali	488,520,000	350 kali	127,138,000	26 kali	12,040,000	21 kali	9,723,050	74 kali	29,610,000	194 kali	62,910,000	***315 kali***	***114,283,050***	***1,365 kali***	***602,803,050***	***78.00%***	***74.04%***	DINAS KOMINFO
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5**	-	**3**	-						-		-		-	-	-	***3***	-	***60.00%***		DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya Mesin Absensi	5 unit	-	3 unit	-	1 unit		unit		unit	-	unit		unit		- unit	-	3 unit	-	60.00%		DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	500 300	1,063,671,505		638,202,903		253,094,560		**4,200,144**		**7,258,890**					-	*11,459,034*	*300*	*649,661,937*	*60.00%*	*61.08%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Surat Menyurat	60 bulan	-	36 bulan	-	0 bulan	-	bulan		bulan		bulan		bulan		- bulan	-	36 bulan	-	60.00%		DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Persediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	60 kali	549,578,805	36 kali	329,747,283	12 kali	91,605,000	3 kali	4,200,144	3 kali	2,258,890	3 kali	6,805,156	3 kali	50,074,704	*12 kali*	*63,338,894*	*48 kali*	*393,086,177*	*80.00%*	*71.52%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Perbaikan Peralatan Kantor	100 unit	295,355,100	60 unit	176,013,000	20 unit	58,671,020	0 unit	-	3 unit	5,000,000	9 unit	42,454,960	8 unit	47,454,960	*20 unit*	*94,909,920*	*80 unit*	*270,922,920*	*80.00%*		DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	175 Kali	514,092,700	105 Kali	308,455,620	35 Kali	102,818,540	Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	*105 Kali*	*308,455,620*		*60.00%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500 300**	**879,700,000**		**527,820,000**		**195,460,000**		**42,912,800**		**10,349,600**		**44,237,400**		**51,950,200**	-	*149,450,000*	*300*	*677,270,000*	*60.00%*	*76.99%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dengan baik Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	330 Unit	737,700,000	198 Unit	442,620,000	6 6 Unit	147,540,000	9 Unit	28,252,800	10 Unit	23,549,600	21 Unit	43,237,400	26 Unit	51,500,200	*66 Unit*	*146,540,000*	*264 Unit*	*589,160,000*		*79.86%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Unit	-	Unit	-	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	- Unit	-			DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara dengan baik	100 unit	56,800,000	60 unit	34,080,000	20 unit	2,920,000	1 unit	14,660,000	2 unit	- 13,200,000	4 unit	1,000,000	13 unit	450,000	*20 unit*	*2,910,000*	*80 unit*	*36,990,000*	*80.00%*	*65.12%*	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame Terpeliharanya Rumah Jabatan	Unit	-	Unit	-	7 1 Unit	45,000,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-			DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana grdung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara dengan baik, Terpeliharanya Gedung Kantor dan Papan Reklame	30 Unit	85,200,000	18 Unit	51,120,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	*18 Unit*	*51,120,000*		*60.00%*	DINAS KOMINFO
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**8.34**	**17.00**	**10.86**	**26.97**	**30.46**	**21.69**	**49.67**	**23.19**	**99.34**	**88.85**				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**T**				
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Peningkatan Publikasi Informasi Komunikasi Publik**	**40 24**	**32,443,163,150**		**19,465,897,890**		**6,491,337,500**		**788,790,000**		**2,528,765,200**		**774,930,000**		**1,959,261,300**	-	*6,051,746,500*	*24*	*25,517,644,390*	*60.00%*	*78.65%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tercapainya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang baik**	**5 3**	**32,443,163,150**		**19,465,897,890**		**6,491,337,500**		**788,790,000**		**2,528,765,200**		**774,930,000**		**1,959,261,300**	-	*6,051,746,500*	*3*	*25,517,644,390*	*60.00%*	*78.65%*	DINAS KOMINFO
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	terciptaya Perumusan Kebijakan		-		-		-				-					-	-	-	-	*#DIV/0!*		DINAS KOMINFO
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	Kecamatan	-	Kecamatan	-	Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan	-	Kecamatan		Kecamatan		- Kecamatan	-	- Kecamatan	-			DINAS KOMINFO
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Monitoring yang menjadi prioritas	1200 kali	336,212,500	720 kali	201,727,500	240 kali	15,402,500	17 kali	3,540,000	53 kali	3,225,200	55 kali	3,810,000	115 kali	4,827,300	*240 kali*	*15,402,500*	*960 kali*	*217,130,000*	*80.00%*	*64.58%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah yang akan dilaksanakan	960 kali	300,320,000	576 kali	180,192,000	192 kali	29,100,000	0 kali	-	- kali	-	50 kali	10,000,000	142 kali	18,314,000	*192 kali*	*28,314,000*	*768 kali*	*208,506,000*	*80.00%*	*69.43%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media yang akan dibayar atau jumlah dokumen yang akan menjadi dokumentas	3400 kali	16,681,200,000	2040 kali	10,008,720,000	680 kali	4,208,975,000	30 kali	394,960,000	220 kali	1,624,490,000	260 kali	419,940,000	170 kali	1,634,340,000	*680 kali*	*4,073,730,000*	*2,720 kali*	*14,082,450,000*	*80.00%*	*84.42%*	DINAS KOMINFO
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Waktu Pelayanan	60 bulan	340,688,750	36 bulan	204,413,250	12 bulan	48,150,000	1 bulan	2,700,000	3 bulan	1,270,000	1 bulan	3,810,000	7 bulan	11,810,000	*12 bulan*	*19,590,000*	*48 bulan*	*224,003,250*	*80.00%*	*65.75%*	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Masa	1045 Media	270,000,000	627 Media	162,000,000	Media		Media		Media		Media		Media		- *Media*	-	*627 Media*	*162,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KOMINFO
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Penerima Hibah	225 lembaga	13,625,000,000	135 lembaga	8,175,000,000	45 lembaga	2,135,000,000	8 lembaga	380,400,000	10 lembaga	897,000,000	14 lembaga	325,000,000	13 lembaga	277,600,000	*45 lembaga*	*1,880,000,000*	*180 lembaga*	*10,055,000,000*	*80.00%*	*73.80%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terciptanya hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi Publik	60 bulan	668,591,900	36 bulan	401,155,140	12 bulan	11,430,000	1 bulan	2,540,000	3 bulan	1,270,000	2 bulan	3,810,000	6 bulan	3,810,000	*12 bulan*	*11,430,000*	*48 bulan*	*412,585,140*	*80.00%*	*61.71%*	DINAS KOMINFO
			Penyediaan/Pengad aan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi	15 Unit	221,150,000	9 Unit	132,690,000	3 Unit	43,280,000	1 Unit	4,650,000	1 Unit	1,510,000	0 Unit	8,560,000	1 Unit	8,560,000	*3 Unit*	*23,280,000*	*12 Unit*	*155,970,000*	*80.00%*	*70.53%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.90**	**12.15**	**24.49**	**38.96**	**32.26**	**11.94**	**38.34**	**30.18**	**100.00**	**93.23**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Aplikasi E-Government**	**Cukup**	**4,922,950,000**	**Cukup**	**2,953,770,000**	**Cukup**	**875,230,000**	**Cukup**	**5,760,000**	**Cukup**	**143,031,420**	**Cukup**	**355,279,000**	**Cukup**	**355,384,820**	- *Cukup*	*859,455,240*	- *Cukup*	*3,813,225,240*		*77.46%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Adanya Domain dan Sub Domain di Tanggamus**	**5 Jaringan**	**484,650,000**	**3 Jaringan**	**290,790,000**	**Jaringan**	**61,430,000**	**Jaringan**	**2,540,000**	**Jaringan**	**2,201,420**	**Jaringan**	**33,810,000**	**Jaringan**	**9,204,820**	- *Jaringan*	*47,756,240*	*3 Jaringan*	*338,546,240*	*60.00%*	*69.85%*	DINAS KOMINFO
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain	5 website	484,650,000	3 website	290,790,000	1 website	61,430,000	0 website	2,540,000	- website	2,201,420	0 website	33,810,000	1 website	9,204,820	*1 website*	*47,756,240*	*4 website*	*338,546,240*	*80.00%*	*69.85%*	DINAS KOMINFO
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Informasi Pemerintah Daerah**	**5**	**4,438,300,000**	**3**	**2,662,980,000**	**1**	**813,800,000**		**3,220,000**		**140,830,000**		**321,469,000**		**346,180,000**	-	*811,699,000*	*3*	*3,474,679,000*	*60.00%*	*78.29%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Persentase tTersedianya Internet Benwich	500 %	3,487,750,000	300 %	2,092,650,000	100 %	628,530,000	0 %	3,220,000	20.19 %	140,830,000	20.48 %	139,650,000	59.33 %	344,830,000	*100 %*	*628,530,000*	*400 %*	*2,721,180,000*		*78.02%*	DINAS KOMINFO
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Jaringan Fiber Optik SPBE	5 Unit	950,550,000	3 Unit	570,330,000	1 Unit	185,270,000	0 Unit	-	*Unit* -	-	1.00 Unit	181,819,000	99.00 Unit	1,350,000	*100 Unit*	*183,169,000*	*103 Unit*	*753,499,000*		*79.27%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**0.66**	**19.60**	**16.34**	**20.85**	**40.59**	**154.69**	**40.60**	**195.15**	**98.20**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Persentase Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektoral**	**Ada**	**252,750,000**	**Ada**	**151,650,000**	**Ada**	**28,250,000**	**Ada**	**5,080,000**	*Ada*	**3,040,000**		**7,620,000**		**11,920,000**	- *Ada*	*27,660,000*	- *Ada*	*179,310,000*		*70.94%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya Data Statistik sektoral**	**500**	**252,750,000**	**300**	**151,650,000**		**28,250,000**		**5,080,000**		**3,040,000**		**7,620,000**		**11,920,000**	-	*27,660,000*	*300*	*179,310,000*	*60.00%*	*70.94%*	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis s dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik sektoral	125 buku	140,650,000	75 buku	84,390,000	25 buku	16,820,000	0 buku	2,540,000	4 buku	1,770,000	8 buku	3,810,000	13 buku	8,110,000	*25 buku*	*16,230,000*	*100 buku*	*100,620,000*	*80.00%*	*71.54%*	DINAS KOMINFO
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral	5 Jaringan	112,100,000	3 Jaringan	67,260,000	1 Jaringan	11,430,000	0 Jaringan	2,540,000	- Jaringan	1,270,000	0 Jaringan	3,810,000	1 Jaringan	3,810,000	*1 Jaringan*	*11,430,000*	*4 Jaringan*	*78,690,000*	*80.00%*	*70.20%*	DINAS KOMINFO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**17.98**	**15.38**	**10.76**	**30.77**	**26.97**	**53.85**	**42.19**	**100.00**	**97.91**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	**Persentase Peningkatan Layanan keamanan Informasi Dalam**	**150**	**150,000,000**	**90**	**90,000,000**		**70,754,650**		**2,700,000**		**10,856,000**		**14,788,500**		**13,308,500**	-	*41,653,000*	*90*	*131,653,000*	*60.00%*	*87.77%*	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Terciptanya Keamanan Informasi Persandian**	**500**	**150,000,000**	**300**	**90,000,000**		**70,754,650**		**2,700,000**		**10,856,000**		**14,788,500**		**13,308,500**	-	*41,653,000*	*300*	*131,653,000*	*60.00%*	*87.77%*	DINAS KOMINFO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																					
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Keamanan Informasi Persandian	5 unit	150,000,000	3 unit	90,000,000	unit 1	70,754,650	unit 0	2,700,000	unit -	10,856,000	0 unit	14,788,500	1 unit	13,308,500	*1 unit*	*41,653,000*	*4 unit*	*131,653,000*	*80.00%*	*87.77%*	DINAS KOMINFO
											Rata-rata capaian kinerja (%)	-		3.82	0.00		15.34	-		20.90	100.00		18.81	100.00		58.87				
											Predikat kinerja	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR	ST*		R				
			DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**34,203,271,975**	**WTP**	**20,521,963,185**	**WTP**	**6,480,321,530**	**WTP**	**1,209,239,331**	**WTP**	**1,836,613,284**	**WTP**	**1,378,969,507**	**WTP**	**5,272,423,069**	*- WTP*	*9,697,245,191*	*- WTP*	*30,219,208,376*		*88.35%*	DINAS KOPERINDAG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perankat daerah yang tepat waktu**	**500**	**214,315,000**	**300**	**128,589,000**		**26,567,850**		**10,430,000**		-		-		**19,482,700**	-	*29,912,700*	*300*	*158,501,700*	*60.00%*	*73.96%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	150 Buku	39,275,000	90 Buku	23,565,000	30 Buku	5,270,100	0 Buku	2,510,000	10 Buku	-	0 Buku	-	20 Buku	3,470,000	*30 Buku*	*5,980,000*	*120 Buku*	*29,545,000*	*80.00%*	*75.23%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA OPD yang tersusun	100 Buku	36,137,500	60 Buku	21,682,500	20 Buku	4,722,500	5 Buku	2,250,000	- Buku	-	0 Buku	-	15 Buku	4,550,000	*20 Buku*	*6,800,000*	*80 Buku*	*28,482,500*	*80.00%*	*78.82%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	50 Buku	27,012,500	30 Buku	16,207,500	10 Buku	2,847,500	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	10 Buku	1,800,000	*10 Buku*	*1,800,000*	*40 Buku*	*18,007,500*	*80.00%*	*66.66%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20,250,000	135 Eksemplar Dokumen	12,150,000	45 Eksemplar Dokumen	2,775,000	0 Eksemplar Dokumen	675,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	1,217,700	*20 Eksemplar Dokum*	*1,892,700*	*155 Eksemplar Dokum*	*14,042,700*	*68.89%*	*69.35%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	225 Eksemplar Dokumen	20,250,000	135 Eksemplar Dokumen	12,150,000	45 Eksemplar Dokumen	2,775,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	40 Eksemplar Dokumen	1,500,000	*40 Eksemplar Dokum*	*1,500,000*	*175 Eksemplar Dokum*	*13,650,000*	*77.78%*	*67.41%*	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	5 Dokumen	12,975,000	3 Dokumen	7,785,000	1 Dokumen	2,595,000	0 Dokumen	2,595,000	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,595,000	*1 Dokumen*	*5,190,000*	*4 Dokumen*	*12,975,000*	*80.00%*	*100.00%*	DINAS KOPERINDAG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	25 Dokumen	58,415,000	15 Dokumen	35,049,000	5 Dokumen	5,582,750	1 Dokumen	2,400,000	- 1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	4 Dokumen	4,350,000	*5 Dokumen*	*6,750,000*	*20 Dokumen*	*41,799,000*	*80.00%*	*71.56%*	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	5	**29,871,550,200**	**3**	**17,922,930,120**		**5,727,014,680**		**1,146,119,334**		**1,653,765,180**		**1,148,476,264**		**5,087,066,813**	-	*9,035,427,591*	*3*	*26,958,357,711*	*60.00%*	*90.25%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 bulan	24,474,900,200	42 bulan	14,684,940,120	14 bulan	4,646,784,680	3 bulan	888,989,334	5 bulan	1,386,000,180	2 bulan	879,881,264	4 bulan	4,017,191,813	*14 bulan*	*7,172,062,591*	*56 bulan*	*21,857,002,711*	*80.00%*	*89.30%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	330 orang	5,036,500,000	198 orang	3,021,900,000	66 orang	1,008,200,000	12 orang	245,250,000	18 orang	250,375,000	5 orang	250,775,000	31 orang	998,725,000	*66 orang*	*1,745,125,000*	*264 orang*	*4,767,025,000*	*80.00%*	*94.65%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	70 orang	360,150,000	42 orang	216,090,000	14 orang	72,030,000	2 orang	11,880,000	4 orang	17,390,000	4 orang	17,820,000	4 orang	71,150,000	*14 orang*	*118,240,000*	*56 orang*	*334,330,000*	*80.00%*	*92.83%*	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**240,750,000**		**144,450,000**		-				-		-		-	-	-	-	*144,450,000*		*60.00%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		475 stel	240,750,000	285 stel	144,450,000	stel		stel		stel		stel		stel		- *stel*	-	*285 stel*	*144,450,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS KOPERINDAG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi**	**5**	**1,654,541,000**	**3**	**992,724,600**		**267,701,800**		**13,444,040**		**97,284,520**		**14,807,350**		**76,688,250**	-	*202,224,160*	*3*	*1,194,948,760*	*60.00%*	*72.22%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi	50 Jenis	25,600,000	30 Jenis	15,360,000	10 Jenis	2,780,000	0 Jenis	945,000	2 Jenis	1,390,000	2 Jenis	-	6 Jenis	390,000	*10 Jenis*	*2,725,000*	*40 Jenis*	*18,085,000*	*80.00%*	*70.64%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 unit	235,775,000	27 unit	141,465,000	9 unit	55,750,000	0 unit	-	- unit	10,400,000	0 unit	950,000	7 unit	30,000,000	*7 unit*	*41,350,000*	*34 unit*	*182,815,000*	*75.56%*	*77.54%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	60 bulan	29,388,000	36 bulan	17,632,800	12 bulan	5,359,200	3 bulan	982,040	3 bulan	2,091,320	1 bulan	200,000	5 bulan	1,878,000	*12 bulan*	*5,151,360*	*48 bulan*	*22,784,160*	*80.00%*	*77.53%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pelaksanaan penyediaan logistik kantor	60 bulan	161,970,000	36 bulan	97,182,000	12 bulan	20,976,000	3 bulan	2,338,800	3 bulan	4,437,500	2 bulan	1,215,750	4 bulan	7,208,750	*12 bulan*	*15,200,800*	*48 bulan*	*112,382,800*	*80.00%*	*69.38%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Triwulan	179,824,500	12 Triwulan	107,894,700	4 Triwulan	49,022,600	1 Triwulan	4,452,000	1 Triwulan	22,018,900	1 Triwulan	9,140,100	1 Triwulan	6,626,800	*4 Triwulan*	*42,237,800*	*16 Triwulan*	*150,132,500*	*80.00%*	*83.49%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan kantor	60 Bulan	234,203,500	36 Bulan	140,522,100	12 Bulan	26,564,000	3 Bulan	4,726,200	2 Bulan	13,051,800	2 Bulan	2,521,500	5 Bulan	6,164,700	*12 Bulan*	*26,464,200*	*48 Bulan*	*166,986,300*	*80.00%*	*71.30%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	900 kali	787,780,000	540 kali	472,668,000	180 kali	107,250,000	0 kali	-	10 kali	43,895,000	65 kali	780,000	40 kali	24,420,000	*115 kali*	*69,095,000*	*655 kali*	*541,763,000*	*72.78%*	*68.77%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**5**	**1,049,101,275**	3	**629,460,765**		**221,475,000**		**6,540,657**		**19,412,484**		**153,914,793**		**25,466,816**	-	*205,334,750*	*3*	*834,795,515*	*60.00%*	*79.57%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	331,701,275	36 bulan	199,020,765	12 bulan	81,400,000	3 bulan	6,540,657	3 bulan	19,412,484	2 bulan	13,959,293	4 bulan	25,466,816	*12 bulan*	*65,379,250*	*48 bulan*	*264,400,015*	*80.00%*	*79.71%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 Set	717,400,000	3 Set	430,440,000	1 Set	140,075,000	0 Set	-	- *Set*	-	1 Set	139,955,500	- Set	-	*1 Set*	*139,955,500*	*4 Set*	*570,395,500*	*80.00%*	*79.51%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase pelaksanaan administrasi perkantoran perangkat daerah**	**5**	**1,173,014,500**	3	**703,808,700**		**237,562,200**		**32,705,300**		**66,151,100**		**61,771,100**		**63,718,490**	-	*224,345,990*	*3*	*928,154,690*	*60.00%*	*79.13%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	5 unit	193,350,000	3 unit	116,010,000	1 unit	44,170,000	0 unit	8,071,000	1 unit	12,448,000	0 unit	9,068,000	- unit	14,080,000	*1 unit*	*43,667,000*	*4 unit*	*159,677,000*	*80.00%*	*82.58%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara dan membayar pajak	50 unit mobil motor Mobil Motor	748,052,000	30 unit mobil motor Mobil Motor	448,831,200	10 unit mobil motor Mobil Motor	150,812,200	9 unit mobil motor Mobil Motor	24,634,300	- unit mobil motor Mobil Motor	44,643,100	0 unit mobilmotor MobilMotor	26,393,100	1 unit mobilmotor MobilMotor	49,638,490	*10 unit mobilmotor MobilMotor*	*145,308,990*	*40 unit mobilmotor MobilMotor*	*594,140,190*		*79.42%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpeliharan/ terawat	35 unit	50,750,000	21 unit	30,450,000	7 unit	12,260,000	0 unit	-	- unit	4,060,000	0 unit	1,340,000	3 unit	-	*3 unit*	*5,400,000*	*24 unit*	*35,850,000*	*68.57%*	*70.64%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	25 unit	180,862,500	15 unit	108,517,500	5 unit	30,320,000	0 unit	-	- unit	5,000,000	0 unit	24,970,000	5 unit	-	*5 unit*	*29,970,000*	*20 unit*	*138,487,500*	*80.00%*	*76.57%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**8.57**	**18.66**	**11.62**	**28.34**	**16.76**	**21.28**	**43.81**	**81.36**	**80.76**	**149.64**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**	**ST**					
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase Peningkatan Pembentukan Koperasi Baru**	**25**	**79,950,000**	**15**	**47,970,000**		**13,970,000**		-		-		**13,970,000**		-	-	*13,970,000*	*15*	*61,940,000*	*60.00%*	*77.47%*	DINAS KOPERINDAG
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi Baru yangmedapatkan akta pendirian koperasi**	**25 Akta Koperas**	**79,950,000**	**15 Akta Koperas**	**47,970,000**	**Akta Koperas**	**13,970,000**	**Akta Koperas**	-	**Akta Koperas**	-	**Akta Koperas**	**13,970,000**	**Akta Koperas**	-	- *Akta Koperas*	*13,970,000*	*15 Akta Koperas*	*61,940,000*	*60.00%*	*77.47%*	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	25 Akta Koperasi	79,950,000	15 Akta Koperasi	47,970,000	Akta Koperasi 5	13,970,000	Akta Koperasi 0	-	Akta Koperasi -	-	5 Akta Koperasi	13,970,000	- Akta Koperasi	-	*5 Akta Koperasi*	*13,970,000*	*20 Akta Koperasi*	*61,940,000*	*80.00%*	*77.47%*	DINAS KOPERINDAG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**0.00**	-	**100.00**	**100.00**	-	-	**100.00**	**100.00**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			**299,700,000**		**179,820,000**		**29,450,000**		-		-		**29,450,000**		-	-	*29,450,000*	-	*209,270,000*		*69.83%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah koperasi yang dapat melaksanakan penyehatan kelembagaan dan usahanya**	**300 Koperasi**	**299,700,000**	**180 Koperasi**	**179,820,000**	**Koperasi**	**29,450,000**	**Koperasi**		**Koperasi**	**-**	**Koperasi**	**29,450,000**	**Koperasi**	**-**	**- Koperasi**	***29,450,000***	***180 Koperasi***	***209,270,000***	***60.00%***	***69.83%***	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	5 Dokumen	299,700,000	3 Dokumen	179,820,000	1 Dokumen	29,450,000	0 Dokumen		- Dokumen	-	0 Dokumen	29,450,000	1 Dokumen	-	***1 Dokumen***	***29,450,000***	***4 Dokumen***	***209,270,000***	***80.00%***	***69.83%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**100.00**	**100.00**	**-**	**100.00**	**100.00**					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**ST***	**ST**					
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas**	**9090**	**419,325,000**	**5454**	**251,595,000**		**42,802,500**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***5,454***	***251,595,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terbentuknya Koperasi Baru**	**30 Koperasi Baru**	**419,325,000**	**18 Koperasi Baru**	**251,595,000**	**Koperasi Baru**	**42,802,500**	**Koperasi Baru**		**Koperasi Baru**	**-**	**Koperasi Baru**	**-**	**Koperasi Baru**	**-**	**- Koperasi Baru**	**-**	***18 Koperasi Baru***	***251,595,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	600 Peserta	419,325,000	360 Peserta	251,595,000	120 Peserta	42,802,500	0 Peserta		- Peserta	-	0 Peserta	-	- Peserta	-	- ***Peserta***	**-**	***360 Peserta***	***251,595,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			**2,971,175,000**		**1,782,705,000**		**501,040,000**				**280,000,000**		**20,000,000**		**150,000,000**	**-**	***450,000,000***	**-**	***2,232,705,000***		***75.15%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Meningkatnya daya saing UMKM**	**50**	**2,971,175,000**	**30**	**1,782,705,000**		**501,040,000**				**280,000,000**		**20,000,000**		**150,000,000**	**-**	***450,000,000***	***30***	***2,232,705,000***	***60.00%***	***75.15%***	DINAS KOPERINDAG
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah belanja hibah Kemitraan	5 Paket	2,725,000,000	3 Paket	1,635,000,000	1 Paket	501,040,000	0 Paket		- Paket	280,000,000	0 Paket	20,000,000	1 Paket	150,000,000	***1 Paket***	***450,000,000***	***4 Paket***	***2,085,000,000***	***80.00%***	***76.51%***	DINAS KOPERINDAG
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta/ UMKM yang mengikuti Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	200 UMKM	126,437,500	120 UMKM	75,862,500	UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		UMKM		- ***UMKM***	**-**	***120 UMKM***	***75,862,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 kali	119,737,500	120 kali	71,842,500	kali		kali		kali		kali		kali		- ***kali***	**-**	***120 kali***	***71,842,500***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**0.00**	**55.88**	**-**	**3.99**	**100.00**	**29.94**	**100.00**	**89.81**					
											SR	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST***	**T**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			**107,860,000**		**64,716,000**		**15,000,000**				**-**		**-**		**15,000,000**	**-**	***15,000,000***	**-**	***79,716,000***		***73.91%***	DINAS KOPERINDAG
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Meningkatnya daya saing UMKM**	**5**	**107,860,000**	**3**	**64,716,000**		**15,000,000**				**-**		**-**		**15,000,000**	**-**	***15,000,000***	***3***	***79,716,000***	***60.00%***	***73.91%***	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	150 UMKM	107,860,000	90 UMKM	64,716,000	UMKM 30	15,000,000	UMKM 0	-	UMKM -	-	0 UMKM	-	30 UMKM	15,000,000	*30 UMKM*	*15,000,000*	*120 UMKM*	*79,716,000*	*80.00%*	*73.91%*	DINAS KOPERINDAG
											Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	100.00					
											Predikat kinerja								ST	ST					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			**768,950,000**		**461,370,000**		**150,110,000**				**42,715,035**		**99,668,415**		-	-	*142,383,450*	-	*603,753,450*		*78.52%*	DINAS KOPERINDAG
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			**768,950,000**		**461,370,000**		**150,110,000**				**42,715,035**		**99,668,415**		-	-	*142,383,450*	-	*603,753,450*		*78.52%*	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Distibusi Perdagangan	500 %	768,950,000	300 %	461,370,000	% 100	**150,110,000**	% 0	-	% -	42,715,035	15 %	99,668,415	85 %	-	*100 %*	*142,383,450*	*400 %*	*603,753,450*	*80.00%*	*78.52%*	DINAS KOPERINDAG
											Rata-rata capaian kinerja (%)								100.00	94.85					
											Predikat kinerja								ST	ST					
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Kestabilan Harga Bahan Pokok dan Barang Penting**	**33350**	**669,800,000**	**20010**	**401,880,000**		**21,417,500**			-	**7,270,000**		**3,630,000**		-	-	*10,900,000*	*20,010*	*412,780,000*	*60.00%*	*61.63%*	DINAS KOPERINDAG
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Presentase Pelaksanaan Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar dan Agen dalam tahun berjalan**	**500**	**599,300,000**	**300**	**359,580,000**		**4,055,000**				**3,640,000**		-		-	-	*3,640,000*	*300*	*363,220,000*	*60.00%*	*60.61%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Lokasi Pengendalian Harga Pokok dan barang Penting Ditingkat Agen dan Pasar Rakyat	50 Lokasi	599,300,000	30 Lokasi	359,580,000	Lokasi 3	4,055,000	Lokasi 0	-	Lokasi -	3,640,000	0 Lokasi	-	3 Lokasi	-	*3 Lokasi*	*3,640,000*	*33 Lokasi*	*363,220,000*	*66.00%*	*60.61%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kesetabilan harga barang pokok dan penting di Kabupaten Tanggamus**	**450**	**70,500,000**	**270**	**42,300,000**		**17,362,500**			-	**3,630,000**		**3,630,000**		-	-	*7,260,000*	*270*	*49,560,000*	*60.00%*	*70.30%*	DINAS KOPERINDAG
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Lokasi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (7 Pasar Pemda x 12 Bulan)	25 Lokasi	70,500,000	15 Lokasi	42,300,000	Lokasi 5	17,362,500	Lokasi 0	-	Lokasi -	3,630,000	0 Lokasi	3,630,000	2 Lokasi	-	*2 Lokasi*	*7,260,000*	*17 Lokasi*	*49,560,000*	*68.00%*	*70.30%*	DINAS KOPERINDAG
											Rata-rata capaian kinerja (%)								62.50	50.89					
											Predikat kinerja								R	R					
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			**443,827,500**		**266,296,500**		**49,742,500**			-	**8,507,900**		**4,590,000**		**5,000,000**	-	*18,097,900*	-	*284,394,400*		*64.08%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Presentase kepuasan masyarakat terhadap pelayananan perlindungan konsumen**	**400**	**443,827,500**	**240**	**266,296,500**		**49,742,500**			-	**8,507,900**		**4,590,000**		**5,000,000**	-	*18,097,900*	*240*	*284,394,400*	*60.00%*	*64.08%*	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	35 lokasi	365,352,500	21 lokasi	219,211,500	lokasi 7	38,202,500	lokasi 0	-	lokasi -	8,507,900	0 lokasi	-	3 lokasi	5,000,000	*3 lokasi*	*13,507,900*	*24 lokasi*	*232,719,400*	*68.57%*	*63.70%*	DINAS KOPERINDAG
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	110 kali	78,475,000	66 kali	47,085,000	kali 22	11,540,000	kali 0	-	kali -	-	2 kali	4,590,000	7 kali	-	*9 kali*	*4,590,000*	*75 kali*	*51,675,000*	*68.18%*	*65.85%*	DINAS KOPERINDAG
											Rata-rata capaian kinerja (%)								41.38	36.38					
											Predikat kinerja								SR	SR					
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			**1,714,062,500**		**1,028,437,500**		**262,130,000**			-			-		**260,654,000**	-	*260,654,000*	-	*1,289,091,500*		*75.21%*	DINAS KOPERINDAG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Presentase UMKM yang difasilitasi promosi melalui pameran meningkat volume usahanya melalui penjualan dan atau kerja sama**	**500**	**1,714,062,500**	**300**	**1,028,437,500**		**262,130,000**		-		-		-		**260,654,000**	-	***260,654,000***	***300***	***1,289,091,500***	***60.00%***	***75.21%***	DINAS KOPERINDAG
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	25 pameran	1,714,062,500	15 pameran	1,028,437,500	4 pameran	262,130,000	0 pameran	-	- pameran	-	0 pamera n	-	2 pamera n	260,654,000	***2 pameran***	***260,654,000***	***17 pameran***	***1,289,091,500***	***68.00%***	***75.21%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.00**	**99.44**	**50.00**	**99.44**				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**				
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			**242,575,000**		**145,545,000**		**6,220,000**		-		-		**5,890,000**		-	-	***5,890,000***	-	***151,435,000***		***62.43%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Presentase Peningkatkan volume usaha industri kecil dan menengah Kabupaten Tanggamus**	**500**	**242,575,000**	**300**	**145,545,000**		**6,220,000**		-		-		**5,890,000**		-	-	***5,890,000***	***300***	***151,435,000***	***60.00%***	***62.43%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	400 Peserta	242,575,000	240 Peserta	145,545,000	Peserta 10	6,220,000	Peserta 0	-	Peserta -	-	0 Peserta	5,890,000	10 Peserta	-	***10 Peserta***	***5,890,000***	***250 Peserta***	***151,435,000***	***62.50%***	***62.43%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**94.69**	**100.00**	**-**	**100.00**	**94.69**				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**ST'**	**ST**				
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	**Presentase Peningkatan IKM baru**	**50**	**132,175,000**	**30**	**79,305,000**		-		-		-		-		-	-	-	***30***	***79,305,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**500**	**132,175,000**	**300**	**79,305,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***79,305,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kabupaten Tanggamusdalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	200 Peserta	132,175,000	120 Peserta	79,305,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- ***Peserta***	-	***120 Peserta***	***79,305,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Presentase Peningkatan IKM yang terdaftar di SIINAS**	**50**	**107,600,000**	**30**	**64,560,000**		-		-		-		-		-	-	-	***30***	***64,560,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**	**500**	**107,600,000**	**300**	**64,560,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***64,560,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	150 Peserta	107,600,000	90 Peserta	64,560,000	Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		Peserta		- ***Peserta***	-	***90 Peserta***	***64,560,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS KOPERINDAG
											-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																- -	-	- -	-			

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
																9		10		11		12							
1	2	3						4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**18,152,017,395**	**WTP**	**10,891,210,437**	**WTP**	**1,486,174,050**	**WTP**	**665,282,075**	**WTP**	**833,080,249**	**WTP**	**862,863,539**	**WTP**	**598,348,472**	*- WTP*	*2,959,574,335*	*- WTP*	*13,850,784,772*		*76.30%*	DPMPTSP
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disususn Tepat Waktu**	**500**	**370,103,500**	**300**	**222,062,100**		**76,941,800**		**10,111,300**		**13,068,800**		**7,399,950**		**23,894,650**	-	*54,474,700*	*300*	*276,536,800*	*60.00%*	*74.72%*	DPMPTSP
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	15 Buku	71,208,500	9 Buku	42,725,100	3 Buku	14,241,700	0 Buku	5,881,500	2 Buku	1,600,000	0 Buku	-	1 Buku	270,000	*3 Buku*	*7,751,500*	*12 Buku*	*50,476,600*	*80.00%*	*70.89%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	75,090,000	3 Eksemplar Dokumen	45,054,000	1 Eksemplar Dokumen	15,625,900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	8,499,350	*1 Eksemplar Dokum*	*8,499,350*	*4 Eksemplar Dokum*	*53,553,350*	*80.00%*	*71.32%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	74,950,000	3 Eksemplar Dokumen	44,970,000	1 Eksemplar Dokumen	14,990,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,834,500	0 Eksemplar Dokumen	848,250	1 Eksemplar Dokumen	6,267,000	*1 Eksemplar Dokum*	*8,949,750*	*4 Eksemplar Dokum*	*53,919,750*	*80.00%*	*71.94%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	5 Eksemplar Dokumen	12,350,000	3 Eksemplar Dokumen	7,410,000	1 Eksemplar Dokumen	2,470,000	0 Eksemplar Dokumen	1,689,800	- Eksemplar Dokumen	780,000	1 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*1 Eksemplar Dokum*	*2,469,800*	*4 Eksemplar Dokum*	*9,879,800*	*80.00%*	*80.00%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Eksemplar Dokumen	11,254,000	3 Eksemplar Dokumen	6,752,400	1 Eksemplar Dokumen	2,250,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	2,250,800	*1 Eksemplar Dokum*	*2,250,800*	*4 Eksemplar Dokum*	*9,003,200*	*80.00%*	*80.00%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	10 Eksemplar Dokumen	104,550,000	6 Eksemplar Dokumen	62,730,000	2 Eksemplar Dokumen	23,223,200	0 Eksemplar Dokumen	2,540,000	2 Eksemplar Dokumen	7,232,400	0 Eksemplar Dokumen	4,414,200	- Eksemplar Dokumen	6,607,500	*2 Eksemplar Dokum*	*20,794,100*	*8 Eksemplar Dokum*	*83,524,100*	*80.00%*	*79.89%*	DPMPTSP
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	20,701,000	9 Eksemplar Dokumen	12,420,600	3 Eksemplar Dokumen	4,140,200	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	1,621,900	1 Eksemplar Dokumen	2,137,500	- Eksemplar Dokumen	-	*3 Eksemplar Dokum*	*3,759,400*	*12 Eksemplar Dokum*	*16,180,000*	*80.00%*	*78.16%*	DPMPTSP
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Keuanganyang disusun tepat waktu**	**5**	**14,050,026,895**	**3**	**8,430,016,137**	**1**	**667,585,100**		**559,038,451**		**657,733,897**		**653,346,925**		**418,177,936**	-	*2,288,297,209*	*3*	*10,718,313,346*	*60.00%*	*76.29%*	DPMPTSP
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	10,712,101,395	36 Bulan	6,427,260,837	12 Bulan	.865.320.640,00	3 Bulan	393,093,451	3 Bulan	786,298,087.00	3 Bulan	174,667,735	3 Bulan	296,879,036	*12 Bulan*	*1,650,938,309*	*48 Bulan*	*8,078,199,146*	*80.00%*	*75.41%*	DPMPTSP
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	190 Orang	2,956,500,000	114 Orang	1,773,900,000	38 Orang	591,300,000	9 Orang	147,825,000	9 Orang	- 146,684,189.85	10 Orang	459,959,190	10 Orang	102,000,000	*38 Orang*	*563,100,000*	*152 Orang*	*2,337,000,000*	*80.00%*	*79.05%*	DPMPTSP
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujuan/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	365,525,000	36 Kali	219,315,000	12 Kali	73,105,000	3 Kali	18,120,000	3 Kali	18,120,000.00	3 Kali	18,720,000	3 Kali	18,120,000	*12 Kali*	*73,080,000*	*48 Kali*	*292,395,000*	*80.00%*	*79.99%*	DPMPTSP
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Buku	15,900,500	3 Buku	9,540,300	1 Buku	3,180,100	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	1 Buku	1,178,900	*1 Buku*	*1,178,900*	*4 Buku*	*10,719,200*	*80.00%*	*67.41%*	DPMPTSP
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**	**5**	**250,000,000**	**3**	**150,000,000**	**1**	**30,000,000**		-		**30,000,000**		-		-	-	*30,000,000*	*3*	*180,000,000*	*60.00%*	*72.00%*	DPMPTSP
								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Stel	-	0 Stel	-	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	- *Stel*	-			DPMPTSP
								Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Penyusunan Peraturan Daerah	5 Perda	250,000,000	3 Perda	150,000,000	1 Perda	30,000,000	0 Perda	-	1 Perda	30,000,000	0 Perda	-	- Perda	-	*1 Perda*	*30,000,000*	*4 Perda*	*180,000,000*	*80.00%*	*72.00%*	DPMPTSP
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu**	**5**	**2,133,313,500**	**3**	**1,279,988,100**		**458,759,450**		**49,763,760**		**83,151,720**		**142,709,000**		**76,978,150**	-	*352,602,630*	*3*	*1,632,590,730*	*60.00%*	*76.53%*	DPMPTSP
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	347,871,500	12 Unit	208,722,900	8 Unit	103,442,050	0 Unit	18,664,840	1 Unit	18,060,000	6 Unit	50,387,000	1 Unit	1,639,000	*8 Unit*	*88,750,840*	*20 Unit*	*297,473,740*	*100.00%*	*85.51%*	DPMPTSP
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	3035 Porsi	136,575,000	1821 Porsi	81,945,000	128 Porsi	5,760,000	0 Porsi	-	- Porsi	1,260,000	31 Porsi	-	69 Porsi	3,697,650	*100 Porsi*	*4,957,650*	*1,921 Porsi*	*86,902,650*	*63.29%*	*63.63%*	DPMPTSP
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	825 Eksemplar	171,923,500	495 Eksemplar	103,154,100	165 Eksemplar	26,994,700	0 Eksemplar	17,209,500	- Eksemplar	1,570,000	120 Eksemplar	3,140,000	30 Eksemplar	3,144,500	*150 Eksemplar*	*25,064,000*	*645 Eksemplar*	*128,218,100*	*78.18%*	*74.58%*	DPMPTSP
								Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	60 Bulan	117,583,500	36 Bulan	70,550,100	12 Bulan	23,516,700	0 Bulan	10,129,420	6 Bulan	3,421,720	3 Bulan	3,312,000	3 Bulan	4,413,000	*12 Bulan*	*21,276,140*	*48 Bulan*	*91,826,240*	*80.00%*	*78.09%*	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	200 Kali	1,359,360,000	120 Kali	815,616,000	40 Kali	299,046,000	1 Kali	3,760,000	21 Kali	58,840,000	6 Kali	85,870,000	- Kali	64,084,000	*28 Kali*	*212,554,000*	*148 Kali*	*1,028,170,000*	*74.00%*	*75.64%*	DPMPTSP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah**	**5**	**42,446,000**	**3**	**25,467,600**		**8,489,200**		**-**		**-**		**-**		**8,200,000**	**-**	***8,200,000***	***3***	***33,667,600***	***60.00%***	***79.32%***	DPMPTSP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Lainnya	40 Unit	42,446,000	24 Unit	25,467,600	8 Unit	8,489,200	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	8 Unit	8,200,000	*8 Unit*	*8,200,000*	*32 Unit*	*33,667,600*	*80.00%*	*79.32%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500**	**798,027,500**	**300**	**478,816,500**		**161,094,500**		**33,891,764**		**26,358,032**		**48,261,464**		**46,583,536**	**-**	***155,094,796***	***300***	***633,911,296***	***60.00%***	***79.43%***	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	745,475,000	36 Kali	447,285,000	12 Kali	151,094,500	3 Kali	23,891,764	3 Kali	26,358,032	3 Kali	48,261,464	3 Kali	46,583,536	*12 Kali*	*145,094,796*	*48 Kali*	*592,379,796*	*80.00%*	*79.46%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	52,552,500	3 Kali	31,531,500	1 Kali	10,000,000	1 Kali	10,000,000	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*4 Kali*	*41,531,500*	*80.00%*	*79.03%*	DPMPTSP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**5**	**508,100,000**	**3**	**304,860,000**		**83,304,000**		**12,476,800**		**22,767,800**		**11,146,200**		**24,514,200**	**-**	***70,905,000***	***3***	***375,765,000***	***60.00%***	***73.95%***	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Unit	223,350,000	3 Unit	134,010,000	1 Unit	27,774,000	1 Unit	5,632,000	- Unit	11,193,250	0 Unit	-	- Unit	2,816,000	*1 Unit*	*19,641,250*	*4 Unit*	*153,651,250*	*80.00%*	*68.79%*	DPMPTSP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	15 Unit	236,850,000	9 Unit	142,110,000	3 Unit	47,370,000	1 Unit	6,034,800	- Unit	8,804,550	2 Unit	10,246,200	- Unit	21,398,200	*3 Unit*	*46,483,750*	*12 Unit*	*188,593,750*	*80.00%*	*79.63%*	DPMPTSP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	70 Unit	47,900,000	42 Unit	28,740,000	14 Unit	8,160,000	2 Unit	810,000	3 Unit	2,770,000	1 Unit	900,000	1 Unit	300,000	*7 Unit*	*4,780,000*	*49 Unit*	*33,520,000*	*70.00%*	*69.98%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5.11**	**13.14**	**11.91**	**16.99**	**40.43**	**9.62**	**28.94**	**31.06**	**86.38**	**70.80**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SD**					
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Peningkatan Keikutsertaan Pameran Investasi**	**5**	**739,218,000**	**3**	**443,530,800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***3***	***443,530,800***	***60.00%***	***60.00%***	DPMPTSP
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya promosi investasi**	**5**	**739,218,000**	**3**	**443,530,800**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***3***	***443,530,800***	***60.00%***	***60.00%***	DPMPTSP
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran Investasi	20 Kali	739,218,000	12 Kali	443,530,800	Kali		Kali		*Kali*	-	Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*12 Kali*	*443,530,800*	*60.00%*	*60.00%*	DPMPTSP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu**	**5**	**1,221,674,000**	**3**	**733,004,400**		**213,228,300**		**17,346,400**		**44,677,000**		**61,873,000**		**71,369,000**	**-**	***195,265,400***	***3***	***928,269,800***	***60.00%***	***75.98%***	DPMPTSP
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Perizinan yang terbit tepat waktu dan sesuai SOP**	**5**	**1,221,674,000**	**3**	**733,004,400**		**213,228,300**		**17,346,400**		**44,677,000**		**61,873,000**		**71,369,000**	**-**	***195,265,400***	***3***	***928,269,800***	***60.00%***	***75.98%***	DPMPTSP
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Implementasi Sistem Perizinan Terpadu melalui Online Single Submission (OSS)	60 Bulan	749,847,000	36 Bulan	449,908,200	12 Bulan	149,969,400	3 Bulan	16,200,000	3 Bulan	23,100,000	3 Bulan	35,200,000	3 Bulan	70,649,000	*12 Bulan*	*145,149,000*	*48 Bulan*	*595,057,200*	*80.00%*	*79.36%*	DPMPTSP
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Plat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	3585 Buah	89,625,000	2151 Buah	53,775,000	717 Buah	17,925,000	0 Buah	-	717 Buah	17,925,000	0 Buah	-	- Buah	-	*717 Buah*	*17,925,000*	*2,868 Buah*	*71,700,000*	*80.00%*	*80.00%*	DPMPTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	60 Bulan	382,202,000	36 Bulan	229,321,200	Bulan 12	45,333,900	Bulan 0	1,146,400	Bulan 6	3,652,000	3 Bulan	26,673,000	3 Bulan	720,000	***12 Bulan***	***32,191,400***	***48 Bulan***	***261,512,600***	***80.00%***	***68.42%***	DPMPTSP
				Rata-rata capaian kinerja (%)							**0.40**	**8.14**	**97.98**	**20.95**	**0.81**	**29.02**	**0.81**	**33.47**	**100.00**	**91.58**					
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah**	**5**	**1,630,610,000**	**3**	**978,366,000**		**326,122,000**		**-**		**125,766,568**		**25,200,000**		**171,391,024**	**-**	***322,357,592***	***3***	***1,300,723,592***	***60.00%***	***79.77%***	DPMPTSP
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**5**	**1,630,610,000**	**3**	**978,366,000**		**326,122,000**		**-**		**125,766,568**		**25,200,000**		**171,391,024**	**-**	***322,357,592***	***3***	***1,300,723,592***	***60.00%***	***79.77%***	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantaua Penanaman Modal	265 Kali	241,500,000	159 Kali	144,900,000	Kali 54	48,300,000	Kali 0	-	Kali 20	23,025,500	7 Kali	-	27 Kali	25,274,500	***54 Kali***	***48,300,000***	***213 Kali***	***193,200,000***	***80.38%***	***80.00%***	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	40 Kali	906,110,000	24 Kali	543,666,000	Kali 7	181,222,000	Kali 0	-	Kali -	54,541,068	3 Kali	24,300,000	4 Kali	98,616,524	***7 Kali***	***177,457,592***	***31 Kali***	***721,123,592***	***77.50%***	***79.58%***	DPMPTSP
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisas Pengawasan Penanaman Modal	535 Kali	483,000,000	321 Kali	289,800,000	Kali 100	96,600,000	Kali 0	-	Kali 49	48,200,000	1 Kali	900,000	50 Kali	47,500,000	***100 Kali***	***96,600,000***	***421 Kali***	***386,400,000***	***78.69%***	***80.00%***	DPMPTSP
				Rata-rata capaian kinerja (%)							**-**	**-**	**42.86**	**38.56**	**6.83**	**7.73**	**50.31**	**52.55**	**100.00**	**98.85**					
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			**234,375,880**		**140,625,528**		**55,205,176**		**3,514,200**		**19,570,000**		**6,100,000**		**5,990,000**	**-**	***35,174,200***	**-**	***175,799,728***		***75.01%***	DPMPTSP
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**234,375,880**		**140,625,528**		**55,205,176**		**3,514,200**		**19,570,000**		**6,100,000**		**5,990,000**	**-**	***35,174,200***	**-**	***175,799,728***		***75.01%***	DPMPTSP
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Cakupan Layanan Pengendaian Pelaksanaan Penaaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Investasi Tanggamus	3165 Eksemplar	234,375,880	1899 Eksemplar	140,625,528	Eksemplar 633	55,205,176	Eksemplar 0	3,514,200	Eksemplar -	19,570,000	433 Eksemplar	6,100,000	- Eksemplar	5,990,000	***433 Eksemplar***	***35,174,200***	***2,332 Eksemplar***	***175,799,728***	***73.68%***	***75.01%***	DPMPTSP
				Rata-rata capaian kinerja (%)							**-**	**6.37**	**6.77**	**35.45**	**68.40**	**11.05**	**-**	**10.85**	**75.17**	**63.72**					
				Predikat kinerja							**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**					
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA										***0.00***						- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										***0.00***						- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**5,851,075,650**	**WTP**	**3,510,645,390**	**WTP**	**1,214,327,035**	**WTP**	**474,497,662**	**WTP**	**- 195,460,212**	**WTP**	**232,792,001**	**WTP**	**415,992,553**	**- *WTP***	***927,822,004***	**- *WTP***	***4,438,467,394***		***75.86%***	DISPORA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**5**	**171,522,000**	**3**	**102,913,200**		**34,374,400**		**-**		**11,564,400**		**4,680,000**		**18,049,500**	**-**	***34,293,900***	***3***	***137,207,100***	***60.00%***	***79.99%***	DISPORA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Peruahan Renja	15 Dokumen	60,247,500	9 Dokumen	36,148,500	3 Dokumen	12,049,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	4,714,500	1 Dokumen	3,555,000	2 Dokumen	3,780,000	***3 Dokumen***	***12,049,500***	***12 Dokumen***	***48,198,000***	***80.00%***	***80.00%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	20 Dokumen	33,508,000	12 Dokumen	20,104,800	4 Dokumen	6,701,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,101,600	2 Dokumen	600,000	2 Dokumen	3,000,000	***4 Dokumen***	***6,701,600***	***16 Dokumen***	***26,806,400***	***80.00%***	***80.00%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	14,683,000	3 Dokumen	8,809,800	1 Dokumen	2,936,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	611,600	0 Dokumen	525,000	1 Dokumen	1,800,000	***1 Dokumen***	***2,936,600***	***4 Dokumen***	***11,746,400***	***80.00%***	***80.00%***	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16,144,500	3 Dokumen	9,686,700	1 Dokumen	3,298,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,228,900	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,000,000	***1 Dokumen***	***3,228,900***	***4 Dokumen***	***12,915,600***	***80.00%***	***80.00%***	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	16,494,500	3 Dokumen	9,896,700	1 Dokumen	3,298,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	398,900	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,900,000	*1 Dokumen*	*3,298,900*	*4 Dokumen*	*13,195,600*	*80.00%*	*80.00%*	DISPORA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30,444,500	3 Dokumen	18,266,700	1 Dokumen	6,088,900	0 Dokumen	-	- Dokumen	1,508,900	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4,569,500	*1 Dokumen*	*6,078,400*	*4 Dokumen*	*24,345,100*	*80.00%*	*79.97%*	DISPORA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**	**5**	**4,249,334,150**	**3**	**2,549,600,490**		**733,286,301**		**443,303,382**		**- 221,942,507**		**177,577,101**		**198,288,454**	*-*	*597,226,430*	*3*	*3,146,826,920*	*60.00%*	*74.05%*	DISPORA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	3,980,634,150	141 Pegawai	2,388,380,490	47 Pegawai	679,546,301	11 Pegawai	431,223,382	9 Pegawai	- 231,752,507	13 Pegawai	172,597,101	14 Pegawai	173,388,454	*47 Pegawai*	*545,456,430*	*188 Pegawai*	*2,933,836,920*	*80.00%*	*73.70%*	DISPORA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	268,700,000	24 Orang	161,220,000	8 Orang	53,740,000	0 Orang	12,080,000	2 Orang	9,810,000	2 Orang	4,980,000	4 Orang	24,900,000	*8 Orang*	*51,770,000*	*32 Orang*	*212,990,000*	*80.00%*	*79.27%*	DISPORA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**507,967,500**	**3**	**304,780,500**		**108,359,700**		**1,555,000**		**2,031,700**		**13,280,000**		**38,300,000**	*-*	*55,166,700*	*3*	*359,947,200*	*60.00%*	*70.86%*	DISPORA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60 Bulan	32,000,000	36 Bulan	19,200,000	12 Bulan	13,540,000	0 Bulan	-	2 Bulan	990,000	2 Bulan	990,000	8 Bulan	3,883,000	*12 Bulan*	*5,863,000*	*48 Bulan*	*25,063,000*	*80.00%*	*78.32%*	DISPORA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	25,758,500	36 Bulan	15,455,100	12 Bulan	11,843,400	0 Bulan	300,000	3 Bulan	1,041,700	5 Bulan	2,300,000	4 Bulan	8,201,700	*12 Bulan*	*11,843,400*	*48 Bulan*	*27,298,500*	*80.00%*	*105.98%*	DISPORA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	29,744,000	36 Bulan	17,846,400	12 Bulan	12,960,300	0 Bulan	1,255,000	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	11,705,300	*12 Bulan*	*12,960,300*	*48 Bulan*	*30,806,700*	*80.00%*	*103.57%*	DISPORA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	3000 Kali	420,465,000	1800 Kali	252,279,000	600 Kali	70,016,000	0 Kali	-	- Kali	-	50 Kali	9,990,000	400 Kali	14,510,000	*450 Kali*	*24,500,000*	*2,250 Kali*	*276,779,000*	*75.00%*	*65.83%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**387,800,000**	**3**	**232,680,000**		**231,416,234**		**8,328,000**		**5,821,775**		**31,971,500**		**96,180,999**	*-*	*142,302,274*	*3*	*374,982,274*	*60.00%*	*96.69%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	337,800,000	36 Bulan	202,680,000	12 Bulan	46,455,000	1 Bulan	7,628,000	- Bulan	- 3,478,225	2 Bulan	7,221,500	9 Bulan	19,032,429	*12 Bulan*	*30,403,704*	*48 Bulan*	*233,083,704*	*80.00%*	*69.00%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan, Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	50,000,000	15 Kali	30,000,000	5 Kali	184,961,234	0 Kali	700,000	1 Kali	9,300,000	1 Kali	24,750,000	3 Kali	77,148,570	*5 Kali*	*111,898,570*	*20 Kali*	*141,898,570*	*80.00%*	*283.80%*	DISPORA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**534,452,000**	**3**	**320,671,200**		**106,890,400**		**21,311,280**		**7,064,420**		**5,283,400**		**65,173,600**	*-*	*98,832,700*	*3*	*419,503,900*	*60.00%*	*78.49%*	DISPORA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	534,452,000	6 Unit	320,671,200	2 Unit	106,890,400	0 Unit	21,311,280	- Unit	7,064,420	1 Unit	5,283,400	1 Unit	65,173,600	*2 Unit*	*98,832,700*	*8 Unit*	*419,503,900*	*80.00%*	*78.49%*	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.66**	**39.07**	**2.36**	**- 16.10**	**10.96**	**19.17**	**64.22**	**34.26**	**79.20**	**76.41**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan**	**75**	**3,506,065,500**	**45**	**2,103,639,300**		**258,968,900**		**-**		**31,516,000**		**-**		**-**	*-*	*31,516,000*	*45*	*2,135,155,300*	*60.00%*	*60.90%*	DISPORA
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Terbinanya Pemuda Pelopor**	**25 Orang**	**640,791,000**	**15 Orang**	**384,474,600**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	**Orang**	**-**	*- Orang*	*-*	*15 Orang*	*384,474,600*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha	5 kali	106,815,000	3 kali	64,089,000	kali		kali		kali		kali		kali		*kali*	-	*3 kali*	*64,089,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	5 kali	307,275,000	3 kali	184,365,000	kali		kali		kali		kali		kali		*kali*	-	*3 kali*	*184,365,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	5 kali	117,057,000	3 kali	70,234,200	kali		kali		kali		kali		kali		*kali*	-	*3 kali*	*70,234,200*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5 kali	109,644,000	3 kali	65,786,400	kali		kali		kali		kali		kali		- *kali*	-	*3 kali*	*65,786,400*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota**	25	2,865,274,500	15	1,719,164,700	**5**	**258,968,900**				**31,516,000**					-	*31,516,000*	*15*	*1,750,680,700*	*60.00%*	*61.10%*	DISPORA
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	5 kali	2,865,274,500	3 kali	1,719,164,700	kali 1	258,968,900	kali 0	-	kali -	31,516,000	0 kali	218,635,400	1 kali	3,500,000	*1 kali*	*253,651,400*	*4 kali*	*1,972,816,100*	*80.00%*	*68.85%*	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	-	**12.17**	-	-	**16.67**	-	16.67	12.17					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah Atlet Berprestasi**	**15 Orang**	**10,752,695,000**	**9 Orang**	**6,451,617,000**	**Orang**	**1,936,975,200**	**Orang**	**-**	*Orang*	**491,747,400**		**221,037,150**		**309,659,000**	- *Orang*	*1,022,443,550*	*9 Orang*	*7,474,060,550*	*60.00%*	*69.51%*	DISPORA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan Atlet yang Berprestasi**	**5**	**700,000,000**	**3**	**420,000,000**		**4,927,400**		**-**		**3,197,400**		**1,730,000**		**-**	-	*4,927,400*	*3*	*424,927,400*	*60.00%*	*60.70%*	DISPORA
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	700,000,000	9 Cabang Olahraga	420,000,000	3 Cabang Olahraga	4,927,400	0 Cabang Olahraga	-	- Cabang Olahraga	3,197,400	Cabang Olahraga	1,730,000	3 Cabang Olahraga	-	*3 Cabang Olahraga*	*4,927,400*	*12 Cabang Olahraga*	*424,927,400*	*80.00%*	*60.70%*	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Peningkatan Atlet Berprestasi**	**5**	**400,000,000**	**3**	**240,000,000**		**123,868,800**		**-**		**-**		**19,307,150**		**3,260,000**	-	*22,567,150*	*3*	*262,567,150*	*60.00%*	*65.64%*	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	15 Cabang Olahraga	250,000,000	9 Cabang Olahraga	150,000,000	3 Cabang Olahraga	123,868,800	0 Cabang Olahraga	-	- Cabang Olahraga	-	1 Cabang Olahraga	19,307,150	- Cabang Olahraga	3,260,000	*1 Cabang Olahraga*	*22,567,150*	*10 Cabang Olahraga*	*172,567,150*	*66.67%*	*69.03%*	DISPORA
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Koordinasi dan Sikronisasi Peyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	10 Kali	150,000,000	6 Kali	90,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*6 Kali*	*90,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			**7,650,000,000**		**4,590,000,000**		**1,477,640,000**		**-**		**235,000,000**		**200,000,000**		**229,410,000**	-	*664,410,000*	-	*5,254,410,000*		*68.69%*	DISPORA
			Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah Persentase Hibah yang tersalurkan	500 %	7,650,000,000	300 %	4,590,000,000	% 100	1,477,640,000	% 0	-	% 15.36	235,000,000	14.64 %	200,000,000	70.00 %	229,410,000	*100 %*	*664,410,000*	*400 %*	*5,254,410,000*	*80.00%*	*68.69%*	DISPORA
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase peningkatan Atlet Berprestasi**	**5**	**2,002,695,000**	**3**	**1,201,617,000**		**330,539,000**		**-**		**253,550,000**		**-**		**76,989,000**	-	*330,539,000*	*3*	*1,532,156,000*	*60.00%*	*76.50%*	DISPORA
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Sepeda Santai)	5 Event	350,000,000	3 Event	210,000,000	Event		Event		Event		Event		Event	- *Event*	-	*3 Event*	*210,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	DISPORA
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	5 Gedung	1,652,695,000	3 Gedung	991,617,000	1 Gedung	330,539,000	0 Gedung	-	- Gedung	253,550,000	0 Gedung	-	1 Gedung	76,989,000	*1 Gedung*	*330,539,000*	*4 Gedung*	*1,322,156,000*	*80.00%*	*80.00%*	DISPORA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	-	-	**14.36**	**25.39**	**14.62**	**11.41**	**69.16**	**15.99**	98.13	52.79					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST'	R					
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**18,332,727,615**	**WTP**	**10,999,636,569**	**WTP**	**3,858,149,187**	**WTP**	**643,357,062**	**WTP**	**1,045,868,631**	**WTP**	**727,728,450**	**WTP**	**719,564,670**	- *WTP*	*3,136,518,813*	- *WTP*	*14,136,155,382*		*77.11%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**422,275,500**	**3**	**253,365,300**		**80,168,900**		**10,800,000**		**24,140,000**		**30,960,000**		**39,960,000**	-	*105,860,000*	*3*	*359,225,300*	*60.00%*	*85.07%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	200 Dokumen	184,100,000	120 Dokumen	110,460,000	40 Dokumen	42,935,400	10 Dokumen	10,800,000	15 Dokumen	22,040,000	0 Dokumen	28,860,000	15 Dokumen	33,280,000	*40 Dokumen*	*94,980,000*	*160 Dokumen*	*205,440,000*	*80.00%*	*111.59%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	25 Dokumen	42,100,000	15 Dokumen	25,260,000	5 Dokumen	8,420,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,100,000	0 Dokumen	2,100,000	4 Dokumen	5,700,000	*5 Dokumen*	*9,900,000*	*20 Dokumen*	*35,160,000*	*80.00%*	*83.52%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		25 Dokumen	24,100,000	15 Dokumen	14,460,000	5 Dokumen	4,160,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	980,000	*5 Dokumen*	*980,000*	*20 Dokumen*	*15,440,000*	*80.00%*	*64.07%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	37,600,000	3 Dokumen	22,560,000	1 Dokumen	4,899,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*3 Dokumen*	*22,560,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	25,025,000	3 Dokumen	15,015,000	1 Dokumen	5,870,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*3 Dokumen*	*15,015,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaa	30 Dokumen	59,150,000	18 Dokumen	35,490,000	6 Dokumen	7,769,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*18 Dokumen*	*35,490,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	30 Dokumen	50,200,500	18 Dokumen	30,120,300	6 Dokumen	6,114,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- *Dokumen*	-	*18 Dokumen*	*30,120,300*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia**	**5**	**14,396,450,515**	**3**	**8,637,870,309**		**3,132,816,887**		**600,962,782**		**886,175,756**		**639,768,622**		**631,372,323**	-	*2,758,279,483*	*3*	*11,396,149,792*	*60.00%*	*79.16%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	10,606,572,015	60 Orang	6,363,943,209	20 Orang	2,359,373,787	5 Orang	431,223,382	5 Orang	700,694,631	5 Orang	465,407,897	5 Orang	458,504,673	*20 Orang*	*2,055,830,583*	*80 Orang*	*8,419,773,792*	*80.00%*	*79.38%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Tugas ASN	195 Orang	3,245,931,000	117 Orang	1,947,558,600	39 Orang	655,186,200	11 Orang	157,659,400	9 Orang	158,400,000	10 Orang	157,100,000	9 Orang	155,800,000	*39 Orang*	*628,959,400*	*156 Orang*	*2,576,518,000*	*80.00%*	*79.38%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Penglola Administrasi	50 Orang	543,947,500	30 Orang	326,368,500	10 Orang	118,256,900	1 Orang	12,080,000	8 Orang	27,081,125	0 Orang	17,260,725	1 Orang	17,067,650	*10 Orang*	*73,489,500*	*40 Orang*	*399,858,000*	*80.00%*	*73.51%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-		**25,800,000**				-					-	-	-	-			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta atribut Kelengkapannya	295 Buah	-	177 Buah	-	59 Buah	25,800,000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	-	- Buah	-	- *Buah*	-	*177 Buah*	-	*60.00%*		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5**	**1,219,963,600**	**3**	**731,978,160**	**1**	**217,239,800**		**1,955,000**		**24,560,355**		**11,124,625**		**8,345,400**	-	*45,985,380*	*3*	*777,963,540*	*60.00%*	*63.77%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	30 Unit	453,046,600	18 Unit	271,827,960	6 Unit	70,730,000	0 Unit	400,000	- Unit	12,880,000	0 Unit	1,730,000	4 Unit	2,270,150	*4 Unit*	*17,280,150*	*22 Unit*	*289,108,110*	*73.33%*	*63.81%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum kantor	1500 Porsi	51,750,000	900 Porsi	31,050,000	300 Porsi	18,400,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	2,310,000	100 Porsi	-	*100 Porsi*	*2,310,000*	*1,000 Porsi*	*33,360,000*	*66.67%*	*64.46%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak	100 Eksemplar	34,710,000	60 Eksemplar	20,826,000	20 Eksemplar	30,304,900	0 Eksemplar	300,000	1 Eksemplar	700,000	0 Eksemplar	1,000,000	9 Eksemplar	-	*10 Eksemplar*	*2,000,000*	*70 Eksemplar*	*22,826,000*	*70.00%*	*65.76%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis kantor dan Bahan Material Lainnya Untuk Keperluan Kantor	100 Buah	125,207,000	60 Buah	75,124,200	20 Buah	30,304,900	0 Buah	1,255,000	1 Buah	4,896,355	0 Buah	3,354,625	9 Buah	3,735,250	*10 Buah*	*13,241,230*	*70 Buah*	*88,365,430*	*70.00%*	*70.58%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Luar Daerah dalam Ranga konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan Pemerintah dareah	375 Kali	555,250,000	225 Kali	333,150,000	Kali 75	67,500,000	Kali 0	-	Kali -	6,084,000	0 Kali	2,730,000	45 Kali	2,340,000	*45 Kali*	*11,154,000*	*270 Kali*	*344,304,000*	*72.00%*	*62.01%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**664,495,000**	**3**	**398,697,000**		**123,943,000**		**8,328,000**		**20,295,620**		**16,080,428**		**15,872,747**	*-*	*60,576,795*	*3*	*459,273,795*	*60.00%*	*69.12%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	505,010,000	36 Bulan	303,006,000	Bulan 12	104,706,000	Bulan 1	7,628,000	Bulan 1	19,995,620	1 Bulan	14,265,128	9 Bulan	13,896,747	*12 Bulan*	*55,785,495*	*48 Bulan*	*358,791,495*	*80.00%*	*71.05%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	159,485,000	Bulan	95,691,000	Bulan 12	19,237,000	Bulan 1	700,000	Bulan -	300,000	0 Bulan	1,815,300	11 Bulan	1,976,000	*12 Bulan*	*4,791,300*	*12 Bulan*	*100,482,300*		*63.00%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,629,543,000**	**300**	**977,725,800**		**278,180,600**		**21,311,280**		**90,696,900**		**29,794,775**		**24,014,200**	*-*	*165,817,155*	*300*	*1,143,542,955*	*60.00%*	*70.18%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Meningkatnya penyediiaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	500 %	199,676,000	300 %	119,805,600	% 100	39,935,200	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	*- %*	*-*	*300 %*	*119,805,600*	*60%*		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	50 Unit	1,385,868,000	30 Unit	119,805	Unit 10	189,510,400	Unit 0	21,311,280	Unit 1	42,191,900	0 Unit	29,794,775	9 Unit	24,014,200	*10 Unit*	*117,312,155*	*40 Unit*	*117,431,960*	*80.00%*	*8.47%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Gedung	5 Unit	243,675,000	3 Unit	146,205,000	Unit 1	48,735,000	Unit 0	-	Unit -	48,505,000	0 Unit	-	1 Unit	-	*1 Unit*	*48,505,000*	*4 Unit*	*194,710,000*	*80.00%*	*79.91%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**3.87**	**16.68**	**5.61**	**27.11**	**2.14**	**18.86**	**31.51**	**18.65**	**43.12**	**81.30**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Peningkatan Perpustakaan Yang Dibin**	**40**	**3,867,190,000**	**24**	**2,320,314,000**		**757,558,000**		**-**		**41,212,500**		**86,290,450**		**331,891,000**	*-*	*459,393,950*	*24*	*2,779,707,950*	*60.00%*	*71.88%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan jumlah Perpustakaan Pekon di Kabupaten Tanggamus**	**125**	**1,117,190,000**	**75**	**670,314,000**		**205,938,000**		**-**		**38,392,500**		**85,590,450**		**12,308,800**	*-*	*136,291,750*	*75*	*806,605,750*	*60.00%*	*72.20%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Elektronik	3750 Orang	221,850,000	2250 Orang	133,110,000	Orang 750	44,370,000	Orang 0	-	Orang -	2,020,000	0 Orang	42,021,000	750 Orang	-	*750 Orang*	*44,041,000*	*3,000 Orang*	*177,151,000*	*80.00%*	*79.85%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Perpuskanaan Tingkat Kabupaten Kota	30 Perpustakaan	169,355,000	18 Perpustakaan	101,613,000	6 Perpustakaan	27,521,000	0 Perpustakaan	-	- Perpustakaan	2,694,500	0 Perpustakaan	22,779,450	6 Perpustakaan	-	*6 Perpustakaan*	*25,473,950*	*24 Perpustakaan*	*127,086,950*	*80.00%*	*75.04%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Antologi	500 Eksemplar	195,950,000	300 Eksemplar	117,570,000	100 Eksemplar	38,390,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	1,010,000	57 Eksemplar	19,780,000	43 Eksemplar	12,308,800	*100 Eksemplar*	*33,098,800*	*400 Eksemplar*	*150,668,800*	*80.00%*	*76.89%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perpustakaan Pekon	150 Pekon	145,627,000	90 Pekon	87,376,200	Pekon 30	26,425,400	Pekon 0	-	Pekon -	1,010,000	3 Pekon	-	27 Pekon	-	*30 Pekon*	*1,010,000*	*120 Pekon*	*88,386,200*	*80.00%*	*60.69%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	30 Perpustakaan	384,408,000	18 Perpustakaan	230,644,800	6 Perpustakaan	69,231,600	0 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	31,658,000	1 Perpustakaan	1,010,000	1 Perpustakaan	-	*3 Perpustakaan*	*32,668,000*	*21 Perpustakaan*	*263,312,800*	*70.00%*	*68.50%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan sarana perpustakaan**	**125**	**2,750,000,000**	**75**	**1,650,000,000**		**551,620,000**		**-**		**2,820,000**		**700,000**		**319,582,200**	*-*	*323,102,200*	*75*	*1,973,102,200*	*60.00%*	*71.75%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasana	1155 Unit	2,750,000,000	693 Unit	1,650,000,000	Unit 20	551,620,000	Unit 0	-	Unit -	2,820,000	0 Unit	700,000	10 Unit	319,582,200	*10 Unit*	*323,102,200*	*703 Unit*	*1,973,102,200*	*60.87%*	*71.75%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**0.11**	**5.44**	**6.69**	**11.39**	**91.78**	**43.81**	**98.57**	**60.64**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**ST'**	**R**					
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Peningkatan Arsip Yang Di Kelola Melalui JIKN**	**35**	**502,835,000**	**21**	**301,701,000**		**62,664,250**		**-**		**9,165,000**		**8,700,000**		**-**	*-*	*17,865,000*	*21*	*319,566,000*	*60.00%*	*63.55%*	DINAS PERPUSTAKAAN DAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis**	**5**	**278,176,250**	**3**	**166,905,750**		**29,785,250**		**-**		**9,165,000**		**8,700,000**		**-**	**-**	**17,865,000**	**3**	**184,770,750**	**60.00%**	**66.42%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	128,126,250	3 %	76,875,750	% 100	19,375,250	% 0	-	% 16.18	4,145,000	25.91 %	4,010,000	57.91 %	-	**100 %**	**8,155,000**	**103 %**	**85,030,750**	**20.60%**	**66.36%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Dinmis	500 %	150,050,000	3 %	90,030,000	% 100	10,410,000	% 0	-	% 16.73	5,020,000	76.55 %	4,690,000	6.72 %	-	**100 %**	**9,710,000**	**103 %**	**99,740,000**	**20.60%**	**66.47%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Perangkat daerah yang mengelola Arsip Statis**	**5**	**104,385,000**	**3**	**62,631,000**		**32,879,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**3**	**62,631,000**	**60.00%**	**60.00%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Penyerahan arsip Statis dari pencipta arsip (OPD) dan akuisisi oleh lembaga kearsipan daerah (Dinas Perpustakaan)	500 %	104,385,000	3 %	62,631,000	% 100	32,879,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	**- %**	**-**	**3 %**	**62,631,000**	**0.60%**	**60.00%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**25**	**120,273,750**	**15**	**72,164,250**	**5**	**-**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**15**	**72,164,250**	**60.00%**	**60.00%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	500 %	120,273,750	300 %	72,164,250	%		%	-	%						**- %**	**-**	**300 %**	**72,164,250**	**60.00%**	**60.00%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**10.79**	**14.63**	**33.59**	**13.88**	**21.19**	**-**	**65.57**	**28.51**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**				
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Dokumen/Arsip Daerah Yang Di Selamatkan**	**385**	**145,210,000**	**231**	**87,126,000**		**-**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	**231**	**87,126,000**	**60.00%**	**60.00%**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	**Persentase Perangkat daerah yang melakukan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**5**	**145,210,000**	**3**	**87,126,000**			**0**		***0.00***	**-**		**-**		**-**	**- -**	**-**	***3*** **-**	***87,126,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Persentase Penetapan Arsip OPD yang akan dimusnahkan	500 %	145,210,000	300 %	87,126,000			0		***0.00***	-					**- -**	**-**	***300*** **-**	***87,126,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPDA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**-**	**0.00**	**-**		**-**		**-**	**-**	**-**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			DINAS PERIKANAN																**- -**	**-**	**- -**	**-**			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERIKANAN																**- -**	**-**	**- -**	**-**			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**20,542,793,645**	**3 WTP**	**12,325,676,187**	**WTP**	**3,973,340,457**	**WTP**	**679,728,991**	***WTP***	**1,100,679,450**		**738,039,733**		**731,354,706**	**- *WTP***	***3,249,802,880***	***3 WTP***	***15,575,479,067***	***60.00%***	***75.82%***	DINAS PERIKANAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan**	**35 Kegiatan**	**137,650,000**	**21 Kegiatan**	**82,590,000**	**Kegiatan**	**27,530,000**	**Kegiatan**	**750,000**	**Kegiatan**	**5,420,000**	0 Kegiatan	7,710,000	- **Kegiatan**	**6,960,000**	**- *Kegiatan***	***20,840,000***	***21 Kegiatan***	***103,430,000***	***60.00%***	***75.14%***	DINAS PERIKANAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	60 Eksemplar Dokumen	110,650,000	36 Eksemplar Dokumen	66,390,000	20 Eksemplar Dokumen	22,130,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	4,670,000	12 Eksemplar Dokumen	(3,920,000)	3 Eksemplar Dokumen	6,960,000	***15 Eksemplar Dokum***	***7,710,000***	***51 Eksemplar Dokum***	***74,100,000***	***85.00%***	***66.97%***	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***12 Eksemplar Dokum***	***750,000***	***48 Eksemplar Dokum***	***3,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***36 Eksemplar Dokum***	***2,250,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***12 Eksemplar Dokum***	***750,000***	***48 Eksemplar Dokum***	***3,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perikanan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*36 Eksemplar Dokum*	*2,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERIKANAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	60 Eksemplar Dokumen	3,750,000	36 Eksemplar Dokumen	2,250,000	12 Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*36 Eksemplar Dokum*	*2,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERIKANAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	60 Eksemplar Dokumen	8,250,000	36 Eksemplar Dokumen	4,950,000	12 Eksemplar Dokumen	1,650,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*36 Eksemplar Dokum*	*4,950,000*	*60.00%*	*60.00%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**	**15 Kegiatan**	**16,570,122,300**	**9 Kegiatan**	**9,942,073,380**	**Kegiatan**	**3,207,612,438**	**Kegiatan**	**631,253,741**	**Kegiatan**	**880,545,428**	**Kegiatan**	**636,748,707**	**Kegiatan**	**655,750,923**	*- Kegiatan*	*2,804,298,799*	*9 Kegiatan*	*12,746,372,179*	*60.00%*	*76.92%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang	12,574,022,300	78 Orang	7,544,413,380	26 Orang	2,397,489,938	6 Orang	451,758,741	6 Orang	683,330,428	6 Orang	466,813,707	8 Orang	468,265,923	*26 Orang*	*2,070,168,799*	*104 Orang*	*9,614,582,179*	*80.00%*	*76.46%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	210 Orang	3,433,950,000	126 Orang	2,060,370,000	42 Orang	686,790,000	10 Orang	164,495,000	10 Orang	175,705,000	11 Orang	157,685,000	11 Orang	165,685,000	*42 Orang*	*663,570,000*	*168 Orang*	*2,723,940,000*	*80.00%*	*79.32%*	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Orang	562,150,000	75 Orang	337,290,000	25 Orang	123,332,500	6 Orang	15,000,000	6 Orang	21,510,000	5 Orang	12,250,000	8 Orang	21,800,000	*25 Orang*	*70,560,000*	*100 Orang*	*407,850,000*	*80.00%*	*72.55%*	DINAS PERIKANAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Dareah yang disusun dengan baik**	**25 Kegiatan**	**820,518,200**	**15 Kegiatan**	**492,310,920**	**Kegiatan**	**172,463,190**	**Kegiatan**	**20,379,300**	**Kegiatan**	**26,572,326**	**Kegiatan**	**11,295,500**	**Kegiatan**	**18,953,500**	*- Kegiatan*	*77,200,626*	*15 Kegiatan*	*569,511,546*	*60.00%*	*69.41%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Unit	150,565,950	21 Unit	90,339,570	7 Unit	55,183,190	0 Unit	-	- Unit	9,460,000	0 Unit	4,020,000	3 Unit	1,953,000	*3 Unit*	*15,433,000*	*24 Unit*	*105,772,570*	*68.57%*	*70.25%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	7000 Kotak	92,825,000	4200 Kotak	55,695,000	1400 Kotak	14,265,000	350 Kotak	528,000	- 200 Kotak	528,000	150 Kotak	1,556,000	700 Kotak	3,058,000	*1,000 Kotak*	*5,670,000*	*5,200 Kotak*	*61,365,000*	*74.29%*	*66.11%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	3445 Eksemplar	108,418,750	2067 Eksemplar	65,051,250	689 Eksemplar	18,421,000	172 Eksemplar	10,904,300	- 100 Eksemplar	2,595,826	100 Eksemplar	1,519,500	178 Eksemplar	1,000,000	*350 Eksemplar*	*16,019,626*	*2,417 Eksemplar*	*81,070,876*	*70.16%*	*74.78%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	16945 Buah	165,423,500	10167 Buah	99,254,100	3389 Buah	23,937,000	847 Buah	8,947,000	- 400 Buah	8,078,500	400 Buah	-	2,453 Buah	6,909,500	*3,300 Buah*	*23,935,000*	*13,467 Buah*	*123,189,100*	*79.47%*	*74.47%*	DINAS PERIKANAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	400 Kali	303,285,000	240 Kali	181,971,000	80 Kali	60,657,000	0 Kali	-	5 Kali	5,910,000	25 Kali	4,200,000	40 Kali	6,033,000	*70 Kali*	*16,143,000*	*310 Kali*	*198,114,000*	*77.50%*	*65.32%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**	**10 Kegiatan**	**577,521,145**	**6 Kegiatan**	**346,512,687**	**2 Kegiatan**	**118,804,229**	**Kegiatan**	**6,111,950**	**Kegiatan**	**42,182,096**	**Kegiatan**	**10,402,726**	**Kegiatan**	**5,156,283**	*- Kegiatan*	*63,853,055*	*6 Kegiatan*	*410,365,742*	*60.00%*	*71.06%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	487,001,145	36 Bulan	292,200,687	12 Bulan	108,200,229	3 Bulan	6,111,950	3 Bulan	31,578,096	2 Bulan	10,402,726	4 Bulan	5,156,283	*12 Bulan*	*53,249,055*	*48 Bulan*	*345,449,742*	*80.00%*	*70.93%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	90,520,000	36 Bulan	54,312,000	12 Bulan	10,604,000	0 Bulan	-	6 Bulan	10,604,000	1 Bulan	-	5 Bulan	-	*12 Bulan*	*10,604,000*	*48 Bulan*	*64,916,000*	*80.00%*	*71.71%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**20 Kegiatan**	**2,436,982,000**	**12 Kegiatan**	**1,462,189,200**	**Kegiatan**	**446,930,600**	**Kegiatan**	**21,234,000**	**Kegiatan**	**145,959,600**	**Kegiatan**	**71,882,800**	**Kegiatan**	**44,534,000**	*- Kegiatan*	*283,610,400*	*12 Kegiatan*	*1,745,799,600*	*60.00%*	*71.64%*	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	15 Unit	418,532,000	9 Unit	251,119,200	Unit 3	78,074,400	Unit 0	11,264,000	Unit -	11,264,000	0 Unit	11,264,000	3 Unit	14,877,200	*3 Unit*	*48,669,200*	*12 Unit*	*299,788,400*	*80.00%*	*71.63%*	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan baik	135 Unit	1,817,200,000	81 Unit	1,090,320,000	Unit 27	328,606,200	Unit 0	9,970,000	Unit -	124,695,600	0 Unit	39,508,800	27 Unit	29,656,800	*27 Unit*	*203,831,200*	*108 Unit*	*1,294,151,200*	*80.00%*	*71.22%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dengan baik	60 Bulan	47,300,000	36 Bulan	28,380,000	Bulan 12	9,460,000	Bulan 0	-	Bulan -	-	9 Bulan	730,000	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*730,000*	*48 Bulan*	*29,110,000*	*80.00%*	*61.54%*	DINAS PERIKANAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara dengan Baik	10 Unit	153,950,000	6 Unit	92,370,000	Unit 2	30,790,000	Unit 0	-	Unit -	10,000,000	0 Unit	20,380,000	2 Unit	-	*2 Unit*	*30,380,000*	*8 Unit*	*122,750,000*	*80.00%*	*79.73%*	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**24.16**	**17.11**	**-11.20**	**27.70**	**12.39**	**18.57**	**59.24**	**18.41**	**84.59**	**81.79**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**10**	**2,678,595,000**	**6**	**1,607,157,000**		**417,294,300**		**-**		**4,286,500**		**314,028,000**		**76,984,800**	**-**	***395,299,300***	***6***	***2,002,456,300***	***60.00%***	***74.76%***	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah**	**5 Kegiatan**	**2,145,000,000**	**3 Kegiatan**	**1,287,000,000**	**Kegiatan**	**329,500,000**	**Kegiatan**	**-**	**Kegiatan**	**-**	**Kegiatan**	**314,028,000**	**Kegiatan**	**7,500,000**	**- Kegiatan**	***321,528,000***	***3 Kegiatan***	***1,608,528,000***	***60.00%***	***74.99%***	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Peningkatan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2680 Unit	2,145,000,000	1608 Unit	1,287,000,000	Unit 536	329,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	314,028,000	500 Unit	7,500,000	***500 Unit***	***321,528,000***	***2,108 Unit***	***1,608,528,000***	***78.66%***	***74.99%***	DINAS PERIKANAN
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil yang menjadi Kewenangan Daerah**	**5 Kegiatan**	**533,595,000**	**3 Kegiatan**	**320,157,000**	**Kegiatan 1**	**87,794,300**	**Kegiatan**	**4,286,500**	**Kegiatan**	**4,286,500**	**Kegiatan**		**Kegiatan**		**- Kegiatan**	***4,286,500***	***3 Kegiatan***	***324,443,500***	***60.00%***	***60.80%***	**DINAS PERIKANAN**
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan / Jaminan Jiwa Keselamatan Nelayan	1900 Orang	533,595,000	1140 Orang	320,157,000	Orang 380	87,794,300	Orang 0	-	Orang -	4,286,500	0 Orang	-	350 Orang	69,484,800	***350 Orang***	***73,771,300***	***1,490 Orang***	***393,928,300***	***78.42%***	***73.83%***	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-						-					-	-	-	-			DINAS PERIKANAN
			Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal PerikananBerukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Penangkapan Ikan	150 Orang	-	90 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- *Orang*	-	*90 Orang*	-			DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**-**	**0.00**	**1.03**	**0.00**	**75.25**	**92.69**	**18.45**	**92.69**	**94.73**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**ST**	**SR**	**ST'**	**ST**					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**10**	**3,117,350,000**	**6**	**1,870,410,000**		**612,725,400**		**-**		**101,667,950**		**12,097,000**		**26,800,000**	**-**	***140,564,950***	***6***	***2,010,974,950***	***60.00%***	***64.51%***	DINAS PERIKANAN
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**15 Kegiatan**	**1,314,850,000**	**9 Kegiatan**	**788,910,000**	**Kegiatan**	**152,725,400**	**Kegiatan**	**-**	**Kegiatan**	**10,310,000**	**Kegiatan**	**12,097,000**	**Kegiatan**	**26,800,000**	**- Kegiatan**	***49,207,000***	***9 Kegiatan***	***838,117,000***	***60.00%***	***63.74%***	DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Cara Berbudidaya Ikan Yang Baik	1225000 Ekor	1,000,000,000	735000 Ekor	600,000,000	Ekor 245000	92,295,400	Ekor 0	-	Ekor -	2,540,000	0 Ekor	2,540,000	200,000 Ekor	26,800,000	###### Ekor	31,880,000	935,000 Ekor	631,880,000	76.33%	63.19%	DINAS PERIKANAN
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	500 %	175,000,000	300 %	105,000,000	% 100	35,000,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	300 %	105,000,000	60.00%	60.00%	DINAS PERIKANAN
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Balai Benih Ikan	10 Paket	139,850,000	6 Paket	83,910,000	Paket 2	25,430,000	Paket 0	-	Paket -	7,770,000	0 Paket	9,557,000	2 Paket	-	2 Paket	17,327,000	8 Paket	101,237,000	80.00%	72.39%	DINAS PERIKANAN
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	5 Kegiatan	1,802,500,000	3 Kegiatan	1,081,500,000	Kegiatan	**460,000,000**	Kegiatan		Kegiatan	**91,357,950**	Kegiatan		Kegiatan		- Kegiatan	91,357,950	3 Kegiatan	1,172,857,950	60.00%	65.07%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Prasarana Pembudidaya Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah	30 Paket	1,802,500,000	18 Paket	1,081,500,000	Paket 6	460,000,000	Paket 0	-	Paket -	91,357,950	0 Paket	355,916,055	6 Paket	7,950,000	6 Paket	455,224,005	24 Paket	1,536,724,005	80.00%	85.26%	DINAS PERIKANAN
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang mengikuti kegiatan yang mendukung peningkatan produksi ikan	175 Orang	-	105 Orang	-	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		- Orang	-	105 Orang	-			DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	**16.59**	**0.00**	**1.97**	**81.60**	**4.37**	**81.60**	**22.94**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**T**	**SR**					
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**100**	**458,050,000**	**60**	**274,830,000**		**67,510,000**				**10,350,000**		-		**3,810,000**	-	**14,160,000**	**60**	**288,990,000**	**60.00%**	**63.09%**	DINAS PERIKANAN
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**5 Kegiatan**	**252,000,000**	**3 Kegiatan**	**151,200,000**	**Kegiatan**	**26,300,000**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**10,350,000**	**Kegiatan**	-	**Kegiatan**	**3,810,000**	- Kegiatan	**14,160,000**	3 Kegiatan	**165,360,000**	**60.00%**	**65.62%**	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	45 Paket	252,000,000	27 Paket	151,200,000	Paket 9	26,300,000	Paket 0	-	Paket -	10,350,000	0 Paket	-	5 Paket	3,810,000	5 Paket	14,160,000	32 Paket	165,360,000	71.11%	65.62%	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah**	10 Kegiatan	206,050,000	6 Kegiatan	123,630,000	Kegiatan	**41,210,000**	Kegiatan		Kegiatan	-	Kegiatan		Kegiatan		- Kegiatan	-	6 Kegiatan	123,630,000	60.00%	60.00%	DINAS PERIKANAN
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Intensifikasi dan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan yang menjadi Kewenangan Daerah	220 Orang	89,000,000	132 Orang	53,400,000	Orang 44	17,800,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	132 Orang	53,400,000	60.00%	60.00%	DINAS PERIKANAN
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) / Intervensi Pencegahan Stunting yang menjadi Kewenangan Daerah	130 Orang	117,050,000	78 Orang	70,230,000	Orang 26	23,410,000	Orang 0	-	Orang -	-	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	78 Orang	70,230,000	60.00%	60.00%	DINAS PERIKANAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	-	**0.00**	**15.33**	**0.00**	-	**6.33**	**5.64**	**6.33**	**20.97**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Predikat kinerja								**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**						
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Persentase Kelompok Kesenian dan Budaya Lokal ya Difasilitasi Pengembangan**		**5,698,140,000**		**3,418,884,000**		**883,500,000**		-	**101,707,950**		**106,142,050**		**75,000,000**	-	***282,850,000***	-	***3,701,734,000***		***64.96%***	DINAS PARBUD
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**5**	**4,787,500,000**	**3**	**2,872,500,000**		**767,500,000**		-	**91,357,950**		**106,142,050**		**75,000,000**	-	***272,500,000***	***3***	***3,145,000,000***	***60.00%***	***65.69%***	DINAS PARBUD
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Hibah Keuangan	5 Paket	4,787,500,000	3 Paket	2,872,500,000	Paket 1	767,500,000	Paket 0	-	***Paket*** -	91,357,950	0 Paket	106,142,050	1 Paket	75,000,000	***1 Paket***	***272,500,000***	***4 Paket***	***3,145,000,000***		***65.69%***	DINAS PARBUD
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase meningkatnya pemajuan lembaga adat**	5	910,640,000	3	546,384,000		**116,000,000**		-	**10,350,000**						-	***10,350,000***	***3***	***556,734,000***	***60.00%***	***61.14%***	DINAS PARBUD
			Pelindunga n, Pengemban gan, Pemanfaata n Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, nPgemanfaatan Objek nPyeamajuan Lembaga Adat	5 Kali	910,640,000	3 Kali	546,384,000	Kali **1**	116,000,000	Kali 0	-	***Kali*** -	10,350,000	0 Kali	62,620,000	1 Kali	3,030,000	***1 Kali***	***76,000,000***	***4 Kali***	***622,384,000***	***80.00%***	***68.35%***	DINAS PARBUD
			Rata-rata capaian kinerja (%)								**0.00**	-	**0.00**	**11.51**	**0.00**	**12.01**	**100.00**	**8.49**	**100.00**	**32.01**					
			Predikat kinerja								**SR**		**SR**		**SR**		**ST**		**ST'**						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Persentase Kelompok Kesenian Tradisional yang Difasilitasi Pengembangan**	10	2,234,254,000	6	1,340,552,400		264,022,550				-		-		162,006,200	-	***162,006,200***	***6***	***1,502,558,600***	***60.00%***	***67.25%***	DINAS PARBUD
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dibina**	**450**	**2,234,254,000**	**270**	**1,340,552,400**		**264,022,550**				**-**		**-**		**162,006,200**	-	***162,006,200***	***270***	***1,502,558,600***	***60.00%***	***67.25%***	DINAS PARBUD
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradision	Jumlah Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yKaesenian Tradisional	250 SDM	2,034,254,000	150 SDM	1,220,552,400	SDM 50	261,022,550	SDM 0	-	SDM -	-	0 SDM	-	50 SDM	162,006,200	***50 SDM***	***162,006,200***	***200 SDM***	***1,382,558,600***	***80.00%***	***67.96%***	DINAS PARBUD
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga yKaesenian Tradisional	250 Kesenian Tradiional	200,000,000	150 Kesenian Tradiional	120,000,000	50 Kesenian Tradiional	3,000,000	0 Kesenian Tradiional	-	Kesenian - Tradiional	-	0 Kesenian Tradiional	-	- Kesenian Tradiional	-	***- Kesenian Tradiional***	-	***150 Kesenian Tradiional***	***120,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Rata-rata capaian kinerja (%)								**0.00**	-	**0.00**	-	**0.00**	-	**50.00**	**61.36**	**50.00**	**61.36**					
			Predikat kinerja								**SR**		**SR**		**SR**		**SR**	**R**	**SR**	**R**					
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Objek Diduga Cagar Budaya yang Teregister**	**10**	**190,000,000**	**6**	**114,000,000**		**38,000,000**		-		-		-		-	-	-	***6***	***114,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase cagar budaya yang dilestarikan**	**5**	**190,000,000**	**3**	**114,000,000**		**38,000,000**		-		-		-		-	-	-	***3***	***114,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Pelindungan Cagar Budaya	25 Cagar Budaya	190,000,000	15 Cagar Budaya	114,000,000	5 Cagar Budaya	38,000,000	0 Cagar Budaya	-	Cagar - Budaya	-	0 Cagar Budaya	-	- Cagar Budaya	-	***- Cagar Budaya***	-	***15 Cagar Budaya***	***114,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Rata-rata capaian kinerja (%)								**0.00**	-	**0.00**	-	-	-	-	-	-	-					
			Predikat kinerja								**SR**		**SR**		**SR**		**SR**		**SR**						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**41,360,753,100**	**3 WTP**	**24,816,451,860**	**WTP**	**7,043,387,707**	**WTP**	**1,065,950,306**	***WTP***	**2,366,554,924**		**747,506,959**		**2,039,457,853**	***- WTP***	***6,219,470,042***	***3 WTP***	***31,035,921,902***	***60.00%***	***75.04%***	DINAS PARBUD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**489,110,000**	**3**	**293,466,000**		**89,179,800**		-	**38,940,400**		-		**34,936,500**	-	***73,876,900***	***3***	***367,342,900***	***60.00%***	***75.10%***	DINAS PARBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200 Dokumen	78,297,500	120 Dokumen	46,978,500	40 Dokumen	7,067,300	0 Dokumen	-	20 Dokumen	4,005,500	0 Dokumen	-	20 Dokumen	3,040,000	*40 Dokumen*	*7,045,500*	*160 Dokumen*	*54,024,000*	*80.00%*	*69.00%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	143,374,000	3 Dokumen	86,024,400	1 Dokumen	28,674,800	0 Dokumen	-	- Dokumen	13,996,150	0 Dokumen	-	1 Dokumen	12,180,000	*1 Dokumen*	*26,176,150*	*4 Dokumen*	*112,200,550*	*80.00%*	*78.26%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	101,132,500	3 Dokumen	60,679,500	1 Dokumen	20,176,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	16,676,500	*1 Dokumen*	*16,676,500*	*4 Dokumen*	*77,356,000*	*80.00%*	*76.49%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5 Dokumen	36,305,500	3 Dokumen	21,783,300	1 Dokumen	7,261,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	7,260,750	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*7,260,750*	*4 Dokumen*	*29,044,050*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	36,133,000	3 Dokumen	21,679,800	1 Dokumen	7,226,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,000,000	*1 Dokumen*	*2,000,000*	*4 Dokumen*	*23,679,800*	*80.00%*	*65.54%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	40,660,000	3 Laporan	24,396,000	1 Laporan	8,132,000	0 Laporan	-	- Laporan	5,714,000	0 Laporan	-	1 Laporan	1,040,000	*1 Laporan*	*6,754,000*	*4 Laporan*	*31,150,000*	*80.00%*	*76.61%*	DINAS PARBUD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	53,207,500	3 Laporan	31,924,500	1 Laporan	10,641,500	0 Laporan	-	1 Laporan	7,964,000	0 Laporan	-	- Laporan	-	*1 Laporan*	*7,964,000*	*4 Laporan*	*39,888,500*	*80.00%*	*74.97%*	DINAS PARBUD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5**	**34,577,272,600**	**3**	**20,746,363,560**		**5,239,192,377**		**990,570,306**		**1,920,719,765**		**722,381,959**		**1,212,295,982**	*-*	*4,845,968,012*	*3*	*25,592,331,572*	*60.00%*	*74.01%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Pegawai	28,208,721,600	141 Pegawai	16,925,232,960	47 Pegawai	3,984,282,177	11 Pegawai	712,095,306	16 Pegawai	1,498,659,765	4 Pegawai	631,906,959	16 Pegawai	790,695,782	*47 Pegawai*	*3,633,357,812*	*188 Pegawai*	*20,558,590,772*	*80.00%*	*72.88%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	375 Orang	5,799,000,000	225 Orang	3,479,400,000	75 Orang	1,141,000,000	18 Orang	278,475,000	26 Orang	366,050,000	6 Orang	90,475,000	25 Orang	363,700,000	*75 Orang*	*1,098,700,000*	*300 Orang*	*4,578,100,000*	*80.00%*	*78.95%*	DINAS PARBUD
			Pelaksanaa n Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	40 Orang	540,600,000	24 Orang	324,360,000	8 Orang	108,120,000	0 Orang	-	3 Orang	54,060,000	0 Orang	-	5 Orang	54,060,000	*8 Orang*	*108,120,000*	*32 Orang*	*432,480,000*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PARBUD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen/Laporan	28,951,000	3 Dokumen/Laporan	17,370,600	1 Dokumen/Laporan	5,790,200	0 Dokumen/Laporan	-	- Dokumen/Laporan	1,950,000	0 Dokumen/Laporan	-	1 Dokumen/Laporan	3,840,200	*1 Dokumen/Laporan*	*5,790,200*	*4 Dokumen/Laporan*	*23,160,800*	*80.00%*	*80.00%*	DINAS PARBUD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5**	**296,250,000**	**3**	**177,750,000**		**59,250,000**		**44,250,000**		**15,000,000**		**25,125,000**		**-**	*-*	*84,375,000*	*3*	*262,125,000*	*60.00%*	*88.48%*	DINAS PARBUD
			Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	296,250,000	3 Orang	177,750,000	3 Orang	84,480,000	0 Orang	44,250,000	*Orang* 3	15,000,000	0 Orang	25,125,000	- Orang	-	*3 Orang*	*84,375,000*	*6 Orang*	*262,125,000*	*85.71%*	*88.48%*	DINAS PARBUD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum aPnerangkat rDaerah**	**5**	**2,840,430,500**	**3**	**1,704,258,300**		**1,046,963,030**				**256,937,100**		**-**		**419,770,213**	*-*	*676,707,313*	*3*	*2,380,965,613*	*60.00%*	*83.82%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kanto	60 Bulan	25,417,750	36 Bulan	15,250,650	12 Bulan	5,083,550	0 Bulan	-	- Bulan	2,541,000	6 Bulan	-	6 Bulan	2,541,000	*12 Bulan*	*5,082,000*	*48 Bulan*	*20,332,650*	*80.00%*	*79.99%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	403,212,750	36 Bulan	241,927,650	12 Bulan	118,079,480	0 Bulan	-	6 Bulan	54,643,300	1 Bulan	-	5 Bulan	1,944,500	*12 Bulan*	*56,587,800*	*48 Bulan*	*298,515,450*	*80.00%*	*74.03%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60 Bulan	105,150,000	36 Bulan	63,090,000	12 Bulan	21,030,000	0 Bulan	-	6 Bulan	10,924,900	2 Bulan	-	4 Bulan	10,059,200	*12 Bulan*	*20,984,100*	*48 Bulan*	*84,074,100*	*80.00%*	*79.96%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	94,850,000	36 Bulan	56,910,000	12 Bulan	24,070,000	0 Bulan	-	6 Bulan	14,301,300	0 Bulan	-	6 Bulan	2,221,467	*12 Bulan*	*16,522,767*	*48 Bulan*	*73,432,767*	*80.00%*	*77.42%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	123,950,000	36 Bulan	74,370,000	12 Bulan	461,130,000	0 Bulan	-	6 Bulan	12,348,600	1 Bulan	-	5 Bulan	276,416,723	*12 Bulan*	*288,765,323*	*48 Bulan*	*363,135,323*	*80.00%*	*292.97%*	DINAS PARBUD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraa Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	500 Kali	2,087,850,000	300 Kali	1,252,710,000	100 Kali	417,570,000	0 Kali	-	7 Kali	162,178,000	11 Kali	-	23 Kali	126,587,323	*41 Kali*	*288,765,323*	*341 Kali*	*1,541,475,323*	*68.20%*	*73.83%*	DINAS PARBUD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5**	**56,000,000**	**3**	**33,600,000**		**11,200,000**		**11,130,000**		**-**		**-**		**-**	*-*	*11,130,000*	*3*	*44,730,000*	*60.00%*	*79.88%*	DINAS PARBUD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56,000,000	3 Unit	33,600,000	1 Unit	11,200,000	1 Unit	11,130,000	- 1 Unit	-	1 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*11,130,000*	*4 Unit*	*44,730,000*	*80.00%*	*79.88%*	DINAS PARBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**1,097,902,500**	**3**	**658,741,500**		**196,845,000**		**20,000,000**		**59,652,959**		**-**		**91,881,508**	**-**	***171,534,467***	***3***	***830,275,967***	***60.00%***	***75.62%***	DINAS PARBUD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	919,725,000	36 Bulan	551,835,000	12 Bulan	186,845,000	2 Bulan	20,000,000	4 Bulan	49,852,959	0 Bulan	-	6 Bulan	91,881,508	***12 Bulan***	***161,734,467***	***48 Bulan***	***713,569,467***	***80.00%***	***77.59%***	DINAS PARBUD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	178,177,500	36 Bulan	106,906,500	12 Bulan	10,000,000	0 Bulan	-	***Bulan*** 6	9,800,000	3 Bulan	-	3 Bulan	-	***12 Bulan***	***9,800,000***	***48 Bulan***	***116,706,500***	***80.00%***	***65.50%***	DINAS PARBUD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	5	2,003,787,500	3	1,202,272,500		400,757,500		-		75,304,700		-		280,573,650	**-**	***355,878,350***	***3***	***1,558,150,850***	***60.00%***	***77.76%***	DINAS PARBUD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	500 %	658,100,000	300 %	394,860,000	% 100	131,620,000	% 0	-	**%** 46	60,867,200	0 %	-	49 %	64,548,650	***95 %***	***125,415,850***	***395 %***	***520,275,850***	***79.00%***	***79.06%***	DINAS PARBUD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50 Bulan	35,500,000	30 Bulan	21,300,000	10 Bulan	7,100,000	0 Bulan	-	6 Bulan	4,150,000	0 Bulan	-	6 Bulan	1,600,000	***12 Bulan***	***5,750,000***	***42 Bulan***	***27,050,000***	***84.00%***	***76.20%***	DINAS PARBUD
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/R Gedung Kantor Bangunan Lainn	5 Unit	1,310,187,500	3 Unit	786,112,500	1 Unit	262,037,500	0 Unit	-	- Unit	10,287,500	0 Unit	-	1 Unit	214,425,000	***1 Unit***	***224,712,500***	***4 Unit***	***1,010,825,000***	***80.00%***	***77.15%***	DINAS PARBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**6.72**	**15.13**	**33.82**	**33.60**	**7.56**	**10.61**	**38.87**	**28.96**	**86.97**	**88.30**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Pembangunan Sarpras Destinasi Pariwisata**	**135**	**19,179,956,500**	**81**	**11,507,973,900**		**3,747,909,301**				**240,532,523**		**755,565,131**		**727,629,814**	**-**	***1,723,727,468***	***81***	***13,231,701,368***	***60.00%***	***68.99%***	DINAS PARBUD
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kab/Kota**	**5**	**411,861,000**	**3**	**247,116,600**		**82,372,200**				**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***3***	***247,116,600***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Perencanaa n Pengemban gan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Paket	411,861,000	3 Paket	247,116,600	1 Paket	82,372,200	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	-	- Paket	-	***- Paket***	**-**	***3 Paket***	***247,116,600***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**5**	**3,304,306,000**	**3**	**1,982,583,600**		**658,781,200**				**162,213,523**		**102,000,000**		**358,208,814**	**-**	***622,422,337***	***3***	***2,605,005,937***	***60.00%***	***78.84%***	DINAS PARBUD
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2,757,647,500	3 Paket	1,654,588,500	Paket 1	551,529,500	Paket 0	-	***Paket*** -	162,213,523	0 Paket	102,000,000	1 Paket	251,473,314	***1 Paket***	***515,686,837***	***4 Paket***	***2,170,275,337***	***80.00%***	***78.70%***	DINAS PARBUD
			Penerapan Destinasi Pariwisata	Jumlah Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	5 Paket	546,658,500	3 Paket	327,995,100	Paket 1	107,251,700	Paket 0	-	***Paket*** -	-	0 Paket	-	1 Paket	106,735,500	***1 Paket***	***106,735,500***	***4 Paket***	***434,730,600***	***80.00%***	***79.53%***	DINAS PARBUD
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**5**	**15,463,789,500**	**3**	**9,278,273,700**		**3,006,755,901**		**29,600,000**		**78,319,000**		**653,565,131**		**369,421,000**	**-**	***1,130,905,131***	***3***	***10,409,178,831***	***60.00%***	***67.31%***	DINAS PARBUD
			Pengemban gan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6000 Orang	13,013,921,500	3600 Orang	7,808,352,900	Orang 1200	2,602,784,301	Orang 0	29,600,000	Orang -	36,100,000	1200 Orang	404,802,900	- Orang	312,374,000	***1,200 Orang***	***782,876,900***	***4,800 Orang***	***8,591,229,800***	***80.00%***	***66.02%***	DINAS PARBUD
			Pengadaan/ Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan/Pem /Rehabilitasi Sar Prasarana dalam Pengelolaan Des Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	2,004,580,000	3 Paket	1,202,748,000	Paket 1	400,916,000	Paket 0	-	***Paket*** -	42,219,000	0 Paket	248,762,231	1 Paket	57,047,000	***1 Paket***	***348,028,231***	***4 Paket***	***1,550,776,231***	***80.00%***	***77.36%***	DINAS PARBUD
			Pemberday aan Masyarakat dalam Pengelolaa n Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5 Paket	445,288,000	3 Paket	267,172,800	Paket 1	3,055,600	Paket 0	-	***Paket*** -	-	0 Paket	-	- Paket	-	***- Paket***	**-**	***3 Paket***	***267,172,800***	***60.00%***	***60.00%***	DINAS PARBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**-**	**0.00**	**6.42**	**99.59**	**20.16**	**0.25**	**19.41**	**-**	**45.99**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Promosi/Event Pariwisata yang Diikuti**	**15**	**2,876,273,500**	**9**	**1,725,764,100**		**380,017,700**		**-**		**41,528,900**		**175,130,400**		**153,269,750**	**-**	***369,929,050***	***9***	***2,095,693,150***	***60.00%***	***72.86%***	DINAS PARBUD
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatann kerjasam dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri**	**5**	**2,876,273,500**	**3**	**1,725,764,100**		**380,017,700**		**-**		**41,528,900**		**175,130,400**		**153,269,750**	**-**	***369,929,050***	***3***	***2,095,693,150***	***60.00%***	***72.86%***	DINAS PARBUD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Paket	572,287,000	3 Paket	343,372,200	Paket 1	157,822,150	Paket 0	-	*Paket* -	18,497,900	0 Paket	79,202,650	1 Paket	60,121,600	*1 Paket*	*157,822,150*	*4 Paket*	*501,194,350*	*80.00%*	*87.58%*	DINAS PARBUD
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	30 Desa	789,402,000	18 Desa	473,641,200	Desa 6	61,028,400	Desa 0	-	Desa -	15,627,750	0 Desa	15,627,750	6 Desa	24,313,150	*6 Desa*	*55,568,650*	*24 Desa*	*529,209,850*	*80.00%*	*67.04%*	DINAS PARBUD
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Desa	322,287,000	18 Desa	193,372,200	Desa 6	64,457,400	Desa 0	-	Desa -	-	0 Desa	60,300,000	6 Desa	1,010,000	*6 Desa*	*61,310,000*	*24 Desa*	*254,682,200*	*80.00%*	*79.02%*	DINAS PARBUD
			Peningkata n Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30 Desa	1,192,297,500	18 Desa	715,378,500	Desa 6	96,709,750	Desa 0	-	Desa -	7,403,250	0 Desa	20,000,000	6 Desa	67,825,000	*6 Desa*	*95,228,250*	*24 Desa*	*810,606,750*	*80.00%*	*67.99%*	DINAS PARBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**-**	**0.00**	**10.93**	**0.00**	**46.08**	**100.00**	**40.33**	-	**97.35**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**ST**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Peningkatan Sumber Daya Kepariwisataan dan Pelaku Ekonomi Kreatif**	**5**	**247,292,500**	**3**	**148,375,500**		**3,620,000**		-		**3,614,600**		-		-	-	*3,614,600*	*3*	*151,990,100*	*60.00%*	*61.46%*	DINAS PARBUD
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**25**	**247,292,500**	**15**	**148,375,500**		**3,620,000**		-		**3,614,600**		-		-	-	*3,614,600*	*15*	*151,990,100*	*60.00%*	*61.46%*	DINAS PARBUD
			Pengemban gan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	30 Desa	247,292,500	18 Desa	148,375,500	Desa 6	3,620,000	Desa 0	-	Desa -	3,614,600	6 Desa	-	- Desa	-	*6 Desa*	*3,614,600*	*24 Desa*	*151,990,100*	*80.00%*	*61.46%*	DINAS PARBUD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**-**	**0.00**	**99.85**	**100.00**	**-**	**0.00**	**-**	-	**99.85**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**					
			DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																- -	-	- -	-			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**		**10,179,871,750**		**6,107,923,050**		**1,602,909,315**		**106,690,078**		**401,405,551**		**416,808,972**		**312,312,519**	-	*1,237,217,120*	-	*7,345,140,170*		*72.15%*	DUNAS BUNNAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu**		**341,827,500**		**205,096,500**		**67,765,500**		**12,834,500**		**16,481,400**		**20,448,300**		**13,697,000**	-	*63,461,200*	-	*268,557,700*		*78.57%*	DUNAS BUNNAK
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan PerubahanRenja	250 Eksemplar Dokumen	46,155,000	150 Eksemplar Dokumen	27,693,000	50 Eksemplar Dokumen	9,231,000	7 Eksemplar Dokumen	3,077,000	- Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	3,077,000	36 Eksemplar Dokumen	3,077,000	*50 Eksemplar Dokum*	*9,231,000*	*200 Eksemplar Dokum*	*36,924,000*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	105 Eksemplar Dokumen	208,102,500	63 Eksemplar Dokumen	124,861,500	21 Eksemplar Dokumen	41,020,500	21 Eksemplar Dokumen	8,237,500	- Eksemplar Dokumen	15,731,400	0 Eksemplar Dokumen	8,169,400	- Eksemplar Dokumen	7,650,000	*21 Eksemplar Dokum*	*39,788,300*	*84 Eksemplar Dokum*	*164,649,800*	*80.00%*	*79.12%*	DUNAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	35,760,000	63 Eksemplar Dokumen	21,456,000	21 Eksemplar Dokumen	7,152,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	21 Eksemplar Dokumen	7,152,000	- Eksemplar Dokumen	-	*21 Eksemplar Dokum*	*7,152,000*	*84 Eksemplar Dokum*	*28,608,000*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14,100,000	63 Eksemplar Dokumen	8,460,000	21 Eksemplar Dokumen	2,820,000	21 Eksemplar Dokumen	1,520,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,299,900	- Eksemplar Dokumen	-	*21 Eksemplar Dokum*	*2,819,900*	*84 Eksemplar Dokum*	*11,279,900*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	105 Eksemplar Dokumen	14,100,000	63 Eksemplar Dokumen	8,460,000	21 Eksemplar Dokumen	2,820,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	21 Eksemplar Dokumen	2,820,000	*21 Eksemplar Dokum*	*2,820,000*	*84 Eksemplar Dokum*	*11,280,000*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	105 Eksemplar Dokumen	8,250,000	63 Eksemplar Dokumen	4,950,000	21 Eksemplar Dokumen	1,650,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	750,000	0 Eksemplar Dokumen	750,000	21 Eksemplar Dokumen	150,000	*21 Eksemplar Dokum*	*1,650,000*	*84 Eksemplar Dokum*	*6,600,000*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105 Eksemplar Dokumen	15,360,000	63 Eksemplar Dokumen	9,216,000	21 Eksemplar Dokumen	3,072,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	*-*	*63 Eksemplar Dokum*	*9,216,000*	*60.00%*	*60.00%*	DUNAS BUNNAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5**	**7,225,139,000**	**3**	**4,335,083,400**		**956,335,765**		**67,580,624**		**261,365,659**		**281,506,950**		**199,430,145**	*-*	*809,883,378*	*3*	*5,144,966,778*	*60.00%*	*71.21%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang	6,889,946,500	159 Orang	4,133,967,900	53 Orang	889,297,265	12 Orang	55,502,124	12 Orang	234,087,159	12 Orang	279,165,450	12 Orang	174,090,145	*48 Orang*	*742,844,878*	*207 Orang*	*4,876,812,778*	*78.11%*	*70.78%*	DUNAS BUNNAK
			Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	265 Orang	335,192,500	159 Orang	201,115,500	53 Orang	67,038,500	13 Orang	12,078,500	6 Orang	27,278,500	21 Orang	2,341,500	13 Orang	25,340,000	*53 Orang*	*67,038,500*	*212 Orang*	*268,154,000*	*80.00%*	*80.00%*	DUNAS BUNNAK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**	**5**	**1,266,035,750**	**3**	**759,621,450**		**332,142,150**		**13,230,000**		**84,731,150**		**58,081,450**		**43,608,300**	*-*	*199,650,900*	*3*	*959,272,350*	*60.00%*	*75.77%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	1765 *Unit*	112,615,000	1059 Unit	67,569,000	353 Unit	101,458,000	38 Unit	850,000	- Unit	36,354,000	312 Unit	10,954,000	3 Unit	5,300,000	*353 Unit*	*53,458,000*	*1,412 Unit*	*121,027,000*	*80.00%*	*107.47%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8750 Kotak	250,000,000	5250 Kotak	150,000,000	1750 Kotak	50,000,000	180 Kotak	4,009,500	- Kotak	9,801,000	680 Kotak	9,479,250	522 Kotak	16,483,500	*1,382 Kotak*	*39,773,250*	*6,632 Kotak*	*189,773,250*	*75.79%*	*75.91%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	500 Eksemplar	40,233,000	300 Eksemplar	24,139,800	100 Eksemplar	8,046,600	32 Eksemplar	2,238,000	- Eksemplar	1,362,000	28 Eksemplar	1,221,300	(50) Eksemplar	5,115,300	*10 Eksemplar*	*9,936,600*	*310 Eksemplar*	*34,076,400*	*62.00%*	*84.70%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Penyediaan Bahan/Mat erial	7420 Buah	188,192,750	4452 Buah	112,915,650	1484 Buah	37,638,550	255 Buah	6,132,500	- Buah	25,724,150	1125 Buah	3,156,900	104 Buah	2,615,500	*1,484 Buah*	*37,629,050*	*5,936 Buah*	*150,544,700*	*80.00%*	*79.99%*	DUNAS BUNNAK
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158 Kali	674,995,000	3 Kali	404,997,000	153 Kali	134,999,000	0 Kali	-	- Kali	11,490,000	30 Kali	33,270,000	68 Kali	14,094,000	*98 Kali*	*58,854,000*	*101 Kali*	*463,851,000*	*63.92%*	*68.72%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**	**5**	**763,419,500**	**3**	**458,051,700**		**135,475,900**		**13,044,954**		**18,917,142**		**11,635,222**		**27,681,924**	*-*	*71,279,242*	*3*	*529,330,942*	*60.00%*	*69.34%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	322,650,000	36 Bulan	193,590,000	12 Bulan	70,530,000	3 Bulan	12,819,954	3 Bulan	12,777,142	2 Bulan	6,636,822	4 Bulan	11,924,424	*12 Bulan*	*44,158,342*	*48 Bulan*	*237,748,342*	*80.00%*	*73.69%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Bulan	440,769,500	36 Bulan	264,461,700	12 Bulan	64,945,900	3 Bulan	225,000	1 Bulan	6,140,000	1 Bulan	4,998,400	7 Bulan	15,757,500	*12 Bulan*	*27,120,900*	*48 Bulan*	*291,582,600*	*80.00%*	*66.15%*	DUNAS BUNNAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**0**	**583,450,000**	**0**	**350,070,000**		**111,190,000**				**19,910,200**		**45,137,050**		**27,895,150**	*-*	*92,942,400*	*-*	*443,012,400*		*75.93%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	407,600,000	6 Unit	244,560,000	**1** Unit	40,850,000	0 Unit	2,816,000	- Unit	8,448,000	1 Unit	14,789,000	- Unit	8,448,000	*1 Unit*	*34,501,000*	*7 Unit*	*279,061,000*	*70.00%*	*68.46%*	DUNAS BUNNAK
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		10 Unit	175,850,000	6 Unit	105,510,000	**2** Unit	70,340,000	0 Unit	-	*Unit* -	11,462,200	1 Unit	30,348,050	1 Unit	19,447,150	*2 Unit*	*61,257,400*	*8 Unit*	*166,767,400*	*80.00%*	*94.84%*	DUNAS BUNNAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**14.10**	**6.66**	**0.53**	**25.04**	**54.01**	**26.00**	**18.37**	**19.48**	**87.01**	**77.19**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**	**0**	**3,470,053,500**	**0**	**2,082,032,100**		**507,307,500**		**5,621,000**		**142,488,000**		**329,738,200**		**11,922,000**	*-*	*489,769,200*	*-*	*2,571,801,300*		*74.11%*	DUNAS BUNNAK
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya Pendapatan Petani/Masyarak**	**0**	**1,036,011,000**	**0**	**621,606,600**		**181,719,000**		**3,067,400**		**62,779,000**		**101,686,300**		**5,730,000**	*-*	*173,262,700*	*-*	*794,869,300*		*76.72%*	DUNAS BUNNAK
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tan aman		150000 Bibit	508,768,500	90000 Bibit	305,261,100	30000 Bibit	76,220,500	0 Bibit	2,059,800	*Bibit* -	18,795,200	3000 Bibit	53,609,500	- Bibit	1,040,000	*3,000 Bibit*	*75,504,500*	*93,000 Bibit*	*380,765,600*		*74.84%*	DUNAS BUNNAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemanfaata n SDG Hewan/Tan aman		375 Orang	527,242,500	225 Orang	316,345,500	75 Orang	105,498,500	0 Orang	1,007,600	- *Orang*	43,983,800	75 Orang	48,076,800	- Orang	4,690,000	*75 Orang*	*97,758,200*	*300 Orang*	*414,103,700*		*78.54%*	DUNAS BUNNAK
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			**850,000,000**		**510,000,000**		**35,000,000**		**-**		**35,000,000**		**-**		**-**	*-*	*35,000,000*	*-*	*545,000,000*		*64.12%*	DUNAS BUNNAK
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan n/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Hibah Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30 Paket	850,000,000	18 Paket	510,000,000	Paket 6	35,000,000	Paket 0	-	*Paket* -	35,000,000	6 Paket	-	- Paket	-	*6 Paket*	*35,000,000*	*24 Paket*	*545,000,000*		*64.12%*	DUNAS BUNNAK
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan**	**5**	**1,584,042,500**	**3**	**950,425,500**		**290,588,500**		**2,553,600**		**44,709,000**		**228,051,900**		**6,192,000**	*-*	*281,506,500*	*3*	*1,231,932,000*	*60.00%*	*77.77%*	DUNAS BUNNAK
			Pengendali an Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			1,584,042,500		950,425,500	Ekor 80	290,588,500	Ekor 0	2,553,600	*Ekor* -	44,709,000	80 Ekor	228,051,900	- Ekor	6,192,000	*80 Ekor*	*281,506,500*	*80 Ekor*	*1,231,932,000*		*77.77%*	DUNAS BUNNAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**1.11**	**0.00**	**28.09**	**10.48**	**65.00**	**0.00**	**2.35**	**80.00**	**96.54**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**					
			SEKRETARIAT DPRD										*0.00*						- -	-	- -	-			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD										*0.00*						- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**443,808,387,245**	**WTP**	**266,285,032,347**	**WTP**	**83,728,183,027**	**WTP**	**11,771,205,046**	**WTP**	**25,668,003,191**	**WTP**	**23,422,129,978**	**WTP**	**17,389,481,163**	*- WTP*	*78,250,819,378*	*- WTP*	*344,535,851,725*		*77.63%*	SEKRETARIAT DPRD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5**	**275,584,800**	**3**	**165,350,880**		**46,666,960**		**-**		**-**		**750,000**		**20,785,000**	*-*	*21,535,000*	*3*	*186,885,880*	*60.00%*	*67.81%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	104,014,000	60 Eksemplar Dokumen	62,408,400	30 Eksemplar Dokumen	11,712,800	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	2,540,000	*15 Eksemplar Dokum*	*2,540,000*	*75 Eksemplar Dokum*	*64,948,400*	*75.00%*	*62.44%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	350 Buku	47,935,300	210 Buku	28,761,180	70 Buku	9,647,060	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	35 Buku	2,770,000	*35 Buku*	*2,770,000*	*245 Buku*	*31,531,180*	*70.00%*	*65.78%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKP	100 Eksemplar Dokumen	12,900,000	60 Eksemplar Dokumen	7,740,000	20 Eksemplar Dokumen	4,080,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2,580,000	*20 Eksemplar Dokum*	*2,580,000*	*80 Eksemplar Dokum*	*10,320,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	300 Eksemplar Dokumen	22,500,000	180 Eksemplar Dokumen	13,500,000	60 Eksemplar Dokumen	4,500,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	60 Eksemplar Dokumen	4,500,000	*60 Eksemplar Dokum*	*4,500,000*	*240 Eksemplar Dokum*	*18,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	300 Eksemplar Dokumen	22,500,000	180 Eksemplar Dokumen	13,500,000	60 Eksemplar Dokumen	7,500,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	60 Eksemplar Dokumen	5,250,000	*60 Eksemplar Dokum*	*5,250,000*	*240 Eksemplar Dokum*	*18,750,000*	*80.00%*	*83.33%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Triwulan	100 Eksemplar Dokumen	5,700,000	60 Eksemplar Dokumen	3,420,000	20 Eksemplar Dokumen	1,140,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	750,000	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	*750,000*	*60 Eksemplar Dokum*	*4,170,000*	*60.00%*	*73.16%*	SEKRETARIAT DPRD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Lakip, LPPD dan lainya Daerah	150 Eksemplar Dokumen	60,035,500	90 Eksemplar Dokumen	36,021,300	30 Eksemplar Dokumen	8,087,100	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	3,145,000	*15 Eksemplar Dokum*	*3,145,000*	*105 Eksemplar Dokum*	*39,166,300*	*70.00%*	*65.24%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan**	**5**	**32,461,350,605**	**3**	**19,476,810,363**		**6,904,142,364**		**1,373,246,333**		**1,935,202,877**		**1,965,453,620**		**1,138,693,983**	*-*	*6,412,596,813*	*3*	*25,889,407,176*	*60.00%*	*79.75%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	235 Orang	19,881,992,105	141 Orang	11,929,195,263	47 Orang	4,349,410,664	12 Orang	787,511,333	12 Orang	1,293,437,877	11 Orang	1,205,963,620	12 Orang	597,563,983	*47 Orang*	*3,884,476,813*	*188 Orang*	*15,813,672,076*	*80.00%*	*79.54%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	690 Orang	11,760,300,000	414 Orang	7,056,180,000	138 Orang	2,377,060,000	35 Orang	550,425,000	34 Orang	618,225,000	35 Orang	735,200,000	34 Orang	470,860,000	*138 Orang*	*2,374,710,000*	*552 Orang*	*9,430,890,000*	*80.00%*	*80.19%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pelaksanaan n Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	35 Orang	712,756,000	21 Orang	427,653,600	10 Orang	154,461,200	2 Orang	35,310,000	2 Orang	23,540,000	1 Orang	23,540,000	2 Orang	63,690,000	*7 Orang*	*146,080,000*	*28 Orang*	*573,733,600*	*80.00%*	*80.50%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	125 Eksamplar	41,302,500	75 Eksamplar	24,781,500	25 Eksamplar	7,210,500	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	7 Eksamplar	2,770,000	*7 Eksamplar*	*2,770,000*	*82 Eksamplar*	*27,551,500*	*65.60%*	*66.71%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Semest	Jumlah Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Semest	300 Eksamplar	65,000,000	180 Eksamplar	39,000,000	60 Eksamplar	16,000,000	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	750,000	8 Eksamplar	3,810,000	*8 Eksamplar*	*4,560,000*	*188 Eksamplar*	*43,560,000*	*62.67%*	*67.02%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**5**	**46,123,310,000**	**3**	**27,673,986,000**		**9,303,548,000**		**-**		**2,254,873,500**		**4,444,730,000**		**2,357,212,033**	**-**	*9,056,815,533*	*3*	*36,730,801,533*	*60.00%*	*79.64%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	450 stell	199,250,000	270 stell	119,550,000	28 stell	13,450,000	0 stell	-	- stell	-	0 stell	-	- stell	-	*- stell*	*-*	*270 stell*	*119,550,000*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	60 Kali	44,377,200,000	36 Kali	26,626,320,000	12 Kali	8,907,490,000	0 Kali	-	3 Kali	2,254,873,500	6 Kali	4,444,730,000	3 Kali	2,195,536,500	*12 Kali*	*8,895,140,000*	*48 Kali*	*35,521,460,000*	*80.00%*	*80.04%*	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82 orang	1,546,860,000	21 orang	928,116,000	54 orang	382,608,000	0 orang	-	- orang	-	0 orang	-	24 orang	161,675,533	*24 orang*	*161,675,533*	*45 orang*	*1,089,791,533*	*54.88%*	*70.45%*	SEKRETARIAT DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**5**	**97,477,967,510**	**3**	**58,486,780,506**		**24,058,326,334**		**3,799,614,008**		**7,518,503,815**		**5,126,867,543**		**5,081,024,244**	**-**	*21,526,009,610*	*3*	*80,012,790,116*	*60.00%*	*82.08%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	830 Unit	2,650,142,000	498 Unit	1,590,085,200	166 Unit	457,539,000	0 Unit	8,480,000	2 Unit	71,318,000	9 Unit	191,664,000	155 Unit	9,678,000	*166 Unit*	*281,140,000*	*664 Unit*	*1,871,225,200*	*80.00%*	*70.61%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,490,489,160 Buah/Unit		1,494,293,496 Buah/Unit		570,262,064 Buah/Unit		0 Buah/Unit	73,542,572	25 Buah/Unit	90,569,000	25 Buah/Unit	103,276,500	20 Buah/Unit	217,333,194	*70 Buah/Unit*	*484,721,266*	*70 Buah/Unit*	*1,979,014,762*		*79.46%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	60165 Porsi	1,891,080,000	36099 Porsi	1,134,648,000	7,595 Porsi	265,855,000	308 Porsi	43,991,250	308 Porsi	27,322,500	5400 Porsi	-	1,579 Porsi	69,457,500	*7,595 Porsi*	*140,771,250*	*43,694 Porsi*	*1,275,419,250*	*72.62%*	*67.44%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11205 Eksampl	1,480,290,000	6723 Eksampl	888,174,000	14,310 Eksampl	424,098,000	560 Eksampl	150,520,000	560 Eksampl	33,786,800	0 Eksampl	13,000,000	1,460 Eksampl	196,953,800	*2,580 Eksampl*	*394,260,600*	*9,303 Eksampl*	*1,282,434,600*	*83.03%*	*86.63%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	89825 Buah	693,000,750	53895 Buah	415,800,450	17,965 Buah	114,484,150	0 Buah	9,600,000	8,982 Buah	30,358,400	0 Buah	17,048,000	4,491 Buah	32,266,000	*13,473 Buah*	*89,272,400*	*67,368 Buah*	*505,072,850*	*75.00%*	*72.88%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kordinasi dan Konsultasi ke	255 Kali	88,272,965,600	93 Kali	52,963,779,360	38 Kali	22,226,088,120	8 Kali	3,513,480,186	14 Kali	7,265,149,115	7 Kali	4,801,879,043	7 Kali	4,555,335,750	*36 Kali*	*20,135,844,094*	*129 Kali*	*73,099,623,454*	*50.59%*	*82.81%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda**	**5**	**17,540,683,750**	**3**	**10,524,410,250**		**519,083,000**		**-**		**105,985,000**		**158,697,000**		**187,150,000**	**-**	*451,832,000*	*3*	*10,976,242,250*	*60.00%*	*62.58%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional DPRD	30 Unit	14,810,000,000	18 Unit	8,886,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*18 Unit*	*8,886,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	625 Unit	1,608,800,000	375 Unit	965,280,000	99 Unit	259,360,000	0 Unit	-	48 Unit	105,985,000	51 Unit	139,337,000	- Unit	8,950,000	*99 Unit*	*254,272,000*	*474 Unit*	*1,219,552,000*	*75.84%*	*75.81%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	55 Unit	1,121,883,750	33 Unit	673,130,250	11 Unit	259,723,000	0 Unit	-	- Unit	-	4 Unit	19,360,000	7 Unit	178,200,000	*11 Unit*	*197,560,000*	*44 Unit*	*870,690,250*	*80.00%*	*77.61%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum**	**5**	**54,282,363,000**	**3**	**32,569,417,800**		**12,626,072,600**		**330,126,713**		**6,008,576,658**		**2,513,792,166**		**3,666,257,462**	**-**	*12,518,752,999*	*3*	*45,088,170,799*	*60.00%*	*83.06%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	54,282,363,000	36 Kali	32,569,417,800	12 Kali	12,626,072,600	3 Kali	330,126,713	3 Kali	6,008,576,658	3 Kali	2,513,792,166	3 Kali	3,666,257,462	*12 Kali*	*12,518,752,999*	*48 Kali*	*45,088,170,799*	*80.00%*	*83.06%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umumal**	**5**	**12,006,625,000**	**3**	**7,203,975,000**		**2,158,059,000**		**108,940,000**		**235,371,875**		**438,238,350**		**202,620,300**	-	**985,170,525**	*3*	*8,189,145,525*	*60.00%*	*68.21%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasion	40 Unit	284,500,000	24 Unit	170,700,000	Unit 8	56,900,000	Unit 0	5,986,000	Unit 5	16,325,500	0 Unit	15,129,000	3 Unit	19,375,500	*8 Unit*	*56,816,000*	*32 Unit*	*227,516,000*	*80.00%*	*79.97%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion	330 Unit	6,917,950,000	198 Unit	4,150,770,000	Unit 66	1,115,494,000	Unit 3	102,954,000	Unit 22	185,065,375	6 Unit	118,029,950	13 Unit	160,294,800	*44 Unit*	*566,344,125*	*242 Unit*	*4,717,114,125*		*68.19%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliha Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Per Rumah Jabatan/Jumlah Pemeliha Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	715 Unit/Buah	309,000,000	429 Unit/Buah	185,400,000	Unit/Buah 143	56,630,000	Unit/Buah 0	-	Unit/Buah -	12,960,000	13 Unit/Buah	-	105 Unit/Buah	22,950,000	*118 Unit/Buah*	*35,910,000*	*547 Unit/Buah*	*221,310,000*		*71.62%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	125 Buah	254,375,000	75 Buah	152,625,000	Buah 25	50,875,000	Buah 0	-	Buah -	21,021,000	13 Buah	-	- Buah	-	*13 Buah*	*21,021,000*	*88 Buah*	*173,646,000*	*70.40%*	*68.26%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Jabatan, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	80 Unit/Buah	4,240,800,000	48 Unit/Buah	2,544,480,000	Unit/Buah 16	878,160,000	Unit/Buah 0	-	Unit/Buah -	-	11 Unit/Buah	305,079,400	5 Unit/Buah	-	*16 Unit/Buah*	*305,079,400*	*64 Unit/Buah*	*2,849,559,400*		*67.19%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**5**	**181,236,748,080**	**3**	**108,742,048,848**		**27,646,962,269**		**6,159,277,992**		**7,562,184,066**		**8,707,191,199**		**4,583,558,141**	-	*27,012,211,398*	*3*	*135,754,260,246*	*60.00%*	*74.90%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Administras i Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraa administrasi keuangan DPRD Jumlah Pimpina dan Anggota DPRD Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	450 Orang	178,073,748,080	270 Orang	106,844,248,848	Orang 90	27,014,362,269	Orang 45	6,159,277,992	Orang -	7,000,854,066	45 Orang	8,707,191,199	- Orang	4,583,558,141	*90 Orang*	*26,450,881,398*	*360 Orang*	*133,295,130,246*		*74.85%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1355 stell	3,163,000,000	813 stell	1,897,800,000	stell 271	632,600,000	stell 35	-	stell 145	561,330,000	0 stell	-	45 stell	-	*225 stell*	*561,330,000*	*1,038 stell*	*2,459,130,000*	*76.61%*	*77.75%*	SEKRETARIAT DPRD
			Layanan Administrasi DPRD	**Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD**	**5**	**2,403,754,500**	**3**	**1,442,252,700**		**465,322,500**		**-**		**47,305,400**		**66,410,100**		**152,180,000**	-	*265,895,500*	*3*	*1,708,148,200*	*60.00%*	*71.06%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD	35 Kali	364,423,000	21 Kali	218,653,800	Kali 7	57,456,200	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali		*- Kali*	*-*	*21 Kali*	*218,653,800*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat DPRD	150 Kali	1,860,769,000	90 Kali	1,116,461,400	Kali 30	372,153,800	Kali 0	-	Kali 15	34,435,400	7 Kali	66,410,100	8 Kali	152,180,000	*30 Kali*	*253,025,500*	*120 Kali*	*1,369,486,900*	*80.00%*	*73.60%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	115 Unit	178,562,500	69 Unit	107,137,500	Unit 23	35,712,500	Unit 0	-	Unit 10	12,870,000	0 Unit	-	13 Unit	-	*23 Unit*	*12,870,000*	*92 Unit*	*120,007,500*	*80.00%*	*67.21%*	SEKRETARIAT DPRD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.43**	**14.06**	**24.49**	**30.66**	**13.57**	**27.97**	**19.73**	**20.77**	60.22	93.46					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	R	ST					
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			**65,942,019,500**		**39,565,211,700**		**13,392,664,400**		**280,918,759**		**3,186,601,115**		**2,526,863,327**		**3,350,461,192**	-	*9,344,844,393*	-	*48,910,056,093*		*74.17%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**5**	**1,892,825,500**	**3**	**1,135,695,300**		**328,911,000**		**-**		**8,463,650**		**-**		**281,643,400**	-	*290,107,050*	*3*	*1,425,802,350*	*60.00%*	*75.33%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentuk an Peraturan Daerah	Jumlah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dokumen	267,500,500	12 Dokumen	160,500,300	Dokumen 4	25,551,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	4,069,900	*4 Dokumen*	*4,069,900*	*16 Dokumen*	*164,570,200*	*80.00%*	*61.52%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasa n Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda	60 Ranperda	305,325,000	36 Ranperda	183,195,000	Ranperda 12	39,360,000	Ranperda 0	-	Ranperda -	8,463,650	3 Ranperda	-	9 Ranperda	13,573,500	*12 Ranperda*	*22,037,150*	*48 Ranperda*	*205,232,150*	*80.00%*	*67.22%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelengg araan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Penyelenggaraa Kajian Perundang- Undangan	10 Dokumen	1,000,000,000	6 Dokumen	600,000,000	Dokumen 2	200,000,000	Dokumen 0	-	Dokumen -	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	200,000,000	*2 Dokumen*	*200,000,000*	*8 Dokumen*	*800,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik	10 Ranperda	320,000,000	6 Ranperda	192,000,000	2 Ranperda	64,000,000	0 Ranperda	-	- Ranperda	-	0 Ranperda	-	2 Ranperda	64,000,000	*2 Ranperda*	*64,000,000*	*8 Ranperda*	*256,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**5**	**1,590,625,500**	**3**	**954,375,300**		**229,600,100**				**-**		**-**		**122,276,000**	**-**	*122,276,000*	*3*	*1,076,651,300*	*60.00%*	*67.69%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah pembahasan KUA dan PPAS	25 Kali	316,814,000	15 Kali	190,088,400	5 Kali	45,862,800	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	27,941,000	*5 Kali*	*27,941,000*	*20 Kali*	*218,029,400*	*80.00%*	*68.82%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	25 Kali	317,632,500	15 Kali	190,579,500	5 Kali	46,026,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	15,709,000	*5 Kali*	*15,709,000*	*20 Kali*	*206,288,500*	*80.00%*	*64.95%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	25 Kali	318,557,500	15 Kali	191,134,500	5 Kali	46,211,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	39,004,000	*5 Kali*	*39,004,000*	*20 Kali*	*230,138,500*	*80.00%*	*72.24%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	25 Kali	319,507,500	15 Kali	191,704,500	5 Kali	46,401,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	5,866,000	*5 Kali*	*5,866,000*	*20 Kali*	*197,570,500*	*80.00%*	*61.84%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pembahasan Pertanggun gjawaban APBD	Jumlah Pembah Pertanggungjaw APBD	25 Kali	318,114,000	15 Kali	190,868,400	5 Kali	45,097,800	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	5 Kali	33,756,000	*5 Kali*	*33,756,000*	*20 Kali*	*224,624,400*	*80.00%*	*70.61%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraa Pemerintahan**	**5**	**846,747,500**	**3**	**508,048,500**		**145,603,000**		**-**		**10,116,750**		**-**		**23,876,250**	**-**	*33,993,000*	*3*	*542,041,500*	*60.00%*	*64.01%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasa n Urusan Pemerintah an bidang Pemerintah an dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	75 Kali	195,855,000	45 Kali	117,513,000	15 Kali	32,917,000	0 Kali	-	2 Kali	3,687,500	0 Kali	-	5 Kali	3,727,000	*7 Kali*	*7,414,500*	*52 Kali*	*124,927,500*	*69.33%*	*63.79%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktu r	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	75 Kali	198,030,000	45 Kali	118,818,000	15 Kali	33,648,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	7 Kali	3,748,500	*7 Kali*	*3,748,500*	*52 Kali*	*122,566,500*	*69.33%*	*61.89%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahtera an Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	75 Kali	196,305,000	45 Kali	117,783,000	15 Kali	33,803,500	0 Kali	-	2 Kali	2,433,250	0 Kali	-	5 Kali	11,041,500	*7 Kali*	*13,474,750*	*52 Kali*	*131,257,750*	*69.33%*	*66.86%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomi an	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	75 kali	196,655,000	45 kali	117,993,000	15 kali	33,253,500	0 kali	-	2 kali	3,996,000	0 kali	-	5 kali	5,359,250	*7 kali*	*9,355,250*	*52 kali*	*127,348,250*	*69.33%*	*64.76%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pengawasa n Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	25 Kali	59,902,500	15 Kali	35,941,500	5 Kali	11,980,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*15 Kali*	*35,941,500*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5**	**16,849,395,000**	**3**	**10,109,637,000**		**3,674,379,000**		**111,777,461**		**348,026,250**		**453,761,200**		**1,440,007,080**	**-**	*2,353,571,991*	*3*	*12,463,208,991*	*60.00%*	*73.97%*	SEKRETARIAT DPRD
			Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis DPRD	675 Orang	6,719,099,000	405 Orang	4,031,459,400	135 Orang	1,485,719,800	12 Orang	111,777,461	3 Orang	-	0 Orang	-	78 Orang	642,737,730	*93 Orang*	*754,515,191*	*498 Orang*	*4,785,974,591*	*73.78%*	*71.23%*	SEKRETARIAT DPRD
			Publikasi dan Dokumenta si Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dalam Rangka HUT Tanggamus	16205 Eks/Kali	3,530,284,000	9723 Eks/Kali	2,118,170,400	3241 Eks/Kali	868,656,800	0 Eks/Kali	-	1,620 Eks/Kali	78,026,250	810 Eks/Kali	93,761,200	810 Eks/Kali	347,269,350	*3,240 Eks/Kali*	*519,056,800*	*12,963 Eks/Kali*	*2,637,227,200*		*74.70%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang	3,300,000,000	33 Orang	1,980,000,000	11 Orang	660,000,000	0 Orang	-	11 Orang	165,000,000	0 Orang	220,000,000	- Orang	275,000,000	*11 Orang*	*660,000,000*	*44 Orang*	*2,640,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	35 Orang	2,100,000,000	21 Orang	1,260,000,000	7 Orang	420,000,000	0 Orang	-	7 Orang	105,000,000	4 Orang	140,000,000	(4) Orang	175,000,000	*7 Orang*	*420,000,000*	*28 Orang*	*1,680,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Hibah	5 Kali	1,125,000,000	3 Kali	675,000,000	1 Kali	225,000,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*675,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	50 Eksemplar	75,012,000	30 Eksemplar	45,007,200	10 Eksemplar	15,002,400	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	*- Eksemplar*	*-*	*30 Eksemplar*	*45,007,200*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananyan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**5**	**20,886,592,000**	**3**	**12,531,955,200**		**4,193,467,500**		**-**		**1,385,509,000**		**1,334,889,300**		**10,599,000**	**-**	*2,730,997,300*	*3*	*15,262,952,500*	*60.00%*	*73.08%*	SEKRETARIAT DPRD
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja dalam Daerah	35 Kali	577,500,000	21 Kali	346,500,000	7 Kali	115,500,000	0 Kali	-	3 Kali	45,900,000	0 Kali	-	4 Kali	-	*7 Kali*	*45,900,000*	*28 Kali*	*392,400,000*	*80.00%*	*67.95%*	SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	225 Eksemplar	279,747,500	135 Eksemplar	167,848,500	45 Eksemplar	55,949,500	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	45 Eksemplar	10,599,000	*45 Eksemplar*	*10,599,000*	*180 Eksemplar*	*178,447,500*	*80.00%*	*63.79%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaa n Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 Kali	20,029,344,500	9 Kali	12,017,606,700	3 Kali	4,022,018,000	0 Kali	-	1 Kali	1,339,609,000	1 Kali	1,334,889,300	1 Kali	-	*3 Kali*	*2,674,498,300*	*12 Kali*	*14,692,105,000*	*80.00%*	*73.35%*	SEKRETARIAT DPRD
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksanannya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**5**	**354,756,000**	**3**	**212,853,600**		**70,951,200**		-		-		-		-	-	-	*3*	*212,853,600*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	60 Bulan	354,756,000	36 Bulan	212,853,600	12 Bulan	70,951,200	Bulan		Bulan	-	0 Bulan	-	- Bulan	-	*- Bulan*	*-*	*36 Bulan*	*212,853,600*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**5**	**23,521,078,000**	**3**	**14,112,646,800**		**4,749,752,600**		**169,141,298**		**1,434,485,465**		**738,212,827**		**1,472,059,462**	-	*3,813,899,052*	*3*	*17,926,545,852*	*60.00%*	*76.21%*	SEKRETARIAT DPRD
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan n Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	185 Kali	15,613,120,000	111 Kali	9,367,872,000	37 Kali	3,167,817,000	2 Kali	124,671,298	18 Kali	970,078,367	10 Kali	578,390,979	(30) Kali	798,348,675	*- Kali*	*2,471,489,319*	*111 Kali*	*11,839,361,319*	*60.00%*	*75.83%*	SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	125 Buku	39,715,500	75 Buku	23,829,300	25 Buku	7,943,100	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	*-*	*75 Buku*	*23,829,300*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DPRD
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Memfasilitasi Pimpinan DPRD	155 Kali	7,868,242,500	93 Kali	4,720,945,500	31 Kali	1,573,992,500	2 Kali	44,470,000	20 Kali	464,407,098	9 Kali	159,821,848	Kali	673,710,787	*31 Kali*	*1,342,409,733*	*124 Kali*	*6,063,355,233*	*80.00%*	*77.06%*	SEKRETARIAT DPRD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.44**	**2.10**	**45.96**	**23.79**	**22.78**	**18.87**	**26.34**	**25.02**	**95.51**	**69.78**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**SD**					
			SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS			-		-											- -	-	- -	-			
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			-		-											- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**228,285,199,920**	**WTP**	**136,971,119,952**	**WTP**	**44,225,441,451**	**WTP**	**4,454,695,540**	***WTP***	**9,638,043,715**		**7,231,856,777**		**12,359,560,052**	*- WTP*	*33,684,156,084*	*- WTP*	*170,655,276,036*		*74.76%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**	**500**	**1,136,605,000**	**300**	**681,963,000**		**244,181,000**		**3,997,000**		**9,800,000**		**23,866,000**		**17,316,000**	*-*	*54,979,000*	*300*	*736,942,000*	*60.00%*	*64.84%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA,RENJA dan Perubahannya	100 Buku	589,800,000	60 Buku	353,880,000	20 Buku	117,960,000	0 Buku	-	- Buku	5,500,000	0 Buku	-	2 Buku	-	*2 Buku*	*5,500,000*	*62 Buku*	*359,380,000*	*62.00%*	*60.93%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD	300 Buku	188,310,000	180 Buku	112,986,000	60 Buku	37,662,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	14 Buku	8,822,000	*14 Buku*	*8,822,000*	*194 Buku*	*121,808,000*	*64.67%*	*64.68%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300 Buku	186,670,000	180 Buku	112,002,000	60 Buku	37,334,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	14 Buku	8,494,000	*14 Buku*	*8,494,000*	*194 Buku*	*120,496,000*	*64.67%*	*64.55%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD	Eksemplar	-	Eksemplar	-	60 Eksemplar	13,322,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	9,122,000	41 Eksemplar	-	*41 Eksemplar*	*9,122,000*	*41 Eksemplar*	*9,122,000*			SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Eksemplar	-	Eksemplar	-	60 Eksemplar	13,322,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	9,122,000	41 Eksemplar	-	*41 Eksemplar*	*9,122,000*	*41 Eksemplar*	*9,122,000*			SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Eksemplar	-	Eksemplar	-	20 Eksemplar	14,856,000	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	5,622,000	7 Eksemplar	-	*7 Eksemplar*	*5,622,000*	*7 Eksemplar*	*5,622,000*			SEKRETARIAT DAERAH
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah	100 Buku	171,825,000	60 Buku	103,095,000	20 Buku	9,725,000	0 Buku	3,997,000	- Buku	4,300,000	0 Buku	-	17 Buku	-	*17 Buku*	*8,297,000*	*77 Buku*	*111,392,000*	*77.00%*	*64.83%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**	**500**	**85,223,496,650**	**300**	**51,134,097,990**		**16,760,221,397**		**2,963,642,376**		**4,775,723,573**		**3,812,217,573**		**3,713,133,805**	*-*	*15,264,717,327*	*300*	*66,398,815,317*	*60.00%*	*77.91%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	50,566,230,825	42 Bulan	30,339,738,495	14 Bulan	10,960,461,232	3 Bulan	2,005,506,184	3 Bulan	3,197,733,573	3 Bulan	2,385,126,581	5 Bulan	2,389,037,813	*14 Bulan*	*9,977,404,151*	*56 Bulan*	*40,317,142,646*	*80.00%*	*79.73%*	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
											9		10		11		12							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8										13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	60 Bulan	23,914,000,000	36 Bulan	14,348,400,000	12 Bulan	4,728,387,000	3 Bulan	833,310,000	3 Bulan	1,384,610,000	3 Bulan	1,094,985,000	3 Bulan	1,103,085,000	*12 Bulan*	*4,415,990,000*	*48 Bulan*	*18,764,390,000*	*80.00%*	*78.47%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	6,775,200,000	36 Kali	4,065,120,000	12 Kali	326,490,000	0 Kali	-	6 Kali	900,000	3 Kali	157,470,000	3 Kali	52,460,000	*12 Kali*	*210,830,000*	*48 Kali*	*4,275,950,000*	*80.00%*	*63.11%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Buku	185,080,000	60 Buku	111,048,000	20 Buku	11,526,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	4,395,000	7 Buku	-	*7 Buku*	*4,395,000*	*67 Buku*	*115,443,000*	*67.00%*	*62.37%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	200 Eksemplar Dokumen	157,525,000	120 Eksemplar Dokumen	94,515,000	40 Eksemplar Dokumen	8,265,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,690,000	8 Eksemplar Dokumen	-	*8 Eksemplar Dokumen*	*1,690,000*	*128 Eksemplar Dokumen*	*96,205,000*	*64.00%*	*61.07%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	3,625,460,825	42 Bulan	2,175,276,495	12 Bulan	725,092,165	3 Bulan	124,826,192	3 Bulan	192,480,000	3 Bulan	168,550,992	3 Bulan	168,550,992	*12 Bulan*	*654,408,176*	*54 Bulan*	*2,829,684,671*	*77.14%*	*78.05%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik**	**500**	**167,305,000**	**300**	**100,383,000**		**11,621,000**		**-**		**-**		**945,000**		**-**	*-*	*945,000*	*300*	*101,328,000*	*60.00%*	*60.56%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 eksemplar	167,305,000	60 eksemplar	100,383,000	20 eksemplar	11,621,000	0 eksemplar	-	- eksemplar	-	0 eksemplar	945,000	2 eksemplar	-	*2 eksemplar*	*945,000*	*62 eksemplar*	*101,328,000*	*62.00%*	*60.56%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**	**500**	**3,103,875,000**	**300**	**1,862,325,000**		**573,395,000**		**78,300,000**		**136,930,000**		**51,545,800**		**32,977,200**	*-*	*299,753,000*	*300*	*2,162,078,000*	*60.00%*	*69.66%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	680 Stel	1,603,000,000	408 Stel	961,800,000	136 Stel	385,400,000	15 Stel	78,300,000	72 Stel	128,450,000	0 Stel	32,550,000	4 Stel	23,900,000	*91 Stel*	*263,200,000*	*499 Stel*	*1,225,000,000*	*73.38%*	*76.42%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Orang	1,317,100,000	204 Orang	790,260,000	68 Orang	185,280,000	0 Orang	-	2 Orang	6,980,000	0 Orang	18,995,800	13 Orang	9,077,200	*15 Orang*	*35,053,000*	*219 Orang*	*825,313,000*	*64.41%*	*62.66%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Peserta	183,775,000	60 Peserta	110,265,000	20 Peserta	2,715,000	0 Peserta	-	11 Peserta	1,500,000	0 Peserta	-	- Peserta	-	*11 Peserta*	*1,500,000*	*71 Peserta*	*111,765,000*	*71.00%*	*60.82%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik**	**500**	**51,697,567,350**	**300**	**31,018,540,410**		**9,379,814,670**		**540,640,900**		**2,291,431,300**		**1,600,597,145**		**1,498,994,381**	*-*	*5,931,663,726*	*300*	*36,950,204,136*	*60.00%*	*71.47%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35 Gedung	5,555,891,500	21 Gedung	3,333,534,900	7 Gedung	1,870,557,100	1 Gedung	97,905,000	- Gedung	424,777,000	0 Gedung	83,651,000	3 Gedung	244,955,800	*4 Gedung*	*851,288,800*	*25 Gedung*	*4,184,823,700*	*71.43%*	*75.32%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	565 Unit	1,292,531,250	339 Unit	775,518,750	113 Unit	260,106,250	0 Unit	-	27 Unit	6,800,000	0 Unit	3,600,000	(23) Unit	-	*4 Unit*	*10,400,000*	*343 Unit*	*785,918,750*	*60.71%*	*60.80%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	500 %	19,586,580,000	300 %	11,751,948,000	100 %	3,805,475,000	10 %	409,598,600	46 %	1,447,077,900	0 %	719,674,950	44 %	627,379,400	*100 %*	*3,203,730,850*	*400 %*	*14,955,678,850*	*80.00%*	*76.36%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71550 Eksemplar	1,342,763,000	42930 Eksemplar	805,657,800	14310 Eksemplar	268,552,600	150 Eksemplar	14,400,000	4,000 Eksemplar	63,665,000	0 Eksemplar	82,138,000	9,050 Eksemplar	42,572,500	*13,200 Eksemplar*	*202,775,500*	*56,130 Eksemplar*	*1,008,433,300*	*78.45%*	*75.10%*	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	90475 Buah	1,085,187,000	54285 Buah	651,112,200	18095 Buah	224,537,400	1012 Buah	18,737,300	1,500 Buah	11,403,000	0 Buah	92,760,100	12,500 Buah	22,757,600	***15,012 Buah***	***145,658,000***	***69,297 Buah***	***796,770,200***	***76.59%***	***73.42%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	500 Kali	22,781,420,000	300 Kali	13,668,852,000	100 Kali	2,939,947,400	0 Kali	-	- Kali	337,708,400	0 Kali	618,773,095	53 Kali	561,329,081	***53 Kali***	***1,517,810,576***	***353 Kali***	***15,186,662,576***	***70.60%***	***66.66%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	5 Dokumen	53,194,600	3 Dokumen	31,916,760	1 Dokumen	10,638,920	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	***- Dokumen***	*-*	***3 Dokumen***	***31,916,760***	***60.00%***	***60.00%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**500**	**40,845,671,100**	**300**	**24,507,402,660**		**8,293,012,320**		**-**		**20,779,294**		**333,560,000**		**5,503,726,800**	*-*	***5,858,066,094***	***300***	***30,365,468,754***	***60.00%***	***74.34%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan	30 Unit	19,628,887,600	18 Unit	11,777,332,560	6 Unit	4,029,315,620	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	6 Unit	2,979,674,900	***6 Unit***	***2,979,674,900***	***24 Unit***	***14,757,007,460***	***80.00%***	***75.18%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	135 Unit	14,518,943,750	81 Unit	8,711,366,250	27 Unit	2,903,788,750	0 Unit	-	1 Unit	1,500,000	0 Unit	309,360,000	24 Unit	2,458,280,000	***25 Unit***	***2,769,140,000***	***106 Unit***	***11,480,506,250***	***78.52%***	***79.07%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	75 Unit	6,697,839,750	45 Unit	4,018,703,850	15 Unit	1,359,907,950	0 Unit	-	1 Unit	19,279,294	0 Unit	24,200,000	2 Unit	65,771,900	***3 Unit***	***109,251,194***	***48 Unit***	***4,127,955,044***	***64.00%***	***61.63%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**	**500**	**16,583,425,500**	**300**	**9,950,055,300**		**3,393,003,200**		**477,713,300**		**992,816,047**		**533,551,711**		**856,082,109**	*-*	***2,860,163,167***	***300***	***12,810,218,467***	***60.00%***	***77.25%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	60 Bulan	14,588,872,500	36 Bulan	8,753,323,500	12 Bulan	2,981,774,500	2 Bulan	437,779,480	3 Bulan	856,751,301	2 Bulan	467,131,031	5 Bulan	827,463,969	***12 Bulan***	***2,589,125,781***	***48 Bulan***	***11,342,449,281***	***80.00%***	***77.75%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	500 %	1,994,553,000	300 %	1,196,731,800	100 %	411,228,700	10 %	39,933,820	37 %	136,064,746	0 %	66,420,680	53 %	28,618,140	***100 %***	***271,037,386***	***400 %***	***1,467,769,186***	***80.00%***	***73.59%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik**	**500**	**23,639,127,000**	**300**	**14,183,476,200**		**4,418,380,400**		**324,239,800**		**998,081,050**		**643,750,600**		**582,110,859**	*-*	***2,548,182,309***	***300***	***16,731,658,509***	***60.00%***	***70.78%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dengan Baik	500 %	14,004,684,500	300 %	8,402,810,700	100 %	2,816,836,900	11 %	306,599,800	32 %	813,156,050	0 %	585,510,600	57 %	491,426,059	***100 %***	***2,196,692,509***	***400 %***	***10,599,503,209***	***80.00%***	***75.69%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara Dengan Baik	60 Bulan	9,634,442,500	36 Bulan	5,780,665,500	12 Bulan	1,601,543,500	2 Bulan	17,640,000	- Bulan	184,925,000	0 Bulan	58,240,000	10 Bulan	90,684,800	***12 Bulan***	***351,489,800***	***48 Bulan***	***6,132,155,300***	***80.00%***	***63.65%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Penataan Organisasi	**Indeks Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah**	**500**	**3,252,220,000**	**300**	**1,951,332,000**		**650,991,000**		**25,209,900**		**204,176,351**		**125,331,530**		**98,223,898**	*-*	***452,941,679***	***300***	***2,404,273,679***	***60.00%***	***73.93%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Evaluasi Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Jumlah Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus tersusunnya Perubahan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada SKPD seKabupaten Tanggamus Tersusunya Evaluasi Jabatan Kabupaten Tanggamus	375 Buku	725,000,000	225 Buku	435,000,000	75 Buku	145,000,000	0 Buku	1,782,000	- Buku	11,412,850	0 Buku	42,334,600	75 Buku	22,597,500	***75 Buku***	***78,126,950***	***300 Buku***	***513,126,950***	***80.00%***	***70.78%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Peraturan Tata laksana Tersedianya Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) RATU	200 Buku/Paket	588,809,500	120 Buku/Paket	353,285,700	40 Buku/Paket	117,761,900	0 Buku/Paket	2,381,900	- Buku/Paket	66,152,001	0 Buku/Paket	21,692,430	40 Buku/Paket	13,998,398	***40 Buku/Paket***	***104,224,729***	***160 Buku/Paket***	***457,510,429***	***80.00%***	***77.70%***	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Buku Penyusunan Evaluasi Perjanjian Kinerja SKPD se-Kabupaten Tanggamus, Jumlah Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan	140 PD	239,700,000	84 PD	143,820,000	PD 28	47,940,000	PD 0	-	PD -	11,411,500	0 PD	8,256,500	28 PD	15,429,500	*28 PD*	*35,097,500*	*112 PD*	*178,917,500*	*80.00%*	*74.64%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Operasional Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (saber pekan) Kabupaten Tanggamus	100 Buku	778,810,500	60 Buku	467,286,300	Buku 20	156,309,100	Buku 0	2,673,000	Buku -	41,089,000	0 Buku	30,088,000	20 Buku	30,498,500	*20 Buku*	*104,348,500*	*80 Buku*	*571,634,800*	*80.00%*	*73.40%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanggamus Pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tanggamus Update Aplikasi E-SAKIP	200 Buku/Paket	919,900,000	120 Buku/Paket	551,940,000	Buku/Paket 40	183,980,000	Buku/Paket 0	18,373,000	Buku/Paket -	74,111,000	0 Buku/Paket	22,960,000	40 Buku/Paket	15,700,000	*40 Buku/Paket*	*131,144,000*	*160 Buku/Paket*	*683,084,000*	*80.00%*	*74.26%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Presentase Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Dengan Baik**	**500**	**2,635,907,320**	**300**	**1,581,544,392**		**500,821,464**		**40,952,264**		**208,306,100**		**106,491,418**		**56,995,000**	-	*412,744,782*	*300*	*1,994,289,174*	*60.00%*	*75.66%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara Resmi, Kunjungan Resmi dan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Lembaga Resmi Lainnya	1200 Acara	1,290,667,320	720 Acara	774,400,392	Acara 240	258,133,464	Acara 60	19,945,764	Acara -	118,178,700	40 Acara	57,024,909	44 Acara	36,422,000	*144 Acara*	*231,571,373*	*864 Acara*	*1,005,971,765*	*72.00%*	*77.94%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	600 Kunjungan	626,850,500	360 Kunjungan	376,110,300	120 Kunjungan	99,010,100	30 Kunjungan	756,500	Kunjungan -	48,660,000	30 Kunjungan	19,240,000	6 Kunjungan	7,500,000	*66 Kunjungan*	*76,156,500*	*426 Kunjungan*	*452,266,800*	*71.00%*	*72.15%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2100 Naskah	718,389,500	1260 Naskah	431,033,700	Naskah 420	143,677,900	Naskah 105	20,250,000	Naskah -	41,467,400	175 Naskah	30,226,509	35 Naskah	13,073,000	*315 Naskah*	*105,016,909*	*1,575 Naskah*	*536,050,609*	*75.00%*	*74.62%*	SEKRETARIAT DAERAH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**4.09**	**10.07**	**16.75**	**21.79**	**0.75**	**16.35**	**64.26**	**27.95**	**85.85**	**76.16**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**500**	**90,046,118,505**	**300**	**54,027,671,103**		**14,172,544,951**		**28,681,660**		**712,173,960**		**1,561,245,746**		**2,100,701,330**	-	*4,402,802,696*	*300*	*58,430,473,799*	*60.00%*	*64.89%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan Dengan Baik**	**500**	**13,441,590,880**	**300**	**8,064,954,528**		**1,575,436,476**		**-**		**486,019,600**		**211,620,476**		**321,603,700**	-	*1,019,243,776*	*300*	*9,084,198,304*	*60.00%*	*67.58%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah penataan administrasi pemerintahan	30 Kegiatan	4,957,674,380	18 Kegiatan	2,974,604,628	6 Kegiatan	458,766,576	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	51,860,300	3 Kegiatan	23,620,576	2 Kegiatan	108,748,000	*5 Kegiatan*	*184,228,876*	*23 Kegiatan*	*3,158,833,504*	*76.67%*	*63.72%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah kegiatan administrasi kewilayahan	30 Kegiatan	2,484,994,500	18 Kegiatan	1,490,996,700	3 Kegiatan	632,855,500	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	188,807,900	2 Kegiatan	187,999,900	- Kegiatan	99,455,700	*2 Kegiatan*	*476,263,500*	*20 Kegiatan*	*1,967,260,200*	*66.67%*	*79.17%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan	20 Kegiatan	5,998,922,000	12 Kegiatan	3,599,353,200	4 Kegiatan	483,814,400	0 Kegiatan	-	Kegiatan -	245,351,400	3 Kegiatan	-	1 Kegiatan	113,400,000	*4 Kegiatan*	*358,751,400*	*16 Kegiatan*	*3,958,104,600*	*80.00%*	*65.98%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan**	**500**	**48,816,383,125**	**300**	**29,289,829,875**		**7,611,729,375**		**-**		**49,075,450**		**855,000,000**		**852,500,000**	-	*1,756,575,450*	*300*	*31,046,405,325*	*60.00%*	*63.60%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Persentase kegiatan pengelolaan bina mental spiritual	500 Persen	11,550,375,000	300 Persen	6,930,225,000	Persen 100	100,000,000	Persen 0	-	Persen -	19,075,450	0 Persen	-	100 Persen	-	*100 Persen*	*19,075,450*	*400 Persen*	*6,949,300,450*	*80.00%*	*60.17%*	SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase koordinasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	500 Persen	639,750,000	300 Persen	383,850,000	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen		- Persen	-	300 Persen	383,850,000	60.00%	60.00%	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase organisasi kemasyarakatan bidang keagamaan yang aktif dan Bina Kesejahteraan Rakyat yang diselesaikan	500 Persen	36,626,258,125	300 Persen	21,975,754,875	Persen 100	7,511,729,375	Persen 0	-	Persen -	30,000,000	0 Persen	855,000,000	100 Persen	852,500,000	100 Persen	1,737,500,000	400 Persen	23,713,254,875	80.00%	64.74%	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Presentase Capaian Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah**	**45 Dokumen**	**3,011,344,500**	**27 Dokumen**	**1,806,806,700**	**9 Dokumen**	**573,923,900**	**Dokumen**	**18,295,610**	**Dokumen**	**72,215,560**	**Dokumen**	**198,454,470**	**Dokumen**	**211,434,630**	**- Dokumen**	**500,400,270**	**27 Dokumen**	**2,307,206,970**	**60.00%**	**76.62%**	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan kajian hukum di daerah	45 Dokumen	698,465,500	27 Dokumen	419,079,300	9 Dokumen	132,438,800	1 Dokumen	10,691,000	- Dokumen	32,486,250	0 Dokumen	29,053,750	7 Dokumen	40,604,350	*8 Dokumen*	*112,835,350*	*35 Dokumen*	*531,914,650*	*77.78%*	*76.15%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah dokumen penyelesaian perkara, perdata dan pelaporan RANHAM	45 Dokumen	1,972,400,500	27 Dokumen	1,183,440,300	8 Dokumen	368,935,100	0 Dokumen	-	- Dokumen	16,846,400	0 Dokumen	133,555,850	7 Dokumen	167,490,800	*7 Dokumen*	*317,893,050*	*34 Dokumen*	*1,501,333,350*	*75.56%*	*76.12%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dalam bentuk lembaran/berita daerah dan teruploadnya produk hukum daerah	2000 Buku	340,478,500	1200 Buku	204,287,100	500 Buku	72,550,000	0 Buku	7,604,610	- Buku	22,882,910	0 Buku	35,844,870	500 Buku	3,339,480	*500 Buku*	*69,671,870*	*1,700 Buku*	*273,958,970*	*85.00%*	*80.46%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	**Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan**	**500**	**24,776,800,000**	**300**	**14,866,080,000**		**4,411,455,200**		**10,386,050**		**104,863,350**		**296,170,800**		**715,163,000**	**-**	***1,126,583,200***	***300***	***15,992,663,200***	***60.00%***	***64.55%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Peraturan Daerah Tentang Kerja Sama Terlaksananya MoU/PKS	100 Buku	24,086,046,000	60 Buku	14,451,627,600	Buku 20	4,313,505,600	Buku 0	10,386,050	Buku -	98,603,350	0 Buku	286,370,800	20 Buku	684,567,500	*20 Buku*	*1,079,927,700*	*80 Buku*	*15,531,555,300*	*80.00%*	*64.48%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	10 Laporan	690,754,000	6 Laporan	414,452,400	2 Laporan	97,949,600	0 Laporan	-	- Laporan	6,260,000	0 Laporan	9,800,000	1 Laporan	30,595,500	*1 Laporan*	*46,655,500*	*7 Laporan*	*461,107,900*	*70.00%*	*66.75%*	SEKRETARIAT DAERAH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.13**	**0.20**	**0.00**	**5.03**	**1.05**	**11.02**	**96.98**	**14.82**	**98.16**	**31.07**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST'**	**SR**				
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Daerah**	**500**	**10,041,746,830**	**300**	**6,025,048,098**		**1,470,539,500**		**90,345,200**		**405,772,050**		**314,927,400**		**284,578,000**	**-**	***1,095,622,650***	***300***	***7,120,670,748***	***60%***	***71%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase BUMD dan BLUD yang dimonitoring**	**500**	**416,103,000**	**300**	**249,661,800**		**82,070,600**		**6,721,500**		**12,431,750**		**13,320,000**		**4,920,000**	**-**	***37,393,250***	***300***	***287,055,050***	***60.00%***	***68.99%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang di Monitoring dan Evaluasi	65 BLUDBUMD	141,298,000	39 BLUDBUMD	84,778,800	4 BLUDBUMD	33,849,600	0 BLUDBUMD	6,721,500	- BLUDBUMD	6,009,900	0 BLUDBUMD	7,260,000	4 BLUDBUMD	2,420,000	*4 BLUDBUMD*	*22,411,400*	*43 BLUDBUMD*	*107,190,200*	*66.15%*	*75.86%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pengendalian Inflasi Daerah dan Distribusi	20 Laporan	91,590,000	12 Laporan	54,954,000	4 Laporan	9,078,000	0 Laporan	-	- Laporan	4,368,700	0 Laporan	3,030,000	4 Laporan	-	*4 Laporan*	*7,398,700*	*16 Laporan*	*62,352,700*	*80.00%*	*68.08%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Pengawasan KUR	30 Monitoring	183,215,000	18 Monitoring	109,929,000	6 Monitoring	39,143,000	0 Monitoring	-	- Monitoring	2,053,150	0 Monitoring	3,030,000	6 Monitoring	2,500,000	*6 Monitoring*	*7,583,150*	*24 Monitoring*	*117,512,150*	*80.00%*	*64.14%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah**	**500**	**1,961,474,330**	**300**	**1,176,884,598**		**7,500,000**				**7,500,000**		**-**		**-**	**-**	***7,500,000***	***300***	***1,184,384,598***	***60.00%***	***60.38%***	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Pameran yang diikuti/dilaksanakan	Pameran	-	Pameran	-	4 Pameran	7,500,000	0 Pameran	-	- Pameran	7,500,000	0 Pamera n	-	4 Pamera n	-	*4 Pameran*	*7,500,000*	*4 Pameran*	*7,500,000*			SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Fasilitas Pameran Promosi Produk Unggulan di dalam Daerah dan Luar Daerah	20 Pameran	1,961,474,330	12 Pameran	1,176,884,598	Pameran		Pameran		Pameran		Pameran				- *Pameran*	-	*12 Pameran*	*1,176,884,598*	*60.00%*	*60.00%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik Yang Diterapkan**	**500**	**7,512,362,500**	**300**	**4,507,417,500**	**%**	**1,365,347,500**	**%**	**83,372,500**	**%**	**375,058,300**	**%**	**297,567,400**	4 %	**279,658,000**	*4 %*	*1,035,656,200*	*304 %*	*5,543,073,700*	*60.80%*	*73.79%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pekerjaan dan Operasional Kelompok Kerja	625 Paket	3,626,601,000	375 Paket	2,175,960,600	124 Paket	580,920,200	10 Paket	1,992,500	- Paket	174,420,000	60 Paket	161,336,800	- Paket	7,988,000	*70 Paket*	*345,737,300*	*445 Paket*	*2,521,697,900*	*71.20%*	*69.53%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik	750 Paket	3,681,000,000	450 Paket	2,208,600,000	150 Paket	740,300,000	15 Paket	81,380,000	- Paket	191,420,000	60 Paket	130,240,000	- Paket	271,670,000	*75 Paket*	*674,710,000*	*525 Paket*	*2,883,310,000*	*70.00%*	*78.33%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Barang dan Jasa	250 Paket	204,761,500	150 Paket	122,856,900	50 Paket	44,127,300	0 Paket	-	- Paket	9,218,300	15 Paket	5,990,600	- Paket	-	*15 Paket*	*15,208,900*	*165 Paket*	*138,065,800*	*66.00%*	*67.43%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam**	**500**	**151,807,000**	**300**	**91,084,200**	**%**	**15,621,400**	%	**251,200**	**%**	**10,782,000**	**%**	**4,040,000**	**%**	-	- %	*15,073,200*	*300 %*	*106,157,400*	*60.00%*	*69.93%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	20 Laporan	79,540,000	12 Laporan	47,724,000	4 Laporan	6,358,000	0 Laporan	251,200	- Laporan	3,651,100	0 Laporan	2,020,000	4 Laporan	-	*4 Laporan*	*5,922,300*	*16 Laporan*	*53,646,300*	*80.00%*	*67.45%*	SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg Bersubsidi	20 Laporan	72,267,000	12 Laporan	43,360,200	4 Laporan	9,263,400	0 Laporan	-	- Laporan	7,130,900	0 Laporan	2,020,000	4 Laporan	-	*4 Laporan*	*9,150,900*	*16 Laporan*	*52,511,100*	*80.00%*	*72.66%*	SEKRETARIAT DAERAH
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**7.14**	**6.14**	**0.00**	**27.59**	**38.57**	**21.42**	**8.57**	**19.35**	54.29	74.50					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	R	SD					
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH			-		-				**1,793,046,493**		**3,643,536,151**					-	*5,436,582,644*	-	*5,436,582,644*			
			INSPEKTORAT			-		-				**1,793,046,493**		**3,643,536,151**					-	*5,436,582,644*	-	*5,436,582,644*			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**52,724,061,270**	**3 WTP**	**31,634,436,762**	**WTP**	**10,692,976,813**	**WTP**	**1,777,446,493**	**WTP**	**3,001,321,151**	**WTP**	**2,822,047,268**	**WTP**	**2,210,955,003**	- *WTP*	*9,811,769,915*	*3 WTP*	*41,446,206,677*	*60.00%*	*78.61%*	INSPEKTORAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu**	**5**	**190,766,000**	**3**	**114,459,600**		**38,153,200**		-		**10,063,600**		**3,600,000**		**20,913,000**	-	*34,576,600*	*3*	*149,036,200*	*60.00%*	*78.13%*	INSPEKTORAT
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	50 Dokumen	117,028,000	30 Dokumen	70,216,800	10 Dokumen	23,405,600	0 Dokumen	-	4 Dokumen	8,575,000	0 Dokumen	3,600,000	6 Dokumen	9,430,000	*10 Dokumen*	*21,605,000*	*40 Dokumen*	*91,821,800*	*80.00%*	*78.46%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	28,185,000	87 Eksemplar Dokumen	16,911,000	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	*29 Eksemplar Dokum*	*5,637,000*	*116 Eksemplar Dokum*	*22,548,000*	*80.00%*	*80.00%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	28,185,000	87 Eksemplar Dokumen	16,911,000	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	29 Eksemplar Dokumen	5,637,000	*29 Eksemplar Dokum*	*5,637,000*	*116 Eksemplar Dokum*	*22,548,000*	*80.00%*	*80.00%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4,440,000	87 Eksemplar Dokumen	2,664,000	29 Eksemplar Dokumen	888,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*87 Eksemplar Dokum*	*2,664,000*	*60.00%*	*60.00%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	145 Eksemplar Dokumen	4,440,000	87 Eksemplar Dokumen	2,664,000	29 Eksemplar Dokumen	888,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*87 Eksemplar Dokum*	*2,664,000*	*60.00%*	*60.00%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	50 Eksemplar Dokumen	4,166,000	30 Eksemplar Dokumen	2,499,600	10 Eksemplar Dokumen	833,200	0 Eksemplar Dokumen	-	7 Eksemplar Dokumen	624,200	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	209,000	*10 Eksemplar Dokum*	*833,200*	*40 Eksemplar Dokum*	*3,332,800*	*80.00%*	*80.00%*	INSPEKTORAT
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	4,322,000	27 Eksemplar Dokumen	2,593,200	9 Eksemplar Dokumen	864,400	0 Eksemplar Dokumen	-	9 Eksemplar Dokumen	864,400	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*9 Eksemplar Dokum*	*864,400*	*36 Eksemplar Dokum*	*3,457,600*	*80.00%*	*80.00%*	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum** **Tersusunnya Laporan Administasi Umum** **Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu** **Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu**		**45,100,232,470**		**27,060,139,482**		**9,309,774,303**		**1,614,254,384**		**2,690,828,116**		**2,571,718,166**		**1,959,533,328**	-	***8,836,333,994***	-	***35,896,473,476***		***79.59%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	43,066,113,470	138 Orang	25,839,668,082	55 Orang	8,902,950,503	13 Orang	1,537,904,384	14 Orang	2,565,084,516	14 Orang	2,472,515,566	14 Orang	1,865,123,328	***55 Orang***	***8,440,627,794***	***193 Orang***	***34,280,295,876***	***83.91%***	***79.60%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	80 Orang	1,479,900,000	48 Orang	887,940,000	16 Orang	295,980,000	4 Orang	73,950,000	4 Orang	73,950,000	4 Orang	74,130,000	4 Orang	72,020,000	***16 Orang***	***294,050,000***	***64 Orang***	***1,181,990,000***	***80.00%***	***79.87%***	INSPEKTORAT
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	554,219,000	36 Kali	332,531,400	12 Kali	110,843,800	3 Kali	2,400,000	3 Kali	51,793,600	3 Kali	25,072,600	2 Kali	22,390,000	***11 Kali***	***101,656,200***	***47 Kali***	***434,187,600***	***78.33%***	***78.34%***	INSPEKTORAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Kasus Disiplin Aparatur Inspektorat Daerah Kab.Tanggamus**	**30 Kasus**	**1,041,125,000**	**18 Kasus**	**624,675,000**	**6 Kasus**	**112,290,000**	**Kasus**	**-**	**Kasus**	**34,565,605**	**Kasus**	**68,335,605**	**Kasus**	**101,255,605**	***- Kasus***	***204,156,815***	***18 Kasus***	***828,831,815***	***60.00%***	***79.61%***	INSPEKTORAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Seragam Batik	670 Stel/pcs	218,625,000	402 Stel/pcs	131,175,000	134 Stel/pcs	46,850,000	0 Stel/pcs	-	- Stel/pcs	-	67 Stel/pcs	30,650,000	67 Stel/pcs	45,250,000	***134 Stel/pcs***	***75,900,000***	***536 Stel/pcs***	***207,075,000***		***94.72%***	INSPEKTORAT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	230 ASN	822,500,000	138 ASN	493,500,000	55 ASN	65,440,000	0 ASN	-	4 ASN	34,565,605	0 ASN	37,685,605	1 ASN	56,005,605	***5 ASN***	***128,256,815***	***143 ASN***	***621,756,815***	***62.17%***	***75.59%***	INSPEKTORAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**	**5**	**3,173,037,800**	**3**	**1,903,822,680**		**671,519,310**		**90,547,596**		**103,300,550**		**91,796,901**		**195,680,014**	-	***481,325,061***	***3***	***2,385,147,741***	***60.00%***	***75.17%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180 Unit	1,508,839,300	108 Unit	905,303,580	35 Unit	332,596,410	13 Unit	30,293,400	2 Unit	45,155,140	13 Unit	13,922,870	3 Unit	109,534,379	***31 Unit***	***198,905,789***	***139 Unit***	***1,104,209,369***	***77.22%***	***73.18%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	5000 Kotak	315,250,000	3000 Kotak	189,150,000	11000 Kotak	65,550,000	1792 Kotak	12,692,130	2,116 Kotak	9,749,410	4114 Kotak	9,375,410	470 Kotak	24,554,760	***8,492 Kotak***	***56,371,710***	***11,492 Kotak***	***245,521,710***	***229.84%***	***77.88%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	600 Eksemplar	150,593,500	360 Eksemplar	90,356,100	140 Eksemplar	30,118,700	45 Eksemplar	6,521,200	14 Eksemplar	5,921,200	15 Eksemplar	8,221,200	66 Eksemplar	7,339,075	***140 Eksemplar***	***28,002,675***	***500 Eksemplar***	***118,358,775***	***83.33%***	***78.59%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	3500 Buah	223,709,000	2100 Buah	134,225,400	840 0	44,741,800	106 0	11,175,600	304 0	11,175,600	5 0	10,675,600	425 0	11,675,600	***840 -***	***44,702,400***	***2,940 -***	***178,927,800***	***84.00%***	***79.98%***	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	974,646,000	180 Kali	584,787,600	60 Kali	198,512,400	5 Kali	29,865,266	10 Kali	31,299,200	10 Kali	49,601,821	9 Kali	42,576,200	***34 Kali***	***153,342,487***	***214 Kali***	***738,130,087***	***71.33%***	***75.73%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**	**0**	**923,910,000**	**0**	**554,346,000**		**185,982,000**		**30,083,713**		**46,427,080**		**34,805,796**		**58,824,856**	-	***170,141,445***	-	***724,487,445***		***78.42%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	923,910,000	36 Kali	554,346,000	12 Kali	185,982,000	2 Kali	30,083,713	4 Kali	46,427,080	3 Kali	34,805,796	3 Kali	58,824,856	***12 Kali***	***170,141,445***	***48 Kali***	***724,487,445***	***80.00%***	***78.42%***	INSPEKTORAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Administasi Umum**	**5**	**2,294,990,000**	**3**	**1,376,994,000**	**1**	**375,258,000**		**42,560,800**		**116,136,200**		**51,790,800**		**- 125,251,800**	-	***85,236,000***	***3***	***1,462,230,000***	***60.00%***	***63.71%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional Yang Dipelihara Secara Rutin	5 unit	596,640,000	3 unit	357,984,000	1 unit	54,548,000	0 unit	5,632,000	- unit	23,248,000	0 unit	7,292,000	1 unit	13,264,000	***1 unit***	***49,436,000***	***4 unit***	***407,420,000***	***80.00%***	***68.29%***	INSPEKTORAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	30 unit	1,402,900,000	18 unit	841,740,000	6 unit	261,620,000	1 unit	31,258,800	1 unit	83,188,200	2 unit	41,658,800	2 unit	(142,705,800)	***6 unit***	***13,400,000***	***24 unit***	***855,140,000***	***80.00%***	***60.96%***	INSPEKTORAT
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Yang Dipelihara Secara Rutin	20 Unit	110,100,000	12 Unit	66,060,000	4 Unit	22,020,000	0 Unit	2,170,000	2 Unit	5,700,000	-2 Unit	2,840,000	1 Unit	2,690,000	***1 Unit***	***13,400,000***	***13 Unit***	***79,460,000***	***65.00%***	***72.17%***	INSPEKTORAT
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	149,850,000	3 Unit	89,910,000	1 Unit	29,970,000	0 Unit	3,500,000	- Unit	2,000,000	0 Unit	-	1 Unit	500,000	***1 Unit***	***6,000,000***	***4 Unit***	***95,910,000***	***80.00%***	***64.00%***	INSPEKTORAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemelihara an/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	15 Unit	35,500,000	9 Unit	21,300,000	Unit 3	7,100,000	Unit 0	-	Unit -	2,000,000	0 Unit	-	1 Unit	1,000,000	*1 Unit*	*3,000,000*	*10 Unit*	*24,300,000*	*66.67%*	*68.45%*	INSPEKTORAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**15.84**		**16.62**	**19.94**	**28.07**	**33.91**	**26.39**	**9.08**	**20.68**	**78.77**	**91.76**					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			**4,979,670,000**		**2,987,802,000**		**1,324,887,378**		**15,600,000**		**507,115,000**		**184,500,000**		**482,534,000**	-	*1,189,749,000*	-	*4,177,551,000*		*83.89%*	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Sesuai Standar**	**145 Kali**	**4,151,670,000**	**87 Kali**	**2,491,002,000**	**Kali**	**1,001,487,378**	**Kali**	**15,600,000**	**Kali**	**412,015,000**	**Kali**	**91,500,000**	**Kali**	**274,634,000**	*- Kali*	*793,749,000*	*87 Kali*	*3,284,751,000*	*60.00%*	*79.12%*	INSPEKTORAT
			Pengawasa n Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja dan Keuangan Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Keuanganumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	55 Kali	1,683,000,000	33 Kali	1,009,800,000	Kali 11	525,163,378	Kali 0	-	Kali 2	199,265,000	0 Kali	6,000,000	6 Kali	207,000,000	*8 Kali*	*412,265,000*	*41 Kali*	*1,422,065,000*		*84.50%*	INSPEKTORAT
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksanaan Review Kinerja dan Keuangan	15 Kali	318,750,000	9 Kali	191,250,000	Kali 3	63,750,000	Kali 1	15,600,000	Kali 2	8,700,000	2 Kali	4,800,000	3 Kali	34,650,000	*8 Kali*	*63,750,000*	*17 Kali*	*255,000,000*	*113.33%*	*80.00%*	INSPEKTORAT
			Pengawasa n Desa	Jumlah Desa Yang Mendapat Pengawasan Oleh APIP	300 Pekon	792,000,000	180 Pekon	475,200,000	60 Pekon	158,400,000	Pekon 0	-	Pekon 40	139,200,000	0 Pekon	7,800,000	10 Pekon	4,500,000	*50 Pekon*	*151,500,000*	*230 Pekon*	*626,700,000*	*76.67%*	*79.13%*	INSPEKTORAT
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n APIP	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Keuangan	60 Pemata uan	1,357,920,000	36 Pemata uan	814,752,000	12 Pemata uan	254,174,000	0 Pemata uan	-	3 Pemata uan	64,850,000	1 Pemata uan	72,900,000	3 Pemata uan	28,484,000	*7 Pemat auan*	*166,234,000*	*43 Pemata uan*	*980,986,000*	*71.67%*	*72.24%*	INSPEKTORAT
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Yang Sesuai Standar**	**5**	**828,000,000**	**3**	**496,800,000**		**323,400,000**				**95,100,000**		**93,000,000**		**207,900,000**	*-*	*396,000,000*	*3*	*892,800,000*	*60.00%*	*107.83%*	INSPEKTORAT
			Pengawasa n Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diaudit	430 %	828,000,000	258 %	496,800,000	% 86	323,400,000	% 0	-	% 43	95,100,000	5 %	93,000,000	- %	207,900,000	*48 %*	*396,000,000*	*306 %*	*892,800,000*	*71.16%*	*107.83%*	INSPEKTORAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.58**		**1.18**	**0.00**	**38.28**	**4.65**	**13.93**	**12.79**	**36.42**	**48.00**	**89.80**					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			**2,566,650,035**		**1,539,990,021**		**387,996,800**		**-**		**135,100,000**		**99,641,250**		**73,700,000**	-	*308,441,250*	-	*1,848,431,271*		*72.02%*	INSPEKTORAT
			Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Pemberantasan Tipikor dan Gratifikasi**	**5**	**2,566,650,035**	**3**	**1,539,990,021**		**387,996,800**		**-**		**135,100,000**		**99,641,250**		**73,700,000**	-	*308,441,250*	*3*	*1,848,431,271*	*60.00%*	*72.02%*	INSPEKTORAT
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pekon dan OPD Yang di Lakukan Pendampingan Oleh Fungsional	425 %	2,566,650,035	255 %	1,539,990,021	% 85	387,996,800	% 0	-	% 22	135,100,000	29 %	99,641,250	- %	73,700,000	*51 %*	*308,441,250*	*306 %*	*1,848,431,271*	*72.00%*	*72.02%*	INSPEKTORAT
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**		**-**	**25.88**	**34.82**	**34.12**	**25.68**	**0.00**	**19.00**	**60.00**	**79.50**					
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**					
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN			-		-																	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		-																	
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			-		-																	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**65,755,074,410**	**3 WTP**	**39,453,044,646**	**WTP**	**11,155,157,008**	**WTP**	**1,401,023,440**	**WTP**	**2,793,846,590**	**WTP**	**2,606,377,049**	**WTP**	**2,234,348,277**	*- WTP*	*9,035,595,356*	*3 WTP*	*48,488,640,002*	*60.00%*	*73.74%*	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**	**5**	**1,050,002,980**	**3**	**630,001,788**		**194,612,196**		**20,810,600**		**46,908,200**		**36,426,400**		**72,559,450**	**-**	***176,704,650***	***3***	***806,706,438***	***60.00%***	***76.83%***	BAPPELITBANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	160 Buku	260,719,800	96 Buku	156,431,880	Buku 32	49,443,960	Buku 0	20,810,600	Buku -	-	22 Buku	17,394,800	10 Buku	11,118,100	***32 Buku***	***49,323,500***	***128 Buku***	***205,755,380***	***80.00%***	***78.92%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penysunan Dokumen RKA-SKPD	250 Dokumen	138,352,500	150 Dokumen	83,011,500	50 Dokumen	23,555,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	50 Dokumen	12,783,650	***50 Dokumen***	***12,783,650***	***200 Dokumen***	***95,795,150***	***80.00%***	***69.24%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 Dokumen	134,550,000	3 Dokumen	80,730,000	1 Dokumen	17,370,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	17,316,000	***1 Dokumen***	***17,316,000***	***4 Dokumen***	***98,046,000***	***80.00%***	***72.87%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Dokumen	48,340,000	3 Dokumen	29,004,000	1 Dokumen	9,218,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	9,213,500	1 Dokumen	-	- Dokumen	-	***1 Dokumen***	***9,213,500***	***4 Dokumen***	***38,217,500***	***80.00%***	***79.06%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Dokumen	45,065,500	3 Dokumen	27,039,300	1 Dokumen	8,879,600	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	7,750,100	***1 Dokumen***	***7,750,100***	***4 Dokumen***	***34,789,400***	***80.00%***	***77.20%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaporan Capian Kinerja	80 Buku	248,795,500	48 Buku	149,277,300	Buku 16	59,649,700	Buku 0	-	Buku -	17,648,000	0 Buku	12,612,100	16 Buku	23,591,600	***16 Buku***	***53,851,700***	***64 Buku***	***203,129,000***	***80.00%***	***81.64%***	BAPPELITBANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	120 Buku	174,179,680	72 Buku	104,507,808	Buku 24	26,495,936	Buku 0	-	Buku 24	20,046,700	0 Buku	6,419,500	- Buku	-	***24 Buku***	***26,466,200***	***96 Buku***	***130,974,008***	***80.00%***	***75.19%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**	**290 Orang**	**41,625,837,980**	**174 Orang**	**24,975,502,788**	**Orang**	**7,210,928,122**	**Orang**	**1,345,225,840**	**Orang**	**2,078,026,666**	**Orang**	**1,706,721,638**	**Orang**	**1,708,179,657**	***- Orang***	***6,838,153,801***	***174 Orang***	***31,813,656,589***	***60.00%***	***76.43%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang	33,672,087,980	138 Orang	20,203,252,788	46 Orang	5,778,508,122	Orang 3	1,054,975,840	Orang 3	1,726,696,666	3 Orang	1,324,833,888	37 Orang	1,326,039,657	***46 Orang***	***5,432,546,051***	***184 Orang***	***25,635,798,839***	***80.00%***	***76.13%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	290 Orang	6,983,550,000	174 Orang	4,190,130,000	58 Orang	1,266,160,000	Orang 3	290,250,000	Orang 3	310,490,000	3 Orang	313,260,000	49 Orang	352,160,000	***58 Orang***	***1,266,160,000***	***232 Orang***	***5,456,290,000***	***80.00%***	***78.13%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan /Semestera n SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula /Semester SKPD	60 Bulan	970,200,000	36 Bulan	582,120,000	Bulan 12	166,260,000	Bulan 3	-	Bulan 3	40,840,000	3 Bulan	68,627,750	3 Bulan	29,980,000	***12 Bulan***	***139,447,750***	***48 Bulan***	***721,567,750***	***80.00%***	***74.37%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Pendidikan ndan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**15 Kali**	**758,550,000**	**9 Kali**	**455,130,000**	**Kali**	**98,410,000**	**Kali**	**-**	**Kali**	**68,880,000**	**Kali**	**24,934,900**	**Kali**	**-**	***- Kali***	***93,814,900***	***9 Kali***	***548,944,900***	***60.00%***	***72.37%***	BAPPELITBANG
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Jumlah Kursus- Kursus Singkat/Pelatiha Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana	15 Kali	758,550,000	9 Kali	455,130,000	Kali 3	98,410,000	Kali 0	-	Kali -	68,880,000	3 Kali	24,934,900	- Kali	-	***3 Kali***	***93,814,900***	***12 Kali***	***548,944,900***	***80.00%***	***72.37%***	BAPPELITBANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik**	**500 %**	**10,150,849,450**	**300 %**	**6,090,509,670**	**%**	**1,574,679,790**	**%**	**15,000,000**	**%**	**237,434,327**	**%**	**430,161,283**	**%**	**243,181,544**	***- %***	***925,777,154***	***300 %***	***7,016,286,824***	***60.00%***	***69.12%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 Unit	1,087,842,250	105 Unit	652,705,350	Unit 37	448,413,350	Unit 0	-	Unit 2	70,688,600	35 Unit	265,348,250	- Unit	8,230,000	***37 Unit***	***344,266,850***	***142 Unit***	***996,972,200***	***81.14%***	***91.65%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1,180,900,000	36 Bulan	708,540,000	Bulan 12	117,380,000	Bulan 0	-	Bulan 6	10,434,600	3 Bulan	23,895,300	3 Bulan	24,545,950	***12 Bulan***	***58,875,850***	***48 Bulan***	***767,415,850***	***80.00%***	***64.99%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan	60 Bulan	1,583,918,000	36 Bulan	950,350,800	Bulan 12	343,570,500	Bulan 0	-	Bulan 6	79,479,387	3 Bulan	48,460,800	3 Bulan	77,386,100	***12 Bulan***	***205,326,287***	***48 Bulan***	***1,155,677,087***	***80.00%***	***72.96%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material	60 Bulan	709,582,200	36 Bulan	425,749,320	Bulan 12	131,882,540	Bulan 3	15,000,000	Bulan 3	54,805,740	3 Bulan	16,757,600	3 Bulan	23,254,800	***12 Bulan***	***109,818,140***	***48 Bulan***	***535,567,460***	***80.00%***	***75.48%***	BAPPELITBANG
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JumJumlah Konsultasi dan Koordinasi Pemerintah Daerah	1705 kali	5,588,607,000	1023 kali	3,353,164,200	kali 341	533,433,400	kali 9	-	kali 18	22,026,000	119 kali	75,699,333	104 kali	109,764,694	***250 kali***	***207,490,027***	***1,273 kali***	***3,560,654,227***	***74.66%***	***63.71%***	BAPPELITBANG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**10 Unit**	**2,641,000,000**	**6 Unit**	**1,584,600,000**	**Unit**	**528,200,000**	**Unit**		**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	***- Unit***	***-***	***6 Unit***	***1,584,600,000***	***60.00%***	***60.00%***	BAPPELITBANG
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10 Unit	2,641,000,000	6 Unit	1,584,600,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	***-***	***6 Unit***	***1,584,600,000***	***60.00%***	***60.00%***	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Pameran Pembangunan Provinsi dan Luar Daerah dan sinergi Peogram Pembangunan Luar Daerah dan sinergi Peogram Pembangunan**	**500 %**	**5,613,405,000**	**300 %**	**3,368,043,000**	**%**	**796,389,500**	**%**	**19,987,000**	**%**	**129,165,708**	**%**	**146,707,644**	**%**	**106,236,106**	**- %**	***402,096,458***	***300 %***	***3,770,139,458***	***60.00%***	***67.16%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	60 Bulan	4,503,780,000	36 Bulan	2,702,268,000	Bulan 12	708,868,000	Bulan 3	19,987,000	Bulan 2	128,865,708	4 Bulan	139,305,744	3 Bulan	100,792,470	***12 Bulan***	***388,950,922***	***48 Bulan***	***3,091,218,922***	***80.00%***	***68.64%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Expo/Pameran Pembangunan Kabupaten, Terselenggarany Expo/ Pameran Pembangunan Provinsi dan LuaDaerah Terselenggarany Rapat Sinergitas Program Pembangunan	50 Kali	1,109,625,000	30 Kali	665,775,000	Kali 10	87,521,500	Kali 0	-	Kali -	300,000	0 Kali	7,401,900	5 Kali	5,443,636	***5 Kali***	***13,145,536***	***35 Kali***	***678,920,536***	***70.00%***	***61.18%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**60 Bulan**	**3,915,429,000**	**36 Bulan**	**2,349,257,400**	**Bulan**	**751,937,400**	**Bulan**	**-**	**Bulan**	**233,431,689**	**Bulan**	**261,425,184**	**Bulan**	**104,191,520**	***- Bulan***	***599,048,393***	***36 Bulan***	***2,948,305,793***	***60.00%***	***75.30%***	BAPPELITBANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60 Bulan	3,210,254,000	36 Bulan	1,926,152,400	Bulan 12	617,572,400	Bulan 3	-	Bulan 2	177,686,689	4 Bulan	206,960,184	3 Bulan	99,931,520	***12 Bulan***	***484,578,393***	***48 Bulan***	***2,410,730,793***	***80.00%***	***75.09%***	BAPPELITBANG
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin / Berkala Rumah Dinas Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	15 Paket/ Tahun	194,475,000	9 Paket/ Tahun	116,685,000	Paket/ Tahun 3	31,645,000	Paket/ Tahun 0	-	Paket/ Tahun -	15,760,000	3 Paket/ Tahun	15,885,000	- Paket/Tahun	-	***3 Paket/ Tahun***	***31,645,000***	***12 Paket/ Tahun***	***148,330,000***	***80.00%***	***76.27%***	BAPPELITBANG
			Pemelihara an/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5 Paket	510,700,000	3 Paket	306,420,000	Paket 1	102,720,000	Paket 0	-	Paket -	39,985,000	1 Paket	38,580,000	- Paket	4,260,000	***1 Paket***	***82,825,000***	***4 Paket***	***389,245,000***	***80.00%***	***76.22%***	BAPPELITBANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**5.93**	**12.56**	**15.82**	**25.05**	**46.15**	**23.36**	**63.96**	**20.03**	**131.87**	**81.00**				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**T**				
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu**	**460**	**15,307,089,500**	**276**	**9,184,253,700**		**2,322,315,650**		**-**		**589,045,050**		**1,086,022,400**		**407,490,400**	***-***	***2,082,557,850***	***276***	***11,266,811,550***	***60.00%***	***73.61%***	BAPPELITBANG
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Diselesaikan Secara Tepat Waktu**	**5**	**8,780,368,500**	**3**	**5,268,221,100**		**1,159,006,450**		**-**		**558,798,350**		**462,024,000**		**82,575,800**	***-***	***1,103,398,150***	***3***	***6,371,619,250***	***60.00%***	***72.57%***	BAPPELITBANG
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalah an, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	20 Kali	2,063,740,750	12 Kali	1,238,244,450	Kali 1	338,175,900	Kali 0	-	Kali -	43,351,900	1 Kali	268,464,000	- Kali	22,987,500	***1 Kali***	***334,803,400***	***13 Kali***	***1,573,047,850***	***65.00%***	***76.22%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah	Jumlah Penerapan Integrasi E-Planning dan E-Budgeting	60 Bulan	682,835,000	36 Bulan	409,701,000	Bulan 12	119,887,000	Bulan 3	-	Bulan 3	28,000,000	3 Bulan	40,547,000	3 Bulan	32,486,650	***12 Bulan***	***101,033,650***	***48 Bulan***	***510,734,650***	***80.00%***	***74.80%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaa n Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forgab SKPD	5 Kali	138,225,000	3 Kali	82,935,000	Kali 1	9,120,000	Kali 0	-	Kali -	4,976,800	1 Kali	4,064,000	- Kali	-	***1 Kali***	***9,040,800***	***4 Kali***	***91,975,800***	***80.00%***	***66.54%***	BAPPELITBANG
			Pelaksanaa n Musrenban g Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	5 Kali	3,502,609,250	3 Kali	2,101,565,550	Kali 1	488,321,850	Kali 1	-	Kali -	424,855,050	0 Kali	45,530,800	- Kali	11,470,000	***1 Kali***	***481,855,850***	***4 Kali***	***2,583,421,400***	***80.00%***	***73.76%***	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Executive Summary RKPD dan	1870 Buku	2,392,958,500	600 Buku	1,435,775,100	Buku 374	203,501,700	Buku 0	-	Buku -	57,614,600	74 Buku	103,418,200	- Buku	15,631,650	***74 Buku***	***176,664,450***	***674 Buku***	***1,612,439,550***	***36.04%***	***67.38%***	BAPPELITBANG
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya dokumen perencanaan pada kegiatan analisis data dan informasi daerah bidang perencanaan pembangunan daerah**	**200 Buku**	**5,431,546,000**	**120 Buku**	**3,258,927,600**	**Buku**	**1,016,094,200**	**Buku**	**-**	**Buku**	**22,956,700**	**Buku**	**616,668,400**	**Buku**	**310,734,600**	***- Buku***	***950,359,700***	***120 Buku***	***4,209,287,300***	***60.00%***	***77.50%***	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Analisis Data dan Informasi Perencanaa n Pembangun an Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Analisis Ekonomi Mikro Sektor Pertanian Kabupaen Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Analisis Potensi Desa/Pekon Perbatasan Kabupaten Tanggamus Jumlah Dokumen Kajian Recovery dan Fasilitasi Pemulihan Sektor Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus Penyusuna Peta Aset Bangunan Pemerintah Kabupaten Tanggamus	200 Buku	4,921,152,500	120 Buku	2,952,691,500	Buku 40	986,330,500	Buku 0	-	Buku -	6,620,000	30 Buku	616,668,400	10 Buku	310,734,600	*40 Buku*	*934,023,000*	*160 Buku*	*3,886,714,500*	*80.00%*	*78.98%*	BAPPELITBANG
			Pembinaan dan Pemanfaata n Data dan Informasi Perencanaa n Pembangun an SKPD	JUmlah Dokemen Informasi Pembangunan Kecamatan Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	1150 Buku	510,393,500	690 Buku	306,236,100	Buku 230	29,763,700	Buku 0	-	Buku 80	16,336,700	0 Buku	-	- Buku	-	*80 Buku*	*16,336,700*	*770 Buku*	*322,572,800*		*63.20%*	BAPPELITBANG
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Tersusunnya lapo keterangan pertanggungjaw kepala daerah, evaluasi capaian kinerja serta tersusunnya lap evaluasi pelaksa pembangunan**	**3375 Buku**	**1,095,175,000**	**2025 Buku**	**657,105,000**	**Buku**	**147,215,000**	**Buku**	**-**	**Buku**	**7,290,000**	**Buku**	**7,330,000**	**Buku**	**14,180,000**	*- Buku*	*28,800,000*	*2,025 Buku*	*685,905,000*	*60.00%*	*62.63%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pengendali an Perencanaa n dan Pelaksanaa n Pembangun an Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Capaian Kinerja APBD Kabupaten Tanggamus Tersusunnya Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	3375 Buku	419,150,000	2025 Buku	251,490,000	Buku 675	12,010,000	Buku 0	-	Buku 160	6,730,000	0 Buku	930,000	150 Buku	2,330,000	*310 Buku*	*9,990,000*	*2,335 Buku*	*261,480,000*		*62.38%*	BAPPELITBANG
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring dan Pengendalian Kegiatan di Kabupaten Tanggamus Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus	1950 Buku	676,025,000	1170 Buku	405,615,000	Buku 390	135,205,000	Buku 0	-	Buku 75	560,000	0 Buku	6,400,000	75 Buku	11,850,000	*150 Buku*	*18,810,000*	*1,320 Buku*	*424,425,000*		*62.78%*	BAPPELITBANG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.23**	**-**	**18.45**	**25.36**	**6.32**	**46.76**	**13.81**	**17.55**	**38.81**	**89.68**				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**				
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**33800 indeks**	**24,388,520,000**	**20280 indeks**	**14,633,112,000**	**indeks**	**4,613,689,000**	**indeks**	**-**	**indeks**	**406,410,842**	**indeks**	**2,236,018,500**	**indeks**	**1,161,063,735**	*- indeks*	*3,803,493,077*	*20,280 indeks*	*18,436,605,077*	*60.00%*	*75.60%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		**50 Buku**	**3,525,550,000**	**30 Buku**	**2,115,330,000**	**Buku**	**628,220,000**	**Buku**	**-**	**Buku**	**41,689,200**	**Buku**	**401,917,000**	**Buku**	**117,065,500**	*- Buku*	*560,671,700*	*30 Buku*	*2,676,001,700*	*60.00%*	*75.90%*	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Rencana Aksi dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	50 Buku	910,450,000	30 Buku	546,270,000	Buku 10	41,750,000	Buku 0	-	Buku -	23,749,200	10 Buku	8,640,000	- Buku	1,210,000	*10 Buku*	*33,599,200*	*40 Buku*	*579,869,200*	*80.00%*	*63.69%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Aplikasi Silumba	60 Bulan	291,000,000	36 Bulan	174,600,000	Bulan 12	65,300,000	Bulan 3	-	Bulan 2	-	1 Bulan	190,000	6 Bulan	20,000,000	*12 Bulan*	*20,190,000*	*48 Bulan*	*194,790,000*	*80.00%*	*66.94%*	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monev CSR dan PKH	50 buku	241,200,000	30 buku	144,720,000	buku 10	32,310,000	buku 0	-	buku -	17,940,000	10 buku	12,570,000	- buku	1,800,000	*10 buku*	*32,310,000*	*40 buku*	*177,030,000*	*80.00%*	*73.40%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Kabupaten Layak Anak dan Kajian Inovasi Kebijakan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	100 Buku	2,082,900,000	60 Buku	1,249,740,000	Buku 20	488,860,000	Buku 0	-	Buku -	-	20 Buku	380,517,000	- Buku	94,055,500	*20 Buku*	*474,572,500*	*80 Buku*	*1,724,312,500*	*80.00%*	*82.78%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		**10 Paket**	**5,236,800,000**	**6 Paket**	**3,142,080,000**	**Paket**	**1,026,150,000**	**Paket**		**Paket**	**-**	**Paket**	**988,165,900**	**Paket**	**545,355,900**	*- Paket*	*1,533,521,800*	*6 Paket*	*4,675,601,800*	*60.00%*	*89.28%*	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Kajian Sumber Sumber Ekonomi Baru dan Kajian Pengaruh Keberadaan Pasar Terhadap sosial EKonomi Pedagang pada Era New Normal di Kabupaten Tanggamus	100 Buku	2,410,150,000	60 Buku	1,446,090,000	Buku 20	471,510,000	Buku 0	-	Buku -	-	20 Buku	442,810,000	- Buku	-	20 Buku	442,810,000	80 Buku	1,888,900,000	80.00%	78.37%	BAPPELITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog Produk UMKM	150 Buku	2,826,650,000	90 Buku	1,695,990,000	Buku 30	554,640,000	Buku 0	-	Buku -	-	30 Buku	545,355,900	- Buku	545,355,900	30 Buku	1,090,711,800	120 Buku	2,786,701,800	80.00%	98.59%	BAPPELITBANG
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Tersusunya Dokumen Kajian Pendukung di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat**	**10 Paket**	**15,626,170,000**	**6 Paket**	**9,375,702,000**	**Paket**	**2,959,319,000**	**Paket**	**-**	**Paket**	**364,721,642**	**Paket**	**845,935,600**	**Paket**	**498,642,335**	*- Paket*	*1,709,299,577*	*6 Paket*	*11,085,001,577*	*60.00%*	*70.94%*	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	100 Buku	644,587,500	60 Buku	386,752,500	Buku 20	28,447,500	Buku 0	-	Buku 5	10,690,600	5 Buku	6,072,400	10 Buku	3,054,500	20 Buku	19,817,500	80 Buku	406,570,000	80.00%	63.07%	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Kajian Percepatan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Kab. Tanggamus dan Kajian Pengaruh KUR dan UMKM Terhadap Sustainability Profit dengan Lokasi Usaha sebagai Variabel dan Penyusunan E Katalog Produk UMKM	300 Buku	6,215,442,500	180 Buku	3,729,265,500	Buku 60	1,229,768,500	Buku 0	-	Buku -	84,410,400	0 Buku	340,665,900	60 Buku	185,294,000	60 Buku	610,370,300	240 Buku	4,339,635,800	80.00%	69.82%	BAPPELITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Tanggamus	20 Kali/Buku	2,912,216,000	12 Kali/Buku	1,747,329,600	Kali 4	560,078,200	Kali 1	-	Kali -	103,374,442	3 Kali	3,733,000	- Kali	105,570,035	4 Kali	212,677,477	16 Kali	1,960,007,077	80.00%	67.30%	BAPPELITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Koordinasi Kegiatan Percepatan Kawasan Industri Tanggamus (KIT)	90 Kali	250,003,000	54 Kali	150,001,800	Kali 18	31,370,600	Kali 0	-	Kali 3	20,130,000	5 Kali	2,185,500	2 Kali	3,030,000	10 Kali	25,345,500	64 Kali	175,347,300	71.11%	70.14%	BAPPELITBANG
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Penyusunan RAD AMPL, SPKP, Studi Pemetaan Potensi Infrastruktur Peternakan dan Perencanaan Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Tanggamus	375 Buku	5,603,921,000	225 Buku	3,362,352,600	Buku 75	1,109,654,200	Buku 0	-	Buku -	146,116,200	30 Buku	493,278,800	- Buku	201,693,800	30 Buku	841,088,800	255 Buku	4,203,441,400	68.00%	75.01%	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.43**	**-**	**4**	**8.81**	**48.03**	**48.46**	**27.96**	**25.17**	**81.00**	**82.44**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)**	**360**	**10,548,411,500**	**216**	**6,329,046,900**		**2,068,703,300**		**-**		**139,285,000**		**1,225,093,250**		**286,191,500**	**-**	*1,650,569,750*	*216*	*7,979,616,650*	*60.00%*	*75.65%*	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**5**	**2,596,525,000**	**3**	**1,557,915,000**		**363,990,000**		**-**		**58,352,800**		**283,006,700**		**15,679,000**	**-**	*357,038,500*	*3*	*1,914,953,500*	*60.00%*	*73.75%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Otonomi	Jumlah Penerimaan/Pen Mahasiswa KKN di Kabupaten Tanggamus	20 Perguruan Tinggi	260,100,000	12 Perguruan Tinggi	156,060,000	Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi	- *Perguruan Tinggi*	-	12 *Perguruan Tinggi*	*156,060,000*	*60.00%*	*60.00%*	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Indeks Inovasi Daerah (IID), SIDa, dan Sinovic Kabupaten Tanggamus	50 Buku	1,169,125,000	30 Buku	701,475,000	Buku 10	136,770,000	Buku 0	-	Buku -	14,132,000	0 Buku	106,123,500	10 Buku	15,679,000	10 Buku	135,934,500	40 Buku	837,409,500	80.00%	71.63%	BAPPELITBANG
			Fasilitasi, Pelaksanaa n dan Evaluasi Penelitian dan Pengemban gan Bidang Ketataladksa naan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kajian terhadap Perencanaan Pembangunan Desa	50 Buku	1,167,300,000	30 Buku	700,380,000	Buku 10	227,220,000	Buku 0	-	Buku -	44,220,800	0 Buku	176,883,200	10 Buku	-	10 Buku	221,104,000	40 Buku	921,484,000	80.00%	78.94%	BAPPELITBANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Terfasilitasinya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**5**	**3,673,900,000**	**3**	**2,204,340,000**		**716,660,000**		**-**		**41,151,800**		**481,701,800**		**241,454,000**	**-**	***764,307,600***	***3***	***2,968,647,600***	***60.00%***	***80.80%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus	50 Buku	800,000,000	30 Buku	480,000,000	Buku 10	158,650,000	Buku 0	-	Buku -	-	Buku	78,958,000	10 Buku	142,146,000	***10 Buku***	***221,104,000***	***40 Buku***	***701,104,000***	***80.00%***	***87.64%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaa n	Jumlah Dokumen Kajian Pola Alternatif Pembelajaran di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tanggamus dalam masa New Normal Pandemi Covid-19	50 Buku	803,950,000	30 Buku	482,370,000	Buku 10	155,360,000	Buku 0	-	Buku -	2,420,000	Buku	148,508,600	10 Buku	-	***10 Buku***	***150,928,600***	***40 Buku***	***633,298,600***	***80.00%***	***78.77%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Roadmap Wisata Kuliner Kota Agung dan Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Pariwisata Kab.Tanggamus berbasis mitigasi bencana	100 Buku	2,069,950,000	60 Buku	1,241,970,000	Buku 20	402,650,000	Buku 0	-	Buku -	38,731,800	Buku	254,235,200	20 Buku	99,308,000	***20 Buku***	***392,275,000***	***80 Buku***	***1,634,245,000***	***80.00%***	***78.95%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Terfasilitasinya Pelaksanaan Penelitian dan Pengembagan Bidang**		**2,518,900,000**		**1,511,340,000**		**485,060,000**		**-**		**35,633,600**		**292,471,550**		**-**	**-**	***328,105,150***	**-**	***1,839,445,150***		***73.03%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Peran serta	50 Buku	931,200,000	30 Buku	558,720,000	Buku 10	180,000,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	89,564,200	10 Buku	-	***10 Buku***	***89,564,200***	***40 Buku***	***648,284,200***	***80.00%***	***69.62%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Pr Jumlah Dokumen Roadmap Pengelolaan Produk komoditas unggulan Kabupaten Tanggamus	Buku	948,000,000	Buku	568,800,000	Buku 10	183,360,000	Buku 0	-	Buku -	35,633,600	0 Buku	142,534,400	10 Buku	-	***10 Buku***	***178,168,000***	***10 Buku***	***746,968,000***		***78.79%***	BAPPELITBANG
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	50 Buku	639,700,000	30 Buku	383,820,000	Buku 10	121,700,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	60,372,950	10 Buku	-	***10 Buku***	***60,372,950***	***40 Buku***	***444,192,950***	***80.00%***	***69.44%***	BAPPELITBANG
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi			**1,759,086,500**	**0**	**1,055,451,900**	**0**	**502,993,300**	**0**	**-**	**0**	**4,146,800**	**0**	**167,913,200**	**0**	**29,058,500**	**-** -	***201,118,500***	**-** -	***1,256,570,400***		***71.43%***	BAPPELITBANG
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Tanggamus	50 Buku	921,889,000	30 Buku	553,133,400	Buku 10	174,357,800	Buku 0	-	Buku -	737,800	0 Buku	86,460,700	10 Buku	-	***10 Buku***	***87,198,500***	***40 Buku***	***640,331,900***	***80.00%***	***69.46%***	BAPPELITBANG
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengg araan Pemerintah an Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus	50 Buku	837,197,500	30 Buku	502,318,500	Buku 10	328,635,500	Buku 0	-	Buku -	3,409,000	0 Buku	81,452,500	10 Buku	29,058,500	***10 Buku***	***113,920,000***	***40 Buku***	***616,238,500***	***80.00%***	***73.61%***	BAPPELITBANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**-**	**-**	**6.73**	**-**	**59.22**	**0.02**	**13.83**	**0.02**	**79.79**				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**				
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN			-		-				**7,704,030,200**		**46,000,811,794**					**-**	***53,704,841,994***	**-**	***53,704,841,994***			
			BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			-		-				**7,704,030,200**		**46,000,811,794**					**-**	***53,704,841,994***	**-**	***53,704,841,994***			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**133,850,369,315**		**80,310,221,589**		**23,617,852,645**		**4,317,004,000**		**6,261,569,893**		**5,143,256,175**		**4,975,246,930**	**-**	***20,697,076,998***	**-**	***101,007,298,587***		***75.46%***	BPKD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**	**5**	**325,437,500**	**3**	**195,262,500**		**64,480,500**		**9,800,000**		**3,515,000**		**3,810,000**		**11,118,500**	**-**	***28,243,500***	***3***	***223,506,000***	***60.00%***	***68.68%***	BPKD
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daaerah	200 Buku	86,815,000	120 Buku	52,089,000	Buku 40	16,756,000	Buku 0	-	Buku 9	2,540,000	6 Buku	3,810,000	25 Buku	-	***40 Buku***	***6,350,000***	***160 Buku***	***58,439,000***	***80.00%***	***67.31%***	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	20 Dokumen	34,190,000	12 Dokumen	20,514,000	4 Dokumen	6,838,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	5,859,250	*4 Dokumen*	*5,859,250*	*16 Dokumen*	*26,373,250*	*80.00%*	*77.14%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	34,190,000	3 Dokumen	20,514,000	1 Dokumen	6,838,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,259,250	*1 Dokumen*	*5,259,250*	*4 Dokumen*	*25,773,250*	*80.00%*	*75.38%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	17,315,000	3 Dokumen	10,389,000	1 Dokumen	3,463,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*3 Dokumen*	*10,389,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	17,315,000	3 Dokumen	10,389,000	1 Dokumen	3,463,000	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*3 Dokumen*	*10,389,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen LPPD, LKIP dan LKPJ yamg tersusun tepat waktu	Laporan Dokumen	45,874,500	Laporan Dokumen	27,524,700	4 Laporan Dokumen	9,174,900	0 Laporan Dokumen	-	Laporan Dokumen	-	0 Laporan Dokumen	-	- Laporan Dokumen	-	*- Laporan Dokumen*	*-*	*- Laporan Dokumen*	*27,524,700*		*60.00%*	BPKD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	89,738,000	3 Dokumen	53,842,800	1 Dokumen	17,947,600	0 Dokumen	9,800,000	1 Dokumen	975,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*1 Dokumen*	*10,775,000*	*4 Dokumen*	*64,617,800*	*80.00%*	*72.01%*	BPKD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan dengan Baik**	**5**	**73,284,308,815**	**3**	**43,970,585,289**		**13,750,089,495**		**2,043,061,561**		**3,734,979,194**		**2,850,006,527**		**3,151,894,448**	*-*	*11,779,941,730*	*3*	*55,750,527,019*	*60.00%*	*76.07%*	BPKD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	255 PNS	40,677,510,315	153 PNS	24,406,506,189	51 PNS	8,813,929,795	12 PNS	1,479,646,561	13 PNS	2,256,444,194	13 PNS	1,854,650,527	13 PNS	1,845,035,348	*51 PNS*	*7,435,776,630*	*204 PNS*	*31,842,282,819*	*80.00%*	*78.28%*	BPKD
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	385 Non PNS	26,968,400,000	231 Non PNS	16,181,040,000	77 Non PNS	3,808,480,000	19 Non PNS	386,100,000	20 Non PNS	1,217,220,000	19 Non PNS	809,530,000	19 Non PNS	919,500,000	*77 Non PNS*	*3,332,350,000*	*308 Non PNS*	*19,513,390,000*	*80.00%*	*72.36%*	BPKD
			Pelaksanaan Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah SPJ yang Diverifikasi	60 Bulan	5,470,926,000	36 Bulan	3,282,555,600	12 Bulan	1,094,185,200	3 Bulan	177,315,000	3 Bulan	261,315,000	3 Bulan	185,826,000	3 Bulan	378,699,600	*12 Bulan*	*1,003,155,600*	*48 Bulan*	*4,285,711,200*	*80.00%*	*78.34%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20 Dokumen	50,880,000	12 Dokumen	30,528,000	4 Dokumen	10,176,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*12 Dokumen*	*30,528,000*	*60.00%*	*60.00%*	BPKD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang Disiapkan Sebagai Tanggapan Pemeriksaan	15 Dokumen	32,067,500	9 Dokumen	19,240,500	3 Dokumen	6,413,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	*- Dokumen*	*-*	*9 Dokumen*	*19,240,500*	*60.00%*	*60.00%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokume Laporan Keuang Bulanan/Semester	20 Dokumen	84,525,000	12 Dokumen	50,715,000	4 Dokumen	16,905,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	8,659,500	*4 Dokumen*	*8,659,500*	*16 Dokumen*	*59,374,500*	*80.00%*	*70.24%*	BPKD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**904,340,000**		**542,604,000**		**180,868,000**		**-**		**99,246,000**		**27,500,000**		**15,000,000**	*-*	*141,746,000*	*-*	*684,350,000*		*75.67%*	BPKD
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Diklat/Kursus Pelatihan yang Diikuti Aparatur	25 Kali	904,340,000	15 Kali	542,604,000	5 Kali	180,868,000	0 Kali	-	3 Kali	99,246,000	1 Kali	27,500,000	1 Kali	15,000,000	*5 Kali*	*141,746,000*	*20 Kali*	*684,350,000*	*80.00%*	*75.67%*	BPKD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	14,198,747,250	36 Bulan	8,519,248,350	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		*- Bulan*	*-*	*36 Bulan*	*8,519,248,350*	*60.00%*	*60.00%*	BPKD
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	1,788,543,500	36 Bulan	1,073,126,100	12 Bulan	357,708,700	3 Bulan	87,275,000	3 Bulan	331,384,400	3 Bulan	24,860,000	3 Bulan	109,685,000	*12 Bulan*	*553,204,400*	*48 Bulan*	*1,626,330,500*	*80.00%*	*90.93%*	BPKD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman	60 Bulan	852,150,000	36 Bulan	511,290,000	12 Bulan	170,430,000	3 Bulan	13,201,650	3 Bulan	18,480,550	3 Bulan	21,893,300	3 Bulan	43,166,550	*12 Bulan*	*96,742,050*	*48 Bulan*	*608,032,050*	*80.00%*	*71.35%*	BPKD
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	2,476,474,250	36 Bulan	1,485,884,550	12 Bulan	495,294,850	3 Bulan	128,312,000	3 Bulan	124,183,000	3 Bulan	92,950,200	3 Bulan	133,111,800	*12 Bulan*	*478,557,000*	*48 Bulan*	*1,964,441,550*	*80.00%*	*79.32%*	BPKD
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	1,166,374,500	36 Bulan	699,824,700	12 Bulan	233,274,900	3 Bulan	47,454,200	3 Bulan	54,246,200	3 Bulan	47,646,700	3 Bulan	53,179,400	*12 Bulan*	*202,526,500*	*48 Bulan*	*902,351,200*	*80.00%*	*77.36%*	BPKD
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Aparatur	1000 Kali	7,915,205,000	600 Kali	4,749,123,000	200 Kali	1,583,041,000	7 Kali	55,222,621	42 Kali	329,734,440	56 Kali	277,356,153	95 Kali	410,526,438	*200 Kali*	*1,072,839,652*	*800 Kali*	*5,821,962,652*	*80.00%*	*73.55%*	BPKD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**	**5 Unit**	**122,500,000**	**3 Unit**	**73,500,000**	**Unit**	**40,000,000**	**Unit**	**-**	**Unit**	**38,800,000**	**Unit**	**-**	**Unit**	**-**	*- Unit*	*38,800,000*	*3 Unit*	*112,300,000*	*60.00%*	*91.67%*	BPKD
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	122,500,000	3 Unit	73,500,000	1 Unit	40,000,000	0 Unit	-	1 Unit	38,800,000	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*38,800,000*	*4 Unit*	*112,300,000*	*80.00%*	*91.67%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Program dan Pelaporan Kinerja**	**5**	**41,552,285,750**	**3**	**24,931,371,450**		**8,788,124,650**		**2,144,736,929**		**2,257,338,829**		**2,136,690,091**		**1,514,032,326**	-	*8,052,798,175*	*3*	*32,984,169,625*	*60.00%*	*79.38%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	40,760,147,500	36 Bulan	24,456,088,500	12 Bulan	8,692,467,000	3 Bulan	2,144,286,929	3 Bulan	2,225,016,889	3 Bulan	2,119,882,617	3 Bulan	1,487,965,112	*12 Bulan*	*7,977,151,547*	*48 Bulan*	*32,433,240,047*	*80.00%*	*79.57%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Kali/Bulan	792,138,250	36 Kali/Bulan	475,282,950	12 Kali/Bulan	95,657,650	3 Kali/Bulan	450,000	3 Kali/Bulan	32,321,940	3 Kali/Bulan	16,807,474	3 Kali/Bulan	26,067,214	*12 Kali/Bulan*	*75,646,628*	*48 Kali/Bulan*	*550,929,578*	*80.00%*	*69.55%*	BPKD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa nPael meliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Operasion**	**45 Unit**	**3,462,750,000**	**27 Unit**	**2,077,650,000**	**Unit**	**794,290,000**	**Unit**	**119,405,510**	**Unit**	**127,690,870**	**Unit**	**125,249,557**	**Unit**	**283,201,656**	*- Unit*	*655,547,593*	*27 Unit*	*2,733,197,593*	*60.00%*	*78.93%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Operasio	45 Unit	1,895,150,000	27 Unit	1,137,090,000	9 Unit	386,230,000	2 Unit	93,240,510	2 Unit	76,995,650	2 Unit	77,994,757	3 Unit	86,222,950	*9 Unit*	*334,453,867*	*36 Unit*	*1,471,543,867*	*80.00%*	*77.65%*	BPKD
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasio	55 Unit	326,250,000	33 Unit	195,750,000	11 Unit	52,200,000	0 Unit	1,600,000	1 Unit	4,921,500	1 Unit	6,075,000	9 Unit	9,672,706	*11 Unit*	*22,269,206*	*44 Unit*	*218,019,206*	*80.00%*	*66.83%*	BPKD
			Pemelihara an Aset Tetap Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasio	20 Unit	178,750,000	12 Unit	107,250,000	4 Unit	35,750,000	1 Unit	12,435,000	1 Unit	2,017,000	1 Unit	2,179,800	1 Unit	12,390,000	*4 Unit*	*29,021,800*	*16 Unit*	*136,271,800*	*80.00%*	*76.24%*	BPKD
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	601,400,000	36 Bulan	360,840,000	12 Bulan	220,280,000	0 Bulan	-	4 Bulan	31,530,000	5 Bulan	9,850,000	3 Bulan	148,868,000	*12 Bulan*	*190,248,000*	*48 Bulan*	*551,088,000*	*80.00%*	*91.63%*	BPKD
			Pemelihara an/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60 Bulan	461,200,000	36 Bulan	276,720,000	12 Bulan	99,830,000	2 Bulan	12,130,000	4 Bulan	12,226,720	3 Bulan	29,150,000	3 Bulan	26,048,000	*12 Bulan*	*79,554,720*	*48 Bulan*	*356,274,720*	*80.00%*	*77.25%*	BPKD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**12.10**	**18.28**	**23.06**	**26.51**	**24.20**	**21.78**	**38.19**	**21.07**	**97.54**	**87.63**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	**500**	**2,039,581,620,745**	**300**	**1,223,748,972,447**		**410,011,368,835**		**3,213,159,250**		**39,551,623,771**		**64,875,305,566**		**94,781,075,683**	-	*202,421,164,270*	*300*	*1,426,170,136,717*	*60.00%*	*69.92%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Tersusunya APBD dengan tepat waktu**	**5**	**4,751,065,000**	**3**	**2,850,639,000**		**1,096,063,000**		**14,475,000**		**205,276,560**		**120,903,330**		**383,297,296**	-	*723,952,186*	*3*	*3,574,591,186*	*60.00%*	*75.24%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	1400 Buku	798,820,000	840 Buku	479,292,000	280 Buku	136,564,000	0 Buku	-	- Buku	-	21 Buku	11,664,000	259 Buku	44,194,000	*280 Buku*	*55,858,000*	*1,120 Buku*	*535,150,000*	*80.00%*	*66.99%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS	1400 Buku	598,820,000	840 Buku	359,292,000	280 Buku	119,764,000	0 Buku	-	126 Buku	54,060,000	9 Buku	57,660,000	145 Buku	(9,911,554)	*280 Buku*	*101,808,446*	*1,120 Buku*	*461,100,446*	*80.00%*	*77.00%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen PERDA dan PERBUP tentang APBD	1400 Buku	732,635,000	840 Buku	439,581,000	280 Buku	171,452,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	280 Buku	70,230,350	*280 Buku*	*70,230,350*	*1,120 Buku*	*509,811,350*	*80.00%*	*69.59%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda dan Perbup tentang Perubahan APBD	1775 Buku	1,075,745,000	1065 Buku	645,447,000	355 Buku	209,274,000	24 Buku	14,475,000	89 Buku	68,535,000	12 Buku	(7,489,670)	230 Buku	83,949,500	*355 Buku*	*159,469,830*	*1,420 Buku*	*804,916,830*	*80.00%*	*74.82%*	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus	300 Dokumen	1,545,045,000	180 Dokumen	927,027,000	60 Dokumen	459,009,000	0 Dokumen	-	16 Dokumen	82,681,560	4 Dokumen	59,069,000	40 Dokumen	194,835,000	*60 Dokumen*	*336,585,560*	*240 Dokumen*	*1,263,612,560*	*80.00%*	*81.78%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**5**	**1,348,712,250**	**3**	**809,227,350**		**269,733,150**		**-**		**123,074,000**		**205,429,150**		**262,205,050**	**-**	***590,708,200***	***3***	***1,399,935,550***	***60.00%***	***103.80%***	BPKD
			Penyiapan, Pelaksanaa n Pengendali an dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	255 Perangkat Daerah	233,682,750	153 Perangkat Daerah	140,209,650	51 Perangkat Daerah	46,736,700	0 Perangkat Daerah	-	16 Perangkat Daerah	17,179,550	9 Perangkat Daerah	28,033,250	26 Perangkat Daerah	46,736,700	***51 Perangkat Daerah***	***91,949,500***	***204 Perangkat Daerah***	***232,159,150***	***80.00%***	***99.35%***	BPKD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbanga n dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Daerah	120 Buku	219,167,000	72 Buku	131,500,200	24 Buku	43,833,400	0 Buku	-	12 Buku	22,077,000	8 Buku	37,483,300	4 Buku	43,774,000	***24 Buku***	***103,334,300***	***96 Buku***	***234,834,500***	***80.00%***	***107.15%***	BPKD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluara n Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaa n Pemunguta n/Pemoton gan dan Penyetoran Perhitunga n Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	60 Bulan	273,627,500	36 Bulan	164,176,500	12 Bulan	54,725,400	0 Bulan	-	5 Bulan	22,452,700	3 Bulan	37,803,400	4 Bulan	48,103,400	***12 Bulan***	***108,359,500***	***48 Bulan***	***272,536,000***	***80.00%***	***99.60%***	BPKD
			Koordinasi Pelaksanaa n Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Laporan Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah	200 Buku	417,025,000	120 Buku	250,215,000	40 Buku	86,346,700	0 Buku	-	18 Buku	38,139,700	18 Buku	75,850,700	4 Buku	86,304,700	***40 Buku***	***200,295,100***	***160 Buku***	***450,510,100***	***80.00%***	***108.03%***	BPKD
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluara n Kas serta Pemunguta n dan Pemotonga n Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait Jumlah Pemotongan dan Penyetoran PFK	250 Perangkat Daerah	205,210,000	150 Perangkat Daerah	123,126,000	50 Perangkat Daerah	38,090,950	0 Perangkat Daerah	-	27 Perangkat Daerah	23,225,050	11 Perangkat Daerah	26,258,500	12 Perangkat Daerah	37,286,250	***50 Perangkat Daerah***	***86,769,800***	***200 Perangkat Daerah***	***209,895,800***	***80.00%***	***102.28%***	BPKD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**5**	**3,327,515,500**	**3**	**1,996,509,300**		**664,903,100**		**61,450,000**		**230,758,500**		**77,186,000**		**309,747,150**	**-**	***679,141,650***	***3***	***2,675,650,950***	***60.00%***	***80.41%***	BPKD
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 Dokumen	1,398,270,000	3 Dokumen	838,962,000	1 Dokumen	279,054,000	0 Dokumen	61,450,000	- Dokumen	146,175,000	0 Dokumen	13,700,000	1 Dokumen	34,900,000	***1 Dokumen***	***256,225,000***	***4 Dokumen***	***1,095,187,000***	***80.00%***	***78.32%***	BPKD
			Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD	Jumlah Penyusu Tanggapan/Tind Lanjut LHP BPK Laporan Pertanggungjaw Pelaksanaan AP	300 OPD	1,069,448,000	180 OPD	641,668,800	60 OPD	213,889,600	0 OPD	-	19 OPD	84,583,500	7 OPD	-	34 OPD	120,959,400	***60 OPD***	***205,542,900***	***240 OPD***	***847,211,700***	***80.00%***	***79.22%***	BPKD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengg araan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraa Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	50 Buku	292,360,000	30 Buku	175,416,000	10 Buku	58,472,000	0 Buku	-	- Buku	-	Buku	31,743,000	10 Buku	25,200,000	***10 Buku***	***56,943,000***	***40 Buku***	***232,359,000***	***80.00%***	***79.48%***	BPKD
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tersusun	50 Buku	292,360,000	30 Buku	175,416,000	10 Buku	58,472,000	0 Buku	-	- Buku	-	Buku	31,743,000	10 Buku	25,200,000	***10 Buku***	***56,943,000***	***40 Buku***	***232,359,000***	***80.00%***	***79.48%***	BPKD
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	250 OPD	275,077,500	150 OPD	165,046,500	50 OPD	55,015,500	0 OPD	-	- OPD	-	OPD	-	50 OPD	103,487,750	***50 OPD***	***103,487,750***	***200 OPD***	***268,534,250***	***80.00%***	***97.62%***	BPKD
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Waktu**	**500**	**2,030,154,327,995**	**300**	**1,218,092,596,797**		**407,980,669,585**		**3,137,234,250**		**38,992,514,711**		**64,471,787,086**		**93,825,826,187**	**-**	***200,427,362,234***	***300***	***1,418,519,959,031***	***60.00%***	***69.87%***	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	750 Organisasi	58,865,675,000	450 Organisasi	35,319,405,000	150 Organisasi	10,233,135,000	17 Organisasi	1,300,000,000	23 Organisasi	2,576,053,500	35 Organisasi	4,676,053,500	75 Organisasi	9,340,997,000	*150 Organisasi*	*17,893,104,000*	*600 Organisasi*	*53,212,509,000*	*80.00%*	*90.40%*	BPKD
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Belanja Tidak Terduga	100 Kegiatan	50,000,000,000	60 Kegiatan	30,000,000,000	20 Kegiatan	14,089,803,986	4 Kegiatan	1,837,234,250	- Kegiatan	621,504,579	4 Kegiatan	4,610,059,829	12 Kegiatan	9,229,851,425	*20 Kegiatan*	*16,298,650,083*	*80 Kegiatan*	*46,298,650,083*	*80.00%*	*92.60%*	BPKD
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Pekon yang Mendapatkan Dana Bagi Hasil	1495 Pekon	1,921,288,652,995	897 Pekon	1,152,773,191,797	299 Pekon	383,657,730,599	0 Pekon	-	28 Pekon	35,794,956,632	117 Pekon	55,185,673,757	154 Pekon	75,254,977,762	*299 Pekon*	*166,235,608,151*	*1,196 Pekon*	*1,319,008,799,948*	*80.00%*	*68.65%*	BPKD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.21**	**0.78**	**18.65**	**9.65**	**12.70**	**15.82**	**66.44**	**23.12**	**100.00**	**49.37**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**SR**					
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			**9,573,310,300**		**5,743,986,180**		**1,517,849,060**		**9,650,000**		**160,911,280**		**337,861,220**		**348,768,460**	-	*857,190,960*	-	*6,601,177,140*		*68.95%*	BPKD
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan baik**	**5**	**9,573,310,300**	**3**	**5,743,986,180**		**1,517,849,060**		**9,650,000**		**160,911,280**		**337,861,220**		**348,768,460**	-	*857,190,960*	*3*	*6,601,177,140*	*60.00%*	*68.95%*	BPKD
			Penatausah aan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	250 OPD	340,800,000	150 OPD	204,480,000	50 OPD	168,160,000	0 OPD	-	34 OPD	46,490,000	9 OPD	11,390,000	7 OPD	1,570,000	*50 OPD*	*59,450,000*	*200 OPD*	*263,930,000*	*80.00%*	*77.44%*	BPKD
			Inventarisas i Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Barang Milik Daerah	260 Buah	592,150,000	156 Buah	355,290,000	52 Buah	118,430,000	0 Buah	-	23 Buah	52,205,000	11 Buah	24,700,000	18 Buah	39,780,000	*52 Buah*	*116,685,000*	*208 Buah*	*471,975,000*	*80.00%*	*79.71%*	BPKD
			Pengamana n Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan, Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	5 Dokumen	5,297,718,000	3 Dokumen	3,178,630,800	1 Dokumen	503,443,600	0 Dokumen	9,650,000	- Dokumen	30,297,440	0 Dokumen	84,440,720	1 Dokumen	42,634,960	*1 Dokumen*	*167,023,120*	*4 Dokumen*	*3,345,653,920*	*80.00%*	*63.15%*	BPKD
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan barang Daerah yang dinilai / akan dihapuskan	125 Buku	552,006,750	75 Buku	331,204,050	25 Buku	223,888,350	0 Buku	-	- Buku	-	23 Buku	102,430,500	2 Buku	87,937,000	*25 Buku*	*190,367,500*	*100 Buku*	*521,571,550*	*80.00%*	*94.49%*	BPKD
			Optimalisas i Penggunaa n, Pemanfaata n, Pemindahta nganan, Pemusnaha n, dan Penghapus an Barang Milik Daerah	Jumlah Barang yang Dihapuskan	500 Kendaraa	441,849,000	300 Kendaraa	265,109,400	100 Kendaraa	88,369,800	0 Kendaraa	-	- Kendaraa	-	0 Kendaraa	-	100 Kendaraa	76,395,000	*100 Kendaraa*	*76,395,000*	*400 Kendaraa*	*341,504,400*	*80.00%*	*77.29%*	BPKD
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik	250 OPD	1,913,903,800	150 OPD	1,148,342,280	50 OPD	328,580,760	0 OPD	-	4 OPD	31,918,840	8 OPD	58,900,000	38 OPD	76,771,500	*50 OPD*	*167,590,340*	*200 OPD*	*1,315,932,620*	*80.00%*	*68.76%*	BPKD
			Pembinaan Pengelolaa n Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	250 OPD	434,882,750	150 OPD	260,929,650	50 OPD	86,976,550	0 OPD	-	- OPD	-	32 OPD	56,000,000	18 OPD	23,680,000	*50 OPD*	*79,680,000*	*200 OPD*	*340,609,650*	*80.00%*	*78.32%*	BPKD
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**0.64**	**18.60**	**10.60**	**25.30**	**22.26**	**56.10**	**22.98**	**100.00**	**56.47**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST'**	**R**					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**Ratio PAD terhadap total pendapatan daerah**	**340**	**3,794,161,500**	**204**	**2,276,496,900**		**1,171,478,300**		**164,216,950**		**26,706,850**		**20,665,600**		**697,327,600**	-	*908,917,000*	*204*	*3,185,413,900*	*60.00%*	*83.96%*	BPKD
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	**Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah**	**5**	**3,794,161,500**	**3**	**2,276,496,900**		**1,171,478,300**		**164,216,950**		**26,706,850**		**20,665,600**		**697,327,600**	-	*908,917,000*	*3*	*3,185,413,900*	*60.00%*	*83.96%*	BPKD
			Perencanaa n pengelolaa n pajak daerah	Jumlah Analisa Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Retribusi dan Pajak Daerah	60 Bulan	2,995,600,000	36 Bulan	1,797,360,000	12 Bulan	911,766,000	2 Bulan	164,216,950	1 Bulan	-	1 Bulan	12,211,000	8 Bulan	531,146,000	*12 Bulan*	*707,573,950*	*48 Bulan*	*2,504,933,950*	*80.00%*	*83.62%*	BPKD
			Analisa dan Pengemban gan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan tentang Sistem Admininistrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	10 Dokumen	247,347,000	6 Dokumen	148,408,200	2 Dokumen	149,469,400	0 Dokumen	-	- Dokumen	3,998,450	0 Dokumen	-	2 Dokumen	132,000,000	*2 Dokumen*	*135,998,450*	*8 Dokumen*	*284,406,650*	*80.00%*	*114.98%*	BPKD
			Pengolahan,Pemelihara an, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60 Bulan	257,231,000	36 Bulan	154,338,600	12 Bulan	51,446,200	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	15,040,000	*12 Bulan*	*15,040,000*	*48 Bulan*	*169,378,600*	*80.00%*	*65.85%*	BPKD
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Pemeriksaan Objek Pajak Daerah	500 Dokumen	77,095,000	300 Dokumen	46,257,000	100 Dokumen	15,419,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	11,012,000	Dokumen	-	100 Dokumen	3,580,000	*100 Dokumen*	*14,592,000*	*400 Dokumen*	*60,849,000*	*80.00%*	*78.93%*	BPKD
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Retribusi dan Pajak Daerah	20 Laporan	155,426,000	12 Laporan	93,255,600	4 Laporan	31,085,200	0 Laporan	-	- Laporan	7,126,900	3 Laporan	3,885,100	1 Laporan	12,429,800	*4 Laporan*	*23,441,800*	*16 Laporan*	*116,697,400*	*80.00%*	*75.08%*	BPKD

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengendali an, Pemeriksaa n dan Pengawasa n Pajak Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan Tentang Intisifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Dokumen	61,462,500	3 Dokumen	36,877,500	1 Dokumen	12,292,500	0 Dokumen	-	- Dokumen	4,569,500	0 Dokumen	4,569,500	1 Dokumen	3,131,800	*1 Dokumen*	*12,270,800*	*4 Dokumen*	*49,148,300*	*80.00%*	*79.96%*	BPKD
											Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.53**		**14.02**	**0.76**	**2.28**	**3.05**	**1.76**	**94.66**	**59.53**	**100.00**	**77.59**				
											Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**R**	**ST'**	**T**				
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN			35,650,063,275		21,390,037,965		7,316,853,709		**942,955,021**		**1,604,090,503**					-	*2,547,045,524*	-	*23,937,083,489*		*67.14%*	BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			13,573,714,750		8,144,228,850		2,689,104,750		**638,838,000**		**873,258,000**					-	*1,512,096,000*	-	*9,656,324,850*		*71.14%*	BKPSDM
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			49,223,778,025		29,534,266,815		**10,005,958,459**		**1,511,145,221**		**2,359,942,285**					-	*3,871,087,506*	-	*33,405,354,321*		*67.86%*	BKPSDM
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**21,639,280,035**	**3 WTP**	**12,983,568,021**	**WTP**	**4,796,005,789**	**WTP**	**780,059,021**	**WTP**	**1,287,519,485**	**WTP**	**2,890,003,682**	**WTP**	**- 837,669,401**	*- WTP*	*4,119,912,787*	*3 WTP*	*17,103,480,808*	*60.00%*	*79.04%*	BKPSDM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	**5**	**44,043,000**	**3**	**26,425,800**		**8,808,600**		**-**		**507,000**		**-**		**5,456,100**	-	*5,963,100*	*3*	*32,388,900*	*60.00%*	*73.54%*	BKPSDM
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahannya	25 Buku	12,843,000	15 Buku	7,705,800	5 Buku	2,568,600	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	3 Buku	750,000	*3 Buku*	*750,000*	*18 Buku*	*8,455,800*	*72.00%*	*65.84%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	4,800,000	150 Eksemplar Dokumen	2,880,000	50 Eksemplar Dokumen	960,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	858,000	*50 Eksemplar Dokum*	*858,000*	*200 Eksemplar Dokum*	*3,738,000*	*80.00%*	*77.88%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250 Eksemplar Dokumen	5,100,000	150 Eksemplar Dokumen	3,060,000	50 Eksemplar Dokumen	1,020,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	873,000	*50 Eksemplar Dokum*	*873,000*	*200 Eksemplar Dokum*	*3,933,000*	*80.00%*	*77.12%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-RKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,850,000	30 Eksemplar Dokumen	3,510,000	10 Eksemplar Dokumen	1,170,000	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	507,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	1,107,000	*10 Eksemplar Dokum*	*1,614,000*	*40 Eksemplar Dokum*	*5,124,000*	*80.00%*	*87.59%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,600,000	30 Eksemplar Dokumen	3,960,000	10 Eksemplar Dokumen	1,320,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	865,500	*10 Eksemplar Dokum*	*865,500*	*40 Eksemplar Dokum*	*4,825,500*	*80.00%*	*73.11%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	40 Eksemplar Dokumen	4,800,000	24 Eksemplar Dokumen	2,880,000	8 Eksemplar Dokumen	960,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	417,000	*8 Eksemplar Dokum*	*417,000*	*32 Eksemplar Dokum*	*3,297,000*	*80.00%*	*68.69%*	BKPSDM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD,,LAKIP, LKPJ Perangakt Daerah	500 Eksemplar Dokumen	4,050,000	300 Eksemplar Dokumen	2,430,000	100 Eksemplar Dokumen	810,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	100 Eksemplar Dokumen	585,600	*100 Eksemplar Dokum*	*585,600*	*400 Eksemplar Dokum*	*3,015,600*	*80.00%*	*74.46%*	BKPSDM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu**	**5**	**16,292,078,485**	**3**	**9,775,247,091**		**3,660,655,429**		**711,717,483**		**1,084,076,702**		**2,612,229,895**		**- 961,838,307**	-	*3,446,185,773*	*3*	*13,221,432,864*	*60.00%*	*81.15%*	BKPSDM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang	13,817,978,485	93 Orang	8,290,787,091	34 Orang	3,186,235,429	9 Orang	611,467,483	8 Orang	962,626,702	9 Orang	2,272,179,895	8 Orang	(873,908,307)	*34 Orang*	*2,972,365,773*	*127 Orang*	*11,263,152,864*	*81.94%*	*81.51%*	BKPSDM
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksana Tugas ASN	125 Orang	2,049,000,000	75 Orang	1,229,400,000	25 Orang	409,800,000	6 Orang	100,250,000	7 Orang	100,250,000	6 Orang	302,950,000	6 Orang	(93,650,000)	*25 Orang*	*409,800,000*	*100 Orang*	*1,639,200,000*	*80.00%*	*80.00%*	BKPSDM
			Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan SKPD	60 Kali	420,000,000	36 Kali	252,000,000	12 Kali	63,600,000	0 Kali	-	4 Kali	21,200,000	3 Kali	37,100,000	5 Kali	5,300,000	*12 Kali*	*63,600,000*	*48 Kali*	*315,600,000*	*80.00%*	*75.14%*	BKPSDM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Buku	5,100,000	15 Buku	3,060,000	5 Buku	1,020,000	0 Buku	-	- Buku	-	Buku	-	5 Buku	420,000	*5 Buku*	*420,000*	*20 Buku*	*3,480,000*	*80.00%*	*68.24%*	BKPSDM
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**	**5**	**126,000,000**	**3**	**75,600,000**		**25,200,000**		**-**		**-**		**24,021,800**			-	*24,021,800*	*3*	*99,621,800*	*60.00%*	*79.06%*	BKPSDM
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa nnya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	610 Stel	126,000,000	366 Stel	75,600,000	61 Stel	25,200,000	0 Stel	-	- Stel	-	61 Stel	24,021,800	- Stel	-	*61 Stel*	*24,021,800*	*427 Stel*	*99,621,800*	*70.00%*	*79.06%*	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Laporan Administrasi Umum aPnerangkat rDaerah yang disusun dengan Baik**	**5**	**2,635,592,300**	**3**	**1,581,355,380**		**553,330,760**		**23,643,900**		**120,490,679**		**202,687,319**		**12,655,961**	**-**	***359,477,859***	***3***	***1,940,833,239***	***60.00%***	***73.64%***	BKPSDM
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kanto	5190 Unit	66,978,000	3114 Unit	40,186,800	Unit 1038	11,395,600	Unit 100	3,888,800	Unit 27	4,888,800	6 Unit	4,888,800	81 Unit	(7,327,600)	***214 Unit***	***6,338,800***	***3,328 Unit***	***46,525,600***	***64.12%***	***69.46%***	BKPSDM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	184,981,300	15 Unit	110,988,780	Unit 5	44,065,060	Unit 0	12,225,100	Unit 1	23,332,600	0 Unit	25,982,600	4 Unit	(29,190,220)	***5 Unit***	***32,350,080***	***20 Unit***	***143,338,860***	***80.00%***	***77.49%***	BKPSDM
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minumanuntuk Keperluan Rutin	8950 Porsi	197,000,000	5370 Porsi	118,200,000	Porsi 1790	14,423,000	Porsi 150	1,880,000	Porsi 90	3,410,000	39 Porsi	5,550,000	279 Porsi	(1,407,000)	***558 Porsi***	***9,433,000***	***5,928 Porsi***	***127,633,000***	***66.23%***	***64.79%***	BKPSDM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	7500 Eksempl	309,755,500	4500 Eksempl	185,853,300	Eksempl 1500	79,247,600	Eksempl 0	-	Eksempl 16	8,000,000	3 Eksempl	41,506,200	160 Eksempl	6,100,000	***179 Eksempl***	***55,606,200***	***4,679 Eksempl***	***241,459,500***	***62.39%***	***77.95%***	BKPSDM
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	223120 Buah	259,567,500	133872 Buah	155,740,500	Buah 44624	51,913,500	Buah 35	5,650,000	Buah -	6,150,000	616 Buah	32,553,540	278 Buah	(1,325,000)	***929 Buah***	***43,028,540***	***134,801 Buah***	***198,769,040***	***60.42%***	***76.58%***	BKPSDM
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	1735 Kali	1,617,310,000	1041 Kali	970,386,000	Kali 347	352,286,000	Kali 0	-	Kali 34	74,709,279	10 Kali	92,206,179	13 Kali	45,805,781	***57 Kali***	***212,721,239***	***1,098 Kali***	***1,183,107,239***	***63.29%***	***73.15%***	BKPSDM
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**5**	**238,631,250**	**3**	**143,178,750**		**112,500,000**		**-**		**10,862,500**		**5,145,000**		**-**	**-**	***16,007,500***	***3***	***159,186,250***	***60.00%***	***66.71%***	BKPSDM
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	238,631,250	21 Unit	143,178,750	Unit 7	112,500,000	Unit 0	-	Unit 1	10,862,500	1 Unit	5,145,000	- Unit	-	***2 Unit***	***16,007,500***	***23 Unit***	***159,186,250***	***65.71%***	***66.71%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunya Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**5**	**1,027,585,000**	**3**	**616,551,000**		**180,501,000**		**22,850,153**		**42,889,900**		**23,398,418**		**50,756,498**	**-**	***139,894,969***	***3***	***756,445,969***	***60.00%***	***73.61%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	375 Buah	20,250,000	225 Buah	12,150,000	Buah 75	4,050,000	Buah 1	57,000	Buah 2	156,000	0 Buah	-	5 Buah	989,500	***8 Buah***	***1,202,500***	***233 Buah***	***13,352,500***	***62.13%***	***65.94%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	779,785,000	36 Bulan	467,871,000	Bulan 12	166,451,000	Bulan 3	22,793,153	Bulan 3	32,833,900	3 Bulan	23,398,418	3 Bulan	49,766,998	***12 Bulan***	***128,792,469***	***48 Bulan***	***596,663,469***	***80.00%***	***76.52%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	227,550,000	3 Kali	136,530,000	Kali 1	10,000,000	Kali 0	-	Kali -	9,900,000	0 Kali	-	1 Kali	-	***1 Kali***	***9,900,000***	***4 Kali***	***146,430,000***	***80.00%***	***64.35%***	BKPSDM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	**5**	**1,275,350,000**	**3**	**765,210,000**		**255,010,000**		**21,847,485**		**28,692,704**		**22,521,250**		**55,300,347**	**-**	***128,361,786***	***3***	***893,571,786***	***60.00%***	***70.06%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dengan Baik	5 Unit	223,350,000	3 Unit	134,010,000	Unit 1	44,670,000	Unit 0	4,311,212	Unit -	6,221,454	0 Unit	5,470,000	1 Unit	13,525,907	***1 Unit***	***29,528,573***	***4 Unit***	***163,538,573***	***80.00%***	***73.22%***	BKPSDM
			Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dengan Baik	25 Unit	635,300,000	15 Unit	381,180,000	Unit 5	127,060,000	Unit 0	15,716,273	Unit 2	20,671,250	1 Unit	17,051,250	2 Unit	41,774,440	***5 Unit***	***95,213,213***	***20 Unit***	***476,393,213***	***80.00%***	***74.99%***	BKPSDM
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	30 Unit	137,950,000	18 Unit	82,770,000	Unit 6	27,530,000	Unit 1	1,820,000	Unit 1	1,800,000	0 Unit	-	- Unit	-	***2 Unit***	***3,620,000***	***20 Unit***	***86,390,000***	***66.67%***	***62.62%***	BKPSDM
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dengan Baik	10 Unit	278,750,000	6 Unit	167,250,000	Unit 2	55,750,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	***-***	***6 Unit***	***167,250,000***	***60.00%***	***60.00%***	BKPSDM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.61**	**16.26**	**0.41**	**26.85**	**1.52**	**60.26**	**2.15**	**17.47**	**4.70**	**85.90**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**465**	**14,010,783,240**	**279**	**8,406,469,944**		**2,520,847,920**		**92,248,200**		**199,164,800**		**283,460,100**		**955,025,600**	**-**	***1,529,898,700***	***279***	***9,936,368,644***	***60.00%***	***70.92%***	BKPSDM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Terlaksanannya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**5**	**8,142,487,000**	**3**	**4,885,492,200**		**1,467,071,200**		**750,000**		**25,861,300**		**71,710,000**		**688,678,200**	-	***786,999,500***	***3***	***5,672,491,700***	***60.00%***	***69.67%***	BKPSDM
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaa n Pengadaan ASN	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	40000 Pelamar	6,687,203,000	24000 Pelamar	4,012,321,800	8000 Pelamar	1,203,860,600	0 Pelamar	-	- Pelamar	-	4099 Pelamar	61,210,000	- Pelamar	683,128,200	***4,099 Pelamar***	***744,338,200***	***28,099 Pelamar***	***4,756,660,000***	***70.25%***	***71.13%***	BKPSDM
			Pengelolaa n Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Buku Profil	471,160,000	6 Buku Profil	282,696,000	2 Buku Profil	76,385,800	0 Buku Profil	-	- Buku Profil	11,891,300	2 Buku Profil	10,500,000	- Buku Profil	1,650,000	***2 Buku Profil***	***24,041,300***	***8 Buku Profil***	***306,737,300***	***80.00%***	***65.10%***	BKPSDM
			Pengelolaa n Data Kepegawaia n	Jumlah Penyelenggara Negara Pemerintah Kab.Tanggamus yang Melapor Harta Kekayaannya	750 Penyelen Negara	114,199,000	450 Penyelen Negara	68,519,400	150 Penyelen Negara	22,839,800	146 Penyelen Negara	750,000	- Penyelen Negara	10,410,000	0 Penyelen Negara	-	- Penyelen Negara	-	***146 Penyelen Negara***	***11,160,000***	***596 Penyelen Negara***	***79,679,400***	***79.47%***	***69.77%***	BKPSDM
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	10000 Dokum	869,925,000	6000 Dokum	521,955,000	2000 Dokum	163,985,000	0 Dokum	-	- Dokum	3,560,000	0 Dokum	-	2,000 Dokum	3,900,000	***2,000 Dokum***	***7,460,000***	***8,000 Dokum***	***529,415,000***	***80.00%***	***60.86%***	BKPSDM
			Mutasi dan Promosi ASN	**Terlaksananya Mutasi dan Promosi PNS sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja**	**5**	**4,780,935,400**	**3**	**2,868,561,240**		**912,373,420**		**73,719,200**		**129,954,400**		**211,750,100**		**235,677,400**	-	***651,101,100***	***3***	***3,519,662,340***	***60.00%***	***73.62%***	BKPSDM
			Pengelolaa n Mutasi ASN	Jumlah Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS	50 Kali	273,314,000	30 Kali	163,988,400	10 Kali	14,950,800	0 Kali	-	10 Kali	6,698,400	0 Kali	-	- Kali	3,450,400	***10 Kali***	***10,148,800***	***40 Kali***	***174,137,200***	***80.00%***	***63.71%***	BKPSDM
			Pengelolaa n Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6500 SK	189,508,300	3900 SK	113,704,980	1300 SK	33,800,000	0 SK	-	244 SK	14,006,000	0 SK	-	707 SK	-	***951 SK***	***14,006,000***	***4,851 SK***	***127,710,980***	***74.63%***	***67.39%***	BKPSDM
			Pengelolaa n Promosi ASN	Jumlah Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan PTP dan Penataan Jabatan PTP	20 Selter dan Penataan	4,318,113,100	12 Selter dan Penataan	2,590,867,860	3 Selter dan Penataan	863,622,620	1 Selter dan Penataan	73,719,200	- Selter dan Penataan	109,250,000	1 Selter dan Penataan	211,750,100	1 Selter dan Penataan	232,227,000	***3 Selter dan Penataan***	***626,946,300***	***15 Selter dan Penataan***	***3,217,814,160***	***75.00%***	***74.52%***	BKPSDM
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Terlaksanannya Penilaian dan Evaluasi Kinerja PNS dalam Jabatan Administrator, Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Tanggamus**	**5**	**1,087,360,840**	**3**	**652,416,504**		**141,403,300**		**17,779,000**		**43,349,100**		-		**30,670,000**	-	***91,798,100***	***3***	***744,214,604***	***60.00%***	***68.44%***	BKPSDM
			Pelaksanaa n Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3000 ASN	492,000,000	1800 ASN	295,200,000	600 ASN	49,350,800	0 ASN	-	301 ASN	24,480,400	138 ASN	-	20 ASN	23,620,000	***459 ASN***	***48,100,400***	***2,259 ASN***	***343,300,400***	***75.30%***	***69.78%***	BKPSDM
			Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan Disiplin ASN	45 Kali	595,360,840	27 Kali	357,216,504	15 Kali	92,052,500	2 Kali	17,779,000	2 Kali	18,868,700	2 Kali	-	3 Kali	7,050,000	***9 Kali***	***43,697,700***	***36 Kali***	***400,914,204***	***80.00%***	***67.34%***	BKPSDM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.23**	**3.66**	**4.61**	**7.90**	**35.12**	**11.24**	**22.61**	**37.89**	**63.57**	**60.69**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**R**					
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase PNS yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan**	**40**	**13,573,714,750**	**24**	**8,144,228,850**		**2,689,104,750**		**638,838,000**		**873,258,000**		**624,351,600**		**483,919,150**	-	***2,620,366,750***	***24***	***10,764,595,600***	***60.00%***	***79.30%***	BKPSDM
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Terlaksanannya Pengembangan Kompetensi ASN dan Sertifikasi Kompetensi**	**5**	**13,573,714,750**	**3**	**8,144,228,850**		**2,689,104,750**		**638,838,000**		**873,258,000**		**624,351,600**		**483,919,150**	-	***2,620,366,750***	***3***	***10,764,595,600***	***60.00%***	***79.30%***	BKPSDM
			Pelaksanaa n Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengiriman Peserta Pengembangan Kompetensi Kabupaten Tanggamus	25 PNS	98,691,000	15 PNS	59,214,600	PNS		PNS		PNS		PNS		PNS		***- PNS***	-	***15 PNS***	***59,214,600***	***60.00%***	***60.00%***	BKPSDM
			Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpi nan, dan Prajabatan	Jumlah Penyelenggaraa Pengembangan Kompetensi Bag Pimpinan yang berperidikat Memuaskan	1385 CPNS dan PNS	13,475,023,750	831 CPNS dan PNS	8,085,014,250	274 CPNS dan PNS	2,689,104,750	0 CPNS dan PNS	638,838,000	- CPNS dan PNS	873,258,000	274 CPNS dan PNS	624,351,600	- CPNS dan PNS	483,919,150	***274 CPNS dan PNS***	***2,620,366,750***	***1,105 CPNS dan PNS***	***10,705,381,000***	***79.78%***	***79.45%***	BKPSDM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**-**	**23.76**	**-**	**32.47**	**100.00**	**23.22**	**-**	**18.00**	**100.00**	**97.44**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI			-		-				**70,647,800**		**117,406,218**					-	***188,054,018***	-	***188,054,018***			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**2,503,500,500**	**3 WTP**	**1,502,100,300**	**WTP**	**593,274,730**	**WTP**	**70,647,800**	**WTP**	**117,406,218**	**WTP**	**98,132,818**	**WTP**	**172,579,618**	***- WTP***	***458,766,454***	***3 WTP***	***1,960,866,754***	***60.00%***	***78.32%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**61,631,000**	**3**	**36,978,600**		**12,326,200**		**988,000**		**3,195,200**		**-**		**3,188,600**	**-**	***7,371,800***	***3***	***44,350,400***	***60.00%***	***71.96%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra , Renja dan Perubahannya	80 Buku	16,992,500	48 Buku	10,195,500	Buku 16	3,398,500	Buku 4	532,000	Buku -	366,900	0 Buku	-	12 Buku	-	***16 Buku***	***898,900***	***64 Buku***	***11,094,400***	***80.00%***	***65.29%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150 Eksemplar Dokumen	29,006,500	90 Eksemplar Dokumen	17,403,900	30 Eksemplar Dokumen	5,801,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,216,300	10 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2,020,000	***30 Eksemplar Dokum***	***4,236,300***	***120 Eksemplar Dokum***	***21,640,200***	***80.00%***	***74.60%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3,953,000	90 Eksemplar Dokumen	2,371,800	30 Eksemplar Dokumen	790,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	790,600	***30 Eksemplar Dokum***	***790,600***	***120 Eksemplar Dokum***	***3,162,400***	***80.00%***	***80.00%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,643,000	45 Eksemplar Dokumen	1,585,800	15 Eksemplar Dokumen	528,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***45 Eksemplar Dokum***	***1,585,800***	***60.00%***	***60.00%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,553,000	45 Eksemplar Dokumen	1,531,800	15 Eksemplar Dokumen	510,600	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	378,000	***15 Eksemplar Dokum***	***378,000***	***60 Eksemplar Dokum***	***1,909,800***	***80.00%***	***74.81%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	90 Eksemplar Dokumen	1,446,000	54 Eksemplar Dokumen	867,600	18 Eksemplar Dokumen	289,200	6 Eksemplar Dokumen	105,000	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	12 Eksemplar Dokumen	-	***18 Eksemplar Dokum***	***105,000***	***72 Eksemplar Dokum***	***972,600***	***80.00%***	***67.26%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	45 Eksemplar Dokumen	5,037,000	27 Eksemplar Dokumen	3,022,200	9 Eksemplar Dokumen	1,007,400	3 Eksemplar Dokumen	351,000	- Eksemplar Dokumen	612,000	3 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***6 Eksemplar Dokum***	***963,000***	***33 Eksemplar Dokum***	***3,985,200***	***73.33%***	***79.12%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang disusun Tepat Waktu**	**5**	**1,535,818,000**	**3**	**921,490,800**		**303,926,730**		**61,258,800**		**77,849,000**		**68,789,000**		**75,546,000**	**-**	***283,442,800***	***3***	***1,204,933,600***	***60.00%***	***78.46%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang	982,800,000	12 Orang	589,680,000	4 Orang	193,183,130	1 Orang	37,572,800	1 Orang	45,474,000	1 Orang	45,474,000	1 Orang	44,891,000	***4 Orang***	***173,411,800***	***16 Orang***	***763,091,800***	***80.00%***	***77.64%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Administras i Pelaksanaa n Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	20 Orang	340,500,000	12 Orang	204,300,000	4 Orang	68,100,000	4 Orang	16,675,000	- Orang	17,075,000	1 Orang	16,675,000	1 Orang	17,075,000	***4 Orang***	***67,500,000***	***16 Orang***	***271,800,000***	***80.00%***	***79.82%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pelaksanaa n Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan Pengujian/Verifi Keuangan	60 Kali	200,450,000	36 Kali	120,270,000	Kali 12	40,230,000	Kali 2	6,640,000	Kali 4	13,280,000	2 Kali	6,640,000	4 Kali	13,580,000	***12 Kali***	***40,140,000***	***48 Kali***	***160,410,000***	***80.00%***	***80.02%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Buku	12,068,000	9 Buku	7,240,800	Buku 3	2,413,600	Buku 0	371,000	Buku -	2,020,000	3 Buku	-	- Buku	-	***3 Buku***	***2,391,000***	***12 Buku***	***9,631,800***	***80.00%***	***79.81%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik**	**5**	**541,451,500**	**3**	**324,870,900**		**213,932,800**		**5,257,600**		**10,989,800**		**6,863,600**		**59,562,900**	**-**	***82,673,900***	***3***	***407,544,800***	***60.00%***	***75.27%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Unit	16,320,000	9 Unit	9,792,000	Unit 11	83,046,800	Unit 3	3,117,000	Unit -	3,117,000	8 Unit	4,683,000	- Unit	200,000	***11 Unit***	***11,117,000***	***20 Unit***	***20,909,000***	***86.96%***	***128.12%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	480 Porsi	21,600,000	288 Porsi	12,960,000	Porsi 96	4,320,000	Porsi 0	-	Porsi -	1,782,000	48 Porsi	712,800	16 Porsi	712,800	***64 Porsi***	***3,207,600***	***352 Porsi***	***16,167,600***	***73.33%***	***74.85%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	1115 Eksempla	41,078,000	669 Eksempla	24,646,800	223 Eksempla	9,154,600	0 Eksempla	-	- Eksempla	3,800,200	120 Eksempla	864,300	- Eksempla	2,737,200	***120 Eksempla***	***7,401,700***	***789 Eksempla***	***32,048,500***	***70.76%***	***78.02%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Bahan/Mat erial	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan/Material Lainnya	870 Buah	31,038,500	522 Buah	18,623,100	Buah 174	6,828,400	Buah 70	2,140,600	Buah -	2,140,600	70 Buah	603,500	21 Buah	1,390,200	***161 Buah***	***6,274,900***	***683 Buah***	***24,898,000***	***78.51%***	***80.22%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	300 Kali	431,415,000	180 Kali	258,849,000	Kali 60	110,583,000	Kali 0	-	Kali -	150,000	1 Kali	-	5 Kali	54,522,700	***6 Kali***	***54,672,700***	***186 Kali***	***313,521,700***	***62.00%***	***72.67%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500 %**	**149,975,000**	**300 %**	**89,985,000**	**% 100**	**21,394,000**	**%**	**676,000**	**%**	**7,365,418**	**%**	**16,710,918**	**%**	**20,927,118**	***- %***	***45,679,454***	***300 %***	***135,664,454***	***60.00%***	***90.46%***	SEKRETRIAT DP KORPRI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	60 Kali	43,935,000	36 Kali	26,361,000	12 Kali	15,494,000	3 Kali	676,000	3 Kali	2,065,418	2 Kali	11,410,918	4 Kali	15,027,118	***12 Kali***	***29,179,454***	***48 Kali***	***55,540,454***	***80.00%***	***126.42%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelayanan Umum Kantor	5 Kali	106,040,000	3 Kali	63,624,000	1 Kali	5,900,000	0 Kali	-	- Kali	5,300,000	0 Kali	5,300,000	1 Kali	5,900,000	***1 Kali***	***16,500,000***	***4 Kali***	***80,124,000***	***80.00%***	***75.56%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik**	**5**	**214,625,000**	**3**	**128,775,000**		**41,695,000**		**2,467,400**		**18,006,800**		**5,769,300**		**13,355,000**	-	***39,598,500***	***3***	***168,373,500***	***60.00%***	***78.45%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit Mobil	175,850,000	3 Unit Mobil	105,510,000	1 Unit Mobil	34,670,000	0 Unit Mobil	2,467,400	- Unit Mobil	14,071,800	0 Unit Mobil	4,934,800	1 Unit Mobil	12,843,000	***1 Unit Mobil***	***34,317,000***	***4 Unit Mobil***	***139,827,000***	***80.00%***	***79.51%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Bulan	17,850,000	36 Bulan	10,710,000	12 Bulan	2,840,000	0 Bulan	-	- Bulan	-	6 Bulan	834,500	6 Bulan	512,000	***12 Bulan***	***1,346,500***	***48 Bulan***	***12,056,500***	***80.00%***	***67.54%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pemelihara an/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara dengan baik	5 Unit	20,925,000	3 Unit	12,555,000	1 Unit	4,185,000	0 Unit	-	- Unit	3,935,000	1 Unit	-	- Unit	-	***1 Unit***	***3,935,000***	***4 Unit***	***16,490,000***	***80.00%***	***78.81%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**11.33**	**11.91**	**0.71**	**19.79**	**32.59**	**16.54**	**17.59**	**29.09**	62.22	77.33					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**T**					
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik**	**465**	**698,461,000**	**279**	**419,076,600**		**40,464,200**		-		-		-		-	-	-	***279***	***419,076,600***	***60.00%***	***60.00%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi**	**5**	**698,461,000**	**3**	**419,076,600**		**40,464,200**		-		-		-		-	-	-	***3***	***419,076,600***	***60.00%***	***60.00%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
			Peningkata n Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	15 Kali	698,461,000	9 Kali	419,076,600	3 Kali	40,464,200	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***9 Kali***	***419,076,600***	***60.00%***	***60.00%***	SEKRETRIAT DP KORPRI
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**-**	**0.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-					
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			UNSUR KEWILAYAHAN			-		-											-	-	-	-			
			KECAMATAN KOTA AGUNG			-		-											-	-	-	-			
			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**28,629,116,195**	**WTP**	**17,177,469,717**	**WTP**	**5,311,139,147**	**WTP**	**949,108,126**	**WTP**	**2,353,869,076**	**WTP**	**352,305,182**	**WTP**	**1,061,960,120**	- ***WTP***	***4,717,242,504***	- ***WTP***	***21,894,712,221***		***76.48%***	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**	**500**	**100,375,500**	**300**	**60,225,300**		**20,075,100**		**1,109,350**		**3,051,950**		**8,066,350**		**2,400,000**	-	***14,627,650***	***300***	***74,852,950***	***60.00%***	***74.57%***	KEC. KOTA AGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Perubahan Renja	150 Buku	74,625,000	90 Buku	44,775,000	30 Buku	14,925,000	2 Buku	1,109,350	7 Buku	2,601,950	11 Buku	6,354,650	10 Buku	2,400,000	***30 Buku***	***12,465,950***	***120 Buku***	***57,240,950***	***80.00%***	***76.70%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Eksemplar Dokumen	11,608,500	60 Eksemplar Dokumen	6,965,100	20 Eksemplar Dokumen	2,321,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	971,700	12 Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokum***	***971,700***	***80 Eksemplar Dokum***	***7,936,800***	***80.00%***	***68.37%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,983,500	30 Eksemplar Dokumen	3,590,100	10 Eksemplar Dokumen	1,196,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***3,590,100***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD	75 Eksemplar Dokumen	2,250,000	45 Eksemplar Dokumen	1,350,000	15 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***15 Eksemplar Dokum***	***450,000***	***60 Eksemplar Dokum***	***1,800,000***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3,808,500	45 Eksemplar Dokumen	2,285,100	15 Eksemplar Dokumen	761,700	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	740,000	- Eksemplar Dokumen	-	***15 Eksemplar Dokum***	***740,000***	***60 Eksemplar Dokum***	***3,025,100***	***80.00%***	***79.43%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	30 Eksemplar Dokumen	630,000	10 Eksemplar Dokumen	210,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***630,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPj Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	30 Eksemplar Dokumen	630,000	10 Eksemplar Dokumen	210,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*30 Eksemplar Dokum*	*630,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu**	**500**	**23,205,673,645**	**300**	**13,923,404,187**		**4,388,258,795**		**904,184,126**		**2,179,669,076**		**120,337,982**		**1,004,020,120**	*-*	*4,208,211,304*	*300*	*18,131,615,491*	*60.00%*	*78.13%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang	14,207,723,645	75 Orang	8,524,634,187	Orang 25	2,684,428,795	Orang 6	506,939,126	Orang 7	1,349,059,076	6 Orang	90,462,982	6 Orang	593,735,120	*25 Orang*	*2,540,196,304*	*100 Orang*	*11,064,830,491*	*80.00%*	*77.88%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Non PNS yang Mendukung Pelaksanaan Tugas ASN	420 Orang	8,088,000,000	252 Orang	4,852,800,000	Orang 84	1,617,600,000	Orang 21	385,125,000	Orang 42	796,500,000	0 Orang	12,675,000	21 Orang	395,625,000	*84 Orang*	*1,589,925,000*	*336 Orang*	*6,442,725,000*	*80.00%*	*79.66%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Kali	905,900,000	36 Kali	543,540,000	Kali 12	85,420,000	Kali 3	12,120,000	Kali 3	34,110,000	3 Kali	17,200,000	3 Kali	14,660,000	*12 Kali*	*78,090,000*	*48 Kali*	*621,630,000*	*80.00%*	*68.62%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Buku	4,050,000	30 Buku	2,430,000	Buku 10	810,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	-	*30 Buku*	*2,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik**	**500**	**320,375,000**	**300**	**192,225,000**		**36,100,000**		**-**		**-**		**13,800,000**		**-**	*-*	*13,800,000*	*300*	*206,025,000*	*60.00%*	*64.31%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1375 Stel	320,375,000	825 Stel	192,225,000	Stel 275	36,100,000	Stel 0	-	Stel -	-	105 Stel	13,800,000	170 Stel	-	*275 Stel*	*13,800,000*	*1,100 Stel*	*206,025,000*	*80.00%*	*64.31%*	KEC. KOTA AGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat Waktu**	**500**	**797,997,050**	**300**	**478,798,230**	**100**	**136,242,152**		**2,300,000**		**10,177,000**		**41,469,000**		**22,600**	*-*	*53,968,600*	*300*	*532,766,830*	*60.00%*	*66.76%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Unit	255,090,500	33 Unit	153,054,300	Unit 11	75,547,850	Unit 0	-	Unit 1	1,640,000	4 Unit	26,100,000	6 Unit	-	*11 Unit*	*27,740,000*	*44 Unit*	*180,794,300*	*80.00%*	*70.87%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Keperluan Rutin Kantor	10800 Kotak	243,000,000	6480 Kotak	145,800,000	Kotak 2160	35,100,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	356 Kotak	8,019,000	1,804 Kotak	-	*2,160 Kotak*	*8,019,000*	*8,640 Kotak*	*153,819,000*	*80.00%*	*63.30%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Untuk Keperluan Rutin Kantor	180 Eksemplar	105,400,050	108 Eksemplar	63,240,030	36 Eksemplar	9,798,200	0 Eksemplar	-	9 Eksemplar	2,079,600	17 Eksemplar	3,400,000	10 Eksemplar	22,600	*36 Eksemplar*	*5,502,200*	*144 Eksemplar*	*68,742,230*	*80.00%*	*65.22%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor dan bahan/Material Lainnya untuk Keperluan Rutin Kantor	6145 Buah	179,506,500	3687 Buah	107,703,900	Buah 1229	15,796,102	Buah 179	2,300,000	Buah 324	6,457,400	489 Buah	3,950,000	237 Buah	-	*1,229 Buah*	*12,707,400*	*4,916 Buah*	*120,411,300*	*80.00%*	*67.08%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	100 Kali	15,000,000	60 Kali	9,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*60 Kali*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan baik**	**500**	**730,240,000**	**300**	**438,144,000**		**78,078,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*	*300*	*438,144,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	194,050,000	3 Unit	116,430,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*3 Unit*	*116,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya	280 Unit	331,190,000	168 Unit	198,714,000	Unit 56	37,078,500	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*168 Unit*	*198,714,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	205,000,000	27 Unit	123,000,000	Unit 9	41,000,000	Unit		***Unit***						*- Unit*	-	*27 Unit*	*123,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun tepat Waktu**	**500**	**1,052,656,000**	**300**	**631,593,600**		**181,609,800**		**11,257,250**		**36,561,450**		**41,202,250**		**52,500,000**	*-*	*141,520,950*	*300*	*773,114,550*	*60.00%*	*73.44%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	523,550,000	36 Kali	314,130,000	Kali 12	80,758,600	Kali 0	1,257,250	Kali 1	6,759,250	2 Kali	12,080,250	9 Kali	42,900,000	*12 Kali*	*62,996,750*	*48 Kali*	*377,126,750*	*80.00%*	*72.03%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	70 Kali	529,106,000	42 Kali	317,463,600	Kali 14	100,851,200	Kali 1	10,000,000	Kali 4	29,802,200	4 Kali	29,122,000	5 Kali	9,600,000	*14 Kali*	*78,524,200*	*56 Kali*	*395,987,800*	*80.00%*	*74.84%*	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik**	**500**	**2,421,799,000**	**300**	**1,453,079,400**		**470,774,800**		**30,257,400**		**124,409,600**		**127,429,600**		**3,017,400**	**-**	***285,114,000***	***300***	***1,738,193,400***	***60.00%***	***71.77%***	KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	%	-	%	-	%		%		%		%		%		- %	-	- %	-			KEC. KOTA AGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dengan Baik	65 Unit	2,172,274,000	39 Unit	1,303,364,400	Unit 13	434,454,800	Unit 1	30,257,400	Unit 4	123,029,600	4 Unit	126,629,600	4 Unit	3,017,400	***13 Unit***	***282,934,000***	***52 Unit***	***1,586,298,400***	***80.00%***	***73.02%***	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meja, Kursi, Lemari dan Mebel Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	20 Unit	1,500,000	12 Unit	900,000	Unit 4	300,000	Unit 0	-	Unit -	-	4 Unit	300,000	- Unit	-	***4 Unit***	***300,000***	***16 Unit***	***1,200,000***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik	45 Unit	38,350,000	27 Unit	23,010,000	Unit 9	7,670,000	Unit 0	-	Unit 2	1,380,000	1 Unit	500,000	6 Unit	-	***9 Unit***	***1,880,000***	***36 Unit***	***24,890,000***	***80.00%***	***64.90%***	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	67,925,000	3 Unit	40,755,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	-	***3 Unit***	***40,755,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara dengan baik	10 Unit	141,750,000	6 Unit	85,050,000	Unit 2	28,350,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	-	***6 Unit***	***85,050,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**5.11**	**17.87**	**10.05**	**44.32**	**24.67**	**6.63**	**55.21**	**19.99**	**95.04**	**88.82**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**1,526,103,000**	**288**	**915,661,800**		**268,916,600**		**-**		**2,160,000**		**93,514,800**		**68,950,000**	**-**	***164,624,800***	***288***	***1,080,286,600***	***60.00%***	***70.79%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah**	**500**	**1,345,870,000**	**300**	**807,522,000**		**247,270,000**		**-**		**2,160,000**		**79,662,000**		**68,950,000**	**-**	***150,772,000***	***300***	***958,294,000***	***60.00%***	***71.20%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	109,520,000	6 Kali	65,712,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***6 Kali***	***65,712,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kali	1,236,350,000	18 Kali	741,810,000	Kali 6	247,270,000	Kali 0	-	Kali 1	2,160,000	1 Kali	79,662,000	4 Kali	68,950,000	***6 Kali***	***150,772,000***	***24 Kali***	***892,582,000***	***80.00%***	***72.19%***	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Terlaksananya Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**500**	**180,233,000**	**300**	**108,139,800**		**21,646,600**		**-**		**-**		**13,852,800**		**-**	**-**	***13,852,800***	***300***	***121,992,600***	***60.00%***	***67.69%***	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronisasi Data Kemiski	85 Orang	180,233,000	51 Orang	108,139,800	Orang 17	21,646,600	Orang 0	-	Orang -	-	11 Orang	13,852,800	6 Orang	-	***17 Orang***	***13,852,800***	***68 Orang***	***121,992,600***	***80.00%***	***67.69%***	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**4.35**	**0.80**	**52.17**	**34.77**	**43.48**	**25.64**	***100.00***	61.22					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST'**	**R**					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**12,406,644,540**	**240**	**7,443,986,724**		**2,441,798,908**		**38,434,000**		**49,200,000**		**48,060,000**		**17,400,000**	**-**	***153,094,000***	***240***	***7,597,080,724***	***60.00%***	***61.23%***	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Terlaksananya Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat Kabupaten**	**500**	**1,088,580,000**	**300**	**653,148,000**	**%**	**178,186,000**	**%**	**38,434,000**	**%**	**49,200,000**		**48,060,000**		**17,400,000**	**- %**	***153,094,000***	***300 %***	***806,242,000***	***60.00%***	***74.06%***	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	85 Kali	287,930,000	51 Kali	172,758,000	Kali 17	55,876,000	Kali 11	38,434,000	Kali 5	14,400,000	0 Kali	-	1 Kali	-	*17 Kali*	*52,834,000*	*68 Kali*	*225,592,000*	*80.00%*	*78.35%*	KEC. KOTA AGUNG
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	85 Orang	611,550,000	51 Orang	366,930,000	Orang 17	122,310,000	Orang 0	-	Orang 5	34,800,000	7 Orang	48,060,000	5 Orang	17,400,000	*17 Orang*	*100,260,000*	*68 Orang*	*467,190,000*	*80.00%*	*76.39%*	KEC. KOTA AGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kali	189,100,000	12 Kali	113,460,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*12 Kali*	*113,460,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Tercapainya Kelompok Masyarakat Kelurahan Yang Dapat Diberdayakan**	**500**	**11,318,064,540**	**300**	**6,790,838,724**		**2,263,612,908**		-		-		-		-	-	-	*300*	*6,790,838,724*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah bangunan gedung dan fasilitas pemerintahan kelurahan yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi	55 Unit	9,662,066,500	33 Unit	5,797,239,900	Unit 11	1,932,413,300	Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*33 Unit*	*5,797,239,900*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pemberdayaan masyarakat di kelurahan	40 Kali	1,655,998,040	24 Kali	993,598,824	Kali 8	331,199,608	Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*24 Kali*	*993,598,824*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**20.75**	**1.57**	**18.87**	**2.01**	**13.21**	**1.97**	**11.32**	**0.71**	*64.15*	6.27				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**147,600,000**	**300**	**88,560,000**		**36,720,000**		**4,500,000**		**11,250,000**		**4,500,000**		**4,500,000**	**-**	*24,750,000*	*300*	*113,310,000*	*60.00%*	*76.77%*	KEC. KOTA AGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Terlaksananya Penurunan Gangguan Keamanan**	**500**	**147,600,000**	**300**	**88,560,000**		**36,720,000**		**4,500,000**		**11,250,000**		**4,500,000**		**4,500,000**	**-**	*24,750,000*	*300*	*113,310,000*	*60.00%*	*76.77%*	KEC. KOTA AGUNG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergisitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	147,600,000	36 Kali	88,560,000	Kali 12	36,720,000	Kali 2	4,500,000	Kali 3	11,250,000	2 Kali	4,500,000	5 Kali	4,500,000	*12 Kali*	*24,750,000*	*48 Kali*	*113,310,000*	*80.00%*	*76.77%*	KEC. KOTA AGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**16.67**	**12.25**	**25.00**	**30.64**	**16.67**	**12.25**	**41.67**	**12.25**	**100.00**	67.40				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**113,325,000**	**300**	**67,995,000**		**270,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	*-*	*300*	*67,995,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan**	**500**	**113,325,000**	**300**	**67,995,000**		**270,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	*-*	*300*	*67,995,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55 Kali	82,725,000	33 Kali	49,635,000	Kali 11	270,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*33 Kali*	*49,635,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	30,600,000	3 Kali	18,360,000	Kali		Kali		Kali -	-	Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*18,360,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTA AGUNG
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**485**	**1,817,475,000**	**291**	**1,090,485,000**		**56,295,000**		**-**		**20,270,250**		**-**		**-**	**-**	*20,270,250*	*291*	*1,110,755,250*	*60.00%*	*61.12%*	KEC. KOTA AGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Terlaksananya Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**1,817,475,000**	**300**	**1,090,485,000**		**56,295,000**		-		**20,270,250**		-		-	**-**	***20,270,250***	***300***	***1,110,755,250***	***60.00%***	***61.12%***	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	129,375,000	9 Kali	77,625,000	3 Kali	25,875,000	0 Kali	-	2 Kali	20,270,250	1 Kali	-	- Kali	-	***3 Kali***	***20,270,250***	***12 Kali***	***97,895,250***	***80.00%***	***75.67%***	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	130 Kali	152,100,000	78 Kali	91,260,000	26 Kali	30,420,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***78 Kali***	***91,260,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah fasilitas pelaksanaan tugas,fungsi,dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	215 Orang	1,536,000,000	129 Orang	921,600,000	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang		***- Orang***	***-***	***129 Orang***	***921,600,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTA AGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**6.90**	**36.01**	**3.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	***10.34***	36.01				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			KECAMATAN WONOSOBO			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**13,506,982,730**	**3 WTP**	**8,104,189,638**	**WTP**	**2,435,975,244**	**WTP**	**365,032,637**	**WTP**	**627,064,812**	**WTP**	**466,350,820**	**WTP**	**610,630,514**	**- WTP**	***2,069,078,783***	***3 WTP***	***10,173,268,421***	***60.00%***	***75.32%***	KEC. WONOSOBO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**125,289,500**	**300**	**75,173,700**		**20,257,900**		-		**2,210,000**		**114,350**		-	**-**	***2,324,350***	***300***	***77,498,050***	***60.00%***	***61.86%***	KEC. WONOSOBO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	99,189,500	9 Eksemplar Dokumen	59,513,700	3 Eksemplar Dokumen	15,037,900	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,210,000	2 Eksemplar Dokumen	114,350	1 Eksemplar Dokumen	-	***3 Eksemplar Dokumen***	***2,324,350***	***12 Eksemplar Dokumen***	***61,838,050***	***80.00%***	***62.34%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3,550,000	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	3 Eksemplar Dokumen	710,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,130,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	15 Eksemplar Dokumen	3,550,000	9 Eksemplar Dokumen	2,130,000	3 Eksemplar Dokumen	710,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,130,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Eksemplar Dokumen	4,750,000	9 Eksemplar Dokumen	2,850,000	3 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***9 Eksemplar Dokumen***	***2,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**11,190,890,125**	**300**	**6,714,534,075**		**2,001,405,673**		**365,032,637**		**590,296,513**		**422,610,820**		**410,520,114**	**-**	***1,788,460,084***	***300***	***8,502,994,159***	***60.00%***	***75.98%***	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	9,480,290,125	54 Orang	5,688,174,075	18 Orang	1,638,285,673	4 Orang	293,857,637	5 Orang	489,561,513	5 Orang	335,225,820	4 Orang	323,145,114	***18 Orang***	***1,441,790,084***	***72 Orang***	***7,129,964,159***	***80.00%***	***75.21%***	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	1,426,650,000	54 Orang	855,990,000	18 Orang	306,330,000	4 Orang	71,175,000	5 Orang	81,675,000	5 Orang	76,425,000	4 Orang	76,425,000	***18 Orang***	***305,700,000***	***72 Orang***	***1,161,690,000***	***80.00%***	***81.43%***	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	283,950,000	18 Orang	170,370,000	Orang 6	56,790,000	Orang 0	-	Orang -	19,060,000	3 Orang	10,960,000	3 Orang	10,950,000	*6 Orang*	*40,970,000*	*24 Orang*	*211,340,000*	*80.00%*	*74.43%*	KEC. WONOSOBO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**432,637,750**	**300**	**259,582,650**		**77,201,300**		**-**		**1,720,200**		**1,180,600**		**4,612,600**	**-**	***7,513,400***	***300***	***267,096,050***	***60.00%***	***61.74%***	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Unit	197,241,250	3 Unit	118,344,750	Unit 1	30,122,000	Unit 0	-	Unit -	700,000	0 Unit	328,000	- Unit	722,600	*- Unit*	*1,750,600*	*3 Unit*	*120,095,350*	*60.00%*	*60.89%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	4200 Kotak	111,500,000	2520 Kotak	66,900,000	Kotak 840	22,300,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	*-*	*2,520 Kotak*	*66,900,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	21,822,000	36 Bulan	13,093,200	Bulan 12	4,364,400	Bulan 0	-	Bulan 1	300,200	0 Bulan	-	11 Bulan	3,590,000	*12 Bulan*	*3,890,200*	*48 Bulan*	*16,983,400*	*80.00%*	*77.83%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	35,363,500	36 Bulan	21,218,100	Bulan 12	7,072,700	Bulan 0	-	Bulan 1	720,000	1 Bulan	852,600	10 Bulan	300,000	*12 Bulan*	*1,872,600*	*48 Bulan*	*23,090,700*	*80.00%*	*65.30%*	KEC. WONOSOBO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	440 Orang/ Kali	66,711,000	264 Orang/ Kali	40,026,600	Orang/ Kali 88	13,342,200	Orang/ Kali 0	-	Orang/ Kali -	-	0 Orang/ Kali	-	- Orang/ Kali	-	*- Orang/ Kali*	*-*	*264 Orang/ Kali*	*40,026,600*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**291,452,500**	**300**	**174,871,500**		**46,169,000**		**-**		**6,707,600**		**4,680,000**		**14,280,000**	**-**	***25,667,600***	***300***	***200,539,100***	***60.00%***	***68.81%***	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	155,895,000	36 Bulan	93,537,000	Bulan 12	31,179,000	Bulan 0	-	Bulan 2	6,707,600	3 Bulan	4,680,000	7 Bulan	14,280,000	*12 Bulan*	*25,667,600*	*48 Bulan*	*119,204,600*	*80.00%*	*76.46%*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kegiatan	135,557,500	6 Kegiatan	81,334,500	Kegiatan 2	14,990,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	*- Kegiatan*	*-*	*6 Kegiatan*	*81,334,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,466,712,855**	**300**	**880,027,713**		**290,941,371**		**-**		**26,130,499**		**37,765,050**		**181,217,800**	**-**	***245,113,349***	***300***	***1,125,141,062***	***60.00%***	***76.71%***	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	-	3 Mobil	-	Mobil 1	2,000,000	Mobil 0	-	Mobil -	-	0 Mobil	-	- Mobil	-	*- Mobil*	*-*	*3 Mobil*	*-*	*60.00%*	*#DIV/0!*	KEC. WONOSOBO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Mobil/ Motor	465,556,000	6 Mobil/ Motor	279,333,600	Mobil/ Motor 2	96,510,000	Mobil/ Motor 0	-	Mobil/ Motor -	15,952,200	1 Mobil/ Motor	26,765,050	1 Mobil/ Motor	37,811,800	*2 Mobil/ Motor*	*80,529,050*	*8 Mobil/ Motor*	*359,862,650*	*80.00%*	*77.30%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	50 Unit	67,400,000	30 Unit	40,440,000	Unit 10	5,680,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	10 Unit	550,000	*10 Unit*	*550,000*	*40 Unit*	*40,990,000*	*80.00%*	*60.82%*	KEC. WONOSOBO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	933,756,855	3 Unit	560,254,113	Unit 1	186,751,371	Unit 0	-	Unit -	10,178,299	0 Unit	11,000,000	1 Unit	142,856,000	*1 Unit*	*164,034,299*	*4 Unit*	*724,288,412*	*80.00%*	*77.57%*	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.77**	**14.99**	**1.34**	**25.74**	**1.92**	**19.14**	**4.98**	**25.07**	***9.00***	84.94					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**267,594,500**	**288**	**160,556,700**		**19,009,400**		**-**		**-**		**-**		**800,000**	**-**	***800,000***	***288***	***161,356,700***	***60.00%***	***60.30%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Tercapainya Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**92,747,500**	**300**	**55,648,500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	***-***	***300***	***55,648,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500 %	92,747,500	300 %	55,648,500											- -	-	*300* -	*55,648,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. WONOSOBO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	**Tercapainya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan**	**500**	**174,847,000**	**300**	**104,908,200**		**19,009,400**		-		-		-		**800,000**	**-**	***800,000***	***300***	***105,708,200***	***60.00%***	***60.46%***	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	174,847,000	30 Laporan	104,908,200	10 Laporan	19,009,400	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	10 Laporan	800,000	***10 Laporan***	***800,000***	***40 Laporan***	***105,708,200***	***80.00%***	***60.46%***	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**4.21**	***100.00***	4.21					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**ST'**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang**	**400**	**487,514,000**	**240**	**292,508,400**		**86,717,517**		**48,299,928**		**3,600,000**		**8,000,000**		**900,000**	**-**	***60,799,928***	***240***	***353,308,328***	***60.00%***	***72.47%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**487,514,000**	**300**	**292,508,400**		**86,717,517**		**48,299,928**		**3,600,000**		**8,000,000**		**900,000**	**-**	***60,799,928***	***300***	***353,308,328***	***60.00%***	***72.47%***	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	145 Kecamatan/Pekon	378,160,000	87 Kecamatan/Pekon	226,896,000	29 Kecamatan/Pekon	75,632,000	19 Kecamatan/Pekon	48,299,928	1 Kecamatan/Pekon	3,600,000	3 Kecamatan/Pekon	8,000,000	6 Kecamatan/Pekon	900,000	***29 Kecamatan/Pekon***	***60,799,928***	***116 Kecamatan/Pekon***	***287,695,928***	***80.00%***	***76.08%***	KEC. WONOSOBO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	145 Kecamatan/Pekon	109,354,000	87 Kecamatan/Pekon	65,612,400	29 Kecamatan/Pekon	11,085,517	0 Kecamatan/Pekon	-	- Kecamatan/Pekon	-	0 Kecamatan/Pekon	-	- Kecamatan/Pekon	-	***- Kecamatan/Pekon***	***-***	***87 Kecamatan/Pekon***	***65,612,400***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**32.76**	**55.70**	**1.72**	**4.15**	**5.17**	**9.23**	**10.34**	**1.04**	**50.00**	70.11					
										Predikat kinerja	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban**	**500**	**141,457,500**	**300**	**84,874,500**		**34,200,000**		-		**6,750,000**		**2,250,000**		**18,000,000**	**-**	***27,000,000***	***300***	***111,874,500***	***60.00%***	***79.09%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapainya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**141,457,500**	**300**	**84,874,500**		**34,200,000**		-		**6,750,000**		**2,250,000**		**18,000,000**	**-**	***27,000,000***	***300***	***111,874,500***	***60.00%***	***79.09%***	KEC. WONOSOBO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,457,500	36 Bulan	84,874,500	12 Bulan	34,200,000	0 Bulan	-	3 Bulan	6,750,000	1 Bulan	2,250,000	8 Bulan	18,000,000	***12 Bulan***	***27,000,000***	***48 Bulan***	***111,874,500***	***80.00%***	***79.09%***	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**19.74**	**8.33**	**6.58**	**66.67**	**52.63**	**100.00**	78.95					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**	**ST'**	**T**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**402,997,500**	**300**	**241,798,500**		**47,470,500**		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***241,798,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**402,997,500**	**300**	**241,798,500**		**47,470,500**		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***241,798,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	25 Kali	96,802,500	15 Kali	58,081,500	5 Kali	1,720,500	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***15 Kali***	***58,081,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Pekon	228,750,000	84 Pekon	137,250,000	28 Pekon	45,750,000	0 Pekon	-	- Pekon	-	0 Pekon	-	- Pekon	-	***- Pekon***	***-***	***84 Pekon***	***137,250,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APDPekon	10 Kali	77,445,000	6 Kali	46,467,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	***-***	***6 Kali***	***46,467,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. WONOSOBO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			KECAMATAN TALANG PADANG			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**15,383,520,945**	**3 WTP**	**9,230,112,567**	**WTP**	**2,670,100,689**	**WTP**	**449,580,149**	**WTP**	**695,183,321**	**WTP**	**539,723,721**	**WTP**	**501,578,936**	***- WTP***	***2,186,066,127***	***3 WTP***	***11,416,178,694***	***60.00%***	***74.21%***	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**85,125,000**	**300**	**51,075,000**		**17,025,000**		-		**4,500,000**		**1,200,000**		**1,800,000**	**-**	***7,500,000***	***300***	***58,575,000***	***60.00%***	***68.81%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	200 Buku	37,500,000	120 Buku	22,500,000	Buku 40	7,500,000	Buku 0	-	Buku 17	3,000,000	5 Buku	1,200,000	18 Buku	1,800,000	***40 Buku***	***6,000,000***	***160 Buku***	***28,500,000***	***80.00%***	***76.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku 10	1,500,000	0 Buku	-	- Buku	-	***10 Buku***	***1,500,000***	***40 Buku***	***6,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***30 Buku***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***30 Buku***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***30 Buku***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 Buku	7,500,000	30 Buku	4,500,000	Buku 10	1,500,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***30 Buku***	***4,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Buku	10,125,000	30 Buku	6,075,000	Buku 10	2,025,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	***-***	***30 Buku***	***6,075,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**12,898,138,445**	**300**	**7,738,883,067**		**2,191,017,689**		**416,467,524**		**636,043,841**		**460,413,969**		**442,829,265**	**-**	***1,955,754,599***	***300***	***9,694,637,666***	***60.00%***	***75.16%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	10,504,938,445	66 Orang	6,302,963,067	Orang 22	1,712,377,689	Orang 5	318,727,524	Orang 6	522,433,841	6 Orang	357,423,969	5 Orang	350,579,265	***22 Orang***	***1,549,164,599***	***88 Orang***	***7,852,127,666***	***80.00%***	***74.75%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	2,020,500,000	66 Orang	1,212,300,000	Orang 22	404,100,000	Orang 4	87,000,000	Orang 6	97,500,000	7 Orang	92,250,000	5 Orang	92,250,000	***22 Orang***	***369,000,000***	***88 Orang***	***1,581,300,000***	***80.00%***	***78.26%***	KEC. TALANG PADANG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	372,700,000	36 Bulan	223,620,000	Bulan 12	74,540,000	Bulan 2	10,740,000	Bulan 2	16,110,000	3 Bulan	10,740,000	5 Bulan	-	***12 Bulan***	***37,590,000***	***48 Bulan***	***261,210,000***	***80.00%***	***70.09%***	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	500	74,000,000	300	44,400,000		**14,800,000**		-		-					**-**	**-**	***300***	***44,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	185 Stel	74,000,000	111 Stel	44,400,000	Stel 37	14,800,000	Stel 0	-	Stel -	-	27 Stel	13,200,000	10 Stel	-	***37 Stel***	***13,200,000***	***148 Stel***	***57,600,000***	***80.00%***	***77.84%***	KEC. TALANG PADANG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**260,562,000**	**300**	**156,337,200**		**83,298,900**		**4,577,000**		**3,619,100**		**33,176,400**		**3,495,100**	**-**	***44,867,600***	***300***	***201,204,800***	***60.00%***	***77.22%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	71,670,000	30 Unit	43,002,000	Unit 10	58,984,000	Unit 1	1,833,600	Unit 1	856,300	4 Unit	28,598,800	4 Unit	590,000	***10 Unit***	***31,878,700***	***40 Unit***	***74,880,700***	***80.00%***	***104.48%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3000 Kotak	67,500,000	1800 Kotak	40,500,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		***- Kotak***	***-***	***1,800 Kotak***	***40,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29300 Eksemplar	41,667,000	17580 Eksemplar	25,000,200	5860 Eksemplar	8,313,900	10 Eksemplar	858,000	1,781 Eksemplar	1,689,900	639 Eksemplar	1,010,800	3,430 Eksemplar	1,263,000	***5,860 Eksemplar***	***4,821,700***	***23,440 Eksemplar***	***29,821,900***	***80.00%***	***71.57%***	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	66,225,000	1368 Buah	39,735,000	456 Buah	13,301,000	14 Buah	1,885,400	87 Buah	1,072,900	122 Buah	3,566,800	233 Buah	1,642,100	***456 Buah***	***8,167,200***	***1,824 Buah***	***47,902,200***	***80.00%***	***72.33%***	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 Kali	13,500,000	18 Kali	8,100,000	Kali 6	2,700,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	18 Kali	8,100,000	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**340,761,000**	**300**	**204,456,600**		**54,972,200**		**4,190,425**		**17,502,580**		**8,807,052**		**8,153,961**	-	*38,654,018*	*300*	*243,110,618*	*60.00%*	*71.34%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	195,861,000	36 Bulan	117,516,600	Bulan 12	43,972,200	Bulan 3	4,190,425	Bulan 1	7,502,580	2 Bulan	8,807,052	6 Bulan	8,153,961	*12 Bulan*	*28,654,018*	*48 Bulan*	*146,170,618*	*80.00%*	*74.63%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	144,900,000	3 Kali	86,940,000	Kali 1	11,000,000	Kali 0	-	Kali -	10,000,000	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*4 Kali*	*96,940,000*	*80.00%*	*66.90%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,724,934,500**	**300**	**1,034,960,700**		**308,986,900**		**24,345,200**		**33,517,800**		**36,126,300**		**45,300,610**	-	*139,289,910*	*300*	*1,174,250,610*	*60.00%*	*68.08%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	188,350,000	3 Unit	113,010,000	Unit 1	37,670,000	Unit 0	4,934,800	Unit -	7,402,200	0 Unit	7,402,200	1 Unit	10,869,600	*1 Unit*	*30,608,800*	*4 Unit*	*143,618,800*	*80.00%*	*76.25%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	689,442,000	15 Unit	413,665,200	Unit 5	137,888,400	Unit 1	19,410,400	Unit 1	26,115,600	1 Unit	28,724,100	2 Unit	34,431,010	*5 Unit*	*108,681,110*	*20 Unit*	*522,346,310*	*80.00%*	*75.76%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	30 Unit	32,400,000	18 Unit	19,440,000	Unit 6	6,480,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*18 Unit*	*19,440,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	67,500,000	3 Unit	40,500,000	Unit 1	13,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*3 Unit*	*40,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	747,242,500	3 Unit	448,345,500	Unit 1	113,448,500	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*3 Unit*	*448,345,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**16.84**	**29.18**	**26.04**	**12.45**	**20.21**	**56.78**	**18.79**	*98.41*	81.87				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**R**	**SR**	**ST**	**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**327,091,250**	**288**	**196,254,750**		**65,418,250**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	*288*	*196,254,750*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**122,492,250**	**300**	**73,495,350**		**24,498,450**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	-	*300*	*73,495,350*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	122,492,250	12 Kali	73,495,350	Kali 4	24,498,450	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*12 Kali*	*73,495,350*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	500 %	204,599,000	300 %	122,759,400	%	**40,919,800**	%		%		%		%		- *%*	-	*300 %*	*122,759,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	204,599,000	30 Eksemplar	122,759,400	Eksemplar 10	40,919,800	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- Eksemplar	-	30 Eksemplar	122,759,400	60.00%	60.00%	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**507,070,500**	**240**	**304,242,300**		**74,788,100**		**27,844,650**		**2,000,000**		-		-	-	*29,844,650*	*240*	*334,086,950*	*60.00%*	*65.89%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**507,070,500**	**300**	**304,242,300**		**74,788,100**		**27,844,650**		**2,000,000**		-		-	-	*29,844,650*	*300*	*334,086,950*	*60.00%*	*65.89%*	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	5 Kali	334,602,000	3 Kali	200,761,200	Kali 1	40,294,400	Kali 1	27,844,650	Kali -	2,000,000	0 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*29,844,650*	*4 Kali*	*230,605,850*		*68.92%*	KEC. TALANG PADANG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	20 Kali	172,468,500	12 Kali	103,481,100	Kali 4	34,493,700	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*12 Kali*	*103,481,100*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	20.00	37.23	-	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	39.91				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**139,500,000**	**300**	**83,700,000**		**35,100,000**		**2,250,000**		**6,750,000**		**13,950,000**		**11,250,000**	-	*34,200,000*	*300*	*117,900,000*	*60.00%*	*84.52%*	KEC. TALANG PADANG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**139,500,000**	**300**	**83,700,000**		**35,100,000**		**2,250,000**		**6,750,000**		**13,950,000**		**11,250,000**	-	*34,200,000*	*300*	*117,900,000*	*60.00%*	*84.52%*	KEC. TALANG PADANG
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	139,500,000	36 Bulan	83,700,000	Bulan 12	35,100,000	Bulan 1	2,250,000	Bulan 3	6,750,000	4 Bulan	13,950,000	4 Bulan	11,250,000	*12 Bulan*	*34,200,000*	*48 Bulan*	*117,900,000*	*80.00%*	*84.52%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	8.33	6.41	25.00	19.23	33.33	39.74	33.33	32.05	100.00	97.44				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**41,838,750**	**300**	**25,103,250**		**8,367,750**		-		-		-		-	-	-	*300*	*25,103,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500 %**	**41,838,750**	**300 %**	**25,103,250**	**%**	**8,367,750**	**%**	-	**%**	-		-		-	- %	-	*300 %*	*25,103,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	41,838,750	3 Kali	25,103,250	Kali 1	8,367,750	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*3 Kali*	*25,103,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**388,807,250**	**300**	**233,284,350**		**77,761,450**		-		**13,365,000**		-		-	-	*13,365,000*	*300*	*246,649,350*	*60.00%*	*63.44%*	KEC. TALANG PADANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500 %**	**388,807,250**	**300 %**	**233,284,350**	**%**	**77,761,450**	**%** -		**%**	**13,365,000**		-		-	***- %***	***13,365,000***	***300 %***	***246,649,350***	***60.00%***	***63.44%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Pekon Tentang APBPekon	5 Kali	206,048,500	3 Kali	123,629,100	Kali 1	41,209,700	Kali 0	-	Kali 1	13,365,000	0 Kali	-	- Kali	-	***1 Kali***	***13,365,000***	***4 Kali***	***136,994,100***	***80.00%***	***66.49%***	KEC. TALANG PADANG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	182,758,750	60 Kali	109,655,250	Kali 20	36,551,750	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***60 Kali***	***109,655,250***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. TALANG PADANG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**4.76**	**17.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4.76**	17.19				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			KECAMATAN PULAU PANGGUNG			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,865,777,055**	**3 WTP**	**5,919,466,233**	**WTP**	**1,842,792,818**	**WTP**	**300,297,713**	**WTP**	**474,743,141**	**WTP**	**369,268,599**	**WTP**	**492,287,217**	***- WTP***	***1,636,596,670***	***3 WTP***	***7,556,062,903***	***60.00%***	***76.59%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500 %**	**126,300,000**	**300 %**	**75,780,000**	**%**	**25,260,000**	**%** -		**%**	**6,870,000**	**%**	**2,400,000**	**%**	**3,600,000**	***- %***	***12,870,000***	***300 %***	***88,650,000***	***60.00%***	***70.19%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	76,800,000	60 Eksemplar Dokumen	46,080,000	20 Eksemplar Dokumen	15,360,000	0 Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	6,000,000	3 Eksemplar Dokumen	2,400,000	9 Eksemplar Dokumen	3,600,000	***20 Eksemplar Dokumen***	***12,000,000***	***80 Eksemplar Dokumen***	***58,080,000***	***80.00%***	***75.63%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	23,250,000	150 Eksemplar Dokumen	13,950,000	50 Eksemplar Dokumen	4,650,000	0 Eksemplar Dokumen	-	4 Eksemplar Dokumen	435,000	1 Eksemplar Dokumen	-	45 Eksemplar Dokumen	-	***50 Eksemplar Dokumen***	***435,000***	***200 Eksemplar Dokumen***	***14,385,000***	***80.00%***	***61.87%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	435,000	0 Eksemplar Dokumen	-	9 Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokumen***	***435,000***	***40 Eksemplar Dokumen***	***3,585,000***	***80.00%***	***68.29%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	5,250,000	90 Eksemplar Dokumen	3,150,000	30 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***90 Eksemplar Dokumen***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500 %**	**8,123,983,495**	**300 %**	**4,874,390,097**	**%**	**1,530,033,973**	**%**	**293,123,694**	**%**	**437,796,110**	**%**	**331,898,389**	**%**	**350,105,491**	***- %***	***1,412,923,684***	***300 %***	***6,287,313,781***	***60.00%***	***77.39%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	6,748,092,495	42 Bulan	4,048,855,497	14 Bulan	1,258,755,773	3 Bulan	241,073,694	4 Bulan	368,536,110	4 Bulan	266,483,389	3 Bulan	273,620,491	***14 Bulan***	***1,149,713,684***	***56 Bulan***	***5,198,569,181***	***80.00%***	***77.04%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	1,044,250,000	42 Orang	626,550,000	14 Orang	204,950,000	3 Orang	52,050,000	3 Orang	51,700,000	5 Orang	50,525,000	3 Orang	50,525,000	***14 Orang***	***204,800,000***	***56 Orang***	***831,350,000***	***80.00%***	***79.61%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Bulan	324,500,000	30 Bulan	194,700,000	10 Bulan	64,900,000	0 Bulan	-	4 Bulan	17,560,000	1 Bulan	14,890,000	5 Bulan	25,960,000	***10 Bulan***	***58,410,000***	***40 Bulan***	***253,110,000***	***80.00%***	***78.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahu	50 Eksemplar	7,141,000	30 Eksemplar	4,284,600	10 Eksemplar	1,428,200	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	***- Eksemplar***	-	***30 Eksemplar***	***4,284,600***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500 %**	**200,680,150**	**300 %**	**120,408,090**	**%**	**22,806,600**	**%**	**200,000**	**%**	**4,491,000**	**%**	**1,483,000**	**%**	**2,489,250**	***- %***	***8,663,250***	***300 %***	***129,071,340***	***60.00%***	***64.32%***	KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	111,375,000	1500 Kotak	66,825,000	500 Kotak	12,600,000	0 Kotak	-	30 Kotak	1,336,500	23 Kotak	-	447 Kotak	1,559,250	***500 Kotak***	***2,895,750***	***2,000 Kotak***	***69,720,750***	***80.00%***	***62.60%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	27,150,000	3 Paket	16,290,000	1 Paket	2,700,000	0 Paket	-	- Paket	954,500	0 Paket	-	1 Paket	-	***1 Paket***	***954,500***	***4 Paket***	***17,244,500***	***80.00%***	***63.52%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2280 Buah	62,155,150	1368 Buah	37,293,090	456 Buah	7,506,600	7 Buah	200,000	81 Buah	2,200,000	148 Buah	1,483,000	220 Buah	930,000	***456 Buah***	***4,813,000***	***1,824 Buah***	***42,106,090***	***80.00%***	***67.74%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi																-	-	-	-			KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**338,443,900**	**300**	**203,066,340**		**89,053,280**		**796,419**		**7,904,631**		**24,220,810**		**18,546,076**	**-**	***51,467,936***	***300***	***254,534,276***	***60.00%***	***75.21%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	140,790,000	36 Bulan	84,474,000	12 Bulan	40,158,000	1 Bulan	496,419	2 Bulan	5,916,631	2 Bulan	9,868,173	7 Bulan	11,310,076	***12 Bulan***	***27,591,299***	***48 Bulan***	***112,065,299***	***80.00%***	***79.60%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	75,103,900	9 Unit	45,062,340	3 Unit	29,385,280	0 Unit	300,000	1 Unit	1,988,000	1 Unit	14,352,637	1 Unit	7,236,000	***3 Unit***	***23,876,637***	***12 Unit***	***68,938,977***	***80.00%***	***91.79%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	122,550,000	3 Kali	73,530,000	1 Kali	19,510,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***3 Kali***	***73,530,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,076,369,510**	**300**	**645,821,706**		**175,638,965**		**6,177,600**		**17,681,400**		**9,266,400**		**117,546,400**	**-**	***150,671,800***	***300***	***796,493,506***	***60.00%***	***74.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	220,850,000	3 Unit	132,510,000	1 Unit	44,170,000	0 Unit	4,835,600	- Unit	10,453,400	0 Unit	7,253,400	10 Unit	7,253,400	***10 Unit***	***29,795,800***	***13 Unit***	***162,305,800***	***260.00%***	***73.49%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	43,500,000	6 Unit	26,100,000	2 Unit	8,700,000	0 Unit	1,342,000	- Unit	2,013,000	1 Unit	2,013,000	1 Unit	1,413,000	***2 Unit***	***6,781,000***	***8 Unit***	***32,881,000***	***80.00%***	***75.59%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	100 Unit	812,019,510	60 Unit	487,211,706	20 Unit	122,768,965	0 Unit	-	- Unit	5,215,000	1 Unit	-	19 Unit	108,880,000	***20 Unit***	***114,095,000***	***80 Unit***	***601,306,706***	***80.00%***	***74.05%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**1.18**	**16.30**	**11.66**	**25.76**	**16.05**	**20.04**	**65.88**	**26.71**	***94.76***	88.81					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**297,612,250**	**288**	**178,567,350**		**1,650,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***288***	***178,567,350***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**31,662,250**	**300**	**18,997,350**		**1,650,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***18,997,350***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	31,662,250	6 Kali	18,997,350	2 Kali	1,650,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***6 Kali***	***18,997,350***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**265,950,000**	**300**	**159,570,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***159,570,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksemplar	265,950,000	30 Eksemplar	159,570,000	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar	- ***Eksemplar***	-	***30 Eksemplar***	***159,570,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**456,501,000**	**240**	**273,900,600**		**65,235,650**		**9,507,500**		**44,838,750**		-		-	-	***54,346,250***	***240***	***328,246,850***	***60.00%***	***71.90%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**456,501,000**	**300**	**273,900,600**		**65,235,650**		**9,507,500**		**44,838,750**		-		-	-	***54,346,250***	***300***	***328,246,850***	***60.00%***	***71.90%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Pekon/Kecamatan dan Kegiatan Pendukungnya	10 Kali	292,428,250	6 Kali	175,456,950	Kali 2	58,485,650	Kali 1	9,507,500	Kali 1	44,838,750	0 Kali	-	- Kali	-	***2 Kali***	***54,346,250***	***8 Kali***	***229,803,200***	***80.00%***	***78.58%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	30 Kali	164,072,750	18 Kali	98,443,650	Kali 6	6,750,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***18 Kali***	***98,443,650***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**12.50**	**14.57**	**12.50**	**68.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	83.31					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**146,200,000**	**300**	**87,720,000**		**34,200,000**		-		**7,950,000**		**4,500,000**		**18,450,000**	-	***30,900,000***	***300***	***118,620,000***	***60.00%***	***81.14%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**146,200,000**	**300**	**87,720,000**		**34,200,000**		-		**7,950,000**		**4,500,000**		**18,450,000**	-	***30,900,000***	***300***	***118,620,000***	***60.00%***	***81.14%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	146,200,000	36 Bulan	87,720,000	Bulan 12	34,200,000	Bulan 0	-	Bulan 3	7,950,000	2 Bulan	4,500,000	7 Bulan	18,450,000	***12 Bulan***	***30,900,000***	***48 Bulan***	***118,620,000***	***80.00%***	***81.14%***	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**25.00**	**23.25**	**16.67**	**13.16**	**58.33**	**53.95**	**100.00**	90.35					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**R**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**101,612,500**	**300**	**60,967,500**		**800,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	***60,967,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**101,612,500**	**300**	**60,967,500**		**800,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	***60,967,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	90,862,500	3 Kali	54,517,500	Kali 1	800,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***3 Kali***	***54,517,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PULAU PANGGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12 K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	10,750,000	3 Kali	6,450,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	3 Kali	6,450,000	60.00%	60.00%	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**349,342,500**	**300**	**209,605,500**		**30,475,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*209,605,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**349,342,500**	**300**	**209,605,500**		**30,475,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*209,605,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	105 Kali	349,342,500	63 Kali	209,605,500	Kali 21	30,475,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	*63 Kali*	*209,605,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PULAU PANGGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			KECAMATAN PUGUNG			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**13,271,389,995**	**3 WTP**	**7,962,833,997**	**WTP**	**2,338,500,165**	**WTP**	**392,774,798**	**WTP**	**620,810,107**	**WTP**	**584,312,952**	**WTP**	**422,789,379**	- *WTP*	*2,020,687,236*	*3 WTP*	*9,983,521,233*	*60.00%*	*75.23%*	KEC. PUGUNG
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**102,032,000**	**300**	**61,219,200**		**17,653,800**		-		**5,814,400**		**12,155,500**		**17,345,000**	-	*35,314,900*	*300*	*96,534,100*	*60.00%*	*94.61%*	KEC. PUGUNG
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	60 Buku	77,972,000	36 Buku	46,783,200	Buku 12	13,391,800	Buku 0	-	Buku 4	5,814,400	4 Buku	9,744,400	4 Buku	13,344,400	*12 Buku*	*28,903,200*	*48 Buku*	*75,686,400*	*80.00%*	*97.07%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	500 %	7,250,000	300 %	4,350,000	% 100	900,000	% 0.00	-	% -	-	62.07 %	900,000	38 %	900,000	*100 %*	*1,800,000*	*400 %*	*6,150,000*		*84.83%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	2,250,000	300 %	1,350,000	% 100	450,000	% 0.00	-	% -	-	100.00 %	450,000	- %	450,000	*100 %*	*900,000*	*400 %*	*2,250,000*		*100.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	500 %	3,005,000	300 %	1,803,000	% 100	601,000	% 0.00	-	% -	-	100.00 %	601,000	- %	601,000	*100 %*	*1,202,000*	*400 %*	*3,005,000*		*100.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	PersentaseKoordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	500 %	3,155,000	300 %	1,893,000	% 100	631,000	% 0.00	-	% -	-	58.57 %	369,600	41 %	369,600	*100 %*	*739,200*	*400 %*	*2,632,200*		*83.43%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500 %	2,650,000	300 %	1,590,000	% 100	530,000	% 0.00	-	% -	-	0.00 %	-	100 %	530,000	*100 %*	*530,000*	*400 %*	*2,120,000*		*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500 %	5,750,000	300 %	3,450,000	% 100	1,150,000	% 0.00	-	% -	-	7.87 %	90,500	92 %	1,150,000	*100 %*	*1,240,500*	*400 %*	*4,690,500*		*81.57%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**11,588,376,545**	**300**	**6,953,025,927**		**2,019,420,475**		**386,624,798**		**559,010,107**		**396,654,652**		**379,816,479**	-	*1,722,106,036*	*300*	*8,675,131,963*	*60.00%*	*74.86%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	10,551,363,545	72 Orang	6,330,818,127	24 Orang	1,818,197,875	6 Orang	343,109,798	6 Orang	510,035,107	6 Orang	342,459,652	6 Orang	330,528,879	*24 Orang*	*1,526,133,436*	*96 Orang*	*7,856,951,563*	*80.00%*	*74.46%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	674,750,000	27 Orang	404,850,000	9 Orang	140,200,000	2 Orang	33,375,000	3 Orang	33,765,000	1 Orang	33,915,000	3 Orang	33,895,000	*9 Orang*	*134,950,000*	*36 Orang*	*539,800,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. PUGUNG
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	362,263,000	36 Bulan	217,357,800	12 Bulan	61,022,600	2 Bulan	10,140,000	2 Bulan	15,210,000	5 Bulan	20,280,000	3 Bulan	15,392,600	*12 Bulan*	*61,022,600*	*48 Bulan*	*278,380,400*	*80.00%*	*76.84%*	KEC. PUGUNG
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	**500**		**300**												-	-	*300*	-	*60.00%*		KEC. PUGUNG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	175 Stel		105 Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*105 Stel*	-	*60.00%*		KEC. PUGUNG
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**283,325,450**	**300**	**169,995,270**		**60,137,090**		**1,566,000**		**9,732,500**		**30,182,200**		**4,136,000**	-	*45,616,700*	*300*	*215,611,970*	*60.00%*	*76.10%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	126,713,400	36 Bulan	76,028,040	12 Bulan	45,942,680	0 Bulan	-	2 Bulan	2,400,000	6 Bulan	27,841,500	4 Bulan	1,400,000	*12 Bulan*	*31,641,500*	*48 Bulan*	*107,669,540*	*80.00%*	*84.97%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	45,000,000	600 Kotak	27,000,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- *Kotak*	-	*600 Kotak*	*27,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	37,767,500	36 Bulan	22,660,500	12 Bulan	6,925,500	2 Bulan	1,566,000	7 Bulan	4,238,000	2 Bulan	602,100	1 Bulan	469,500	*12 Bulan*	*6,875,600*	*48 Bulan*	*29,536,100*	*80.00%*	*78.21%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	36,344,550	36 Bulan	21,806,730	12 Bulan	7,268,910	0 Bulan	-	5 Bulan	3,094,500	3 Bulan	1,738,600	4 Bulan	2,266,500	*12 Bulan*	*7,099,600*	*48 Bulan*	*28,906,330*	*80.00%*	*79.53%*	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	250 Kali	37,500,000	150 Kali	22,500,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*150 Kali*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**250,000,000**	**300**	**150,000,000**		**38,980,000**		**1,566,600**		**15,828,500**		**6,689,900**		**6,347,300**	-	*30,432,300*	*300*	*180,432,300*	*60.00%*	*72.17%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112,500,000	36 Bulan	67,500,000	12 Bulan	28,980,000	2 Bulan	1,566,600	2 Bulan	5,828,500	0 Bulan	6,689,900	8 Bulan	6,347,300	*12 Bulan*	*20,432,300*	*48 Bulan*	*87,932,300*	*80.00%*	*78.16%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	137,500,000	3 Kali	82,500,000	1 Kali	10,000,000	0 Kali	-	- Kali	10,000,000	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*4 Kali*	*92,500,000*	*80.00%*	*67.27%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,047,656,000**	**300**	**628,593,600**		**202,308,800**		**3,017,400**		**30,424,600**		**138,630,700**		**15,144,600**	-	*187,217,300*	*300*	*815,810,900*	*60.00%*	*77.87%*	KEC. PUGUNG
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	240,656,000	3 Unit	144,393,600	1 Unit	40,908,800	0 Unit	3,017,400	- Unit	15,694,600	0 Unit	9,197,900	1 Unit	12,044,600	*1 Unit*	*39,954,500*	*4 Unit*	*184,348,100*	*80.00%*	*76.60%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Kantor	40 Unit	27,950,000	24 Unit	16,770,000	8 Unit	5,590,000	0 Unit	-	1 Unit	730,000	2 Unit	1,610,000	5 Unit	3,100,000	*4 Unit*	*5,440,000*	*28 Unit*	*22,210,000*	*70.0%*	*79.5%*	KEC. PUGUNG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	75,050,000	3 Unit	45,030,000	1 Unit	15,010,000	0 Unit	-	- Unit	14,000,000	0 Unit	1,010,000	1 Unit	-	*1 Unit*	*15,010,000*	*4 Unit*	*60,040,000*	*80.0%*	*80.0%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	10 Unit	704,000,000	6 Unit	422,400,000	Unit 2	140,800,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	126,812,800	1 Unit	-	*2 Unit*	*126,812,800*	*8 Unit*	*549,212,800*	*80.0%*	*78.0%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	1.95		16.80	4.46	26.55	49.93	24.99	43.66	18.08	*100.00*	86.41				
										Predikat kinerja	SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**381,581,500**	**288**	**228,948,900**		-		-		-		-		-	-	-	*288*	*228,948,900*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**69,891,000**	**300**	**41,934,600**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*41,934,600*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	69,891,000	6 Kali	41,934,600	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*6 Kali*	*41,934,600*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**311,690,500**	**300**	**187,014,300**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*187,014,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	135 Eksemplar	239,423,000	81 Eksemplar	143,653,800	Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		Eksemplar		- *Eksemplar*	-	*81 Eksemplar*	*143,653,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarg	15 Kali	72,267,500	9 Kali	43,360,500	Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*9 Kali*	*43,360,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**327,250,000**	**240**	**196,350,000**		**65,450,000**		**61,550,000**		-		-		**2,020,000**	-	*63,570,000*	*240*	*259,920,000*	*60.00%*	*79.43%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan**	**450**	**327,250,000**	**270**	**196,350,000**		**65,450,000**		**61,550,000**		-		-		**2,020,000**	-	*63,570,000*	*270*	*259,920,000*	*60.00%*	*79.43%*	KEC. PUGUNG
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	135 Eksemplar	327,250,000	81 Eksemplar	196,350,000	Eksemplar 27	65,450,000	Eksemplar 27	61,550,000	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	2,020,000	*27 Eksemplar*	*63,570,000*	*108 Eksemplar*	*259,920,000*	*80.00%*	*79.43%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00		94.04	-	0.00	0.00	0.00	3.09	100.00	97.13				
										Predikat kinerja	ST		ST	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**137,744,500**	**300**	**82,646,700**		**34,748,900**		**2,250,000**		**9,000,000**		**5,048,900**		**16,050,000**	-	*32,348,900*	*300*	*114,995,600*	*60.00%*	*83.48%*	KEC. PUGUNG
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**137,744,500**	**300**	**82,646,700**		**34,748,900**		**2,250,000**		**9,000,000**		**5,048,900**		**16,050,000**	-	*32,348,900*	*300*	*114,995,600*	*60.00%*	*83.48%*	KEC. PUGUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	137,744,500	36 Bulan	82,646,700	12 Bulan	34,748,900	2 Bulan	2,250,000	4 Bulan	9,000,000	2 Bulan	5,048,900	4 Bulan	16,050,000	*12 Bulan*	*32,348,900*	*48 Bulan*	*114,995,600*	*80.00%*	*83.48%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	16.67	6.48	33.33	25.90	16.67	14.53	33.33	46.19	100.00	93.09					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**45,775,000**	**300**	**27,465,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*27,465,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**45,775,000**	**300**	**27,465,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*27,465,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	24,575,000	3 Kali	14,745,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*3 Kali*	*14,745,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	500 %	21,200,000	300 %	12,720,000	%		%		%						- %	-	*300 %*	*12,720,000*		*60.00%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**318,574,000**	**300**	**191,144,400**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*191,144,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**318,574,000**	**300**	**191,144,400**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*191,144,400*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	140 Kali	204,969,500	84 Kali	122,981,700	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*84 Kali*	*122,981,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	135 Kali	113,604,500	81 Kali	68,162,700	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*81 Kali*	*68,162,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PUGUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			KECAMATAN CUKUH BALAK			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**8,395,950,290**	**3 WTP**	**5,037,570,174**	**WTP**	**1,565,969,029**	**WTP**	**240,653,327**	**WTP**	**420,660,126**	**WTP**	**293,225,586**	**WTP**	**305,461,138**	- *WTP*	*1,260,000,177*	*3 WTP*	*6,297,570,351*	*60.00%*	*75.01%*	KEC. CUKUH BALAK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**101,358,990**	**300**	**60,815,394**		**20,271,798**		-		**2,424,300**		**2,776,000**		**1,800,000**	-	*7,000,300*	*300*	*67,815,694*	*60.00%*	*66.91%*	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	15 Eksemplar Dokumen	62,080,000	9 Eksemplar Dokumen	37,248,000	3 Eksemplar Dokumen	12,416,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	2,400,000	1 Eksemplar Dokumen	2,776,000	2 Eksemplar Dokumen	1,800,000	*3 Eksemplar Dokumen*	*6,976,000*	*12 Eksemplar Dokumen*	*44,224,000*	*80.00%*	*71.24%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	8,465,000	30 Eksemplar Dokumen	5,079,000	10 Eksemplar Dokumen	1,693,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	24,300	1 Eksemplar Dokumen	-	9 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokumen*	*24,300*	*40 Eksemplar Dokumen*	*5,103,300*	*80.00%*	*60.29%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7,578,990	30 Eksemplar Dokumen	4,547,394	10 Eksemplar Dokumen	1,515,798	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*30 Eksemplar Dokumen*	*4,547,394*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,595,000	30 Eksemplar Dokumen	3,957,000	10 Eksemplar Dokumen	1,319,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,957,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,915,000	30 Eksemplar Dokumen	3,549,000	10 Eksemplar Dokumen	1,183,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,549,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	6,225,000	30 Eksemplar Dokumen	3,735,000	10 Eksemplar Dokumen	1,245,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,735,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	4,500,000	30 Eksemplar Dokumen	2,700,000	10 Eksemplar Dokumen	900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	*-*	*30 Eksemplar Dokum*	*2,700,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**7,080,569,940**	**300**	**4,248,341,964**		**1,286,739,659**		**240,653,327**		**388,110,126**		**271,845,586**		**260,561,138**	*-*	*1,161,170,177*	*300*	*5,409,512,141*	*60.00%*	*76.40%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	6,240,469,940	36 Orang	3,744,281,964	12 Orang	1,118,719,659	3 Orang	212,153,327	3 Orang	341,310,126	3 Orang	236,275,586	3 Orang	226,461,138	*12 Orang*	*1,016,200,177*	*48 Orang*	*4,760,482,141*	*80.00%*	*76.28%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	570,000,000	27 Orang	342,000,000	9 Orang	114,000,000	2 Orang	28,500,000	2 Orang	28,500,000	2 Orang	28,500,000	3 Orang	28,500,000	*9 Orang*	*114,000,000*	*36 Orang*	*456,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	270,100,000	18 Orang	162,060,000	6 Orang	54,020,000	0 Orang	-	1 Orang	18,300,000	2 Orang	7,070,000	3 Orang	5,600,000	*6 Orang*	*30,970,000*	*24 Orang*	*193,030,000*	*80.00%*	*71.47%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	**500**		**300**												*-*	*-*	*300*	*-*	*60.00%*		KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	500	100,000,000	300	60,000,000		**20,000,000**				-					*-*	*-*	*300*	*60,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	100,000,000	75 Stel	60,000,000	25 Stel	20,000,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	*- Stel*	*-*	*75 Stel*	*60,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. CUKUH BALAK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**415,129,460**	**300**	**249,077,676**		**101,539,192**		-		**2,317,700**		**2,438,750**		**6,616,100**	*-*	*11,372,550*	*300*	*260,450,226*	*60.00%*	*62.74%*	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	225,007,960	18 Unit	135,004,776	6 Unit	87,397,592	0 Unit	-	- Unit	269,000	0 Unit	-	6 Unit	6,500,000	*6 Unit*	*6,769,000*	*24 Unit*	*141,773,776*	*80.00%*	*63.01%*	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	90,000,000	2160 Kotak	54,000,000	Kotak		Kotak		-		0		0		- -	-	2,160 -	54,000,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Examplar	8,278,000	9777 Examplar	4,966,800	3259 Examplar	1,772,900	0 Examplar	-	1,233 Examplar	621,300	862	443,150	2,026 862	116,100	3,259 Examplar	1,180,550	13,036 Examplar	6,147,350	80.00%	74.26%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Bahan/Material	PersentasePenyediaan Alat Tulis Kantor	500 %	61,843,500	300 %	37,106,100	100 %	12,368,700	0 %	-	11.54 %	1,427,400	16.13 %	1,995,600	72 %	-	100 %	3,423,000	400 %	40,529,100	80.00%	65.53%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	30,000,000	60 Kali	18,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	60 Kali	18,000,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**288,011,900**	**300**	**172,807,140**		**57,602,380**		-	**17,296,000**		**4,553,000**			**11,567,900**	-	*33,416,900*	*300*	*206,224,040*	60.00%	71.60%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,111,900	36 Bulan	91,867,140	12 Bulan	30,622,380	0 Bulan	-	2 Bulan	7,296,000	3 Bulan	4,553,000	7 Bulan	11,567,900	12 Bulan	23,416,900	48 Bulan	115,284,040	80.00%	75.29%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	134,900,000	3 Kali	80,940,000	1 Kali	26,980,000	0 Kali	-	- Kali	10,000,000	0 Kali	-	1 Kali	-	1 Kali	10,000,000	4 Kali	90,940,000	80.00%	67.41%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**410,880,000**	**300**	**246,528,000**		**79,816,000**		-	**10,512,000**		**11,612,250**			**24,916,000**	-	*47,040,250*	*300*	*293,568,250*	60.00%	71.45%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	188,350,000	3 Mobil	113,010,000	1 Mobil	37,670,000	0 Mobil	-	- Mobil	7,380,000	0 Mobil	7,380,000	1 Mobil	18,844,000	1 Mobil	33,604,000	4 Mobil	146,614,000	80.00%	77.84%	KEC. CUKUH BALAK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	155 Unit	88,430,000	93 Unit	53,058,000	31 Unit	17,686,000	0 Unit	-	5 Unit	3,132,000	9 Unit	4,232,250	17 Unit	6,072,000	31 Unit	13,436,250	124 Unit	66,494,250	80.00%	75.19%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Motor	35,100,000	9 Motor	21,060,000	3 Motor	17,860,000	0 Motor	-	- Motor	-	0 Motor	-	- Motor	-	- Motor	-	9 Motor	21,060,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	66,000,000	3 Unit	39,600,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	3 Unit	39,600,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	33,000,000	3 Unit	19,800,000	1 Unit	6,600,000	0 Unit	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	3 Unit	19,800,000	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.14	15.37	35.6345	26.86	1.05	18.72	60.93	0.00	97.76	60.96					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	R					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	480	371,974,000	288	223,184,400		-		-									-	-	288	223,184,400	60.00%	60.00%	KEC. CUKUH BALAK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	500	166,974,500	300	100,184,700		-			-						-	-	***300***	***100,184,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 example	166,974,500	30 example	100,184,700	example		example		example		example		example		- ***example***	-	***30 example***	***100,184,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**204,999,500**	**300**	**122,999,700**		-									-	-	***300***	***122,999,700***	***60.00%***	***60.00%***	**KEC. CUKUH BALAK**
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	204,999,500	30 Laporan	122,999,700	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		- ***Laporan***	-	***30 Laporan***	***122,999,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
											0.00	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**308,966,750**	**240**	**185,380,050**		**29,209,900**									-	-	***240***	***185,380,050***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**308,966,750**	**300**	**185,380,050**		**29,209,900**									-	-	***300***	***185,380,050***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	148,524,500	6 Kali	89,114,700	Kali 2	22,459,900	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***6 Kali***	***89,114,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	160,442,250	9 Kali	96,265,350	Kali 3	6,750,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***9 Kali***	***96,265,350***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**139,500,000**	**300**	**83,700,000**		**34,200,000**				**6,750,000**		**6,750,000**		**13,500,000**	-	***27,000,000***	***300***	***110,700,000***	***60.00%***	***79.35%***	KEC. CUKUH BALAK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**139,500,000**	**300**	**83,700,000**		**34,200,000**		**6,750,000**		**6,750,000**		**13,500,000**	-	***27,000,000***	***300***	***110,700,000***	***60.00%***	***79.35%***	KEC. CUKUH BALAK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	139,500,000	36 Kali	83,700,000	Kali 12	34,200,000	Kali 0	-	Kali 3	6,750,000	2 Kali	6,750,000	7 Kali	13,500,000	***12 Kali***	***27,000,000***	***48 Kali***	***110,700,000***	***80.00%***	***79.35%***	KEC. CUKUH BALAK
											0.00	**0.00**	**25.00**	**19.74**	**16.67**	**19.74**	**58.33**	**39.47**	**100.00**	78.95					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**T**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**167,462,500**	**300**	**100,477,500**		**3,375,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	***100,477,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**167,462,500**	**300**	**100,477,500**		**3,375,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	***100,477,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. CUKUH BALAK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	71,748,750	3 Kali	43,049,250	Kali 1		Kali		Kali -	-	Kali		Kali		- Kali	-	***3 Kali***	***43,049,250***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	95,713,750	3 Kali	57,428,250	Kali 1	3,375,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***3 Kali***	***57,428,250***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**387,689,750**	**300**	**232,613,850**		**73,937,950**		-		-		-		-	-	-	***300***	***232,613,850***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**387,689,750**	**300**	**232,613,850**		**73,937,950**		-		-		-		-	-	-	***300***	***232,613,850***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	15 Kali	203,649,000	9 Kali	122,189,400	Kali 3	40,729,800	Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***9 Kali***	***122,189,400***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	184,040,750	60 Kali	110,424,450	Kali 20	33,208,150	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***60 Kali***	***110,424,450***	***60.0%***	***60.0%***	KEC. CUKUH BALAK
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			KECAMATAN SEMAKA			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**10,171,935,400**	**3 WTP**	**6,103,161,240**	**WTP**	**1,866,283,571**	**WTP**	**316,808,727**	**WTP**	**501,613,107**	**WTP**	**427,406,840**	**WTP**	**514,188,130**	- ***WTP***	***1,760,016,804***	***3 WTP***	***7,863,178,044***	***60.00%***	***77.30%***	KEC. SEMAKA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**47,200,000**	**300**	**28,320,000**		**5,890,400**		-		-		**1,635,000**		**1,389,000**	-	***3,024,000***	***300***	***31,344,000***	***60.00%***	***66.41%***	KEC. SEMAKA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	75 Buku	7,095,000	45 Buku	4,257,000	Buku 15	630,400	Buku 0	-	Buku -	-	15 Buku	585,000	- Buku	-	***15 Buku***	***585,000***	***60 Buku***	***4,842,000***	***80.00%***	***68.25%***	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	500 %	7,650,000	300 %	4,590,000	% 100	1,530,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- ***%***	-	***300 %***	***4,590,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Persentase Penyediaaan Dokumen Perubahan RKA SKPD	500 %	3,700,000	300 %	2,220,000	100 %	375,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	300 %	2,220,000	60.00%	60.00%	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen DPA SKPD	500 %	7,100,000	300 %	4,260,000	100 %	1,420,000	0 %	-	- %	-	73.94 %	1,050,000	26.06 %	-	100 %	1,050,000	400 %	5,310,000	80.00%	74.79%	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen Perubahan DPA SKPD	500 %	8,730,000	300 %	5,238,000	100 %	546,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	300 %	5,238,000	60.00%	60.00%	KEC. SEMAKA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyediaan Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	500 %	9,600,000	300 %	5,760,000	100 %	724,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	724,000	100 %	724,000	400 %	6,484,000	80.00%	67.54%	KEC. SEMAKA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perangkat Daerah	500 %	3,325,000	300 %	1,995,000	100 %	665,000	0 %	-	- %	-	0 %	-	100 %	665,000	100 %	665,000	400 %	2,660,000	80.00%	80.00%	KEC. SEMAKA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**8,237,450,905**	**300**	**4,942,470,543**		**1,513,679,699**		**305,592,727**		**441,163,107**		**337,111,840**		**337,106,230**	-	*1,420,973,904*	*300*	*6,363,444,447*	*60.00%*	*77.25%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,653,450,905	36 Bulan	3,992,070,543	12 Bulan	1,196,879,699	3 Bulan	227,592,727	3 Bulan	360,763,107	3 Bulan	258,511,840	3 Bulan	257,306,230	*12 Bulan*	*1,104,173,904*	*48 Bulan*	*5,096,244,447*	*80.00%*	*76.60%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1,584,000,000	36 Bulan	950,400,000	12 Bulan	316,800,000	3 Bulan	78,000,000	3 Bulan	80,400,000	3 Bulan	78,600,000	3 Bulan	79,800,000	*12 Bulan*	*316,800,000*	*48 Bulan*	*1,267,200,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. SEMAKA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta**	**500**		**300**		**%**		**%**		**%**		**%**		**%**		- %	-	*300* %	-	*60.00%*		KEC. SEMAKA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**196,767,500**	**300**	**118,060,500**	**%**	**14,669,000**	**%**	**129,620**	**%**	**5,910,440**	**%**	**2,860,920**	**%**	**3,381,670**	- %	*12,282,650*	*300* %	*130,343,150*	*60.00%*	*66.24%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315 Buah	25,410,000	189 Buah	15,246,000	63 Buah	3,562,000	2 Buah	129,620	13 Buah	1,135,780	17 Buah	649,320	31 Buah	1,142,800	*63 Buah*	*3,057,520*	*252 Buah*	*18,303,520*	*80.00%*	*72.03%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	Buah	129,605,000	Buah	77,763,000	850 Buah	9,657,000	0 Buah	-	156 Buah	4,774,660	459 Buah	2,211,600	235 Buah	2,238,870	*850 Buah*	*9,225,130*	*850 Buah*	*86,988,130*		*67.12%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40 Eksemplar	13,752,500	24 Eksemplar	8,251,500	8 Eksemplar	1,450,000	0 Eksemplar	-	*Eksemplar*	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	24 *Eksemplar*	*8,251,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	60 Kali	28,000,000	36 Kali	16,800,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*36 Kali*	*16,800,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**422,250,000**	**300**	**253,350,000**		**84,450,000**		**7,843,980**		**30,147,560**		**22,011,680**		**23,246,780**	-	*83,250,000*	*300*	*336,600,000*	*60.00%*	*79.72%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	118,650,000	36 Bulan	71,190,000	12 Bulan	23,730,000	2 Bulan	3,183,980	3 Bulan	6,847,560	3 Bulan	5,631,680	4 Bulan	8,066,780	*12 Bulan*	*23,730,000*	*48 Bulan*	*94,920,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. SEMAKA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	30 Orang	303,600,000	18 Orang	182,160,000	6 Orang	60,720,000	1 Orang	4,660,000	1 Orang	23,300,000	2 Orang	16,380,000	2 Orang	15,180,000	*6 Orang*	*59,520,000*	*24 Orang*	*241,680,000*	*80.00%*	*79.60%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,268,266,995**	**300**	**760,960,197**		**247,594,472**		**3,242,400**		**24,392,000**		**63,787,400**		**149,064,450**	-	*240,486,250*	*300*	*1,001,446,447*	*60.00%*	*78.96%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	519,050,000	3 Mobil	311,430,000	Mobil 1	113,260,000	Mobil 0	3,242,400	Mobil -	24,392,000	0 Mobil	62,516,000	1 Mobil	17,478,850	*1 Mobil*	*107,629,250*	*4 Mobil*	*419,059,250*	*80.00%*	*80.74%*	KEC. SEMAKA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	749,216,995	3 Unit	449,530,197	Unit 1	134,334,472	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	1,271,400	1 Unit	131,585,600	*1 Unit*	*132,857,000*	*4 Unit*	*582,387,197*	*80.00%*	*77.73%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.70	16.98	11.3291	26.88	36.45	22.90	32.03	27.55	*80.51*	94.31					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	ST					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**68,425,000**	**288**	**41,055,000**		**7,319,000**		-		**3,300,000**		-		**3,969,000**	-	*7,269,000*	*288*	*48,324,000*	*60.00%*	*70.62%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**53,095,000**	**300**	**31,857,000**		**7,319,000**		-		**3,300,000**		-		**3,969,000**	-	*7,269,000*	*300*	*39,126,000*	*60.00%*	*73.69%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	5 Kali	53,095,000	3 Kali	31,857,000	Kali 1	7,319,000	Kali 0	-	Kali -	3,300,000	0 Kali	-	1 Kali	3,969,000	*1 Kali*	*7,269,000*	*4 Kali*	*39,126,000*	*80.00%*	*73.69%*	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**15,330,000**	**300**	**9,198,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*9,198,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	5 Kali	15,330,000	3 Kali	9,198,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*3 Kali*	*9,198,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0	45.09	0.00	0.00	100.00	54.23	*100*	99.32					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST'	ST					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**281,290,000**	**240**	**168,774,000**		**43,883,000**		**40,909,000**		-		-		-	-	*40,909,000*	*240*	*209,683,000*	*60.00%*	*74.54%*	KEC. SEMAKA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**281,290,000**	**300**	**168,774,000**		**43,883,000**		**40,909,000**		-		-		-	-	*40,909,000*	*300*	*209,683,000*	*60.00%*	*74.54%*	KEC. SEMAKA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	115 Kali	207,270,000	69 Kali	124,362,000	Kali 23	41,454,000	Kali 23	40,909,000	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*23 Kali*	*40,909,000*	*92 Kali*	*165,271,000*	*80.00%*	*79.74%*	KEC. SEMAKA
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Laporan Pengarustamaan Gender	50 Eksemplar	74,020,000	30 Eksemplar	44,412,000	Eksemplar 10	2,429,000	Eksemplar 0	-	Eksemplar -	-	0 Eksemplar	-	- Eksemplar	-	- *Eksemplar*	-	*30 Eksemplar*	*44,412,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	69.70	93.22	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.70	93.22					
										Predikat kinerja	SD	ST	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	ST					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**140,875,000**	**300**	**84,525,000**		**34,500,000**		**2,250,000**		**11,250,000**		**4,500,000**		**9,000,000**	-	*27,000,000*	*300*	*111,525,000*	*60.00%*	*79.17%*	KEC. SEMAKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**140,875,000**	**300**	**84,525,000**		**34,500,000**		**2,250,000**		**11,250,000**		**4,500,000**		**9,000,000**	**-**	***27,000,000***	***300***	***111,525,000***	***60.00%***	***79.17%***	KEC. SEMAKA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,875,000	36 Kali	84,525,000	Kali 12	34,500,000	Kali 3	2,250,000	Kali 2	11,250,000	2 Kali	4,500,000	5 Kali	9,000,000	***12 Kali***	***27,000,000***	***48 Kali***	***111,525,000***	***80.00%***	***79.17%***	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**25.00**	**6.52**	**16.67**	**32.61**	**16.67**	**13.04**	**41.67**	**26.09**	**100.00**	78.26					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**211,625,000**	**300**	**126,975,000**		**3,347,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***126,975,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**211,625,000**	**300**	**126,975,000**		**3,347,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***126,975,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	114,925,000	3 Kali	68,955,000	Kali 1	450,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***3 Kali***	***68,955,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	96,700,000	3 Kali	58,020,000	Kali 1	2,897,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***3 Kali***	***58,020,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**430,447,500**	**300**	**258,268,500**		**11,154,500**		**-**		**-**		**-**		**7,632,100**	**-**	***7,632,100***	***300***	***265,900,600***	***60.00%***	***61.77%***	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**430,447,500**	**300**	**258,268,500**		**11,154,500**		**-**		**-**		**-**		**7,632,100**	**-**	***7,632,100***	***300***	***265,900,600***	***60.00%***	***61.77%***	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	10 Kali	200,000,000	6 Kali	120,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	***-***	***6 Kali***	***120,000,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SEMAKA
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	20 Kali	230,447,500	12 Kali	138,268,500	Kali 4	11,154,500	Kali -	-	Kali -	-	0 Kali	-	4 Kali	7,632,100	***4 Kali***	***7,632,100***	***16 Kali***	***145,900,600***	***80.00%***	***63.31%***	KEC. SEMAKA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**68.42**	**100.00**	68.42					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SD**	**ST**	**SD**					
			KECAMATAN PEMATANG SAWA			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,239,730,615**	**3 WTP**	**5,543,838,369**	**WTP**	**1,729,759,197**	**WTP**	**265,848,415**	**WTP**	**388,643,121**	**WTP**	**500,624,239**	**WTP**	**321,648,062**	***- WTP***	***1,476,763,837***	***3 WTP***	***7,020,602,206***	***60.00%***	***75.98%***	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**40,394,500**	**300**	**24,236,700**		**8,078,900**		**750,000**		**516,000**		**702,000**		**2,590,100**	**-**	***4,558,100***	***300***	***28,794,800***	***60.00%***	***71.28%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	14,175,000	30 Buku	8,505,000	Buku 10	2,835,000	Buku -	-	Buku -	-	2 Buku	702,000	8 Buku	298,600	***10 Buku***	***1,000,600***	***40 Buku***	***9,505,600***	***80.00%***	***67.06%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	10,831,500	30 Eksemplar Dokumen	6,498,900	10 Eksemplar Dokumen	2,166,300	3 Eksemplar Dokumen	750,000	1 Eksemplar Dokumen	66,000	0 Eksemplar Dokumen	-	6 Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***816,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***7,314,900***	***80.00%***	***67.53%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,206,500	30 Eksemplar Dokumen	3,123,900	10 Eksemplar Dokumen	1,041,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	1,026,000	***10 Eksemplar Dokum***	***1,026,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***4,149,900***	***80.00%***	***79.71%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	2,250,000	30 Eksemplar Dokumen	1,350,000	10 Eksemplar Dokumen	450,000	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***450,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***1,800,000***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,331,500	30 Eksemplar Dokumen	1,998,900	10 Eksemplar Dokumen	666,300	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	666,000	***10 Eksemplar Dokum***	***666,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***2,664,900***	***80.00%***	***79.99%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	1,050,000	30 Eksemplar Dokumen	630,000	10 Eksemplar Dokumen	210,000	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	200,000	***10 Eksemplar Dokum***	***200,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***830,000***	***80.00%***	***79.05%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	3,550,000	30 Eksemplar Dokumen	2,130,000	10 Eksemplar Dokumen	710,000	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	399,500	***10 Eksemplar Dokum***	***399,500***	***40 Eksemplar Dokum***	***2,529,500***	***80.00%***	***71.25%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**7,200,176,215**	**300**	**4,320,105,729**		**1,389,078,080**		**253,196,515**		**374,520,321**		**283,458,439**		**283,925,562**	**-**	***1,195,100,837***	***300***	***5,515,206,566***	***60.00%***	***76.60%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	6,115,620,715	30 Orang	3,669,372,429	10 Orang	1,173,978,080	3 Orang	215,546,515	2 Orang	324,030,321	2 Orang	220,738,439	3 Orang	220,175,562	***10 Orang***	***980,490,837***	***40 Orang***	***4,649,863,266***	***80.00%***	***76.03%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	818,700,000	30 Orang	491,220,000	10 Orang	163,740,000	2 Orang	37,650,000	2 Orang	37,650,000	2 Orang	44,900,000	4 Orang	43,050,000	***10 Orang***	***163,250,000***	***40 Orang***	***654,470,000***	***80.00%***	***79.94%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat	60 Paket	265,855,500	36 Paket	159,513,300	12 Paket	51,360,000	0 Paket	-	3 Paket	12,840,000	3 Paket	17,820,000	6 Paket	20,700,000	***12 Paket***	***51,360,000***	***48 Paket***	***210,873,300***	***80.00%***	***79.32%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	500		300												**-**	**-**	***300***	**-**	***60.00%***		KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500**	**28,125,000**	**300**	**16,875,000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***16,875,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	100 Set	28,125,000	60 Set	16,875,000	Set		Set		Set		Set		Set		**- Set**	**-**	***60 Set***	***16,875,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**512,191,500**	**300**	**307,314,900**		**69,868,867**		**2,024,700**		**5,279,400**		**7,049,500**		**1,850,000**	**-**	***16,203,600***	***300***	***323,518,500***	***60.00%***	***63.16%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	234,550,000	24 Unit	140,730,000	Unit 8	52,008,317	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	**- Unit**	**-**	***24 Unit***	***140,730,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3900 Kotak	94,500,000	2340 Kotak	56,700,000	780 Kotak	9,000,000	10 Kotak	1,980,000	127 Kotak	1,344,000	543 Kotak	5,637,500	100 Kotak	-	***780 Kotak***	***8,961,500***	***3,120 Kotak***	***65,661,500***	***80.00%***	***69.48%***	KEC. PEMATANG SAWA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	56,053,500	36 Bulan	33,632,100	12 Bulan	3,080,750	0 Bulan	-	- Bulan	-	5 Bulan	1,032,000	7 Bulan	1,850,000	12 Bulan	2,882,000	48 Bulan	36,514,100	80.00%	65.14%	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	5 Unit	46,088,000	3 Unit	27,652,800	1 Unit	3,829,800	0 Unit	-	- Unit	3,077,000	0 Unit	380,000	1 Unit	-	1 Unit	3,457,000	4 Unit	31,109,800	80.00%	67.50%	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	490 Kali	81,000,000	294 Kali	48,600,000	98 Kali	1,950,000	1 Kali	44,700	5 Kali	858,400	18 Kali	-	74 Kali	-	98 Kali	903,100	392 Kali	49,503,100	80.00%	61.11%	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**124,539,400**	**300**	**74,723,640**		**22,569,000**		**-**		**5,860,000**		**6,225,000**		**10,080,000**	**-**	**22,165,000**	**300**	**96,888,640**	**60.00%**	**77.80%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	112,045,000	36 Bulan	67,227,000	12 Bulan	22,569,000	0 Bulan	-	3 Bulan	5,860,000	4 Bulan	6,225,000	5 Bulan	10,080,000	12 Bulan	22,165,000	48 Bulan	89,392,000	80.00%	79.78%	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Paket	12,494,400	3 Paket	7,496,640	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	- Paket	-	3 Paket	7,496,640	60.00%	60.00%	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,334,304,000**	**300**	**800,582,400**		**240,164,350**		**9,877,200**		**2,467,400**		**203,189,300**		**23,202,400**	**-**	**238,736,300**	**300**	**1,039,318,700**	**60.00%**	**77.89%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	20 Unit	293,694,000	12 Unit	176,216,400	4 Unit	44,042,350	1 Unit	9,877,200	- Unit	2,467,400	1 Unit	8,209,300	2 Unit	22,252,400	4 Unit	42,806,300	16 Unit	219,022,700	80.00%	74.58%	KEC. PEMATANG SAWA
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Paket	1,040,610,000	3 Paket	624,366,000	1 Paket	196,122,000	0 Paket	-	- Paket	-	0 Paket	194,980,000	1 Paket	950,000	1 Paket	195,930,000	4 Paket	820,296,000	80.00%	78.83%	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	1.96	15.37	15.03	22.47	56.97	28.94	25.25	18.59	99.21	85.37					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**142,849,000**	**288**	**85,709,400**		**4,586,400**		**-**		**-**		**-**		**1,247,500**	**-**	**1,247,500**	**288**	**86,956,900**	**60.00%**	**60.87%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**57,187,000**	**300**	**34,312,200**		**2,497,600**		**-**		**-**		**-**		**515,000**	**-**	**515,000**	**300**	**34,827,200**	**60.00%**	**60.90%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Examplar	57,187,000	30 Examplar	34,312,200	10 Examplar	2,497,600	0 Examplar	-	- Examplar	-	0 Examplar	-	10 Examplar	515,000	10 Examplar	515,000	40 Examplar	34,827,200	80.00%	60.90%	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**85,662,000**	**300**	**51,397,200**		**2,088,800**		**-**		**-**		**-**		**732,500**	**-**	**732,500**	**300**	**52,129,700**	**60.00%**	**60.86%**	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	85,662,000	30 Laporan	51,397,200	10 Laporan	2,088,800	0 Laporan	-	- Laporan	-	0 Laporan	-	10 Laporan	732,500	10 Laporan	732,500	40 Laporan	52,129,700	80.00%	60.86%	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	27.20	100	27.20					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SR	ST	SR					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	400	268,485,000	240	161,091,000		33,598,100		5,348,100		21,875,000		6,323,000		-	-	*33,546,100*	*240*	*194,637,100*	*60.00%*	*72.49%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500	268,485,000	300	161,091,000		33,598,100		5,348,100		21,875,000		6,323,000		-	-	*33,546,100*	*300*	*194,637,100*	*60.00%*	*72.49%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	75 Kegiatan	136,115,500	45 Kegiatan	81,669,300	Kegiatan 15	33,598,100	Kegiatan 15	5,348,100	Kegiatan -	21,875,000	0 Kegiatan	6,323,000	- Kegiatan -	-	*15 Kegiatan*	*33,546,100*	*60 Kegiatan*	*115,215,400*	*80.00%*	*84.65%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Paket	132,369,500	3 Paket	79,421,700	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	-	*Paket*	-	*3 Paket*	*79,421,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	15.92	-	65.11	0.00	18.82	0.00	0.00	100.00	99.85				
										Predikat kinerja	ST	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	ST	ST				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	500	164,590,000	300	98,754,000		36,103,800		-		6,750,000		8,316,700		13,500,000	-	*28,566,700*	*300*	*127,320,700*	*60.00%*	*77.36%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	500	164,590,000	300	98,754,000		36,103,800		-		6,750,000		8,316,700		13,500,000	-	*28,566,700*	*300*	*127,320,700*	*60.00%*	*77.36%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	164,590,000	36 Kali	98,754,000	Kali 12	36,103,800	Kali 0	-	Kali 2	6,750,000	3 Kali	8,316,700	7 Kali	13,500,000	*12 Kali*	*28,566,700*	*48 Kali*	*127,320,700*	*80.00%*	*77.36%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	16.67	18.70	25.00	23.04	58.33	37.39	100.00	79.12				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	T				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	500	118,415,500	300	71,049,300		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*71,049,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan	500	118,415,500	300	71,049,300		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*71,049,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	42,800,500	3 Kali	25,680,300	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	-	*Kali*	-	*3 Kali*	*25,680,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	75,615,000	3 Kali	45,369,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	-	*Kali*	-	*3 Kali*	*45,369,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. PEMATANG SAWA
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**234,878,250**	**300**	**140,926,950**		**12,555,050**		-		**3,737,200**		**1,427,500**		**5,430,000**	**-**	***10,594,700***	***300***	***151,521,650***	***60.00%***	***64.51%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**234,878,250**	**300**	**140,926,950**		**12,555,050**		-		**3,737,200**		**1,427,500**		**5,430,000**	**-**	***10,594,700***	***300***	***151,521,650***	***60.00%***	***64.51%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	70 Kali	126,224,250	42 Kali	75,734,550	Kali 14	5,057,100	Kali 0	-	Kali 2	3,452,200	5 Kali	300,000	7 Kali	456,000	***14 Kali***	***4,208,200***	***56 Kali***	***79,942,750***	***80.00%***	***63.33%***	KEC. PEMATANG SAWA
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	5 Paket	108,654,000	3 Paket	65,192,400	Paket 1	7,497,950	Paket 0	-	Paket -	285,000	0 Paket	1,127,500	1 Paket	4,974,000	***1 Paket***	***6,386,500***	***4 Paket***	***71,578,900***	***80.00%***	***65.88%***	KEC. PEMATANG SAWA
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**13.33**	**29.77**	**33.33**	**11.37**	**53.33**	**43.25**	**100.00**	84.39				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**		**SR**		**R**		**ST**	**T**				
			KECAMATAN SUMBEREJO			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,393,025,115**	**3 WTP**	**5,635,815,069**	**WTP**	**1,762,646,257**	**WTP**	**428,347,103**	**WTP**	**426,249,258**	**WTP**	**323,298,843**	**WTP**	**325,030,238**	***- WTP***	***1,502,925,442***	***3 WTP***	***7,138,740,511***	***60.00%***	***76.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**82,500,000**	**300**	**49,500,000**		**17,700,000**		-		**600,000**		**5,550,000**		**2,500,000**	**-**	***8,650,000***	***300***	***58,150,000***	***60.00%***	***70.48%***	KEC. SUMBEREJO
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	43,500,000	120 Buku	26,100,000	Buku 40	9,900,000	Buku 0	-	Buku 2	600,000	18 Buku	3,600,000	20 Buku	2,500,000	***40 Buku***	***6,700,000***	***160 Buku***	***32,800,000***	***80.00%***	***75.40%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	7,875,000	30 Eksemplar Dokumen	4,725,000	10 Eksemplar Dokumen	1,575,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***4,725,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	7,875,000	30 Eksemplar Dokumen	4,725,000	10 Eksemplar Dokumen	1,575,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	900,000	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***900,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***5,625,000***	***80.00%***	***71.43%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,625,000	30 Eksemplar Dokumen	3,375,000	10 Eksemplar Dokumen	1,125,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	450,000	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***450,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***3,825,000***	***80.00%***	***68.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	6,375,000	30 Eksemplar Dokumen	3,825,000	10 Eksemplar Dokumen	1,275,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	600,000	5 Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***600,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***4,425,000***	***80.00%***	***69.41%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	5,625,000	30 Buku	3,375,000	Buku 10	1,125,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	-	***30 Buku***	***3,375,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	5,625,000	30 Buku	3,375,000	Buku 10	1,125,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***- Buku***	-	***30 Buku***	***3,375,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**7,388,786,865**	**300**	**4,433,272,119**		**1,424,239,557**		**257,847,103**		**396,994,458**		**291,388,843**		**292,600,238**	**-**	***1,238,830,642***	***300***	***5,672,102,761***	***60.00%***	***76.77%***	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,563,186,865	36 Bulan	3,937,912,119	Bulan 12	1,270,759,557	Bulan 3	234,747,103	Bulan 3	365,474,458	3 Bulan	248,148,843	3 Bulan	253,180,238	***12 Bulan***	***1,101,550,642***	***48 Bulan***	***5,039,462,761***	***80.00%***	***76.78%***	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	477,600,000	18 Orang	286,560,000	6 Orang	95,520,000	1 Orang	23,100,000	2 Orang	23,880,000	1 Orang	24,140,000	2 Orang	24,140,000	*6 Orang*	*95,260,000*	*24 Orang*	*381,820,000*	*80.00%*	*79.95%*	KEC. SUMBEREJO
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	348,000,000	21 Orang	208,800,000	Orang 7	57,960,000	Orang 0	-	Orang 2	7,640,000	1 Orang	19,100,000	4 Orang	15,280,000	*7 Orang*	*42,020,000*	*28 Orang*	*250,820,000*	*80.00%*	*72.07%*	KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Sebagai Peningkatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya**	**500**		**300**												-	-	*300*	-	*60.00%*		KEC. SUMBEREJO
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**481,138,250**	**300**	**288,682,950**		**55,026,700**		-		**1,885,200**		**4,121,600**		**5,594,350**	-	*11,601,150*	*300*	*300,284,100*	*60.00%*	*62.41%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Unit	220,813,000	30 Unit	132,487,800	Unit 10	30,320,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	970,000	9 Unit	950,000	*10 Unit*	*1,920,000*	*40 Unit*	*134,407,800*	*80.00%*	*60.87%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1200 Kotak	56,700,000	720 Kotak	34,020,000	240 Kotak	11,340,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	*- Kotak*	-	*720 Kotak*	*34,020,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	110 Examplar	33,775,250	66 Examplar	20,265,150	22 Examplar	6,683,350	0 Examplar	-	- Examplar	-	2 Examplar	660,000	20 Examplar	1,450,200	*22 Examplar*	*2,110,200*	*88 Examplar*	*22,375,350*	*80.00%*	*66.25%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	43,850,000	36 Bulan	26,310,000	12 Bulan	6,683,350	0 Bulan	-	2 Bulan	1,885,200	4 Bulan	2,491,600	6 Bulan	3,194,150	*12 Bulan*	*7,570,950*	*48 Bulan*	*33,880,950*	*80.00%*	*77.27%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	835 Kali	126,000,000	501 Kali	75,600,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*501 Kali*	*75,600,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**242,500,000**	**300**	**145,500,000**		**37,500,000**		-		**13,100,000**		**7,125,000**		**12,658,450**	-	*32,883,450*	*300*	*178,383,450*	*60.00%*	*73.56%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	142,500,000	36 Bulan	85,500,000	Bulan 12	32,500,000	Bulan 0	-	Bulan 4	8,100,000	2 Bulan	7,125,000	6 Bulan	12,658,450	*12 Bulan*	*27,883,450*	*48 Bulan*	*113,383,450*	*80.00%*	*79.57%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	100,000,000	3 Kali	60,000,000	Kali 1	5,000,000	Kali 0	-	Kali -	5,000,000	0 Kali	-	1 Kali	-	*1 Kali*	*5,000,000*	*4 Kali*	*65,000,000*	*80.00%*	*65.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,198,100,000**	**300**	**718,860,000**		**228,180,000**		**170,500,000**		**13,669,600**		**15,113,400**		**11,677,200**	-	*210,960,200*	*300*	*929,820,200*	*60.00%*	*77.61%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Mobil	226,350,000	3 Mobil	135,810,000	Mobil 1	40,220,000	Mobil 0	-	Mobil -	10,419,600	0 Mobil	13,513,400	1 Mobil	9,477,200	*1 Mobil*	*33,410,200*	*4 Mobil*	*169,220,200*	*80.00%*	*74.76%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Motor	43,500,000	6 Motor	26,100,000	Motor 2	8,700,000	Motor 0	-	Motor -	3,250,000	1 Motor	1,600,000	1 Motor	2,200,000	*2 Motor*	*7,050,000*	*8 Motor*	*33,150,000*	*80.00%*	*76.21%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	10,350,000	9 Unit	6,210,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*9 Unit*	*6,210,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	47,250,000	3 Unit	28,350,000	Unit 1	5,130,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	-	*3 Unit*	*28,350,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	870,650,000	3 Unit	522,390,000	Unit 1	174,130,000	Unit 1	170,500,000	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*170,500,000*	*4 Unit*	*692,890,000*	*80.00%*	*79.58%*	KEC. SUMBEREJO
											1.17	**24.30**	**3.51**	**24.18**	**13.58**	**18.34**	**18.27**	**18.44**	**36.53**	85.27					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**139,770,000**	**288**	**83,862,000**		**10,404,000**		-		-		-		-	-	-	***288***	***83,862,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**52,020,000**	**300**	**31,212,000**		**10,404,000**		-		-		-		-	-	-	***300***	***31,212,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Examplar	52,020,000	30 Examplar	31,212,000	Examplar 10	10,404,000	Examplar 0	-	Examplar -	-	0 Examplar	-	- Examplar	-	*- Examplar*	-	*30 Examplar*	*31,212,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**87,750,000**	**300**	**52,650,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***52,650,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	87,750,000	30 Laporan	52,650,000	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		*- Laporan*	-	*30 Laporan*	*52,650,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
											0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**423,325,250**	**240**	**253,995,150**		**43,920,050**		-		**25,712,200**		-		-	-	***25,712,200***	***240***	***279,707,350***	***60.00%***	***66.07%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**423,325,250**	**300**	**253,995,150**		**43,920,050**		-		**25,712,200**		-		-	-	***25,712,200***	***300***	***279,707,350***	***60.00%***	***66.07%***	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	129,711,500	6 Kali	77,826,900	Kali 2	25,942,300	Kali 0	-	Kali 2	25,712,200	0 Kali	-	- Kali	-	*2 Kali*	*25,712,200*	*8 Kali*	*103,539,100*	*80.00%*	*79.82%*	KEC. SUMBEREJO
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5 Kegiatan	138,100,000	3 Kegiatan	82,860,000	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		*- Kegiatan*	-	*3 Kegiatan*	*82,860,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	20 Kegiatan	155,513,750	12 Kegiatan	93,308,250	Kegiatan 4	17,977,750	Kegiatan 0	-	Kegiatan -	-	0 Kegiatan	-	- Kegiatan	-	*- Kegiatan*	-	*12 Kegiatan*	*93,308,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. SUMBEREJO
											0.00	**0.00**	**33.3333**	**58.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	33.33	58.54					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**165,537,500**	**300**	**99,322,500**		**35,807,500**		-		**6,750,000**		**13,950,000**		**11,250,000**	**-**	***31,950,000***	***300***	***131,272,500***	***60.00%***	***79.30%***	KEC. SUMBEREJO
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**165,537,500**	**300**	**99,322,500**		**35,807,500**		-		**6,750,000**		**13,950,000**		**11,250,000**	**-**	***31,950,000***	***300***	***131,272,500***	***60.00%***	***79.30%***	KEC. SUMBEREJO
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	165,537,500	36 Kali	99,322,500	Kali 12	35,807,500	Kali 0	-	Kali 2	6,750,000	5 Kali	13,950,000	5 Kali	11,250,000	***12 Kali***	***31,950,000***	***48 Kali***	***131,272,500***	***80.00%***	***79.30%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**16.67**	**18.85**	**41.67**	**38.96**	**41.67**	**31.42**	**100.00**	89.23					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**138,125,000**	**300**	**82,875,000**		**2,400,000**		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***82,875,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**138,125,000**	**300**	**82,875,000**		**2,400,000**		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***82,875,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	61,750,000	3 Kali	37,050,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***3 Kali***	***37,050,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	76,375,000	3 Kali	45,825,000	Kali 1	2,400,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	-	***3 Kali***	***45,825,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**70,122,500**	**300**	**42,073,500**		-		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***42,073,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**70,122,500**	**300**	**42,073,500**		-		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***42,073,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	65 Kali	45,625,000	39 Kali	27,375,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***39 Kali***	***27,375,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	65 Kali	24,497,500	39 Kali	14,698,500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	-	***39 Kali***	***14,698,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. SUMBEREJO
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			KECAMATAN ULU BELU			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	5 WTP	7,097,860,760	3 WTP	4,258,716,456	WTP	1,473,290,389	WTP	215,829,512	WTP	417,694,099	WTP	289,724,305	WTP	288,939,329	- WTP	1,212,187,245	3 WTP	5,470,903,701	60.00%	77.08%	KEC. ULU BELU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500	63,057,000	300	37,834,200		9,634,000		-		1,250,300		-		2,988,800	-	4,239,100	300	42,073,300	60.00%	66.72%	KEC. ULU BELU
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	60 Dokumen	24,737,000	36 Dokumen	14,842,200	12 Dokumen	2,850,000	0 Dokumen	-	6 Dokumen	162,000	0 Dokumen	-	6 Dokumen	1,163,000	12 Dokumen	1,325,000	48 Dokumen	16,167,200	80.00%	65.36%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	600 Eksemplar Dokumen	5,270,000	360 Eksemplar Dokumen	3,162,000	120 Eksemplar Dokumen	1,054,000	0 Eksemplar Dokumen	-	120 Eksemplar Dokumen	984,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	120 Eksemplar Dokumen	984,000	480 Eksemplar Dokumen	4,146,000	80.00%	78.67%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	160 Eksemplar Dokumen	9,510,000	96 Eksemplar Dokumen	5,706,000	32 Eksemplar Dokumen	1,902,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	32 Eksemplar Dokumen	1,023,800	32 Eksemplar Dokumen	1,023,800	128 Eksemplar Dokumen	6,729,800	80.00%	70.77%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,620,000	3 Eksemplar Dokumen	3,372,000	1 Eksemplar Dokumen	1,124,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	3,372,000	60.00%	60.00%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 Eksemplar Dokumen	5,620,000	3 Eksemplar Dokumen	3,372,000	1 Eksemplar Dokumen	1,124,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	1 Eksemplar Dokumen	802,000	1 Eksemplar Dokumen	802,000	4 Eksemplar Dokumen	4,174,000	80.00%	74.27%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	7,040,000	30 Eksemplar Dokumen	4,224,000	10 Eksemplar Dokumen	528,000	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	104,300	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	104,300	40 Eksemplar Dokumen	4,328,300	80.00%	61.48%	KEC. ULU BELU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,260,000	30 Eksemplar Dokumen	3,156,000	10 Eksemplar Dokumen	1,052,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	30 Eksemplar Dokumen	3,156,000	60.00%	60.00%	KEC. ULU BELU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah	500	6,122,467,560	300	3,673,480,536		1,267,665,649		215,829,512		368,451,699		247,504,705		256,339,329	-	1,088,125,245	300	4,761,605,781	60.00%	77.77%	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	5,277,792,560	42 Bulan	3,166,675,536	14 Bulan	1,104,026,649	3 Bulan	191,304,512	5 Bulan	332,436,699	3 Bulan	222,979,705	3 Bulan	216,494,329	14 Bulan	963,215,245	56 Bulan	4,129,890,781	80.00%	78.25%	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	587,000,000	36 Bulan	352,200,000	12 Bulan	114,800,000	3 Bulan	24,525,000	2 Bulan	24,525,000	3 Bulan	24,525,000	4 Bulan	24,525,000	12 Bulan	98,100,000	48 Bulan	450,300,000	80.00%	76.71%	KEC. ULU BELU
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	233,580,000	18 Orang	140,148,000	6 Orang	45,960,000	0 Orang	-	2 Orang	11,490,000	0 Orang	-	4 Orang	15,320,000	6 Orang	26,810,000	24 Orang	166,958,000	80.00%	71.48%	KEC. ULU BELU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 Dokumen	24,095,000	30 Dokumen	14,457,000	10 Dokumen	2,879,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	30 Dokumen	14,457,000	60.00%	60.00%	KEC. ULU BELU
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	500	49,500,000	300	29,700,000		9,900,000		-		9,900,000		-		-	-	9,900,000	300	39,600,000	60.00%	80.00%	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	200 Stel	49,500,000	120 Stel	29,700,000	40 Stel	9,900,000	0 Stel	-	40 Stel	9,900,000	0 Stel	-	- Stel	-	40 Stel	9,900,000	160 Stel	39,600,000	80.00%	80.00%	KEC. ULU BELU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera	500	252,154,500	300	151,292,700		67,209,200		-		15,770,000		31,599,200		5,752,000	-	53,121,200	300	204,413,900	60.00%	81.07%	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	74,250,000	12 Unit	44,550,000	4 Unit	48,300,000	0 Unit	-	2 Unit	14,850,000	1 Unit	29,950,000	1 Unit	3,500,000	4 Unit	48,300,000	16 Unit	92,850,000	80.00%	125.05%	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	1000 Kotak	46,650,000	600 Kotak	27,990,000	200 Kotak	2,330,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	200 Kotak	744,000	200 Kotak	744,000	800 Kotak	28,734,000	80.00%	61.59%	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31835 Lembar	11,600,000	19101 Lembar	6,960,000	6367 Lembar	3,598,300	0 Lembar	-	1,152 Lembar	420,000	827 Lembar	400,000	4,388 Lembar	750,000	*6,367 Lembar*	*1,570,000*	*25,468 Lembar*	*8,530,000*	*80.00%*	*73.53%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	15 Paket	22,154,500	9 Paket	13,292,700	3 Paket	4,430,900	0 Paket	-	1 Paket	500,000	1 Paket	1,249,200	1 Paket	758,000	*3 Paket*	*2,507,200*	*12 Paket*	*15,799,900*	*80.00%*	*71.32%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	380 Kali	97,500,000	228 Kali	58,500,000	76 Kali	8,550,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*228 Kali*	*58,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500**	**37,500,000**	**300**	**22,500,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	525 Unit	37,500,000	315 Unit	22,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*315 Unit*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**100,531,700**	**300**	**60,319,020**		**29,286,340**		-		**4,652,500**		**3,753,000**		**15,357,000**	-	*23,762,500*	*300*	*84,081,520*	*60.00%*	*83.64%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	73,950,000	36 Bulan	44,370,000	12 Bulan	23,430,000	0 Bulan	-	3 Bulan	4,652,500	1 Bulan	-	8 Bulan	14,577,000	*12 Bulan*	*19,229,500*	*48 Bulan*	*63,599,500*	*80.00%*	*86.00%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	25 Kali	26,581,700	15 Kali	15,949,020	5 Kali	5,856,340	0 Kali	-	- Kali	-	3 Kali	3,753,000	2 Kali	780,000	*5 Kali*	*4,533,000*	*20 Kali*	*20,482,020*	*80.00%*	*77.05%*	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**472,650,000**	**300**	**283,590,000**		**89,595,200**		-		**17,669,600**		**6,867,400**		**8,502,200**	-	*33,039,200*	*300*	*316,629,200*	*60.00%*	*66.99%*	KEC. ULU BELU
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit	279,850,000	15 Unit	167,910,000	5 Unit	51,035,200	0 Unit	-	1 Unit	17,669,600	1 Unit	6,867,400	3 Unit	8,502,200	*5 Unit*	*33,039,200*	*20 Unit*	*200,949,200*	*80.00%*	*71.81%*	KEC. ULU BELU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	192,800,000	6 Unit	115,680,000	2 Unit	38,560,000	Unit		Unit	-	Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*6 Unit*	*115,680,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.09**	**14.65**	**19.36**	**28.35**	**12.10**	**19.67**	**67.03**	**19.61**	**98.57**	82.28					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**75,665,000**	**288**	**45,399,000**		**15,133,000**		-		-		-		-	-	-	*288*	*45,399,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**41,595,000**	**300**	**24,957,000**		**8,319,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*24,957,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	41,595,000	6 Kali	24,957,000	2 Kali	8,319,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*6 Kali*	*24,957,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**34,070,000**	**300**	**20,442,000**		**6,814,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*20,442,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	34,070,000	30 Laporan	20,442,000	Laporan 10	6,814,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	- Laporan	-	30 Laporan	20,442,000	60.00%	60.00%	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**491,685,000**	**240**	**295,011,000**		**52,872,000**				**14,323,750**					-	*14,323,750*	*240*	*309,334,750*	*60.00%*	*62.91%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**491,685,000**	**300**	**295,011,000**		**52,872,000**				**14,323,750**					-	*14,323,750*	*300*	*309,334,750*	*60.00%*	*62.91%*	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	95 Kegiatan	388,685,000	57 Kegiatan	233,211,000	Kegiatan 19	41,182,000	Kegiatan 0	-	Kegiatan 2	14,323,750	8 Kegiatan	-	9 Kegiatan	-	*19 Kegiatan*	*14,323,750*	*76 Kegiatan*	*247,534,750*	*80.00%*	*63.69%*	KEC. ULU BELU
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	103,000,000	18 Kali	61,800,000	Kali 6	11,690,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*18 Kali*	*61,800,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	8.00	27.09	32.00	0.00	36.00	0.00	76.00	27.09				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	T	SR				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**140,790,000**	**300**	**84,474,000**		**34,200,000**				**9,000,000**		**4,500,000**		**8,250,000**	-	*21,750,000*	*300*	*106,224,000*	*60.00%*	*75.45%*	KEC. ULU BELU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**140,790,000**	**300**	**84,474,000**		**34,200,000**				**9,000,000**		**4,500,000**		**8,250,000**	-	*21,750,000*	*300*	*106,224,000*	*60.00%*	*75.45%*	KEC. ULU BELU
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,790,000	36 Kali	84,474,000	Kali 12	34,200,000	Kali 0	-	Kali 4	9,000,000	1 Kali	4,500,000	7 Kali	8,250,000	*12 Kali*	*21,750,000*	*48 Kali*	*106,224,000*	*80.00%*	*75.45%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	33.33	26.32	8.33	13.16	58.33	24.12	100.00	63.60				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST	R				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**94,990,000**	**300**	**56,994,000**		**4,428,000**									-	-	*300*	*56,994,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**94,990,000**	**300**	**56,994,000**		**4,428,000**									-	-	*300*	*56,994,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Kali	59,900,000	6 Kali	35,940,000	Kali 2	480,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*6 Kali*	*35,940,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	35,090,000	3 Kali	21,054,000	Kali 1	3,948,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	3 Kali	21,054,000	60.00%	60.00%	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**333,140,000**	**300**	**199,884,000**		**9,158,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*199,884,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**333,140,000**	**300**	**199,884,000**		**9,158,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*199,884,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	160 Kali	131,260,000	96 Kali	78,756,000	Kali 32	3,082,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*96 Kali*	*78,756,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	160 Kali	127,920,000	96 Kali	76,752,000	Kali 32	3,384,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*96 Kali*	*76,752,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Kali	73,960,000	48 Kali	44,376,000	Kali 16	2,692,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*48 Kali*	*44,376,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. ULU BELU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			KECAMATAN KELUMBAYAN			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**8,774,640,850**	**3 WTP**	**5,264,784,510**	**WTP**	**1,654,911,976**	**WTP**	**227,959,507**	**WTP**	**418,602,982**	**WTP**	**334,444,682**	**WTP**	**358,137,918**	- *WTP*	*1,339,145,089*	*3 WTP*	*6,603,929,599*	*60.00%*	*75.26%*	KEC. KELUMBAYAN
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**154,245,000**	**300**	**92,547,000**		**30,849,000**		-		-		**5,532,600**		**1,639,200**	-	*7,171,800*	*300*	*99,718,800*	*60.00%*	*64.65%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Examplar	73,245,000	90 Examplar	43,947,000	Examplar 30	14,649,000	Examplar 0	-	Examplar -	-	13 Examplar	5,392,000	17 Examplar	1,419,200	*30 Examplar*	*6,811,200*	*120 Examplar*	*50,758,200*	*80.00%*	*69.30%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	15,750,000	30 Eksemplar Dokumen	9,450,000	10 Eksemplar Dokumen	3,150,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	140,600	10 Eksemplar Dokumen	-	*10 Eksemplar Dokum*	*140,600*	*40 Eksemplar Dokum*	*9,590,600*	*80.00%*	*60.89%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,750,000	30 Eksemplar Dokumen	9,450,000	10 Eksemplar Dokumen	3,150,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	220,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*220,000*	*40 Eksemplar Dokumen*	*9,670,000*	*80.00%*	*61.40%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	15,000,000	30 Eksemplar Dokumen	9,000,000	10 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*30 Eksemplar Dokum*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- *Eksemplar Dokum*	-	*30 Eksemplar Dokum*	*3,150,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																					16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	14,250,000	30 Eksemplar Dokumen	8,550,000	10 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	-	*30 Eksemplar Dokumen*	*8,550,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	15,000,000	30 Eksemplar Dokumen	9,000,000	10 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokum*	-	*30 Eksemplar Dokum*	*9,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**6,774,247,050**	**300**	**4,064,548,230**		**1,347,256,869**		**227,959,507**		**403,092,182**		**304,376,682**		**320,667,918**	*-*	*1,256,096,289*	*300*	*5,320,644,519*	*60.00%*	*78.54%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	6,160,247,050	42 Orang	3,696,148,230	14 Orang	1,224,456,869	3 Orang	216,709,507	5 Orang	372,146,982	3 Orang	276,836,682	3 Orang	291,137,918	*14 Orang*	*1,156,831,089*	*56 Orang*	*4,852,979,319*	*80.00%*	*78.78%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang	234,300,000	9 Orang	140,580,000	3 Orang	46,860,000	0 Orang	11,250,000	1 Orang	11,250,000	1 Orang	11,250,000	1 Orang	11,250,000	*3 Orang*	*45,000,000*	*12 Orang*	*185,580,000*	*80.00%*	*79.21%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	342,200,000	18 Orang	205,320,000	6 Orang	68,440,000	0 Orang	-	2 Orang	19,695,200	1 Orang	16,290,000	3 Orang	14,880,000	*6 Orang*	*50,865,200*	*24 Orang*	*256,185,200*	*80.00%*	*74.86%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	50 Eksamplar	18,750,000	30 Eksamplar	11,250,000	10 Eksamplar	3,750,000	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	10 Eksamplar	3,400,000	*10 Eksamplar*	*3,400,000*	*40 Eksamplar*	*14,650,000*	*80.00%*	*78.13%*	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwula	50 Eksamplar	18,750,000	30 Eksamplar	11,250,000	10 Eksamplar	3,750,000	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	- Eksamplar	-	*- Eksamplar*	-	*30 Eksamplar*	*11,250,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500**	**39,375,000**	**300**	**23,625,000**		**7,875,000**				**-**		**-**		**-**	*-*	*-*	*300*	*23,625,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	150 Stel	39,375,000	90 Stel	23,625,000	30 Stel	7,875,000	0 Stel	-	- Stel	-	0 Stel	-	- Stel	-	*- Stel*	-	*90 Stel*	*23,625,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**794,768,150**	**300**	**476,860,890**		**90,279,930**				**3,063,200**		**4,797,800**		**8,016,000**	*-*	*15,877,000*	*300*	*492,737,890*	*60.00%*	*62.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	431,658,150	45 Unit	258,994,890	15 Unit	61,968,630	0 Unit	-	1 Unit	2,975,600	1 Unit	1,971,200	13 Unit	7,596,000	*15 Unit*	*12,542,800*	*60 Unit*	*271,537,690*	*80.00%*	*62.91%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	157,500,000	1500 Kotak	94,500,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		*- Kotak*	-	*1,500 Kotak*	*94,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Examplar	39,000,000	600 Examplar	23,400,000	200 Examplar	7,889,300	0 Examplar	-	15 Examplar	87,600	20 Examplar	72,600	165 Examplar	-	*200 Examplar*	*160,200*	*800 Examplar*	*23,560,200*	*80.00%*	*60.41%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	2250 Buah	102,110,000	1350 Buah	61,266,000	450 Buah	20,422,000	0 Buah	-	- Buah	-	0 Buah	2,754,000	450 Buah	420,000	*450 Buah*	*3,174,000*	*1,800 Buah*	*64,440,000*	*80.00%*	*63.11%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	64,500,000	105 Kali	38,700,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*105 Kali*	*38,700,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**246,326,635**	**300**	**147,795,981**		**30,515,374**		**-**		**-**		**7,000,000**		**5,340,000**	*-*	*12,340,000*	*300*	*160,135,981*	*60.00%*	*65.01%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	117,576,635	36 Bulan	70,545,981	12 Bulan	23,515,374	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	5,340,000	*12 Bulan*	*5,340,000*	*48 Bulan*	*75,885,981*	*80.00%*	*64.54%*	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	128,750,000	3 Kali	77,250,000	Kali 1	7,000,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	7,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*7,000,000*	*4 Kali*	*84,250,000*	*80.00%*	*65.44%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**765,679,015**	**300**	**459,407,409**		**148,135,803**		**-**		**12,447,600**		**12,737,600**		**22,474,800**	**-**	***47,660,000***	***300***	***507,067,409***	***60.00%***	***66.22%***	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	195,850,000	3 Unit	117,510,000	Unit 1	39,170,000	Unit 0	-	Unit -	9,980,200	0 Unit	11,519,600	1 Unit	12,901,800	*1 Unit*	*34,401,600*	*4 Unit*	*151,911,600*	*80.00%*	*77.57%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	84,680,000	6 Unit	50,808,000	Unit 2	16,936,000	Unit 0	-	Unit -	2,467,400	1 Unit	1,218,000	1 Unit	9,573,000	*2 Unit*	*13,258,400*	*8 Unit*	*64,066,400*	*80.00%*	*75.66%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Fasilitas Pemerintahan Kecamatan	5 Unit	485,149,015	3 Unit	291,089,409	Unit 1	92,029,803	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*3 Unit*	*291,089,409*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.36**		**13.77**	**2.84**	**25.29**	**4.73**	**20.21**	**82.49**	**21.64**	**90.41**	80.92				
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**T**	**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**135,937,500**	**288**	**81,562,500**		**5,362,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***288***	***81,562,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**42,937,500**	**300**	**25,762,500**		**2,362,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***25,762,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42,937,500	12 Kali	25,762,500	Kali 4	2,362,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*12 Kali*	*25,762,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**93,000,000**	**300**	**55,800,000**		**3,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***55,800,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Laporan	93,000,000	30 Laporan	55,800,000	Laporan 10	3,000,000	Laporan 0	-	Laporan -	-	0 Laporan	-	- Laporan	-	*- Laporan*	*-*	*30 Laporan*	*55,800,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**		**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-				
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**180,475,000**	**240**	**108,285,000**		**19,745,000**		**-**		**5,744,000**		**467,000**		**-**	**-**	***6,211,000***	***240***	***114,496,000***	***60.00%***	***63.44%***	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**180,475,000**	**300**	**108,285,000**		**19,745,000**		**-**		**5,744,000**		**467,000**		**-**	**-**	***6,211,000***	***300***	***114,496,000***	***60.00%***	***63.44%***	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Kali	123,012,500	30 Kali	73,807,500	Kali 10	18,602,500	Kali 0	-	Kali 10	5,744,000	0 Kali	467,000	- Kali	-	*10 Kali*	*6,211,000*	*40 Kali*	*80,018,500*	*80.00%*	*65.05%*	KEC. KELUMBAYAN
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	57,462,500	9 Kali	34,477,500	Kali 3	1,142,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*9 Kali*	*34,477,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**77**	**29.09**	**0.00**	**2.37**	**0.00**	**0.00**	**76.92**	31.46					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	T	SR					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**140,250,000**	**300**	**84,150,000**		**35,250,000**		**-**		**11,250,000**		**6,750,000**		**2,250,000**	**-**	***20,250,000***	***300***	***104,400,000***	***60.00%***	***74.44%***	KEC. KELUMBAYAN
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**140,250,000**	**300**	**84,150,000**		**35,250,000**		**-**		**11,250,000**		**6,750,000**		**2,250,000**	**-**	***20,250,000***	***300***	***104,400,000***	***60.00%***	***74.44%***	KEC. KELUMBAYAN
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,250,000	36 Kali	84,150,000	Kali 12	35,250,000	Kali 0	-	Kali 4	11,250,000	3 Kali	6,750,000	5 Kali	2,250,000	*12 Kali*	***20,250,000***	***48 Kali***	***104,400,000***	***80.00%***	***74.44%***	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**33.33**	**31.91**	**25.00**	**19.15**	**41.67**	**6.38**	**100.00**	57.45					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	R					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**66,787,500**	**300**	**40,072,500**		**1,525,000**		**-**		**-**		**1,525,000**		**-**	**-**	***1,525,000***	***300***	***41,597,500***	***60.00%***	***62.28%***	KEC. KELUMBAYAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**66,787,500**	**300**	**40,072,500**		**1,525,000**		**-**		**-**		**1,525,000**		**-**	**-**	***1,525,000***	***300***	***41,597,500***	***60.00%***	***62.28%***	KEC. KELUMBAYAN
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	49,662,500	3 Kali	29,797,500	Kali 1	1,525,000	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	1,525,000	- Kali	-	*1 Kali*	***1,525,000***	*4 Kali*	*31,322,500*	*80.00%*	*63.07%*	KEC. KELUMBAYAN
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17,125,000	3 Kali	10,275,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	-	*3 Kali*	*10,275,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	100.00					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**156,087,500**	**300**	**93,652,500**		**7,217,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***93,652,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**156,087,500**	**300**	**93,652,500**		**7,217,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***93,652,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KELUMBAYAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																				
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	73,587,500	18 Kali	44,152,500	Kali 6	2,717,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*18 Kali*	*44,152,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	82,500,000	6 Kali	49,500,000	Kali 2	4,500,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*6 Kali*	*49,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**	**-**				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			KECAMATAN GISTING			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**13,305,903,435**	**3 WTP**	**7,983,542,061**	**WTP**	**2,670,464,870**	**WTP**	**393,193,833**	**WTP**	**638,195,829**	**WTP**	**577,233,165**	**WTP**	**485,530,279**	**-** *WTP*	***2,094,153,106***	***3*** *WTP*	***10,077,695,167***	***60.00%***	***75.74%***	KEC. GISTING
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**65,417,000**	**300**	**39,250,200**		**13,083,400**		**1,095,300**		-		**1,636,500**		-	-	***2,731,800***	***300***	***41,982,000***	***60.00%***	***64.18%***	KEC. GISTING
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	16,679,000	60 Buku	10,007,400	Buku 20	3,335,800	Buku 20	600,000	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***20 Buku***	***600,000***	***80 Buku***	***10,607,400***	***80.00%***	***63.60%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	13,908,000	60 Buku	8,344,800	Buku 20	2,781,600	Buku 0	-	Buku -	-	20 Buku	1,636,500	- Buku	-	***20 Buku***	***1,636,500***	***80 Buku***	***9,981,300***	***80.00%***	***71.77%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	11,580,000	60 Buku	6,948,000	Buku 20	2,316,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***60 Buku***	***6,948,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	7,125,000	60 Buku	4,275,000	Buku 20	1,425,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***60 Buku***	***4,275,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	7,125,000	60 Buku	4,275,000	Buku 20	1,425,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***60 Buku***	***4,275,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	4,500,000	60 Buku	2,700,000	Buku 20	900,000	Buku 20	495,300	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	***20 Buku***	***495,300***	***80 Buku***	***3,195,300***	***80.00%***	***71.01%***	KEC. GISTING
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	4,500,000	60 Buku	2,700,000	Buku 20	900,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***60 Buku***	***2,700,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**9,627,412,865**	**300**	**5,776,447,719**		**1,977,166,756**		**376,164,533**		**570,653,607**		**384,407,583**		**348,703,447**	-	***1,679,929,170***	***300***	***7,456,376,889***	***60.00%***	***77.45%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7,262,226,865	42 Bulan	4,357,336,119	Bulan 14	1,504,129,556	Bulan 3	279,639,533	Bulan 5	449,928,607	3 Bulan	277,002,583	3 Bulan	247,338,447	***14 Bulan***	***1,253,909,170***	***56 Bulan***	***5,611,245,289***	***80.00%***	***77.27%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang	2,058,375,000	72 Orang	1,235,025,000	Orang 24	411,675,000	Orang 5	96,525,000	Orang 6	96,525,000	6 Orang	96,525,000	7 Orang	96,525,000	***24 Orang***	***386,100,000***	***96 Orang***	***1,621,125,000***	***80.00%***	***78.76%***	KEC. GISTING
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	290,400,000	18 Orang	174,240,000	Orang 6	58,080,000	Orang 0	-	Orang 2	24,200,000	2 Orang	9,680,000	2 Orang	4,840,000	***6 Orang***	***38,720,000***	***24 Orang***	***212,960,000***	***80.00%***	***73.33%***	KEC. GISTING
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	16,411,000	30 Buku	9,846,600	Buku 10	3,282,200	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	1,200,000	10 Buku	-	***10 Buku***	***1,200,000***	***40 Buku***	***11,046,600***	***80.00%***	***67.31%***	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	2	3	4	5																				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**500**	**16,425,000**	**300**	**9,855,000**		**3,285,000**		-		-		-		-	**-**	**-**	***300***	***9,855,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45 Stel	16,425,000	27 Stel	9,855,000	Stel 9	3,285,000	Stel 0	-	Stel -	-	0 Stel	-	- Stel	-	***- Stel***	***-***	***27 Stel***	***9,855,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**481,809,070**	**300**	**289,085,442**		**105,401,814**		**750,000**		**2,977,800**		**10,183,900**		**10,817,200**	**-**	***24,728,900***	***300***	***313,814,342***	***60.00%***	***65.13%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	157,165,000	18 Unit	94,299,000	Unit 6	52,823,000	Unit 0	-	Unit -	580,000	1 Unit	1,530,000	5 Unit	1,925,000	***6 Unit***	***4,035,000***	***24 Unit***	***98,334,000***	***80.00%***	***62.57%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	81,000,000	2160 Kotak	48,600,000	Kotak 720	16,200,000	Kotak 0	-	Kotak -	-	119 Kotak	2,673,000	601 Kotak	-	***720 Kotak***	***2,673,000***	***2,880 Kotak***	***51,273,000***	***80.00%***	***63.30%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111000 Lembar	43,969,500	66600 Lembar	26,381,700	22200 Lembar	9,843,900	0 Lembar	-	2,897 Lembar	1,147,800	4363 Lembar	2,070,900	14,940 Lembar	4,612,200	***22,200 Lembar***	***7,830,900***	***88,800 Lembar***	***34,212,600***	***80.00%***	***77.81%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	65,139,570	36 Bulan	39,083,742	12 Bulan	12,827,914	1 Bulan	750,000	- Bulan	1,250,000	3 Bulan	3,910,000	8 Bulan	4,280,000	***12 Bulan***	***10,190,000***	***48 Bulan***	***49,273,742***	***80.00%***	***75.64%***	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	575 Kali	134,535,000	345 Kali	80,721,000	Kali 115	13,707,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***345 Kali***	***80,721,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**	**500**	**37,500,000**	**300**	**22,500,000**		**7,500,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***22,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	30 Unit	37,500,000	18 Unit	22,500,000	Unit 6	7,500,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	***-***	***18 Unit***	***22,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**280,415,500**	**300**	**168,249,300**		**62,083,100**		**1,518,000**		**10,656,422**		**14,733,182**		**9,507,232**	**-**	***36,414,836***	***300***	***204,664,136***	***60.00%***	***72.99%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,900,000	36 Bulan	92,340,000	Bulan 12	31,780,000	Bulan 1	1,518,000	Bulan 3	10,656,422	4 Bulan	4,733,182	4 Bulan	9,507,232	***12 Bulan***	***26,414,836***	***48 Bulan***	***118,754,836***	***80.00%***	***77.16%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	126,515,500	3 Kali	75,909,300	Kali 1	30,303,100	Kali 0	-	Kali -	-	1 Kali	10,000,000	- Kali	-	***1 Kali***	***10,000,000***	***4 Kali***	***85,909,300***	***80.00%***	***67.90%***	KEC. GISTING
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**2,796,924,000**	**300**	**1,678,154,400**		**501,944,800**		**13,666,000**		**53,908,000**		**166,272,000**		**116,502,400**	**-**	***350,348,400***	***300***	***2,028,502,800***	***60.00%***	***72.53%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	225,850,000	3 Unit	135,510,000	Unit 1	45,170,000	Unit 0	2,467,000	Unit -	7,401,000	0 Unit	23,236,000	1 Unit	4,241,400	***1 Unit***	***37,345,400***	***4 Unit***	***172,855,400***	***80.00%***	***76.54%***	KEC. GISTING
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	1,310,372,000	15 Unit Mobil dan Motor	786,223,200	Unit Mobil dan Motor 5	279,074,400	Unit Mobil dan Motor 1	11,199,000	Unit Mobil dan Motor -	46,507,000	1 Unit Mobil dan Motor	51,816,000	3 Unit Mobil dan Motor	75,181,000	***5 Unit Mobil dan Motor***	***184,703,000***	***20 Unit Mobil dan Motor***	***970,926,200***	***80.00%***	***74.10%***	KEC. GISTING
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	56,850,000	45 Unit	34,110,000	Unit 15	11,370,000	Unit 0	-	Unit -	-	1 Unit	2,020,000	14 Unit	2,420,000	***15 Unit***	***4,440,000***	***60 Unit***	***38,550,000***	***80.00%***	***67.81%***	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	1,203,852,000	6 Gedung Bangunan	722,311,200	2 Gedung Bangunan	166,330,400	0 Gedung Bangunan	-	- Gedung Bangunan	-	1 Gedung Bangunan	89,200,000	1 Gedung Bangunan	34,660,000	*2 Gedung Bangunan*	*123,860,000*	*8 Gedung Bangunan*	*846,171,200*	*80.00%*	*70.29%*	KEC. GISTING
				Rata-rata capaian kinerja (%)							0.22		14.72	12.50	23.90	19.42	21.62	66.95	18.18	99.10	78.42				
				Predikat kinerja							SR		SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	T				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**240,102,500**	**288**	**144,061,500**		**48,020,500**		-		-		-		-	-	*288*	*144,061,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	500	125,328,000	300	75,196,800		**25,065,600**		-		-					-	-	*300*	*75,196,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	500 %	125,328,000	300 %	75,196,800	% 100	25,065,600	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*300 %*	*75,196,800*		*60.00%*	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**114,774,500**	**300**	**68,864,700**		**22,954,900**		-		-		-		-	-	*300*	*68,864,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentas Penyediaan Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	500 %	114,774,500	300 %	68,864,700	% 100	22,954,900	% 0	-	% -	-	0 %	-	- %	-	- %	-	*300 %*	*68,864,700*		*60.00%*	KEC. GISTING
				Rata-rata capaian kinerja (%)							0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
				Predikat kinerja							SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**183,820,500**	**240**	**110,292,300**		**36,764,100**		**14,421,850**		**3,030,000**		-		-	-	*17,451,850*	*240*	*127,744,150*	*60.00%*	*69.49%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**183,820,500**	**300**	**110,292,300**		**36,764,100**		**14,421,850**		**3,030,000**		-		-	-	*17,451,850*	*300*	*127,744,150*	*60.00%*	*69.49%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	88,032,500	6 Kali	52,819,500	Kali 2	17,606,500	Kali 1	14,421,850	Kali 1	3,030,000	0 Kali	-	- Kali	-	*2 Kali*	*17,451,850*	*8 Kali*	*70,271,350*	*80.00%*	*79.82%*	KEC. GISTING
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	95,788,000	9 Kali	57,472,800	Kali 3	19,157,600	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*9 Kali*	*57,472,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. GISTING
				Rata-rata capaian kinerja (%)							20.00		39.23	20	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	47.47				
				Predikat kinerja							SR		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**141,593,000**	**300**	**84,955,800**		**35,518,600**		-		**13,500,000**		**4,500,000**		**6,750,000**	-	*24,750,000*	*300*	*109,705,800*	*60.00%*	*77.48%*	KEC. GISTING
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**141,593,000**	**300**	**84,955,800**		**35,518,600**		-		**13,500,000**		**4,500,000**		**6,750,000**	-	*24,750,000*	*300*	*109,705,800*	*60.00%*	*77.48%*	KEC. GISTING

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,593,000	36 Bulan	84,955,800	Bulan 12	35,518,600	Bulan 0	-	Bulan 5	13,500,000	2 Bulan	4,500,000	5 Bulan	6,750,000	*12 Bulan*	*24,750,000*	*48 Bulan*	*109,705,800*	*80.00%*	*77.48%*	KEC. GISTING
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	42	38.01	16.67	12.67	41.67	19.00	100.00	69.68				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	SD				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**66,039,500**	**300**	**39,623,700**		**13,207,900**		-		-		-		-	-	-	***300***	***39,623,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**66,039,500**	**300**	**39,623,700**		**13,207,900**		-		-		-		-	-	-	***300***	***39,623,700***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44,634,000	3 Kali	26,780,400	Kali 1	8,926,800	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	***3 Kali***	***26,780,400***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	21,405,500	3 Kali	12,843,300	Kali 1	4,281,100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	***3 Kali***	***12,843,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**201,424,000**	**300**	**120,854,400**		**40,284,800**		-		**6,014,250**		-		-	-	***6,014,250***	***300***	***126,868,650***	***60.00%***	***62.99%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**201,424,000**	**300**	**120,854,400**		**40,284,800**		-		**6,014,250**		-		-	-	***6,014,250***	***300***	***126,868,650***	***60.00%***	***62.99%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	111,861,000	300 %	67,116,600	% 100	22,372,200	% 0	-	% 26.88	6,014,250	0 %	-	73.12 %	-	***100 %***	***6,014,250***	***400 %***	***73,130,850***	***80.00%***	***65.38%***	KEC. GISTING
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	45 Desa	89,563,000	27 Desa	53,737,800	Desa 9	17,912,600	Desa 0	-	Desa -	-	0 Desa	-	- Desa	-	- *Desa*	-	***27 Desa***	***53,737,800***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GISTING
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	25	14.93	0.00	0.00	67.08	0.00	91.74	14.93				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	ST	SR				
			KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,155,009,695**	**3 WTP**	**5,493,005,817**	**WTP**	**1,699,908,310**	**WTP**	**271,489,557**	**WTP**	**429,225,867**	**WTP**	**316,743,288**	**WTP**	**504,896,411**	- *WTP*	***1,522,355,123***	***3 WTP***	***7,015,360,940***	***60.00%***	***76.63%***	KEC. KOTIM
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**40,513,500**	**300**	**24,308,100**		**1,890,500**		**548,750**		-		-		-	-	***548,750***	***300***	***24,856,850***	***60.00%***	***61.35%***	KEC. KOTIM
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	50 Buku	15,215,000	30 Buku	9,129,000	Buku 10	793,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	- *Buku*	-	***30 Buku***	***9,129,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Buku	13,628,000	90 Buku	8,176,800	Buku 30	882,400	Buku 5	441,200	Buku 25	-	0 Buku	-	- Buku	-	*30 Buku*	*441,200*	*120 Buku*	*8,618,000*	*80.00%*	*63.24%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Buku	1,075,500	30 Buku	645,300	Buku 10	215,100	Buku 0	107,550	Buku -	-	10 Buku	-	- Buku	-	*10 Buku*	*107,550*	*40 Buku*	*752,850*	*80.00%*	*70.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Buku	1,610,000	30 Buku	966,000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		*- Buku*	*-*	*30 Buku*	*966,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Buku	1,610,000	30 Buku	966,000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		*- Buku*	*-*	*30 Buku*	*966,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Buku	2,875,000	30 Buku	1,725,000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		*- Buku*	*-*	*30 Buku*	*1,725,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Buku	4,500,000	30 Buku	2,700,000	Buku		Buku		Buku		Buku		Buku		*- Buku*	*-*	*30 Buku*	*2,700,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**7,511,330,295**	**300**	**4,506,798,177**		**1,454,033,715**		**263,438,311**		**426,495,242**		**306,053,480**		**311,553,249**	*-*	*1,307,540,282*	*300*	*5,814,338,459*	*60.00%*	*77.41%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	6,418,580,295	36 Bulan	3,851,148,177	Bulan 12	1,235,483,715	Bulan 0	-	Bulan 6	604,793,553	3 Bulan	258,223,480	3 Bulan	268,353,249	*12 Bulan*	*1,131,370,282*	*48 Bulan*	*4,982,518,459*	*80.00%*	*77.63%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	753,600,000	36 Bulan	452,160,000	Bulan 12	150,720,000	Bulan 3	225,758,311	Bulan 3	- 151,178,311	3 Bulan	36,900,000	3 Bulan	37,680,000	*12 Bulan*	*149,160,000*	*48 Bulan*	*601,320,000*	*80.00%*	*79.79%*	KEC. KOTIM
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	339,150,000	36 Bulan	203,490,000	Bulan 12	67,830,000	Bulan 1	37,680,000	Bulan 2	- 27,120,000	4 Bulan	10,930,000	5 Bulan	5,520,000	*12 Bulan*	*27,010,000*	*48 Bulan*	*230,500,000*	*80.00%*	*67.96%*	KEC. KOTIM
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**121,885,000**	**300 0**	**73,131,000**	**%**	**3,452,000**	**%**	**-**	**%**	**1,994,625**	**%**	**678,450**	**%**	**-**	*- %*	*2,673,075*	*300 %*	*75,804,075*	*60.00%*	*62.19%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	960 Kali	45,000,000	576 Kali	27,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*576 Kali*	*27,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	17,125,000	36 Bulan	10,275,000	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		*- Bulan*	*-*	*36 Bulan*	*10,275,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	22,260,000	36 Bulan	13,356,000	Bulan 12	3,452,000	Bulan 0	-	Bulan 6	1,994,625	3 Bulan	678,450	3 Bulan	-	*12 Bulan*	*2,673,075*	*48 Bulan*	*16,029,075*	*80.00%*	*72.01%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	205 Kali	37,500,000	123 Kali	22,500,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*123 Kali*	*22,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**283,935,000**	**300**	**170,361,000**	**%**	**33,726,500**	**%**	**447,696**	**%**	**-**	**%**	**870,558**	**%**	**23,487,855**	*- %*	*24,806,109*	*300 %*	*195,167,109*	*60.00%*	*68.74%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	59,700,000	36 Bulan	35,820,000	Bulan 12	19,279,500	Bulan 1	447,696	Bulan -	-	8 Bulan	380,558	3 Bulan	13,029,855	*12 Bulan*	*13,858,109*	*48 Bulan*	*49,678,109*	*80.00%*	*83.21%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap	Persentase Peyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	94,235,000	300 %	56,541,000	% 100	4,447,000	% 0	-	% -	-	60 %	490,000	40 %	458,000	*100 %*	*948,000*	*400 %*	*57,489,000*		*61.01%*	KEC. KOTIM
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130,000,000	3 Kali	78,000,000	Kali 1	10,000,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	1 Kali	10,000,000	*1 Kali*	*10,000,000*	*4 Kali*	*88,000,000*	*80.00%*	*67.69%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,197,345,900**	**300**	**718,407,540**		**206,805,595**		**7,054,800**		**736,000**		**9,140,800**		**169,855,307**	*-*	*186,786,907*	*300*	*905,194,447*	*60.00%*	*75.60%*	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	15 Unit	243,350,000	9 Unit	146,010,000	Unit 3	38,208,800	Unit 0	7,054,800	Unit 1	736,000	1 Unit	9,140,800	1 Unit	13,184,207	*3 Unit*	*30,115,807*	*12 Unit*	*176,125,807*	*80.00%*	*72.38%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	500 %	77,100,000	300 %	46,260,000	%		%								- -	-	*300 -*	*46,260,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	876,895,900	3 Unit	526,137,540	Unit 1	168,596,795	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	1 Unit	156,671,100	*1 Unit*	*156,671,100*	*4 Unit*	*682,808,640*	*80.00%*	*77.87%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	4.65	15.97	20.00	25.25	42.79	18.63	27.91	29.70	95.35	89.56					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**125,595,000**	**288**	**75,357,000**		-		-		-		-		-	-	-	*288*	*75,357,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**15,357,500**	**300**	**9,214,500**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*9,214,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Exampler	15,357,500	30 Exampler	9,214,500	Exampler		Exampler		Exampler		Exampler		Exampler	- *Exampler*	-	*30 Exampler*	*9,214,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**110,237,500**	**300**	**66,142,500**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*66,142,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Exampler	110,237,500	30 Exampler	66,142,500	Exampler		Exampler		Exampler		Exampler		Exampler	- *Exampler*	-	*30 Exampler*	*66,142,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**174,437,500**	**240**	**104,662,500**		**34,887,500**		**19,337,500**		**9,000,000**		-		-	-	*28,337,500*	*240*	*133,000,000*	*60.00%*	*76.25%*	KEC. KOTIM
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**174,437,500**	**300**	**104,662,500**		**34,887,500**		**19,337,500**		**9,000,000**		-		-	-	*28,337,500*	*300*	*133,000,000*	*60.00%*	*76.25%*	KEC. KOTIM
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	50 Exampler	174,437,500	30 Exampler	104,662,500	Exampler 10	34,887,500	Exampler 5	19,337,500	Exampler 5	9,000,000	0 Exampler	-	- Exampler	-	*10 Exampler*	*28,337,500*	*40 Exampler*	*133,000,000*	*80.00%*	*76.25%*	KEC. KOTIM
										Rata-rata capaian kinerja (%)	50.00	55.43	50	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	81.23					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**135,000,000**	**300**	**81,000,000**		**34,200,000**		-		-		**6,750,000**		**4,500,000**	-	*11,250,000*	*300*	*92,250,000*	*60.00%*	*68.33%*	KEC. KOTIM

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**135,000,000**	**300**	**81,000,000**		**34,200,000**		-		-		**6,750,000**		**4,500,000**	**-**	***11,250,000***	***300***	***92,250,000***	***60.00%***	***68.33%***	KEC. KOTIM
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	25 Orang	135,000,000	15 Orang	81,000,000	Orang 5	34,200,000	Orang 0	-	Orang -	-	2 Orang	6,750,000	3 Orang	4,500,000	***5 Orang***	***11,250,000***	***20 Orang***	***92,250,000***	***80.00%***	***68.33%***	KEC. KOTIM
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**40.00**	**19.74**	**60.00**	**13.16**	**100.00**	32.89					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**SR**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**18,650,000**	**300**	**11,190,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***11,190,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**18,650,000**	**300**	**11,190,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***11,190,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	5,075,000	3 Kali	3,045,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***3 Kali***	***3,045,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	13,575,000	3 Kali	8,145,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***3 Kali***	***8,145,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat**	**500**	**106,625,000**	**300**	**63,975,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***63,975,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**106,625,000**	**300**	**63,975,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***63,975,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Persentase Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	500 %	78,650,000	300 %	47,190,000	%		%		%						- %	-	***300 %***	***47,190,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	60 Desa	27,975,000	36 Desa	16,785,000	Desa		Desa		Desa		Desa		Desa		- ***Desa***	-	***36 Desa***	***16,785,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOTIM
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,253,286,595**	**3 WTP**	**5,551,971,957**	**WTP**	**1,796,889,622**	**WTP**	**279,095,164**	**WTP**	**440,575,138**	**WTP**	**484,377,685**	**WTP**	**390,174,546**	- ***WTP***	***1,594,222,533***	***3 WTP***	***7,146,194,490***	***60.00%***	***77.23%***	KEC. KOBAR
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**106,992,500**	**300**	**64,195,500**		**15,398,500**		-		**2,715,400**		**2,550,000**		**3,948,600**	**-**	***9,214,000***	***300***	***73,409,500***	***60.00%***	***68.61%***	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Buku	80,817,500	90 Buku	48,490,500	Buku 30	10,163,500	Buku 0	-	Buku 5	2,715,400	10 Buku	1,800,000	15 Buku	3,198,600	***30 Buku***	***7,714,000***	***120 Buku***	***56,204,500***	***80.00%***	***69.54%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	150 Eksamplar Dokumen	10,500,000	90 Eksamplar Dokumen	6,300,000	30 Eksamplar Dokumen	2,100,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	750,000	***30 Eksamplar Dokum***	***750,000***	***120 Eksamplar Dokum***	***7,050,000***	***80.00%***	***67.14%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	4,875,000	90 Eksamplar Dokumen	2,925,000	30 Eksamplar Dokumen	975,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	7 Eksamplar Dokumen	300,000	23 Eksamplar Dokumen	-	***30 Eksamplar Dokum***	***300,000***	***120 Eksamplar Dokum***	***3,225,000***	***80.00%***	***66.15%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2,370,000	90 Eksamplar Dokumen	1,422,000	30 Eksamplar Dokumen	474,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	***- Eksamplar Dokum***	***-***	***90 Eksamplar Dokum***	***1,422,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	150 Eksamplar Dokumen	2,250,000	90 Eksamplar Dokumen	1,350,000	30 Eksamplar Dokumen	450,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	30 Eksamplar Dokumen	450,000	- Eksamplar Dokumen	-	***30 Eksamplar Dokum***	***450,000***	***120 Eksamplar Dokum***	***1,800,000***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	150 Eksamplar Dokumen	2,310,000	90 Eksamplar Dokumen	1,386,000	30 Eksamplar Dokumen	462,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	***- Eksamplar Dokumen***	***-***	***90 Eksamplar Dokumen***	***1,386,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOBAR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	150 Eksamplar Dokumen	3,870,000	90 Eksamplar Dokumen	2,322,000	30 Eksamplar Dokumen	774,000	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	0 Eksamplar Dokumen	-	- Eksamplar Dokumen	-	***- Eksamplar Dokum***	***-***	***90 Eksamplar Dokum***	***2,322,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOBAR
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**7,373,119,495**	**300**	**4,423,871,697**		**1,448,344,104**		**275,819,957**		**404,300,338**		**292,330,685**		**316,391,239**	***-***	***1,288,842,219***	***300***	***5,712,713,916***	***60.00%***	***77.48%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang	6,013,192,495	33 Orang	3,607,915,497	11 Orang	1,176,358,704	3 Orang	220,499,957	5 Orang	334,720,338	2 Orang	235,151,085	1 Orang	242,935,439	***11 Orang***	***1,033,306,819***	***44 Orang***	***4,641,222,316***	***80.00%***	***77.18%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	1,043,700,000	51 Orang	626,220,000	17 Orang	208,740,000	4 Orang	51,000,000	7 Orang	52,300,000	3 Orang	47,995,000	3 Orang	49,075,000	***17 Orang***	***200,370,000***	***68 Orang***	***826,590,000***	***80.00%***	***79.20%***	KEC. KOBAR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Kali	312,423,000	36 Kali	187,453,800	12 Kali	62,484,600	2 Kali	4,320,000	2 Kali	17,280,000	3 Kali	9,184,600	5 Kali	23,620,000	***12 Kali***	***54,404,600***	***48 Kali***	***241,858,400***	***80.00%***	***77.41%***	KEC. KOBAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3,804,000	15 Buku	2,282,400	5 Buku	760,800	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	5 Buku	760,800	***5 Buku***	***760,800***	***20 Buku***	***3,043,200***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. KOBAR
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	500	232,034,550	300	139,220,730		**46,994,008**		-		**1,826,600**					***-***	***1,826,600***	***300***	***141,047,330***	***60.00%***	***60.79%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	129,164,270	9 Unit	77,498,562	3 Unit	35,051,104	0 Unit	-	- Unit	-	1 Unit	1,380,354	2 Unit	2,323,354	***3 Unit***	***3,703,708***	***12 Unit***	***81,202,270***	***80.00%***	***62.87%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	600 Porsi	27,000,000	360 Porsi	16,200,000	120 Porsi	5,400,000	0 Porsi	-	- Porsi	-	0 Porsi	-	- Porsi	-	***- Porsi***	***-***	***360 Porsi***	***16,200,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150 eksampler	8,839,000	90 eksampler	5,303,400	30 eksampler	1,767,800	0 eksampler	-	14 eksampler	835,200	9 eksampler	669,600	7 eksampler	1,578,300	***30 eksampler***	***3,083,100***	***120 eksampler***	***8,386,500***	***80.00%***	***94.88%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	70 Buah	46,781,280	42 Buah	28,068,768	14 Buah	4,475,104	0 Buah	-	4 Buah	991,400	8 Buah	1,809,904	2 Buah	-	***14 Buah***	***2,801,304***	***56 Buah***	***30,870,072***	***80.00%***	***65.99%***	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	50 Kali	20,250,000	30 Kali	12,150,000	10 Kali	300,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali		- Kali	-	***- Kali***	***-***	***30 Kali***	***12,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**271,115,050**	**300**	**162,669,030**		**53,223,010**		**807,807**		**16,302,000**		**10,661,000**		**31,425,707**	***-***	***59,196,514***	***300***	***221,865,544***	***60.00%***	***81.83%***	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	140,340,050	36 Kali	84,204,030	12 Kali	28,068,010	2 Kali	807,807	3 Kali	11,302,000	3 Kali	5,661,000	4 Kali	26,187,807	***12 Kali***	***43,958,614***	***48 Kali***	***128,162,644***	***80.00%***	***91.32%***	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	130,775,000	3 Kali	78,465,000	Kali 1	25,155,000	Kali 0	-	Kali -	5,000,000	0 Kali	5,000,000	1 Kali	5,237,900	*1 Kali*	*15,237,900*	*4 Kali*	*93,702,900*	*80.00%*	*71.65%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,270,025,000**	**300**	**762,015,000**		**232,930,000**		**2,467,400**		**15,430,800**		**178,836,000**		**38,409,000**	*-*	*235,143,200*	*300*	*997,158,200*	*60.00%*	*78.51%*	KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit		3 Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	*-*	*3 Unit*	*-*	*60.00%*		KEC. KOBAR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	25 Unit Mobil dan Motor	259,350,000	15 Unit Mobil dan Motor	155,610,000	Unit Mobil dan Motor 5	43,070,000	Unit Mobil dan Motor 1	2,467,400	Unit Mobil dan Motor 1	15,430,800	1 Unit Mobil dan Motor	25,433,000	2 Unit Mobil dan Motor	38,409,000	*5 Unit Mobil dan Motor*	*81,740,200*	*20 Unit Mobil dan Motor*	*237,350,200*	*80.00%*	*91.52%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	75 Unit	28,400,000	45 Unit	17,040,000	Unit 15	3,530,000	Unit 0	-	Unit -	-	10 Unit	1,420,000	5 Unit	-	*15 Unit*	*1,420,000*	*60 Unit*	*18,460,000*	*80.00%*	*65.00%*	KEC. KOBAR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Gedung Bangunan	982,275,000	6 Gedung Bangunan	589,365,000	Gedung Bangunan 2	186,330,000	Gedung Bangunan 0	-	Gedung Bangunan -	-	1 Gedung Bangunan	151,983,000	1 Gedung Bangunan	-	*2 Gedung Bangunan*	*151,983,000*	*8 Gedung Bangunan*	*741,348,000*	*80.00%*	*75.47%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**2.57**	**15.53**	**8.78**	**24.52**	**18.84**	**26.96**	**22.70**	**21.71**	**52.89**	88.72					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**315,807,000**	**288**	**189,484,200**		**26,053,800**		**-**		**-**		**189,000**		**-**	*-*	*189,000*	*288*	*189,673,200*	*60.00%*	*60.06%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**80,975,500**	**300**	**48,585,300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	*-*	*-*	*300*	*48,585,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	60 Kali	80,975,500	36 Kali	48,585,300	Kali		Kali -	-	Kali		Kali		*- Kali*	*-*	*36 Kali*	*48,585,300*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**234,831,500**	**300**	**140,898,900**		**26,053,800**		**-**		**-**		**189,000**		**-**	*-*	*189,000*	*300*	*141,087,900*	*60.00%*	*60.08%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	10 Eksampler	234,831,500	6 Eksampler	140,898,900	Eksampler 2	26,053,800	Eksampler 0	-	Eksampler -	-	2 Eksampler	189,000	- Eksampler	-	*2 Eksampler*	*189,000*	*8 Eksampler*	*141,087,900*	*80.00%*	*60.08%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**100.00**	**0.73**	**0.00**	**0.00**	*100*	0.73					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**452,293,000**	**240**	**271,375,800**		**70,707,600**		**59,988,600**		**3,341,250**		**-**		**-**	*-*	*63,329,850*	*240*	*334,705,650*	*60.00%*	*74.00%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**452,293,000**	**300**	**271,375,800**		**70,707,600**		**59,988,600**		**3,341,250**		**-**		**-**	*-*	*63,329,850*	*300*	*334,705,650*	*60.00%*	*74.00%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	85 Kali	361,238,000	51 Kali	216,742,800	Kali 17	63,493,600	Kali 17	59,988,600	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*17 Kali*	*59,988,600*	*68 Kali*	*276,731,400*	*80.00%*	*76.61%*	KEC. KOBAR
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	91,055,000	9 Kali	54,633,000	Kali 3	7,214,000	Kali 0	-	Kali 2	3,341,250	0 Kali	-	1 Kali	-	*3 Kali*	*3,341,250*	*12 Kali*	*57,974,250*	*80.00%*	*63.67%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	85.00	84.84	10.00	4.73	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	89.57					
										Predikat kinerja	T	T	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**140,675,000**	**300**	**84,405,000**		**35,338,000**		**2,250,000**		**9,000,000**		**6,750,000**		**9,535,000**	*-*	*27,535,000*	*300*	*111,940,000*	*60.00%*	*79.57%*	KEC. KOBAR
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**140,675,000**	**300**	**84,405,000**		**35,338,000**		**2,250,000**		**9,000,000**		**6,750,000**		**9,535,000**	*-*	*27,535,000*	*300*	*111,940,000*	*60.00%*	*79.57%*	KEC. KOBAR
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	140,675,000	36 Kali	84,405,000	Kali 12	35,338,000	Kali 2	2,250,000	Kali 2	9,000,000	3 Kali	6,750,000	5 Kali	9,535,000	*12 Kali*	*27,535,000*	*48 Kali*	*111,940,000*	*80.00%*	*79.57%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	16.67	6.37	16.67	25.47	25.00	19.10	41.67	26.98	100.00	77.92					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**72,628,750**	**300**	**43,577,250**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*43,577,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**72,628,750**	**300**	**43,577,250**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*43,577,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	44,950,000	3 Kali	26,970,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*3 Kali*	*26,970,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	27,678,750	3 Kali	16,607,250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*3 Kali*	*16,607,250*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**368,746,000**	**300**	**221,247,600**		**34,501,400**		-		-		**7,128,000**		**243,100**	-	*7,371,100*	*300*	*228,618,700*	*60.00%*	*62.00%*	KEC. KOBAR
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**368,746,000**	**300**	**221,247,600**		**34,501,400**		-		-		**7,128,000**		**243,100**	-	*7,371,100*	*300*	*228,618,700*	*60.00%*	*62.00%*	KEC. KOBAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	80 Kali	115,195,500	48 Kali	69,117,300	Kali 16	7,791,300	Kali 0	-	Kali -	-	16 Kali	7,128,000	- Kali	-	***16 Kali***	***7,128,000***	***64 Kali***	***76,245,300***	***80.00%***	***66.19%***	KEC. KOBAR
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	253,550,500	6 Kali	152,130,300	Kali 2	26,710,100	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	2 Kali	243,100	***2 Kali***	***243,100***	***8 Kali***	***152,373,400***	***80.00%***	***60.10%***	KEC. KOBAR
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**88.89**	**20.66**	**11.11**	**0.70**	**100.00**	21.36				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**				
			KECAMATAN GUNUNG ALIP			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,371,749,565**	**3 WTP**	**5,623,049,739**	**WTP**	**1,947,572,931**	**WTP**	**342,255,075**	**WTP**	**500,596,708**	**WTP**	**377,539,015**	**WTP**	**354,982,803**	**- *WTP***	***1,575,373,601***	***3 WTP***	***7,198,423,340***	***60.00%***		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**131,355,000**	**300**	**78,813,000**		**26,271,000**		**1,713,500**		**2,647,200**		**4,000,000**		**300,000**	-	***8,660,700***	***300***	***87,473,700***	***60.00%***	***66.59%***	KEC. GULIP
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Eksemplar Dokumen	83,125,000	90 Eksemplar Dokumen	49,875,000	30 Eksemplar Dokumen	16,625,000	2 Eksemplar Dokumen	1,713,500	5 Eksemplar Dokumen	2,400,000	13 Eksemplar Dokumen	4,000,000	10 Eksemplar Dokumen	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***8,113,500***	***120 Eksemplar Dokumen***	***57,988,500***	***80.00%***	***69.76%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	50 Eksemplar Dokumen	14,290,000	30 Eksemplar Dokumen	8,574,000	10 Eksemplar Dokumen	2,858,000	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	26,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***10 Eksemplar Dokum***	***26,000***	***40 Eksemplar Dokum***	***8,600,000***	***80.00%***	***60.18%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	2 Eksemplar Dokumen	221,200	0 Eksemplar Dokumen	-	8 Eksemplar Dokumen	300,000	***10 Eksemplar Dokumen***	***521,200***	***40 Eksemplar Dokumen***	***3,671,200***	***80.00%***	***69.93%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	5,250,000	30 Eksemplar Dokumen	3,150,000	10 Eksemplar Dokumen	1,050,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***3,150,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	50 Eksemplar Dokumen	13,440,000	30 Eksemplar Dokumen	8,064,000	10 Eksemplar Dokumen	2,688,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokumen***	-	***30 Eksemplar Dokumen***	***8,064,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	4,750,000	30 Eksemplar Dokumen	2,850,000	10 Eksemplar Dokumen	950,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***2,850,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**8,102,549,455**	**300**	**4,861,529,673**		**1,784,254,715**		**332,724,375**		**475,720,708**		**353,454,515**		**329,388,303**	-	***1,491,287,901***	***300***	***6,352,817,574***	***60.00%***	***78.41%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang	6,908,755,955	51 Orang	4,145,253,573	17 Orang	1,545,496,015	4 Orang	290,574,375	4 Orang	425,130,708	4 Orang	286,864,515	5 Orang	285,877,803	***17 Orang***	***1,288,447,401***	***68 Orang***	***5,433,700,974***	***80.00%***	***78.65%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	847,500,000	30 Orang	508,500,000	10 Orang	169,500,000	2 Orang	42,150,000	3 Orang	42,150,000	3 Orang	42,150,000	2 Orang	42,840,500	***10 Orang***	***169,290,500***	***40 Orang***	***677,790,500***	***80.00%***	***79.98%***	KEC. GULIP
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	324,700,000	18 Orang	194,820,000	6 Orang	64,940,000	0 Orang	-	2 Orang	7,440,000	2 Orang	24,360,000	2 Orang	670,000	***6 Orang***	***32,470,000***	***24 Orang***	***227,290,000***	***80.00%***	***70.00%***	KEC. GULIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksemplar	21,593,500	30 Eksemplar	12,956,100	10 Eksemplar	4,318,700	0 Eksemplar	-	2 Eksemplar	1,000,000	2 Eksemplar	80,000	6 Eksemplar	-	***10 Eksemplar***	***1,080,000***	***40 Eksemplar***	***14,036,100***	***80.00%***	***65.00%***	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**458,476,700**	**300**	**275,086,020**		**39,193,340**		**182,400**		**1,346,000**		-		**3,981,800**	**-**	***5,510,200***	***300***	***280,596,220***	***60.00%***	***61.20%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80 Unit	207,385,900	48 Unit	124,431,540	Unit 16	20,181,180	Unit 0	-	Unit 3	1,346,000	4 Unit	-	9 Unit	1,982,300	***16 Unit***	***3,328,300***	***64 Unit***	***127,759,840***	***80.00%***	***61.60%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	5000 Kotak	119,250,000	3000 Kotak	71,550,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		***- Kotak***	***-***	***3,000 Kotak***	***71,550,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1000 Eksampler	25,639,000	600 Eksampler	15,383,400	200 Eksampler	5,271,800	100 Eksampler	182,400	100 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	***200 Eksampler***	***182,400***	***800 Eksampler***	***15,565,800***	***80.00%***	***60.71%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	68,701,800	36 Bulan	41,221,080	12 Bulan	13,740,360	0 Bulan	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	1,999,500	***12 Bulan***	***1,999,500***	***48 Bulan***	***43,220,580***	***80.00%***	***62.91%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	175 Kali	37,500,000	105 Kali	22,500,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		***- Kali***	***-***	***105 Kali***	***22,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**	**500**	**6,500,000**	**300**	**3,900,000**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***3,900,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meja, Kursi, lemari dan mebel lainnya	50 Unit	6,500,000	30 Unit	3,900,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	***-***	***30 Unit***	***3,900,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**275,818,410**	**300**	**165,491,046**		**40,163,876**		**1,600,000**		**11,948,000**		**6,474,500**		**13,320,500**	**-**	***33,343,000***	***300***	***198,834,046***	***60.00%***	***72.09%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	160,768,410	36 Bulan	96,461,046	Bulan 12	32,153,876	Bulan 1	1,600,000	Bulan 1	4,448,000	3 Bulan	6,474,500	7 Bulan	13,320,500	***12 Bulan***	***25,843,000***	***48 Bulan***	***122,304,046***	***80.00%***	***76.07%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	10 Kali	115,050,000	6 Kali	69,030,000	Kali 2	8,010,000	Kali 0	-	Kali 2	7,500,000	0 Kali	-	- Kali	-	***2 Kali***	***7,500,000***	***8 Kali***	***76,530,000***	***80.00%***	***66.52%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**397,050,000**	**300**	**238,230,000**		**57,690,000**		**6,034,800**		**8,934,800**		**13,610,000**		**7,992,200**	**-**	***36,571,800***	***300***	***274,801,800***	***60.00%***	***69.21%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 Unit	235,850,000	3 Unit	141,510,000	Unit 1	47,170,000	Unit 0	4,934,800	Unit -	8,934,800	0 Unit	12,000,000	1 Unit	7,402,200	***1 Unit***	***33,271,800***	***4 Unit***	***174,781,800***	***80.00%***	***74.11%***	KEC. GULIP
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	42,250,000	6 Unit	25,350,000	Unit 2	8,450,000	Unit 0	1,100,000	Unit -	-	1 Unit	1,610,000	1 Unit	590,000	***2 Unit***	***3,300,000***	***8 Unit***	***28,650,000***	***80.00%***	***67.81%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50 Unit	16,450,000	30 Unit	9,870,000	Unit 10	2,070,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	-	***- Unit***	***-***	***30 Unit***	***9,870,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	102,500,000	3 Unit	61,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		***- Unit***	***-***	***3 Unit***	***61,500,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**28.09**	**17.57**	**34.54**	**25.70**	**8.25**	**19.39**	**16.24**	**18.23**	**87.11**	80.89					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**T**	**T**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**122,952,500**	**288**	**73,771,500**		**3,575,500**		-		-		-		**1,045,000**	**-**	***1,045,000***	***288***	***74,816,500***	***60.00%***	***60.85%***	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**43,460,000**	**300**	**26,076,000**		**1,717,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***26,076,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	43,460,000	12 Kali	26,076,000	Kali 4	1,717,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***- Kali***	***-***	***12 Kali***	***26,076,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**79,492,500**	**300**	**47,695,500**		**1,858,500**		**-**		**-**		**-**		**1,045,000**	**-**	***1,045,000***	***300***	***48,740,500***	***60.00%***	***61.31%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	79,492,500	30 Eksampler	47,695,500	Eksampler 10	1,858,500	Eksampler 0	-	Eksampler -	-	0 Eksampler	-	10 Eksampler	1,045,000	***10 Eksampler***	***1,045,000***	***40 Eksampler***	***48,740,500***	***80.00%***	***61.31%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71.43**	**29.23**	***71.43***	29.23				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SD**	**SR**				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**240,157,500**	**240**	**144,094,500**		**24,406,500**		**7,869,300**		**12,584,000**		**-**		**-**	**-**	***20,453,300***	***240***	***164,547,800***	***60.00%***	***68.52%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**240,157,500**	**300**	**144,094,500**		**24,406,500**		**7,869,300**		**12,584,000**		**-**		**-**	**-**	***20,453,300***	***300***	***164,547,800***	***60.00%***	***68.52%***	KEC. GULIP
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	70 Kali	164,225,000	42 Kali	98,535,000	Kali 14	22,045,000	Kali 2	6,344,700	Kali 12	12,584,000	0 Kali	-	- Kali	-	***14 Kali***	***18,928,700***	***56 Kali***	***117,463,700***	***80.00%***	***71.53%***	KEC. GULIP
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	75,932,500	9 Kali	45,559,500	Kali 3	2,361,500	Kali 3	1,524,600	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	***3 Kali***	***1,524,600***	***12 Kali***	***47,084,100***	***80.00%***	***62.01%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**29.41**	**32.24**	**70.59**	**51.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	83.80				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SD**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**144,850,000**	**300**	**86,910,000**		**36,170,000**		**-**		**4,500,000**		**9,000,000**		**-**	**-**	***13,500,000***	***300***	***100,410,000***	***60.00%***	***69.32%***	KEC. GULIP
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**144,850,000**	**300**	**86,910,000**		**36,170,000**		**-**		**4,500,000**		**9,000,000**		**-**	**-**	***13,500,000***	***300***	***100,410,000***	***60.00%***	***69.32%***	KEC. GULIP
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	144,850,000	36 Bulan	86,910,000	Bulan 12	36,170,000	Bulan 0	4,500,000	Bulan 2	4,500,000	2 Bulan	9,000,000	8 Bulan	-	***12 Bulan***	***13,500,000***	***48 Bulan***	***100,410,000***	***80.00%***	***69.32%***	KEC. GULIP
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**16.67**	**12.44**	**16.67**	**24.88**	**66.67**	**0.00**	**100.00**	37.32				
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**ST**	**SR**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**125,537,500**	**300**	**75,322,500**		**21,082,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	***-***	***300***	***75,322,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**125,537,500**	**300**	**75,322,500**		**21,082,500**		-		-		-		-	-	-	***300***	***75,322,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	105,412,500	3 Kali	63,247,500	Kali 1	21,082,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***3 Kali***	***63,247,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	20,125,000	3 Kali	12,075,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***3 Kali***	***12,075,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**131,292,500**	**300**	**78,775,500**		**5,318,500**		-		-		**1,275,500**		-	-	***1,275,500***	***300***	***80,051,000***	***60.00%***	***60.97%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**131,292,500**	**300**	**78,775,500**		**5,318,500**		-		-		**1,275,500**		-	-	***1,275,500***	***300***	***80,051,000***	***60.00%***	***60.97%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	46,735,000	18 Kali	28,041,000	Kali 6	2,447,000	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	- ***Kali***	-	***18 Kali***	***28,041,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. GULIP
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	84,557,500	6 Kali	50,734,500	Kali 2	2,871,500	Kali 0	-	Kali -	-	2 Kali	1,275,500	- Kali	-	***2 Kali***	***1,275,500***	***8 Kali***	***52,010,000***	***80.00%***	***61.51%***	KEC. GULIP
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**25.00**	**23.98**	**0.00**	**0.00**	**25.00**	23.98				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			KECAMATAN LIMAU			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**9,874,892,860**	**3 WTP**	**5,924,935,716**	**WTP**	**1,832,331,562**	**WTP**	**305,730,632**	**WTP**	**496,049,746**	**WTP**	**355,132,578**	**WTP**	**373,921,026**	- ***WTP***	***1,530,833,982***	***3 WTP***	***7,455,769,698***	***60.00%***	***75.50%***	KEC. LIMAU
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**72,032,000**	**300**	**43,219,200**		**14,406,400**		-		**1,800,000**		**1,200,000**		**2,270,000**	-	***5,270,000***	***300***	***48,489,200***	***60.00%***	***67.32%***	KEC. LIMAU
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	200 Buku	47,972,000	120 Buku	28,783,200	Buku 40	9,594,400	Buku 0	-	Buku 2	1,800,000	13 Buku	1,200,000	25 Buku	1,200,000	***40 Buku***	***4,200,000***	***160 Buku***	***32,983,200***	***80.00%***	***68.76%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksemplar Dokumen	7,250,000	15 Eksemplar Dokumen	4,350,000	5 Eksemplar Dokumen	1,450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	450,000	***5 Eksemplar Dokum***	***450,000***	***20 Eksemplar Dokum***	***4,800,000***	***80.00%***	***66.21%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,250,000	15 Eksemplar Dokumen	1,350,000	5 Eksemplar Dokumen	450,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***15 Eksemplar Dokum***	***1,350,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,005,000	30 Eksemplar Dokumen	1,803,000	10 Eksemplar Dokumen	601,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- ***Eksemplar Dokum***	-	***30 Eksemplar Dokum***	***1,803,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	50 Eksemplar Dokumen	3,155,000	30 Eksemplar Dokumen	1,893,000	10 Eksemplar Dokumen	631,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	10 Eksemplar Dokumen	620,000	*10 Eksemplar Dokumen*	*620,000*	*40 Eksemplar Dokumen*	*2,513,000*	*80.00%*	*79.65%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksemplar Dokumen	2,650,000	15 Eksemplar Dokumen	1,590,000	5 Eksemplar Dokumen	530,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*15 Eksemplar Dokumen*	*1,590,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	50 Eksemplar Dokumen	5,750,000	30 Eksemplar Dokumen	3,450,000	10 Eksemplar Dokumen	1,150,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	*- Eksemplar Dokumen*	*-*	*30 Eksemplar Dokumen*	*3,450,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**8,437,169,250**	**300**	**5,062,301,550**		**1,699,229,340**		**305,730,632**		**475,969,746**		**336,527,778**		**340,868,826**	*-*	*1,459,096,982*	*300*	*6,521,398,532*	*60.00%*	*77.29%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	7,299,269,250	36 Orang	4,379,561,550	12 Orang	1,471,649,340	3 Orang	270,630,632	3 Orang	417,299,746	3 Orang	289,267,778	3 Orang	277,498,826	*12 Orang*	*1,254,696,982*	*48 Orang*	*5,634,258,532*	*80.00%*	*77.19%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	772,500,000	36 Bulan	463,500,000	12 Bulan	154,500,000	2 Bulan	35,100,000	4 Bulan	35,100,000	2 Bulan	35,100,000	4 Bulan	35,100,000	*12 Bulan*	*140,400,000*	*48 Bulan*	*603,900,000*	*80.00%*	*78.17%*	KEC. LIMAU
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	361,350,000	24 Orang	216,810,000	8 Orang	72,270,000	0 Orang	-	2 Orang	23,570,000	2 Orang	12,160,000	4 Orang	28,270,000	*8 Orang*	*64,000,000*	*32 Orang*	*280,810,000*	*80.00%*	*77.71%*	KEC. LIMAU
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Buku	4,050,000	30 Buku	2,430,000	10 Buku	810,000	0 Buku	-	- Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	*-*	*30 Buku*	*2,430,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**127,054,110**	**300**	**76,232,466**		**39,015,822**		**-**		**1,493,000**		**470,000**		**4,794,800**	*-*	*6,757,800*	*300*	*82,990,266*	*60.00%*	*65.32%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Bulan	14,962,500	36 Bulan	8,977,500	12 Bulan	26,767,500	0 Bulan	-	6 Bulan	345,000	3 Bulan	-	3 Bulan	704,900	*12 Bulan*	*1,049,900*	*48 Bulan*	*10,027,400*	*80.00%*	*67.02%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	60 Bulan	45,000,000	36 Bulan	27,000,000	Bulan		0 Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		*- Bulan*	*-*	*36 Bulan*	*27,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	30,043,500	300 %	18,026,100	% 100	6,008,700	% 0	-	% 4.25	255,200	7.82 %	470,000	87.93 %	1,050,000	*100 %*	*1,775,200*	*400 %*	*19,801,300*	*80.00%*	*65.91%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	18,298,110	36 Bulan	10,978,866	12 Bulan	3,389,622	0 Bulan	-	3 Bulan	892,800	1 Bulan	-	8 Bulan	2,039,900	*12 Bulan*	*2,932,700*	*48 Bulan*	*13,911,566*	*80.00%*	*76.03%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500 %	18,750,000	300 %	11,250,000	% 100	2,850,000	% 0	-	% -	-	0 %	-	100 %	1,000,000	*100 %*	*1,000,000*	*400 %*	*12,250,000*	*80.00%*	*65.33%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**131,250,000**	**300**	**78,750,000**		**26,250,000**		**-**		**2,250,000**		**10,000,000**		**2,800,000**	*-*	*15,050,000*	*300*	*93,800,000*	*60.00%*	*71.47%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	33,750,000	36 Bulan	20,250,000	12 Bulan	6,750,000	0 Bulan	-	4 Bulan	2,250,000	1 Bulan	-	7 Bulan	2,800,000	*12 Bulan*	*5,050,000*	*48 Bulan*	*25,300,000*	*80.00%*	*74.96%*	KEC. LIMAU
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	97,500,000	3 Kali	58,500,000	Kali 1	19,500,000	Kali 0	-	Kali -	-	2 Kali	10,000,000	1 Kali	-	*3 Kali*	*10,000,000*	*6 Kali*	*68,500,000*	*120.00%*	*70.26%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,107,387,500**	**300**	**664,432,500**		**53,430,000**		**-**		**14,537,000**		**6,934,800**		**23,187,400**	*-*	*44,659,200*	*300*	*709,091,700*	*60.00%*	*64.03%*	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	10 Unit	193,600,000	6 Unit	116,160,000	Unit 2	38,720,000	Unit 0	-	Unit -	14,537,000	1 Unit	6,934,800	1 Unit	15,497,400	*2 Unit*	*36,969,200*	*8 Unit*	*153,129,200*	*80.00%*	*79.10%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	10 Unit	73,550,000	6 Unit	44,130,000	Unit 2	14,710,000	Unit 0	-	Unit -	-	0 Unit	-	- Unit	7,690,000	*- Unit*	*7,690,000*	*6 Unit*	*51,820,000*	*60.00%*	*70.46%*	KEC. LIMAU
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	10 Unit	840,237,500	6 Unit	504,142,500	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		*- Unit*	-	*6 Unit*	*504,142,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	1.36	16.69	7.68	27.07	9.73	19.38	70.36	20.41	89.13	83.55				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SR	T	T				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**89,670,500**	**288**	**53,802,300**		**15,954,100**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***288***	***53,802,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**42,262,500**	**300**	**25,357,500**		**8,452,500**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***25,357,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	42,262,500	12 Kali	25,357,500	Kali 4	8,452,500	Kali 0	-	Kali -	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	-	*12 Kali*	*25,357,500*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**47,408,000**	**300**	**28,444,800**		**7,501,600**		**-**		**-**		**-**		**-**	**-**	**-**	***300***	***28,444,800***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	480 Eksampler	47,408,000	288 Eksampler	28,444,800	Eksampler 96	7,501,600	Eksampler 0	-	Eksampler -	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	*- Eksampler*	-	*288 Eksampler*	*28,444,800*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**152,450,000**	**240**	**91,470,000**		**30,490,000**		**-**		**17,550,000**		**1,400,000**		**-**	**-**	***18,950,000***	***240***	***110,420,000***	***60.00%***	***72.43%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**152,450,000**	**300**	**91,470,000**		**30,490,000**		**-**		**17,550,000**		**1,400,000**		**-**	**-**	***18,950,000***	***300***	***110,420,000***	***60.00%***	***72.43%***	KEC. LIMAU
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	152,450,000	33 Kali	91,470,000	Kali 11	30,490,000	Kali 0	-	Kali 6	17,550,000	5 Kali	1,400,000	- Kali	-	*11 Kali*	*18,950,000*	*44 Kali*	*110,420,000*	*80.00%*	*72.43%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	54.55	57.56	45.45	4.59	0.00	0.00	100.00	62.15				
										Predikat kinerja	SR	SR	R	Rp	SR	SR	SR	SR	ST	SD				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**136,500,000**	**300**	**81,900,000**		**34,500,000**		**-**		**6,750,000**		**6,750,000**		**11,400,000**	**-**	***24,900,000***	***300***	***106,800,000***	***60.00%***	***78.24%***	KEC. LIMAU
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**136,500,000**	**300**	**81,900,000**		**34,500,000**		**-**		**6,750,000**		**6,750,000**		**11,400,000**	**-**	***24,900,000***	***300***	***106,800,000***	***60.00%***	***78.24%***	KEC. LIMAU

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Kali	136,500,000	36 Kali	81,900,000	12 Kali	34,500,000	0 Kali	-	3 Kali	6,750,000	2 Kali	6,750,000	7 Kali	11,400,000	*12 Kali*	*24,900,000*	*48 Kali*	*106,800,000*	*80.00%*	*78.24%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	25.00	19.57	16.67	19.57	58.33	33.04	100.00	72.17				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST'	SD				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**27,150,000**	**300**	**16,290,000**		**2,925,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*16,290,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**27,150,000**	**300**	**16,290,000**		**2,925,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*16,290,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	12,450,000	3 Kali	7,470,000	1 Kali	2,250,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*7,470,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	14,700,000	3 Kali	8,820,000	1 Kali	675,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*3 Kali*	*8,820,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**119,219,500**	**300**	**71,531,700**		**23,843,900**		-		-		-		-	-	-	*300*	*71,531,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**119,219,500**	**300**	**71,531,700**		**23,843,900**		-		-		-		-	-	-	*300*	*71,531,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	30 Kali	74,750,000	18 Kali	44,850,000	6 Kali	14,950,000	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*18 Kali*	*44,850,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	44,469,500	6 Kali	26,681,700	2 Kali	8,893,900	0 Kali	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*6 Kali*	*26,681,700*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. LIMAU
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			KECAMATAN BANDAR NEGERI SEMUONG			-		-											-	-	-	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**10,124,222,665**	**3 WTP**	**6,074,533,599**	**WTP**	**1,859,079,987**	**WTP**	**404,320,029**	**WTP**	**501,468,893**	**WTP**	**495,591,637**	**WTP**	**362,342,146**	*- WTP*	*1,763,722,705*	*3 WTP*	*7,838,256,304*	*60.00%*	*77.42%*	KEC. BNS
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**72,207,000**	**300**	**43,324,200**		**6,897,480**		-		**6,266,480**		-		-	-	*6,266,480*	*300*	*49,590,680*	*60.00%*	*68.68%*	KEC. BNS
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Buku	50,272,000	60 Buku	30,163,200	20 Buku	3,060,480	0 Buku	-	20 Buku	3,060,480.00	0 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*3,060,480*	*80 Buku*	*33,223,680*	*80.00%*	*66.09%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Buku	4,500,000	60 Buku	2,700,000	Buku 20	350,000	Buku 0	-	Buku 20	350,000.00	0 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*350,000*	*80 Buku*	*3,050,000*	*80.00%*	*67.78%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Buku	2,875,000	60 Buku	1,725,000	Buku 20	575,000	Buku 0	-	Buku 20	575,000.00	0 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*575,000*	*80 Buku*	*2,300,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Buku	3,005,000	60 Buku	1,803,000	Buku 20	601,000	Buku 0	-	Buku 20	601,000.00	0 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*601,000*	*80 Buku*	*2,404,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Buku	3,155,000	60 Buku	1,893,000	Buku 20	631,000	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	*-*	*60 Buku*	*1,893,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Buku	2,650,000	60 Buku	1,590,000	Buku 20	530,000	Buku 0	-	Buku -	530,000.00	20 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*530,000*	*80 Buku*	*2,120,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Buku	5,750,000	60 Buku	3,450,000	Buku 20	1,150,000	Buku 0	-	Buku -	1,150,000.00	20 Buku	-	- Buku	-	*20 Buku*	*1,150,000*	*80 Buku*	*4,600,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**8,693,645,585**	**300**	**5,216,187,351**		**1,612,708,491**		**293,000,029**		**441,963,397**		**401,946,537**		**343,478,962**	*-*	*1,480,388,925*	*300*	*6,696,576,276*	*60.00%*	*77.03%*	KEC. BNS
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PersentasePenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	6,947,773,585	300 %	4,168,664,151	% 100	1,263,534,091	% 25.00	231,700,029	% 25.00	380,663,397.00	25.00 %	266,896,537	25.00 %	252,748,962	*100 %*	*1,132,008,925*	*400 %*	*5,300,673,076*	*80.00%*	*76.29%*	KEC. BNS
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	1,443,000,000	300 %	865,800,000	% 100	288,600,000	% 17.67	51,000,000	% 17.67	51,000,000.00	39.66 %	114,450,000	25.00 %	72,150,000	*100 %*	*288,600,000*	*400 %*	*1,154,400,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	500 %	298,900,000	300 %	179,340,000	% 100	59,780,000	% 17.23	10,300,000	% 17.23	10,300,000.00	34.46 %	20,600,000	31.08 %	18,580,000	*100 %*	*59,780,000*	*400 %*	*239,120,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	25 Buku	3,972,000	15 Buku	2,383,200	Buku 5	794,400	Buku 0	-	Buku -	-	0 Buku	-	- Buku	-	*- Buku*	*-*	*15 Buku*	*2,383,200*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. BNS
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**113,097,580**	**300**	**67,858,548**		**71,919,516**		**-**		**8,175,416**		**63,484,100**		**200,000**	*-*	*71,859,516*	*300*	*139,718,064*	*60.00%*	*123.54%*	KEC. BNS
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500 %	22,877,080	300 %	13,726,248	% 100	66,775,416	% 0	-	% 50	4,575,416.00	50 %	62,140,000	- %	-	*100 %*	*66,715,416*	*400 %*	*80,441,664*	*80.00%*	*351.63%*	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Makan dan Minum	500 %	27,000,000	300 %	16,200,000	%		%		%		%		%		*- %*	*-*	*300 %*	*16,200,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. BNS
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	500 %	8,760,500	300 %	5,256,300	% 100	1,752,100	% 0	-	% 62.78	1,100,000.00	37.22 %	652,100	- %	-	*100 %*	*1,752,100*	*400 %*	*7,008,400*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	45,460,000	36 Bulan	27,276,000	Bulan 12	3,392,000	Bulan 0	-	Bulan 4	2,500,000.00	6 Bulan	692,000	2 Bulan	200,000	*12 Bulan*	*3,392,000*	*48 Bulan*	*30,668,000*	*80.00%*	*67.46%*	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	500	9,000,000	300	5,400,000											*-*	*-*	*300*	*5,400,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**133,572,500**	**300**	**80,143,500**		**14,714,500**		**250,000**		**11,250,000**		**2,241,000**		**973,500**	*-*	*14,714,500*	*300*	*94,858,000*	*60.00%*	*71.02%*	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	23,572,500	36 Bulan	14,143,500	Bulan 12	4,714,500	Bulan 1	250,000	Bulan 3	1,250,000.00	5 Bulan	2,241,000	3 Bulan	973,500	*12 Bulan*	*4,714,500*	*48 Bulan*	*18,858,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	110,000,000	3 Kali	66,000,000	Kali 1	10,000,000	Kali 0	-	Kali 1	10,000,000.00	0 Kali	-	- Kali	-	*1 Kali*	*10,000,000*	*4 Kali*	*76,000,000*	*80.00%*	*69.09%*	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**1,111,700,000**	**300**	**667,020,000**		**152,840,000**		**111,070,000**		**12,365,800**		**13,420,000**		**12,239,684**	**-**	***149,095,484***	***300***	***816,115,484***	***60.00%***	***73.41%***	KEC. BNS
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	217,600,000	6 Unit	130,560,000	Unit 2	43,520,000	Unit 0	1,750,000	1 Unit	12,365,800.00	0 Unit	13,420,000	1 Unit	12,239,684	***2 Unit***	***39,775,484***	***8 Unit***	***170,335,484***	***80.00%***	***78.28%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	500	28,400,000	300	17,040,000			0		0		0		0		- -	-	***300 -***	***17,040,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	865,700,000	3 Unit	519,420,000	Unit 1	109,320,000	Unit 1	109,320,000	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	***1 Unit***	***109,320,000***	***4 Unit***	***628,740,000***	***80.00%***	***72.63%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**9.20**	**21.75**	**38.88**	**26.97**	**35.27**	**26.66**	**12.94**	**19.49**	96.29	94.87					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**125,328,000**	**288**	**75,196,800**		-		-		-		-		-	- -	-	***288 -***	***75,196,800***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**34,415,500**	**300**	**20,649,300**		-		-		-		-		-	- -	-	***300 -***	***20,649,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	34,415,500	12 Kali	20,649,300	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali	- ***Kali***	-	***12 Kali***	***20,649,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**90,912,500**	**300**	**54,547,500**		-		-		-		-		-	-	-	***300***	***54,547,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	90,912,500	30 Eksampler	54,547,500	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler	- ***Eksampler***	-	***30 Eksampler***	***54,547,500***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**103,414,000**	**240**	**62,048,400**		**20,682,800**		**10,010,000**		**10,672,800**		-		-	- -	***20,682,800***	***240 -***	***82,731,200***	***60.00%***	***80.00%***	KEC. BNS
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**103,414,000**	**300**	**62,048,400**	**%**	**20,682,800**	**%**	**10,010,000**	**%**	**10,672,800**	**%**	-	**%**	-	- %	***20,682,800***	***300 %***	***82,731,200***	***60.00%***	***80.00%***	KEC. BNS
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	500 %	103,414,000	300 %	62,048,400	% 100	20,682,800	% 50	10,010,000	50 %	10,672,800.00	0 %	-	- %	-	***100 %***	***20,682,800***	***400 %***	***82,731,200***	***80.00%***	***80.00%***	KEC. BNS
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**50.00**	**48.40**	**50.00**	**51.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	100.00					
										Predikat kinerja	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**ST**					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**140,125,000**	**300**	**84,075,000**		**35,225,000**		**4,500,000**		**10,775,000**		**14,500,000**		**5,450,000**	- -	***35,225,000***	***300 -***	***119,300,000***	***60.00%***	***85.14%***	KEC. BNS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**140,125,000**	**300**	**84,075,000**		**35,225,000**		**4,500,000**		**10,775,000**		**14,500,000**		**5,450,000**	- -	***35,225,000***	***300*** -	***119,300,000***	***60.00%***	***85.14%***	KEC. BNS
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	140,125,000	36 Bulan	84,075,000	Bulan 12	35,225,000	Bulan 2	4,500,000	5 Bulan	10,775,000.00	3 Bulan	14,500,000	2 Bulan	5,450,000	***12 Bulan***	***35,225,000***	***48 Bulan***	***119,300,000***	***80.00%***	***85.14%***	KEC. BNS
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**16.67**	**12.78**	**41.67**	**30.59**	**25.00**	**41.16**	**16.67**	**15.47**	**100.00**	100.00				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**ST'**	**ST**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**70,871,250**	**300**	**42,522,750**		**3,464,000**		**-**		**-**		**624,000**		**2,840,000**	- -	***3,464,000***	***300*** -	***45,986,750***	***60.00%***	***64.89%***	KEC. BNS
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**70,871,250**	**300**	**42,522,750**		**3,464,000**		**-**		**-**		**624,000**		**2,840,000**	- -	***3,464,000***	***300*** -	***45,986,750***	***60.00%***	***64.89%***	KEC. BNS
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	48,570,000	3 Kali	29,142,000	Kali 1	3,464,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	624,000	1 Kali	2,840,000	***1 Kali***	***3,464,000***	***4 Kali***	***32,606,000***	***80.00%***	***67.13%***	KEC. BNS
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	22,301,250	3 Kali	13,380,750	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali			- ***Kali***	-	***3 Kali***	***13,380,750***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**18.01**	**100.00**	**81.99**	**100.00**	100.00				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**T**	**ST'**	**ST**				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**159,640,500**	**300**	**95,784,300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**	***300***	***95,784,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**159,640,500**	**300**	**95,784,300**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**	-	**-**	***300***	***95,784,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	69,500,000	33 Kali	41,700,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***33 Kali***	***41,700,000***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	100 Kali	90,140,500	60 Kali	54,084,300	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***60 Kali***	***54,084,300***	***60.00%***	***60.00%***	KEC. BNS
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**0.00**	**0.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT			-		-						379,694,448					- -	***379,694,448***	- -	***379,694,448***			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**5 WTP**	**7,570,530,625**	**3 WTP**	**4,542,318,375**	**WTP**	**1,458,900,420**	**WTP**	**246,774,725**	**WTP**	**370,694,448**	**WTP**	**283,448,745**	**WTP**	**249,452,697**	- ***WTP***	***1,150,370,615***	***3 WTP***	***5,692,688,990***	***60.00%***	***75.20%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**48,050,000**	**300**	**28,830,000**		**6,000,000**		**-**		**1,200,000**		**600,000**		**1,200,000**	-	***3,000,000***	***300***	***31,830,000***	***60.00%***	***66.24%***	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	150 Dokumen	48,050,000	90 Dokumen	28,830,000	Dokumen 30	6,000,000	Dokumen 0	-	10 Dokumen	1,200,000.00	8 Dokumen	600,000	12 Dokumen	1,200,000	*30 Dokumen*	*3,000,000*	*120 Dokumen*	*31,830,000*	*80.00%*	*66.24%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**6,193,353,915**	**300**	**3,716,012,349**		**1,269,286,420**		**241,744,725**		**356,458,248**		**258,030,945**		**239,634,697**	-	*1,095,868,615*	*300*	*4,811,880,964*	*60.00%*	*77.69%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	5,572,853,915	36 Bulan	3,343,712,349	Bulan 12	1,145,186,420	Bulan 3	215,274,725	3 Bulan	328,788,248.00	3 Bulan	227,400,945	3 Bulan	208,404,697	*12 Bulan*	*979,868,615*	*48 Bulan*	*4,323,580,964*	*80.00%*	*77.58%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	315,000,000	36 Bulan	189,000,000	Bulan 12	63,000,000	Bulan 3	15,750,000	3 Bulan	15,750,000.00	3 Bulan	15,750,000	3 Bulan	15,750,000	*12 Bulan*	*63,000,000*	*48 Bulan*	*252,000,000*	*80.00%*	*80.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	305,500,000	15 Orang	183,300,000	Orang 5	61,100,000	Orang 1	10,720,000	1 Orang	11,920,000.00	1 Orang	14,880,000	2 Orang	15,480,000	*5 Orang*	*53,000,000*	*20 Orang*	*236,300,000*	*80.00%*	*77.35%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**	**500**	**70,500,000**	**300**	**42,300,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*42,300,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100 Stel	70,500,000	60 Stel	42,300,000	Stel		Stel		Stel		Stel		Stel		- *Stel*	-	*60 Stel*	*42,300,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**367,320,000**	**300**	**220,392,000**		**90,814,000**		**1,484,600**		**2,400,000**		-		**1,440,000**	-	*5,324,600*	*300*	*225,716,600*	*60.00%*	*61.45%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75 Unit	8,500,000	45 Unit	5,100,000	Unit 15	18,900,000	Unit 0	-	- Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- *Unit*	-	*45 Unit*	*5,100,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2500 Kotak	144,000,000	1500 Kotak	86,400,000	Kotak 500	28,800,000	Kotak 0	-	350 Kotak	2,400,000.00	55 Kotak	-	95 Kotak	-	*500 Kotak*	*2,400,000*	*2,000 Kotak*	*88,800,000*	*80.00%*	*61.67%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60 Bulan	68,950,000	36 Bulan	41,370,000	Bulan 12	13,790,000	Bulan 0	-	- Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	1,440,000	*12 Bulan*	*1,440,000*	*48 Bulan*	*42,810,000*	*80.00%*	*62.09%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 Bulan	67,870,000	36 Bulan	40,722,000	Bulan 12	13,724,000	Bulan 1	1,484,600	1 Bulan	843,800	2 Bulan	1,213,800	8 Bulan	1,500,400	*12 Bulan*	*5,042,600*	*48 Bulan*	*45,764,600*	*80.00%*	*67.43%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	78,000,000	60 Kali	46,800,000	Kali 20	15,600,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*60 Kali*	*46,800,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**500**	**332,500,000**	**300**	**199,500,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*199,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya anggaran pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	100 Unit	332,500,000	60 Unit	199,500,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*60 Unit*	*199,500,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**149,526,710**	**300**	**89,716,026**		**28,494,000**		-		-		**420,000**		**3,360,000**	-	*3,780,000*	*300*	*93,496,026*	*60.00%*	*62.53%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	49,526,710	36 Bulan	29,716,026	Bulan 12	9,571,500	Bulan 0	-	- Bulan	-	9 Bulan	420,000	3 Bulan	3,360,000	*12 Bulan*	*3,780,000*	*48 Bulan*	*33,496,026*	*80.00%*	*67.63%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	150 Kali	100,000,000	90 Kali	60,000,000	Kali 30	18,922,500	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*90 Kali*	*60,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**409,280,000**	**300**	**245,568,000**		**64,306,000**		**3,545,400**		**10,636,200**		**24,817,800**		**7,178,000**	-	*46,177,400*	*300*	*291,745,400*	*60.00%*	*71.28%*	KEC. KELUMBAYAN BARAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlaha pemeliharaan rutin/berkala mobil jabata	60 Bulan	235,850,000	36 Bulan	141,510,000	Bulan 12	47,170,000	Bulan 1	3,545,400	2 Bulan	7,402,200.00	2 Bulan	19,427,800	7 Bulan	3,422,000	12 Bulan	33,797,400	48 Bulan	175,307,400	80.00%	74.33%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasiona	60 Bulan	85,680,000	36 Bulan	51,408,000	Bulan 12	17,136,000	Bulan 0	-	2 Bulan	3,234,000.00	2 Bulan	5,390,000	8 Bulan	3,756,000	12 Bulan	12,380,000	48 Bulan	63,788,000	80.00%	74.45%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung rumah dinas	5 Unit	87,750,000	3 Unit	52,650,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- Unit	-	3 Unit	52,650,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
									Rata-rata capaian kinerja (%)		1.32	16.92	54.39	25.41	12.43	19.43	22.37	17.10	90.50	78.85				
									Predikat kinerja		SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**49,500,000**	**288**	**29,700,000**		**5,900,000**		-		-		-		-	- -	-	**288** -	**29,700,000**	**60.00%**	**60.00%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**27,000,000**	**300**	**16,200,000**		**1,400,000**		-		-		-		-	- -	-	**300** -	**16,200,000**	**60.00%**	**60.00%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	10 Kali	27,000,000	6 Kali	16,200,000	Kali 2	1,400,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	6 Kali	16,200,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**22,500,000**	**300**	**13,500,000**		**4,500,000**		-		-		-		-	-	-	**300**	**13,500,000**	**60.00%**	**60.00%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	22,500,000	30 Eksampler	13,500,000	Eksampler 10	4,500,000	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksamp ler		- Eksampler	-	30 Eksampler	13,500,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**177,000,000**	**240**	**106,200,000**		**12,000,000**		-		-		**3,000,000**		**8,910,000**	-	**11,910,000**	**240**	**118,110,000**	**60.00%**	**66.73%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**177,000,000**	**300**	**106,200,000**		**12,000,000**		-		-		**3,000,000**		**8,910,000**	-	**11,910,000**	**300**	**118,110,000**	**60.00%**	**66.73%**	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	45 Kali	87,000,000	27 Kali	52,200,000	Kali 9	12,000,000	Kali 0	-	- Kali	-	3 Kali	3,000,000	6 Kali	8,910,000	9 Kali	11,910,000	36 Kali	64,110,000	80.00%	73.69%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	10 Kali	90,000,000	6 Kali	54,000,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	6 Kali	54,000,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
									Rata-rata capaian kinerja (%)		0.00	0.00	-	0.00	33.33	25.00	66.67	74.25	100.00	99.25				
									Predikat kinerja		SR	SR	SR	SR	SR	SR	SD	SD	ST	ST				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	500	135,000,000	300	81,000,000		34,200,000		2,250,000		9,000,000		2,250,000		6,750,000	- -	20,250,000	300 -	101,250,000	60.00%	75.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	500	135,000,000	300	81,000,000		34,200,000		2,250,000		9,000,000		2,250,000		6,750,000	- -	20,250,000	300 -	101,250,000	60.00%	75.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	135,000,000	36 Bulan	81,000,000	Bulan 12	34,200,000	Bulan 1	2,250,000	3 Bulan	9,000,000.00	1 Bulan	2,250,000	7 Bulan	6,750,000	12 Bulan	20,250,000	48 Bulan	101,250,000	80.00%	75.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	8.33	6.58	25	26.32	8.33	6.58	58.33	19.74	100.00	59.21				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	SR	ST'	R				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	500	110,487,500	300	66,292,500		3,525,000		-		-		-		-	- -	-	300 -	66,292,500	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan	500	110,487,500	300	66,292,500		3,525,000		-		-		-		-	- -	-	300 -	66,292,500	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	92,862,500	3 Kali	55,717,500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	3 Kali	55,717,500	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	17,625,000	3 Kali	10,575,000	Kali 1	3,525,000	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	3 Kali	10,575,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	500	74,325,000	300	44,595,000		-		-		-		-		-	-	-	300	44,595,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500	74,325,000	300	44,595,000		-		-		-		-		-	-	-	300	44,595,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	31,125,000	12 Kali	18,675,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	12 Kali	18,675,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	10 Kali	43,200,000	6 Kali	25,920,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	6 Kali	25,920,000	60.00%	60.00%	KEC. KELUMBAYAN BARAT
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			KECAMATAN AIR NANINGAN			-		-						490,524,018					- -	490,524,018	- -	490,524,018			KECAMATAN AIR NANINGAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	5 WTP	9,723,428,140	3 WTP	5,834,056,884	WTP	1,849,936,553	WTP	309,571,089	WTP	483,774,018	WTP	341,491,596	WTP	321,531,065	- WTP	1,456,367,768	3 WTP	7,290,424,652	60.00%	74.98%	KECAMATAN AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**500**	**173,477,500**	**300**	**104,086,500**		**31,637,300**		**-**		**9,300,000**		**-**		**5,100,000**	**-**	**14,400,000**	**300**	**118,486,500**	**60.00%**	**68.30%**	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	100 Eksemplar Dokumen	96,977,500	60 Eksemplar Dokumen	58,186,500	20 Eksemplar Dokumen	16,337,300	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	3,600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	3,600,000	***20 Eksemplar Dokumen***	***7,200,000***	***80 Eksemplar Dokumen***	***65,386,500***	***80.00%***	***67.42%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	100 Eksemplar Dokumen	14,250,000	60 Eksemplar Dokumen	8,550,000	20 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2,850,000.00	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokum***	***2,850,000***	***80 Eksemplar Dokum***	***11,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	14,250,000	60 Eksemplar Dokumen	8,550,000	20 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***60 Eksemplar Dokum***	***8,550,000***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	14,250,000	60 Eksemplar Dokumen	8,550,000	20 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	2,850,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***20 Eksemplar Dokum***	***2,850,000***	***80 Eksemplar Dokum***	***11,400,000***	***80.00%***	***80.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100 Eksemplar Dokumen	12,000,000	60 Eksemplar Dokumen	7,200,000	20 Eksemplar Dokumen	2,400,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokum***	***-***	***60 Eksemplar Dokum***	***7,200,000***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	100 Eksemplar Dokumen	6,750,000	60 Eksemplar Dokumen	4,050,000	20 Eksemplar Dokumen	1,350,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	***- Eksemplar Dokumen***	***-***	***60 Eksemplar Dokumen***	***4,050,000***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	100 Eksemplar Dokumen	15,000,000	60 Eksemplar Dokumen	9,000,000	20 Eksemplar Dokumen	3,000,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	20 Eksemplar Dokumen	1,500,000	***20 Eksemplar Dokum***	***1,500,000***	***80 Eksemplar Dokum***	***10,500,000***	***80.00%***	***70.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah**	**500**	**8,334,052,740**	**300**	**5,000,431,644**		**1,662,163,473**		**307,679,559**		**457,071,818**		**332,439,396**		**303,981,065**	**-**	**1,401,171,838**	**300**	**6,401,603,482**	**60.00%**	**76.81%**	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	7,319,002,740	45 Orang	4,391,401,644	15 Orang	1,459,153,473	3 Orang	272,579,559	5 Orang	406,731,818.00	2 Orang	281,499,396	5 Orang	268,881,065	***15 Orang***	***1,229,691,838***	***60 Orang***	***5,621,093,482***	***80.00%***	***76.80%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang	704,250,000	45 Orang	422,550,000	15 Orang	140,850,000	3 Orang	35,100,000	2 Orang	35,100,000.00	4 Orang	35,100,000	6 Orang	35,100,000	***15 Orang***	***140,400,000***	***60 Orang***	***562,950,000***	***80.00%***	***79.94%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	310,800,000	18 Orang	186,480,000	6 Orang	62,160,000	0 Orang	-	1 Orang	15,240,000.00	2 Orang	15,840,000	3 Orang	-	***6 Orang***	***31,080,000***	***24 Orang***	***217,560,000***	***80.00%***	***70.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera**	**500**	**50,000,000**	**300**	**30,000,000**		**10,000,000**		**-**		**10,000,000**		**-**		**-**	**-**	**10,000,000**	**300**	**40,000,000**	**60.00%**	**80.00%**	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	125 Stel	50,000,000	75 Stel	30,000,000	25 Stel	10,000,000	0 Stel	-	25 Stel	10,000,000.00	0 Stel	-	- Stel	-	***25 Stel***	***10,000,000***	***100 Stel***	***40,000,000***	***80.00%***	***80.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera**	**500**	**379,267,900**	**300**	**227,560,740**		**67,774,780**		**241,530**		**17,495,000**		**6,510,000**		**18,921,500**	**-**	**43,168,030**	**300**	**270,728,770**	**60.00%**	**71.38%**	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Unit	197,030,900	18 Unit	118,218,540	6 Unit	49,693,880	0 Unit	-	2 Unit	17,495,000.00	1 Unit	4,400,000	3 Unit	15,494,500	***6 Unit***	***37,389,500***	***24 Unit***	***155,608,040***	***80.00%***	***78.98%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	3600 Kotak	54,000,000	2160 Kotak	32,400,000	720 Kotak	5,400,000	0 Kotak	-	- Kotak	-	0 Kotak	-	- Kotak	-	***- Kotak***	***-***	***2,160 Kotak***	***32,400,000***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16295 Eksampler	28,547,000	9777 Eksampler	17,128,200	3259 Eksampler	3,209,400	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	1107 Eksampler	1,090,000	2,152 Eksampler	410,000	***3,259 Eksampler***	***1,500,000***	***13,036 Eksampler***	***18,628,200***	***80.00%***	***65.25%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	3515 Buah	65,907,500	2109 Buah	39,544,500	703 Buah	9,471,500	50 Buah	241,530	- Buah	-	128 Buah	2,110,000	525 Buah	3,427,000	***703 Buah***	***5,778,530***	***2,812 Buah***	***45,323,030***	***80.00%***	***68.77%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Kali	33,782,500	60 Kali	20,269,500	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*60 Kali*	*20,269,500*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**500**	**270,000,000**	**300**	**162,000,000**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*162,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 Unit	270,000,000	3 Unit	162,000,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*3 Unit*	*162,000,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**227,136,000**	**300**	**136,281,600**		**34,552,200**		-		-		**15,900,000**		**15,900,000**	-	*31,800,000*	*300*	*168,081,600*	*60.00%*	*74.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	153,000,000	36 Bulan	91,800,000	Bulan 12	32,600,000	Bulan 0	-	- Bulan	-	6 Bulan	15,900,000	6 Bulan	15,900,000	*12 Bulan*	*31,800,000*	*48 Bulan*	*123,600,000*	*80.00%*	*80.78%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan	5 Kali	74,136,000	3 Kali	44,481,600	Kali 1	1,952,200	Kali 0	-	- Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*3 Kali*	*44,481,600*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**289,494,000**	**300**	**173,696,400**		**43,808,800**		**1,650,000**		**7,402,200**		**9,052,200**		**12,450,000**	-	*30,554,400*	*300*	*204,250,800*	*60.00%*	*70.55%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	175,544,000	3 Unit	105,326,400	Unit 1	35,108,800	Unit 0	-	- Unit	7,402,200.00	0 Unit	7,402,200	1 Unit	10,750,000	*1 Unit*	*25,554,400*	*4 Unit*	*130,880,800*	*80.00%*	*74.56%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	15 Unit	39,500,000	9 Unit	23,700,000	Unit 3	8,700,000	Unit 0	1,650,000	1 Unit	-	0 Unit	1,650,000	2 Unit	1,700,000	*3 Unit*	*5,000,000*	*12 Unit*	*28,700,000*	*80.00%*	*72.66%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	74,450,000	3 Unit	44,670,000	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit		- *Unit*	-	*3 Unit*	*44,670,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
									Rata-rata capaian kinerja (%)		**1.14**	**16.73**	**1.96**	**26.15**	**25.48**	**18.46**	**55.50**	**17.38**	**84.08**	78.73				
									Predikat kinerja		**SR**	**SR**	**SR**	**ST**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**T**	**T**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**154,203,000**	**288**	**92,521,800**		-		-		-		-		-	- -	-	*288* -	*92,521,800*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**69,700,000**	**300**	**41,820,000**		-		-		-		-		-	- -	-	*300* -	*41,820,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	20 Kali	69,700,000	12 Kali	41,820,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- *Kali*	-	*12 Kali*	*41,820,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**84,503,000**	**300**	**50,701,800**		-		-		-		-		-	-	-	*300*	*50,701,800*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	84,503,000	30 Eksampler	50,701,800	Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler		Eksampler	- *Eksampler*	-	*30 Eksampler*	*50,701,800*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN AIR NANINGAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**189,500,000**	**240**	**113,700,000**		**19,725,000**		**14,725,000**		-		**5,000,000**		-	- -	***19,725,000***	***240*** -	***133,425,000***	***60.00%***	***70.41%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**189,500,000**	**300**	**113,700,000**		**19,725,000**		**14,725,000**		-		**5,000,000**		-	- -	***19,725,000***	***300*** -	***133,425,000***	***60.00%***	***70.41%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	10 Kali	115,075,000	6 Kali	69,045,000	Kali 2	19,725,000	Kali 2	14,725,000	0 Kali	-	0 Kali	5,000,000	- Kali	-	***2 Kali***	***19,725,000***	***8 Kali***	***88,770,000***	***80.00%***	***77.14%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	15 Kali	74,425,000	9 Kali	44,655,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***9 Kali***	***44,655,000***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100.00	74.65	0.00	0.00	0.00	25.35	0.00	0.00	100.00	100.00					
										Predikat kinerja	ST	SD	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	ST					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500**	**102,925,000**	**300**	**61,755,000**		**34,200,000**		-	**0**	**6,750,000**		**6,750,000**		**13,650,000**	- -	***27,150,000***	***300*** -	***88,905,000***	***60.00%***	***86.38%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500**	**102,925,000**	**300**	**61,755,000**		**34,200,000**		-	**0**	**6,750,000**		**6,750,000**		**13,650,000**	- -	***27,150,000***	***300*** -	***88,905,000***	***60.00%***	***86.38%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	102,925,000	36 Bulan	61,755,000	Bulan 12	34,200,000	Bulan 0	-	5 Bulan	6,750,000.00	1 Bulan	6,750,000	6 Bulan	13,650,000	***12 Bulan***	***27,150,000***	***48 Bulan***	***88,905,000***	***80.00%***	***86.38%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	41.67	19.74	8.33	19.74	50.00	39.91	100.00	79.39					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**96,235,250**	**300**	**57,741,150**		-		-		-		-		-	- -	-	***300*** -	***57,741,150***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**96,235,250**	**300**	**57,741,150**		-		-		-		-		-	- -	-	***300*** -	***57,741,150***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	56,588,750	3 Kali	33,953,250	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***3 Kali***	***33,953,250***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	39,646,500	3 Kali	23,787,900	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- ***Kali***	-	***3 Kali***	***23,787,900***	***60.00%***	***60.00%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**500**	**83,750,000**	**300**	**50,250,000**		**9,850,000**		-		-		**706,000**		**3,550,000**	-	***4,256,000***	***300***	***54,506,000***	***60.00%***	***65.08%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**83,750,000**	**300**	**50,250,000**		**9,850,000**		-		-		**706,000**		**3,550,000**	-	***4,256,000***	***300***	***54,506,000***	***60.00%***	***65.08%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	55 Kali	83,750,000	33 Kali	50,250,000	Kali 11	9,850,000	Kali 0	-	0 Kali	-	2 Kali	706,000	9 Kali	3,550,000	***11 Kali***	***4,256,000***	***44 Kali***	***54,506,000***	***80.00%***	***65.08%***	**KECAMATAN AIR NANINGAN**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
											Rata-rata capaian kinerja (%)														
											Predikat kinerja														
			KECAMATAN BULOK																						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	5 WTP	10,090,726,925	3 WTP	6,054,436,155	WTP	1,848,966,792	WTP	302,718,715	WTP	426,177,842	WTP	360,387,622	WTP	428,389,708	- WTP	1,517,673,887	3 WTP	7,572,110,042	60.00%	75.04%	KECAMATAN BULOK
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500	112,500,000	300	67,500,000		20,475,900		-		-		2,250,000		11,599,600	-	13,849,600	300	81,349,600	60.00%	72.31%	KECAMATAN BULOK
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan RKA, DPA dan DPAP	25 Buku	83,250,000	15 Buku	49,950,000	Buku 5	16,650,300	Buku 0	-	0 Buku	-	0 Buku	2,250,000	5 Buku	8,400,000	5 Buku	10,650,000	20 Buku	60,600,000	80.00%	72.79%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA, RKAP, DPA, DPPA	25 Eksemplar Dokumen	15,750,000	15 Eksemplar Dokumen	9,450,000	5 Eksemplar Dokumen	1,125,600	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	1,125,300	5 Eksemplar Dokum	1,125,300	20 Eksemplar Dokum	10,575,300	80.00%	67.14%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	1,875,000	15 Eksemplar Dokumen	1,125,000	5 Eksemplar Dokumen	375,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	349,300	5 Eksemplar Dokum	349,300	20 Eksemplar Dokum	1,474,300	80.00%	78.63%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,625,000	15 Eksemplar Dokumen	1,575,000	5 Eksemplar Dokumen	525,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	525,000	5 Eksemplar Dokum	525,000	20 Eksemplar Dokum	2,100,000	80.00%	80.00%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	25 Eksemplar Dokumen	2,625,000	15 Eksemplar Dokumen	1,575,000	5 Eksemplar Dokumen	525,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	525,000	5 Eksemplar Dokum	525,000	20 Eksemplar Dokum	2,100,000	80.00%	80.00%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP dan LKPJ	25 Eksemplar Dokumen	3,000,000	15 Eksemplar Dokumen	1,800,000	5 Eksemplar Dokumen	600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	1,800,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	25 Eksemplar Dokumen	3,375,000	15 Eksemplar Dokumen	2,025,000	5 Eksemplar Dokumen	675,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	5 Eksemplar Dokumen	675,000	5 Eksemplar Dokum	675,000	20 Eksemplar Dokum	2,700,000	80.00%	80.00%	KECAMATAN BULOK
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Derah	500	8,514,411,425	300	5,108,646,855		1,558,545,392		302,718,715		422,017,842		319,032,822		329,049,708	-	1,372,819,087	300	6,481,465,942	60.00%	76.12%	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	7,654,311,425	42 Bulan	4,592,586,855	Bulan 14	1,386,525,392	Bulan 3	276,693,715	3 Bulan	387,852,842.00	5 Bulan	276,727,822	3 Bulan	276,474,708	14 Bulan	1,217,749,087	56 Bulan	5,810,335,942	80.00%	75.91%	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	520,500,000	21 Orang	312,300,000	Orang 7	104,100,000	Orang 1	26,025,000	1 Orang	26,025,000.00	1 Orang	26,025,000	4 Orang	26,025,000	7 Orang	104,100,000	28 Orang	416,400,000	80.00%	80.00%	KECAMATAN BULOK
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	335,850,000	21 Orang	201,510,000	Orang 7	67,170,000	Orang 0	-	1 Orang	8,140,000	1 Orang	16,280,000	5 Orang	26,550,000	7 Orang	50,970,000	28 Orang	252,480,000	80.00%	75.18%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	50 Eksampler	3,750,000	30 Eksampler	2,250,000	Eksampler 10	750,000	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- Eksamp	-	30 Eksamp	2,250,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daera	500	207,300,000	300	124,380,000		8,542,400		-		1,142,600		202,400		617,800	-	1,962,800	300	126,342,800	60.00%	60.95%	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65 Unit	25,215,000	39 Unit	15,129,000	Unit 13	1,527,000	Unit 0	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	39 Unit	15,129,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum	2000 Kotak	90,000,000	1200 Kotak	54,000,000	Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		Kotak		- Kotak	-	1,200 Kotak	54,000,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	225 Eksampler	33,155,500	135 Eksampler	19,893,300	45 Eksampler	2,145,300	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	45 Eksampler	590,000	*45 Eksampler*	*590,000*	*180 Eksampler*	*20,483,300*	*80.00%*	*61.78%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	105 Unit	47,679,500	63 Unit	28,607,700	21 Unit	4,120,100	0 Unit	-	2 Unit	1,142,600.00	5 Unit	202,400	14 Unit	617,800	*21 Unit*	*1,962,800*	*84 Unit*	*30,570,500*	*80.00%*	*64.12%*	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	75 Kali	11,250,000	45 Kali	6,750,000	15 Kali	750,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	*- Kali*	*-*	*45 Kali*	*6,750,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah yang disusun dengan baik**	**500**	**368,210,500**	**300**	**220,926,300**		**84,042,100**		**-**		**-**		**12,000,000**		**51,290,000**	*-*	*63,290,000*	*300*	*284,216,300*	*60.00%*	*77.19%*	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	55 Unit	109,750,000	33 Unit	65,850,000	11 Unit	33,950,000	0 Unit	-	0 Unit	-	4 Unit	12,000,000	7 Unit	5,000,000	*11 Unit*	*17,000,000*	*44 Unit*	*82,850,000*	*80.00%*	*75.49%*	KECAMATAN BULOK
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15 Unit	258,460,500	9 Unit	155,076,300	3 Unit	50,092,100	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	46,290,000	*3 Unit*	*46,290,000*	*12 Unit*	*201,366,300*	*80.00%*	*77.91%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**239,400,000**	**300**	**143,640,000**		**64,520,000**		**-**		**-**		**9,467,600**		**15,810,800**	*-*	*25,278,400*	*300*	*168,918,400*	*60.00%*	*70.56%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	149,400,000	36 Bulan	89,640,000	12 Bulan	46,520,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	9 Bulan	4,467,600	3 Bulan	15,810,800	*12 Bulan*	*20,278,400*	*48 Bulan*	*109,918,400*	*80.00%*	*73.57%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Kali	90,000,000	3 Kali	54,000,000	1 Kali	18,000,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	5,000,000	1 Kali	-	*1 Kali*	*5,000,000*	*4 Kali*	*59,000,000*	*80.00%*	*65.56%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500**	**648,905,000**	**300**	**389,343,000**		**112,841,000**		**-**		**3,017,400**		**17,434,800**		**20,021,800**	*-*	*40,474,000*	*300*	*429,817,000*	*60.00%*	*66.24%*	KECAMATAN BULOK
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	440,980,000	3 Unit	264,588,000	1 Unit	76,906,000	0 Unit	-	0 Unit	3,017,400.00	0 Unit	17,434,800	1 Unit	20,021,800	*1 Unit*	*40,474,000*	*4 Unit*	*305,062,000*	*80.00%*	*69.18%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit Mobil dan Motor	151,875,000	12 Unit Mobil dan Motor	91,125,000	Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor		Unit Mobil dan Motor	*- Unit Mobil dan Motor*	*-*	*12 Unit Mobil dan Motor*	*91,125,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat	5 Unit	56,050,000	3 Unit	33,630,000	1 Unit	30,375,000	0 Unit	-	1 Unit	30,375,000.00	0 Unit	-	- Unit	-	*1 Unit*	*30,375,000*	*4 Unit*	*64,005,000*	*80.00%*	*114.19%*	KECAMATAN BULOK
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	56,050,000	3 Unit	33,630,000	1 Unit	5,560,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	- Unit	-	*- Unit*	*-*	*3 Unit*	*33,630,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	1.33	16.37	2.67	23.05	8.33	19.49	38.67	23.17	51.00	82.08					
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	R	T					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik**	**480**	**177,541,200**	**288**	**106,524,720**		**6,352,600**		**-**		**-**		**-**		**-**	*- -*	*-*	*288 -*	*106,524,720*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Termonitornya Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai**	**500**	**91,143,700**	**300**	**54,686,220**		**2,002,600**		**-**		**-**		**-**		**-**	*- -*	*-*	*300 -*	*54,686,220*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5																					16
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	50 Eksampler	91,143,700	30 Eksampler	54,686,220	Eksampler 10	2,002,600	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- *Eksampler*	-	*30 Eksampler*	*54,686,220*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Tersusunnya Dokumen Laporan Sinkronisasi Data Kemiskinan yang Diselesaikan Tepat Waktu**	**500**	**86,397,500**	**300**	**51,838,500**		**4,350,000**		-		-		-		-	-	-	*300*	*51,838,500*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinkronasasi Data Kemiskinan	50 Eksampler	86,397,500	30 Eksampler	51,838,500	Eksampler 10	4,350,000	Eksampler 0	-	0 Eksampler	-	0 Eksampler	-	- Eksampler	-	- *Eksampler*	-	*30 Eksampler*	*51,838,500*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
											0.00	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	-	-				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**				
			ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan**	**400**	**301,168,000**	**240**	**180,700,800**		**27,810,100**		-		-		**6,050,000**		-	- -	*6,050,000*	*240 -*	*186,750,800*	*60.00%*	*62.01%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500**	**301,168,000**	**300**	**180,700,800**		**27,810,100**		-		-		**6,050,000**		-	- -	*6,050,000*	*300 -*	*186,750,800*	*60.00%*	*62.01%*	KECAMATAN BULOK
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	55 Kali	143,848,000	33 Kali	86,308,800	Kali 11	26,421,100	Kali 0	-	0 Kali	-	11 Kali	6,050,000	- Kali	-	*11 Kali*	*6,050,000*	*44 Kali*	*92,358,800*	*80.00%*	*64.21%*	KECAMATAN BULOK
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Kali	157,320,000	18 Kali	94,392,000	Kali 6	1,389,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- *Kali*	-	*18 Kali*	*94,392,000*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
											0.00	**0.00**	**-**	**0.00**	**64.71**	**21.75**	**0.00**	**0.00**	**64.71**	21.75				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**				
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan**	**500 %**	**141,250,500**	**300 %**	**84,750,300**	**%**	**34,815,600**	**%**	-	**%**	**4,500,000**	%	**9,000,000**	%	**9,000,000**	- %	*22,500,000*	*300 %*	*107,250,300*	*60.00%*	*75.93%*	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**tercapinya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**500 %**	**141,250,500**	**300 %**	**84,750,300**	**%**	**34,815,600**	**%**	-	%	**4,500,000**	%	**9,000,000**	%	**9,000,000**	- %	*22,500,000*	*300 %*	*107,250,300*	*60.00%*	*75.93%*	KECAMATAN BULOK
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan Instansi Terkait	60 Bulan	141,250,500	36 Bulan	84,750,300	Bulan 12	34,815,600	Bulan 0	-	2 Bulan	4,500,000.00	3 Bulan	9,000,000	7 Bulan	9,000,000	*12 Bulan*	*22,500,000*	*48 Bulan*	*107,250,300*	*80.00%*	*75.93%*	KECAMATAN BULOK
											0.00	**0.00**	**16.67**	**12.93**	**25.00**	**25.85**	**58.33**	**25.85**	**100.00**	64.63				
											SR	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**SR**	**ST**	**R**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PRESENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**500**	**125,944,450**	**300**	**75,566,670**		-		-		-		-		-	- -	-	*300 -*	*75,566,670*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Terlaksananya Peingatan HUT RI Kecamatan**	**500**	**125,944,450**	**300**	**75,566,670**		-		-		-		-		-	- -	-	*300 -*	*75,566,670*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5 Kali	91,319,450	3 Kali	54,791,670	Kali		Kali			Kali		Kali		Kali	- *Kali*	-	*3 Kali*	*54,791,670*	*60.00%*	*60.00%*	KECAMATAN BULOK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan	5 Kali	34,625,000	3 Kali	20,775,000	Kali		Kali		Kali		Kali		Kali		- Kali	-	3 Kali	20,775,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	#DIV/0!		0.00		#DIV/0!		0.00		#DIV/0!		0.00		#DIV/0!	-				
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	SR				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	500	385,660,000	300	231,396,000		23,236,600		-		-		-		-	- -	-	300 -	231,396,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tercapainya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	500	385,660,000	300	231,396,000		23,236,600		-		-		-		-	- -	-	300 -	231,396,000	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Pengelolaan APBPekon	20 Kali	157,271,500	12 Kali	94,362,900	Kali 4	3,436,300	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	12 Kali	94,362,900	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa	150 Buku	131,764,500	90 Buku	79,058,700	Buku 30	15,360,300	Buku 0	-	0 Buku	-	0 Buku	-	- Buku	-	- Buku	-	90 Buku	79,058,700	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pendampingan dan Pembentukan Desa Wisata & UMKM	40 Kali	96,624,000	24 Kali	57,974,400	Kali 8	4,440,000	Kali 0	-	0 Kali	-	0 Kali	-	- Kali	-	- Kali	-	24 Kali	57,974,400	60.00%	60.00%	KECAMATAN BULOK
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00		0.00		0		0.00		0.00		0.00		0.00	-				
										Predikat kinerja	SR		SR		SR		SR		SR		SR		SR	SR				
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			-		-											- -	-	- -	-			
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			-		-											- -	-	- -	-			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	21,897,379,465	WTP	13,138,427,679	WTP	3,661,931,681	WTP	567,229,751	WTP	1,116,428,288	WTP	785,616,356	WTP	760,964,744	- WTP	3,230,239,139	- WTP	16,368,666,818		74.75%	BADAN KESBANGPOL
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500	246,258,500	300	147,755,100		47,232,300		-		14,759,200		6,457,600		38,574,800	-	59,791,600	300	207,546,700	60.00%	84.28%	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra,Renja dan Perubahannya	250 Buku	199,407,000	150 Buku	119,644,200	Buku 50	37,862,000	Buku 0	-	17 Buku	13,292,700	0 Buku	3,552,600	28 Buku	33,736,000	45 Buku	50,581,300	195 Buku	170,225,500	78.00%	85.37%	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	75 Eksemplar Dokumen	4,500,000	45 Eksemplar Dokumen	2,700,000	15 Eksemplar Dokumen	900,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	15 Eksemplar Dokumen	900,000	15 Eksemplar Dokum	900,000	60 Eksemplar Dokum	3,600,000	80.00%	80.00%	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dukumen Perubahan RKA SKPD	250 Eksemplar Dokumen	10,200,000	150 Eksemplar Dokumen	6,120,000	50 Eksemplar Dokumen	2,040,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	540,000	50 Eksemplar Dokumen	1,500,000	50 Eksemplar Dokum	2,040,000	200 Eksemplar Dokum	8,160,000	80.00%	80.00%	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dukumen DPA SKPD	150 Eksemplar Dokumen	3,660,000	90 Eksemplar Dokumen	2,196,000	50 Eksemplar Dokumen	732,000	0 Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokumen	732,000	0 Eksemplar Dokumen	-	- Eksemplar Dokumen	-	50 Eksemplar Dokum	732,000	140 Eksemplar Dokum	2,928,000	93.33%	80.00%	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dukumen Perubahan DPA-SKPD	75 Eksemplar Dokumen	3,000,000	45 Eksemplar Dokumen	1,800,000	15 Eksemplar Dokumen	600,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	300,000	15 Eksemplar Dokumen	300,000	15 Eksemplar Dokum	600,000	60 Eksemplar Dokum	2,400,000	80.00%	80.00%	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 K	9 Rp	10 K	10 Rp	11 K	11 Rp	12 K	12 Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rensrta,Renja,Perubahan Renja dan Laporan Triwulan	75 Eksemplar Dokumen	17,916,500	45 Eksemplar Dokumen	10,749,900	15 Eksemplar Dokumen	3,583,300	0 Eksemplar Dokumen	-	3 Eksemplar Dokumen	734,500.00	2 Eksemplar Dokumen	550,000	9 Eksemplar Dokumen	2,138,800	***14 Eksemplar Dokumen***	***3,423,300***	***59 Eksemplar Dokumen***	***14,173,200***	***78.67%***	***79.11%***	BADAN KESBANGPOL
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dukumen LPPD,LAKIP,LKPJ Perangkat Daerah	75 Eksemplar Dokumen	7,575,000	45 Eksemplar Dokumen	4,545,000	15 Eksemplar Dokumen	1,515,000	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	-	0 Eksemplar Dokumen	1,515,000	15 Eksemplar Dokumen	-	***15 Eksemplar Dokum***	***1,515,000***	***60 Eksemplar Dokum***	***6,060,000***	***80.00%***	***80.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan Secara Tepat Waktu**	**500** 300	**19,949,167,035**	**11,969,500,221**		**3,155,732,477**			**567,229,751**		**994,166,366**		**696,083,156**		**584,854,744**	**-**	***2,842,334,017***	***300***	***14,811,834,238***	***60.00%***	***74.25%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6070 Bulan	18,252,667,035	3642 Bulan	10,951,600,221	14 Bulan	2,886,932,477	3 Bulan	502,279,751	4 Bulan	926,966,366.00	1 Bulan	628,883,156	5 Bulan	515,404,744	***13 Bulan***	***2,573,534,017***	***3,655 Bulan***	***13,525,134,238***	***60.21%***	***74.10%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60 Bulan	1,696,500,000	36 Bulan	1,017,900,000	12 Bulan	268,800,000	2 Bulan	64,950,000	3 Bulan	67,200,000.00	2 Bulan	67,200,000	5 Bulan	69,450,000	***12 Bulan***	***268,800,000***	***48 Bulan***	***1,286,700,000***	***80.00%***	***75.84%***	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya administrasi kegpegawaian yang baik**	**500** 300	**307,003,500**	**184,202,100**		**61,400,700**			**-**		**25,910,700**		**10,140,000**		**25,350,000**	**- -**	***61,400,700***	***300 -***	***245,602,800***	***60.00%***	***80.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan	60 Bulan	307,003,500	36 Bulan	184,202,100	12 Bulan	61,400,700	0 Bulan	-	5 Bulan	25,910,700.00	0 Bulan	10,140,000	7 Bulan	25,350,000	***12 Bulan***	***61,400,700***	***48 Bulan***	***245,602,800***	***80.00%***	***80.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**680,498,430**		**408,299,058**		**170,353,304**		**-**		**35,941,886**		**28,224,500**		**27,471,800**	**-**	***91,638,186***	**-**	***499,937,244***		***73.47%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	92,011,180	6 Unit	55,206,708	12 Unit	55,472,236	0 Unit	-	5 Unit	18,402,236.00	1 Unit	16,900,000	5 Unit	3,300,000	***11 Unit***	***38,602,236***	***17 Unit***	***93,808,944***	***85.00%***	***101.95%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	1501280 BuahKotak	115,727,000	900768 BuahKotak	69,436,200	556 BuahKotak	14,145,518	0 BuahKotak	-	300 BuahKotak	7,893,600.00	10 BuahKotak	984,500	246 BuahKotak	5,263,300	***556 BuahKotak***	***14,141,400***	***901,324 BuahKotak***	***83,577,600***	***60.04%***	***72.22%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan	150 Exemplar	18,405,250	90 Exemplar	11,043,150	30 Exemplar	9,864,550	0 Exemplar	-	13 Exemplar	3,681,050.00	4 Exemplar	5,000,000	13 Exemplar	1,183,500	***30 Exemplar***	***9,864,550***	***120 Exemplar***	***20,907,700***	***80.00%***	***113.60%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	900 Kali	454,355,000	540 Kali	272,613,000	180 Kali	90,871,000	0 Kali	-	21 Kali	5,965,000.00	6 Kali	5,340,000	80 Kali	17,725,000	***107 Kali***	***29,030,000***	***647 Kali***	***301,643,000***	***71.89%***	***66.39%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**185,470,000**		**111,282,000**		**57,226,500**		**-**		**9,708,250**		**16,486,600**		**21,939,400**	**-**	***48,134,250***	**-**	***159,416,250***		***85.95%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunkikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	179,470,000	36 Bulan	107,682,000	12 Bulan	56,026,500	0 Bulan	-	3 Bulan	9,483,250.00	1 Bulan	16,036,600	6 Bulan	21,414,400	***10 Bulan***	***46,934,250***	***46 Bulan***	***154,616,250***	***76.67%***	***86.15%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 Bulan	6,000,000	36 Bulan	3,600,000	12 Bulan	1,200,000	0 Bulan	-	2 Bulan	225,000.00	1 Bulan	450,000	9 Bulan	525,000	***12 Bulan***	***1,200,000***	***48 Bulan***	***4,800,000***	***80.00%***	***80.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**528,982,000**		**317,389,200**		**169,986,400**		**-**		**57,840,400**		**12,364,000**		**87,510,250**	**-**	***157,714,650***	**-**	***475,103,850***		***89.81%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	20 Unit	474,982,000	12 Unit	284,989,200	4 Unit	159,186,400	0 Unit	-	2 Unit	57,840,400.00	0 Unit	12,364,000	2 Unit	87,510,250	***4 Unit***	***157,714,650***	***16 Unit***	***442,703,850***	***80.00%***	***93.20%***	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		16
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantof	5 Unit	54,000,000	3 Unit	32,400,000	Unit 1	10,800,000	Unit 0	-	- Unit	-	1 Unit	10,735,000	- Unit	-	*1 Unit*	*10,735,000*	*4 Unit*	*43,135,000*	*80.00%*	*79.88%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.47	15.49	40.57	30.49	2.75	21.45	48.34	20.78	92.13	88.21				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	T				
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			**191,273,000**		**114,763,800**		**17,244,600**		-		-		-		2,491,000	- -	*2,491,000*	- -	*117,254,800*		*61%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			**191,273,000**		**114,763,800**		**17,244,600**		-		-		-		2,491,000	- -	*2,491,000*	- -	*117,254,800*		*61%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	20 Rapat	59,350,000	12 Rapat	35,610,000	Rapat 4	3,890,000	Rapat 0	-	- Rapat	-	0 Rapat	-	3 Rapat	2,491,000	*3 Rapat*	*2,491,000*	*15 Rapat*	*38,101,000*	*75.00%*	*64%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	JUmlah Pelaksanaan Monitoring Dalam Meningkatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Tanggamus	200 Orang	131,923,000	120 Orang	79,153,800	Orang 40	13,354,600	Orang 0	-	- Orang	-	0 Orang	-	- Orang	-	- *Orang*	-	*120 Orang*	*79,153,800*	*60.00%*	*60%*	BADAN KESBANGPOL
										Rata-rata capaian kinerja (%)	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	6.82	14.45	6.82	14.45				
										Predikat kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			**121,981,500**		**73,188,900**		**23,496,300**		-		**12,820,000**		**416,300**		**2,020,000**	- -	*15,256,300*	- -	*88,445,200*		*73%*	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			**121,981,500**		**73,188,900**		**23,496,300**		-		**12,820,000**		**416,300**		**2,020,000**	- -	*15,256,300*	- -	*88,445,200*		*73%*	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	TIM Administrasi Verifikasi Bantuan Partai Politik Di Kabupaten Tanggamus	40 Partai	121,981,500	24 Partai	73,188,900	Partai 8	23,496,300	Partai 0	-	2 Partai	12,820,000	0 Partai	416,300	1 Partai	2,020,000	*3 Partai*	*15,256,300*	*27 Partai*	*88,445,200*	*68%*	*73%*	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00	25	54.56	0.00	1.77	12.50	8.60	37.50	64.93					
			Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			**9,800,545,450**		**5,880,327,270**		**1,932,409,090**		**60,000,000**		**1,114,421,167**		**253,816,602**		**282,499,997**	- -	***1,710,737,766***	- -	***7,591,065,036***		***77.46%***	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			**9,800,545,450**		**5,880,327,270**		**1,932,409,090**		**60,000,000**		**1,114,421,167**		**253,816,602**		**282,499,997**	- -	***1,710,737,766***	- -	***7,591,065,036***		***77.46%***	BADAN KESBANGPOL
			Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Tersalurkannya Hibah Keuangan	500 %	9,714,165,450	300 %	5,828,499,270	% 100	1,917,833,090	% 3.09	60,000,000	57.36 %	1,114,421,167	13.45 %	242,916,602	13.10 %	282,499,997	***87 %***	***1,699,837,766***	***387 %***	***7,528,337,036***	***77%***	***77.50%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	Jumlah Ormas Di Kabupaten tanggamus	125 Orang	86,380,000	75 Orang	51,828,000	Orang 25	14,576,000	Orang 0	-	- Orang	-	Orang	10,900,000	25 Orang	-	***25 Orang***	***10,900,000***	***100 Orang***	***62,728,000***	***80%***	***72.62%***	BADAN KESBANGPOL
			Rata-rata capaian kinerja (%)								2.47	3.10	45.89	57.67	10.76	13.13	30.48	14.62	89.60	88.53					
			Predikat kinerja							-	SR	SR	SR	R	SR	SR	SR	SR	T	T					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			**336,750,500**		**202,050,300**		-		-		-		-		-	- -	-	- -	***202,050,300***		***60.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			**336,750,500**		**202,050,300**		-		-		-		-		-	- -	-	- -	***202,050,300***		***60.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring Budaya,Penyalah Gunaan Narkotika dan FKUB di Kabupaten Tanggamus	250 Orang	134,034,500	150 Orang	80,420,700	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	- ***Orang***	-	***150 Orang***	***80,420,700***	***60.00%***	***60.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya danFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Etnis dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Dikabupaten Tanggamus	250 Orang	67,012,500	150 Orang	40,207,500	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	- ***Orang***	-	***150 Orang***	***40,207,500***	***60.00%***	***60.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan	Jumlah Laporan Stabilitas Ekonomi Masyarakat	250 Orang	135,703,500	150 Orang	81,422,100	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	- ***Orang***	-	***150 Orang***	***81,422,100***	***60.00%***	***60.00%***	BADAN KESBANGPOL
			Rata-rata capaian kinerja (%)								0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-					
			Predikat kinerja								SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR					
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			**224,506,000**		**134,703,600**		**39,936,200**		-		-		-		**35,302,200**	- -	***35,302,200***	- -	***170,005,800***		***75.72%***	BADAN KESBANGPOL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s/d 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					6		7		8		I		II		III		IV		13 = 9+10+11+12		14 = 7 + 13		15 = 14/6x100%		
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			**224,506,000**		**134,703,600**	%	**39,936,200**	%	-	%	-	%	-	%	**35,302,200**	- %	***35,302,200***	- %	***170,005,800***		***75.72%***	BADAN KESBANGPOL
					%		**%**		**100**																
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan a ntar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Untuk cegah Dini dan Deteksi Dini Terkait IPOLEKSOSBUDHANKAM	250	128,523,000		77,113,800	Orang	22,644,600	Orang	-	Orang	-	0 Orang	-	43 Orang		***43 Orang***	***19,523,600***	***193 Orang***	***96,637,400***	***77.20%***	***75.19%***	
					Orang		150 Orang		50		0			-				19,523,600							BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	"Jumlah Dokumen Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah"	250	95,983,000		57,589,800	Orang	17,291,600	Orang	-	Orang	-	0 Orang	-	46 Orang		***46 Orang***	***15,778,600***	***196 Orang***	***73,368,400***	***78.40%***	***76.44%***	BADAN KESBANGPOL
					Orang		150 Orang		50		0			-				15,778,600							
										Rata-rata capaian kinerja (%)	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**59.33**	**88.40**	***59.33***	88.40			
										Predikat kinerja	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**R**	**T**	**R**	**T**			
										JUMLAH PAGU ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**1,986,334,724,658.65**														
										JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										**1,247,888,332,302.65**					
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**5.59**		**7.05**	**12.20**	**17.83**	**12.64**	**16.49**	**44.65**	**21.45**	**75.08**	62.82			**75.37**	**70.95**	
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	**SR**		**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SR**	**SD**	**R**			**SD**	**SD**	

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun demikian, Kabupaten Tanggamus sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih intensif, komprehensif dan lintas sector. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 menitikberatkan kepada penanganan isu strategis pembangunan dan permasalahan yang berkembang dimasyarakat Kabupaten Tanggamus, disamping itu juga harus memperhatikan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Lampung dan Nasional.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah mengacu pada kriteria sebagai berikut :

- mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
- mendukung peningkatankualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan sektor jasa, ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah;
- terintegrasi, sehingga dapat mengefisienkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan
- memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Permasalahan bersumber dari hasil capaian indikator kinerja tahunan yang rendah dan perlu upaya keras untuk perbaikan. Deskripsi dari capaian indikator tersebut memberikan arah untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada. Identifikasi permasalahan pembangunan dikategorikan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program dan kegiatan yang disusun oleh perangkat daerah diharapkan mampu melaksanakan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan ataupun permasalahan yang akan dihadapi. Isu dan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

a. Permasalahan daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan berupa masih belum meratanya infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan :
   - Transportasi darat, antara lain rendahnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan, rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur jaringan jalan, kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas, belum optimalnya kondisi dan penataan sistem hirarki terminal sebagai tempat pertukaran moda transportasi dan jumlah kendaraan yang makin padat pada jalan lintas Barat;
   - Transportasi laut, antara lain kondisi fisik pelabuhan dan fasilitas kurang memadai serta adanya keterbatasan pengembangan karena kondisi alam yang tidak mendukung.

Sedangkan permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi berupa :

- Potensi sumber daya air di Kabupaten Tanggamus yang besar tetapi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri dan kebutuhan domestik;
- Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai;
- Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi yang diakibatkan oelh menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi;

- Kondisi jaringan irigasijuga belum memadai mengingat irigasi dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan.

Permasalahan pada aspek infrastruktur listrik dan energi yaitu berupa rasio elektrifikasi rumah tangga masih belum memadai, yaitu baru mencapai sekitar ± 60%; (2) Penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro, surya dan angin masih sangat terbatas.

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi bekum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel untuk daerah kecamatan dengan kondisi teledensitasnya masih rendah, terutama diwilayah perdesaan.

Permasalahan pada Bidang Penataan Ruang yaitu penyimpangan pemanfaatan ruang yang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.

b. Permasalahan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah sebagai berikut :

- Di Bidang Pendidikan, antara lain beberapa permasalahan mendasar yang memerlukan penanganan segera mencakup : (a) tingkat pendidikan rata-rata masyarakat Kabupaten Tanggamus masih relatif rendah. Di tahun 2021, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus baru mencapai 7,34 tahun; (b) Masih terdapatnya Angka putus sekolah terutama untuk jenjang SD dan SMP; (c) kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing; (d) terjadinya perubahan kewenangan dalam bidang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

- Di Bidang Kesehatan, antara lain : (a) rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah yang diindikasikan dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan; (b) belum optimalnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi bidang kesehatan; (c) Masih terjadinya kasus penderita gizi buruk dan gizi kurang balita; dan (d) Masih adanya kasus yang disebabkan oleh penyakit menular, seperti flu burung, AIDS, dan HIV positif.
- Di Bidang Pemuda dan Olahraga, permasalahan yang dihadapi bidang keolahragaan yaitu pembinaan olahraga yang belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olaharaga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kabupaten Tanggamus dalam pentas kompetisi olahraga nasional dan internasional serta permasalahan masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Sedangkan permasalahan di bidang kepemudaan yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.
- Di Bidang Pemberdayaan Perempuan, masih sangat terbatasnya program/kegiatan yang terkait dengan kesempatan usaha, akses terhadap pendidikan, seringnya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

c. Permasalahan di Bidang Ekonomi adalah pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Beberapa kendala dalam upaya peningkatan investasi Kabupaten Tanggamus, antara lain belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Potensi budaya dan keindahan alam di Kabupaten Tanggamus belum terkelola dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi destinasi pariwisata Kabupaten Tanggamus.

d. Permasalahan pada Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan adalah sebagai berikut :
   - Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata adalah masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Kabupaten Tanggamus. Sedangkan permasalahan bidang pariwisata yaitu belum terkelolanya potensi pariwisata serta belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pariwsiata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar daerah wisata akan pentingnya pengembangan destinasi pariwisata.
   - Di Bidang Sosial yaitu adanya kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial seperti anak terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan, dll. Masih relatif rendahnya peranserta masyarakat dalam penanganan masalah sosial sebagai akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permaslahan sosial, meskipun berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat.

e. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dijumpai antara lain masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat, masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana. Selain itu, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran Perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda.

f. Permasalahan pada Bidang Lingkungan Hidup yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumber energi alternatif yang terbarukan, selain tenaga air. Struktur geologi yang bersifat kompleks menjadikan sebagian wilayah

Kabupaten Tanggamus memiliki kerentanan yang tinggi dari ancaman bencana alam. Sumber penyebab bencana lainnya yaitu masih tingginya intensitas curah hujan yang memicu gerakan tanah terutama di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus seperti Kecamatan Pematang Sawa, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Kota Agung Barat, Kota Agung, Pugung, Talang Padang, Gisting, Cukuh Balak, dan Limau. Permasalahan yang dihadapi adalah masih lemahnya mitigasi bencana alam. Berdasarkan kondisi kualitas air sungai situjuh sungai utama, upaya-upaya pengendalian tingkat pencemaran air yang telah dilakukan masih belum dapat memberikan efek signifikan terhadap pergeseran status mutu air ke tingkat yang lebih baik.

g. Permasalahan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahdan adalah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

2.3.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diidentifikasi pada setiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi setipa SKPD. Identifikasi tersebut menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

Tabel II.132. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
1.	Pendidikan	• Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) masih di bawah RLS dan HLS Provinsi Lampung dan Nasional. • Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah 7,34 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 8,08 tahun dan 8,54 tahun. • Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus pada Tahun	• Belum tercapainya program Wajib Belajar 12 tahun • Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan • Cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah. • Belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan. • Kualitas dan kuantitas

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
		2021 adalah 12,19 tahun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 12,73 tahun dan 13,08 tahun. • Kondisi Ruang Kelas Pendidikan Dasar dengan kondisi baik pada tahun 2021 hanya 33,35%.	terhadap akses dan mutu layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan.
2.	Kesehatan	• Angka Harapan Hidup masih dibawah Provinsi Lampung maupun Nasional. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah 68,67 tahun. Sedangkan Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Nasioanl masing-masing adalah 70,73 tahun dan 71,57. • Kasus kematian bayi di tahun 2021 terdapat 10 kasus kematian bayi. • Kasus kematian ibu, di tahun 2021 terdapat 14 kasus kematian bayi • Terdapat kasus Balita Gizi Buruk, pada tahun 2021 ditemukan 2 Kasus Gizi Buruk. • Jumlah penderita TB masih tergolong tinggi. Pada tahun 2020, terdapat 577 kasus penderita TB, 124 kasus DBD, dll.	• Belum optimalnya pelayanan kesehatan. • Masih rendahnya kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata khususnya pada daerah yang sulit dijangkau • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan bayinya. • Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular. • Masih Kurangnya fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit, dll.
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2021baru mencapai 29,54%. • Irigasi dalam kondisi rusak (ringan, sedang dan berat) masih tinggi sebesar 62,82%.	• Masih rendahnya jalan dalam kondisi baik dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan. • Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi. • Belum optimalnya system drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan. • Belum optimalnya pelayanan infrastruktur

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase). • Keterbatasan APBD untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya.
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	• Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, pada tahun 2021 sebanyak 5.448 unit. • Persentase lingkungan pemukiman kumuh di tahun 2021 sebesar 67,5%	• Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni • Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Pemukiman. • Kawasan/permukiman kumuh yang perlu segera mendapatkan penanganan • Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana pada kawasan pemukiman. • Belum terintegrasinya • Pengembangan kawasan • perumahan dan pembangunan prasarana dan sarana kawasan. • Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan.
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	• Pada tahun 2021, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentrama, keindahan) adalah 87%. Masih terdapat pelanggaran K3 yang belum terselesaikan. • Korban bencana alam pada tahun • 2021 di Kabupaten Tanggamus sebanyak 603 orang. Sedangkan Korban Bencana Sosial sebanyak 69 orang.	• Rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku • Kondisi Kabupaten Tanggamus yang rawan bencana • Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana • Kurangnya dukungan database kebencanaan.
6.	Sosial	• Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 sebesar 11,81% dengan total jumlah penduduk miskin 71.890 jiwa, lebih rendah	• Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi • Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
		daripada tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 12,62% namun lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71%. • Pada tahun 2021, jumlah anak terlantar sebanyak 300 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 1806, Penyandang Disabilitas sebanyak 744	menerima bantuan dari pemerintah. Belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lansia, disabilitas, dan anak terlantar • Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia terlantar • Masih terbatas dan rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan sosial.
7.	Tenaga Kerja	• Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2021 adalah sebesar 68,76%, lebih rendah dari TPAK Provinsi sebesar 69,35%. • Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 adalah sebesar 2,93%. Hal ini karena mayoritas Pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, sehingga tidak terlalu terdampak dengan pengurangan pekerja. • Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan pada tahun 2021 sebesar 0%.	• Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja disektor formal • Kualitas dan kompetensi angkatan kerja belum memadai • Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru • Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan-pelatihan tenaga kerja • Kurangnya variasi dan jenis pelatihan. • Sistim informasi ketenagakerjaan yang belum memadai.
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Pada tahun 2021, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah adalah 55,45%.	• Masih rendahnya partisipasi perempuan di berbagai bidang dan ditemukannya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga. • Belum optimalnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. • Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender. • Kurang Optimalnya Penguatan Karakter Berbasis Keluarga
9.	Pangan	• Pada tahun 2021, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 57,30%. • NTP mengalami pada tahun 2021 adalah 88,03, masih di bawah 100.	• Masih rendahnya Nilai Tukar Petani akibat harga komoditas pertanian rakyat yang mengalami penurunan • Masih adanya beberapa daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan penanganan serius. • Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penyediaan cadangan pangan dan lain-lain
10.	Pertanahan	• Pada tahun 2021, Persentase luas lahan bersertifikat sebanyak 66,5%.	• Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya sertifikasi atas tanah yang dimiliki • Belum ada database pertanahan • Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan. • Belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak • terkait lainya
11.	Lingkungan Hidup	• Indek Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 adalah 63,42.	• Luas tutupan lahan yang semakin berkurang karena perluasan pemukiman penduduk dan kebakaran hutan. • Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup. • Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH. • Masih minimnya bank sampah dan TPS3R. • Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			akan lingkungan bersih dan sehat termasuk dalam penanganan dan pengolahan sampah
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Pada tahun 2021, rasio penduduk ber- KTP persatuan penduduk sebesar 74,09%.	• Ada sebagian masyarakat yang sudah menikah akan tetapi tidak memiliki akta nikah, atau tidak dicatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. • Terbatasnya sarana prasana dan SDM pengelola data dalam pelayanan adminduk.
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Pada tahun 2021, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayan masyarakat (LPM) sebesar 85%. • Sedangkan wadaya Masyarakat terhadap program pemberdayan masyarakat sebesar 80%.	• Lemahnya kompetensi aparatur yang dimiliki BPM Kabupaten Tanggamus belum sepenuhnya professional dan memiliki kompetensi khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. • Dukungan kebijakan baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. • Masih lemahnya kapasitas Pemerintah Pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat; • Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan mengembangkan usaha

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya.
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Persentase akseptor KB MKJP pada tahun 2020 adalah 38,39%.	• Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana. • Jumlah PLKB sangat kurang, idealnya 1 pekon 1 PLKB. • Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
15.	Perhubungan	• Pada tahun 2020 terdapat 6 buah/lokasi Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis.	• Belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas yang ada. • Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan tranportasi. • Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik. • Belum optimal dan meratanya pembangunan di seluruh wilayah baik menyangkut fisik maupun sistem manajemen transportasi yang dikembangkan • Masih adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan mengingat kondisi geografis yang tidak mendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akhir-akhir ini menurun.

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
16.	Komunikasi dan Informatika	• Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 adalah 26% • Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2021 adalah 66%.	• Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. • Belum optimalnya integrasi system informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kab. Tanggamus. • Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang beberapa wilayahnya berbukit-bukit, sehingga terdapat wilayah *blank spot* (tidak terjangkau melalui media elektronik) dan daya akses informasi masyarakat yang masih cukup rendah sebagai akibat masih rendahnya kemampuan di bidang teknologi informasi. • SDM yang menangani Informasi dan komunikasi masih dirasakan kurang dalam penguasan teknologi Informasi. • Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	• Persentase koperasi aktif pada tahun 2021 sebesar37,45%, menurun dari tahun 2020 dengan persentase sebesar 50,73%. • Persentase BPR/LKM aktif pada tahun 2021 sebanyak 4,21%.	• Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMKM. • Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik • Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengelola usahanya. • Keterbatasan modal pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah disebabkan terbatasnya akses pembiayaan modal bagi koperasi dan UMKM yang mengakibatkan sulitnya pelaku usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah menjalankan dan mengembangkan

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			usahanya. • Lemahnya akses usaha kecil dan menengah dalam memasuki pasar. • Kurangnya kerja sama pelaku usaha koperasi dan UKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga
18.	Penanaman Modal	• Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) pada tahun 2021 adalah 13 investor, tidak mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. • Kenaikan Nilai Realisasi PMDN tahun 2021 sebesar 49,88 %.	• Belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah • Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah • Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan untuk mendukung investasi di Kabupaten Tanggamus
19.	Kepemudaan dan Olah Raga	• Persentase organisasi pemuda yang aktif tahun 2021 sebesar 52%. • Cakupan pembinaan olahraga 80%.	• Sangat terbatasnya sarana dan prasarana olahraga serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja • Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan • Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan • Kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda. • Minimnya pencapaian prestasi olahraga.
20.	Statistik	• Ketersediaan dokumen statistic : 1. Tanggamus Dalam Angka 2. PDRB Tanggamus	• Masih rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral • Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders)* maupun antar instansi dalam proses pengumpulan data bagi perencanaan pembangunan. • Belum optimalnya dukungan seluruh SKPD

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			yang terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat. • Ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan.
21.	Persandian	• Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah tahun 2021 adalah 12%.	• Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi. • Belum terlaksananya tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasian, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal.
22.	Kebudayaan	• Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2021 adalah 67%. • Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2021 sebanyak 1 karya budaya.	• Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya local Tanggamus. • Kurang optimalnya promosi budaya local Tanggamus di dalam dan luar negeri. • Belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya, sehingga pembinaan dan pengembangan kebudayaan hanya mengandalkan personil yang tersedia. • Belum tersedianya anggaran untuk program pelestarian benda cagar budaya.
23.	Perpustakaan	• Perpustakaan daerah 1 unit, rendahnya minat baca dengan jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2021 sebanyak 2.879 orang. • Jumlah koleksi judul buku tahun 2021 sebanyak 561 buku.	• Keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah. • Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Pelaksanaan perpustakaan keliling yang diminati

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			masyarakat belum bisa menjangkau ke wilayah kecamatan se-Kabupaten Kabupaten Tanggamus.
24.	Kearsipan	• Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku tahun 2021 sebesar 40%. • SDM pengelola kearsipan tahun 2021 sebanyak 2 orang	• Terbatasnya tenaga fungsional baik pustakawan maupun arsiparis berakibat pelayanan kepada masyarakat maupun kepada SKPD khususnya dalam hal pembinaan menjadi kurang optimal. • Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur akan pentingnya pengelolaan arsip • Selama ini pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip masih kurang. Arsip dipahami hanya sebatas proses surat menyurat dan selanjutnya menjadi tumpukan dokumen yang tidak berarti yang harus disingkirkan. Pemahaman yang kurang ini menjadi penyebab kurangnya kepedulian terhadap pengelolaan arsip yang terjadi pada sebagian besar SKPD. • Disamping itu, ketidakpedulian terhadap arsip juga dicerminkan dari anggaran SKPD yang sering luput mengalokasikan anggaran untuk sarana pendukung pengelolaan arsip. Hal tersebut menjadi kendala bagi petugas arsip SKPD untuk bisa mengelola arsip instansinya secara baik karena tidak memperoleh dukungan sarana prasarana kearsipan yang memadai.
25.	Kelautan dan Perikanan	• Produksi perikanan Tangkap dan Budidaya tahun 2021 sebesar 32.036,45 Ton. • Cakupan bina kelompok nelayan tahun 2021	• Sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai • Sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik aparatur dan nelayan

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
		sebesar 27%	kapasitasnya masih kurang. • Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan • Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
26.	Pariwisata	• Pertumbuhan Kunjungan wisata 45%	• Masih rendahnya investasi di sektor pariwisata • Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta akses menuju destinasi wisata • Pemasaran dan promosi wisata dirasa masih lemah dan terkendala tiadanya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi baik SDM maupun perangkat/peralatannya, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas promosi. • Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat. • Belum tersedianya anggaran untuk menata kawasan pantai meliputi percontohan penataan kios, percontohan pengelolaan sampah, dan percontohan pengelolaan limbah. • Masih terbatasnya fasilitas objek wisata yang belum memadai antara lain: areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata/cinderarasa serta terbatasnya jaringan listrik.
27.	Pertanian	• Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB tahun 2021 sebesar 43,48%. • Ketersediaan pangan utama tahun 2021 sebesar 191.426 ton, menurun dari	• Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan. • Belum optimalnya akses maupun penggunaan oleh masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam hal pengolahan

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
		tahun sebelumnya. • Cakupan bina kelompok petani tahun 2020 sebesar 68%.	lahan dan pengolahan hasil pertanian. • Masih banyak petani dan peternak yang belum memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian. • Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. • Terbatasnya tenaga medik veteriner dan dokter hewan Poskeswan/Laboratorium Kesehatan Hewan • Keterbatasan keberadaan sapronak karena tergantung pabrik luar daerah.
28.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Pada tahun 2021, Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah 97,05%. • Rasio ketersediaan daya listrik sebesar 96,65%.	• Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT). • Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian daerah terisolir/terpencil. • Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral. • Kurangnya kesadaran dan wawasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan energi dan sumber daya mineral. • Masih ditemukannya kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin/penambagan liar. • Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berwawasan lingkungan.
29.	Perdagangan	• Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2020 sebesar 17,60%. • Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tahun 2020 sebesar 12,03%.	• Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus ke luar daerah dan nasional masih terbatas. • Masih rendahnya kontribusi sector perdagangan erhadap PDRB. • Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusah mengenai potensi pasar produk daerah, masih

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang ada sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat. • Bertambahnya ritel-ritel modern di beberapa kota kecamatan berpengaruh terhadap perkembangan pasar tradisional. • Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar kurang terjaga, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen di pasar tradisional.
30.	Perindustrian	• Cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2020 sebesar 14,21%.	• Terbatasnya pengetahuan pengrajin/pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha juga masih terbatas. • Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perdagangan masih rendah. • Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas.
31	Transmigrasi	• Pada tahun 2021 tidak ada masyarakat yang mengikuti program transmigrasi	• Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah. • Kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi juga terbatas sehingga ketika secara kuantitas calon transmigran terpenuhi, belum dibarengi

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
			dengan kuota yang tersedia di daerah tujuan transmigrasi. • Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman dan sarana pendukung di lokasi transmigrasi.
32.	Perencanaan	• Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD yang mencapai persentase 100%.	• Belum adanya sinergitas antar SKPD terhadap dokumen perencanaan daerah secara optimal. • Adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun oleh daerah. • Belum optimalnya basis data yang dikelola oleh statistik yang akan dipergunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan.
33.	Keuangan	• Sejak tahun 2017-2021 Kabupaten Tanggamus telah memperoleh Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak (WTP) 5 (kali) kali, yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.	• Masih besarnya tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan. • Belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendanaan pembangunan daerah. • Terbatasnya aparatur yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan. • Ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas sehingga mengakibatkan kegiatan yang direncanakan, khususnya pada awal tahun anggaran tidak semuanya dapat terlaksana sesuai dengan time *schedule* yang telah ditetapkan.
34.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	• Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural pada tahun	• Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir dan kapasitas ASN seperti diklat dan

No.	Urusan	ANALISIS	Permasalahan
		2021 hanya sebesar 25%. • Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 sebesar 25%.	kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi karena sumber daya APBD yang terbatas. • Perubahan peraturan di bidang pemerintahan daerah yang berdampak pada bidang kepegawaian membutuhkan antisipasi penataan Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada analisis beban kerja di setiap SKPD. • Belum optimalnya manajemen informasi sistem kepegawaian yang ada disetiap SKPD. • Masih kurangya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
35.	Penelitian dan Pengembangan	• Persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 87%. • Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 77%. • Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 76%.	• Belum optimalnya peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan karena kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait. • Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas. • Belum optimalnya inovasi daerah yang dilakukan oleh SKPD maupun *stakeholders* lainnya dalam peningkatan pelayanan publik maupun pemerintahan.
36.	Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	• Persentase tindak lanjut temuan 96,7%.	• Masih terbatasnya sumber daya aparatur khususnya auditor dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). • Masih kurangnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah untuk mendukung kinerja yang optimal. • Belum optimalnya pelayanan publik di daerah.

Sumber : Data diolah dan hasil analisis, 2022

2.3.3 ISU STRATEGIS

Identifikasi isu strategis merupakan inti dari proses perencanaan strategis. Isu strategis berperan penting dalam pengambilan keputusan politis. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu tersebut ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan, dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan.

Salah satu permasalahan yang muncul sejak awal tahun 2020 dan berdampak sangat besar terhadap identifikasi isu strategis yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memiliki dampak sangat besar terhadap pembangunan Nasional khususnya pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus. Asumsi-asumsi target makro ekonomi yang sebelumnya disusun dalam target RPJMD 2018-2023 mengalami perubahan signifikan.

Permasalahan tersebut juga akan berdampak terhadap pendapatan negara khususnya daerah dikarenakan aktivitas ekonomi yang lesu.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD serta mempertimbangkan Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDG's, maka terdapat beberapa isu strategis pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Pilar Ekonomi :

1. Pemulihan Ekonomi, terutama Sektor UMKM dan sektor informal lainnya akibat dampak *Covid-19* yang pada tahun 2021 hanya tumbuh 2,3%;
2. Peningkatan Nilai Tambah sektor pertanian dan perikanan yang pada tahun 2021 terkontraksi sebesar -2,7%;
3. Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata dalam daya dukung perekonomian Tanggamus yang pada tahun 2021 sebesar 1,80%;

4. Peningkatan Realisasi Investasi untuk optimalisasi pertumbuhan ekonomi Tanggamus;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus untuk pendongkrak pertumbuhan ekonomi Tanggamus;
6. Pengendalian dan Stabilitas Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan pasokan bahan pangan pokok.

B. Pilar Sosial :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan, yang mana saat ini angka kemiskinan sebesar 11,81% masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata Nasional;
2. Peningkatan IPM, karena masih rendahnya capaian IPM Kabupaten Tanggamus sebesar 66,65 jika dibandingkan baik dengan Provinsi Lampung maupun Nasional.
3. Pencapaian Kabupaten ODF. Sampai dengan tahun 2021, baru 52 Pekon dari 302 Pekon/Kelurahan (17,21%) yang berstatus Pekon ODF. Sedangkan Prevalensi Stunting berdasarkan SSGI 2021 sebesar 25%.
4. Peningkatan Konektivitas Wilayah. Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten baru mencapai 51,09% hal tersebut masih terkendala dengan terbatasnya kemampuan pembiayaan penanganan ruas jalan.

C. Pilar Hukum dan Pemerintahan :

1. Peningkatan Pelayanan Publik. Saat ini Kualitas Pelayanan Publik masih berada pada nilai 3,57. Upaya peningkatannya melalui pelayanan RATU (Ramah, Amanah, Tegas dan Unggul) pada setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kualitas SPBE saat ini masih berada diangka 1, sehingga terus diupayakan untuk pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan;
3. Peningkatan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Saat ini persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih berada pada

angka 13,41%. Oleh karena itu fokusnya untuk mkewujudkan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis.

D. Pilar Lingkungan :

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Saat ini, Indeks Kuaiitas Lingkungan Hidup baru mencapai 63,08 (Kategori Kurang) oleh karena itu perlu peningkatan kualitas air, udara dan tututan lahan;
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dengan minimal menurunkan Emisi GRK 6,5% pada tahun 2022.
3. Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana. Dengan Indeks Risiko Bencana 127,96 Tanggamus sebagai daerah rawan bencana memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran-sasaran terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kualitas lingkungan tempat dimana masyarakat melakukan aktifitas ekonomi.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak dapat terlepas dengan keadaan perekonomian Provinsi Lampung, Nasional bahkan perekonomian global, hal tersebut karena perekonomian Kabupaten Tanggamus yang merupakan bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian dunia yang terbuka (globalisasi ekonomi). Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan di tingkat daerah, seperti : kebijakan pemerintah yang menyangkut sektor moneter maupun kebijakan ekonomi sektor fiskal, serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, naik turunnya nilai tukar mata uang asing, maupun pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global yang akan berdampak pada kelesuan pasar di dalam dan di luar daerah; disamping eksternalitas yang terkait dengan faktor cuaca ataupun bencana alam dan bencana non alam seperti pandemik *corona virus disease 2019*.

Upaya memperkuat perekonomian Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengembangkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki dengan orientasi kepada skala ekonomi nasional dan global. Di lain sisi, ekonomi berbasis agro juga akan terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan penguasaan teknologi dan penguasaan informasi pasar. Selain itu kebijakan ekonomi daerah akan diarahkan pada peningkatan investasi baru baik dalam maupun luar negeri yang dipacu untuk memperluas kesempatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang konsumsi. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya juga diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Target yang ingin dicapai sehubungan dengan penetapan kebijakan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, antara lain:

1) Menciptakan kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi kemiskinan;

   Kebijakan perekonomian daerah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang tinggi diarahkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah pengangguran yang terjadi dan memiliki kompleksitas yang tinggi serta berpengaruh kepada kondisi sosial, politik maupun budaya daerah. Melalui kebijakan ini, diharapkan terjadi penurunan jumlah/tingkat pengangguran sampai dengan titik *full employment.* Semakin banyak penduduk yang memiliki pekerjaan, akan semakin banyak penduduk yang memiliki penghasilan; pada keadaan tersebut secara kuantitatif diharapkan dapat berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Lebih lanjut, produktifitas tenaga kerja juga harus ditingkatkan, yang diikuti dengan semakin bertambahnya jumlah pekerja formal dan keseimbangan demand dan supply di pasar kerja.

2) Meningkatkan kapasitas perekonomian daerah;

   Upaya meningkatkan fundamental ekonomi masih menghadapi tantangan. Kapasitas perkonomian yang diharapkan tumbuh tinggi

mengalami kendala output potensialnya. Sumber-sumber potensial perekonomian Kabupaten Tanggamus belum didukung ketersediaan dan pemerataan infrastruktur maupun kualitas SDM. Untuk mencapai kapasitas ekonomi yang optimal, struktur perekonomian perlu didukung dengan peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan berusaha dan akses sumber-sumber pendanaan serta infrastruktur kewilayahan yang baik dan penguasaan teknologi.

3) Meningkatkan pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat;
Pendapatan perkapita secara umum diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pendapatan dengan jumlah penduduk. Namun satu hal yang lebih berarti adalah jika meningkatnya pendapatan masyarakat terjadi sebagai akibat dari meningkatnya produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan. Meningkatnya pendapatan perkapita tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang berarti meningkatkan sisi konsumsi pada sisi permintaan sekaligus mendorong pergerakan pada sisi penawaran.

4) Menciptakan kondisi perekonomian daerah yang stabil;
Kestabilan yang diharapkan meliputi 3 (tiga) hal yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja serta ketersedian barang dengan tingkat harga yang wajar. Kestabilan ekonomi yang diharapkan adalah kondisi dimana nilai fluktuatif variabel ekonomi yang terjadi tidak bersifat *booming* namun bergerak dalam kondisi dan batas yang wajar yang masih mampu ditoleransi oleh sektor ekonomi produktif.

5) Pemerataan distribusi pendapatan;
Pertumbuhan ekonomi telah menjadi salah satu ukuran utama makro ekonomi dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dijalankan sepanjang periode waktu tertentu. Namun ukuran kinerja perekonomian daerah tersebut akan semakin lebih baik jika dilengkapi dengan menurunnya disparitas pendapatan (*equality of income*).

Sebelum menguraikan tentang kerangka ekonomi daerah Kabupaten Tanggamus berikut ini sekilas dijabarkan mengenai kondisi perekonomian Indonesia dan Provinsi Lampung dalam kerangka ekonomi Pulau Sumatera.

3.1.1 Tantangan dan Risiko Perekonomian

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif melambat ditengah ancaman dari varian baru covid-19 serta kenaikan inflasi dan ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 3,2 persen pada tahun 2023 dikarenakan dukungan fiscal dan moneter diseluruh dunia mulai dicabut. Pesatnya penyebaran Covid-19 varian baru Omicron menunjukkan bahwa pandemi kemungkinan akan terus mengganggu aktivitas ekonomi dalam waktu dekat. Selain itu, perlambatan yang signifikan terjadi di negara-negara ekonomi utama, termasuk Amerika Serikat dan China, akan membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang.

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dan cukup untuk memulihkan output dan investasi ke tren pra-pandemi di negara-negara berkembang, pertumbuhan diperkirakan akan turun dari 6,3 persen pada tahun 2021 menjadi 4,6 persen pada tahun 2022 dan 4,4 persen pada tahun 2023.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2022, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batu bara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang lebih mengarah ke Green Recovery. Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2023. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2023. Akibat pandemi COVID-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (*capital outflow*) dari *emerging markets*, termasuk salah satunya Indonesia.

Outlook Ekonomi Indonesia Dampak perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya likuiditas global. Sementara itu, harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan negara, meskipun terdapat resiko tekanan inflasi yang semakin tinggi dibeberpa negara mitra dagang Indonesia. Dalam upaya mengatasi permasalahan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, pemerintah akan mengupayakan distribusi belanja bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak seiring dengan peningkatan pendapatan negara yang didorong oleh peningkatan harga komoditas. Sehingga, tahun 2022 diharapkan dapat terus melanjutkan momentum Pemulihan Ekonomi Indonesia.

Gambar III.1 Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2022



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

Dengan menggunakan skenario *Business As Usual* (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca COVID-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. TFP Index Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir dan berada pada tingkat sebesar 0,90 pada tahun 2019. Selanjutnya dibandingkan dengan negara lain, rata-rata tahunan TFP Indonesia tahun 2010–2019 tergolong rendah dan berada pada zona negatif. Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Sehingga Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan sebagai *"Game Changer"* untuk menuju Indonesia Maju.

Sasaran Ekonomi Makro Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries. Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pasca pandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0–4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US$ berada pada rentang Rp13.800,00–Rp15.000,00 per US$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3–6,0 persen.

Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375–0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31– 73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga

tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103–105 dan NTN pada kisaran 106–107.

Arah Kebijakan Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Perkiraan vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (*herd immunity*) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor juga didorong untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (*between sectors*). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industry dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan social

ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian.

Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID-19 harus dilakukan.

Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan akan mampu tumbuh 5,3–5,9 persen. Investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian Indonesia. Tren investasi hijau akan semakin menguat pada tahun 2023 seiring dengan adanya komitmen global untuk mencapai pembangunan rendah karbon. Pemulihan ekonomi hijau pasca COVID-19 mulai menjadi arah kebijakan di berbagai negara.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, investasi (PMTB) diprakirakan tumbuh sebesar 6,1–6,7 persen, dengan target realisasi PMA dan PMDN sebesar Rp1.250–1.400 triliun pada tahun 2023. Untuk mencapai target tersebut, strategi akan diarahkan melalui (1) peningkatan investasi skala besar yang menyerap tenaga kerja banyak; (2) peningkatan investasi pada sektor industri pengolahan; dan (3) pengintegrasian sistem perizinan di tingkat pusat pada sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) dan implementasi sistem perizinan melalui sistem One Single Submission (OSS) di daerah. Konsumsi masyarakat juga diprakirakan tumbuh positif mencapai 4,9–5,5 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan terkendalinya penanganan pandemic COVID-19. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tetap terkendali juga mendorong masyarakat untuk melakukan aktivitas konsumsi.

Selain itu, membaiknya perekonomian juga mendorong tumbuh positifnya konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah diprakirakan tumbuh pada kisaran 0,6–1,2 persen, sehingga tetap dapat memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didukung oleh kebijakan fiskal yang akomodatif, meski di saat yang bersamaan defisit fiskal akan kembali dijaga di bawah 3 persen per PDB. Ekspor barang dan jasa diprakirakan akan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 6,8–8,0 persen. Pemulihan permintaan global serta optimisme pemulihan ekonomi yang terus berlanjut menjadi faktor pendorong tetap tingginya pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor barang dan jasa diprakirakan akan tumbuh 6,6–7,8 persen, mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang menguat.

Hal ini didorong oleh peningkatan kebutuhan bahan baku/penolong untuk industry pengolahan, barang modal untuk investasi, serta konsumsi dalam negeri.

Tabel III.1. Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2023 (Persen)

Uraian	RPJMN[a)]	Sasaran 2023[b)]	Sumber Pertumbuhan
Pertumbuhan PDB	**6,0–6,3**	**5,3–5,9**	**5,3–5,9**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9–4,0	4,0–4,2	0,5–0,5[c)]
Pertambangan dan Penggalian	2,0–2,1	3,2–3,5	0,2–0,3
Industri Pengolahan	7,1–7,5	5,4–6,0	1,1–1,2
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,5–6,0	5,6–6,0	0,1–0,1[c)]
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,7–4,8	5,4–5,7	0,0–0,0[c)]
Konstruksi	6,4–6,7	6,3–6,9	0,6–0,7
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,2–6,7	5,0–5,6	0,7–0,7[c)]
Transportasi dan Pergudangan	7,5–7,9	8,5–9,5	0,3–0,4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,5–6,7	6,6–7,3	0,2–0,2[c)]
Informasi dan Komunikasi	8,9–9,4	7,9–8,3	0,5–0,5[c)]
Jasa Keuangan	7,1–7,7	3,4–3,8	0,1–0,2
Real Estate	5,3–5,3	4,3–4,8	0,1–0,1[c)]
Jasa Perusahaan	8,5–8,7	4,7–5,3	0,1–0,1[c)]
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	5,2–5,5	2,3–2,6	0,1–0,1[c)]
Jasa Pendidikan	5,5–5,6	3,3–3,8	0,1–0,1[c)]
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,4–8,5	8,7–9,3	0,1–0,1[c)]
Jasa Lainnya	9,6–9,6	5,9–6,5	0,1–0,1[c)]

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan :a) RPJMN Tahun 2020–2024;
b) Perhitungan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, 2022; dan
c) Perbedaan angka desimal dalam range terjadi pada dua hingga empat angka di belakang koma.

Di sisi lapangan usaha, subsektor industri diprakirakan dapat mengalami pemulihan secara bertahap, baik dari sisi rantai pasok dan akses pasar seiring dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan diprakirakan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen. Faktor-faktor pendorong pertumbuhan industry pengolahan pada tahun 2023 antara lain (a) pemulihan industri makanan dan minuman seiring dengan pemulihan mobilitas dan daya beli masyarakat; (b) pemulihan daya beli masyarakat terutama untuk produk makanan, minuman, tekstil dan pakaian jadi, serta produk-produk tahan lama (durable); (c) dukungan belanja pemerintah dan pemerintah daerah untuk produk dalam negeri; (d) peningkatan utilisasi produksi; (e) peningkatan efisiensi sejalan dengan adopsi teknologi dalam proses produksi; serta (f) percepatan transisi penerapan industri hijau.

Sektor pertanian yang mampu bertahan dan tumbuh positif selama pandemi COVID-19, diprakirakan akan terakselerasi dengan pertumbuhan pada kisaran 4,0–4,2 persen. Pertumbuhan sektor pertanian didorong oleh berlanjutnya kebijakan pengembangan Food Estate (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian. Sementara itu, sektor konstruksi diprakirakan akan tumbuh tinggi pada kisaran 6,3–6,9 persen, didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya. Sektor pertambangan akan meningkat pada kisaran 3,2–3,5 persen, seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non–migas dan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) yang memerlukan logam dasar. Sektor perdagangan akan pulih dan diprakirakan tumbuh pada kisaran 5,0–5,6 persen, didorong oleh semakin pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat serta semakin kuatnya peran UMKM.

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi diprakirakan akan tumbuh sebesar 7,9–8,3 persen, didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peningkatan produktivitas di sektor pariwisata akan didorong oleh pertumbuhan sector penyediaan akomodasi dan makan minum sejalan dengan pemulihan mobilitas masyarakat. Sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum akan meningkat pada kisaran 6,6–7,3 persen, didukung oleh pelaksanaan event dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisman dan wisnus. Pembukaan Bali juga menjadi momentum bagi pembukaan destinasi pariwisata prioritas sejalan dengan perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara.

Produktivitas di sektor ekonomi kreatif diprakirakan akan lebih cepat tumbuh seiring dengan penguatan industri berbasis konten dan peningkatan konsumsi produk kreatif lokal. Secara terperinci, produktivitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditentukan oleh (a) perbaikan kondisi kesehatan di Indonesia dan negara sumber wisatawan mancanegara; (b) peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian masyarakat di dalam negeri dan mancanegara; (c) pemulihan daya beli masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan tersier seperti pariwisata dan produk kreatif; (d) peningkatan investasi khususnya di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang telah didukung penyediaan infrastruktur yang memadai; (e) peningkatan penyelenggaraan event, festival, MICE, serta produksi film dan musik; (f) percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif; dan (g) perkembangan start-up ekonomi kreatif dan digital yang dijalankan oleh generasi muda di berbagai wilayah.

Sektor perdagangan di dalam negeri akan diarahkan untuk mendorong perkuatan ekosistem perdagangan dan pemanfaatan teknologi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas perekonomian. Hal ini akan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi utama, yakni (a) penguatan logistik nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok melalui integrasi data pasokan antarpulau/antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana perdagangan dalam negeri, (b) pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan, serta (c) peningkatan persaingan usaha dan perlindungan konsumen melalui penguatan iklim persaingan usaha yang sehat dan redesain program perlindungan konsumen yang lebih bersifat multi channel. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan tidak

hanya untuk meningkatkan kapasitas penjualan pelaku usaha perdagangan semata, namun adopsi teknologi informasi juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional secara keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan penyiapan ekosistem dan mekanisme pengawasan pelaku usaha yang efektif guna menjamin perkembangan teknologi digital dapat tetap selaras dengan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.

Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui strategi (a) perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan yang baik; (b) pengembangan pola perjalanan yang mudah diakses; (c) penguatan rantai pasok dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; (d) peningkatan diversifikasi atraksi di 5 Destinasi Super Prioritas dengan dukungan investasi pariwisata, event dan MICE; (e) penguatan desa wisata melalui penguatan narasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan diversifikasi produk dan layanan; (f) percepatan digitalisasi usaha dan produk kreatif; (g) scaling-up start-up ekonomi kreatif dan digital; (h) upskilling dan reskilling SDM pariwisata serta ekonomi kreatif dan digital; (i) penguatan ekspor gastronomi melalui "Indonesia *Spice Up The World*"; serta (j) perluasan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

Pada tahun 2023, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diprakirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Akselerasi pertumbuhan ekonomi KTI merupakan kontribusi dari membaiknya kinerja pertambangan, dampak program hilirisasi pertambangan yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, mulai beroperasinya Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, operasionalisasi smelter baru, implementasi program lumbung ikan nasional, serta kinerja food estate.

Meskipun pertumbuhan KBI diproyeksikan lebih rendah dibandingkan KTI, namun tetap menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diprakirakan akan didorong oleh adanya peningkatan volume ekspor seiring dengan tetap tingginya harga komoditas

CPO dan batu bara. Hal ini didukung oleh adanya komitmen perjanjian perdagangan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan kerja sama Indonesia dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Beroperasinya beberapa KI/KEK, berlanjutnya pembangunan proyek jalan Tol Trans Sumatera, dan peningkatan investasi swasta dalam proses hilirisasi industri, juga akan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan tumbuh sebesar 4,7–5,2 persen pada tahun 2023. Aktivitas ekonomi ini diharapkan dapat juga berdampak secara inklusif untuk seluruh penduduk terutama penduduk miskin dan rentan sehingga dapat menyumbang pada penurunan kemiskinan sebesar 8,2–8,6 persen. TPT di Wilayah Sumatera pun diprakirakan menurun menjadi 4,6–5,3 persen.

Tabel III. 2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2023 (Persen)

Wilayah	RPJMN[a]	2023[b]
Sumatera		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	4,7–5,2
Tingkat Kemiskinan (%)	7,76[c]	8,2–8,6
Tingkat Pengangguran (%)	3,6	4,6–5,3
Jawa-Bali		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,3–5,8
Tingkat Kemiskinan (%)	6,50[c]	6,9–7,6
Tingkat Pengangguran (%)	4,1	6,0–6,7
Nusa Tenggara		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,0	5,1–5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	12,75[c]	13,8–14,8
Tingkat Pengangguran (%)	2,1	2,7–3,1
Kalimantan		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	5,5–6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	3,72[c]	4,3–5,1
Tingkat Pengangguran (%)	3,4	4,5–5,2

Wilayah	RPJMN[a)]	2023[b)]
Sulawesi		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,6	7,1–7,8
Tingkat Kemiskinan (%)	7,74[c)]	8,3–8,8
Tingkat Pengangguran (%)	3,5	4,2–4,8
Maluku		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,3	9,2–10,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,45[c)]	10,6–11,4
Tingkat Pengangguran (%)	4,6	5,4–5,9
Papua		
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,6	7,3–8,4
Tingkat Kemiskinan (%)	18,67[c)]	22,0–23,6
Tingkat Pengangguran (%)	2,5	3,4–3,8

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Keterangan: a) Pertumbuhan ekonomi merupakan rata-rata tahun 2020–2024, sementara tingkat pengangguran merupakan target 2024 pada RPJMN Tahun 2020–2024;

b) Prakiraan Kementerian PPN/Bappenas, Februari 2022;

c) Trajectory RPJMN Tahun 2020-2024 di tahun 2023.

3.1.2 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Pengembangan wilayah tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi social ekonomi masyarakat dan daerah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali.

Tujuan Pengembangan Wilayah Sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2022, pengembangan wilayah pada tahun 2023 ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wilayah juga bertujuan untuk memperbaiki rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, dan meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian masing-masing wilayah. Dalam perspektif kesinambungan transformasi

sosial ekonomi nasional, pengembangan wilayah diarahkan untuk semakin memperkuat integrasi perekonomian domestik dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan wilayah dilakukan melalui pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan ketahanan terhadap bencana.

Secara umum, pemantapan pemulihan ekonomi dan transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk memperkuat rantai nilai di daerah, meningkatkan produktivitas komoditas unggulan wilayah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat konektivitas dan perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah mendorong realisasi investasi, khususnya di kawasan-kawasan strategis, melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Salah satu syarat agar sistem perizinan investasi OSS berjalan dengan efisien adalah terintegrasinya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam format digital. Oleh karena itu, penuntasan RDTR pada kawasan-kawasan strategis menjadi prioritas.

Upaya peningkatan daya tarik dan daya saing kawasan-kawasan strategis tersebut dilakukan dengan memadukan penyediaan paket insentif fiskal bagi pelaku usaha, penuntasan tata ruang dan penyediaan lahan/tanah, percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan, dan berbagai inisiatif badan usaha, termasuk badan usaha swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengembangan kawasan perkotaan, baik Wilayah Metropolitan (WM), kota besar, kota sedang, kota kecil, kota baru, Ibu Kota Nusantara (IKN), maupun kawasan perkotaan di dalam wilayah kabupaten diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan dan simpul pembentukan rantai nilai wilayah, serta pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Pembangunan perkotaan akan difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, penguatan kerja sama antara kota-kota utama dan kota-kota penyangganya, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pemenuhan layanan infrastruktur.

Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pada tahun 2023, pemerataan pembangunan antarwilayah akan dilakukan dengan meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Langkah ini akan dilakukan dengan memadukan kebijakan afirmatif pemerintah dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal khususnya di kawasan dan daerah yang relatif Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Fokus pemerataan pembangunan wilayah pada tahun 2023 adalah percepatan penyediaan pelayanan dasar di daerah 3T, khususnya di pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan di kawasan rawan bencana, serta kebijakan afirmatif peningkatan konektivitas daerah 3T dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terdekat.

Upaya pencapaian tujuan-tujuan pengembangan wilayah di atas perlu antisipasi tantangan dan risiko yang bersifat eksternal maupun domestik (nasional dan lokal). Isu-isu eksternal yang sudah diidentifikasi di subbab Tantangan dan Risiko Perekonomian berupa risiko berkepanjangannya pandemi COVID-19 dan efek luka yang ditimbulkannya pada perekonomian, instabilitas politik di Eropa (Rusia-Ukraina), kenaikan harga energi di pasar global, dan transisi kebijakan energi di Cina pada tingkat lokal. Selain itu, diperkirakan terdapat tantangan dan risiko peningkatan kesenjangan digital antarwilayah, ketidaksesuaian antara sisi penawaran skill angkatan kerja dan kebutuhan baru dunia usaha dalam pasar kerja pascapandemi, ketidaksiapan pelaku UMKM mengadopsi standar baru kesehatan, instabilitas harga kebutuhan pokok, belum pulihnya daya beli masyarakat, backlog pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur wilayah, serta ketidaksiapan daerah mengantisipasi risiko bencana dan perubahan iklim.

Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian pembangunan wilayah pada (Pembangunan Wilayah Tahun 2021 dan 2022), tantangan dan risiko domestik serta eksternal, dan sasaran pembangunan wilayah sebagaimana ditunjukkan dalam secara khusus strategi pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis wilayah pulau atau kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi unggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Sumatera,

Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua. Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur di antara ketujuh wilayah tersebut memerlukan penyesuaian-penyesuaian strategi pertumbuhan, pemerataan, dan mitigasi bencana untuk masing-masing wilayah. Penyesuaian strategi pengembangan wilayah di sini terutama didasarkan pada tingkat kesiapan masyarakat dan dunia usaha, kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat diversifikasi ekonomi di daerah. Sedangkan penyesuaian strategi mitigasi bencana dilakukan dengan mempertimbangkan besaran risiko bencana alam wilayah seperti ancaman gempa tektonik, tsunami, dan erupsi gunung berapi, dan menekan risiko bencana akibat perbuatan manusia, seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan, serta mengantisipasi risiko bencana nonalam seperti wabah penyakit (pandemi).

Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memperkuat peran Sumatera sebagai lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan mitigasi serta adaptasi bencana; (2) memacu pertumbuhan sektor industri, khususnya hilirisasi industri berbasis komoditas unggulan, dan sektor pariwisata pascapandemi COVID-19 melalui pengembangan strategis di Pulau Sumatera yang berdaya saing internasional; (3) mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir barat Sumatera dan daerah rawan bencana melalui pengembangan daerah 3T; dan (4) mewujudkan Wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Industrialisasi di Wilayah Sumatera bertumpu pada hilirisasi komoditas-komoditas utama wilayah, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao, tebu, serta perikanan tangkap dan budi daya. Selama ini sebagian besar komoditas-komoditas tersebut diekspor ke luar wilayah dalam bentuk bahan mentah sehingga potensi nilai tambah yang cukup besar dari proses pengolahan menjadi produk turunan tidak dapat diperoleh.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2023 adalah (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan adanya pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Tabel. III.3. Target Pengembangan Wilayah Sumatera Per Provinsi Tahun 2023 (Persen)

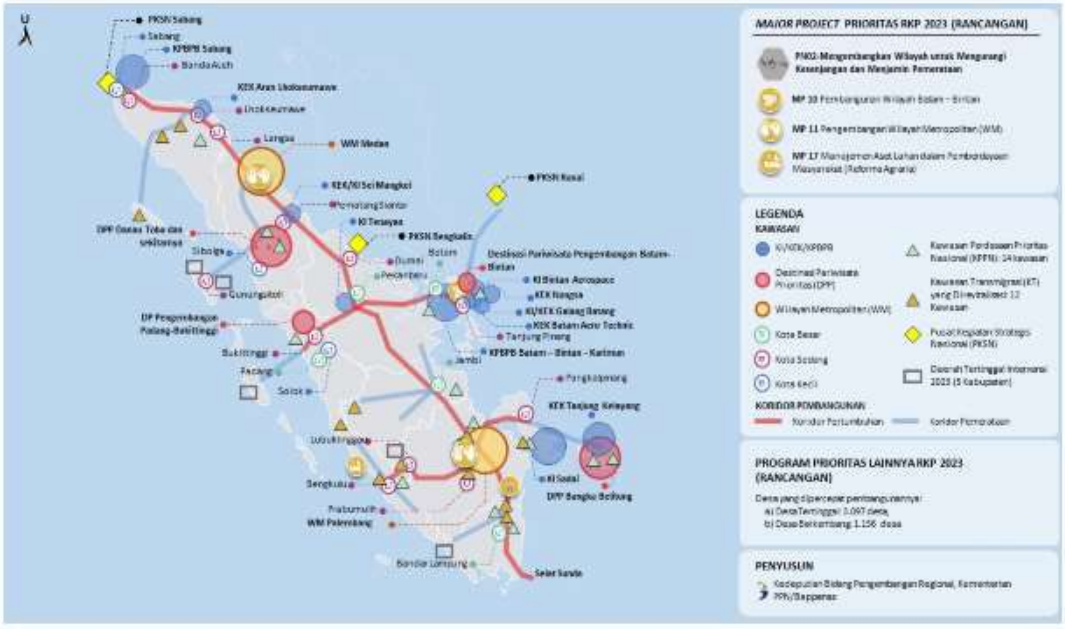
Indikator	Target Tahun 2023									
	Aceh	Sumut	Sumbar	Riau	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Kep. Babel	Kep. Riau
Pertumbuhan Ekonomi[a]	4,0–4,5	5,4–5,9	5,2–5,7	3,1–3,7	4,5–5,1	5,5–6,1	5,1–5,6	4,9–5,3	5,2–5,4	5,1–5,6
Tingkat Kemiskinan[b]	13,71–14,00	7,25–7,50	4,65–6,00	6,00–6,00	6,25–6,50	10,85–11,00	12,95–13,50	9,68–10,20	3,48–3,50	4,35–5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka[b]	5,07–6,01	5,42–6,07	5,43–6,18	3,90–4,28	3,90–4,65	4,04–4,80	3,01–3,48	3,71–4,47	3,85–4,51	8,03–8,75

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Keterangan: a) Target tahun 2023 merupakan assessment Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi triwulan IV-2021 dan
b) Target tahun 2023 merupakan hasil proyeksi Kementerian PPN/Bappenas setelah mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah.

Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya pada jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, yang berpotensi diikuti tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor, serta ancaman kebakaran lahan dan hutan. Oleh sebab itu, upaya memperkuat sistem ketahanan bencana melalui pengurangan risiko bencana akan dilakukan dengan memantapkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, internalisasi kerawanan bencana dalam perencanaan proyek-proyek strategis, meningkatkan kapasitas aparat daerah, meningkatkan kesadaran risiko bencana di masyarakat, pengembangan data kebencanaan, sinergi pembiayaan penanggulangan bencana, dan meningkatkan kerja sama lintas daerah dan multipihak mitigasi bencana.

Sasaran utama pengembangan Wilayah Sumatera pada tahun 2022 adalah (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) meningkatnya kesempatan kerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah kembali pulih setelah terdampak pandemi Covid-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Gambar. III. 2 Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022

3.1.3 Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022

Pada sektor ekonomi di Provinsi Lampung isu strategis yang mewarnai perjalan perekonomian ditahun 2021 antara lain:

Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2021 tumbuh sebesar 2,79 persen, menguat dibanding tahun 2020 (c-to-c) yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,67 persen. Pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 8,26 persen. Selanjutnya Konstruksi tumbuh sebesar 6,95 persen dan Pengadaan Air tumbuh sebesar 6,94 persen. Selain itu lapangan usaha yang juga tumbuh cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17 persen dan 4,57 persen Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, terutama terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi masing-masing sebesar 6,80 persen dan 5,28 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2021 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Lampung masih didominasi oleh lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 2,79 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,97 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,84 persen, dan Konstruksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,29 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2021 dibanding periode yang sama tahun 2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,15 persen, menguat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,00 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada sebagian besar lapangan usaha terutama Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor, serta Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 16,81 persen dan 14,63 persen. Lapangan usaha Pengadaan Air juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi mencapai 9,55 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial tumbuh 9,23 persen; serta Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 8,69 persen. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi, terutama pada lapangan usaha Jasa Keuangan yang terkontraksi sebesar -1,41 persen serta Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi ssebesar -0,78 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan IV-2021 dibandingkan triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 6,37 persen. Kontraksi pertumbuhan terutama disebabkan penurunan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan penopang perekonomian Provinsi Lampung. Tercatat pertumbuhannya mengalami kontraksi sebesar 22,68 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi komoditas pertanian terutama tanaman pangan, perkebunan semusim, serta kehutanan dan penebangan kayu. Selain itu kontraksi pertumbuhan cukup besar juga terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang terkontraksi sebesar 9,21 persen.

Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 8,49 persen, diikuti Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 6,68 persen. Selain itu, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, serta Real Estate juga tumbuh positif masing-masing tumbuh sebesar 5,61 persen, 4,19 persen, dan 3,68 persen.

Perekonomian Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2022 mencapai Rp105.102,83 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp66.388,13 miliar.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,45 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,38 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan II-2022 terhadap triwulan I-2022 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 9,12 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,97 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,92 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung semester I-2022 terhadap semester I-2021 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,07 persen. Dari sisi produ ksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 16,37 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Ekspor Barang dan Jasa sebesar 5,11 persen.

3.1.4 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini memberi gambaran kondisi ekonomi makro

tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dengan segala karateristiknya, perkiraan dan sasaran-sasaran pokok tahun 2023, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2023 tersebut akan dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

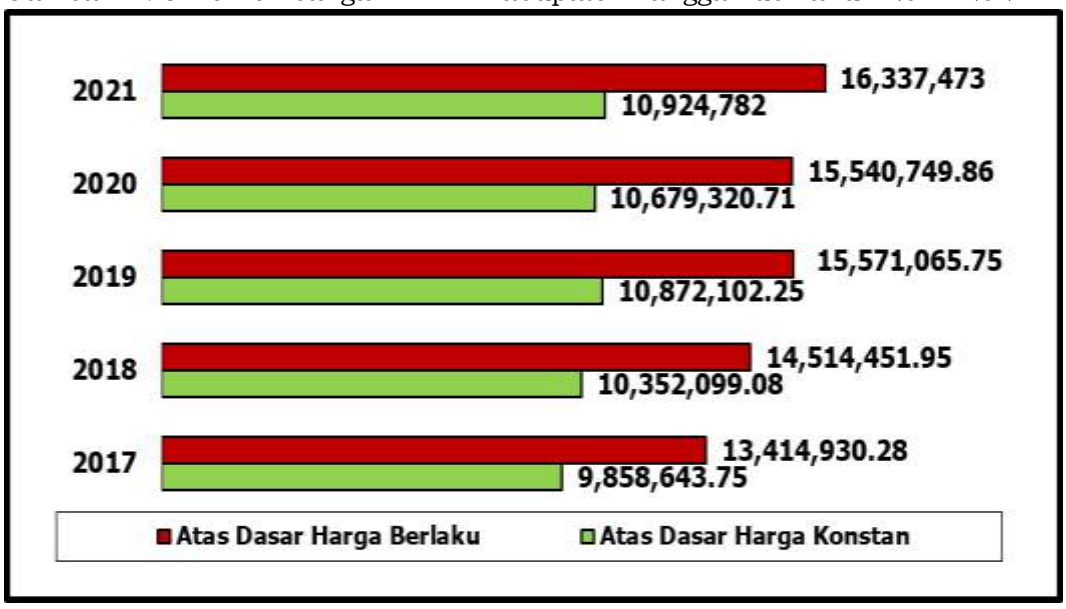
Pada hakekatnya membangun perekonomian suatu daerah adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Dengan kata lain pembangunan enonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin, oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh suatu perencanaan yang realistis, terarah dan tepat sasaran.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dapat dilihat dari beberapa indikator makro, karena indikator makro lebih menunjukkan pencapaian pembangunan secara keseluruhan.

Secara total, PDRB Kabupaten Tanggamus dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, PDRB atas dasar harga Konstan di tahun 2021 meningkat 2,30% jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020 yang terjadi kondisi pandemi covid-19 yakni dari 10.679.320,71 Juta Rupiah menjadi 10.924.781,96 Juta Rupiah. Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi, perekonomian Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 mulai membaik yakni meningkat sebesar 2,30%. Peningkatan volume ekonomi di tahun 2021 tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh di atas 10%. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Pada periode tahun 2017-2020 PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 13.414.930,28 juta Rupiah (2017); 14.514.451,95 juta Rupiah (2018); 15.590.931,00 juta Rupiah (2019); dan 15.468.955,86

juta Rupiah (2020);. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten Tanggamus atas dasar harga Berlaku mulai meningkat cukup signifikan setelah tahun sebelumnya perkonomian tanggamus terkena dampak dari penyebaran covid-19 yakni sebesar 16.337.473,45 juta Rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Pergerakan PDRB menurut komponen pengeluaran kabupaten Tanggamus pada periode 2017-2021.

Gambar III. 3 Perkembangan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Tanggamus dari tahun 2017 s.d 2019 secara rata-rata mencapai 5,10 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,19 persen (2017); 5,01 persen (2018); dan 5,02 persen (2019). Namun, pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi menjadi -1,77 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,30 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,19 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (-1,77 persen). Pertumbuhan PDRB ADHK 2017-2021.

Gambar III. 4. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2021 Berdasarkan Seri 2000 dan 2010

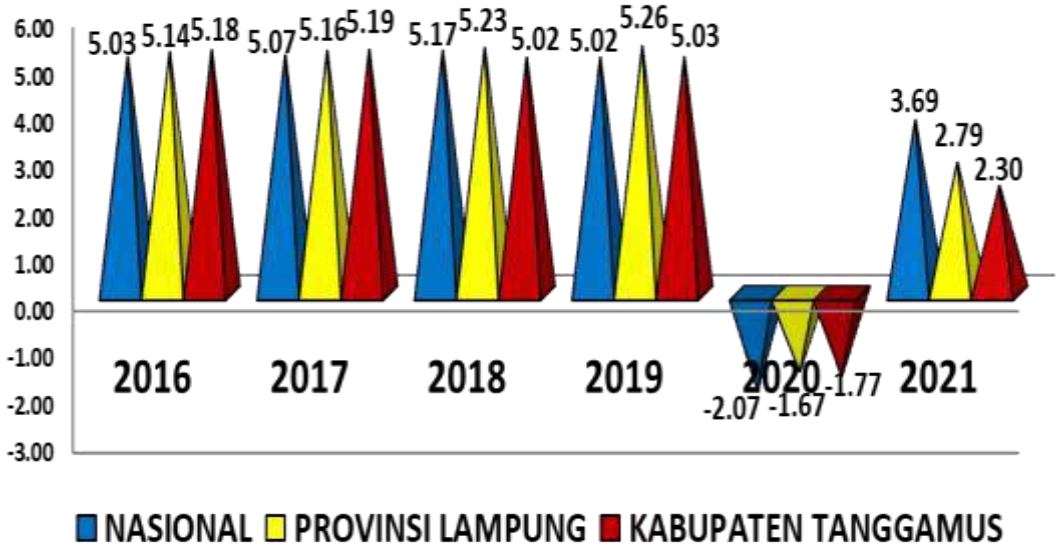


Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

Tidak berbeda dengan daerah lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat dampak Covid-19, dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB mengalami Penurunan hal ini di karenakan Covid-19 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dilihat dari sisi migas maupun tanpa migas. Dimana pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen, sedangkan pada Tahun 2018 tumbuh sebesar 5,01 persen. Hal tersebut sejalan dengan perlambatan pergerakan ekonomi nasional. Pada Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 diperkirakan berada pada 3,2-3,9 persen.

Namun begitu, meningkatnya kinerja perekonomian Kabupaten Tanggamus tidak serta merta menunjukkan kenaikan untuk semua kegiatan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari pergerakan tahun sebelumnya yang seluruhnya menunjukan pertumbuhan yang positif meskipun terdapat beberapa kegiatan ekonomi yang mengalami perlambatan, seperti kegiatan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kegiatan Industri Pengolahan, kegiatan Jasa Keuangan dan Asuransi, kegiatan Jasa Perusahaan, kegiatan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta kegiatan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Gambar III. 5. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2021

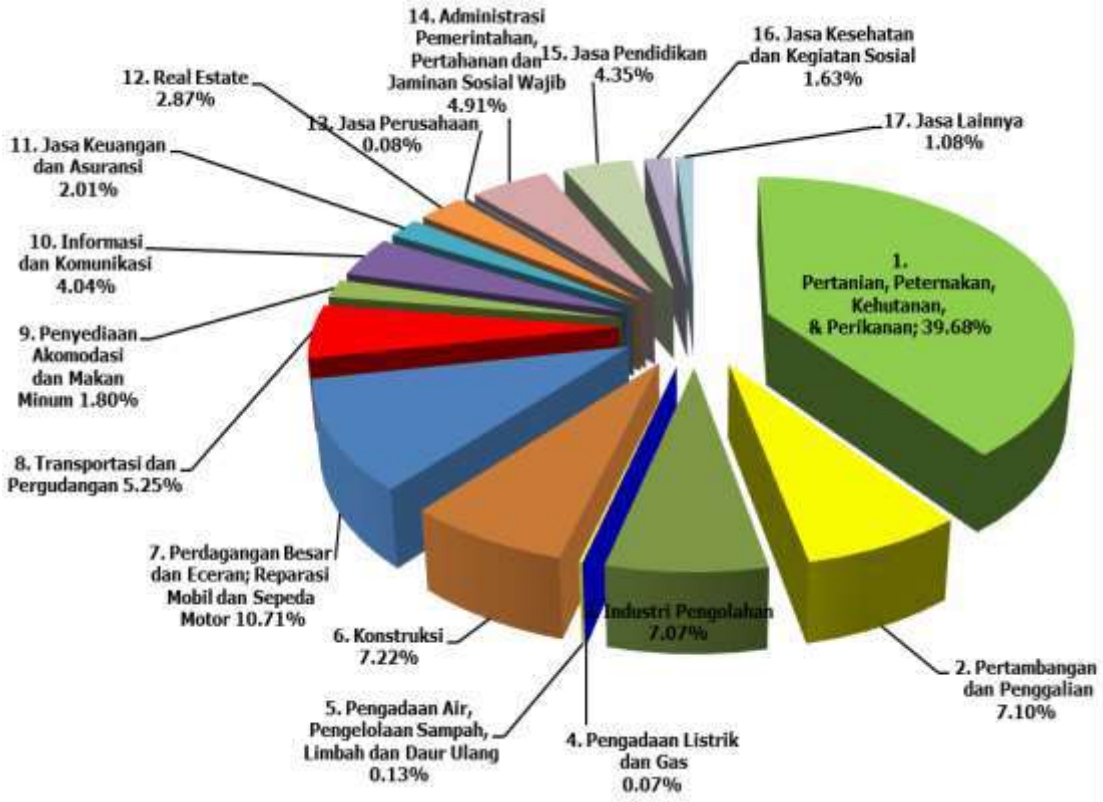


Sumber : BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Kondisi perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pengendalian jumlah penduduk dan tingkat harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat menurunkan daya beli masyarakat. Indikator yang dapat menunjukkan perubahan tingkat harga dan barang dan jasa pada kurun waktu tertentu pada suatu wilayah disebut inflasi.

Struktur perekonomian Kabupaten Tanggamus dalam pembentukan PDRB Tanggamus secara nilai tambah masih tetap di dominasi oleh kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan pertanian, kehutanan, dan perikanan, kemudian disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya sumbangan terbesar ketiga berada pada kegiatan Konstruksi terbesar keempat berada pada kegiatan Pertambangan dan penggalian. Sementara peranan kegiatan lainnya masih di bawah 5 persen, kecuali kegiatan Transportasi dan Pergudangan yang mendekati yakni berkisar 5,25 persen.

Gambar III. 6. Distribusi PDRB Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2022

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

3.1.5.1 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Dengan dasar kondisi perekonomian pada tahun 2020 dan 2021 serta asumsi tahun 2022 berjalan sesuai kenyataan, maka pada tahun 2023 perekonomian daerah akan menghadapi tantangan sebagai berikut :

1) Dampak pandemi *Covid-19* berakibat pada melambatnya perekonomian secara keseluruhan oleh karena itu pemulihan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

2) Peranan lapangan usaha yang masih pada sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 39,68% dari total PDRB (atas harga berlaku) Kabupaten Tanggamus (BPS, 2021) dengan kontribusi terbesar adalah sub unit produksi/lapangan usaha tanaman perkebunan, hal ini

dikarenakan sektor perkebunan di Kabupaten Tanggamus khususnya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 menjadi sektor andalan di Kabupaten Tanggamus karena faktor geografi dan Kabupaten Tanggamus merupakan kawasan agropolitan, minapolitan dan industri pengolahan hasil pertanian menjadikan Kabupaten Tanggamus salah satu daerah lumbung tani di Provinsi Lampung.

3) Pada tahun 2023 adanya kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan peran lapangan usaha lain seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor hal ini karenakan kegiatan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kegiatan yang terus berkembang sejalan peningkatan jumlah penduduk. kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 10,71 persen pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yakni 9,70 persen ditengah dampak pandemi covid-19 yang belum selesai,

4) Pada Iklim investasi yang masih tetap lemah yang ditunjukkan dengan konstribusi sektor jasa perusahaan hanya pada 0,08% pada PDRB 2021. Hal ini tidak berubah dikarenakan dominasi jasa perusahaan di luar kabupaten Tanggamus di Kota Bandar Lampung, efek globalisasi terkait operasional *boundary* perusahaan nasional/multi nasional. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi.

5) Isu ketersediaan pangan dan kerawanan pangan akibat perubahan iklim yang semakin tidak menentu, timbulnya hama/penyakit yang menyerang tanaman pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, alih fungsi lahan, kerusakan lahan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan. Disamping itu pula isu mutu dan keamanan pangan serta semakin terbukanya arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk pertanian asal Kabupaten Tanggamus maupun Nasional.

6) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanggamus yang masih tergolong cukup tinggi mencapai 11,81 persen pada tahun 2021, hal tersebut merupakan masalah tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Kemiskinan tersebut diakibatkan kemampuan mengakses sumber-sumber daya produksi masih sangat kurang. Intervensi pemerintah diperlukan untuk memberi peluang atau kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Kesempatan berusaha tersebut hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuannya.

7) Banyaknya tenaga kerja yang masih mencari pekerjaan di luar daerah mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum mampu menyerap secara optimal tenaga kerja yang setiap tahunnya bertambah. Status tenaga kerja yang masih sebagai tenaga kerja bebas (serabutan) dan rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri, diperlukan dorongan, dan peningkatan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif usaha bagi para tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan modal usaha yang murah dan sederhana persyaratannya.

8) Kemudian, faktor eksternal yang diperkirakan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah penerimaan fiskal negara yang lemah. Hal ini mengindikasikan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekoomi nasional yang menyebabkan laju inflasi meningkat.

9) Kebijakan pemerintah pada tahun 2023 yang akan memberlakukan pengurangan subsidi bahan bakar minyak bagi kendaraan bermotor atau kenaikan harga BBM, sehingga akan menyebabkan peningkatan biaya transportasi yang pada akhirnya berdampak pada naiknya biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat.

10) Kemudian kenaikan tarif dasar listrik dan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023. Hal ini mengkibatkan akan meningkatkan biaya produksi yang berdampak pada naiknya biaya produksi khususnya usaha mikro, kecil dan menengah dan menurunnya daya beli masyarakat.

Disamping hal tersebut dampak utama pandemi *Covid-19* dan resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian daerah juga harus menjadi perhatian sebagai tantangan yang harus dihadapi yaitu :

1) Menurunnya konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap perekonomian;
2) Adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada kelangsungan dunia usaha;
3) Terjadinya fluktuasi harga bahan pokok masyarakat dan penurunan harga komoditas produk unggulan akibat pelemahan ekonomi;

3.1.5.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2022 dan 2023 akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan internasional. Memantapkan perekonomian bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan akan terus dilaksanakan dan mencakup seluruh kawasan ekonomi.

Pada tahun 2022 dan 2023 mendatang kondisi tersebut dipengaruhi oleh **faktor eksternal** berupa : Aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Selain AS, adanya invasi Rusia ke Ukraina juga dapat berujung pada peningkatan kebijakan perdagangan yang lebih restriktif di negara-negara tersebut. Lingkungan global khususnya pada politik dunia baik Amerika maupun Uni Eropa yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pertama, Berlanjutnya kenaikan tingkat suku bunga di negara maju. Bank sentral AS sudah memberikan indikasi akan kembali dinaikkannya *Fed Fund Rate* pada tahun 2023. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2023 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral Eropa. Potensi kenaikan tingkat suku bunga dunia dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.

Kedua, Harga komoditas berada pada level yang rendah. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2020,

tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era *commodity boom*. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.

Ketiga, Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain :

1) Perbaikan infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan membentuk kawasan industri diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan logam, serta kebijakan pemerintah merelaksasi ekspor mineral mentah akan membantu meningkatkan kinerja sektor pertambangan penggalian. Sementara itu, faktor cuaca yang lebih mendukung dan kebijakan reformasi subsidi pupuk dan benih, diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian.Penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat;
2) Peningkatan efektivitas terhadap pendapatan Negara, terdapat kenaikan yang cukup signifikan, peningkatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan.
3) Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik.

Sedangkan **faktor internal** yang akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tanggamus tahun 2022 dan 2023 mendatang adalah :

Pertama, *jumlah penduduk;* kondisi ini disatu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. ***Kedua,*** *infrastruktur daerah;* penyediaan sarana dan prasarana yang relatif baik akan mampu mempengaruhi tingkat investasi dan efisiensi perekonomian. ***Ketiga,*** *kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;* kebijakan bidang perekonomian belum memberikan dampak yang seimbang antara sektor formal dan informal. ***Keempat,*** *kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif baik dalam segi politik maupun kebijakan;* keadaan ini sangat mempengaruhi kelancaran usaha, minat investasi dan aktivitas ekonomi masayarakat. ***Kelima,*** *Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan*; perencanaan pembangunan juga akan mengalami sinkronisasi dan sinergitas dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang akan dilakukan penerapan secara penuh Penganggaran Berbasis Kinerja *(Performance Based Budgeting)*; Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah *(Medium Term Expediture Framework)*; dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*) dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan terutama daerah, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Tabel III.4. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Kondisi Eksternal Kabupaten Tanggamus

NO	KONDISI INTERNAL DAERAH		KONDISI EKSTERNAL DAERAH	
	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
1	Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang sangat strategis sebagai daerah penyangga Provinsi Lampung (Kawasan Pariwisata dan Industri Maritim)	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten yang baru mencapai 51,09% (sumber data Dinas PUPR, 2022)	Dibukanya Jalur Lintas Barat Sumatera yang cukup strategis dan potensial untuk berkembang.	Meningkatnya frekuensi lalu lintas dan kelebihan tonnase kendaraan yang tidak diimbangi dengan peningkatan status dan kondisi jalan yang mempengaruhi kelancaran distribusi barang ke dan dari Kabupaten Tanggamus yang pada gilirannya berdampak pada tingkat inflasi

NO	KONDISI INTERNAL DAERAH		KONDISI EKSTERNAL DAERAH	
	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
2	Kabupaten Tanggamus merupakan daerah dengan penduduk pada tahun 2021 yang cukup besar yang mencapai 645.807 jiwa (sumber data BPS, 2021)	Masih tingginya angka penduduk miskin pada tahun 2021 yang mencapai 11,81 % (sumber data BPS, 2021)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang terus meningkat	Masih tingginya tingkat pengganguran terbuka dan heterogenitas penduduk yang tinggi sehingga pengangguran meningkat, karena rendahnya kesempatan kerja dikarenakan kurangnya pelayanan dan mutu pendidikan, sehingga beban sosial ekonomi meningkat
3	Kondisi ketentraman dan ketertiban yang kondusif	Jumlah dan distribusi aparatur keamanan yang tidak merata serta kurangnya fasilitas yang mendukung keamanan masyarakat	Peningkatan kemampuan aparatur keamanan dan pemerataan penempatanya	Tingkat kriminalitas dan gejala sosial lainnya terutama setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
4	Ekonomi daerah didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (39,68% dari PDRB)	Lahan untuk sektor pertanian semakin berkurang sehingga mayoritas petani hanya sebagai buruh tani atau petani gurem yang disebabkan peluang kerja di luar sektor pertanian sangat terbatas	Harga pangan dunia yang melambung tinggi menyebabkan demand atas hasil pertanian Kabupaten Tanggamus meningkat sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan perkapita	Kerusakan lingkungan hidup (hutan) semakin meluas, sehingga sumber daya air semakin terbatas untuk mendukung pertanian
5	Kabupaten Tanggamus memiliki potensi untuk mengembangkan kawasan strategis Batu Balai menjadi pelabuhan laut internasional terbuka untuk pelayaran samudera (*Ocean Going)*, dan merupakan pelabuhan alam yang cukup terlindung dari gangguan gelombang laut karena berada di Teluk	Kurangnya dukungan dana untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pengembangan potensi *Hinterland* pelabuhan, promosi investasi serta wisata bahari	Dilanjutkannya pembangunan Pelabuhan Batu Balai sehingga dapat menjadi *Growth Promotor*ekonomi di Kabupaten Tanggamus. Saat ini sedang dilakukan penataan kawasan strategis Batu Balai dan adanya minat investor untuk membangun industri maritim	Adanya pihak-pihak yang menghambat program tersebut terkait relokasi pemukiman di kawasan Batu Balai

NO	KONDISI INTERNAL DAERAH		KONDISI EKSTERNAL DAERAH	
	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	ANCAMAN
6	Kabupaten Tanggamus terletak pada jalur Bukit Barisan dan diapit dua Lempenng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia	Potensi bencana yang cuup tinggi dengan tingkat risiko bencana yang mencapai 127,96	Sinergisitas pembangunan yang berlandaskan mitigasi bencana antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Kondisi alam yang sulit di prediksi seperti curah hujan yang tiba-tiba sangat tinggi mengakibatkan potensi bencana yang sangat tinggi seperti bencana tanah longsor dan banjir serta gelombang laut yang tinggi
7	Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan kearah perbaikan dengan tumbuh 2,30% pada tahun 2021 setelah mengalami pertumbuhan yang negative pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*	Keterbatasan keuangan daerah, kondisi ini akan mempengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan bidang perekonomian daerah	Mulai pulihnya perekonomian daerah yang ditandai dengan mulai bergeraknya sektor UMKM dan sektor jasa	Setelah pandemi *Covid-19* dan kini muncul resesi ekonomi dunia yang mengakibatkan kenaikan harga BBM di Indonesia hal-hal tersebut berdampak terhadap perekonomian daerah seperti terjadinya fluktuasi harga bahan pokok masyarakat dan penurunan harga komoditas produk unggulan

Sumber : Analisis dan data diolah, 2022

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan daya beli masyarakat akibat dampak pandemik *Covid-19*. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2023 akan mencakup :

1) Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal

2) Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi *Covid-19*.

3) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung pemerataan akses produksi dan distribusi produk unggulan daerah, pengembangan kawasan industri dan pariwisata.

4) Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa *Covid-19*. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5) Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakan ekonomi melalui: percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke wilayah lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6) Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMD yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan dan minuman; peningkatan fasilitasi ekspor; peningatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) *Free Trade Agreement* (FTA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7) Pembangunan Pariwisata

Peningkatan pemasaran wisata ke wilayah yang sudah pulih; peningkatan *event* olah raga, seni dan budaya; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan.

8) Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan stabilitas sektor keuangan.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka perekonomian Kabupaten Tanggamus dapat diproyeksi sebagai berikut:

Tabel III.5. Capaian dan Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI					TARGET	PROYEKSI
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.19	5.02	5.03	-1.77	3.20	4.00	4.05
2	PDRB Perkapita	Rupiah	22,868,022	24,492,707	26,025,543	25,742,248	26,763,352	7,512,154	28,600,000
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	13.69	13.14	12.05	11.68	11.31	10.94	10.80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.08	2.21	2.96	2.96	2.95	2.90	2.89
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	64.94	65.67	66.37	66.42	66.48	66.57	66.60
6	Indeks Gini	Angka	0.395	0.278	0.314	0.293	0.292	0.291	0.290
7	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	41.50	43.44	46.19	49.12	51.61	54.93	59.09
8	Nilai Tukar Petani	Angka	140.72	147.14	140.1	71.09	88.03	91.34	97.06
9	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	6.00	6.50	7.00

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, data diolah, 2022

Untuk mencapai target tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu :

1) Peningkatan Daya Beli

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di antaranya adalah :

a) Mendorong berkembangnya ekonomi lokal, yaitu usaha yang memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal serta melibatkan pelaku usaha lokal, melalui kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan, difusi teknologi tepat guna dan penyuluhan;
b) Memberikan fasilitasi dan penyuluhan kepada kalangan dunia usaha dan wirausahawan yang membuka kesempatan kerja;
c) Mendorong promosi produk unggulan daerah;
d) Membantu pengembangan sistem resi gudang dan perdagangan berjangka komoditi untuk menjaga stabilitas harga yang diterima petani produsen;
e) Menggerakkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan karakter dan potensi wisata daerah, misalnya dengan mengadakan festival budaya.

Sementara itu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi biaya hidup masyarakat di antaranya adalah :

a) Memperluas penerapan jaminan kesehatan daerah;
b) Memperluas program pendidikan gratis untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah;
c) Mengkoordinasikan implementasi program-program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan ketepatan sasaran;
d) Meningkatkan ketersediaan angkutan publik yang murah dan efektif.

2) Peningkatan Iklim Investasi

Iklim Investasi merupakan salah satu isu dari peningkatan daya saing sebagai penguat dalam keadaan ekonomi domestik, investasi dapat mencerminkan daya saing perekonomian domestik melalui penigkatan investasi merupakan salah satu solusi yang terbaik. Semakin baik investasi akan memperlihatkan timgkat kepercayaan penanaman modal yang baik, iklim investasi mencerminkan sejumlah factor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha tau investasi secara produktif dan berkembang, oleh sebab itu penimgkatan iklim investasi dan usaha sangat penting untuk mendorong arus investasi masuk dan

berkembangnya usaha. Dengan investasi yang baik akan mendorong aktifitas perekonomian, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan daya beli masyarakat yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesehteraan rakyat, disamping itu investasi yang masuk kedaerah juga akan membawa teknologi baru yang membuat prosese produksi berlangsung lebih efisien dan lebih produktif, saat ini banyak investor asing yang berminat untu investasi dikabupaten Tanggamus karena domestic yang besar serta sumberdaya alam yang banyak.

Dalam upaya peningkatan dan memperkuat investasi daerah maka diperlukan suatu penataan yang terencana dan komperehensif, Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui :

a) Peningkatan Kemudahan Perizinan Melalui Peningkatan Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Saat ini penerbitan izin usaha diseluruh Indonesia dalam proses menggunakan OSS **(*Online Single Submission)*** yaitu suatu system perizinan terpusat, mulai dari prosedur, dokumen pendukung yang menyertai, lamanya proses dan tanpa biaya. Pembelian perizinan usaha yang transparan cepat, serta pelayanan yang baik merupakan cerminan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akan menjadi pintu gerbang masuknya investor. Dengan kejelasan prosedur, jenis dokumen dan waktu, serta proporsional biaya, maka dunia usaha akan berkembang.

Untuk mempermudah proses perijinan serta menciptakan transparansi, maka diperlukan penyatuan dan penyederhanaan prosedur perizinan pada satu tempat, yaitu seluruh proses dan penerbitan atas berbagai ijin usahadan ijin lain yang mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan DPMPTS perlu mengacu kepada standar pelayanan prima, sehingga mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi, serta mencapai standar ISO yang sangat diperlukan di seluruh daerah. Dengan adanya DPMPTS maka investor hanya cukup datang pada

satu tempat untuk mengurus berbagai perijinan dan non perijinan, mengadukan permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan solusi.

b) Penyederhanaan dan Harmonisasi Peraturan Daerah

Perlunya daerah kembali meninjau dan menata Peraturan Daerah (Perda) yang telah diterbitkan untuk menghindari timbulnya hal-hal yang bersifat kontra produktif bagi dunia usaha dan masyarakat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk itu beberapa hal yang penting untuk dilakukan adalah :

- Perda yang tidak didukung penciptaan iklim investasi sebaiknya dihapuskan dan diubah dengan penyediaan fasilitasi bagi dunia usaha;
- Perda terkait Investasi perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi (tingkat nasional);

c) *Pemberian Fasilitas*

Perlunya perubahan pola pikir (*mindset*) pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dengan salah satu cara adalah menyediakan fasilitas. Dunia usaha memerlukan fasilitas antara lain kemudahan penerbitan usaha melalui jemput bola, pendampingan pengembangan keahlian khusus, promosi produk, bantuan pemasaran dan kepastian ketersediaan lahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan peran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk secara aktif menjemput calon investor potensial, menyediakan data dan informasi potensi daerah dan menjadi *clearing house* masalah investasi di daerah. Fasilitasi ini tentunya akan berbeda setiap sektornya.

Sektor primer membutuhkan fasilitas berupa kemudahan memperoleh hak atas penguasaan tanah, keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha, keamanan usaha, keamanan masyarakat, rendahnya angka unjuk rasa dan etos kerja masyarakat lokal yang tinggi.

Sektor pengolahan/sekunder membutuhkan ketersediaan energi, infrastruktur fisik, fasilitas penundaan pembayaran paja sampai dengan berproduksinya usaha. Dukungan infrastruktur yang memadai dan baik juga akan membantu meningkatkan produktivitas faktor-faktor penentu berinvestasi lainnya.

Sektor tersier membutuhkan keamanan usaha yang tinggi baik di tempat usaha, di masyarakat sekitar tempat usaha dan selama proses pengiriman barang menuju daerah tujuan, selain itu Pemerintah perlu juga untuk memfasilitasi penyediaan lahan untuk industry dan memastikan terakomodasi alam Rencana Tata Ruang Wilayah, sementara itu fasilitasi lain yang diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif yang harmonis antara pengusaha dan buruh.

d) Pemilihan Fokus Bidang Usaha

Pembangunan Ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan ekonomi global, implikasinya pembangunan ekonomi masyarakat makin perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis *(knowledge-base deconomy)* yang lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan inovasi. Dalam konteks tersebut pemanfaatan iptek menjadi basis pengembangan ekonomi masyarakat, disisi lain pengembangan pengetahuan (dan teknologi) perlu difokuskan pada upaya pengembangan yang berbasiskan potensi/kekayaan sumberdaya yang dimiliki untuk mewujudkan interaksi antar sector rill di dan antar daerah di perlukan adanya pendekatan yang terintegritas dan strategi kebijakan yang menyeluruh, oleh karena itu penguatan system inovasi didaerah diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat didaerah.

Pemerintah daerah perlu mulai memilih dan fokus pada bidang usaha yang berbasis kemampuan/potensi lokal dan selanjutnya didorong menuju produk yang berdaya saing. Bidang usaha yang dipilih hendaknya difasilitasi sehingga lebih cepat dalam

pengembangannya. Dengan demikian akan memberi manfaat bagi pengembangan potensi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menyerap tenaga kerja dan akhirnya meningkatkan perekonomian lokal yang berdaya saing.

e) Peningkatan kerjasama dengan daerah lain.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif dilaksanakan untuk meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan alternative pemecahan-pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapinya, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggara pelayanan public serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Beberapa jenis usaha tentunya akan bersifat lintas kabupaten/kota bahkan lintas provinsi. Terkait dengan hal ini, kerjasama antar daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakharmonisan kebijakan yang bersifat lintas wilayah, mengurangi inkonsistensi kebijakan antar wilayah, serta mendorong dunia usaha untuk lebih meningkatkan usaha yang bersifat lintas wilayah karena hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha, maka pemerintah daerah dapat melakukan :

- *Penyediaan pelatihan ketrampilan*, dengan membangun pusat pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal dan peluang untuk mengembangkannya ke bidang lain. Penyediaan pelatihan keterampilan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- *Penyediaan pendidikan.* Membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang, namun harus dimulai sedini mungkin agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang tinggi untuk

meningkatkan taraf hidupnya. Dengan pendidikan yang memadai seseorang akan memiliki peluang lapangan kerjayang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, sertamemberi pengaruh yang lebih baik bagi lingkungannya.

- *Peningkatan kesadaran masyarakat,* terhadap perlunya etoskerja yang tinggi dan berkualitas. Selain kemampuan berupa keterampilan dan intelegensia, perlu pula dibangun etoskerja yang tinggi sehingga berdaya saing dan memiliki kualitas moral yang baik. *Role model* pemimpin daerah sangat mempengaruhi perilaku pegawai yang tercermin dari etos kerja pegawai kantor pemerintah daerahnya dan menjadi panutan bagi masyarakat.

3) Peningkatan Belanja Modal, Penyerapan dan Kualitas Belanja

Pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan proporsi total Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.1.679.542.040.945,- dengan komposisi Belanja Modal 11,15 % atau senilai Rp.187.284.021.938 dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial*, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follows Program* yang memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kualitas belanja pemerintah daerah sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal).

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kualitas belanja diantaranya adalah :

a) Menyusun skala prioritas dan mengalokasikan anggaran belanja pemerintah daerah pada kegiatan-kegiatan yang strategis, berdampak besar, terkait langsung dengan permasalahan daerah dan menjangkau sebanyak mungkin masyarakat miskin;

b) Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah, seperti jalan kabupaten serta jaringan irigasi sekunder/tersier;
c) Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dan pengesahan APBD;
d) Meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan;
e) Meningkatkan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan belanja pemerintah.

4) Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional yang memfokuskan pada peningkatan ekspor non-migas dan peningkatan kualitas serta keberagaman produk, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan perhatiannya pada pengembangan potensi dan daya saing ekspor daerah masing-masing.

Langkah-langkah umum yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan antara lain dapat berupa :

a) Melakukan identifikasi komoditas unggulan daerah dengan orientasi ekspor untuk menetapkan fokus pembinaan kepada pelaku usaha dan eksportir lokal;
b) Menggiatkan diseminasi informasi kepada pelaku usaha dan eksportir terkait potensi pasar termasuk pasar ekspor non tradisional, tingkat kualitas dan diversifikasi produk yang dibutuhkan, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur ekspor;
c) Menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain melalui koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan sektor/instansi lain yang mempengaruhi kelancaran ekspor seperti infrastruktur, logistik, penanaman modal, pendanaan dan perizinan;
d) Meningkatkan nilai tambah produk unggulan;
e) Mengembangkan insentif bagi industri berorientasi ekspor yang menggunakan input lokal dalam porsi besar;

f) Mengembangkan sistem logistik yang lebih efisien, untuk mempermudah perolehan bahan baku dan memperlancar distribusi hasil produksi;

g) Menghapus beban pungutan (baik pungutan resmi maupun tidak resmi) yang membebani proses produksi dan distribusi barang, terutama barang-barang yang akan diekspor.

Langkah-langkah tersebut tentunya dapat dikembangkan dan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya di daerah. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah ini akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah mengingat sejak tahun 2015 telah diimplementasikan pasar bersama ASEAN (*ASEAN Economic Community*). Dengan dibukanya pasar bersama regional tersebut maka tidak tertutup kemungkinan pasar lokal akan dibanjiri dengan produk impor dari negara tetangga yang erpotensi menciptakan defisit neraca perdagangan. Peningkatan daya saing produk ini diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor sehingga dapat mengimbangi masuknya barang impor dan bahkan dapat memberikan surplus dalam neraca perdagangan.

5) Peningkatan Nilai Tambah Industri

Secara umum pengembangan industri hilir nasional masih terbatas, khususnya di daerah, dan secara spasial terkonsentrasi di Jabodetabek, Banten, wilayah Pantura Jawa dan Batam. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah yang masuk dalam RIPIN Tahun 2015-2025, dimana peranan Kabupaten Tanggamus dalam WPPI (Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri) Wilayah 9 berupa Kawasan Industri Maritim (KIM). Pemerintah juga telah menetapkan sektor-sektor strategis untuk dikembangkan rantai industri hilirnya. Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam lokal ini akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian daerah, karena dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong proses transformasi ekonomi nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan.

Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan dan mendorong nilai tambah industri di antaranya adalah :

a) Mendorong berkembangnya klaster industri unggulan daerah;
b) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, terutama dalam hal pemberian insentif bagi investasi yang menghasilkan produk hilir;
c) Mengembangkan kawasan industri terpadu (*industrial park*) untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi industri, mengefisienkan pembangunan infrastruktur industri dan meningkatkan *linkages* antar industri terkait.

6) Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah

Perdagangan antar wilayah berperan strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan integrasi perekonomian nasional. Perdagangan antar pulau yang intensif akan menguntungkan semua wilayah yang terlibat, terlebih bila masing-masing wilayah dapat mengembangkan spesialisasinya. Namun demikian hingga saat ini pola perdagangan antar wilayah nasional masih didominasi perdagangan intrapulau.

Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perdagangan antar wilayah antara lain :

a) Meningkatkan kerjasama antar daerah untuk pengembangan pasar regional;
b) Meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen/petani lokal;
c) Mengurangi pungutan arus barang antar wilayah;
d) Memantau dan menjaga kelancaran arus angkutan barang dari dan ke pelabuhan;
e) Meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur wilayah untuk mengefisienkan biaya transportasi.

7) Peningkatan Infrastruktur

Infrastruktur berperan sangat strategis bagi peningkatan daya saing wilayah dan daerah. Jaringan infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting untuk dapat memfasilitasi distribusi barang dan orang

secara efisien, dan efisiensi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing dipasar nasional dan internasional.

Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah :

a) Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi;
b) Menurunkan biaya logistik;
c) Mengurangi ekonomi biaya tinggi;
d) Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan
e) Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan tersebut, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan hal tersebut perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan penguatan konektivitas secara terintegrasi antara pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi dan juga antar koridor ekonomi, serta keterhubungan secara internasional terutama untuk memperlancar perdagangan internasional maupun sebagai pintu masuk bagi para wisatawan mancanegara.

Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan kerja sama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, yaitu:

a) Pemerintah Pusat

- Memberikan fokus pada pembangunan prasarana dasar yang menjadi wewenang pemerintah pusat;
- Mempertajam prioritas pembangunan infrastruktur, terutama jenis infrastruktur yang memiliki *multiplier effect* tinggi terhadap peningkatan kegiatan perekonomian;

- Meningkatkan efisiensi dengan melakukan penghematan belanja pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan infrastruktur

b) Pemerintah Daerah

- Meningkatkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- Melakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu dalam upaya memperkuat konektivitas antar pusat ekonomi dan/atau pusat produksi, baik di dalam provinsi maupun denganpusat ekonomi di luar provinsi;
- Melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan lainnya dan memberikan fasilitasi kebijakan yang mendukung investasi baik infrastruktur maupun investasi sektor riil;
- Mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur strategis dengan menuntaskan pembebasan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum);
- Mendorong partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur jalan, listrik berbasis sumber daya lokal (*mikrohidro, geothermal*) dan penyediaan air bersih.

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*, Pemeringtah Kabupaten Tanggamus memformulasikan beberapa kebijakan strategis dalam frame kebijakan yakni :

1. Memperkuat sektor kesehatan mulai dari level pemerintahan terkecil
   Penguatan sektor ini dapat dilakukan melalui : i) peningkatan perilaku sehat dan physical dan social distancing dengan penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di seluruh lini masyarakat dari perkotaan sampai ke perdesaan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media; ii) pemenuhan kapasitas laboratorium (reagen, alat test dan lab); dan iii) pemenuhan Alat Perlindungan Diri (APD), alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan untuk penangangan pasien.

2. Memperkuat Sistem Jaring Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi

   Covid-19 secara dalam waktu relatif singkat ternyata telah menyebabkan perubahan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat dengan sangat cepat dan dalam. Kebijakan Sistem Jaring Pengaman Sosial ini merupakan salah satu bentuk transformasi struktural akibat masifnya perubahan tatanan yang sedang terjadi saat ini. Sistem yang dibangun tersebut merupakan kompilasi dari berbagai macam bentuk varian produk kesejahteraan sosial baik dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), jaminan social kesehatan (BPJS Kesehatan), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan sebagainya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memeprhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/belanja publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah mempunyai kelebihan (kesempatan lebih luas) dalam membuat anggaran belanja agar lebih efisien dengan memenuhi kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaan riil yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penganggaran pada belanja bidang infrastruktur dan sektor sosial pada pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang dipacu oleh pengeluaran pemerintah dan swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Untuk menyerap besarnya laju pertumbuhan tenaga kerja yang cenderung meningkat terus menerus, diperlukan upaya-upaya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, karena investasi tidak hanya menciptakan permintaan tapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan meluasnya kesempatan kerja, akses masyarakat untuk mendapatkan penghasilan makin besar.

Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat maka dampak yang lebih luas adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan primernya/*basic needs* (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan) bahkan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tingkat kemiskinan di masyarakatpun akan berkurang, karena kemiskinan dan kesejahteraan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan *kebijakan reformasi* dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :

1) Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas.
2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja.
3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD).
4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah kedepan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangan secara profesional. *Pertama,* ***sistem informasi manajemen keuangan***. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses

perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. *Kedua,* ***pengelolaan aset-aset daerah***. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus diarahkan untuk :

1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023, yaitu: (1) Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan *good governance*, kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi, serta pelestarian nilai-nilai budaya; (3) Peningkatan derajat kesehatan dan pelayanan sosial dasar masyarakat, kapasitas serta produktifitas kerja, perumahan, dan prasarana dasar pemukiman, dalam rangka percepatan peningkatan

kesejahteraan masyarakat miskin; (4) Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan yang didukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; (5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan.

Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 secara umum diarahkan :

1) Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2023 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained),* serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2) Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Tanggamus digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2023.
3) Kebijakan pembiayaan tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Seiring dengan adanya reformasi dibidang keuangan, pengelolaan keuangan publik harus dikelola secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dengan demikian arah kebijakan pengelolaan belanja daerah

harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran penerimaan pendapatan daerah relatitif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana serta terealisasi.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung pencapaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023. Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Pedapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Tabel III.6 . Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
A	**PENDAPATAN DAERAH**					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Pajak Daerah	50.437.031.841,00	19.171.170.356,51	38,01	50.881.773.077	20.046.287.778
	Retribusi Daerah	4.876.630.000,00	2.132.582.984,30	43,73	7.126.630.000	2.199.313.435
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.784.379.400,00	5.837.823.377,61	86,05	7.851.691.019	6.129.714.547
	Lain-lain PAD yang Sah	62.442.652.086,00	68.645.062.582,74	109,93	62.150.270.444	111.611.094.115
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**124.540.693.327,00**	**95.786.639.301,16**	76,91	**128.010.364.540**	**139.986.409.874**
	PENDAPATAN TRANSFER					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.369.011.459.083,00	1.382.256.477.844,00	100,97	1.443.228.264.912	1.338.907.362.975
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.318.710.770,00	72.373.886.433,00	45,14	166.790.367.133	125.649.999.517
	Total Pendapatan Transfer	**1.529.330.169.853,00**	**1.454.630.364.277,00**	95,12	**1.610.018.632.045**	**1.464.557.362.492**

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Hibah	51.048.983.000,00	21.140.556.876,00	41,41	49.668.500.000	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	150.023.765.266,00	80.568.318.582,00	53,70	68.000.000.000	94.998.268.579
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**201.072.748.266,00**	**101.708.875.458,00**	**50,58**	**117.668.500.000**	**94.998.268.579**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.854.943.611.446,00**	**1.652.125.879.036,16**	**89,07**	**1.855.697.496.585**	**1.699.542.040.945**
B	**BELANJA**					
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai	659.990.820.680,70	619.192.788.739,56	93,82	662.852.766.063	711.992.919.376
	Belanja Barang dan Jasa	539.908.869.602,95	435.373.522.039,09	80,64	549.938.014.577	350.853.982.731
	Belanja Bunga	-	-	-	5.500.000.000	5.070.000.000
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	52.197.107.465,00	35.551.259.769,00	68,11	52.470.159.089	67.353.970.778
	Bantuan Sosial		-	-	645.000.000	-
	Jumlah Belanja Operasi	**1.252.096.797.748,65**	**1.090.117.570.547,65**	**87,06**	**1.271.405.939.729**	**1.135.270.872.885**
	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	7.230.000.000,00	29.240.000,00	0,40	8.200.000.000	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.724.780.430,00	32.309.954.951,00	73,89	49.890.176.532	43.604.578.966
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.154.096.784,00	40.374.975.987,00	64,96	64.187.487.865	50.076.406.875
	Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi	217.292.220.727,00	97.268.370.408,14	44,76	169.652.276.027	89.274.473.897
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.089.294.384,00	5.702.464.900,00	93,65	4.298.190.000	4.328.562.200
	Jumlah Belanja Modal	**336.490.392.325,00**	**175.685.006.246,14**	**52,21**	**296.228.130.424**	**187.284.021.938**
	BELANJA TIDAK TERDUGA					
	Belanja Tidak Terduga	14.089.803.986,00	10.163.029.525,00	72,13	17.000.000.000	15.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**14.089.803.986,00**	**10.163.029.525,00**	**72,13**	**17.000.000.000**	**15.000.000.000**
	BELANJA TRANSFER					
	Belanja Bagi Hasil	6.221.961.185,00	6.135.124.739,00	98,60	5.800.840.318	2.224.560.122
	Belanja Bantuan Keuangan	377.435.769.414,00	376.084.285.441,00	99,64	339.762.586.114	339.762.586.000
	Jumlah Belanja Transfer	**383.657.730.599,00**	**382.219.410.180,00**	**99,63**	**345.563.426.432**	**341.987.146.122**
	JUMLAH BELANJA	**1.986.334.724.658,65**	**1.658.185.016.498,79**	**83,48**	**1.930.197.496.585**	**1.679.542.040.945**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(131.391.113.212,65)**	**(6.059.137.462,63)**	**4,61**	**(74.500.000.000)**	**20.000.000.000**

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
C	**PEMBIAYAAN**					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	95.000.000.000,00	-
	Penggunaan SiLPA	38.490.843.212,65	38.490.843.212,65	100,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**38.490.843.212,65**	**38.490.843.212,65**	**100,00**	**95.000.000.000,00**	**-**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	1.500.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	19.000.000.000,00	19.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**2.100.000.000,00**	-	-	**20.500.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**36.390.843.212,65**	**38.490.843.212,65**	**105,77**	**74.500.000.000,00**	**(20.000.000.000,00)**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	**32.431.705.750,02**	-	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tanggamus masih bertumpu pada Pendapatan Transfer (sampai dengan tahun 2022 masih pada kisaran 86,76 persen dari total Pendapatan Daerah sedangkan PAD menyumbang sebesar 6,90 persen). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tanggamus masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.652.125.879.036,16. Sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan data tahun 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.95.786.639.301,16 atau 76,91 persen dari target PAD Kabupaten Tanggamus. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.454.630.364.277,- atau 95,12 persen. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai Rp.101.708.875.458,- atau sebesar 50,58 persen. Sedangkan pada tahun 2022 Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan meningkat menjadi Rp.1.855.697.496.585,-.

Di tahun 2023 Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami penurunan dari tahun 2022 menjadi Rp.1.699.542.040.945,-. Hal ini didasarkan pada realisasi capaian Pendapatan Daerah di tahun 2021 yang hanya mencapai 89,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Rp. 139.986.409.874,-
- Pendapatan Transfer : Rp. 1.464.557.362.492,-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah : Rp. 94.998.268.579,-

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Tanggamus sebesar Rp.95.786.639.301,16 atau hanya mencapai 76,91 persen dari target PAD di tahun 2021. Penerimaan PAD paling besar disumbang dari Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp.68.645.062.582,74 (109,93 persen), sedangkan pada tahun 2023 PAD diproyeksikan sebesar Rp.139.986.409.874,-

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus akan melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk dialokasikan mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam upaya meningkatkan pendapatan dan mendukung program pencapaian pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Lampung sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 perihal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang :
   a. Dukungan sarana kesamsatan yang berada di wilayah kabupaten/kota masing-masing.
   b. Melakukan himbauan kepada masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
   c. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai kabupaten/kota.

   Dan untuk mendukung program tersebut, juga menghimbau kepada pengurus dan pemegang kendaraan dinas agar menganggarkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di perangkat daerahnya masing-masing.
5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan diluar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
16) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, (2) menghambat mobilitas penduduk, (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

1) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai

kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

Sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah :

1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
   a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
   b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
   c) hasil kerja sama daerah;
   d) jasa giro;
   e) hasil pengelolaan dana bergulir;
   f) pendapatan bunga;
   g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k) pendapatan denda pajak daerah;

l) Pendapatan denda retribusi daerah;

m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n) pendapatan dari pengembalian;

o) pendapatan dari BLUD; dan

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2023, proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai 86,76 persen dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pendapatan Transfer Pemerintah

Pusat mencapai Rp.1.338.907.362.975,- sedangkan sisanya sebesar Rp.125.649.999.517,- berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Kebijakan pendapatan transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

1) Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

a) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

- ✓ Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- ✓ Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

  Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

  Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

✓ Pendapatan DBH-SDA terdiri dari :

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- ✓ Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Di tahun 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tanggamus direncanakan mencapai Rp.94.998.268.579,- atau sebesar 5,12 persen dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b. Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana

untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

1) Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari DAK Non Fisik.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2021 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

2) Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus

Dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Pendapatan Berasal Dari Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi, mempedomani Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, dan

rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. III.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
A	**PENDAPATAN DAERAH**					
	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
	Pajak Daerah	50.437.031.841,00	19.171.170.356,51	38,01	50.881.773.077	20.046.287.778
	Retribusi Daerah	4.876.630.000,00	2.132.582.984,30	43,73	7.126.630.000	2.199.313.435
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.784.379.400,00	5.837.823.377,61	86,05	7.851.691.019	6.129.714.547
	Lain-lain PAD yang Sah	62.442.652.086,00	68.645.062.582,74	109,93	62.150.270.444	111.611.094.115
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**124.540.693.327,00**	**95.786.639.301,16**	76,91	**128.010.364.540**	**139.986.409.874**
	PENDAPATAN TRANSFER					
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.369.011.459.083,00	1.382.256.477.844,00	100,97	1.443.228.264.912	1.338.907.362.975
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.318.710.770,00	72.373.886.433,00	45,14	166.790.367.133	125.649.999.517
	Total Pendapatan Transfer	**1.529.330.169.853,00**	**1.454.630.364.277,00**	95,12	**1.610.018.632.045**	**1.464.557.362.492**
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
	Hibah	51.048.983.000,00	21.140.556.876,00	41,41	49.668.500.000	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	150.023.765.266,00	80.568.318.582,00	53,70	68.000.000.000	94.998.268.579
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**201.072.748.266,00**	**101.708.875.458,00**	**50,58**	**117.668.500.000**	**94.998.268.579**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.854.943.611.446,00**	**1.652.125.879.036,16**	**89,07**	**1.855.697.496.585**	**1.699.542.040.945**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

Upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari obyek-obyek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya memaksimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dana daerah dan menggali obyek-obyek yang baru guna menambah penerimaan daerah, secara singkat upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
   a) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
      - Melakukan perluasan pembayaran pajak melalui bank (*multikanal*) dan tempat lainnya.
      - Melakukan penambahan gerai pajak dalam rangka mempermudah pembayaran pajak daerah.
   b) Peningkatan *Law Enforcement*
      - Memaksimalkan kegiatan penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
      - Meningkatkan kerja sama dengan terkait dalam hal penagihan piutang pajak daerah.
   c) Intensifikasi Pajak Daerah
      - Membangun sistem informasi pajak daerah yang terkonsolidasi.
      - Melakukan pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2.
      - Memberlakukan data berbasis NIK dan KK dalam rangka meningkatkan akurasi tarif progresif guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
      - Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* yang terkait dengan penentuan potensi pajak daerah.
      - Membangun sistem terintegrasi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB secara online.
      - Meningkatkan kerja sama dengan DJP dalam rangka pertukaran data dan informasi terkait perpajakan.
      - Peningkatan kualitas pelayanan seluruh jenis pajak daerah.
   d) Ekstensifikasi Pajak Daerah
      - Melakukan penyesuaian tarif beberapa pajak daerah.
      - Melakukan perluasan basis pajak daerah

- Pengenaan persewaan seluruh ruangan hotel sebagai objek pajak hotel.
- Revisi perijinan hotel dan restoran yang menjalankan aktifitas hiburan untuk diperluas menjadi objek pajak hiburan.
- Reklasifikasi aktifitas tempat wisata dan rekreasi keluarga yang dikelola oleh swasta dan pemerintah menjadi klasifikasi jenis hiburan sehingga dapat dijadikan sebagai objek pajak hiburan.
- Menyesuaikan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.

2. Retribusi Daerah
   a) Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah
      - Akan menerapkan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah.
      - Akan menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi.
      - Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   b) Peningkatan *Law Enforcement*
      - Menerapkan Perda tentang Retribusi Daerah.
      - Akan membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Bank dalam rangka pembayaran retribusi daerah.
   c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah
      - Melakukan penyesuaian tarif beberapa jenis retribusi daerah.
      - Melakukan pembaharuan system pelayanan dan pembayaran Retribusi UKM.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
   b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
   c) Memperkuat struktur permodalan BUMD.

d) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga.
e) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

4. Kebijakan Pendapatan Transfer
   Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer bai itu Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
   Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung untuk pencairan Dana Hibah serta berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

(a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1. Belanja Operasi
    a) Belanja Pegawai;
    b) Belanja Barang dan Jasa;
    c) Belanja Bunga;
    d) Belanja Subsidi;
    e) Belanja Hibah; dan
    f) Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
    a) Belanja Tanah;
    b) Belanja Peralatan dan Mesin;
    c) Belanja Bangunan dan Gedung;
    d) Belanja Jalan;
    e) Belanja Irigasi dan Jaringan;
    f) Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
    a) Belanja Bagi Hasil;
    b) Belanja Bantuan Keuangan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Selanjutnya, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;

(2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

(3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

(2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023.

(3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya

maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

(4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

(5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

(9) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran Belanja Barang Dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

(2) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(3) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(4) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

   (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

   (b) Penghargaan atas suatu prestasi;

   (c) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam

Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

(d) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

(5) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(6) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(7) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

(a) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(b) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada

SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

(8) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

(9) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

(10) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

(11) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

(12) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

(13) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(14) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

(a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

(15) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

(a) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

(b) pimpinan dan anggota DPRD; serta

(c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

(16) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

(17) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

d) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman

sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

f) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan

dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    (a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    (b) Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    (c) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

g) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi

Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
c) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

(1) Belanja Modal Tanah;

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung;

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

(5) Belanja Aset Tetap Lainnya;

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) Belanja Aset Lainnya;

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Keperluan mendesak; dan/atau
c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

(1) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

(a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

(b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

(c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan

(d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan

secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2032 sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa

paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya, belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

(1) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
(2) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
(3) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
(4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
(5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan

keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD ata atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Kebijakan belanja diatas, dilaksanakan untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2023 yaitu "Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah" yang diimplementasikan dalam upaya pemulihan pasca pandemi *Covid-19* yang secara umum diarahkan pada 3 (tiga) bidang pembangunan, yaitu :

1) Bidang pembangunan infrastruktur *(domestic connectivity)* yang merata diseluruh wilayah untuk menunjang perekonomian;
2) Bidang pengembangan sumber daya manusia terutama pelayanan dan akses kesehatan dan pendidikan; dan
3) Bidang penanggulangan kemiskinan untuk menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan iklim investasi dalam rangka pemulihan perekonomian dengan pemberdayaan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan dan peningkatan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang ditopang dengan revitalisasi pertanian secara menyeluruh.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus diproyeksikan mengalami peningkatan dari Rp.1.658.185.016.498,79 pada tahun 2021, naik menjadi Rp.1.930.197.496.585,- pada tahun 2022. Anggaran Belanja Operasi tahun 2021 mencapai Rp1.090.117.570.547,65 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp.1.271.405.939.729,-. Kemudian untuk anggaran Belanja Modal pada tahun 2021 mencapai Rp.175.685.006.246,14 naik pada tahun 2022 menjadi Rp.296.228.130.424,- , Untuk anggaran Belanja Tak Terduga pada tahun 2021 mencapai Rp.10.163.029.525,-, ditargetkan meningkat menjadi Rp.17.000.000.000,- pada tahun 2022. Sedangkan untuk anggaran Belanja Transfer pada tahun 2021 sebesar Rp.382.219.410.180,-, turun menjadi Rp.345.563.426.432,- pada tahun 2022.

Perhitungan proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023, diperkirakan mencapai angka Rp.1.679.542.040.945,- dengan komposisi Belanja Operasi sebesar Rp.1.135.270.872.885,-, Belanja Modal sebesar Rp.187.284.021.938,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.15.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.341.987.146.122,- Realisasi dan proyeksi belanja dalam kurun waktu 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
B	**BELANJA**					
	BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai	659.990.820.680,70	619.192.788.739,56	93,82	662.852.766.063	711.992.919.376
	Belanja Barang dan Jasa	539.908.869.602,95	435.373.522.039,09	80,64	549.938.014.577	350.853.982.731
	Belanja Bunga	-	-	-	5.500.000.000	5.070.000.000
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	52.197.107.465,00	35.551.259.769,00	68,11	52.470.159.089	67.353.970.778
	Bantuan Sosial		-	-	645.000.000	-
	Jumlah Belanja Operasi	**1.252.096.797.748,65**	**1.090.117.570.547,65**	**87,06**	**1.271.405.939.729**	**1.135.270.872.885**
	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	7.230.000.000,00	29.240.000,00	0,40	8.200.000.000	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.724.780.430,00	32.309.954.951,00	73,89	49.890.176.532	43.604.578.966
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.154.096.784,00	40.374.975.987,00	64,96	64.187.487.865	50.076.406.875
	Belanja Modal, Jaringan dan Irigasi	217.292.220.727,00	97.268.370.408,14	44,76	169.652.276.027	89.274.473.897
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.089.294.384,00	5.702.464.900,00	93,65	4.298.190.000	4.328.562.200
	Jumlah Belanja Modal	**336.490.392.325,00**	**175.685.006.246,14**	**52,21**	**296.228.130.424**	**187.284.021.938**
	BELANJA TIDAK TERDUGA					
	Belanja Tidak Terduga	14.089.803.986,00	10.163.029.525,00	72,13	17.000.000.000	15.000.000.000
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**14.089.803.986,00**	**10.163.029.525,00**	**72,13**	**17.000.000.000**	**15.000.000.000**
	BELANJA TRANSFER					
	Belanja Bagi Hasil	6.221.961.185,00	6.135.124.739,00	98,60	5.800.840.318	2.224.560.122
	Belanja Bantuan Keuangan	377.435.769.414,00	376.084.285.441,00	99,64	339.762.586.114	339.762.586.000
	Jumlah Belanja Transfer	**383.657.730.599,00**	**382.219.410.180,00**	**99,63**	**345.563.426.432**	**341.987.146.122**
	JUMLAH BELANJA	**1.986.334.724.658,65**	**1.658.185.016.498,79**	**83,48**	**1.930.197.496.585**	**1.679.542.040.945**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan kondisi keuangan daerah, apakah cenderung mengalami Defisit Anggaran ataukah dalam kondisi Surplus Anggaran. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya Defisit Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya Surplus Anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

1) Penerimaan Pembiayaan
   a) SiLPA;
   b) Pencairan Dana Cadangan;
   c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d) Penerimaan Pinjaman Daerah;
   e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau;
   f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pengeluaran Pembiayaan
   a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
   b) Penyertaan Modal Daerah;
   c) Pembentukan Dana Cadangan;
   d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
   e) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan penganggaran pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD.

a) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

(1) pelampauan penerimaan PAD;
(2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
(3) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
(4) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
(5) penghematan belanja;
(6) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
(7) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Selanjutnya, persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang dilakukan bersamaan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

(1) Pemerintah Pusat;
(2) pemerintah daerah lain;
(3) Lembaga Keuangan Bank;
(4) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
(5) Masyarakat (obligasi daerah);

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

(1) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;

(2) salinan berita acara pelantikan kepala daerah;
(3) kerangka acuan kegiatan;
(4) RPJMD;
(5) RKPD;
(6) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
(7) APBD tahun anggaran berjalan;
(8) Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
(9) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
(10) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh kepala daerah;
(11) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
(12) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan daerah, dengan tujuan:

(1) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
(2) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
(3) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan kepala daerah dengan ketentuan dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kepala daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah (penyertaan modal daerah) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan investasi daerah (penyertaan modal daerah) tersebut, pemerintah daerah menyusun analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) pemerintah daerah sebelum melakukan investasi (penyertaan modal daerah).

Analisis investasi daerah (penyertaan modal daerah) dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Investasi daerah (penyertaan modal daerah) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Perda tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

- ✓ sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah;
- ✓ monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
- ✓ pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah;
- ✓ pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program *One Village One Product (OVOP)*;

sebagaimana maksud Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam masing-masing APBD.

(4) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek kode rekening berkenaan.

Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

(5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (*SDG's*) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah

daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

(1) DAK;
(2) pinjaman daerah; dan
(3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan. Perda tersebut sekurang-kurangnya memuat:

(1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
(2) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
(3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
(4) sumber dana cadangan; dan
(5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Perda tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

d) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2023 bersaldo nihil.

b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Pada tahun 2023, proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.0,00 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp.1.000.000.000,- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. SMI sebesar Rp.19.000.000.000,-. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

NO	URAIAN	APBD 2021		%	APBD TAHUN BERJALAN	PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2023
		TARGET	REALISASI (AUDITED)		APBD 2022	
C	**PEMBIAYAAN**					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	95.000.000.000,00	-
	Penggunaan SiLPA	38.490.843.212,65	38.490.843.212,65	100,00	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**38.490.843.212,65**	**38.490.843.212,65**	**100,00**	**95.000.000.000,00**	**-**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	1.500.000.000,00	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.100.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	19.000.000.000,00	19.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**2.100.000.000,00**	**-**	**-**	**20.500.000.000,00**	**20.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**36.390.843.212,65**	**38.490.843.212,65**	**105,77**	**74.500.000.000,00**	**(20.000.000.000,00)**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah adalah sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana dimuat pada RPJMD pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah juga merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya untuk pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

Elemen utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggungjawab. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas, oleh karena itu, harus ditentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 dengan mendasarkan pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021 dan 2022. Di samping itu, berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja dalam RPJMD Periode sebelumnya, identifikasi isu strategis, dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan seluruh Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2018.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya.Dalam rangka mewujudkan kondisi yang dicita-citakan, seluruh *stakeholder* dan pelaku pembangunan[1] melakukan koordinasi untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah sehingga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

[1] Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dapat tercapai secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan sehingga bisa memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan, disamping itu visi organisasi harus realistis dan kredibel.

Masyarakat Kabupaten Tanggamus berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energi untuk membangun dan identitas masyarakat untuk bergerak kearah yang lebih maju baik secara komparatif maupun secara kompetitif.

Pencapaian visi Kabupaten Tanggamus merupakan upaya menyeluruh yang harus didukung oleh seluruh *stakeholder* pembangunan dan pada akhirnya diharapkan membawa perubahan kearah kemajuan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat, isu-isu strategis, potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, penting sekali menjadikan visi pembangunan Kabupaten Tanggamus tersebut menjadi visi bersama *(shared vision).* Berdasarkan kondisi yang ada dan aspirasi rakyat yang berkembang dengan tetap memperhatikan kebijakan pada tingkat provinsi dan nasional maka Kabupaten Tanggamus telah merumuskan visi pembangunan jangka panjang untuk waktu 20 tahun mendatang yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom"**. Kata kunci visi ini adalah masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom. Masyarakat yang sejahtera yaitu masyarakat yang menjalankan agamanya secara taat dalam suasana budaya yang kreatif dan didukung manusia yang berkualitas, sedangkan daerah sai tanggom adalah daerah yang maju, indah, dan berwibawa.

Penyusunan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ini mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2018-2023 hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus

Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

"Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera"

Visi ini memuat lima kata kunci yaitu tangguh, agamis, mandiri, unggul dan sejahtera. Visi ini merupakan cita-cita dan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023.

Masyarakat yang **tangguh** adalah masyarakat yang kuat, andal, dan pantang menyerah. Tangguh memberikan motivasi dalam melaksanakan hal-hal yang besar untuk mengubah situasi ke arah yang lebih baik.

Masyarakat yang **agamis** adalah masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran beragama sehingga tingkat ketaatan pada ajaran agama makin baik serta memiliki rasa toleransi antar umat beragama.

Mandiri memiliki arti bahwa Kabupaten Tanggamus harus mampu menjalankan pembangunan daerah secara mandiri yang ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki serta pendapatan daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah.

Unggul mempunyai konotasi lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih ulet daripada lingkungannya, baik dalam skala kawasan maupun regional. Keunggulan dan daya saing mencakup domain perekonomian, sains, dan teknologi, pendidikan, dan *civilazation* (politik dan hukum).

Masyarakat yang **sejahtera** adalah masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman.

Misi merepresentasikan suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Secara ringkas pernyataan Misi Kabupaten Tanggamus memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Misi juga dapat diartikan sebagai upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dan berorientasi global dalam rangka mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanggamus diatas, ditetapkanlah Misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus secara ringkas dengan mempertimbangkan aspek relevan lainnya, seperti tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta karakteristik kelembagaan yang melekat pada lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dengan pertimbangan hal tersebut maka telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus yaitu (1) Membangun manusia yang berkualitas dan agamis; (2) Menata kehidupan sosial yang demokratis dan harmonis; (3) Menata pemerintahan yang bersih dan baik; dan (4) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkeadilan. Dari misi jangka panjang tersebut, maka telah dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagai sarana untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus periode 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1) **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas**

   Misi ini adalah upaya untuk memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa dan transparan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan dan kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik, efektif, dan efsien yang memperluas jangkauan.

Gambar IV.1. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing

Misi ini adalah upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul, berkerakter dan berdaya saing melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Gambar IV.2. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 2



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

3) Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika

Misi ini untuk mewujudkan desa yang tangguh sehingga dapat menjadi basis pembangunan sosial, ekonomi berbasis kerakyatan, kualitas sumberdaya manusia, kehidupan yang harmonis, keamanan, ketertiban dan ketentraman, yang bersinergi dengan pemberdayaan masyarakat.

Gambar IV.3. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 3



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

4) Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, menjamin ketahanan pangan melalui ravitalisasi pertanian dan perikanan melalui dukungan inovasi ilmu pengetahun dan teknologi.

Gambar IV.4. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 4

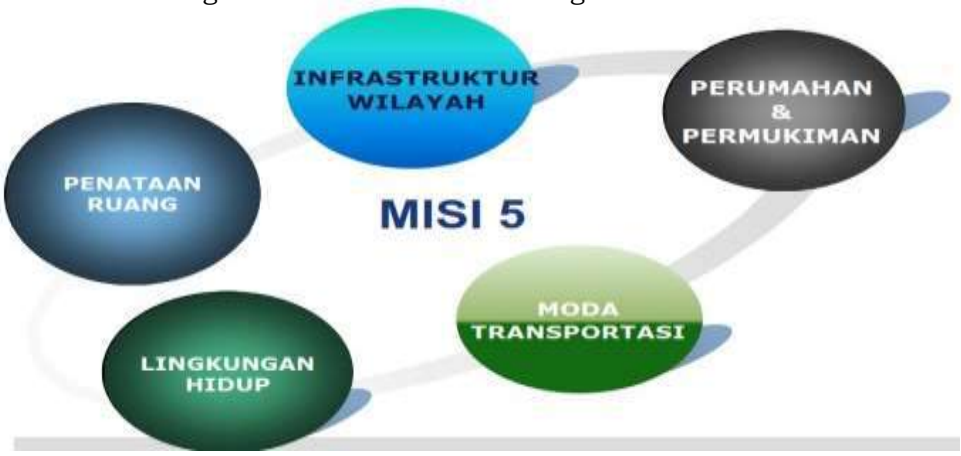


Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

5) Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata

Misi ini adalah upaya untuk mempercepat pembangunan sarana dan infrastruktur wilayah yang berkualitas guna memperlancar mobilitas dan percepatan pembangunan yang merata. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang menjamin pembangunan yang berkelanjutan, serta menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.

Gambar IV.5. Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 5

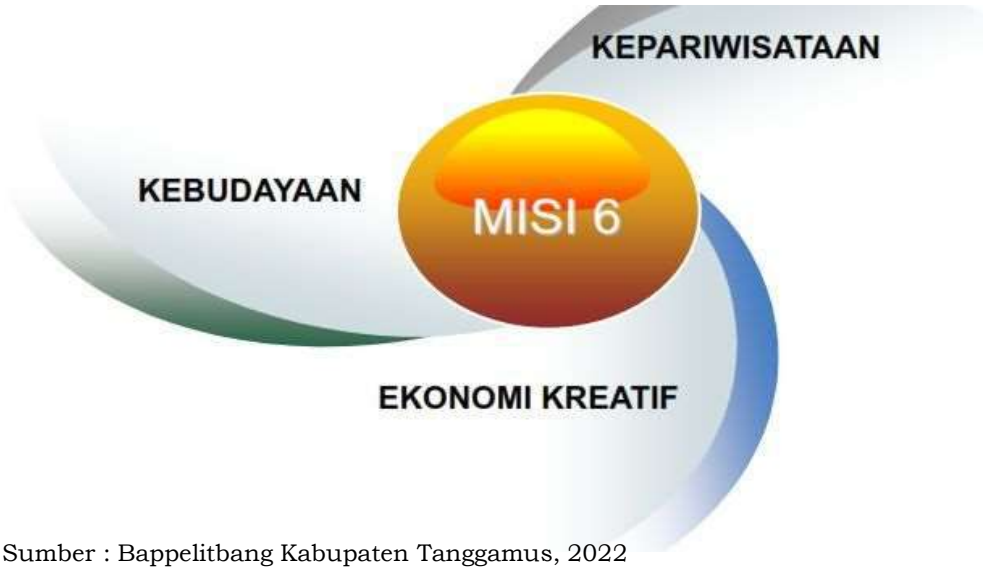


Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

6) Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan Sektor Pariwisata yang dapat menumbuhkembangkan ekonomi kreatif, kebhinekaan budaya, dan apresiasi karya seni masyarakat.

Gambar IV.6 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 6



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Strategi sebagai cara mencapai tujuan mempunyai ruang lingkup kebijakan, program, dan kegiatan. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan dalam urutan proses. Proses yang pertama adalah perumusan kebijakan. Kebijakan kemudian dijabarkan kedalam program dan program dituangkan dalam kegiatan.

Perumusan kebijakan merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan. Karena itu perlu dirumuskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah turunan visi yang masih bersifat umum. Untuk itu, tujuan diterjemahkan lebih lanjut dalam sasaran, yang sudah lebih nyata sehingga diharapkan sudah terukur.

Berdasarkan misi yang ada maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

NO	MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN 2023
	Visi : "Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera"									
1	Misi 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	T.1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	IS.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian	BB
							IS.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	85.0000
					S.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87.00
2	Misi 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	T.2	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	S.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan	IS.4	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.70
					S.4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	IS.5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.25
							IS.6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.35
3	Misi 3	Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	T.3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	S.5	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	IS.7	Angka Kemiskinan	Persen	10.80
							IS.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.89
					S.6	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius	IS.9	Indeks Rasa Aman	Angka	0.94
							IS.10	Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	13.10
					S.7	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IS.11	Indeks Gini	Angka	0.290

NO	MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN 2023
	Visi : "Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera"									
			T.4	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas	S.8	Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk	IS. 12	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Persen	5.00
			T.5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	S.9	Meningkatnya Pekon Maju	IS. 13	Persentase Pekon Maju	Persen	19.06
					S. 10	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IS. 14	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67.50
							IS. 15	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	570.00
4	Misi 4	Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T.6	Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan	S. 11	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan	IS. 16	Nilai Tukar Petani	Angka	97.06
							IS. 17	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	83.60
5	Misi 5	Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	T.7	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	S. 12	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	IS. 18	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	52.00
					S. 13	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah	IS. 19	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	65.00
					S. 14	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	IS. 20	Rasio Elektrifikasi	Persen	98.00
					S. 15	Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	IS. 21	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	7.00
					S. 16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IS. 22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	65.56
					S. 17	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	IS. 23	Indeks Risiko Bencana	Angka	120.00

NO	MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET CAPAIAN 2023
	Visi : "Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera"									
6	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	T.8	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	S. 18	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal	IS. 24	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	30.00

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Gambar IV.7. Penyusunan Tema Pembangunan RKP Tahun 2023

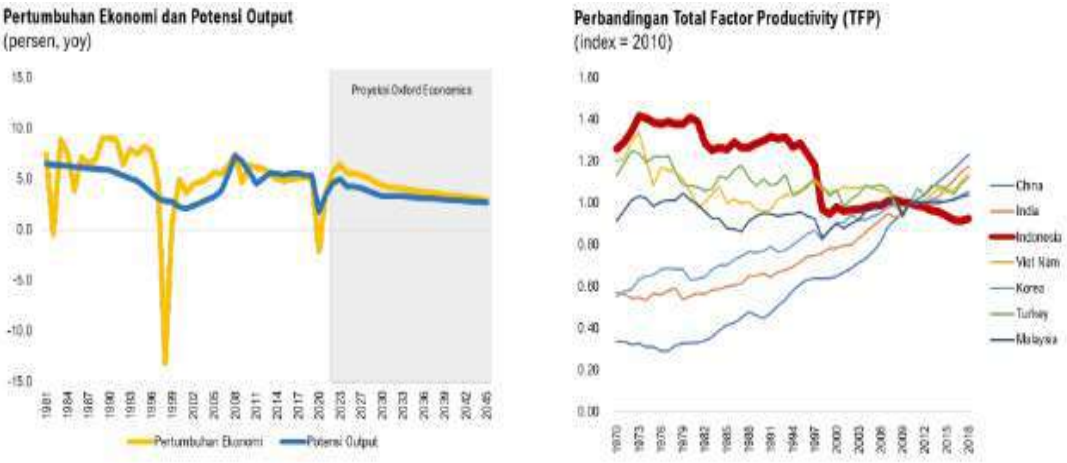


Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022

Tema RKP Tahun 2023 jtga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2O2O terkontraksi 2,O7 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomiseperti sebelum krisis. Dengan menggunakan skenario business as usual (BAU), pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca-COVID-lg diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas Indonesia dibandingkan negara setara dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Gambar IV.8 Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Produktivitas



Sumber : BPS, Oxford Economics, Asian Productyvity Database, 2022

Penurunan produktivitas tersebut harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi COVID-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari ratarata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi Negara maju. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relative rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (AI) dan big data, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi structural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Transformasi ekonomi Indonesia dilaksanakan pada seluruh daerah. Provinsi Bali, yang paling terdampak negatif pandemi menjadi daerah percontohan atau pilot project melalui pelaksanaan Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dalam jangka menengah-panjang, transformasi ekonomi Bali dilakukan melalui (1) Bali Pintar dan Sehat, (2) Bali Produktif, (3) Bali Hijau, (4) Bali Terintegrasi, (5) Bali Smart Island, dan (6) Bali Kondusif. Semangat transformasi ekonomi yang dilakukan di Provinsi Bali menjadi praktik baik yang perlu diadopsi oleh provinsi lain melalui penyelarasan strategi jangka menengah-panjang dengan transformasi ekonomi Indonesia.

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis COVID-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan legacy pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap

perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap sejalan dengan target keluar dari middle-income trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar IV.9. Kerangka Pikir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

1) Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indicator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan oleh infografis sebagai berikut.

Gambar IV.10 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas, 2022

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

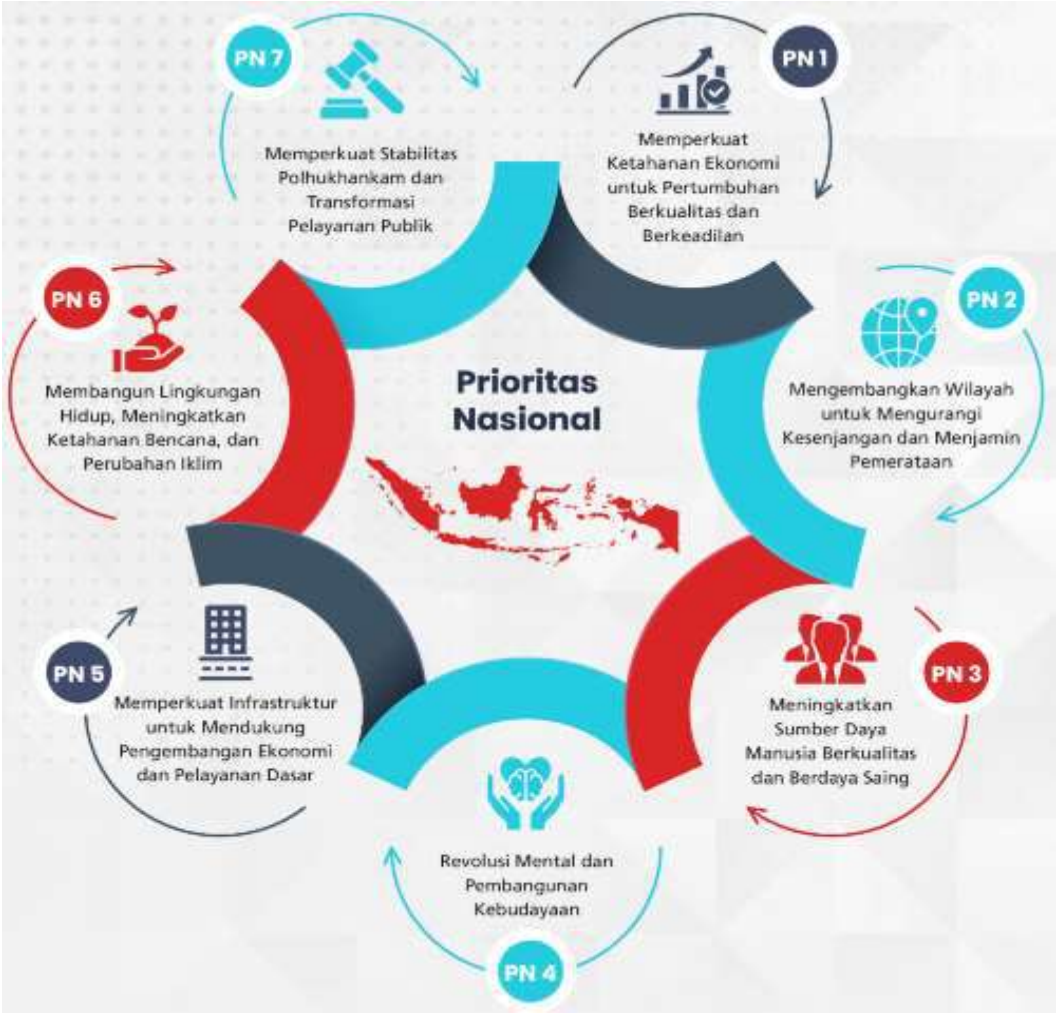
Gambar IV.11 Strategi Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Gambar IV.12 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022

Dalam tujuh PN pada RKP 2023, arah kebijakan masing-masing PN adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2023 dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Secara rinci sasaran dari masing-masing PN diuraikan sebagai berikut:



Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan;

(2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;

(2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.





Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

(1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);

(2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;

(3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi *stunting* pada balita, (d) menurunkan insidensi *tuberculosis*, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk >18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10–18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;

(4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);

(5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;

(6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

(1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;

(2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;

(3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;

(4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;

(5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;

(6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);

(2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 Km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara;

(3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;

(4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);

(5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

(2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;

(3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.

PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

(1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

(2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;

(3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;

(4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;

(5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.

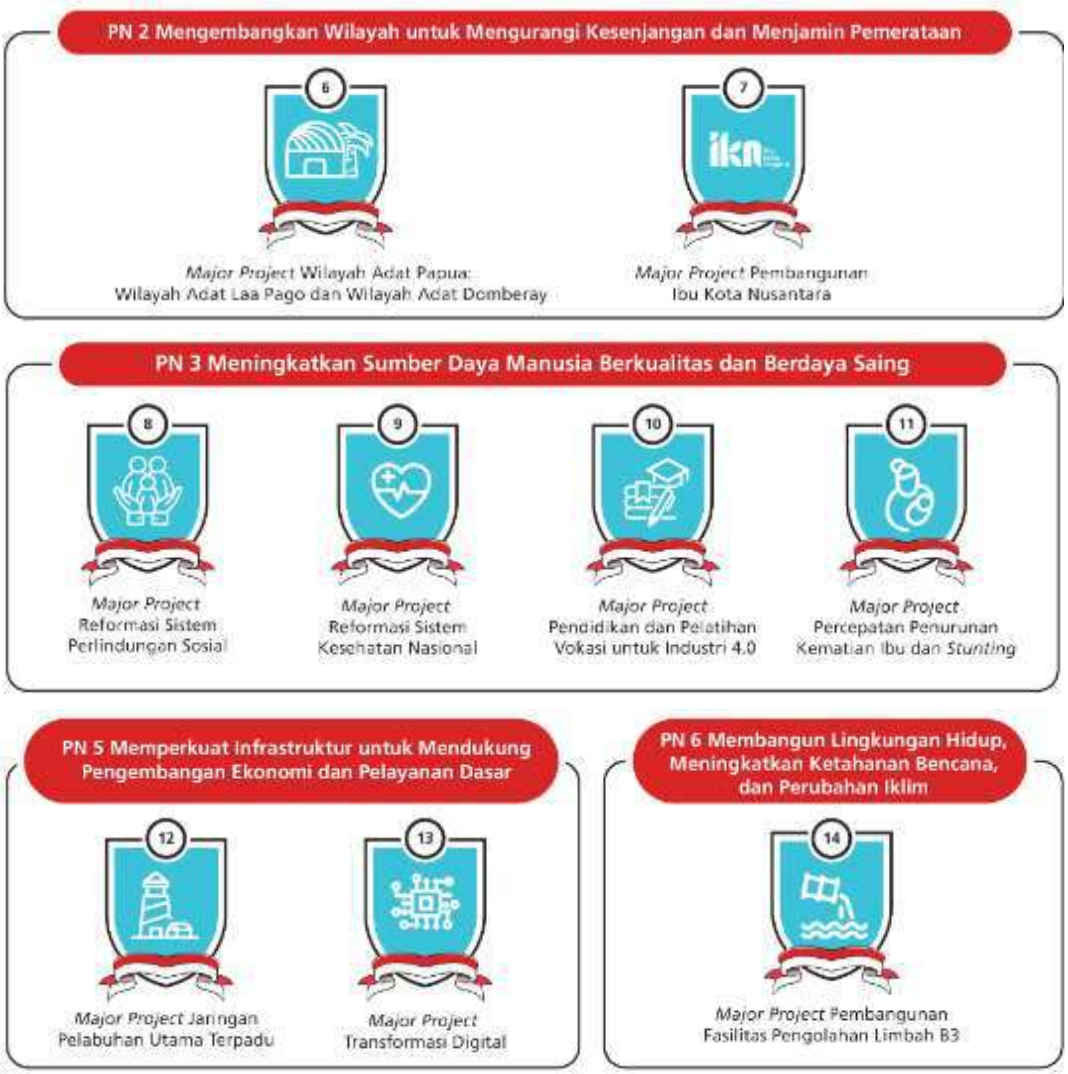
Pencapaian tujuh PN di atas didukung oleh pelaksanaan 45 proyek prioritas strategis/Major Project (MP) sebagai leverage point yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional RKP Tahun 2023. Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2020 tentang RPJMN Tahun 2020–2024, disebutkan bahwa MP dirancang sebagai penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN, RKP dan APBN tahunannya. Dalam pelaksanaannya, indikasi pendanaan Major Project dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta direktif presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target-target pembangunan RKP Tahun 2023 menuntut adanya penekanan kebijakan melalui pelaksanaan beberapa MP yang secara spesifik signifikan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan tahun 2023.

Untuk itu ditetapkan 14 MP yang menjadi penekanan (highlight), yakni (1) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, (2) Pengelolaan Terpadu UMKM, (3) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, (4) Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan), (5) Destinasi Pariwisata Prioritas, (6) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, (7) Pembangunan Ibu Kota Nusantara, (8) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (10) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, (11) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, (12) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, (13) Transformasi Digital, dan (14) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Gambar IV.13 Highlight Major Project RKP Tahun 2023





Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2022

Penerapan mekanisme Clearing House (CH) dalam perencanaan MP yang telah dimulai pada RKP Tahun 2022 tetap dilaksanakan dan dipertajam pada RKP Tahun 2023. Penajaman mekanisme CH bertujuan untuk menjamin tercapainya output MP dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024 (not only sent but delivered). Penajaman antara lain meliputi (1) optimalisasi integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran pembangunan nasional; (2) penguatan mekanisme CH dalam penyusunan cascading, executive summary, dan info memo MP; serta (3) intensifikasi pelibatan stakeholder dalam mekanisme CH melalui rangkaian pertemuan multipihak

(trilateral/multilateral meeting) guna memastikan komitmen para pihak mulai dari perencanaan hingga implementasi MP yang berorientasi pada pencapaian output MP pada tahun 2024.

Sejalan dengan visi, misi dan prioritas tahap ke-4 RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025, RKP Tahun 2023 serta penyelarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Lampung 2019-2024, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Rancangan Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023, yaitu :

"Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan dan Daya Saing Daerah"

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2023, sebagai berikut :

1) Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3) Pembangunan infrastruktur;
4) Reformasi birokrasi;
5) Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
6) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana;

Dengan terjadinya pandemi global *Covid-19* yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian Provinsi Lampung dan pertumbuhan ekonomi, maka Provinsi Lampung memfokuskan penanganan dampak *Covid-19* dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan bauran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perkonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta sinergi pembangunan antara daerah dan nasional; sasaran makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tahun 2023 diarahkan sebagaimana tercantum pada diagram dibawah sebagai berikut:

Tabel IV.2 Sasaran Makro Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 - 4,5
2.	Laju Inflasi (%)	3 ± 1
3.	PDRB Perkapita ADHA (Juta Rupaih)	43 – 44
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,0 - 4,3
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 - 11,9
6.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	70,3 - 70,6
7.	Indeks Gini (nilai)	0,302 - 0,319
8.	Nilai Tukar Petani (nilai)	104 – 105
9.	Pertumbuhan PAD (%)	4,74
10.	Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
11.	Penuruan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	7,066

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2022

Sementara itu pembangunan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 mengambil tema :

"Peningkatan Produktivitas untuk Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah"

Dalam rangka tercapainya kesesuaian dan sinkronisasi dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023 adalah :

1) Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
2) Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas;
3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan;
4) Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan;
5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah;
6) Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Demikian pula halnya dengan sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2023 disinkronkan dengan target sasaran makro Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.3 Penyelarasan Sasaran Makro RKP, RKPD Provinsi Lampung dan RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	PROYEKSI 2023		
			NASIONAL	LAMPUNG	TANGGAMUS
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3-5,9	3,5 - 4,5	4,05
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	-	43 – 44	28,6
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,5-8,5	11,4 - 11,9	10,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,3-6,0	4,0 - 4,3	2,89
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,31-73,49	70,3 - 70,6	66,60
6	Indeks Gini	Angka	0,375-0,378	0,302 - 0,319	0,290
7	Nilai Tukar Petani	Angka	103-1-5	104 – 105	97,06
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	27,02	7,066	7,00

Sumber : Bappenas RI, Bappeda Provinsi Lampung, Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang telah diuraikan diatas, berikut ini disajikan data Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2023.

Tabel IV.4 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**		**827,341,727,481**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503,876,268,662	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	90,703,062,283	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	55,098,800	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,347,700,083	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36,580,753,545	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	130,571,000	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,942,000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	400,463,500	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,576,129,420	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43,152,149,600	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	384,630,500	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,184,330,640	Puskesmas Siring Betik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,020,313,780	Puskesmas Wonosobo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,094,244,000	Puskesmas Sudimoro
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,559,022,773	Puskesmas Sukaraja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,189,034,760	Puskesmas Sanggi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,443,762,860	Puskesmas Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	910,273,360	Puskesmas Way Nipah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,366,905,880	Puskesmas Pasar Simpang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,204,448,350	Puskesmas Negara Batin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,954,742,600	Puskesmas Pulau Panggung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,585,350,000	Puskesmas Ngarip
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,862,464,676	Puskesmas Air Naningan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,596,243,490	Puskesmas Talang Padang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,000,635,620	Puskesmas Margoyoso

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,604,707,450	Puskesmas Gisting
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,032,380,150	Puskesmas Kedaloman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,754,589,805	Puskesmas Rantau Tijang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,080,746,460	Puskesmas Sumanda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,213,859,090	Puskesmas Bulok Sukamara
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,608,975,660	Puskesmas Putih Doh
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	909,065,940	Puskesmas Klumbayan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,274,181,540	Puskesmas Antar Brak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	825,765,160	Puskesmas Klumbayan Barat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	668,280,492	Puskesmas Sumberejo
		Program Pengendalian Penduduk	167,360,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,371,768,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,918,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,378,748,009	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	450,475,400	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,714,958,900	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	103,969,800	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan	3,520,653,443	Dinas Perpustakaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dan Kearsipan Daerah
		Program Pembinaan Perpustakaan	99,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	**Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi, Kehidupan Sosial, Budaya, Keagamaan, dan Stabilitas Kamtibmas**		**498,012,906,423**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,996,745,737	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168,074,500	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,674,780,553	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	115,299,500	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	5,400,000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	338,516,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	53,078,700	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	102,514,000	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	29,612,300	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,531,968,658	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	10,097,500	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11,338,800	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	147,649,020	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,859,589,670	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	278,154,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	854,390,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7,479,833,980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	33,311,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	9,220,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15,114,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	21,940,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,439,720,913	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penataan Desa	1,452,216,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,828,481,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,215,770,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,441,722,108	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29,999,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	441,322,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,597,829,454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	93,360,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360,216,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	63,267,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengembangan Kebudayaan	195,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	30,065,000	Dinas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	89,007,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	54,717,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	99,420,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	51,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,162,750,948	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,485,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	401,915,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	609,847,916	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,092,049,324	Kecamatan Kota Agung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17,160,000	Kecamatan Kota Agung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36,325,000	Kecamatan Kota Agung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000	Kecamatan Kota Agung
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16,445,000	Kecamatan Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86,150,000	Kelurahan Baros
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	355,144,100	Kelurahan Baros
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	62,400,000	Kelurahan Baros
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109,127,209	Kelurahan Pasar Madang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	323,834,300	Kelurahan Pasar Madang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,800,000	Kelurahan Pasar Madang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,959,590	Kelurahan Kuripan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	328,627,150	Kelurahan Kuripan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	144,000,000	Kelurahan Kuripan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,980,638,551	Kecamatan Wonosobo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,270,600	Kecamatan Wonosobo
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,814,400	Kecamatan Wonosobo
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20,309,100	Kecamatan Wonosobo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,481,034,721	Kecamatan Talangpadang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50,626,650	Kecamatan Talangpadang
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,100,000	Kecamatan Talangpadang
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,500,000	Kecamatan Talangpadang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,731,391,247	Kecamatan Pulau Panggung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	32,735,050	Kecamatan Pulau Panggung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,000,000	Kecamatan Pulau Panggung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,902,500	Kecamatan Pulau Panggung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,799,106,658	Kecamatan Pugung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13,030,000	Kecamatan Pugung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40,050,000	Kecamatan Pugung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,482,600	Kecamatan Pugung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,200,000	Kecamatan Pugung
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,635,000	Kecamatan Pugung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,338,588,475	Kecamatan Cukuh Balak
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27,328,250	Kecamatan Cukuh Balak
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,200,000	Kecamatan Cukuh Balak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,734,608,696	Kecamatan Semaka
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38,834,600	Kecamatan Semaka
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34,875,000	Kecamatan Semaka
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	980,000	Kecamatan Semaka
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4,796,200	Kecamatan Semaka
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,412,838,494	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13,904,300	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21,846,900	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,781,500	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16,520,000	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,244,200	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,518,360,447	Kecamatan Sumberejo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16,414,000	Kecamatan Sumberejo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30,647,050	Kecamatan Sumberejo
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55,402,500	Kecamatan Sumberejo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,415,000	Kecamatan Sumberejo

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9,846,800	Kecamatan Sumberejo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,314,795,193	Kecamatan Ulu Belu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16,696,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	38,383,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,200,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,920,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,602,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,686,641,645	Kecamatan Kelumbayan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,387,500	Kecamatan Kelumbayan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7,132,500	Kecamatan Kelumbayan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,000,000	Kecamatan Kelumbayan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8,392,500	Kecamatan Kelumbayan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,175,000	Kecamatan Kelumbayan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,064,025,190	Kecamatan Gisting
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	24,255,563	Kecamatan Gisting
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	36,614,100	Kecamatan Gisting
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28,087,500	Kecamatan Gisting
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14,982,900	Kecamatan Gisting
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22,408,500	Kecamatan Gisting
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,578,040,730	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8,609,800	Kecamatan Kota Agung Timur

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	20,511,500	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,245,000	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3,425,000	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,286,300	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,538,528,693	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11,706,700	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	68,205,300	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,934,000	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13,782,500	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27,637,300	Kecamatan Kota Agung Barat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,677,452,928	Kecamatan Gunung Alip
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8,989,500	Kecamatan Gunung Alip
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	13,232,500	Kecamatan Gunung Alip
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,090,000	Kecamatan Gunung Alip
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,925,000	Kecamatan Gunung Alip
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2,325,000	Kecamatan Gunung Alip
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,592,364,863	Kecamatan Limau
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10,698,200	Kecamatan Limau
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	17,177,390	Kecamatan Limau
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34,482,600	Kecamatan Limau
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2,665,000	Kecamatan Limau

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4,729,700	Kecamatan Limau
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,705,200,212	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2,660,000	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27,150,000	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,600,000	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6,750,000	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,201,036,915	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8,745,000	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61,957,500	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,600,000	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6,390,000	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,583,380,950	Kecamatan Air Naningan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	223,200	Kecamatan Air Naningan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	21,217,390	Kecamatan Air Naningan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000	Kecamatan Air Naningan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,400,000	Kecamatan Air Naningan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,602,193,202	Kecamatan Bulok
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	43,745,000	Kecamatan Bulok
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,450,000	Kecamatan Bulok
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1,800,000	Kecamatan Bulok
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,299,929,920	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	47,708,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	199,254,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,014,126,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	388,420,164,520	Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
3	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**		**165,229,815,085**	
		Program Pengelolaan Arsip	29,477,150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	523,733,978	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5,378,028,000	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	554,581,400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,045,901,392	Bagian Umum Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	223,925,653	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332,447,100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,718,012,610	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	55,332,793,242	Sekretariat DPRD
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4,941,067,700	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,512,673,801	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,865,633,660	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,239,018,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	31,008,216,824	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,509,551,350	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	992,201,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	403,460,200	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,577,809,765	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	712,080,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	528,216,624	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
		Program Kepegawaian Daerah	43,720,750	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,165,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,033,429,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11,662,456,886	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,415,556,400	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	495,655,000	Inspektorat
4	**Memperkuat Daya Dukung Infrastruktur dan Konektivitas Kewilayahan**		**139,765,608,303**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,689,866,570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11,121,233,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	41,128,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	19,434,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	1,905,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2,804,279,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	27,805,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	373,901,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,063,389,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	1,125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	7,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,770,868,600	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	248,728,450	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	2,540,000	Dinas Perhubungan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,923,910,186	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,127,271,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	341,520,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	**Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah**		**35,190,371,058**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,359,155,694	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	308,584,900	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,506,035,737	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	63,740,700	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	72,190,100	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	48,157,500	Dinas Perikanan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,474,402,613	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	508,020,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	134,393,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	160,978,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	206,346,800	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	5,540,870,500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,149,184,464	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	579,044,250	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79,266,800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
6	**Mengelola Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana**		**14,001,612,595**	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,635,749,964	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10,560,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,131,840,219	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	234,330,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,638,891,212	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	40,120,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	690,121,200	Dinas Lingkungan Hidup
	JUMLAH		**1,679,542,040,945**	

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat terpetakan Program Pembangunan Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2023 yaitu :

1) PD1 Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, didukung anggaran sebesar Rp.827.341.727.481,-;
2) PD2 Meningkatkan nilai tambah ekonomi, kehidupan sosial, budaya, keagamaan dan stabilitas kamtibmas, didukung anggaran sebesar Rp.498.012.906.423,-;
3) PD3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan, didukung anggaran sebesar Rp.165.229.815.085,-;
4) PD4 Memperkuat daya dukung infrastruktur dan konektivitas kewilayahan, didukung anggaran sebesar Rp.139.765.608.303,-;
5) PD5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah, didukung anggaran sebesar Rp.35.190.371.058,-;
6) PD6 Mengelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, didukung anggaran sebesar Rp.14.001.612.595,-.

Tabel IV.5 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Meningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan**		**9,699,482,766**	
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29,999,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	441,322,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Umkm	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pelayanan Penanaman Modal	93,360,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360,216,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	89,007,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	54,717,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	99,420,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perekonomian dan Pembangunan	609,847,916	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	308,584,900	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	63,740,700	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	72,190,100	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	48,157,500	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	508,020,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	134,393,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	160,978,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	206,346,800	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	5,540,870,500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	579,044,250	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79,266,800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2	**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**		**215,642,227,864**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	90,703,062,283	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum	55,098,800	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36,580,753,545	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	130,571,000	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,942,000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	400,463,500	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	43,152,149,600	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	384,630,500	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,184,330,640	Puskesmas Siring Betik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,020,313,780	Puskesmas Wonosobo

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,094,244,000	Puskesmas Sudimoro
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,559,022,773	Puskesmas Sukaraja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,189,034,760	Puskesmas Sanggi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,443,762,860	Puskesmas Kota Agung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	910,273,360	Puskesmas Way Nipah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,366,905,880	Puskesmas Pasar Simpang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,204,448,350	Puskesmas Negara Batin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,954,742,600	Puskesmas Pulau Panggung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,585,350,000	Puskesmas Ngarip
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,862,464,676	Puskesmas Air Naningan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,596,243,490	Puskesmas Talang Padang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,000,635,620	Puskesmas Margoyoso
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,604,707,450	Puskesmas Gisting
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,032,380,150	Puskesmas Kedaloman
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,754,589,805	Puskesmas Rantau Tijang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,080,746,460	Puskesmas Sumanda
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,213,859,090	Puskesmas Bulok Sukamara
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,608,975,660	Puskesmas Putih Doh
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	909,065,940	Puskesmas Klumbayan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,274,181,540	Puskesmas Antar Brak
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	825,765,160	Puskesmas Klumbayan Barat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	668,280,492	Puskesmas Sumberejo
		Program Pengendalian Penduduk	167,360,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,371,768,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,918,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	450,475,400	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,714,958,900	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	103,969,800	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	99,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	**Pembangunan Infrastruktur**		**114,912,171,947**	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11,121,233,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	41,128,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Permukiman	19,434,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan Gedung	1,905,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2,804,279,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Jalan	27,805,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	373,901,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,063,389,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Pengembangan Perumahan	1,125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Kawasan Permukiman	7,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	248,728,450	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	2,540,000	Dinas Perhubungan
4	**Reformasi Birokrasi**		**22,843,733,941**	
		Program Pengelolaan Arsip	29,477,150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	523,733,978	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5,378,028,000	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan	554,581,400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	223,925,653	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	332,447,100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4,941,067,700	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,865,633,660	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,239,018,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,509,551,350	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	992,201,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	403,460,200	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	712,080,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	43,720,750	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,165,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,033,429,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,415,556,400	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	495,655,000	Inspektorat
5	**Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya**		**19,722,182,868**	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	168,074,500	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pemberdayaan Sosial	115,299,500	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	5,400,000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	338,516,000	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	53,078,700	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	102,514,000	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	29,612,300	Dinas Sosial
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	10,097,500	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11,338,800	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	147,649,020	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan Perempuan	278,154,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	854,390,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Pendaftaran Penduduk	33,311,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	9,220,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15,114,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	21,940,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penataan Desa	1,452,216,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,828,481,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,215,770,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Kebudayaan	195,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	51,000,000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,162,750,948	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	401,915,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000	Kecamatan Kota Agung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,814,400	Kecamatan Wonosobo
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	56,100,000	Kecamatan Talangpadang
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,000,000	Kecamatan Pulau Panggung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,482,600	Kecamatan Pugung
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,200,000	Kecamatan Cukuh Balak
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34,875,000	Kecamatan Semaka
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45,781,500	Kecamatan Pematang Sawa
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	55,402,500	Kecamatan Sumberejo
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	43,200,000	Kecamatan Ulu Belu
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,000,000	Kecamatan Kelumbayan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28,087,500	Kecamatan Gisting
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,245,000	Kecamatan Kota Agung Timur
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,934,000	Kecamatan Kota Agung Barat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,090,000	Kecamatan Gunung Alip
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34,482,600	Kecamatan Limau
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,600,000	Kecamatan Bandar Negeri Semuong
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36,600,000	Kecamatan Kelumbayan Barat
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,000,000	Kecamatan Air Naningan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	33,450,000	Kecamatan Bulok
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	47,708,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	199,254,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,014,126,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	**Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana**		**1,595,131,200**	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10,560,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Program Penanggulangan Bencana	234,330,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	40,120,000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	690,121,200	Dinas Lingkungan Hidup
	JUMLAH		**384,414,930,586**	

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Keselarasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023 ditunjukkan dalam bentuk dukungan sebagai berikut :

1) PD1 Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan, didukung anggaran sebesar Rp.9.699.482.766,-;
2) PD2 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, didukung anggaran sebesar Rp.215.642.227.864,-;
3) PD3 Pembangunan infrastruktur, didukung anggaran sebesar Rp.114.912.171.947,-;
4) PD4 Reformasi birokrasi, didukung anggaran sebesar Rp.22.843.733.941,-;
5) PD5 Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya, didukung anggaran sebesar Rp.19.722.182.868,-;
6) PD6 Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana, didukung anggaran sebesar Rp.1.595.131.200,-;

Tabel IV.6 Dukungan Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pettumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**			**19,732,913,747**	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	30,065,000	Dinas Tenaga Kerja
		2 Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11,121,233,897	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		3 Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	1 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	308,584,900	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	134,393,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				579,044,250	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	79,266,800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	160,978,000	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
			5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	206,346,800	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
			6 Program Penyuluhan Pertanian	5,540,870,500	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	63,740,700	Dinas Perikanan
			2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	72,190,100	Dinas Perikanan
			3 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	48,157,500	Dinas Perikanan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	1 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	29,999,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	441,322,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			3 Program Pengembangan Umkm	100,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	1 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	120,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	99,420,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	89,007,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			2 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	54,717,500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1 Program Pelayanan Penanaman Modal	93,360,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			2 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	360,216,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**			**26,460,315,693**	
		1 Pembangunan Wilayah Sumatera	1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	508,020,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			2 Program Pengembangan Perumahan	1,125,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,063,389,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			4 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	51,000,000	Dinas Tenaga Kerja
			5 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2,033,429,500	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
			6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	154,479,763	Kecamatan
			7 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1,716,595,830	Kecamatan
			9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	373,901,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			10 Program Kawasan Permukiman	19,434,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**			**822,875,796,265**	
		1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1 Program Pendaftaran Penduduk	33,311,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 Program Pencatatan Sipil	9,220,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15,114,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	21,940,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			5 Program Pengendalian Penduduk	167,360,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			6 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,371,768,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	1 Program Pemberdayaan Sosial	115,299,500	Dinas Sosial
			2 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	5,400,000	Dinas Sosial
			3 Program Rehabilitasi Sosial	338,516,000	Dinas Sosial
			4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	53,078,700	Dinas Sosial
			5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	29,612,300	Dinas Sosial
		3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	36,580,753,545	Dinas Kesehatan
				43,152,149,600	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
			2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	130,571,000	Dinas Kesehatan
				384,630,500	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
			3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	464,942,000	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	400,463,500	Dinas Kesehatan
			5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69,347,700,083	Dinas Kesehatan
				31,576,129,420	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
				33,944,324,536	Puskesmas
		4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	1 Program Pengelolaan Pendidikan	90,703,062,283	Dinas Pendidikan
			2 Program Pengembangan Kurikulum	55,098,800	Dinas Pendidikan
			3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	503,876,268,662	Dinas Pendidikan
		5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	1 Program Perlindungan Perempuan	278,154,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			2 Program Perlindungan Khusus Anak	854,390,100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			3 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	450,475,400	Dinas Pemuda dan Olahraga
			4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1,714,958,900	Dinas Pemuda dan Olahraga
			5 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	103,969,800	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		6 Pengentasan Kemiskinan	1 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2,918,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	1 Program Perencanaan Tenaga Kerja	10,097,500	Dinas Tenaga Kerja
			2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	11,338,800	Dinas Tenaga Kerja
			3 Program Penempatan Tenaga Kerja	147,649,020	Dinas Tenaga Kerja
			4 Program Perekonomian dan Pembangunan	609,847,916	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**			**6,874,721,598**	
		1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4,162,750,948	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
			2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	199,254,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	1 Program Pengembangan Kebudayaan	195,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
		3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	1 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,014,126,600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	36,591,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	89,813,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	47,708,100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	1 Program Pembinaan Perpustakaan	99,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			2 Program Pengelolaan Arsip	29,477,150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5	**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**			**84,406,821,050**	
		1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3 Program Pengembangan Permukiman	7,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			4 Program Penataan Bangunan Gedung	1,905,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			5 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	2,804,279,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		2 Infrastruktur Ekonomi	1 Program Penyelenggaraan Jalan	27,805,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	41,128,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			3 Program Pengelolaan Pelayaran	2,540,000	Dinas Perhubungan
		3 Infrastruktur Perkotaan	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	248,728,450	Dinas Perhubungan
		4 Energi dan Ketenagalistrikan	1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	30,065,000	Dinas Tenaga Kerja
		5 Transformasi Digital	1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,127,271,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	341,520,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	50,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	63,267,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**			**1,697,645,200**	
		1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	600,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			2 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	40,120,000	Dinas Lingkungan Hidup
			3 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
		2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	1 Program Penanggulangan Bencana	234,330,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	10,560,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			3 Program Penanganan Bencana	102,514,000	Dinas Sosial
		3 Pembangunan Rendah Karbon	1 Program Pengelolaan Persampahan	690,121,200	Dinas Lingkungan Hidup
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**			**717,523,892,392**	
		1 Konsolidasi Demokrasi	1 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	4,215,770,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4,941,067,700	Sekretariat DPRD
		2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	-	-	-
		3 Penegakan Hukum Nasional	1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	401,915,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,485,200	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1 Program Perekonomian dan Pembangunan	554,581,400	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
			2 Program Penataan Desa	1,452,216,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			4 Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,828,481,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,865,633,660	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
			6 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,239,018,700	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
			7 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	389,929,715,870	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			8 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	992,201,000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			9 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	403,460,200	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			10 Program Kepegawaian Daerah	712,080,600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
				43,720,750	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
			11 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	150,165,800	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			12 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,415,556,400	Inspektorat
			13 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	495,655,000	Inspektorat
			14 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,300,400	Kecamatan
			15 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	477,290,100	Kecamatan
			16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13,689,866,570	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
				168,074,500	Satuan Polisi Pamong Praja
				4,635,749,964	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
				3,131,840,219	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				3,674,780,553	Dinas Sosial
				3,531,968,658	Dinas Tenaga Kerja
				4,859,589,670	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				13,359,155,694	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				4,638,891,212	Dinas Lingkungan Hidup
				7,479,833,980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				3,439,720,913	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				4,770,868,600	Dinas Perhubungan
				3,923,910,186	Dinas Komunikasi dan Informatika
				3,597,829,454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				3,378,748,009	Dinas Pemuda dan Olahraga
				3,520,653,443	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
				3,506,035,737	Dinas Perikanan
				4,474,402,613	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				6,149,184,464	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				5,378,028,000	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
				10,045,901,392	Bagian Umum Sekretariat Daerah
				223,925,653	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
				332,447,100	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
				18,718,012,610	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
				523,733,978	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
				55,332,793,242	Sekretariat DPRD
				10,512,673,801	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RKPD KABUPATEN TANGGAMUS	PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
				31,008,216,824	Badan Pengelola Keuangan Daerah
				4,577,809,765	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				528,216,624	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
				11,662,456,886	Inspektorat
				6,441,722,108	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				36,922,513,933	Kecamatan
				3,299,929,920	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,996,745,737	Satuan Polisi Pamong Praja
			2 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	783,345,100	Kecamatan
	JUMLAH			**1,679,542,040,945**	

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Komitmen Kabupaten Tanggamus dalam mendukung Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 ditunjukkan dengan penganggaran Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 yang sasaran dan arah kebijakkannya sinergi dengan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023, sebagai berikut :

1) PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pettumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.19.732.913.747,-
2) PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.26.460.315.693,-

3) PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, didukung dengan anggaran sebesar Rp.822.875.796.265,-
4) PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.874.721.598,-
5) PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, didukung dengan anggaran sebesar Rp.84.4006.821.050,-
6) PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, didukung dengan anggaran sebesar Rp.1.697.645.200,-
7) PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, didukung dengan anggaran sebesar Rp.717.523.892.392,-

Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada uraian diatas juga berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses yang dilakukan oleh legislatif. Cara yang dilakukan yaitu melalui penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran yang selanjutnya dipadukan juga dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Selain itu juga dikolaborasikan dengan berbagai Inovasi Daerah seperti Bude Sar'I (Bunda Dewi Serap Aspirasi dan Informasi) yang turun langsung ke masyarakat dan berkantor di Kecamatan dengan menekankan pada pencapaian 55 Rencana Aksi De-Sa ASIK (Agamis, Sejahtera, Inovatif dan Kondusif). Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya dimasukan kedalam *e-planning* yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang langsung dientry oleh akun masing-masing anggota DPRD melalui para pendamping DPRD yang telah ditunjuk, selanjutnya usulan tersebut diverifikasi oleh akun Sekretariat DPRD dan divalidasi oleh akun Mitra Bappelitbang yang berada dimasing-masing Bidang Teknis.

Tahapan selanjutnya, usulan yang telah diverifikasi dan divalidasi akan dibahas dengan para Perangkat Daerah yang secara teknis membidangi sebagai Perangkat Daerah tujuan dalam Forum Gabungan Perangkat Daerah (Forgab-PD) yang hasilnya akan dijadikan sebagai lokus dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Gambar IV.14 Alur Pengusulan Musrenbang dan Pokir DPRD Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Sumber : Kementerian Dalam Negeri, Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

Gambar IV.15 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil I



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

Gambar IV.16 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil II



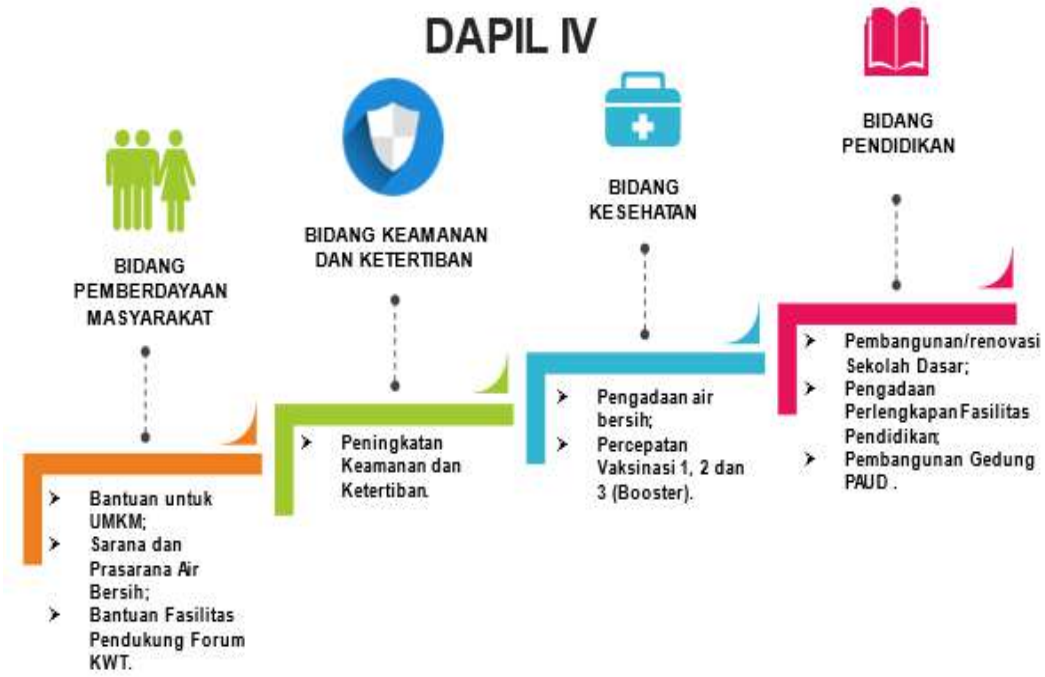
Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

Gambar IV.17 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil III



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

Gambar IV.18 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil IV



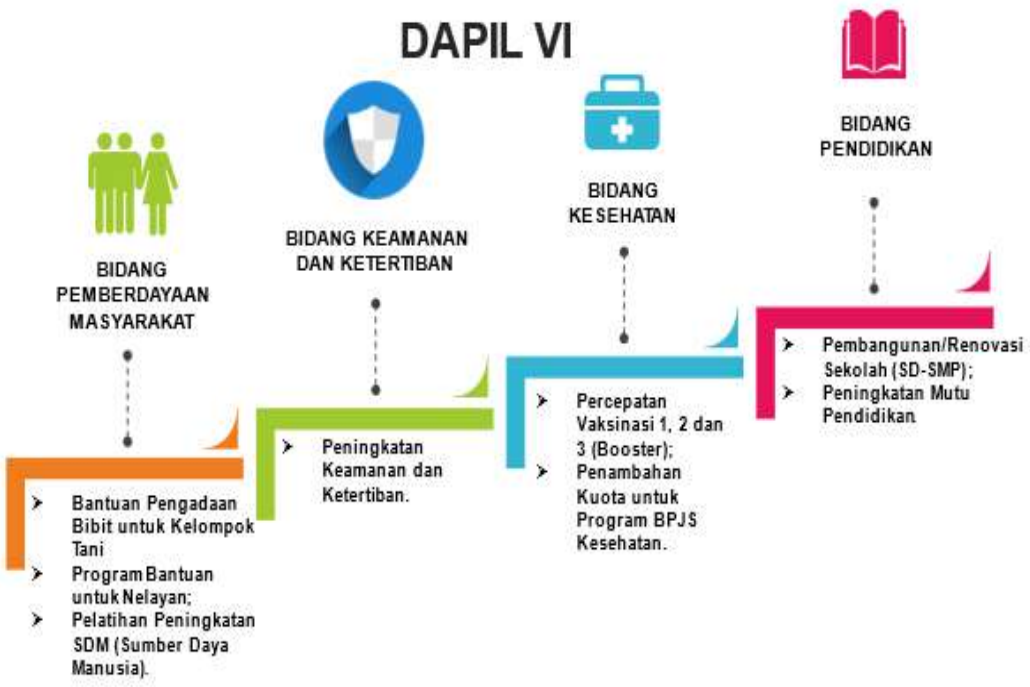
Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

Gambar IV.19 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil V



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

Gambar IV.20 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil VI



Sumber : DPRD Kabupaten Tanggamus, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus merupakan dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *top down*, dan buttom up, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD.

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Perkiraan anggaran disusun berdasarkan pilar pembangunan yang telah ditetapkan menurut SKPD yang akan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahun 2023.

Peralihan paradigma dalam penyusunan anggaran saat ini dari *money follow function* ke prinsip *money follow program* yang berbasis *outcome* menuntut

agar pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program dan kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu perencanaan yang *holistik* (menyeluruh), *tematik* (terfokus), terintegrasi (terpadu) dan spasial (lokasi yang jelas). Pada kondisi penuruan belanja, maka *money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; relokasi dari program dan kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program dan kegiatan non prioritas.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policydriven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dilakukan dengan penguatan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS)** sebagai berikut :

1) ***Tematik*** *:* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu menentukan tema pembangunan yang merupakan kristalisasi dari penyatuan unsur-unsur yang terkait dengan pokok permasalahan pembangunan dan memperhatikan potensi yang ada di daerah sehingga terjadi keterpaduan antara satu dengan yang lain.

   Sebagai contoh dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan mengatasi kelangkaan pangan yang berdampak pada inflasi maka ditentukan tema pembangunan yaitu Kedaulatan Pangan.

2) *Holistik* : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas serta melakukan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dan *stakeholders* yang terkait.

   Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikulturan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Komisi Irigasi (Komir), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

3) *Integratif :* Kebijakan yang dilaksanakan yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan.

   Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, penyedian pupuk, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

4) *Spasial* : Kebijakan yang dilaksanakan yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

   Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, serta pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep ***Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS)** ini yaitu :

1) **Sasaran Pembangunan**; fokus pada pencapaian prioritas pembangunan.
2) **Arah Kebijakan**; kebijakan yang menyeluruh pada setiap prioritas pembangunan.

3) **Kerangka Regulasi**; memberikan kemudahan dan mengurangi beban masyarakat, mendorong potensi kreatif, mendorong efektivitas dan efisiensi, serta memiliki nilai tambah atau insentif.
4) **Kerangka Kelembagaan**; tidak ada tumpeng tindih fungsi/kewenangan, tata Kelola dan hubungan kerja yang sinergis antar fungsi/kewenangan, tersedianya ASN yang professional dan memberikan daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pebangunan.
5) **Kerangka Kewilayahan**; setiap kegiatan memiliki lokasi yang jelas (koordinat), keterkaitan lokasi dalam mencapai sasaran program prioritas dan distribusi kegiatan antar wilayah.
6) **Kejelasan Pelaksana Kegiatan**; siapa berbuat apa (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD), memiliki indikator yang jelas dan terukur dan memiliki tahapan kegiatan prioritas.
7) **Kejelasan Sumber Pembiayaan**; penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Kementerian/Lembaga, APBD, Pinjaman Daerah maupun Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Gambar V.1 Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep *Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial* (THIS) di Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi :

1) Program Prioritas I :
   Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Kepala Daerah.
2) Program Prioritas II :
   Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta indikatornya.
3) Program Prioritas III :
   Merupakan prioritas program ditingkat Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi setiap Perangkat Daerah.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh Perangkat Daerah dalam Renstra-PD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-PD dengan kriteria sebagai berikut :

1) Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2) Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;

3) Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4) Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal penambahan program/kegiatan baru maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.
2. Dalam hal penambahan program baru merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD.
3. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra-PD, sebagai acuan penyusunan Renja-PD.
4. Perubahan dan/atau penambahan program ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
5. Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra-PD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2) Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3) Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4) Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5) Menghitung alokasi Perangkat Daerah berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah yang salah satunya terdapat pada 55 Aksi Rencana Aksi De-Sa ASIK.

Tabel V.1 Pemetaan Integrasi Agenda Politik Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2018-2023

MISI		AGENDA 55 RENCANA AKSI DE-SA ASIK	
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas	25	Reformasi Birokrasi (Bupati berkantor di Kecamatan, Membentuk Tim Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan (SABER PEKAN), Peningkatan kesejahteraan Aparatur yang terukur, memangkas birokrasi perijinan yang tidak efektif dan efisien, peningkatan SDM Aparatur
		27	Akte Kelahiran dapat diterima masyarakat di Klinik Bersalin, Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit.
		28	Penambahan Mobil E-KTP Keliling
		46	Pemberdayaan atau pembangunan Fasilitas Kamtibmas di titik rawan kriminalitas
		47	Penambahan kendaraan patroli TNI/POLRI.
		48	Hibah Anggaran Peningkatan SDM/Profesional bagi penegak hukum
		49	Menciptakan Aparatur Profesional; Membudayakan Aparatur yang Jujur, Ramah dan Resposif; Program SMS CENTRE BUPATI Menjawab Keluhan Masyarakat
		51	Membentuk Dewan Pertimbangan Pemerintah Daerah (Beranggotakan Mantan Bupati dan Tokoh Masyarakat Tanggamus)
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	1	Pemberantasan Buta Aksara AL-Qur'an (Sertifikasi lancar baca Al-Qur'an, MTQ Tingkat Sekolah Gebyar TPQ)
		3	Beasiswa Santri dan Santriwati berprestasi kedalam maupun keluar negeri
		6	Peningkatan bantuan Pondok Pesantren dan TPA
		7	Memberikan penghargaan Santri dan Santriwati, Siswa dan Siswi, berprestasi termasuk pembiyaan untuk kompetisi tingkat Provinsi hingga Nasional
		21	Penambahan Dokter Spesialis di RSUD
		22	Meningkatkan insentif bagi tenaga Non ASN bidang pendidikan dan kesehatan
		23	Peningkatan Bantuan Operasional dan Insentif Tendik PAUD dan Tenaga Kependidikan.
		24	Peningkatan Bantuan Operasional Posyandu dan Kader Posyandu serta meningkatkan pembinaan/pelatihan Kader Posyandu Balita dan Kader Lansia
		29	Pengadaan Mobil PAUD/TPA Keliling
		30	Pengadaan USG (Ultrasonography) di setiap Puskesmas Rawat Inap untuk pemeriksaan ibu hamil

MISI		AGENDA 55 RENCANA AKSI DE-SA ASIK	
		31	Program Mobil Ambulance/Mobil Bantuan Sosial Pekon Gratis disetiap Pekon
		32	Menambah Armada Mobil Puskesmas Keliling di Kecamatan
		33	Peningkatan Layanan Home Care dan Kartu Lansia (mendatangi melakukan pemerikasaan rutin melalui Motor Reaksi Cepat Pelayanan Kesehatan (MRC-YANKES)
		35	Penambahan Unit Sekolah Baru di daerah terpencil dan rumah dinas guru
		39	Penambahan Bis Sekolah Gratis
		41	Program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		42	Program Beasiswa masyarakat tidak mampu berprestasi ke perguruan tinggi negeri
3	Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika	2	Peningkatan insentif guru ngaji, bantuan operasionanal penggiat keagamaan, bantuan Majelis Taklim dan organisasi keagamaan lainnya.
		4	Peningkatan Wisata Religi untuk semua agama
		5	Peningkatan bantuan tempat ibadah
		11	Mengembangkan Koperasi dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Nelayan, UMKM dan Pedagang Pasar
		12	Mendirikan Pegadaian Syari'ah.
		13	Percepatan pembangunan Kawasan Industri Maritim/KIM untuk membuka lapangan pekerjaan
		16	Membangun Balai Latihan Kerja/BLK.
		18	Revitalisasi BUMD
		19	Penerbitan Perda Tentang Perlindungan Produk Lokal
		20	Mendorong berkembangnya industri manufaktur (mesin pengubah bahan mentah menjadi produk ekonomis) berbasis produk lokal
		26	Bantuan Operasional RT
		50	Membentuk Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika, beranggotakan masyarakat lintas suku dan etnis
		52	Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam perencanaan program Bupati
		54	Peningkatan Program PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
		55	Pembinaan dan pengembangan kreatifitas generasi muda; Membentuk kader kebangsaaan satu orang disetiap Pekon; Pembinaan Karang Taruna; Pembinaan Risma;
4	Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10	Peningkatan Kegiatan atau Bantuan untuk Ketahanan Pangan dan UMKM/Sai Pekon Sai Produk melalui pelatihan pelaku UMKM, KWT, Anggota Majelis Taklim dan Penyandang Disabilitas
		14	Mendorong pembangunan SMK Pertanian Terpadu (Menciptakan generasi petani yang handal, sebagai pusat persilangan bibit-bibit unggul dan menciptakan tenaga-tenaga penyuluh)
		15	Peningkatan SDM Petani melalui Sekolah Lapangan Pertanian

MISI		AGENDA 55 RENCANA AKSI DE-SA ASIK	
5	Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata	8	Peningkatan infrastruktur jalan, drainase, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata serta fasilitas umum
		9	Membuka akses jalan daerah terpencil dalam kegiatan TMMD/Karya Bhakti TNI dengan pioritas seperti wilayah kecamatan Pematang Sawa
		17	Kegiatan Jum'at Bedah Rumah Tidak Layak Huni setiap tahunnya dengan target 500 rumah
		38	Perluasan jaringan komunikasi HP di daerah terpencil
		40	Mendorong dibangunnya Green Terminal Tipe B oleh Pemerintah Provinsi (Angkutan Bus).
		43	Program penanggulangan banjir di wilayah Tanggamus bagian Barat (Embung untuk irigasi dan pariwisata)
		44	Pembangunan Rest Area dan Gapura perbatasan
		45	Pembangunan Stadion Gelora Tanggamus
		37	Pengadaan Mobil Patroli Sampah dan pembenahan sistem pengolahan sampah
		53	Program Sai Petani HKm merupakan Sai Duta Pelestarian Hutan (SPSD), adalah upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan hutan dan pencegahan banjir serta kering mata air di musim kemarau
6	Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	34	Pengembangan serta promosi pariwisata yang bebasiskan SDA dan Agrowisata termasuk promosi produk UMKM berbasiskan Teknologi Informasi
		36	Pengembangan/Pelestarian seni budaya, pengembangan Museum Adat Lampung, Penerbitan Buku Sejarah dan adat istiadat Lampung serta di bagi gratis kepada siswa/siswi

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 yang merupakan hasil perpaduan usulan tingkat Pekon, tingkat Kecamatan dengan usulan Perangkat Daerah, dapat diketahui usulan dana pembangunan untuk tahun 2023 yang dibiayai APBD Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus Sumber Dana APBD Kabupaten Tanggamus

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								**594,634,429,745**					**1,668,315,724,955**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**503,876,268,662**					**1,430,944,708,798**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**392,399,900**					**789,853,910**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	105,053,600
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Dokumen	100 %	107,399,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	214,800,310
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	90,000,000
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	100,000,000
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Dokumen	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	90,000,000
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Laporan	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	90,000,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Laporan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	100,000,000
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**499,429,953,962**					**1,422,279,294,488**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3564 Orang/bulan	100 %	463,338,533,962	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	911,877,637,992
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3320 Dokumen	100 %	35,917,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	509,948,228,996
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	128,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	200,000,000
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	253,427,500
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**66,027,500**					**122,420,200**
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Laporan	100 %	32,427,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	61,275,000
1	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Laporan	100 %	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	61,145,200
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**44,641,400**					**207,262,800**
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tercapainya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	240 Dokumen	100 %	44,641,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	106,280,800
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,114,208,900**					**1,049,427,000**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	271 Paket	100 %	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	40,000,000
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Paket	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,758,400
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1832 Paket	100 %	32,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	100,000,000
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1200 Paket	100 %	197,005,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	400,000,000
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	Paket	100 %	136,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		141,388,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur,	WTP	12 Laporan	100 %	52,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		110,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				yang Disusun dengan Baik	Kampung Baru					Umum				
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tercapainya Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Dokumen	100 %	642,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	207,280,600
1 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,265,025,000**					**3,153,050,000**
1 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	65 Unit	100 %	1,265,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,530,050,000
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,155,010,000**					**2,762,912,400**
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	962,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,537,480,000
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	192,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	225,432,400
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**409,002,000**					**580,488,000**
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4 Unit	100 %	57,292,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	320,324,000
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4 Unit	100 %	121,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	77,584,000
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	24 Unit	100 %	201,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	101,720,000
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tercapainya Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Unit	100 %	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	80,860,000
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**90,703,062,283**					**237,171,016,157**
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**								**44,454,335,483**					**131,054,872,000**
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Soponyono Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	82.97 %	4 Ruang	100 %	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	400,000,000
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	25 Unit	100 %	13,196,436,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	26,392,872,000
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang Kab. Tanggamus, Wonosobo, Wonosobo Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Pulau Panggung	82.97 %	21000 Satuan Pendidikan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	200,000,000
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	82.97 %	250 Peserta Didik	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	202,400,000
1 01 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Bawah	82.97 %	600 Orang	100 %	301,213,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	900,000,000
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	400 Satuan Pendidikan	100 %	25,856,686,233	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	102,959,600,000
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**								**31,173,371,800**					**72,888,552,000**
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Tampang	82.97 %	10 Ruang	100 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	400,000,000
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	20 Unit	100 %	15,186,670,600	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	30,373,352,000
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Permai	82.97 %	900 Peserta Didik	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	82.97 %	250 Peserta Didik	100 %	96,101,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	200,000,000
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	51 Satuan Pendidikan	100 %	15,340,600,000	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	41,715,200,000
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**								**10,710,353,100**					**22,449,763,637**
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	82.97 %	16046 Peserta Didik	100 %	81,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	311,512,598
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Sumber Rejo	82.97 %	488 Satuan Pendidikan	100 %	188,498,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	466,000,000
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	488 Satuan Pendidikan	100 %	10,440,000,000	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	21,672,251,039
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**								**4,365,001,900**					**10,777,828,520**
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	10 Unit	100 %	620,055,000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	1,240,110,000
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	82.97 %	100 Peserta Didik	100 %	30,846,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	312,933,520
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	82.97 %	19 Satuan Pendidikan	100 %	3,714,100,000	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik	82.97 %	9,024,785,000
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**55,098,800**					**100,000,000**
1 01 03 2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**								**55,098,800**					**100,000,000**
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rasio Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Tercapainya Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Permai	80 %	50 Orang	100 %	55,098,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	80 %	100,000,000
								TOTAL	**594,634,429,745**					**1,668,315,724,955**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**106,924,430,128**					**135,838,030,642**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**69,347,700,083**					**67,621,934,403**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**187,895,100**					**221,000,000**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	30 Dokumen	100 %	43,810,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	37,000,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	60 Dokumen	100 %	18,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	26,000,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	20 Dokumen	100 %	10,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	6,500,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	20 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	7,500,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	20 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	7,500,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	20 Laporan	100 %	12,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	13,500,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	120 Laporan	100 %	87,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	123,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**65,709,600,837**					**62,715,006,965**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	755 Orang/bulan	100 %	53,572,670,837	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	50,525,468,417
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Dokumen	100 %	11,906,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	11,925,180,000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Dokumen	100 %	221,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	249,858,548
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	10 Laporan	100 %	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	14,500,000
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**120,740,000**					**178,741,000**
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	100 Stel	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	85,350,000
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	10 Orang	100 %	55,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	78,875,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,251,298,946**					**1,583,598,458**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	5 Paket	100 %	8,045,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	8,955,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	10 Paket	100 %	134,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	161,575,500
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	7 Paket	100 %	15,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	17,365,120
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	500 Paket	100 %	380,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	380,811,700
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	100 Paket	100 %	300,597,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	393,425,950
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	100 Paket	100 %	143,862,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	134,111,588
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	631 Laporan	100 %	223,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	441,636,200
1	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 WTP	20 Dokumen	100 %	43,870,000			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	45,717,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**144,700,000**					**201,650,000**
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	2 Unit	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	70,000,000
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	25 Unit	100 %	74,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	83,600,000
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**952,550,000**					**1,022,524,500**
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Laporan	100 %	786,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	815,444,500
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Laporan	100 %	81,380,000	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	117,000,000
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Laporan	100 %	85,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	90,080,000
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**727,560,200**					**1,432,203,480**
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	23 Unit	100 %	436,300,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	486,393,460
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	17 Unit	100 %	37,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	144,620,000
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	4 Unit	100 %	254,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	792,500,000
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**103,715,000**					**115,060,000**
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan BLUD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	24 Unit Kerja	100 %	103,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	115,060,000
1 02 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**6,000,000**					**6,000,000**
1 02 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kepala Daerah Mengikuti Medical Check Up	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	3 Orang	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	6,000,000
1 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**143,640,000**					**146,150,000**
1 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase DPRD Mengikuti Medical Check Up	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	47 Orang	100 %	143,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	146,150,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**36,580,753,545**					**66,585,507,119**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**12,050,011,143**					**31,105,851,912**
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk UKM dan UKP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	0,4 Angka	4 Unit	100 %	2,500,000,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	0,4 Angka	9,021,551,742
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk UKM dan UKP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	0,4 Angka	40 Unit	100 %	8,704,658,143	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	0,4 Angka	6,700,300,000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk UKM dan UKP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	0,4 Angka	1 Paket	100 %	537,158,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	0,4 Angka	5,246,482,442
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk UKM dan UKP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	0,4 Angka	1 Paket	100 %	308,195,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	0,4 Angka	809,995,000
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**24,444,647,902**					**35,315,555,207**
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	11311 Orang	100 %	150,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	84,875,000
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	1079 Orang	100 %	326,542,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	892,584,000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	10283 Orang	100 %	12,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	43,025,000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	49950 Orang	100 %	30,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	25,085,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	83916 Orang	100 %	29,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	22,930,000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	394052 Orang	100 %	16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	27,965,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	67390 Orang	100 %	1,995,990,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	14,050,000
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	121821 Orang	100 %	21,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	21,610,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	3692 Orang	100 %	18,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	18,655,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	10499 Orang	100 %	21,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	21,875,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	14231 Orang	100 %	21,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	21,875,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	40,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	42,480,000
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	804,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	69,228,000
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	304,908,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	26,700,000
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	42,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	55,005,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	202,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	88,510,000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	3,564,103,702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	320,665,000
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	43,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	49,675,000
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	517,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	91,500,000
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	1046 Orang	100 %	70,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	70,960,000
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	181,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	200,815,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	105,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	105,320,000
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	0 Dokumen	100 %	15,511,480,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	0
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Paket	100 %	71,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	72,100,000
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	91,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	98,560,000
1 02 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	24 Unit	100 %	52,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	69,130,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	12 Dokumen	100 %	63,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	31,675,890,507
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	9 Unit	100 %	11,280,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	930,130,500
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	5 Laporan	100 %	86,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	112,812,200
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	15 %	4 Dokumen	100 %	33,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	41,545,000
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**								**86,094,500**					**164,100,000**
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	0,4 %	12 Dokumen	100 %	86,094,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	0,4 %	164,100,000
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**130,571,000**					**743,624,000**
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**								**19,155,000**					**19,575,000**
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Dokumen	100 %	19,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	100 %	19,575,000
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**73,148,000**					**688,460,000**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Sumberdaya Manusia Sesuai Kebutuhan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	500 Orang	100 %	73,148,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	100 %	645,460,000
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**38,268,000**					**35,589,000**
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumberdaya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dibidangnya	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	48 Orang	9 Tenaga	38,268,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	100 %	35,589,000
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**								**464,942,000**					**618,560,993**
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**								**418,142,000**					**516,760,993**
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Berizin Serta Produksi Pangan pada IRT yang bersertifikat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin produksi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	40 %	12 Dokumen	100 %	418,142,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Berizin Serta Produksi Pangan pada IRT yang bersertifikat	40 %	516,760,993
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**								**46,800,000**					**66,800,000**
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Berizin Serta Produksi Pangan pada IRT yang bersertifikat	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Diperiksa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	40 %	5 Unit	100 %	46,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Berizin Serta Produksi Pangan pada IRT yang bersertifikat	40 %	66,800,000
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**								**400,463,500**					**268,404,127**
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**45,463,500**					**63,404,127**
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	6 Dokumen	100 %	45,463,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	63,404,127
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**355,000,000**					**205,000,000**
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	4 Dokumen	100 %	355,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	205,000,000
								TOTAL	**106,924,430,128**					**135,838,030,642**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**75,112,909,520**					**71,294,835,466**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**31,576,129,420**					**48,444,837,046**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**87,323,050**					**91,689,200**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	4 Dokumen	100 %	58,183,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	61,134,200
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Dokumen	100 %	6,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	6,300,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Dokumen	100 %	6,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	6,300,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,260,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Dokumen	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,260,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Laporan	100 %	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	9,975,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	3 Laporan	100 %	5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	5,460,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,164,627,245**					**17,881,383,960**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	132 Orang/bulan	100 %	13,158,267,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	13,816,181,000
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	190 Dokumen	100 %	3,932,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,932,580,000
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Dokumen	100 %	62,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	114,201,360
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	40 Laporan	100 %	4,399,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	5,016,100
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	15 Laporan	100 %	7,339,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	13,405,500
1	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,245,400**					**39,753,600**
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dususun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	24 Paket	100 %	14,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	19,983,600
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dususun Dengan Baik		WTP 1	6 Orang	100 %	10,045,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	19,770,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**319,860,925**					**610,067,550**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	270 Paket	100 %	13,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	25,348,050
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Paket	100 %	9,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,508,900
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	46 Paket	100 %	11,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	19,901,700
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Paket	100 %	42,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	77,783,600
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	1 Paket	100 %	70,536,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1	128,583,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP 1	1 Paket	100 %	51,712,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	91,618,300
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	190 Laporan	100 %	120,154,725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	252,324,000
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,510,000**					**30,098,250**
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	24 Unit	100 %	16,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	30,098,250
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,955,745,800**					**3,174,633,685**
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	140 Laporan	100 %	12,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	23,187,400
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Laporan	100 %	752,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	745,038,000
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	52 Laporan	100 %	27,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	50,458,500
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Laporan	100 %	2,163,733,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,355,949,785
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**363,448,900**					**417,210,801**
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	22 Unit	100 %	254,210,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	302,510,376
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	6 Unit	100 %	109,238,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	114,700,425
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**10,644,368,100**					**26,200,000,000**
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase Laporan Pelayanan Pelayanan BLUD yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Kali	100 %	10,644,368,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	26,200,000,000
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**43,152,149,600**					**22,030,061,670**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**42,655,670,300**					**21,235,106,425**
1 02 02 2.01 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	1 Unit	100 %	55,910,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	101,921,925
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	2 Unit	100 %	13,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	25,208,800
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	14 Unit	100 %	42,558,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	21,057,727,950
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	20 Unit	100 %	27,935,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk	1 % 70 % 0,4 % 0.5 %	50,247,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk		
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**425,269,800**					**646,002,665**
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 15 % 0.5 %	1 Dokumen	100 %	223,499,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 15 % 0.5 %	234,674,265
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 15 % 0.5 %	1 Dokumen	100 %	20,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 15 % 0.5 %	41,748,500
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 15 % 0.5 %	1 Dokumen	100 %	9,616,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 15 % 0.5 %	17,529,600
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 15 % 0.5 %	1 Dokumen	100 %	32,901,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 15 % 0.5 %	63,397,700
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanaan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	1 % 70 % 15 % 0.5 %	16 Unit	100 %	138,343,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk	1 % 70 % 15 % 0.5 %	288,652,600
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**71,209,500**					**148,952,580**
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	15 %	1 Unit	100 %	71,209,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM	15 %	148,952,580
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**384,630,500**					**819,936,750**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**								**374,890,500**					**800,166,150**
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	100 %	12 Orang	100 %	374,890,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	100 %	800,166,150
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**9,740,000**					**19,770,600**
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis Dibidangnya	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	100 %	6 Orang	100 %	9,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya	100 %	19,770,600
								TOTAL	**75,112,909,520**					**71,294,835,466**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Siring Betik
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Siring Betik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,184,330,640**					**1,043,830,640**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,184,330,640**					**1,043,830,640**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,184,330,640**					**1,043,830,640**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		1,184,330,640	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,043,830,640
												TOTAL	**1,184,330,640**					**1,043,830,640**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Wonosobo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,020,313,780**					**1,012,725,380**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,020,313,780**					**1,012,725,380**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,020,313,780**					**1,012,725,380**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Banjar Negara	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,020,313,780	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,012,725,380
												TOTAL	**1,020,313,780**					**1,012,725,380**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Sudimoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,094,244,000**					**956,096,925**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,094,244,000**					**956,096,925**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,094,244,000**					**956,096,925**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Semaka, Sudimoro Bangun	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,094,244,000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	956,096,925
												TOTAL	**1,094,244,000**					**956,096,925**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sukaraja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,559,022,773**					**1,559,022,773**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,559,022,773**					**1,559,022,773**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,559,022,773**					**1,559,022,773**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,559,022,773	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,559,022,773
												TOTAL	**1,559,022,773**					**1,559,022,773**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Sanggi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,189,034,760**					**1,083,039,560**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,189,034,760**					**1,083,039,560**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,189,034,760**					**1,083,039,560**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Bandar Negeri Semuong, Sanggi	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,189,034,760	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,083,039,560
												TOTAL	**1,189,034,760**					**1,083,039,560**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kota Agung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,443,762,860**					**2,436,041,860**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,443,762,860**					**2,436,041,860**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,443,762,860**					**2,436,041,860**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,443,762,860	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	2,436,041,860
												TOTAL	**2,443,762,860**					**2,436,041,860**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Way Nipah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**910,273,360**					**910,273,360**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**910,273,360**					**910,273,360**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**910,273,360**					**910,273,360**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Way Nipah	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	910,273,360	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	910,273,360
TOTAL													**910,273,360**					**910,273,360**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Pasar Simpang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,366,905,880**					**1,366,905,880**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,366,905,880**					**1,366,905,880**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,366,905,880**					**1,366,905,880**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kagungan	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,366,905,880	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,366,905,880
												TOTAL	**1,366,905,880**					**1,366,905,880**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Negara Batin

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,204,448,350**					**1,119,896,310**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,204,448,350**					**1,119,896,310**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,204,448,350**					**1,119,896,310**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,204,448,350	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,119,896,310
												TOTAL	**1,204,448,350**					**1,119,896,310**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Pulau Panggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,954,742,600**					**1,827,322,600**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,954,742,600**					**1,827,322,600**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,954,742,600**					**1,827,322,600**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,954,742,600	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,827,322,600
												TOTAL	**1,954,742,600**					**1,827,322,600**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Ngarip

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,585,350,000**					**1,462,500,760**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,585,350,000**					**1,462,500,760**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,585,350,000**					**1,462,500,760**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,585,350,000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,462,500,760
												TOTAL	**1,585,350,000**					**1,462,500,760**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Air Naningan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,862,464,676**					**1,862,464,676**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,862,464,676**					**1,862,464,676**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,862,464,676**					**1,862,464,676**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Unit	1 unit	1,862,464,676	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,862,464,676
												TOTAL	**1,862,464,676**					**1,862,464,676**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Talang Padang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,596,243,490**					**2,535,668,290**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,596,243,490**					**2,535,668,290**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,596,243,490**					**2,535,668,290**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Banding Agung	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,596,243,490	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	2,535,668,290
												TOTAL	**2,596,243,490**					**2,535,668,290**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Margoyoso

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,000,635,620**					**894,640,420**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,000,635,620**					**894,640,420**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,000,635,620**					**894,640,420**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,000,635,620	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	894,640,420
												TOTAL	**1,000,635,620**					**894,640,420**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Gisting

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,604,707,450**					**1,604,707,450**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,604,707,450**					**1,604,707,450**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,604,707,450**					**1,604,707,450**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Gisting, Gisting Bawah	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,604,707,450	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,604,707,450
												TOTAL	**1,604,707,450**					**1,604,707,450**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Kedaloman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,032,380,150**					**1,032,380,150**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,032,380,150**					**1,032,380,150**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,032,380,150**					**1,032,380,150**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Kedaloman	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,032,380,150	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,032,380,150
												TOTAL	**1,032,380,150**					**1,032,380,150**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Rantau Tijang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,754,589,805**					**1,754,589,805**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,754,589,805**					**1,754,589,805**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,754,589,805**					**1,754,589,805**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang		1 Unit Kerja		1,754,589,805	Pendapatan dari BLUD				1,754,589,805
												TOTAL	**1,754,589,805**					**1,754,589,805**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Sumanda

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**2,080,746,460**					**1,779,946,460**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,080,746,460**					**1,779,946,460**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**2,080,746,460**					**1,779,946,460**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Pugung, Sumanda	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,080,746,460	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,779,946,460
												TOTAL	**2,080,746,460**					**1,779,946,460**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Bulok Sukamara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,213,859,090**					**1,086,418,590**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,213,859,090**					**1,086,418,590**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,213,859,090**					**1,086,418,590**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kab. Tanggamus, Bulok, Gunung Terang	1 WTP	1 Unit Kerja	1 unit	1,213,859,090	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,086,418,590
												TOTAL	**1,213,859,090**					**1,086,418,590**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Putih Doh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,608,975,660**					**1,475,390,460**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,608,975,660**					**1,475,390,460**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,608,975,660**					**1,475,390,460**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,608,975,660	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,475,390,460
												TOTAL	**1,608,975,660**					**1,475,390,460**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Klumbayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**909,065,940**					**909,065,940**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**909,065,940**					**909,065,940**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**909,065,940**					**909,065,940**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Penyandingan	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	909,065,940	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	909,065,940
												TOTAL	**909,065,940**					**909,065,940**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 Puskesmas Antar Brak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**1,274,181,540**					**1,129,256,340**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,274,181,540**					**1,129,256,340**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**1,274,181,540**					**1,129,256,340**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kab. Tanggamus, Limau, Atar Brak	1 WTP	1 Unit Kerja	1 unit	1,274,181,540	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,129,256,340
TOTAL													**1,274,181,540**					**1,129,256,340**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 Puskesmas Klumbayan Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**825,765,160**					**740,505,160**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**825,765,160**					**740,505,160**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**825,765,160**					**740,505,160**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	825,765,160	Pendapatan dari BLUD		opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	740,505,160
												TOTAL	**825,765,160**					**740,505,160**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 Puskesmas Sumberejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								**668,280,492**					**265,084,200**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**668,280,492**					**265,084,200**
1	**02**	**01**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**668,280,492**					**265,084,200**
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Sumber Rejo	1 WTP	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	668,280,492	Pendapatan dari BLUD		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	265,084,200
												TOTAL	**668,280,492**					**265,084,200**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								**119,725,770,067**					**244,542,000,000**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,689,866,570**					**15,892,000,000**
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**262,803,600**					**392,000,000**
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	4 Dokumen	100 %	59,872,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	60,000,000
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	2 Dokumen	100 %	16,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	27,000,000
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	2 Dokumen	100 %	15,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	25,000,000
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	2 Dokumen	100 %	9,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	20,000,000
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	2 Dokumen	100 %	8,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	20,000,000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	8 Laporan	100 %	27,191,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	40,000,000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	4 Laporan	100 %	125,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	200,000,000
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,566,252,670**					**11,200,000,000**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Percentase Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	83 Orang/bulan	100 %	7,734,972,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	8,000,000,000
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Percentase Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Dokumen	100 %	2,368,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	2,500,000,000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Percentase Penyediaan Administrasi Keuangan SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Dokumen	100 %	463,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	700,000,000
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**123,290,000**					**200,000,000**
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Percentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	4 Orang	100 %	123,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	200,000,000
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**993,782,900**					**1,950,000,000**
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	5 Paket	100 %	177,863,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	500,000,000
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	2 Paket	100 %	249,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	300,000,000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Paket	100 %	113,118,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	150,000,000
1	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Paket	100 %	60,001,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	100,000,000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Percentase Penyediaan Administrasi Umum SKPD	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	30 Laporan	100 %	392,808,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	900,000,000
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**922,395,000**					**1,315,000,000**
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Laporan	100 %	32,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	65,000,000
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Laporan	100 %	374,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	400,000,000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	4 Laporan	100 %	515,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	850,000,000
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**821,342,400**					**835,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	25 Unit	100 %	786,812,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	800,000,000
1 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Unit	100 %	34,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	35,000,000
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**11,121,233,897**					**41,300,000,000**
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**3,939,700,000**					**15,300,000,000**
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Jumlah Pengelolaan dan Pembangunan Pengaman Sungai Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.20 %	0.8 KM	7 KM	3,841,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	26.20 %	15,000,000,000
1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pembangunan Pengaman Sungai Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.20 %	100 Orang	7 KM	98,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	26.20 %	300,000,000
1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**7,181,533,897**					**26,000,000,000**
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.20 %	1 KM	25 KM	6,981,533,897	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	26.20 %	10,000,000,000
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26.20 %	1 KM	25 KM	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	26.20 %	1,000,000,000
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**200,000,000**					**11,400,000,000**
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**11,400,000,000**
1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Percentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.68 %	1 Dokumen	3100 Rumah Tangga	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten	14.68 %	400,000,000
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**								**200,000,000**					**5,350,000,000**
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**5,350,000,000**
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah rumah tangga yang mendapat hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.77 %	1 Dokumen	1643 Rumah Tangga	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten	56.77 %	350,000,000
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**								**41,128,000,000**					**25,000,000,000**
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**41,128,000,000**					**25,000,000,000**
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Percentase Pembangunan,Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Percentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Drainase Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 M	100 %	41,128,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan,Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100 %	25,000,000,000
1 03 07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**								**19,434,500,000**					**35,000,000,000**
1 03 07 2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**								**19,434,500,000**					**35,000,000,000**
1 03 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pengembangan Permukiman Kabupaten	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Sistem Jaringan	100 %	18,273,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Permukiman Kabupaten	100 %	25,000,000,000
1 03 07 2.01 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pengembangan Permukiman Kabupaten	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Sistem Jaringan	100 %	1,161,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Permukiman Kabupaten	100 %	10,000,000,000
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**								**1,905,000,000**					**15,000,000,000**
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**								**1,905,000,000**					**15,000,000,000**
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Penataan Bangunan Gedung Kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	1,905,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penataan Bangunan Gedung Kabupaten	100 %	15,000,000,000
1 03 09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**								**2,804,279,000**					**5,500,000,000**
1 03 09 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**								**2,804,279,000**					**5,500,000,000**
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Percentase Pembangunan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	390,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	100 %	500,000,000
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Percentase Pembangunan dan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kawasan	100 %	2,414,279,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten	100 %	5,000,000,000
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**27,805,600,000**					**85,500,000,000**
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**								**27,805,600,000**					**85,500,000,000**
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.82 %	Dokumen	670 KM	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	38.82 %	500,000,000
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan yang Dibangun			%	KM	670 KM	12,293,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan	38.82 %	15,000,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.10.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Kabupaten Tanggamus				Semua Kelurahan					Umum		Jembatan Kabupaten Tanggamus		
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.82 %	10 KM	670 KM	13,354,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	38.82 %	25,000,000,000
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.82 %	1 KM	670 KM	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	38.82 %	5,000,000,000
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	Panjang Jembatan yang Dibangun	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38.82 %	25 M	670 KM	1,328,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus	38.82 %	15,000,000,000
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**								**373,901,000**					**800,000,000**
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**								**173,901,000**					**500,000,000**
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Percentase Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	3.42 %	173,901,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	100 %	500,000,000
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**200,000,000**					**300,000,000**
1 03 11 2.02 07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Percentase Penyediaan Sistem Informasi Konstruksi Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanggamus	100 %	300,000,000
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**1,063,389,600**					**3,800,000,000**
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**								**800,000,000**					**3,000,000,000**
1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Percentase RTRW dan RRTR Kabupaten Tanggamus yang telah ditetapkan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	100 %	3,000,000,000
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**50,430,000**					**300,000,000**
1 03 12 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Percentase Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	50,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	100 %	300,000,000
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**								**212,959,600**					**500,000,000**
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Percentase Pemanfaatan Ruang Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	212,959,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	100 %	500,000,000
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								**8,625,000,000**					**27,300,000,000**
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**1,125,000,000**					**3,300,000,000**
1 04 02 2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**150,000,000**					**300,000,000**
1 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Percentase Pengembangan Perumahan Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Percentase Penyusunan dan Pendataan Rumah Korban Bencana Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	1 Dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Perumahan Kabupaten	88 %	300,000,000
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**								**975,000,000**					**3,000,000,000**
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Percentase Pengembangan Perumahan Kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Percentase Rumah Korban Bencana yang telah tertangani	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88 %	50 Unit Rumah	100 %	975,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pengembangan Perumahan Kabupaten	88 %	3,000,000,000
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**								**7,500,000,000**					**24,000,000,000**
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**								**7,500,000,000**					**24,000,000,000**
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Percentase Pembangunan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Percentase Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kabupaten Tanggamus	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit Rumah	100 %	7,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Percentase Pembangunan Kawasan Permukiman	100 %	15,000,000,000
								TOTAL	**128,350,770,067**					**273,842,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**12,164,820,237**					**16,518,073,242**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11,996,745,737**					**15,967,098,242**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**46,009,500**					**55,500,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4 Buku	100 %	29,121,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	32,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		WTP	10 Eksemplar	100 %	4,509,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,000,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Eksemplar	100 %	4,509,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,000,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		WTP	10 Eksemplar	100 %	2,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,500,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Eksemplar	100 %	2,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Eksemplar	100 %	1,071,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Dokumen	100 %	2,149,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**11,542,416,565**					**15,209,535,535**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	66 Orang/bulan	100 %	6,509,596,565	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,462,475,535
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP	177 Orang	100 %	4,937,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,651,060,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Kali	100 %	95,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	96,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**46,948,472**					**245,500,000**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terciptanya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	24 unit	100 %	710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	90,000,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terciptanya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	420 Kotak	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	35,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terciptanya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	30000 Lembar	100 %	12,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,500,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terciptanya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1147 Buah	100 %	20,735,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	35,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terciptanya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	48 Kali	100 %	9,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	70,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**46,350,000**					**140,062,707**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Bulan	100 %	45,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	65,062,707
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Kali	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	75,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**315,021,200**					**316,500,000**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terawatnya dan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	43,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	45,000,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terawatnya dan Terpeliharanya Barang			Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		225,000,000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Terawatnya dan Terpeliharanya Barang			Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		35,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**168,074,500**					**550,975,000**
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**152,504,500**					**450,975,000**
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Indeks Rasa Aman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum dimasyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks	72 Kali	100 %	93,385,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Rasa Aman	0.53 Indeks	150,975,000
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Rasa Aman	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum dimasyarakat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.53 Indeks	604 Orang	100 %	59,119,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Rasa Aman	0.53 Indeks	300,000,000
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**								**15,570,000**					**100,000,000**
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Kali		15,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
								TOTAL	**12,164,820,237**					**16,518,073,242**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**4,646,309,964**					**4,867,398,364**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,635,749,964**					**4,842,398,364**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**31,817,800**					**35,000,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	0 Dokumen 20 Dokumen	100 %	24,845,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	25,000,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Dokumen	100 %	1,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Dokumen	100 %	1,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Dokumen	100 %	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Dokumen	100 %	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	1,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,271,641,004**					**4,298,809,964**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	13 Orang/bulan	100 %	1,641,810,004	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,641,809,964
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	2,574,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,574,000,000
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	53,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	80,000,000
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	2,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**24,875,160**					**110,000,000**
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	100 %	2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	45,000,000
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	100 %	3,905,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Laporan	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,400,000**					**40,000,000**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	40,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**293,016,000**					**358,588,400**
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	9 Unit	100 %	293,016,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	358,588,400
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**10,560,000**					**25,000,000**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**10,560,000**					**25,000,000**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	10,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	100 %	25,000,000
												TOTAL	**4,646,309,964**					**4,867,398,364**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**3,366,170,219**					**3,486,749,847**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,131,840,219**					**3,200,206,597**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,498,300**					**32,196,000**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi klnerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	30 Dokumen	100 %	2,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	6,540,000
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi klnerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	6 Dokumen	100 %	3,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	6,774,000
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi klnerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	6 Dokumen	100 %	3,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	3,702,000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi klnerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3 Laporan	100 %	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	1,080,000
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi klnerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Laporan	100 %	2,104,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	14,100,000
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,653,771,204**					**2,610,571,002**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	17 Orang/bulan	100 %	2,026,171,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	2,026,171,002
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	627,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	584,400,000
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**69,598,700**					**128,184,380**
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	570 Paket	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	7,950,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	292 Paket	100 %	6,577,200			Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	21,112,880
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	616 Paket	100 %	19,789,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	23,307,500
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Laporan	100 %	37,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	75,814,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**157,603,215**					**180,211,215**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	157,603,215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	180,211,215
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**239,368,800**					**249,044,000**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Unit	100 %	40,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	40,170,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	0 Unit 13 Unit	100 %	193,838,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	200,754,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Unit	100 %	5,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100 %	8,120,000
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**234,330,000**					**286,543,250**
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**185,880,000**					**211,830,000**
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	185,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap	100 %	211,830,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												darurat, dan pasca bencana		
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**48,450,000**					**74,713,250**
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	100 Orang	100 %	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	44,713,250
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	30,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana	100 %	30,000,000
								TOTAL	**3,366,170,219**					**3,486,749,847**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								**4,319,201,053**					**5,548,500,000**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,674,780,553**					**4,053,500,000**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**55,635,100**					**71,000,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	13,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	8,926,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	8,926,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	8,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	8,435,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Triwulan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	18 Eksemplar	100 %	1,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang tersusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Laporan	100 %	5,994,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,000,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,203,451,158**					**3,322,500,000**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	25 Orang/bulan	100 %	2,717,661,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,800,000,000
1	06	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	25 Orang	100 %	441,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	450,000,000
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Bulan	100 %	42,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	70,000,000
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	5 Laporan	100 %	1,750,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,500,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**141,086,095**					**285,000,000**
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	6,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Makanan dan Minuman untuk Keperluan Rutin Kantor	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	550 Kotak	100 %	13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	25,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan Rutin Kantor	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	450 Eksemplar	100 %	10,007,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Bulan	100 %	18,388,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	30,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	100 Kali	100 %	92,486,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	200,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**97,515,200**					**135,000,000**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Bulan	100 %	66,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	85,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Bulan	100 %	30,735,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		50,000,000
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**177,093,000**					**240,000,000**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	44,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		50,000,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	[illegible]	Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Unit	100 %	116,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		160,000,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan Baik				Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		10,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Pemerintahan Daerah	Kampung Baru					Umum				
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	10,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**115,299,500**					**350,000,000**
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**								**115,299,500**					**350,000,000**
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	30 Orang	100 %	16,765,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	50,000,000
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	22 Orang	100 %	28,210,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	70,000,000
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	130 Keluarga	100 %	59,335,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	200,000,000
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Orang	100 %	10,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100 %	30,000,000
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**5,400,000**					**10,000,000**
1 06 03 2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**								**5,400,000**					**10,000,000**
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal.	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang tertangani	100 %	10,000,000
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**338,516,000**					**440,000,000**
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**								**65,565,000**					**195,000,000**
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	47,222,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	100,000,000
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	12,377,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	85,000,000
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Orang	100 %	5,966,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	10,000,000
1 06 04 2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**								**272,951,000**					**245,000,000**
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Penerima Layanan Kedaruratan	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 LS	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	90,000,000
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25 Orang	100 %	19,447,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	45,000,000
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	3,262,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	10,000,000
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang direhabilitasi	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Orang	100 %	50,241,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang direhabilitasi	100 %	100,000,000
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**53,078,700**					**280,000,000**
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**53,078,700**					**280,000,000**
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Bulan	100 %	53,078,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	200,000,000
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**102,514,000**					**365,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**								**45,014,000**					**135,000,000**
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Penyediaan Makanan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	100 %	39,514,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100 %	100,000,000
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100 %	15,000,000
1 06 06 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**								**57,500,000**					**230,000,000**
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	57 Orang	100 %	57,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani	100 %	230,000,000
1 06 07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**29,612,300**					**50,000,000**
1 06 07 2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**								**29,612,300**					**50,000,000**
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kagungan	100 %	12 Bulan	100 %	29,612,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 %	50,000,000
								TOTAL	**4,319,201,053**					**5,548,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								**3,701,053,978**					**4,309,651,409**
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,531,968,658**					**4,055,081,409**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,637,600**					**119,100,000**
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Program, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	30 Dokumen	100 %	10,637,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	85,000,000
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,184,717,706**					**3,132,769,149**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Orang/bulan	100 %	2,016,729,106	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,016,684,249
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	26 Dokumen	100 %	1,091,848,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,107,584,900
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	8 Dokumen	100 %	76,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,500,000
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**11,449,800**					**326,478,000**
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Paket	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	125,000,000
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	500 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	29,000,000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	9000 Paket	100 %	1,714,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	11,000,000
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	100 %	7,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	29,169,000
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**85,134,952**					**138,983,900**
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	80,549,272	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	81,000,000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Laporan	100 %	4,585,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	57,983,900
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**240,028,600**					**337,750,360**
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	7 Unit	100 %	169,013,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	146,750,360
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Unit	100 %	6,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	18,000,000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	64,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	173,000,000
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**								**10,097,500**					**10,088,900**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**								**10,097,500**					**10,088,900**
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	2	10 Dokumen	100 %	10,097,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Pengangguran Terbuka	2	10,088,900
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**								**11,338,800**					**11,481,100**
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**								**11,338,800**					**11,481,100**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rasio lulusan S1/S2/S3	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	5,60 %	14 Lembaga	100 %	11,338,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio lulusan S1/S2/S3	5,60 %	11,481,100
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**147,649,020**					**210,000,000**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**								**147,649,020**					**210,000,000**
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Pencari Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			%	Orang	%				[illegible]	97 %	210,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**								**30,065,000**					**48,049,650**
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**								**30,065,000**					**48,049,650**
3	**29**	**05**	**2.01**		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**30,065,000**					**48,049,650**
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ratio Elektrifikasi	[illegible] Kabupaten/Kota			%	Laporan	100 %	30,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ratio Elektrifikasi	98 %	48,049,650
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								**51,000,000**					**51,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 32 03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**51,000,000**					**51,000,000**
3 32 03 2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**51,000,000**					**51,000,000**
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.0172 %	1 Laporan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	0.0172 %	25,000,000
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	0.0172 %	5 Kepala Keluarga	100 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi	0.0172 %	26,000,000
								TOTAL	**3,782,118,978**					**4,408,701,059**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								**5,992,133,770**					**6,326,668,223**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,859,589,670**					**4,972,928,323**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**62,400,600**					**62,430,910**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	5 Dokumen	100 %	19,151,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,821,110
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3333 Eksemplar	100 %	4,614,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,614,800
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumeen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3333 Eksemplar	100 %	8,308,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,823,900
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6644 Eksemplar	100 %	4,367,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,367,700
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6644 Eksemplar	100 %	1,899,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,899,900
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah dokumen PK dan Laporan Kinerja Triwulan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3334 Eksemplar	100 %	9,218,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,063,500
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen LPPD, LAKIP, LKPJ Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4333 Eksemplar	100 %	14,840,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,840,000
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,317,595,200**					**4,462,815,613**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	24 Orang	100 %	3,301,035,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,401,035,613
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	54 Orang	100 %	906,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	949,090,000
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 kali	100 %	110,469,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	112,690,000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**70,118,300**					**96,870,200**
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 unit	100 %	12,639,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,639,800
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah makan dan minuman untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	310 Porsi	100 %	11,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	12,030,000
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Barang cetakan dan Penggandaan untuk keperluan kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4953 Eksemplar	100 %	3,922,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,922,400
2	08	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	31 buah	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	193 kali	100 %	40,726,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	64,278,000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**78,089,800**					**80,089,900**
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 kali	100 %	56,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	57,490,000
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 kali	100 %	21,599,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	22,599,900
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**331,385,770**					**270,721,700**
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dengan baik	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	0 Unit 8 unit	100 %	331,385,770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	270,721,700
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**278,154,000**					**281,155,000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**251,269,000**					**253,270,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	jumlah koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah tanggamus/kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	94 %	20 Orang	100 %	112,949,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	94 %	113,950,000
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan tanggamus/kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	94 %	20 Orang	100 %	138,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	94 %	139,320,000
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**								**26,885,000**					**27,885,000**
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	Jumlah rujukan korban kekerasan pada perempuan	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	94 %	12 Bulan	100 %	26,885,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani	94 %	27,885,000
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**854,390,100**					**858,390,100**
2	**08**	**07**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**777,584,100**					**780,584,100**
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Jumlah pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	93 %	3 bulan	100 %	235,159,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	93 %	237,159,000
2	08	07	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Jumlah Penerima Hibah	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	93 %	100 persen	100 %	542,425,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	93 %	543,425,100
2	**08**	**07**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**76,806,000**					**77,806,000**
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	Jumlah peserta peningkatan SDM penyedia layanan anak	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	80 Peserta	100 %	76,806,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	100 %	77,806,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								**7,457,328,000**					**7,711,384,750**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**								**167,360,000**					**190,319,800**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**								**167,360,000**					**169,360,000**
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah Data Keluarga	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.30 %	2272 blangko	100 %	11,360,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase rata-rata jumlah anak per keluarga	2.30 %	12,360,000
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah pemetaan data perkiraan pengendalian penduduk	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.30 %	20 Kecamatan	100 %	156,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase rata-rata jumlah anak per keluarga	2.30 %	157,000,000
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**								**4,371,768,000**					**4,432,253,000**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**								**1,262,015,000**					**1,268,015,000**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah Pelaksaan advokasi program KKBPK	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	20 Kecamatan	100 %	4,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	5,375,000
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah Media KIE KB Jumlah Pelaksanaan Advokasi kearifan budaya lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	50 buah 20 Kecamatan	100 %	25,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	26,000,000
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah Media KIE KB	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	45 %	50 buah	100 %	70,640,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	71,640,000
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah peserta lokmin	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	45 %	20 Orang	100 %	312,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	313,000,000
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah peserta sosialisasi tenaga lini lapangan	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	400 Orang	100 %	810,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	811,000,000
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah audit kasus stunting	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	20 Kecamatan	100 %	40,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	41,000,000
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**								**1,449,600,000**					**1,495,600,000**
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah PPKBD dan SUBPPKBD	Persentase Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	302 ppkbd	100 %	1,449,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	1,495,600,000
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**								**573,403,000**					**579,963,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	25 Faskes	100 %	22,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	23,500,000
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah akseptor pelayanan MKJP	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	23 Akseptor	100 %	527,275,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	530,835,000
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah operasional ke Faskes	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	10 Faskes	100 %	10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	11,800,000
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Persentase Akseptor KB MKJP	Jumlah peserta promosi dan konseling kespro terkendalinya pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan kb di daerah kab/kota	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	45 %	100 Orang	100 %	12,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	13,828,000
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**								**1,086,750,000**					**1,088,675,000**
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Akseptor KB MKJP	Presentase program KKBPK di Kampung KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45 %	70 persen	100 %	1,086,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Akseptor KB MKJP	45 %	1,088,675,000
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**								**2,918,200,000**					**3,088,811,950**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**								**2,918,200,000**					**2,993,811,950**
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Pendampingan Calon Pengantin	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	4625 catin	100 %	2,918,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera	70 %	2,980,200,000
												TOTAL	**13,449,461,770**					**14,038,052,973**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								**13,667,740,594**					**13,704,086,028**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**13,359,155,694**					**13,502,086,028**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48,777,000**					**68,510,250**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	30 Dokumen	100 %	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,500,000
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	75 Dokumen	100 %	28,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	47,976,250
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Dokumen	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,500,000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	21 Dokumen	100 %	3,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,120,000
2	09	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		WTP	10 Dokumen	100 %	3,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,120,000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	30 Laporan	100 %	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,650,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Laporan	100 %	2,644,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,644,000
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,649,647,492**					**12,683,661,368**
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	146 Orang/bulan	100 %	11,681,367,492	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	11,681,301,368
2	09	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	861,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	870,000,000
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	107,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	132,360,000
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168,239,400**					**221,580,950**
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	34,888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,000,000
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	35,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,580,950
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Paket	100 %	12,888,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,000,000
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP	1 Paket	100 %	12,993,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,000,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	12 Laporan	100 %	72,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	168,000,000
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**175,070,000**					**204,750,000**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Bai	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	107,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	86,750,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Bai	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	67,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	118,000,000
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**317,421,802**					**323,583,460**
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP	0 Unit 2 Unit	100 %	85,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	85,940,000
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua	WTP	15 Unit	100 %	169,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		177,152,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kelurahan					Umum				
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	62,071,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	60,491,460
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**308,584,900**					**202,000,000**
2 09 03 2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**								**202,000,000**					**202,000,000**
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari %	0 Laporan 1 Laporan	100 %	202,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	100 % 100Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari %	202,000,000
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**								**106,584,900**					**0**
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	ersentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	106,584,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		ersentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari	100 %	0
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**6,042,588,300**					**3,490,180,866**
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**134,393,000**					**150,000,000**
3 27 02 2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**134,393,000**					**150,000,000**
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100 %	1 Dokumen	100 %	134,393,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	100 %	150,000,000
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**								**160,978,000**					**2,005,386,933**
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**								**160,978,000**					**158,381,933**
3 27 03 2.01 02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	160,978,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	100 %	158,381,933
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**206,346,800**					**208,381,933**
3 27 05 2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**								**206,346,800**					**208,381,933**
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Ha	100 %	157,831,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	100 %	158,381,933
3 27 05 2.01 05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	48,514,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian	100 %	50,000,000
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**								**5,540,870,500**					**1,126,412,000**
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**								**5,540,870,500**					**1,126,412,000**
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	569,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	100 %	576,412,000
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	100 %	250,000,000
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	4,721,038,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina	100 %	300,000,000
								TOTAL	**19,710,328,894**					**17,194,266,894**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**5,989,132,412**					**6,246,324,728**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,638,891,212**					**5,022,912,837**
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,812,072,612**					**3,816,659,311**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	0 Orang/bulan 25 orang	100 %	2,816,032,612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,816,579,311
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Non PNS yang mendukung pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	46 orang	100 %	893,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	912,240,000
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang disusun	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	12 kali	100 %	102,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	87,840,000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**98,873,400**					**205,194,326**
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	202 Buah	100 %	6,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	9,070,000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyedian Makanan dan minuman untuk Keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	751 Porsi	100 %	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	26,300,000
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Keperluan rutin Kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	125 Eksemplar	100 %	9,708,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor yang disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	975 buah	100 %	12,494,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	123 Kali	100 %	60,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	102,264,326
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,056,000**					**115,000,000**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	12 kali	100 %	121,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	115,000,000
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**606,889,200**					**693,019,200**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dengan baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	1 Unit	100 %	44,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	44,170,000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang dipelahara dengan baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	17 Unit	100 %	555,619,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	598,849,200
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WTP	20 unit	100 %	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**600,000,000**					**290,389,600**
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**								**600,000,000**					**250,000,000**
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ada	1 Dokumen	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada	250,000,000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**40,120,000**					**213,459,800**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**40,120,000**					**213,459,800**
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				%	sampel	%				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68 %	60,207,000
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**20,000,000**					**35,000,000**
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**20,000,000**					**35,000,000**
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kemitraan Lingkungan Hidup yang Mendapat Pendampingan oleh Perangkat Daerah				%	Lembaga	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kemitraan Lingkungan Hidup yang Mendapat Pendampingan oleh Perangkat Daerah	65 %	35,000,000
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**690,121,200**					**662,662,491**
2					**Pengelolaan Sampah**								**690,121,200**					**662,662,491**
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R				%	Dokumen	100 %	156,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	95 %	155,260,000
2										%	Ton	100 %	534,101,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	95 %	507,402,491

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
								TOTAL	**5,989,132,412**					**6,246,324,728**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								**7,559,420,380**					**8,762,653,215**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**7,479,833,980**					**8,623,005,215**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**14,762,100**					**35,586,200**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Dokumen	100 %	8,486,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	27,936,200
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Dokumen	100 %	1,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,450,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Dokumen	100 %	1,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,500,000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Dokumen	100 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	800,000
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Dokumen	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	850,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	6 Laporan	100 %	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	900,000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	3 Laporan	100 %	1,895,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	2,150,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,240,166,940**					**6,593,625,015**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	38 Orang/bulan	100 %	4,553,403,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	4,553,403,315
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Dokumen	100 %	1,642,271,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,950,721,700
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Dokumen	100 %	44,491,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	89,500,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**171,018,040**					**239,351,000**
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	1 Paket	100 %	18,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	26,195,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Paket	100 %	41,161,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	42,650,000
2	12	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Paket	100 %	44,950,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	46,856,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	76 Laporan	100 %	66,480,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	123,650,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**815,973,100**					**1,520,383,000**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	12 Laporan	100 %	113,881,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	123,400,000
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	10 Laporan	100 %	645,941,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,324,440,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	12 Laporan	100 %	56,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	72,543,000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**237,913,800**					**234,060,000**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Unit	100 %	40,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	42,560,000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan				WTP	Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	134,650,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	32 Unit	100 %	54,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	32,320,000
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP	1 Unit	100 %	21,813,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	24,530,000
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**								**33,311,700**					**32,360,000**
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**								**33,311,700**					**32,360,000**
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP-el	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu keluarga	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	33,311,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP-el	100 %	32,360,000
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**								**9,220,000**					**27,660,000**
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**								**9,220,000**					**27,660,000**
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -18 Tahun	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	37250 Dokumen	100 %	9,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100 %	27,660,000
2 12 04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**15,114,700**					**24,328,000**
2 12 04 2.01	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**								**15,114,700**					**24,328,000**
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang Mengajukan PKS	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase OPD yang mengajukan PKS	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Dokumen	100 %	15,114,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang Mengajukan PKS	100 %	24,328,000
2 12 05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**								**21,940,000**					**55,300,000**
2 12 05 2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**								**21,940,000**					**55,300,000**
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Buku Profil Kependudukan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	30 Dokumen	100 %	21,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	55,300,000
								TOTAL	**7,559,420,380**					**8,762,653,215**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								**12,986,188,213**					**9,436,191,720**
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,439,720,913**					**3,364,902,770**
2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**69,836,100**					**64,524,150**
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	4 Dokumen	100 %	40,626,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	40,626,150
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	5 Dokumen	100 %	4,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	4,254,000
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	5 Dokumen	100 %	4,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	4,254,000
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	5 Dokumen	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	4,050,000
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	5 Dokumen	100 %	3,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	3,036,000
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	4 Laporan	100 %	10,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	5,268,000
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP Dokumen	3 Laporan	100 %	3,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP Dokumen	3,036,000
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,932,241,763**					**2,879,021,770**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 20 Orang	25 Orang/bulan	100 %	2,366,621,763	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 20 Orang	2,366,621,713
2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 20 Orang	26 Dokumen	100 %	512,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 20 Orang	512,400,000
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 20 Orang	2 Dokumen	100 %	53,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 20 Orang	57
2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**32,625,000**					**32,625,000**
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	opini bpk terhadap laporan keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1	1 Orang	1 Orang	32,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan	WTP 1	32,625,000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**187,191,850**					**245,904,650**
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 1 Paket	3 Paket	100 %	61,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 1 Paket	135,501,800
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 1 Paket	400 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 1 Paket	4,000,000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 1 Paket	4000 Paket	100 %	6,916,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 1 Paket	6,916,850
2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 1 Paket	150 Paket	100 %	6,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1 1 Paket	6,426,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 1 Paket	150 Laporan	100 %	108,347,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	1 1 Paket	93,060,000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**116,355,000**					**116,356,000**
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan				1 Dokumen	Laporan	%				opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP 1 WTP Dokumen	85,436,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Opini BPK terhadap laporan keuangan		
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	persentase tersedianya penunjang urusan pemerintahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1 WTP Dokumen	3 Laporan	100 %	30,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP 1 WTP Dokumen	30,920,000
2 13 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**101,471,200**					**26,471,200**
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	opini bpk terhadap laporan keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	persentase tersedianya penunjang urusan pemerintahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP 1	6 Unit	100 %	101,471,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		opini bpk terhadap laporan keuangan	WTP 1	26,471,200
2 13 02	**PROGRAM PENATAAN DESA**								**1,452,216,000**					**819,038,950**
2 13 02 2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**								**1,452,216,000**					**819,038,950**
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan kewenangan	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Desa	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penataan Pekon	100 %	50,000,000
2 13 02 2.01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	1,402,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penataan Pekon	100 %	769,038,950
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**								**50,000,000**					**50,000,000**
2 13 03 2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**								**50,000,000**					**50,000,000**
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pekon yang melaksanakan kerjasama	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kerjasama Pekon	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pekon yang melaksanakan kerjasama	100 %	50,000,000
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**3,828,481,300**					**1,394,500,000**
2 13 04 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**								**3,828,481,300**					**1,394,500,000**
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	100 %	2 Dokumen	100 %	2,077,179,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	0
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	35,000,000
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	80,000,000
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Dokumen	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	75,000,000
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Laporan	100 %	1,431,301,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	1,074,500,000
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	40,000,000
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pekon tertib administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Administrasi Pemerintahan Desa dalam meningkatkan aparatur dan pembangunan desa	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pekon tertib administrasi	100 %	90,000,000
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**4,215,770,000**					**3,807,750,000**
2 13 05 2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**4,215,770,000**					**3,807,750,000**
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartispasi dalam proses pembangunan pekon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			%	Lembaga	%				[illegible] pembangunan pekon	%	80,000,000
2						%	Unit	%				[illegible] pembangunan pekon	%	3,537,750,000
2						%	Laporan	100 %	155,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		[illegible] pembangunan pekon	%	150,000,000
2						%	Laporan	100 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		[illegible] Lembaga Adat	100 %	40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		berpartispasi dalam proses pembangunan pekon		dan Kelembagaan Desa	Semua Kelurahan					Umum		dan Masyarakat yang berpartispasi dalam proses pembangunan pekon		
								TOTAL	**12,986,188,213**					**9,436,191,720**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								**5,022,137,050**					**5,895,453,774**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,770,868,600**					**5,423,783,774**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35,844,900**					**86,800,000**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	100 %	753,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	1,800,000
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Dokumen	100 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	3,000,000
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Dokumen	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	3,000,000
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	100 %	741,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	3,000,000
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	3,000,000
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	3 Laporan	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	3,000,000
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Laporan	100 %	30,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	70,000,000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,187,463,995**					**4,243,863,774**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disutepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	22 Orang	22 Orang	100 %	2,213,593,995	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	22 Orang	2,213,593,774
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disutepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	22 Orang	1 Dokumen	100 %	1,928,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	22 Orang	1,939,730,000
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disutepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	22 Orang	1 Dokumen	100 %	45,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	22 Orang	90,540,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**102,236,500**					**193,120,000**
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	1 Paket	1 Paket	100 %	9,334,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	26,500,000
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	1 Paket	1 Paket	100 %	9,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	26,500,000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	1 Paket	1 Paket	100 %	27,953,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	40,120,000
2	15	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	1 Paket	1 Paket	100 %	23,775,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	30,000,000
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	10 Laporan	100 %	31,699,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 Paket	70,000,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**186,598,005**					**200,000,000**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	WPT Dokumen	2 Laporan	100 %	186,598,005	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WPT Dokumen	200,000,000
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**258,725,200**					**700,000,000**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	23 Unit	23 Unit	100 %	258,725,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	23 Unit	700,000,000
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**248,728,450**					**421,670,000**
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**								**76,563,450**					**165,000,000**
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				%	Unit	%				Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	30,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1200 Unit	100 %	63,226,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	135,000,000
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**								**81,430,000**					**125,600,000**
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Persentase PeningkataPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4000 Unit	100 %	81,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	125,600,000
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**								**15,310,000**					**37,550,000**
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	10,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	32,550,000
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Batu Kramat	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	5,000,000
2 15 02 2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**75,425,000**					**93,520,000**
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit	100 %	3,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	3,520,000
2 15 02 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	100 %	3 Laporan	100 %	72,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	100 %	90,000,000
2 15 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**2,540,000**					**50,000,000**
2 15 03 2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**								**2,540,000**					**50,000,000**
2 15 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Persentase Peningkatan Penumpang yang Terlayani oleh Angkutan Pelayaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung	100 %	1 Unit	100 %	2,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Penumpang yang terlayani Oleh Angkutan Pelayaran	100 %	50,000,000
								TOTAL	**5,022,137,050**					**5,895,453,774**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								**6,392,701,186**					**8,426,500,000**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,923,910,186**					**4,033,000,000**
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**19,350,000**					**30,500,000**
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen		12,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,500,000
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan		1,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,200,000
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,414,747,925**					**3,385,500,000**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan		2,985,357,925	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,900,000,000
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				23 Dokumen		356,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				395,500,000
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		72,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				90,000,000
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**181,094,300**					**264,000,000**
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		14 Paket		25,590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		80 Paket		27,116,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				24,000,000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket		31,637,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan		96,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				165,000,000
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**134,627,961**					**152,000,000**
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		102,115,761	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				112,000,000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				35 Laporan		32,512,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40,000,000
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**174,090,000**					**201,000,000**
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit		133,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				150,000,000
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		3 Unit		40,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				51,000,000
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**2,127,271,000**					**3,956,000,000**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**2,127,271,000**					**3,956,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				192 Dokumen		14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,500,000
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				620 Dokumen		592,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,500,000,000
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen		33,340,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				41,000,000
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				45 Dokumen		1,472,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,350,000,000
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen		14,950,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,500,000
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**341,520,000**					**437,500,000**
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**41,520,000**					**32,500,000**
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				37 Dokumen		41,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,500,000
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**300,000,000**					**405,000,000**
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				27 Layanan		300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				405,000,000
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								**50,550,000**					**27,500,000**
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**								**50,550,000**					**27,500,000**
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**								**50,550,000**					**27,500,000**
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				4 Dokumen		50,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,500,000
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								**63,267,600**					**32,500,000**
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**63,267,600**					**32,500,000**
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**63,267,600**					**32,500,000**
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				4 Perangkat Daerah		63,267,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,500,000
								TOTAL	**6,506,518,786**					**8,486,500,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								**7,013,043,908**					**6,858,031,648**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,441,722,108**					**6,048,031,648**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16,750,500**					**15,550,500**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 WTP	20 Dokumen	100 persen	5,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	4,395,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	6 Dokumen	100 persen	1,737,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	1,737,500
2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	6 Dokumen	100 persen	1,517,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	1,517,500
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	10 Dokumen	100 persen	2,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	2,070,000
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	20 Dokumen	100 persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	1,800,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	45 Laporan	100 persen	2,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	2,020,000
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang disusun Dengan Baik dan Tepat Waktu		1 WTP	5 Laporan 5 Laporan	100 persen	2,010,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap laporan keuangan	1 WTP	2,010,500
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,623,121,446**					**5,623,891,446**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		WTP	45 Orang/bulan	100 persen	4,420,861,446	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,420,861,446
2	17	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		WTP	12 Dokumen	100 persen	1,130,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,131,000,000
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		WTP	12 Dokumen	100 persen	71,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	72,030,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**139,500,700**					**142,375,522**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket		1,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,740,000
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket		3,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,440,000
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket		3,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				3,576,560
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket		13,645,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,645,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket		31,583,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33,736,500
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				10 Paket		22,637,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				22,637,400
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				169 Laporan		63,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				63,600,062
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**447,042,362**					**76,540,000**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Presentase laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	60 Laporan 60 Paket	100 persen	83,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	76,540,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase laporan penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	2 Laporan	100 persen	363,234,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0
2 17 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**215,307,100**					**189,674,180**
2 17 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	1 Unit	100 persen	44,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	100 persen	44,170,000
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	10 Unit	100 persen	147,679,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	100 persen	122,354,180
2 17 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	12 Unit	100 persen	8,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	100 persen	8,200,000
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun dengan baik		100 persen	1 Unit	100 persen	15,257,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pemenuhan Penyediaan Administrasi Umum	100 persen	14,950,000
2 17 03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**								**29,999,800**					**60,000,000**
2 17 03 2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**								**29,999,800**					**60,000,000**
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentasi koperasi yang di awasi		50 persen	40 Unit Usaha	100 persen	29,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi	50 persen	60,000,000
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**								**441,322,000**					**600,000,000**
2 17 05 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**441,322,000**					**600,000,000**
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang		441,322,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000,000
2 17 08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**								**100,000,000**					**150,000,000**
2 17 08 2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**								**100,000,000**					**150,000,000**
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Unit Usaha		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UMK				150,000,000
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								**263,724,500**					**207,045,938**
3 30 04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**								**120,000,000**					**66,725,000**
3 30 04 2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**								**83,640,000**					**50,725,000**
3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		83,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50,725,000
3 30 04 2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**								**36,360,000**					**16,000,000**
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	indeks kestabilan harga barang pokok dan penting di kabupaten tanggamus	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	indeks kepuasan masyarakat terhadap kestabilan harga barang pokok dan penting di kabupaten tanggamus		90 persen	12 Laporan	90 persen	36,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks kestabilan harga barang pokok dan penting di kabupaten tanggamus	90 persen	16,000,000
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**89,007,000**					**30,085,938**
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**								**89,007,000**					**30,085,938**
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				100 Unit		64,007,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi LegaL Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				10 kali 0 Orang		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,085,938
3 30 07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**54,717,500**					**110,235,000**
3 30 07 2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**54,717,500**					**110,235,000**
3 30 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah produk unggulan yang di fasilitasi pemasarannya	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Presentase pelaku usaha yang di tingkatkan akses pasarnya	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 produk	70 UMKM	100 persen	54,717,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		jumlah produk unggulan yang di fasilitasi pemasarannya	20 produk	110,235,000
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								**99,420,000**					**200,000,000**
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**99,420,000**					**200,000,000**
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**								**99,420,000**					**200,000,000**
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen		99,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
					Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
								TOTAL	7,376,188,408					7,265,077,586

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								**4,051,405,454**					**4,568,017,533**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,597,829,454**					**3,776,344,357**
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56,859,200**					**60,446,900**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3 Dokumen	100 %	8,168,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,168,500
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 %	8,574,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,497,300
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 %	8,369,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,369,300
2	18	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 %	4,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,380,000
2	18	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 %	4,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,395,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Laporan	100 %	17,616,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	21,426,200
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3 Laporan	100 %	5,356,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,210,600
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,981,886,904**					**2,994,541,807**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	18 Orang/bulan	100 100	2,178,657,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,178,657,707
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 100	741,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	741,600,000
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Dokumen	100 100	60,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	73,105,000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Laporan	100 100	1,179,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,179,100
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**147,662,150**					**269,865,650**
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	61,417,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	103,310,100
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	280 Paket	100 %	6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	12,600,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	19,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		25,739,850
2	18	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Paket	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		22,571,700
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Laporan	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		105,644,000
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**133,200,000**					**157,860,000**
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Laporan	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		147,860,000
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**278,221,200**					**293,630,000**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		44,670,000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		125,460,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		6,700,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				disusun dengan baik										
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	101,391,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	116,800,000
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**93,360,000**					**154,810,000**
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**								**93,360,000**					**154,810,000**
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase izin yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1000 Pelaku Usaha	100 %	93,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	100 %	136,960,000
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**360,216,000**					**449,808,000**
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**								**360,216,000**					**449,808,000**
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	210 Pelaku Usaha	100 %	261,996,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	100 %	187,812,000
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Kegiatan Usaha	100 %	98,220,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	100 %	187,812,000
								TOTAL	**4,051,405,454**					**4,568,017,533**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								**5,648,152,109**					**5,402,289,835**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,378,748,009**					**3,636,376,635**
2	**19**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**40,322,600**					**34,166,300**
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	3 Dokumen	100 Persen	6,379,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Dokumen	100 Persen	5,540,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	19,024,800
2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Dokumen	100 Persen	6,597,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Dokumen	100 Persen	5,355,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,261,100
2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Dokumen	100 Persen	5,710,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,880,400
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	5 Laporan	100 Persen	4,782,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		WTP	2 Laporan	100 Persen	5,956,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,109,567,849**					**3,178,455,425**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	22 Orang/bulan	100 Persen	2,620,187,849	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,687,355,425
2	19	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Dokumen	100 Persen	405,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	407,100,000
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	12 Dokumen	100 Persen	84,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	84,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**72,563,760**					**159,449,310**
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP	1 Paket	100 Persen	15,269,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	25,960,900
2	19	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	1 Paket	100 Persen	19,389,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	23,372,800
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	3 Laporan	100 Persen	37,904,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	75,908,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**89,893,000**					**122,160,000**
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	WTP	4 Laporan	100 Persen	57,838,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		92,160,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Laporan	100 Persen	32,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		30,000,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**66,400,800**					**124,145,600**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan					Unit	Persen				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		90,645,600
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**450,475,400**					**508,403,200**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**								**346,505,600**					**408,403,200**
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui Kewirausahaan, Kepeloporan dan Kepemimpinan0				Persen	Orang	100 Persen	346,505,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemberdayaan Aktifitas Pemuda Melalui	Persen	408,403,200
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**103,969,800**					**100,000,000**
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota					Persen	Dokumen	100 Persen	103,969,800			~~Organisasi Kepemudaan~~ yang diberdayakan dan	Persen	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Persentase Peningkatan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan		Persentase Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan						Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		dikembangkan		
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**1,714,958,900**					**1,157,510,000**
2 19 03 2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**1,714,958,900**					**797,898,500**
2 19 03 2.04 03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	1,714,958,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembibitan Olahragawan Berbakat	100 Persen	797,898,500
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**103,969,800**					**100,000,000**
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**103,969,800**					**100,000,000**
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase KwarRan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaanya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya	100 Persen	1 Organisasi	100 Persen	103,969,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase KwarRan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaanya	100 Persen	100,000,000
								TOTAL	**5,648,152,109**					**5,402,289,835**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								**3,620,153,443**					**3,849,494,341**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,520,653,443**					**3,733,494,341**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**57,941,200**					**81,000,000**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen		28,941,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,000,000
2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen		4,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,000,000
2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen		4,999,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan		5,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan		4,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6,000,000
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,082,014,943**					**3,085,014,061**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan		2,243,409,243	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2,243,408,361
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				41 Dokumen		731,686,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				731,686,200
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen		106,919,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				109,919,500
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**103,315,300**					**160,400,000**
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket		18,118,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10,000,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				500 Paket		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7,000,000
2	23	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				800 Paket		23,296,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				27,000,000
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan		47,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				96,400,000
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,905,200**					**32,000,000**
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit		30,905,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32,000,000
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**76,556,000**					**89,302,000**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		56,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				64,302,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		19,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25,000,000
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**169,920,800**					**285,778,280**
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit		169,920,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				200,778,280
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**99,500,000**					**116,000,000**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**34,000,000**					**40,000,000**
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan				150 Eksemplar		34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				40,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan							Umum				
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**65,500,000**					**76,000,000**
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Perpustakaan		65,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				76,000,000
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								**29,477,150**					**85,000,000**
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**29,477,150**					**85,000,000**
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**								**17,484,550**					**65,000,000**
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis								9,688,750	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				30,000,000
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				5 Berkas		7,795,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
2 24 02 2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**								**11,992,600**					**20,000,000**
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				10 Arsip		11,992,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,000,000
								TOTAL	**3,649,630,593**					**3,934,494,341**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**3,690,124,037**					**4,581,657,521**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,506,035,737**					**4,341,657,521**
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**21,618,000**					**85,000,000**
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	36 Dokumen	100 %	15,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	35,000,000
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	3,000,000
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	3,000,000
3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	3,000,000
3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	35,000,000
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	12 Laporan	100 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	3,000,000
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 % 100 %	20 Laporan	100 %	1,038,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Sumber Daya Perikanan yang Unggul dan Berkelanjutan Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 % 100 %	3,000,000
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,139,588,189**					**3,234,657,521**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	22 Orang/bulan	100 %	2,304,748,189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	2,304,748,189
3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	41 Dokumen	100 %	782,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	816,390,000
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah DokumenPenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Dokumen	100 %	52,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	113,519,332
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**75,879,300**					**310,000,000**
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	7 Paket	100 %	13,423,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	35,000,000
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Paket	100 %	10,005,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	45,000,000
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Paket	100 %	11,041,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	50,000,000
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Paket	100 %	22,223,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	30,000,000
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	80 Laporan	100 %	19,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	150,000,000
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**96,959,248**					**150,000,000**
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	63,709,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Laporan	100 %	33,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	50,000,000
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**171,991,000**					**562,000,000**
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Unit	100 %	21,641,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	82,000,000
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	30 Unit	100 %	133,614,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	410,000,000
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Unit	100 %	4,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	20,000,000
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Unit	100 %	12,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tersedianya Informasi dan Kualitas Pelayanan yang baik	100 %	50,000,000
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**63,740,700**					**10,000,000**
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**63,740,700**					**10,000,000**
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Persentse Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil yang menjadi Kewenangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,50 %	265 Orang	100 %	63,740,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2,50 %	10,000,000
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**72,190,100**					**120,000,000**
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**								**44,130,000**					**70,000,000**
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,50 %	2 Kelompok	100 %	14,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,50 %	35,000,000
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,50 %	3 Kelompok	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,50 %	35,000,000
3 25 04 2.03	**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**13,920,000**					**25,000,000**
3 25 04 2.03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,50 %	25 Rekomendasi	100 %	13,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,50 %	25,000,000
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**								**14,140,100**					**25,000,000**
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	2,50 %	2 Unit	100 %	14,140,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,50 %	25,000,000
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**48,157,500**					**110,000,000**
3 25 06 2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**								**18,547,500**					**40,000,000**
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	Persentase Peningkatan Informasi dan Promosi Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	4 Dokumen	100 %	18,547,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	2 %	40,000,000
3 25 06 2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**								**12,800,000**					**35,000,000**
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Persentase Peningkatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	10 Unit Usaha	100 %	12,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	2 %	35,000,000
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**								**16,810,000**					**35,000,000**
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan yang menjadi Kewenangan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 %	26 Pelaku Usaha	100 %	16,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan Pengelolaan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan dan Peningkatan Konsumsi Ikan	2 %	35,000,000
								TOTAL	**3,690,124,037**					**4,581,657,521**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.2.22.2.19.02.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3.26.2.22.2.19.02.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								**195,500,000**					**295,500,000**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**								**195,500,000**					**245,500,000**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**195,500,000**					**195,500,000**
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaaan lokal yang Difasilitasi Pengembanganya	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	195,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Kesenian dan kebudayaaan lokal yang Difasilitasi Pengembanganya	100 %	195,500,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								**4,982,422,613**					**6,102,082,001**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,474,402,613**					**5,302,082,001**
3	**26**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**28,913,400**					**82,000,000**
3	26	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	2 Dokumen	100 %	11,013,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	11,000,000
3	26	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	2 Dokumen	100 %	6,000,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,000,000
3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	2 Dokumen	100 %	5,899,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,000,000
3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	2 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,000,000
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,095,990,213**					**4,444,962,221**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administratsi Keuangan Perangkat Daerah		WTP	41 Orang/bulan	100 %	3,094,560,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,408,042,221
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administratsi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	914,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	914,400,000
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Administratsi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	1 Dokumen	100 %	87,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	122,520,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**172,907,600**					**366,000,000**
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	10 Paket	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	1 Paket	100 %	3,267,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
3	26	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	1 Paket	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	1 Laporan	100 %	149,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	318,000,000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**80,265,000**					**277,867,780**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	20 Laporan	100 %	80,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	243,545,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**96,326,400**					**131,252,000**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	4 Unit	100 %	93,326,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	101,252,000
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	2 Unit	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	28,000,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**508,020,000**					**650,000,000**
3	**26**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**								**463,020,000**					**605,000,000**
3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			%	Unit	%				Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100 %	605,000,000
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**								**45,000,000**					**45,000,000**
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata	[illegible]	[illegible]	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		[illegible]	100 %	45,000,000
												TOTAL	**5,177,922,613**					**6,397,582,001**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**													
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								**6,807,495,514**					**6,778,760,514**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6,149,184,464**					**6,113,010,914**
3	**27**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**56,396,600**					**62,046,000**
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	5,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	9,231,000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Dokumen	100 %	35,338,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	35,228,100
3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	27 Dokumen	100 %	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,152,000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	27 Dokumen	100 %	2,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,820,000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	27 Dokumen	100 %	2,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,820,000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	8 Laporan	100 %	1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,650,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Laporan	100 %	1,992,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,144,900
3	**27**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,623,280,764**					**5,609,859,384**
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	53 Orang/bulan	100 %	4,208,362,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,208,359,384
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	79 Dokumen	100 %	1,329,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,326,900,000
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	85,618,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	74,600,000
3	**27**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**201,578,500**					**238,969,030**
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	75 Paket	100 %	55,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	81,510,230
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1355 Paket	100 %	55,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	42,700,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	50 Paket	100 %	7,744,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,263,800
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1124 Paket	100 %	30,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	28,300,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	72 Laporan	100 %	51,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	78,195,000
3	**27**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**157,541,000**					**102,950,000**
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	63,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	57,250,000
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	93,935,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	45,700,000
3	**27**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**110,387,600**					**99,186,500**
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ersentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	40,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	35,170,000
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	ersentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Unit	100 %	70,217,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	64,016,500

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.05.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**579,044,250**					**586,299,600**
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**								**188,955,200**					**78,200,000**
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	5 %	3 Laporan	100 %	188,955,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	5 %	78,200,000
3 27 02 2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**								**165,855,800**					**142,054,400**
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perkebunan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Presentase Ketersediaan Benih / Bibit Perkebunan dan Peternakan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	7 %	3 VUB	5 %	67,710,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perkebunan	7 %	76,300,000
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perkebunan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Presentase Ketersediaan Benih / Bibit Perkebunan dan Peternakan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	7 %	5 Dokumen	5 %	98,145,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pertumbuhan Produksi Hasil Perkebunan	7 %	65,754,400
3 27 02 2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**224,233,250**					**366,045,200**
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	5 %	4 Ton	5 %	224,233,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peresentase Produksi Sub Sektor Perkebunan dan Peternakan	5 %	366,045,200
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**79,266,800**					**79,450,000**
3 27 04 2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**								**79,266,800**					**79,450,000**
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Presentase Pelaksanaan Vaksinasi dan pengobatan Hewan Ternak	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	79,266,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	100 %	79,450,000
								TOTAL	**6,807,495,514**					**6,778,760,514**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**523,733,978**					**978,811,050**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**523,733,978**					**978,811,050**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**								**523,733,978**					**978,811,050**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Dokumen	9 Dokumen	306,080,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	641,983,950
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3 Dokumen	9 Dokumen	91,358,778	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	170,455,750
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Dokumen	9 Dokumen	126,294,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	166,371,350
												TOTAL	**523,733,978**					**978,811,050**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**4,162,750,948**					**18,727,234,884**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**4,162,750,948**					**18,727,234,884**
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**								**4,162,750,948**					**18,727,234,884**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		1 Dokumen		750,332,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6,035,418,221
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		1 Dokumen		209,254,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4,794,222,721
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		1 Dokumen		3,203,164,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				7,897,593,942
												TOTAL	**4,162,750,948**					**18,727,234,884**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0003 Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**441,400,400**					**818,188,500**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**39,485,200**					**80,330,600**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**39,485,200**					**80,330,600**
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun dengan baik, presentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	46 Orang	100 %	39,485,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	80,330,600
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**401,915,200**					**737,857,900**
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**								**401,915,200**					**737,857,900**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Adanya capaian penyelenggaraan produk hukum daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	9 Dokumen	100 %	109,502,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	100 %	177,939,900
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Adanya capaian penyelenggaraan produk hukum daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	6 Kasus	100 %	202,862,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	100 %	448,555,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Adanya capaian penyelenggaraan produk hukum daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	700 Dokumen	100 %	89,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		presentase kecukupan pelayanan pemerintahan dan lesejahteraan rakyat	100 %	111,363,000
												TOTAL	**441,400,400**					**818,188,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0004 Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**5,378,028,000**					**5,493,135,900**
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**5,378,028,000**					**5,493,135,900**
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**5,378,028,000**					**5,493,135,900**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Tercapainya MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	6 Dokumen	6 Dokumen	5,308,488,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	100 persen	5,423,912,300
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Tercapainya MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	2 Laporan	6 Dokumen	69,540,000			Presentase MoU/PKS yang dapat diimplementasikan	100 persen	69,223,600
												TOTAL	**5,378,028,000**					**5,493,135,900**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**609,847,916**					**361,000,000**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**609,847,916**					**361,000,000**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**								**105,236,100**					**122,000,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah BUMD dan BLUD yang di Monitoring dan Evaluasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dimonitoring dan Evaluasi	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 BLUD 3 BUMD	100 %	41,580,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	50,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dimonitoring dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	19,707,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	22,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Pengawasan KUR	Persentase Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dimonitoring dan Evaluasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	43,947,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	50,000,000
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**								**470,516,916**					**200,000,000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Pameran yang diikuti dan dilaksanakan	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Pameran	100 %	470,516,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	200,000,000
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**								**34,094,900**					**39,000,000**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Puouk dan Pestisida	Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam		100 %	4 Laporan	100 %	17,603,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	19,000,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg Bersubsidi	Persentase Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Sumber Daya Alam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	16,491,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Pembangunan dan Perekonomian	100 %	20,000,000
												TOTAL	**609,847,916**					**361,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**554,581,400**					**1,072,395,398**
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**554,581,400**					**1,072,395,398**
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**554,581,400**					**1,072,395,398**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	124 Dokumen	124 Document	111,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	466,952,588
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Dokumen	124 Document	423,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	516,915,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	24 Orang	124 Document	19,681,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 %	88,527,810
												TOTAL	**554,581,400**					**1,072,395,398**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0007 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**10,045,901,392**					**13,518,027,230**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,045,901,392**					**13,518,027,230**
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**745,112,115**					**872,562,721**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP	110 Paket	12 Laporan	369,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	478,275,000
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP	12 Dokumen	12 Laporan	340,802,115	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	357,842,221
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP	68 Orang	12 Laporan	34,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	36,445,500
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**3,793,618,842**					**4,477,764,409**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP 0	14776 Paket	12 Laporan	745,147,842	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	1,276,869,859
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP 0	90000 Paket	12 Laporan	3,048,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	3,200,894,550
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,000,000**					**1,471,050,000**
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,050,000
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,653,953,535**					**3,703,922,355**
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik		1 WTP WTP 0		12 Laporan	1,109,722,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	1,165,208,625
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik		1 WTP WTP 0	12 Laporan	12 Laporan	1,544,231,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	2,538,713,730
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,852,216,900**					**2,992,727,745**
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik		1 WTP WTP 0	178 Unit	100 Unit	2,428,649,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	2,550,082,185
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	1 WTP WTP 0	22 Unit	100 Unit	232,287,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	243,901,560
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik		1 WTP WTP 0	23 Unit	100 Unit	189,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	196,644,000
4	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik		1 WTP WTP 0	0 Unit 12 Unit	100 Unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	1,050,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik		1 WTP WTP 0	12 Unit	100 Unit	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP WTP 0	1,050,000
												TOTAL	**10,045,901,392**					**13,518,027,230**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0008 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**223,925,653**					**597,000,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**223,925,653**					**597,000,000**
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**223,925,653**					**597,000,000**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP	20 Dokumen	600 Indeks	41,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	102,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	15 Laporan	600 Indeks	40,461,553	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	120,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	15 Dokumen	600 Indeks	64,358,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	120,000,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	15 Dokumen	600 Indeks	32,608,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	105,000,000
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	600 Indeks	45,197,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	150,000,000
												TOTAL	**223,925,653**					**597,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**332,447,100**					**365,691,810**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**332,447,100**					**365,691,810**
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**								**332,447,100**					**365,691,810**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Acara Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Acara, Naskah Dinas, Dokumen dan Laporan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	240 Acara	100 %	127,446,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	140,191,590
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Naskah Dinas Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Acara, Naskah Dinas, Dokumen dan Laporan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	420 Naskah	100 %	90,000,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	99,000,220
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Acara, Naskah Dinas, Dokumen dan Laporan	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	240 Dokumen	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	126,500,000
												TOTAL	**332,447,100**					**365,691,810**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.06.0.00.01.0010 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**								**18,718,012,610**					**20,570,632,198**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**18,718,012,610**					**20,570,632,198**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**47,906,100**					**120,942,043**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	20 Dokumen	100 %	5,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,860,796
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	60 Dokumen	100 %	5,464,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,511,865
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	60 Dokumen	100 %	6,664,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,150,245
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	60 Dokumen	100 %	6,664,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,511,865
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	60 Dokumen	100 %	6,664,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,511,865
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	20 Laporan	100 %	8,031,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	17,533,850
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	20 Laporan	100 %	9,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	25,861,557
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**16,456,486,545**					**16,691,473,753**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	81 Orang/bulan	100 %	11,108,807,345	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	11,108,807,076
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	210 Dokumen	100 %	5,211,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	5,301,600,000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	17 Dokumen	100 %	119,074,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	252,882,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	20 Laporan	100 %	7,371,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	12,980,415
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	40 Laporan	100 %	9,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	15,204,262
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5,429,000**					**10,985,152**
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	20 Laporan	100 %	5,429,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	10,985,152
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,483,098,612**					**3,022,139,085**
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	14310 Paket	100 %	102,041,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	170,103,255
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	18095 Paket	100 %	83,757,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	105,160,020
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksnanya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	884 Laporan	100 %	1,297,299,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,746,875,810
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**725,092,353**					**725,092,165**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	2 Orang/Bulan	2 Laporan	725,092,353	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	725,092,165
												TOTAL	**18,718,012,610**					**20,570,632,198**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**								**60,273,860,942**					**106,257,217,080**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**55,332,793,242**					**95,449,637,080**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**53,800,500**					**58,187,800**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Dokumen	100 %	13,940,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	14,187,800
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Dokumen	100 %	9,168,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	11,000,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Dokumen	100 %	7,558,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	8,000,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	60 Dokumen	100 %	4,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	6,000,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	25 Dokumen	100 %	6,925,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	6,000,000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Laporan	100 %	2,620,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3,500,000
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Laporan	100 %	8,863,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	9,500,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,141,914,909**					**7,209,035,348**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	43 Orang/bulan	100 %	4,221,812,309	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	4,221,741,248
4	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	138 Dokumen	100 %	2,776,706,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2,757,506,400
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	7 Dokumen	100 %	126,511,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	212,031,200
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Laporan	100 %	6,679,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	6,679,200
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	40 Laporan	100 %	10,205,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	11,077,300
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**86,985,500**					**11,343,368,000**
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Presetase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	0 Orang	100 %	6,125,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	11,158,435,000
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Presetase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Orang	100 %	80,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	155,183,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**9,969,099,950**					**23,695,084,732**
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Presentase Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Paket	100 %	382,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	512,000,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Presentase Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Paket	100 %	496,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	610,403,432
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Presentase Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Paket	100 %	244,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	352,966,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Presentase Laporan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2241 Paket	100 %	127,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	130,558,000
4	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum				%	Paket	%				Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	%	160,000,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum				%	Laporan	%				Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	%	21,929,157,300
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**72,827,200**					**235,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunanan lainnya	Presentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 unit	100 %	72,827,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	150,000,000
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,158,277,800**					**13,804,087,800**
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	12 Laporan	100 %	9,158,277,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	13,804,087,800
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**751,482,600**					**1,783,243,400**
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Unit	100 %	56,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	70,000,000
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	42 Unit	100 %	608,657,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1,342,368,400
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	94 Unit	100 %	56,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	120,000,000
4 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Presentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Unit	100 %	29,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	50,875,000
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**27,796,761,383**					**36,868,350,000**
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Presentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	45 orang	100 %	27,145,261,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	36,200,000,000
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Presentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Paket	100 %	651,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	668,350,000
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**								**301,643,400**					**453,280,000**
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Presentase Laporan Layanan Administrasi DPRD yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	7 Laporan	100 %	72,956,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	57,456,200
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Presentase Laporan Layanan Administrasi DPRD yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	18 Laporan	100 %	205,453,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	374,553,800
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Presentase Laporan Layanan Administrasi DPRD yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Paket	100 %	23,233,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Kecukupan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	21,270,000
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**4,941,067,700**					**10,807,580,000**
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**								**274,916,100**					**313,115,100**
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Presentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daearh dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Dokumen	100 %	49,115,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	100 %	49,115,100
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Presentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daearh dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	20 Dokumen	100 %	25,801,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	100 %	0
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Presentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daearh dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	100 %	200,000,000
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Presentase Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daearh dan Peraturan DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Dokumen	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terealisasi dengan baik	100 %	64,000,000
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**221,671,000**					**229,600,100**
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Presentase Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Dokumen	100 %	44,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	45,862,800
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Dokumen	100 %	45,286,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	46,026,500
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Presentase Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	5 Dokumen	100 %	45,266,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	46,211,500
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Presentase Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	5 Dokumen	100 %	45,456,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	46,401,500
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik				%	Dokumen	100 %	41,281,500				100 %	45,097,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
				Presentase Terlaksananya Pembahasaan Kebijakan Anggaran dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik		
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**138,748,200**					**145,603,000**
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Laporan	100 %	38,136,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	32,917,000
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Laporan	100 %	29,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	33,648,500
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Laporan	100 %	29,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	33,803,500
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Laporan	100 %	29,483,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	33,253,500
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Presentase Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	15 Laporan	100 %	12,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	11,980,500
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**2,352,610,200**					**4,075,076,200**
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	7 Dokumen	100 %	521,468,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	1,583,034,800
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3240 Dokumen	100 %	735,789,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	1,246,689,000
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	11 Orang	100 %	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	660,000,000
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	7 Orang	100 %	420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	420,000,000
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Dokumen	100 %	15,352,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	15,352,400
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**1,416,468,400**					**4,085,523,400**
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Presentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	45 Dokumen	100 %	55,949,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	55,949,500
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Presentase Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3 Dokumen	100 %	1,360,518,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	4,029,573,900
4 02 02 2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**36,610,700**					**84,610,700**
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Presentase Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	6 Dokumen	100 %	36,610,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	84,610,700
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**								**500,043,100**					**1,874,051,500**
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Presentase Terfasilitasinya Tugas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3 Dokumen	100 %	94,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	292,416,000
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Presentase Terfasilitasinya Tugas DPRD dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	25 Laporan	100 %	7,943,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	7,943,100
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Presentase Terfasilitasinya Tugas DPRD dengan baik		100 %	26 Dokumen	100 %	398,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Tugas dan Fungsi DPRD yang Terfasilitasi dengan baik	100 %	1,573,692,400
								TOTAL	**60,273,860,942**					**106,257,217,080**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**01**				**PERENCANAAN**								**13,617,326,161**					**15,600,762,004**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**10,512,673,801**					**10,586,171,355**
5	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**155,228,596**					**114,906,727**
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32 Buku		44,443,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		50 Dokumen		20,920,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20,920,500
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		50 Dokumen		12,469,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12,470,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen		5,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,218,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		24 Dokumen		4,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4,563,100
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		24 Laporan		41,374,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,238,391
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		24 Laporan		26,496,736	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,496,736
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,685,091,240**					**7,497,871,633**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		46 Orang		6,098,927,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,881,247,383
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		58 Dokumen		1,374,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1,374,070,000
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		12 Laporan		211,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				242,554,250
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**39,901,500**					**91,932,500**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		5 Paket		5,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5,200,000
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan umlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		0 Orang 4 Orang		34,701,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				86,732,500
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,044,011,600**					**1,199,794,520**
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		33 Paket		59,537,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				71,740,850
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		12 Paket		185,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				208,030,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		1995 Paket		86,032,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				65,879,650
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		12 Paket		55,380,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				59,977,120
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		341 Laporan		657,831,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				794,166,900
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,034,765,565**					**1,007,790,495**
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		946,762,015	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				964,761,745

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		10 Laporan		88,003,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43,028,750
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**553,675,300**					**673,875,480**
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				22 Unit		374,293,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				490,493,180
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		78,242,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				78,242,300
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		89 Unit		101,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,140,000
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,865,633,660**					**2,351,992,893**
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1,417,890,660**					**1,495,000,000**
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	4 Kali	100 Persen	297,537,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	100 %	350,000,000
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Dokumen	100 Persen	76,252,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	100 %	250,000,000
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Berita Acara	100 Persen	19,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	100 %	65,000,000
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Berita Acara	100 Persen	618,869,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	100 %	550,000,000
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	210 Dokumen	100 Persen	405,581,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kesesuaian Program RKPD Terhadap APBD	100 %	280,000,000
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**241,858,500**					**516,858,382**
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Masukan		163,555,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				471,561,416
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		umlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		230 Orang		78,303,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,296,966
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**205,884,500**					**340,134,511**
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		571 Buku		143,473,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				277,723,306
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		215 Laporan		62,411,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				62,411,205
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**1,239,018,700**					**2,662,597,756**
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**800,364,400**					**276,360,407**
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen		13,888,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,888,400
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		15,270,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,270,500
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		17,658,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,658,500
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		156,488,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		13,738,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,738,400
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 3 laporan		10,459,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				105,833,346

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia											
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 3 Laporan		31,548,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26,027,505
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		541,312,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				83,943,756
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**59,385,600**					**1,271,143,444**
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		11,430,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,430,500
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 3 Laporan		7,946,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				345,200,245
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Laporan		11,508,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11,508,200
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Laporan		27,566,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				61,822,816
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				3 Laporan		934,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				550,988,700
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**379,268,700**					**1,115,093,905**
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		15,470,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,420,621
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Laporan 10 Laporan		180,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				188,710,977
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Dokumen		14,962,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,244,934
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0 Laporan 10 Laporan		168,235,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				468,235,829
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								**2,033,429,500**					**2,946,887,800**
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**2,033,429,500**					**2,946,887,800**
5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**								**1,105,143,500**					**1,181,887,800**
5 05 02 2.01 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,700,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				446,887,800

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 05 02 2.01 06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		100,701,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				350,000,000
5 05 02 2.01 08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,002,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				190,000,000
5 05 02 2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**2,550,000**					**196,000,000**
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				196,000,000
5 05 02 2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**								**705,180,000**					**1,370,000,000**
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen		202,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen		202,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				610,000,000
5 05 02 2.03 05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen		201,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				210,000,000
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen		99,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**220,556,000**					**199,000,000**
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		220,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				199,000,000
								TOTAL	**15,650,755,661**					**18,547,649,804**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**33,913,429,374**					**37,594,023,447**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**31,008,216,824**					**33,602,191,261**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**66,319,050**					**68,943,540**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	0 Dokumen 4 Dokumen	100 %	14,572,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	16,959,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	1 Dokumen	100 %	6,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	7,799,490
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	WTP WTP WTP	1 Dokumen	100 %	6,243,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	7,865,550
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	1 Dokumen	100 %	2,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	3,636,150
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	1 Dokumen	100 %	2,213,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	3,636,150
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	3 Laporan	100 %	9,399,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	12,106,500
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	1 Laporan	100 %	25,435,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	16,940,700
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**19,719,548,174**					**22,361,086,128**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	49 ASN	100 %	9,345,190,074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	9,994,696,533
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	12 Dokumen	100 %	3,993,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	4,091,178,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	1 Dokumen	100 %	6,363,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	8,253,908,460
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	40 Laporan 0 Laporan	100 %	5,248,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	7,715,925
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	3 Dokumen	100 %	6,413,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	4,862,970
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	0 Laporan 19 Laporan	100 %	5,752,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	8,724,240
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**77,792,000**					**81,681,600**
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	9 Orang	100 %	77,792,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	81,681,600
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,116,498,100**					**2,033,310,458**
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	12 Paket 0 Paket	100 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	178,316,040

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	12 Paket 0 Paket	100 %	101,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	106,568,280
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	4 Paket	100 %	263,299,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	341,191,200
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	4 Paket	100 %	150,198,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	157,225,320
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	250 Laporan	100 %	595,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	1,250,009,618
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,516,489,500**					**8,394,839,775**
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	12 Laporan	100 %	9,407,295,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	8,302,658,175
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP WTP	12 Bulan	100 %	109,194,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP WTP	92,181,600
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**511,570,000**					**662,329,760**
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik		WTP WTP	9 Unit	100 %	377,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	362,585,000
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	0 Unit 15 unit	100 %	50,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	49,477,365
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya yang Dipelihara/Direhabillitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP WTP	0 Unit 110 unit	100 %	83,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP WTP	97,293,420
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**1,509,551,350**					**2,118,200,786**
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**855,675,000**					**1,136,875,500**
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	120 Dokumen 0 Dokumen	100 %	65,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	134,619,450
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	120 Dokumen	100 %	65,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	100,915,500
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	280 Dokumen	100 %	145,343,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	123,466,350
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	0 Dokumen 400 Dokumen	100 %	138,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	181,287,750
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	0 Dokumen 100 Dokumen	100 %	366,879,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	521,586,450
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	5 Dokumen	100 %	73,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	75,000,000
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**272,165,750**					**406,973,700**
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Penyerapan Anggaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	51 Dokumen	100 %	21,855,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan	100 %	32,894,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
												Pemerintah Daerah		
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Anggaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	24 Dokumen	100 %	20,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	31,029,600
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Penyerapan Anggaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	8 Laporan	100 %	168,185,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	252,980,700
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Penyerapan Anggaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	8 Dokumen	100 %	46,667,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	69,218,100
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penyerapan Anggaran	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	40 Dokumen	100 %	14,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	20,850,900
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**381,710,600**					**574,351,586**
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	11 Laporan	1 WTP	182,176,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	259,824,086
5 02 02 2.03 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	24 Dokumen	1 WTP	119,672,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	194,344,500
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	110 Orang	1 WTP	79,862,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	120,183,000
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**992,201,000**					**1,304,083,050**
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**992,201,000**					**1,304,083,050**
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	3 Laporan	100 %	181,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	53,533,200
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	48 Laporan	100 %	61,616,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	92,712,900
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Laporan	100 %	373,878,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	428,995,350
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	0 Laporan 25 Laporan	100 %	53,812,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	80,969,700
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	25 Dokumen	100 %	44,498,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	66,956,400
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	48 Laporan	100 %	175,163,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	263,564,700
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	50 Orang	100 %	101,251,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisir	100 %	152,350,800
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**403,460,200**					**569,548,350**
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**403,460,200**					**569,548,350**
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	6.44 %	1 Dokumen	6.44 %	192,484,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	289,625,700
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	6.44 %	3 Dokumen	6.44 %	32,065,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	29,646,750

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	6.44 %	1 Laporan	6.44 %	133,305,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	200,581,500
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	6.44 %	1000 Dokumen	6.44 %	14,335,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	21,570,150
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	6.44 %	4 Dokumen	6.44 %	21,976,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	20,294,400
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah		6.44 %	0 Dokumen	6.44 %	9,292,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	6.44 %	7,829,850
								TOTAL	**33,913,429,374**					**37,594,023,447**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**02**				**KEUANGAN**								**388,420,164,520**					**417,717,381,930**
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**388,420,164,520**					**417,717,381,930**
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**388,420,164,520**					**417,717,381,930**
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Penyaluran Dana Pekon	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Laporan	100 %	31,433,018,398	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	26,000,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Penyaluran Dana Pekon	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Laporan	100 %	15,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	11,000,000,000
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Dana Pekon	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1 Laporan	100 %	341,987,146,122	Dana Desa		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	380,717,381,930
												TOTAL	**388,420,164,520**					**417,717,381,930**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**5,289,890,365**					**6,980,659,342**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**4,577,809,765**					**4,970,619,542**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,995,200**					**23,054,600**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	5 Dokumen	85 %	13,554,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	17,054,600
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	85 %	210,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	960,000
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	85 %	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,020,000
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	85 %	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,170,000
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	85 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,320,000
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Laporan	85 %	960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	960,000
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Laporan	85 %	570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	570,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,816,228,515**					**3,839,968,282**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	31 Orang/bulan	85 %	3,259,108,515	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,259,108,282
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu		WTP	25 Orang	85 %	485,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	485,400,000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	85 %	70,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	94,440,000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Laporan	85 %	1,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,020,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**295,390,250**					**491,859,660**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	85 %	12,765,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,395,600
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	85 %	4,064,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	29,065,060
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Paket	85 %	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	37,330,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	15 Paket	85 %	49,097,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	55,078,850
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	15 Paket	85 %	46,152,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	57,731,500
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	900 Laporan	85 %	155,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	299,258,650
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**226,707,000**					**262,862,000**
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	Laporan	85 %	2,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		4,050,000
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	[illegible]	[illegible] dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	85 %	188,597,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		202,677,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	[illegible]	dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	85 %	35,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		56,135,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**221,488,800**					**251,175,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	7 Unit	85 %	39,038,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	44,670,000
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Kampung Baru	WTP	6 Unit	85 %	145,690,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	137,400,000
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Unit	85 %	16,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	27,530,000
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Unit	85 %	20,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	41,575,000
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**712,080,600**					**2,010,039,800**
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**353,425,100**					**999,570,500**
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	100 Dokumen	90 %	277,228,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	881,460,000
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	5700 Dokumen	90 %	16,950,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	16,950,000
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	146 Dokumen	90 %	16,086,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	41,774,000
5 03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2000 Laporan	90 %	43,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	59,386,500
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**								**224,284,600**					**949,209,300**
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Dokumen	90 %	6,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	6,700,000
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	1300 Dokumen	90 %	14,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	33,800,000
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Dokumen	90 %	203,294,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	908,709,300
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**134,370,900**					**61,260,000**
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	600 Dokumen	95 %	52,070,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	61,260,000
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	9 Orang	95 %	82,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	100 %	0
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**150,165,800**					**476,529,100**
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**150,165,800**					**476,529,100**
5 04 02 2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**50,654,800**					**0**
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru		5 Orang		50,654,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
5 04 02 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**								**99,511,000**					**476,529,100**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	2 Laporan	95 %	99,511,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kepegawaian yang berperidikat Memuaskan	100 %	476,529,100
								TOTAL	**5,440,056,165**					**7,457,188,442**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**													
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**								**571,937,374**					**636,459,860**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**528,216,624**					**558,150,360**
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,826,900**					**5,543,600**
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3 Dokumen	100 %	700,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	670,200
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	100 %	1,532,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,732,900
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	100 %	510,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	710,600
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	100 %	561,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	661,900
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Dokumen	100 %	504,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	584,600
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Laporan	100 %	443,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	490,400
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3 Laporan	100 %	573,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	693,000
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**396,186,924**					**398,897,640**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	4 Orang/bulan	100 %	257,454,124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	257,454,040
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	98,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	99,000,000
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	40,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	40,090,000
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Laporan	100 %	382,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,353,600
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,418,300**					**72,375,120**
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	3 Paket	100 %	3,502,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,555,120
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	96 Paket	100 %	4,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,430,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Paket	100 %	8,206,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,540,000
5	03	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Paket	100 %	5,459,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,540,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	22 Laporan	100 %	28,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	49,310,000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,274,500**					**42,724,000**
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	11,470,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	13,450,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatkannya Sistem Pelaporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Laporan	100 %	27,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		29,274,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**37,510,000**					**38,610,000**
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Sistem Pelaporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	100 %	34,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		35,170,000
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		3,440,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**43,720,750**					**78,309,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**								**43,720,750**					**78,309,500**
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	85 %	90 Orang	100 %	43,720,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PNS yang capaian Kinerjanya Berpredikat Baik	85 %	78,309,500
								TOTAL	**571,937,374**					**636,459,860**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**													
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**								**13,573,668,286**					**15,465,024,087**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**11,662,456,886**					**13,098,373,647**
6	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**39,454,900**					**51,910,750**
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Dokumen	100 %	24,013,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	34,013,200
6	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	29 Dokumen	100 %	5,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,637,000
6	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	29 Dokumen	100 %	5,637,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,637,000
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	29 Dokumen	100 %	888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	988,000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	29 Dokumen	100 %	888,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	988,000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	10 Laporan	100 %	833,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	933,200
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	100 %	1,558,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,714,350
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**10,128,740,486**					**11,028,312,906**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	56 Orang/bulan	100 %	9,694,356,686	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,663,792,288
6	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	319,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	351,978,000
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Dokumen	100 %	114,403,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	12,542,618
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**463,985,000**					**510,801,500**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase laporan administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	56 Orang	85 %	463,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	510,801,500
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**352,346,500**					**764,045,491**
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	26 Paket	85 %	27,462,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	419,344,321
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1000 Paket	85 %	73,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	80,899,500
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	120 Paket	85 %	30,147,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	33,159,280
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	700 Paket	85 %	50,224,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	57,164,360
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	60 Laporan	85 %	170,967,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	173,478,030
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**251,360,000**					**276,485,000**
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	12 Laporan	85 %	240,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	264,145,200
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Laporan	85 %	11,218,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		12,339,800
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**426,570,000**					**466,818,000**
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	1 Unit	85 %	74,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		82,137,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	6 Unit	85 %	262,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	287,782,000
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	20 Unit	85 %	37,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	39,622,000
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	2 Unit	85 %	44,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	49,467,000
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP	24 Unit	85 %	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,810,000
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**1,415,556,400**					**1,821,429,940**
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**1,064,156,400**					**1,502,842,000**
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan sesuai dengan PKPT	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	12 Laporan	80 %	438,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	48 %	549,032,000
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan sesuai dengan PKPT	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	48 %	15 Laporan	80 %	150,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	48 %	165,990,000
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan sesuai dengan PKPT	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	15 Laporan	80 %	254,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	48 %	390,720,000
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Pengawasan Internal yang dilakukan sesuai dengan PKPT	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	20 Dokumen	80 %	220,736,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	48 %	397,100,000
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**351,400,000**					**318,587,940**
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaran dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti sesuai SOP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	48 %	65 Laporan	80 %	351,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Nilai Maturitas Sistem Pengawasan Internal Perangkat Daerah Level 3	48 %	318,587,940
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**495,655,000**					**545,220,500**
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**								**495,655,000**					**545,220,500**
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder)	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pendampingan dan asistensi yang sesuai dengan SOP	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	78 %	10 Kegiatan	80 %	495,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (Stakeholder)	78 %	545,220,500
								TOTAL	**13,573,668,286**					**15,465,024,087**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**5,176,979,324**					**5,465,511,508**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**5,092,049,324**					**5,231,249,908**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,000,100**					**20,540,100**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	30 Dokumen	100 %	14,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,970,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	20 Dokumen	100 %	2,321,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,321,700
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,196,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,196,700
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		WTP 1	15 Dokumen	100 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	750,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	15 Dokumen	100 %	761,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	761,700
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,520,938,169**					**4,521,748,169**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	27 Orang/bulan	100 %	2,599,818,169	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,599,818,169
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	85 Dokumen	100 %	1,835,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,835,700,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP 1	17 Dokumen	100 %	85,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	85,420,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**21,900,000**					**29,100,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	120 Paket	100 %	21,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	29,100,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**39,675,200**					**103,442,800**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	2 Paket	100 %	8,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	40,500,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	500 Paket	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	16,200,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	16 Paket	100 %	6,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	18,379,700
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	514 Paket	100 %	18,943,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	25,363,100
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP 1	20 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**84,860,255**					**115,060,239**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Laporan	100 %	43,290,255	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	61,290,239
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	14 Laporan	100 %	41,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	53,770,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**404,675,600**					**441,358,600**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Unit	100 %	367,875,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	399,025,600
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	WTP 1	12 Unit	100 %	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1	8,360,000
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan				1	Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1	33,973,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**17,160,000**					**28,756,600**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**17,160,000**					**28,756,600**
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kelurahan	100 %	16 Dokumen	100 %	17,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	100 %	28,756,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**36,325,000**					**139,565,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**36,325,000**					**139,565,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Semua Kelurahan	100 %		100 %	36,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	60,125,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**15,000,000**					**35,520,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**15,000,000**					**35,520,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketertiban,Ketentr aman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	100 %	12 Laporan	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	100 %	35,520,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**16,445,000**					**23,985,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**16,445,000**					**23,985,000**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian	100 %	1 Dokumen	100 %	6,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	8,775,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Negeri Ratu Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pananggungan Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terdana Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kelungu Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pardasuka Kab. Tanggamus, Kota Agung, Teratas Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kusa Kab. Tanggamus, Kota Agung, Terbaya Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kedamaian Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Agung Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kota Batu Kab. Tanggamus, Kota Agung, Campang Tiga Kab. Tanggamus, Kota Agung, Benteng Jaya	100 %	13 Dokumen	100 %	9,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	15,210,000
												TOTAL	**5,176,979,324**					**5,465,511,508**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Baros

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**503,694,100**					**368,263,708**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**86,150,000**					**83,463,900**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**31,920,000**					**31,920,000**
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP `1	12 kali	100 %	31,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP `1	31,920,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,700,000**					**3,700,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	8 stel	100 %	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,700,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**20,470,000**					**17,783,900**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	6 unit	100 %	10,081,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	6,178,400
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah barang cetak dan penggandaan untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	20 eksemplar	100 %	3,286,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	4,503,200
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	342 buah	100 %	7,102,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	7,102,300
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,560,000**					**7,560,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	12 kali	100 %	7,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	7,560,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,500,000**					**22,500,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	2 unit	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	9,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	WTP 1	1 Unit	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	13,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**355,144,100**					**222,399,808**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**355,144,100**					**222,399,808**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros		3 Unit		271,841,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				111,199,904
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros		4 Pokmas / Ormas		83,302,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				111,199,904
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**62,400,000**					**62,400,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**62,400,000**					**62,400,000**
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Baros	100 %	13 Orang	100 %	62,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	62,400,000
												TOTAL	**503,694,100**					**368,263,708**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Pasar Madang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**533,761,509**					**781,687,750**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**109,127,209**					**105,209,850**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**31,920,000**					**31,920,000**
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP 1	3 Dokumen	100 %	31,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	31,920,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,700,000**					**3,700,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1	8 Paket	100 %	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,700,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**13,563,200**					**15,695,850**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1`	1 Paket	100 %	1,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1`	4,234,400
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1`	20 Paket	100 %	5,073,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1`	4,353,500
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1`	342 Paket	100 %	7,364,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1`	7,107,950
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**29,000,000**					**20,900,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1	4 Unit	100 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	8,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1	3 Unit	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	12,900,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,920,009**					**7,920,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	100 %	12 Laporan	100 %	7,920,009	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100 %	7,920,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,024,000**					**25,074,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1	2 Unit	100 %	8,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	10,950,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	WTP 1	1 Unit	100 %	14,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,124,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**323,834,300**					**575,677,900**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**323,834,300**					**575,677,900**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	100 %	4 Unit	100 %	211,634,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	460,677,900
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Kelurahan		100 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	112,199,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	115,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**100,800,000**					**100,800,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**100,800,000**					**100,800,000**
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Pasar Madang	100 %	12 Dokumen	100 %	100,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100,800,000
												TOTAL	**533,761,509**					**781,687,750**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kota Agung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Kuripan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**567,586,740**					**624,887,364**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**94,959,590**					**109,149,960**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**31,920,000**					**31,920,000**
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah penatausahaan dan penguji/verivikasi keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	12 Kali	100 %	31,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	31,920,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**3,700,000**					**3,700,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	8 stel	100 %	3,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,700,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**16,729,590**					**16,719,960**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	0 Paket 5 unit	100 %	4,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	4,376,500
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah barang cetak dan penggandaan untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	20 eksemplarr	100 %	4,621,790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	4,611,660
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya untuk keperluan rutin kantor	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	265 buah	100 %	7,735,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	7,731,800
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,300,000**					**25,500,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	3 unit	100 %	11,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,700,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,460,000**					**8,460,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	jumlah penyedia jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	12 kali	100 %	8,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	8,460,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**22,850,000**					**22,850,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	6 u	100 %	9,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	9,350,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara dengan baik	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	WTP 1	1 unit	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	13,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**328,627,150**					**371,737,404**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**328,627,150**					**371,737,404**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	100 %	3 unit	100 %	239,336,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	360,537,600
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	100 %	4 kali	100 %	89,290,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	11,199,804
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**144,000,000**					**144,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**144,000,000**					**144,000,000**
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilita Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung, Kuripan	100 %	30 orang	100 %	144,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	144,000,000
												TOTAL	**567,586,740**					**624,887,364**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wonosobo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wonosobo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,123,032,651**					**2,237,449,020**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,980,638,551**					**2,057,693,220**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,627,900**					**7,367,900**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Wonosobo	wtp %	10 Dokumen	10 Dokumen	8,407,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,367,900
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Dokumen	10 Dokumen	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Dokumen	10 Dokumen	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Dokumen	10 Dokumen	710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Dokumen	10 Dokumen	710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Laporan	10 Dokumen	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Laporan	10 Dokumen	950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,771,525,751**					**1,784,325,320**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	16 Orang/bulan	14 Orang/Bulan	1,395,495,751	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,395,495,320
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	15 Dokumen	14 Orang/Bulan	328,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	328,830,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	6 Dokumen	14 Orang/Bulan	47,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**32,827,400**					**52,000,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	10 Paket	10 Paket	7,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	14,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	2 Paket	10 Paket	12,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	20,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	30 Eksamplar	10 Paket	4,398,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	50 Paket	10 Paket	6,744,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	9,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	50 Kali	10 Paket	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	4,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,710,500**					**58,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	12 Laporan	12 Laporan	32,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	33,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	2 Laporan	12 Laporan	20,731,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108,947,000**					**156,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	wtp %	3 Unit	3 Unit	86,171,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	94,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan				%	Unit	Unit				Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	%	62,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wonosobo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Wonosobo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**75,270,600**					**109,755,800**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**65,294,800**					**95,000,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Semua Kelurahan	100 %		20 Laporan	56,969,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	80,000,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Semua Kelurahan	100 %	10 Dokumen	20 Laporan	8,325,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	15,000,000
7 01 03 2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**								**9,975,800**					**14,755,800**
7 01 03 2.06 07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Kab. Tanggamus, Wonosobo, Semua Kelurahan		25 Keluarga		9,975,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,755,800
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**46,814,400**					**29,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**46,814,400**					**29,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Persentase Penurunan Gangguan Keamanan"	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	100 %	12 Laporan	22 Laporan	46,814,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	29,000,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**20,309,100**					**41,000,000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**20,309,100**					**41,000,000**
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	7,820,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	21,000,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Wonosobo, Tanjung Kurung	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	12,488,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	20,000,000
								TOTAL	**2,123,032,651**					**2,237,449,020**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Talangpadang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Talangpadang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,601,261,371**					**2,707,866,735**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,481,034,721**					**2,480,110,785**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,025,000**					**17,025,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Dokumen	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	7,500,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,500,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,500,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Laporan	100 %	2,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,025,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,184,587,421**					**2,184,587,385**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	18 Orang/bulan	100 %	1,669,887,421	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,669,887,385
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	22 Dokumen	100 %	438,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	438,600,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	6 Dokumen	100 %	76,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	76,100,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38,920,900**					**37,997,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	10 Paket	100 %	14,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,614,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	5860 Paket	100 %	9,252,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	9,252,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	456 Paket	100 %	15,054,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,131,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64,943,000**					**64,943,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	ersentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	12 Laporan	100 %	39,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	39,138,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	ersentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	1 Laporan	100 %	25,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	25,805,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**175,558,400**					**175,558,400**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	1 Unit	100 %	37,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	37,670,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	WTP 1	4 Unit	100 %	137,888,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	137,888,400
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**50,626,650**					**88,902,800**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**50,626,650**				100 %	**88,902,800**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat daam Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			%	Lembaga	100 %	50,626,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		67,209,400

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Talangpadang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Talangpadang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**56,100,000**					**35,100,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**56,100,000**					**35,100,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketertiban,Ketentr aman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	100 %	12 Laporan	100 %	56,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penurunan Angka Kriminalitas	100 %	35,100,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**13,500,000**					**58,026,900**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**13,500,000**					**58,026,900**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Talang Padang, Talang Padang	100 %	20 Dokumen	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	41,680,200
								TOTAL	**2,601,261,371**					**2,707,866,735**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pulau Panggung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pulau Panggung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,812,028,797**					**1,871,800,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,731,391,247**					**1,789,450,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**22,560,000**					**22,500,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	16,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	17,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,100,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,100,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,100,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,100,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Laporan	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,100,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Laporan	100 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,565,532,947**					**1,600,450,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	12 Orang/bulan	100 Persen	1,280,584,747	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,300,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	12 Dokumen	100 Persen	217,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	225,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Dokumen	100 Persen	66,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	74,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Laporan	100 Persen	1,428,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,450,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**16,197,300**					**23,200,000**
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Peresentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	500 Paket	100 Persen	6,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,100,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Peresentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	10 Paket	100 Persen	3,042,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,100,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Peresentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	22 Paket	100 Persen	7,125,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**68,753,000**					**83,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	12 Laporan	100 Persen	34,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	35,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	3 Laporan	100 Persen	7,105,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	18,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	2 Laporan	100 Persen	26,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	30,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58,348,000**					**60,300,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	1 Unit	100 Persen	44,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		46,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pulau Panggung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pulau Panggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	2 Unit	100 Persen	8,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,800,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	WTP	2 Unit	100 Persen	5,478,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,500,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**32,735,050**					**33,800,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**32,735,050**					**33,800,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	100 Persen	10 Lembaga	100 Persen	29,022,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	100 Persen	30,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	3,712,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	100 Persen	3,800,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**45,000,000**					**45,500,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**45,000,000**					**45,500,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketertiban,Ketentraman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	100 Persen	45,500,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**2,902,500**					**3,050,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**2,902,500**					**3,050,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	100 Persen	50 Orang	100 Persen	2,002,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100 Persen	2,100,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Pulau Panggung, Tekad	100 Persen	30 Orang	100 Persen	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100 Persen	950,000
								TOTAL	**1,812,028,797**					**1,871,800,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pugung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pugung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,911,504,258**					**1,634,358,159**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,799,106,658**					**1,502,492,469**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,177,400**					**15,977,400**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	5 Dokumen	100 %	8,283,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	13,083,100
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	5 Dokumen	100 %	325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	325,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	2 Dokumen	100 %	325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	325,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	2 Dokumen	100 %	310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	310,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	2 Dokumen	100 %	471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	471,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	2 Laporan	100 %	280,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	280,600
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	2 Laporan	100 %	1,182,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	1,182,700
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,697,622,664**					**1,340,205,169**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	14 Bulan	100 %	1,449,012,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	1,093,992,569
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	10 Dokumen	100 %	182,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	182,760,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	12 Dokumen	100 %	65,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	63,452,600
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**12,851,394**					**24,476,410**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	1 Paket	100 %	1,654,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	1,654,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	150 kotak	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	7,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	12 Kali	100 %	2,699,560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	6,553,500
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	300 Buah	100 %	2,497,834	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	6,268,910
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	7 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**38,500,000**					**50,458,490**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	12 Kali	12 Kali	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	28,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	0 WTP	12 Kali	12 Kali	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	0 WTP	21,958,490
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**38,955,200**					**71,375,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	WTP 1 0	2 Unit	100 %	37,735,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	WTP 1 0	43,970,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	WTP 1 0	3 Unit	100 %	1,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Keuangan	WTP 1 0	5,590,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pugung
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Pugung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**13,030,000**					**25,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**2,700,000**					**5,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	90 %	2 Kali	90 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	90 %	5,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**10,330,000**					**20,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pencapaian SPM di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	90 %	6 Exsempalr	90 %	6,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	90 %	15,000,000
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pencapaian SPM di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	90 %	2 Kali	90 %	3,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	90 %	5,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**40,050,000**					**43,352,390**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**40,050,000**					**43,352,390**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	100 %	28 Kali	100 %	40,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	43,352,390
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**49,482,600**					**34,482,600**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**49,482,600**					**34,482,600**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat di Selesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarak	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	70 %	12 Kali	70 %	49,482,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat di Selesaikan	70 %	34,482,600
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**8,200,000**					**9,155,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8,200,000**					**9,155,000**
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	100 %	3 Orang	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,915,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	100 %	3 Orang	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,240,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**1,635,000**					**19,875,700**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**1,635,000**					**19,875,700**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	100 %	3 Kali	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	9,875,700
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pugung, Rantau Tijang	100 %	3 Dokumen	100 %	735,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	10,000,000
												TOTAL	**1,911,504,258**					**1,634,358,159**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cukuh Balak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cukuh Balak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,412,116,725**					**1,482,311,596**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,338,588,475**					**1,416,463,569**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,515,700**					**12,077,500**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	3 Dokumen	100 %	7,372,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	8,934,500
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	10 Dokumen	100 %	828,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	828,500
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu		0 WTP	10 Dokumen	100 %	796,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	796,600
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	10 Dokumen	100 %	707,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	707,900
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	10 Dokumen	100 %	270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	270,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	10 Laporan	100 %	270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	270,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	10 Laporan	100 %	270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	270,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,219,400,383**					**1,219,400,358**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	11 Orang/bulan	100 %	1,039,760,383	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	1,039,760,358
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Semua Kelurahan	0 WTP	12 Dokumen	100 %	127,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	127,800,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	12 Dokumen	100 %	51,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	51,840,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**12,357,300**					**48,120,522**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	4 Paket	100 %	2,998,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	33,749,722
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	2 Paket	100 %	1,314,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	1,876,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	2 Paket	100 %	6,544,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	9,494,800
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik		0 WTP	20 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,709,092**					**52,709,092**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	2 Laporan	100 %	30,709,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	30,709,092
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	3 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	22,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,606,000**					**74,156,097**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	1 Unit	100 %	37,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	37,670,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	0 WTP	3 Unit	100 %	17,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	0 WTP	17,936,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**27,328,250**					**30,748,027**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27,328,250**					**30,748,027**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cukuh Balak
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Cukuh Balak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	27,328,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	30,748,027
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**46,200,000**					**35,100,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**46,200,000**					**35,100,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	Kab. Tanggamus, Cukuh Balak, Putih Doh	100 %	12 Laporan	100 %	46,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	35,100,000
								TOTAL	**1,412,116,725**					**1,482,311,596**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Semaka
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Semaka

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,814,094,496**					**1,901,751,996**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,734,608,696**					**1,769,410,396**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,129,600**					**13,129,600**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	5 Dokumen	100 %	1,324,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,324,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Dokumen	100 %	807,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	807,900
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Dokumen	100 %	1,430,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,430,400
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Dokumen	100 %	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,450,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Dokumen	100 %	1,215,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,215,500
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Laporan	100 %	1,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,259,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	5 Laporan	100 %	5,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,642,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,502,396,756**					**1,502,396,756**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	13 Orang/bulan	100 %	1,143,596,756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,143,596,756
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Persentase Administrasi Umum yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	21 orang	100 %	358,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	358,800,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**18,058,740**					**26,283,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	10 Paket	100 %	5,482,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,467,500
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	200 Paket	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,800,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	10 Paket	100 %	3,725,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,718,800
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	10 Paket	100 %	1,950,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,296,700
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik		WTP	7 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**91,440,000**					**96,720,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	12 Laporan	100 %	24,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	30,180,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Urusan Pemerintah daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	10 Laporan	100 %	66,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	66,540,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**98,230,000**					**111,881,040**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	4 Unit	100 %	55,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	60,900,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	WTP	2 Unit	100 %	42,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,981,040
7	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**								**11,353,600**					**11,000,000**
7	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				Dokumen	100 %	11,353,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		11,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**38,834,600**					**51,329,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**37,329,000**					**42,329,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Semaka
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Semaka

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	100 %	22 Lembaga	100 %	37,329,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	37,329,000
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**								**1,505,600**					**9,000,000**
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	100 %	2 Pokmas / Ormas	100 %	1,505,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	9,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**34,875,000**					**35,100,000**
7 01 04 7.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**34,875,000**					**35,100,000**
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	100 %	12 Laporan	100 %	34,875,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	35,100,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**980,000**					**3,000,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**980,000**					**3,000,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	100 %	3 Orang	100 %	980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	3,000,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**4,796,200**					**25,979,600**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**4,796,200**					**25,979,600**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Semaka, Sukaraja	100 %	5 Dokumen	100 %	4,796,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	10,603,600
								TOTAL	**1,814,094,496**					**1,901,751,996**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pematang Sawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pematang Sawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,530,135,394**					**1,696,796,198**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,412,838,494**					**1,531,904,862**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,400,200**					**13,220,800**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Dokumen	100 %	2,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,986,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Dokumen	100 %	1,116,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,987,500
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Dokumen	100 %	1,041,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,112,700
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Dokumen	100 %	516,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	568,100
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Laporan	100 %	2,166,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,286,500
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	10 Laporan	100 %	710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	780,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,247,911,013**					**1,282,820,019**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	8 Orang/bulan	100 %	1,007,911,013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,018,780,019
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peresentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	11 Dokumen	100 %	193,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	215,840,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peresentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	6 Dokumen	100 %	46,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	48,200,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**48,060,630**					**57,842,300**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	2 Paket	100 %	17,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	16,860,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	600 Paket	100 %	19,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	29,800,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	12 Paket	100 %	4,312,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,811,500
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	888 Paket	100 %	6,464,030	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,870,800
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45,297,851**					**46,446,585**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	12 Examplar	100 %	35,551,851	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	37,867,785
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	1 Laporan	100 %	9,746,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,578,800
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**63,168,800**					**131,575,158**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	4 Unit	100 %	46,558,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,785,500
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	WTP	1 Unit	100 %	16,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	80,789,658
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**13,904,300**					**24,781,286**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**6,724,000**					**12,850,786**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			%	Laporan	100 %	6,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	12,850,786

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pematang Sawa
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pematang Sawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**7,180,300**					**11,930,500**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	7,180,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	11,930,500
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**21,846,900**					**53,667,300**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**21,846,900**					**53,667,300**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	14 Lembaga	100 %	17,014,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	39,876,500
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	4,832,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	13,790,800
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**45,781,500**					**36,898,600**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**45,781,500**					**36,898,600**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	45,781,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	36,898,600
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**16,520,000**					**14,487,800**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**16,520,000**					**14,487,800**
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 % 100 %	1 Orang	100 %	16,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 % 100 %	14,487,800
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**19,244,200**					**35,056,350**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**19,244,200**					**35,056,350**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	10,553,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	19,899,500
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Tanggamus, Pematang Sawa, Semua Kelurahan	100 %	14 Dokumen	100 %	8,691,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	15,156,850
												TOTAL	**1,530,135,394**					**1,696,796,198**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sumberejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sumberejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,635,085,797**					**1,635,085,797**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,518,360,447**					**1,518,360,447**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**16,786,300**					**16,786,300**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	12 Dokumen	100 %	14,841,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,841,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	8 Dokumen	100 %	250,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	250,900
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	8 Dokumen	100 %	250,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	250,900
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	5 Dokumen	100 %	340,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	340,900
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	5 Dokumen	100 %	340,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	340,900
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	10 Laporan	100 %	350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	350,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	8 Laporan	100 %	410,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	410,900
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,357,964,397**					**1,357,964,397**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	11 Orang/bulan	100 %	1,192,434,397	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,192,434,397
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	6 Dokumen	100 %	111,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	111,600,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	5 Dokumen	100 %	53,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	53,930,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**38,595,750**					**38,595,750**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	15 Paket	100 %	16,765,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	16,765,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	100 Paket	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,600,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	20 Paket	100 %	1,729,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,729,250
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	100 Paket	100 %	5,401,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,401,500
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	79 Laporan	100 %	11,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	11,100,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,754,000**					**51,754,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	12 Laporan	100 %	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	12 Laporan	100 %	41,254,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	41,254,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,260,000**					**53,260,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	3 Unit	100 %	43,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	43,870,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				Unit	%				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		1,380,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sumberejo
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Sumberejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disusun dengan baik	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	WTP	1 Unit	100 %	8,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,010,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**16,414,000**					**16,414,000**
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**2,304,000**					**2,304,000**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 % 100 %	5 Laporan	100 %	2,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 % 100 %	2,304,000
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**14,110,000**					**14,110,000**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 100	5 Laporan	100 %	14,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 100	14,110,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**30,647,050**					**30,647,050**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**30,647,050**					**30,647,050**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	0 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	25,369,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	25,369,300
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	5 Laporan	100 %	5,277,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	5,277,750
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**55,402,500**					**55,402,500**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**55,402,500**					**55,402,500**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	12 Laporan	100 %	55,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	55,402,500
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**4,415,000**					**4,415,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**4,415,000**					**4,415,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	1 Orang	100 %	3,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	3,050,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	1 Orang	100 %	1,365,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	1,365,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**9,846,800**					**9,846,800**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**9,846,800**					**9,846,800**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	13 Dokumen	100 %	6,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	6,550,000
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Sumber Rejo, Margoyoso	100 %	13 Dokumen	100 %	3,296,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	3,296,800
								TOTAL	**1,635,085,797**					**1,635,085,797**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ulu Belu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ulu Belu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,428,596,193**					**1,525,750,979**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,314,795,193**					**1,367,829,969**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**9,501,300**					**13,839,885**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	12 Dokumen	100 persen	1,616,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,696,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	0 Dokumen 12 Dokumen	100 persen	1,547,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,756,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	12 Dokumen	100 persen	1,118,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,173,900
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	12 Dokumen	100 persen	868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,698,900
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	6 Dokumen	100 persen	1,278,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,341,900
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	4 Laporan	100 persen	1,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,885,400
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		WTP	4 Laporan	100 persen	1,225,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,286,985
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,215,282,793**					**1,220,693,883**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	11 Orang/Bulan	100 persen	1,050,339,793	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,050,338,733
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	5 Dokumen	100 persen	111,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	111,300,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	6 Dokumen	100 persen	51,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	53,839,800
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP	6 Laporan	100 persen	2,367,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,215,350
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**18,296,300**					**37,533,615**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	4 Paket	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	19,818,750
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	4 Paket	100 persen	3,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	5,355,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	8 Paket	100 persen	4,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	4,362,750
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	6 Paket	100 persen	5,072,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	5,325,915
7	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tercapainya Persentase Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	4 Dokumen	100 persen	2,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	2,671,200
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**20,406,000**					**28,388,346**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	TercapainyaPersentaseOpini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	12 Laporan	100 persen	15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	23,341,500
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	TercapainyaPersentaseOpini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	12 Laporan	100 persen	4,806,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	5,046,846
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,308,800**					**67,374,240**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tercapainya Persentase Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	WTP 0	5 Unit	100 persen	51,308,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 0	53,874,240

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ulu Belu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Ulu Belu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**16,696,000**					**6,095,060**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**3,828,000**					**4,019,400**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Tercapainya Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	100 Persen	6 Laporan	100 persen	3,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 Persen	4,019,400
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**12,868,000**					**2,075,660**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Persentase Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	96 Persen	12 Laporan	96 persen	12,868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	96 Persen	2,075,660
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**38,383,000**					**65,882,760**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**38,383,000**					**65,882,760**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Tercapainya Persentase Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	80 Persen	0 Lembaga Kemasyarakatan 80 Persen	80 persen	27,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	80 Persen	27,060,060
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Persentase Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	80 Persen	16 Laporan	80 persen	11,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	80 Persen	38,822,700
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**43,200,000**					**43,200,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**43,200,000**					**43,200,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Persentase Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	100 Persen	16 Laporan	100 persen	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 Persen	43,200,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**8,920,000**					**22,333,500**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8,920,000**					**22,333,500**
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tercapaianya Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	100 Persen	200 Orang	100 persen	4,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100 Persen	11,991,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tercapaianya Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	100 Persen	50 Orang	100 persen	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	100 Persen	10,342,500
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6,602,000**					**20,409,690**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6,602,000**					**20,409,690**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	97 Persen	16 Dokumen	97 persen	5,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	97 Persen	17,942,190
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	umlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tercapainya Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Ulu Belu, Ngarip	97 Persen	16 Dokumen	97 persen	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	97 Persen	2,467,500
												TOTAL	**1,428,596,193**					**1,525,750,979**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kelumbayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kelumbayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,741,729,145**					**2,056,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,686,641,645**					**1,986,000,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**18,009,900**					**30,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Dokumen	12 BULAN	13,108,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	WTP	10 Dokumen	12 BULAN	951,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,700,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Dokumen	12 BULAN	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,700,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Dokumen	12 BULAN	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,700,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Dokumen	12 BULAN	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,700,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Laporan	12 BULAN	840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,700,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Laporan	12 BULAN	590,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,516,339,418**					**1,650,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	12 Orang/bulan	12 BULAN	1,370,569,418	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	4 Dokumen	12 BULAN	72,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	75,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	12 Dokumen	12 BULAN	73,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	75,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**32,655,000**					**76,000,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	10 Paket	12 BULAN	25,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	500 Paket	12 BULAN	1,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	450 Paket	12 BULAN	1,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	500 Paket	12 BULAN	3,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantorun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	12 Laporan	12 BULAN	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49,595,327**					**25,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	12 Laporan	12 BULAN	49,595,327	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70,042,000**					**205,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	2 Unit	2 BUAH	56,106,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	75,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	WTP	2 Unit	2 BUAH	13,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**1,387,500**					**7,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**1,387,500**					**3,500,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	97 %	4 Laporan	4 KALI	1,387,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	97 %	3,500,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kelumbayan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kelumbayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**7,132,500**					**12,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**7,132,500**					**12,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Unsur Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	85 %	10 Lembaga	8 KALI	7,132,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	85 %	12,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**36,000,000**					**35,000,000**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**36,000,000**					**35,000,000**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dengan Uspika di Wilayah Kecamatan	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	100 % 100 %	12 Laporan	12 KALI	36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	100 % 100 %	35,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**8,392,500**					**12,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**8,392,500**					**12,000,000**
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dapat dilaksanakan dengan b aik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	98 %	3 Orang	1 Kali	4,967,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dapat dilaksanakan dengan b aik	98 %	6,000,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dapat dilaksanakan dengan b aik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	98 %	3 Orang	1 Kali	3,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dapat dilaksanakan dengan b aik	98 %	6,000,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**2,175,000**					**4,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**2,175,000**					**4,000,000**
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dabn Pengawasan Pemerintahan Desa yang dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DesaJumlah Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Tanggamus, Klumbayan, Napal	98 %	8 Dokumen	2 Kali	2,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dabn Pengawasan Pemerintahan Desa yang dapat dilaksanakan dengan baik	98 %	4,000,000
												TOTAL	**1,741,729,145**					**2,056,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Gisting
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Gisting

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**2,190,373,753**					**2,401,731,230**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**2,064,025,190**					**2,221,075,330**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,383,400**					**13,383,400**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	WTP 1	20 Dokumen	100 %	3,335,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,335,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	WTP 1	10 Dokumen	100 %	2,781,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,781,600
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	10 Dokumen	100 %	2,316,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	2,316,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,425,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	WTP 1	10 Dokumen	100 %	1,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,425,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	5 Laporan	100 %	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	900,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	4 Laporan	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,700,450,016**					**1,700,650,016**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	11 Orang/bulan	100 %	1,174,894,116	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	1,174,894,116
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	21 Dokumen	100 %	460,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	460,500,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	6 Dokumen	100 %	61,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	61,440,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	10 Laporan	100 %	3,615,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	3,815,900
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**47,537,914**					**95,069,114**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	5 Paket	100 %	11,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	21,415,200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	720 Paket	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	16,500,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	740 Paket	100 %	13,145,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	14,145,400
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	506 Paket	100 %	17,156,514	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	17,501,514
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64,094,460**					**66,283,100**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	12 Laporan	100 %	28,791,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	29,980,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	3 Laporan	100 %	35,303,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	36,303,100
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**238,559,400**					**334,689,700**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	1 Unit	100 %	39,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	40,170,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Gisting
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Gisting

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	5 Unit	100 %	189,424,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	257,352,400
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	15 Unit	100 %	5,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	11,370,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Kuta Dalom	WTP 1	2 Unit	100 %	4,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP 1	25,797,300
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**24,255,563**					**55,355,500**
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**8,005,663**					**25,065,600**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Peningkatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	100 %	8,005,663	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang dapat dilaksanakan dengan baik	100 %	25,065,600
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**16,249,900**					**30,289,900**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang dapat dilaksanakan dengan baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	100 %	16,249,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang dapat dilaksanakan dengan baik	100 %	30,289,900
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**36,614,100**					**37,764,100**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**36,614,100**					**37,764,100**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat Kabupaten	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	10 Lembaga	100 %	17,606,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	18,606,500
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan oleh Masyarakat Hasil Musrenbang Kecamatan yang Disetujui di Tingkat Kabupaten	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	19,007,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	19,157,600
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**28,087,500**					**29,718,600**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**28,087,500**					**29,718,600**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	28,087,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	29,718,600
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**14,982,900**					**17,532,900**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**14,982,900**					**17,532,900**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	100 %	10,701,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	13,251,800
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pengembangan Kegiatan Nilai- Nilai Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	1 Orang	100 %	4,281,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,281,100
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**22,408,500**					**40,284,800**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**22,408,500**					**40,284,800**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	12,595,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	22,372,200
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Gisting, Semua Kelurahan	100 %	9 Dokumen	100 %	9,812,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	17,912,600
								TOTAL	**2,190,373,753**					**2,401,731,230**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kota Agung Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kota Agung Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,666,118,330**					**1,662,372,216**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,578,040,730**					**1,554,536,166**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,934,000**					**11,694,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	7,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	7,350,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	0
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	720,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	532,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Dokumen	100 %	532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	532,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Laporan	100 %	675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	1,350,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokemen Perencanaan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan		100 % 100 %	20 Laporan	100 %	650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokemen Perencanaan	100 % 100 %	1,210,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,445,532,830**					**1,410,151,366**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu		100 % 100 % 100 %	12 Orang/bulan	100 %	1,189,722,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 % 100 % 100 %	1,213,231,366
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu		100 % 100 % 100 %	11 Dokumen	100 %	193,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 % 100 % 100 %	196,920,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu		100 % 100 % 100 %	0 Dokumen	100 %	62,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 % 100 % 100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**25,443,900**					**25,260,800**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	100 Paket	100 %	1,395,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	1,510,800
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	1000 Paket	100 %	3,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	6,750,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	1000 Paket	100 %	1,679,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	30 Dokumen	100 %	11,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	17,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kota Agung Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kota Agung Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	0 Paket	100 %	5,593,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP WTP	0 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	WTP WTP	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,440,000**					**43,940,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kagungan	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	11,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	11,940,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 %	32,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56,690,000**					**63,490,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP	3 Unit	100 %	41,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	47,870,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		WTP	1 Unit	100 %	15,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,620,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,609,800**					**25,064,250**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**615,900**					**1,429,050**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100 %	12 Laporan	100 %	615,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	1,429,050
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**7,993,900**					**23,635,200**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik		Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik		100 %		100 %	5,972,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik	100 %	17,732,600
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik		100 %	12 Laporan	100 %	2,021,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Dan Pelayanan Publik	100 %	5,902,600
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**20,511,500**					**26,259,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**20,511,500**					**26,259,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Laporan Kegiatan Musrenbang		Persentase Laporan Kegiatan Musrenbang		100 %		100 %	20,511,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kegiatan Musrenbang	100 %	26,259,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**49,245,000**					**34,578,900**
7	**01**	**04**	**7.03**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**49,245,000**					**34,578,900**
7	01	04	7.03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Koordinasi kemanan di wilyah kecamtan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Koordinasi kemanan di wilyah kecamtan		100 %	12 Laporan	100 %	49,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Koordinasi kemanan di wilyah kecamtan	100 %	34,578,900
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**3,425,000**					**12,815,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**3,425,000**					**12,815,000**
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	17 Orang	100 %	1,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	6,145,000
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	17 Orang	100 %	1,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	6,670,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6,286,300**					**9,118,900**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6,286,300**					**9,118,900**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	12 Dokumen	100 %	6,286,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	9,118,900
												TOTAL	**1,666,118,330**					**1,662,372,216**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kota Agung Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kota Agung Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,693,794,493**					**1,784,209,785**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,538,528,693**					**1,618,643,685**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,884,800**					**21,005,800**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Dokumen	100 %	15,625,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	15,746,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Dokumen	100 %	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	2,100,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Dokumen	100 %	975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	975,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Dokumen	100 %	474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	474,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Dokumen	100 %	474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	474,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Laporan	100 %	462,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	462,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Laporan	100 %	774,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	774,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,404,541,255**					**1,401,678,255**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	12 Orang/bulan	100 %	1,104,012,855	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,104,012,855
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	13 Dokumen	100 %	234,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	234,420,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	12 Dokumen	100 %	65,347,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	62,484,600
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	5 Laporan	100 %	760,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	760,800
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**18,680,800**					**18,383,462**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	5 Paket	100 %	1,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	559,762
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	120 Paket	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	5,400,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	30 Paket	100 %	1,929,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	1,929,700
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	14 Paket	100 %	7,986,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	7,494,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	10 Laporan	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,451,838**					**53,798,668**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	12 Laporan	100 %	28,546,838	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	29,268,668
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	1 Laporan	100 %	15,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	24,530,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49,970,000**					**123,777,500**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kota Agung Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Kota Agung Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	3 Unit	100 %	43,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	43,070,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	1 WTP	8 Unit	100 %	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	1 WTP	6,900,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**11,706,700**					**10,000,000**
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**11,706,700**					**10,000,000**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	97 %	12 Laporan	100 %	5,017,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	97 %	5,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		97 %	5 Dokumen	100 %	6,689,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan	97 %	5,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**68,205,300**					**80,549,600**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**68,205,300**					**80,549,600**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	85 %	18 Lembaga	100 %	59,293,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	85 %	76,034,700
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	85 %	3 Laporan	100 %	8,911,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	85 %	4,514,900
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**33,934,000**					**35,338,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**33,934,000**					**35,338,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketertiban,Ketentr aman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	100 %	12 Laporan	100 %	33,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	100 %	35,338,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**13,782,500**					**14,907,500**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**13,782,500**					**14,907,500**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	100 %	10 Orang	100 %	8,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	8,990,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	100 %	1 Orang	100 %	5,467,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	5,917,500
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**27,637,300**					**24,771,000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**27,637,300**					**24,771,000**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	98 %	2 Dokumen	100 %	7,199,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 %	8,618,400
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Tanggamus, Kota Agung Barat, Negara Batin	98 %	2 Dokumen	100 %	20,437,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 %	16,152,600
								TOTAL	**1,693,794,493**					**1,784,209,785**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Gunung Alip
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Gunung Alip

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,741,014,928**					**1,597,966,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,677,452,928**					**1,501,966,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**15,062,200**					**29,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"		WTP %	10 Dokumen	10 Dokumen	12,866,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	17,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 DOKUMEN	10 Dokumen	280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 DOKUMEN	10 Dokumen	321,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 Dokumen	10 Dokumen	585,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 Dokumen	10 Dokumen	324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 Laporan	10 Dokumen	344,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 Laporan	10 Dokumen	340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,553,038,128**					**1,297,800,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	wtp %	14 Orang/bulan	14 Orang/Bulan	1,343,578,128	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	1,010,500,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	wtp %	9 Dokumen	14 Orang/Bulan	164,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	215,300,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	wtp %	6 Dokumen	14 Orang/Bulan	44,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	70,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		wtp %	10 Laporan	14 Orang/Bulan	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	wtp %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,441,300**					**46,000,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	10 Paket	10 Unit	8,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	15,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	2 Paket	10 Unit	8,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	13,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	30 Paket	10 Unit	2,020,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	5,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	30 Paket	10 Unit	1,789,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	50 Laporan	10 Unit	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	3,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,452,500**					**65,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	12 Laporan	12 Laporan	24,952,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	40,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"		WTP %	2 Laporan	12 Laporan	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	25,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,458,800**					**64,166,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Gunung Alip
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Gunung Alip

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	1 Unit	1 Unit	35,108,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	40,000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	1 Unit	1 Unit	5,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	7,000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	WTP %	1 Unit	1 Unit	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opinin BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP %	17,166,000
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,989,500**					**15,000,000**
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**3,250,000**					**5,000,000**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**5,739,500**					**10,000,000**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	100 %	12 Laporan	12 Laporan	4,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	100 %	12 Laporan	12 Laporan	1,054,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**13,232,500**					**25,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**13,232,500**					**25,000,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan		Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Semua Kelurahan	100 %		12 lembaga	13,232,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	25,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**36,090,000**					**35,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**36,090,000**					**35,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Persentase Penurunan Gangguan Keamanan"	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	100 %	12 Laporan	12 Laporan	36,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	35,000,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**2,925,000**					**12,000,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**2,925,000**					**12,000,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	10 Orang	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	7,000,000
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Banjar Negeri	100 %	5 Orang	10 Orang	675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**2,325,000**					**9,000,000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**2,325,000**					**9,000,000**
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Laporan	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,000,000
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Tanggamus, Gunung Alip, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	12 Laporan	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
								TOTAL	**1,741,014,928**					**1,597,966,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Limau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Limau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,662,117,753**					**1,676,356,166**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,592,364,863**					**1,549,437,766**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,936,300**					**17,883,800**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Dokumen	100 %	14,161,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,161,800
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	4 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	2 Dokumen	100 %	183,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	131,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Laporan	100 %	411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	411,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Laporan	100 %	1,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,180,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,493,009,563**					**1,428,659,563**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Orang/bulan	100 %	1,251,359,563	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,251,359,563
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Pelaksana Tugas ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	9 Orang	100 %	177,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	177,300,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Dokumen	100 %	64,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**15,172,700**					**14,441,900**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Paket	100 %	3,017,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,017,700
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Dokumen	100 %	8,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,640,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	4 Paket	100 %	3,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,784,200
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,487,500**					**29,250,463**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	12 Laporan	100 %	6,487,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	6,750,463
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,758,800**					**59,202,040**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	2 Unit	100 %	43,558,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	39,202,920
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	WTP	2 Unit	100 %	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	14,999,120
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**10,698,200**					**28,148,200**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**10,698,200**					**15,648,200**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	100 %	12 Laporan	100 %	10,698,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	15,648,200
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**17,177,390**					**22,339,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**17,177,390**					**22,339,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	100 %	11 Lembaga	100 %	17,177,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	22,339,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Limau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Limau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**34,482,600**					**34,482,600**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**34,482,600**					**34,482,600**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	100 %	12 Laporan	100 %	34,482,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	34,482,600
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**2,665,000**					**5,265,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**2,665,000**					**5,265,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	100 %	5 Orang	100 %	2,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,265,000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**4,729,700**					**36,683,600**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**4,729,700**					**36,683,600**
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Kecukupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kab. Tanggamus, Limau, Kuripan	100 %	11 Dokumen	100 %	4,729,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	14,629,700
								TOTAL	**1,662,117,753**					**1,676,356,166**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,772,360,212**					**1,851,818,266**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,705,200,212**					**1,749,556,466**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**7,200,000**					**14,314,400**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Dokumen	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	9,064,400
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,617,572,412**					**1,627,170,066**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Orang/bulan	100 %	1,163,372,412	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,163,370,066
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Dokumen	100 %	391,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	391,800,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Dokumen	100 %	62,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	72,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**6,569,000**					**12,699,000**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Paket	100 %	3,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,500,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Paket	100 %	3,551,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,699,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**31,650,000**					**45,150,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Laporan	100 %	31,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	26,650,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,208,800**					**50,223,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disusun Tepat Waktu		WTP	0 Unit	100 %	42,208,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	43,083,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**2,660,000**					**15,786,200**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**2,660,000**					**15,786,200**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				0 Laporan		2,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,786,200
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**27,150,000**					**34,300,600**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**27,150,000**					**34,300,600**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan		27,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				34,300,600
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**30,600,000**					**37,800,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**30,600,000**					**37,800,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan		30,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				37,800,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**6,750,000**					**14,375,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**6,750,000**					**14,375,000**
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen		6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14,375,000
												TOTAL	**1,772,360,212**					**1,851,818,266**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kelumbayan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kelumbayan Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,314,729,415**					**1,622,000,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,201,036,915**					**1,522,000,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**32,100,000**					**32,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	12 Dokumen	5 Dokumen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	5 Dokumen	5 Dokumen	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	5 Dokumen	5 Dokumen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	"Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	5 Dokumen	5 Dokumen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**849,306,273**					**1,340,000,000**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	10 Orang/bulan	10 Orang/Bulan	685,086,273	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,200,000,000
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	5 Dokumen	10 Orang/Bulan	75,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	90,000,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu		WTP	7 Dokumen	10 Orang/Bulan	89,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**101,452,500**					**65,000,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	3 Paket	3 Paket	54,823,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	20,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	2 Paket	3 Paket	35,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	1 Paket	3 Paket	1,116,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	1 Paket	3 Paket	5,633,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	"Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	50 Laporan	3 Paket	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**33,815,342**					**20,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Batu Patah	WTP	12 Laporan	12 Laporan	30,065,342	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	"Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	2 Laporan	12 Laporan	3,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**184,362,800**					**65,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	2 Unit	3 Unit	61,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,000,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	3 Unit	3 Unit	65,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	"Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	WTP	1 Unit	3 Unit	56,920,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**8,745,000**					**15,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**								**5,400,000**					**10,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	100 %	8 Laporan	8 Laporan	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	10,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**3,345,000**					**5,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kelumbayan Barat
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Kelumbayan Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Peningkatan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	100 %	6 Laporan	8 Laporan	3,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**61,957,500**					**35,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**61,957,500**					**35,000,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Semua Kelurahan	100 %	10 Lembaga	2 Laporan	46,957,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	30,000,000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi Unsur/Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakt	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	100 %	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	100 %	5,000,000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**36,600,000**					**30,000,000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**36,600,000**					**30,000,000**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Persentase Penurunan Gangguan Keamanan"	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	100 %	6 Laporan	6 Laporan	36,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	30,000,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**6,390,000**					**10,000,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**6,390,000**					**10,000,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase Kecukupan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Tanggamus, Klumbayan Barat, Sidoharjo	100 %	5 Orang	5 Orang	6,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	5,000,000
								TOTAL	**1,314,729,415**					**1,622,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Air Naningan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Air Naningan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,637,221,540**					**1,879,874,093**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,583,380,950**					**1,809,674,093**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**20,235,800**					**24,485,800**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	30 Dokumen	30 Eksemplar	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	16,900,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Dokumen	30 Eksemplar	1,560,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,860,900
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Dokumen	30 Eksemplar	1,560,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,860,900
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Dokumen	30 Eksemplar	682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	682,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Dokumen	30 Eksemplar	682,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	682,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Laporan	30 Eksemplar	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,300,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun dengan Baik dan Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	20 Laporan	30 Eksemplar	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,200,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,459,609,650**					**1,639,253,293**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	12 Orang/bulan	12 Orang	1,240,349,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,403,493,293
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	8 Orang	12 Orang	148,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	164,700,000
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	12 Dokumen	12 Orang	71,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	71,060,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**29,465,500**					**53,365,000**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baikurunan Kasus Disiplin Aparatur	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	25 Paket	50 Paket	3,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baikurunan Kasus Disiplin Aparatur	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	50 Paket	50 Paket	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	5,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baikurunan Kasus Disiplin Aparatur	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	50 Paket	50 Paket	2,621,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,600,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baikurunan Kasus Disiplin Aparatur	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	36 Dokumen	50 Paket	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	28,800,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disusun dengan Baikurunan Kasus Disiplin Aparatur	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	70 Paket	50 Paket	2,274,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	8,965,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,200,000**					**31,200,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	12 Bulan	50 Laporan	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	16,200,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	10 Laporan	50 Laporan	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**47,870,000**					**61,370,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	WTP	3 Unit	3 Unit	47,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	47,870,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Air Naningan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Air Naningan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**223,200**					**6,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**								**223,200**					**6,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Publik yang Dapat Dilakasanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	0 %	10 Laporan	12 Eksemplar	223,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	0 %	1,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**21,217,390**					**20,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**21,217,390**					**20,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan		''Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	0 %		10 Lembaga/Pekon	21,217,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelompok Masyarakat Pekon/Kelurahan yang Dapat Diberdayakan	0 %	20,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**27,000,000**					**34,200,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**27,000,000**					**34,200,000**
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	''Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	0 %	12 Laporan	36 Laporan	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	0 %	34,200,000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**5,400,000**					**9,000,000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**5,400,000**					**9,000,000**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	100 %	10 Dokumen	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,500,000
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Kab. Tanggamus, Air Naningan, Air Naningan	100 %	10 Dokumen	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	100 %	4,500,000
												TOTAL	**1,637,221,540**					**1,879,874,093**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Bulok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Bulok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**													
7	**01**				**KECAMATAN**								**1,681,188,202**					**1,817,600,903**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**1,602,193,202**					**1,665,100,903**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**18,822,400**					**27,150,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	15 Dokumen	100 %	15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	17,500,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Dokumen	100 %	1,395,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	4,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Dokumen	100 %	375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Dokumen	100 %	302,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Dokumen	100 %	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,650,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Laporan	100 %	400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Laporan	100 %	450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,483,716,802**					**1,457,450,903**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang D susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	15 Orang/bulan	100 %	1,295,201,802	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	1,386,800,903
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Keuangan Yang D susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	7 orang	100 %	122,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	0
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang D susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	12 Dokumen	100 %	66,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	70,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Keuangan Yang D susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Laporan	100 %	325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	650,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**6,083,000**					**35,500,000**
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum yang D Susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	10 Paket	100 %	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	7,500,000
7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum yang D Susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	21 Paket	100 %	3,933,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum yang D Susun Tepat Waktu	Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kelurahan	WTP	20 Laporan	100 %	750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	3,500,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45,221,000**					**65,000,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	12 Laporan	100 %	8,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	15,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	1 Laporan	100 %	36,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	50,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**48,350,000**					**80,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara	WTP	4 Unit	100 %	48,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	70,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**43,745,000**					**75,000,000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								**43,745,000**					**75,000,000**
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kelurahan	100 %	12 Lembaga	100 %	43,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Publik yang Dapat Dilaksanakan dengan Baik	%	75,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**33,450,000**					**35,000,000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								**33,450,000**					**35,000,000**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Bulok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Bulok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	33,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang Dapat Diselesaikan	100 %	35,000,000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**1,800,000**					**17,500,000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**1,800,000**					**17,500,000**
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Kab. Tanggamus, Bulok, Semua Kelurahan Kab. Tanggamus, Bulok, Sukamara		30 Orang		1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17,500,000
								TOTAL	**1,681,188,202**					**1,817,600,903**

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**													
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								**5,687,423,420**					**6,182,607,456**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**3,299,929,920**					**3,333,840,372**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**43,724,400**					**49,415,400**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	6 Dokumen	50 Laporan	37,404,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	39,415,400
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Dokumen	50 Laporan	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	1,000,000
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Dokumen	50 Laporan	2,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	3,000,000
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Dokumen	50 Laporan	720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	1,000,000
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Dokumen	50 Laporan	600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	1,000,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	4 Laporan	50 Laporan	1,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	2,000,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang di susun dengan Baik dan Tepat waktu	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	4 Laporan	50 Laporan	1,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	2,000,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,925,811,320**					**2,924,010,814**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	32 Orang	32 Orang/bulan	34 Orang	2,534,311,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	32 Orang	2,534,310,814
8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	JUmlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	32 Orang	21 Dokumen	34 Orang	391,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	32 Orang	389,700,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**68,640,000**					**75,000,000**
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	12 Bulan	12 Dokumen	12 Bulan	68,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	12 Bulan	75,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**116,926,800**					**120,920,158**
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	10 Paket	12 Bulan	89,149,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	100 %	55,685,908
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	100 %	60 Paket	12 Bulan	6,921,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	100 %	18,498,250
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 Laporan	12 Bulan	20,856,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	100 %	46,736,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,061,000**					**43,694,000**
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hasil Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Laporan	100 %	38,861,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	42,494,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hasil Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	12 Laporan	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	1,200,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**104,766,400**					**120,800,000**
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	5 Unit	100 %	93,966,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	110,000,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Opini BPK Terhadap Laporan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disusun dengan Baik	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Kampung Baru	WTP 1	1 Unit	100 %	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Opini BPK Terhadap Laporan	WTP 1	10,800,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**47,708,100**					**100,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**47,708,100**					**100,000,000**
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran				Orang		47,708,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan											
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**199,254,500**					**390,000,000**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**								**199,254,500**					**390,000,000**
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Meningkatnya Kualitas SDM Partai Politik		8 Partai	80 Orang	8 Parpol	64,003,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	8 Partai	0
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Partai Politik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Partai	50 Orang	8 Parpol	92,048,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	8 Partai	90,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM Partai Politik	Kab. Tanggamus, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Partai	8 Laporan	8 Parpol	43,202,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Mendapatkan Pendidiksn Politik	8 Partai	100,000,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**2,014,126,600**					**2,068,965,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**2,014,126,600**					**2,068,965,000**
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Kebijakan Ormas	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	1 LS	1 Dokumen	100 %	1,938,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	1 LS	1,938,965,000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Kebijakan Ormas		1 LS	50 Orang	100 %	30,958,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	1 LS	60,000,000
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Kebijakan Ormas		1 LS	70 Orang	100 %	44,202,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas	1 LS	70,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**36,591,300**					**189,802,084**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**36,591,300**					**189,802,084**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase elemen Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan di Bidang ekonomi Sosial Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Kebijakan dan Pemantapan di Bidang Ekonomi sosial dan Budaya		100 %	60 Orang	100 %	36,591,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase elemen Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan di Bidang ekonomi Sosial Budaya	100 %	100,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**89,813,000**					**100,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**89,813,000**					**100,000,000**
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Penyelesaian Konflik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan (entingnya Kewaspadaan Nasional	Kab. Tanggamus, Kota Agung Timur, Semua Kelurahan	100 %	50 Dokumen	100 Orang	89,813,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Konflik	100 %	100,000,000
												TOTAL	**5,687,423,420**					**6,182,607,456**

Tabel V.3 Rekapitulasi Belanja Daerah Setiap Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU
1	***2***	***3***
1	Dinas Pendidikan	**594,634,429,745.00**
2	Dinas Kesehatan	
1	Dinas Kesehatan	**106,924,430,128.00**
2	Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang Kota Agung	**75,112,909,520.00**
3	Puskesmas Siring Betik	**1,184,330,640.00**
4	Puskesmas Wonosobo	**1,020,313,780.00**
5	Puskesmas Sudimoro	**1,094,244,000.00**
6	Puskesmas Sukaraja	**1,559,022,773.00**
7	Puskesmas Sanggi	**1,189,034,760.00**
8	Puskesmas Kota Agung	**2,443,762,860.00**
9	Puskesmas Way Nipah	**910,273,360.00**
10	Puskesmas Pasar Simpang	**1,366,905,880.00**
11	Puskesmas Negara Batin	**1,204,448,350.00**
12	Puskesmas Pulau Panggung	**1,954,742,600.00**
13	Puskesmas Ngarip	**1,585,350,000.00**
14	Puskesmas Air Naningan	**1,862,464,676.00**
15	Puskesmas Talang Padang	**2,596,243,490.00**
16	Puskesmas Margoyoso	**1,000,635,620.00**
17	Puskesmas Gisting	**1,604,707,450.00**
18	Puskesmas Kedaloman	**1,032,380,150.00**
19	Puskesmas Rantau Tijang	**1,754,589,805.00**
20	Puskesmas Sumanda	**2,080,746,460.00**
21	Puskesmas Bulok Sukamara	**1,213,859,090.00**
22	Puskesmas Putih Doh	**1,608,975,660.00**
23	Puskesmas Klumbayan	**909,065,940.00**
24	Puskesmas Antar Brak	**1,274,181,540.00**

NO	PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU
25	Puskesmas Klumbayan Barat	**825,765,160.00**
26	Puskesmas Sumberejo	**668,280,492.00**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	**128,350,770,067.00**
4	Satuan Polisi Pamong Praja	**12,164,820,237.00**
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	**4,646,309,964.00**
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	**3,366,170,219.00**
7	Dinas Sosial	**4,319,201,053.00**
8	Dinas Tenaga Kerja	**3,782,118,978.00**
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**13,449,461,770.00**
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	**19,710,328,894.00**
11	Dinas Lingkungan Hidup	**5,989,132,412.00**
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**7,559,420,380.00**
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**12,986,188,213.00**
14	Dinas Perhubungan	**5,022,137,050.00**
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	**6,506,518,786.00**
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	**7,376,188,408.00**
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	**4,051,405,454.00**
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	**5,648,152,109.00**
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	**3,649,630,593.00**
20	Dinas Perikanan	**3,690,124,037.00**
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	**5,177,922,613.00**
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	**6,807,495,514.00**
23	Sekretariat Daerah	
1	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	**523,733,978.00**
2	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	**4,162,750,948.00**
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	**441,400,400.00**
4	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	**5,378,028,000.00**
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	**609,847,916.00**

NO	PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	**554,581,400.00**
7	Bagian Umum Sekretariat Daerah	**10,045,901,392.00**
8	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	**223,925,653.00**
9	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	**332,447,100.00**
10	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	**18,718,012,610.00**
24	Sekretariat DPRD	**60,273,860,942.00**
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	**15,650,755,661.00**
26	Badan Pengelola Keuangan Daerah	**-**
1	Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD)	**33,913,429,374.00**
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)	**388,420,164,520.00**
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	**5,440,056,165.00**
28	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	**571,937,374.00**
29	Inspektorat	**13,573,668,286.00**
30	Kecamatan Kota Agung	
1	Kecamatan Kota Agung	**5,176,979,324.00**
2	Kelurahan Baros	**503,694,100.00**
3	Kelurahan Pasar Madang	**533,761,509.00**
4	Kelurahan Kuripan	**567,586,740.00**
31	Kecamatan Wonosobo	**2,123,032,651.00**
32	Kecamatan Talang Padang	**2,601,261,371.00**
33	Kecamatan Pulau Panggung	**1,812,028,797.00**
34	Kecamatan Pugung	**1,911,504,258.00**
35	Kecamatan Cukuh Balak	**1,412,116,725.00**
36	Kecamatan Semaka	**1,814,094,496.00**
37	Kecamatan Pematang Sawa	**1,530,135,394.00**
38	Kecamatan Sumberejo	**1,635,085,797.00**
39	Kecamatan Ulu Belu	**1,428,596,193.00**
40	Kecamatan Kelumbayan	**1,741,729,145.00**

NO	PERANGKAT DAERAH	BATASAN PAGU
41	Kecamatan Gisting	**2,190,373,753.00**
42	Kecamatan Kota Agung Timur	**1,666,118,330.00**
43	Kecamatan Kota Agung Barat	**1,693,794,493.00**
44	Kecamatan Gunung Alip	**1,741,014,928.00**
45	Kecamatan Limau	**1,662,117,753.00**
46	Kecamatan Bandar Negeri Semuong	**1,772,360,212.00**
47	Kecamatan Kelumbayan Barat	**1,314,729,415.00**
48	Kecamatan Air Naningan	**1,637,221,540.00**
49	Kecamatan Bulok	**1,681,188,202.00**
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	**5,687,423,420.00**
	JUMLAH	**1,679,542,040,945.00**

Tabel V.4 Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SPM Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	9,158,045,430	8,173,095,690	5,000,000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25,455,975,000	15,635,570,006	13,196,436,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	60,000,200	130,129,600	50,000,000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	69,949,900	194,502,160	50,000,000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	78,906,500	646,129,600	301,213,398
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	69,689,648,305	51,479,800,000	51,479,800,000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	1,768,270,750	2,086,763,500	500,000,000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16,096,811,750	16,638,418,530	15,186,676,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	53,630,000	122,037,050	50,000,000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	42,689,200	149,384,400	51,200,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20,369,713,800	20,857,600,000	20,857,600,000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	42,065,000	94,680,000	75,000,000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	-	553,621,000	76,200,000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	9,797,400,000	10,440,000,000	10,440,000,000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	447,479,250	710,206,462	620,055,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2,837,300,000	370,860,000	75,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-	55,670,000	75,000,000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	3,714,100,000	3,714,100,000
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	303,169,600	50,000,000
		Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	90,567,800	50,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	5,150,000	4,595,106,950	6,190,297,050
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,426,644,000	326,542,000	326,542,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33,565,000	41,825,000	12,260,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0.00	13,685,000	30,360,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11,870,000	14,970,000	29,260,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14,825,000	21,540,000	16,900,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0.00	1,888,499,750	1,995,990,600
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23,090,000	12,950,000	21,300,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15,655,000	12,765,000	18,350,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18,175,000	25,725,000	21,680,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	19,650,000	37,500,000	70,750,000
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19,875,000	24,600,000	21,755,000
		Operasional Pelayanan Puskesmas	5,178,155,017.67		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3,387,452,200	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)	14,352,369,400	-	
				-	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2,467,078,300	-	
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (DAK)	13,118,342,250	-	
				-	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	750,000,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	5,350,202,500	-	-
				-	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	-	-	1,500,000,000
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (DAK)	-	-	-
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENEYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.011.759.600	20.684.000	17.760.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		51.000.000	34.000.000
		Penyelenggaraan Kerjasma dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		29.130.000	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	-	15,487,500	-
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	67,758,250	60,624,700
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	202,110,000	211,830,000	185,460,000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	150,000,000	-
		Penanganan Pascabencana	40,000,000	41,350,000	41,350,000

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	25,602,500	55,197,500	25,450,000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	7,200,000	16,920,000	30,450,000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-	-	250,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	779.060.000	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	25.200.000	25.200.000	25.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	11.500.000	12.600.000	12.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	31.100.000	-	-

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		
			2021	2022	2023
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	-	17.130.000	53.990.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	856,920,900	246,055,900	94,907,000.00
		Penyediaan Sandang	97,729,000	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	72,606,500	83,956,500	23,177,000.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS Dan NAPZA Di luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	83,525,000	41,813,000	27,473,500.00
		Penyediaan Sandang	20,374,000	-	-
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	191,181,000	96,181,000	83,641,000.00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	211,082,000	106,202,500	93,089,000.00
		Penyediaan Sandang	49,360,000	-	-
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	29,250,000	31,000,000	-

Sumber : Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Tanggamus (data diolah), 2022

Tabel V.5 Dukungan Program Prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten Tanggamus Terhadap Indikator yang Mendukung Kegiatan SDGs Tahun 2023

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
a. Pilar Sosial										
	TPB. 1	**Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan**								
			Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	**Persentase Angka Kemiskinan**	**DINAS SOSIAL**					
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100%**	**214,533,700**	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	214,533,700	
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Waktu Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	214,533,700	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tertangani**	**100%**	**102,549,000**	
						Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Sosial kabupaten/Kota	100%	102,549,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan	150 Orang	93,089,000	
						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	9,460,000	
				Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS)	**DINAS SOSIAL**					
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PMKS yang direhabilitasi**	**100%**	**118,771,500**	
						Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	29,143,000	
						Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	23,177,000	
						Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5,966,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	89,628,500	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,987,500	
						Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15 Orang	83,641,000	
			Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**DINAS TENAGA KERJA**					
						PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**2**	**10,097,500**	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100%	10,097,500	
						Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	10 Dokumen	10,097,500	
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Rasio lulusan S1/S2/S3**	**5,60 %**	**11,338,800**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 %	11,338,800	
						Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 Lembaga	11,338,800	
	TPB. 2	**Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan**								
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	**Skor Pola Pangan Harapan**	**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**					
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari**		**308,584,900**	
						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Peningkatan Rumah Pangan Lestari		202,000,000	
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		202,000,000	
						Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota		106,584,900	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		106,584,900	
	TPB. 3	**Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia**								
			Rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	**Angka Harapan Hidup**	**DINAS KESEHATAN**					
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk**	**0,4**	**56,688,740,143**	
			Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH				**Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penderita PTM dan PM**	**15%**		
			Prevalensi epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk UKM dan UKP	100%	9,590,011,143	
			Angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	40 Unit	8,704,658,143	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
			Persentase pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	577,158,000	
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	308,195,000	
						Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	47,012,634,500	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11311 Orang	6,190,297,050	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1079 Orang	326,542,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10283 Orang	12,260,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49950 Orang	30,360,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	83916 Orang	29,260,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	394052 Orang	16,900,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67390 Orang	1,995,990,600	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121821 Orang	21,300,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3692 Orang	18,350,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10499 Orang	21,680,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14231 Orang	21,755,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen	40,960,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	9,903,631,698	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	5,109,336,100	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	42,070,000	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	815,718,900	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	3,777,135,702	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen	43,840,000	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	3,481,230,350	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1046 Orang	70,750,000	
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	4 Dokumen	181,260,000	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	105,585,000	
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	11,511,480,500	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	4 Dokumen	71,280,000	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 Dokumen	91,875,000	
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	24 Unit	52,730,000	
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	2,431,261,600	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	477,590,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	5 Laporan	86,905,000	
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	4 Dokumen	33,300,000	
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan Yang Terintegrasi	100%	86,094,500	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	86,094,500	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumberdaya Manusia Kesehatan yang mempunyai sertifikat kompetensi dibidangnya**	**100%**	**130,571,000**	
						Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan	100%	19,155,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	19,155,000	
						Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumberdaya Manusia Sesuai Kebutuhan	100%	73,148,000	
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 Orang	73,148,000	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi teknis dibidangnya	9 Tenaga	38,268,000	
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	48 Orang	38,268,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang Berizin Serta Produksi Pangan pada IRT yang bersertifikat**	**40%**	**464,942,000**	
						Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin produksi	100%	418,142,000	
						Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	418,142,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Diperiksa	100%	46,800,000	
						Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	5 Unit	46,800,000	
				Jumlah Konflik Sosial	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Penyelesaian Konflik**	**100%**	**89,813,000**	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan pentingnya Kewaspadaan Nasional	100 Orang	89,813,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	50 Dokumen	89,813,000	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase elemen Masyarakat Yang mendapatkan Pembinaan di Bidang ekonomi Sosial Budaya**	**100%**	**36,591,300**	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan dan Pemantapan di Bidang Ekonomi sosial dan Budaya	100%	36,591,300	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	36,591,300	
			Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	**Indeks Rasa Aman**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			**47,708,100**	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			47,708,100	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	47,708,100	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keberadaan dan Aktivitas Ormas**	**100%**	**2,014,126,600**	
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kebijakan Pembinaan dan Kebijakan Ormas	100%	2,014,126,600	
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1,938,965,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	30,958,900	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	70 Orang	44,202,700	
	TPB. 4	**Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua**								
			Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	**Angka Rata Rata Lama Sekolah**	**DINAS PENDIDIKAN**					
			Pengarusutamaan pada semua jenjang pendidikan, (i) pendidikan kewargaan dunia, (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	**Indeks Pendidikan**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rasio Ruang Kelas Berkondisi Baik**	**82.97%**	**90,703,062,283**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
			termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia pada (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru, (d) penilaian siswa.							
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Persentase Tenaga Pendidik Sekolah Dasar, PAUD dan Kesetaraan yang ber Ijazah S1	100%	44,454,335,483	
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang	5,000,000,000	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	25 Unit	13,196,436,000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	21000 Satuan Pendidikan	50,000,000	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	50,000,000	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	600 Orang	301,213,250	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	400 Satuan Pendidikan	25,856,686,233	
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Menengah Pertama yang berkualitas baik	100%	31,173,371,800	
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	500,000,000	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Unit	15,186,670,600	
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	900 Peserta Didik	50,000,000	
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	96,101,200	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan	15,340,600,000	
						Pengelolaan	Tercapainya	100%	10,710,353,100	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarpras Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas baik			
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16046 Peserta Didik	81,855,000	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajeme	488 Satuan Pendidikan	188,498,100	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	488 Satuan Pendidikan	10,440,000,000	
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Persentase Sarpras Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas baik.	82.97%	4,365,001,900	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	10 Unit	620,055,000	
						Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	30,846,900	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	3,714,100,000	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	**Rasio Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**80%**	**55,098,800**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	55,098,800	
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang	55,098,800	
	TPB. 5	**Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**								
			Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	**Indeks Pembangunan Gender**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani**	**94%**	**251,269,000**	
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	251,269,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan kegiatan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah tanggamus/kota	20 orang	112,949,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan tanggamus/kota	20 orang	138,320,000	
				Level Kabupaten Layak Anak		**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)**	**93%**	**854,390,100**	
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	777,584,100	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota	3 bulan	235,159,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Hibah	100 %	542,425,100	
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	76,806,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta peningkatan SDM penyedia layanan anak	80 peserta	76,806,000	
b. Pilar Lingkungan	**TPB. 6**	**Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua**								
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	**Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**					
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Percentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**26.20%**	**3,939,700,000**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pembangunan Pengaman Sungai Kabupaten Tanggamus	7 KM	3,939,700,000	
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.8 KM	3,841,000,000	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	98,700,000	
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten	25 KM	7,181,533,897	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	6,981,533,897	
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	200,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Percentase Penyediaan Infrastruktur Air Minum Kabupaten**	**14.68%**	**200,000,000**	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	3100 Rumah Tangga	200,000,000	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	200,000,000	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Percentase Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah/Sanitasi Kabupaten**	**56.77%**	**200,000,000**	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapat hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman	1643 Rumah Tangga	200,000,000	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	200,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Percentase Pembangunan, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**	**100%**	**41,128,000,000**	
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Percentase Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Drainase Kabupaten Tanggamus	100%	41,128,000,000	
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	50 M	41,128,000,000	
	TPB. 11	**Membangun Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan**								
				Indeks Desa Membangun (IDM)	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**					
						PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Peningkatan Penataan Pekon**	**100%**	**1,452,216,000**	
						Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Peningkatan Penataan Pekon	100%	1,452,216,000	
						Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan kewenangan	20 Desa	50,000,000	
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1,402,216,000	
						PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Pekon yang melaksanakan kerjasama**	**100%**	**50,000,000**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerjasama Pekon	100%	50,000,000	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	50 Dokumen	50,000,000	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Presentase Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan pekon**	**100%**	**4,215,770,000**	
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di dalam pembagunan, Pemberdayaan dan Kelembagaan Desa	100%	4,215,770,000	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	110 Lembaga	80,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Unit	3,940,770,000	
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	155,000,000	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	40,000,000	
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**					

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota**	**100%**	**600,000,000**	
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	600,000,000	
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	600,000,000	
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**68%**	**40,120,000**	
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	40,120,000	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap media Air	80 sampel	40,120,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Kemitraan Lingkungan Hidup yang Mendapat Pendampingan oleh Perangkat Daerah**	**65%**	**20,000,000**	
						Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	20,000,000	
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	20,000,000	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R**	**95%**	**690,121,200**	
						Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100%	690,121,200	
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	156,020,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	37084 Ton	534,101,200	
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	**Persentase Resiko Bencana pada Kawasan Rawan Bencana (KRB)**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase upaya penanggulangan bencana yang mencakup prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana**	**100%**	**234,330,000**	
						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Yang Terlaksana	100%	185,880,000	
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	185,880,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Upaya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Yang Terlaksana	100%	48,450,000	
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	18,000,000	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	30,450,000	
	TPB. 12	**Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.**								
	TPB. 13	**Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.**								
	TPB. 14	**Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.**								
	TPB. 15	**Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.**								
c. Pilar Ekonomi	**TPB. 7**	**Menjamin Akses Energi Bersih dan Terjangkau**								
			Rasio elektrifikasi	**Rasio elektrifikasi**	**DINAS TENAGA KERJA**					
						PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**Ratio Elektrifikasi**	**98%**	**30,065,000**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan yang Optimal	100%	30,065,000	
						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,065,000	
	TPB. 8	**Meningkatan Pertumbuhan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**								
			Laju pertumbuhan PDB per kapita	**Laju pertumbuhan PDRB**	**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA;**					
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Persentase Penurunan Lahan Sawah Yang Terkena Bencana Pertanian**	**100%**	**206,346,800**	
						Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	206,346,800	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	157,831,900	
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	48,514,900	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang di Bina**	**100%**	**5,540,870,500**	
						Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	5,540,870,500	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	569,832,000	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	250,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	4,721,038,500	
					DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**indeks kestabilan harga barang pokok dan penting di kabupaten tanggamus**	**90 persen**	**83,640,000**	
						Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		90 persen	83,640,000	
						Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	83,640,000	
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat terhadap kestabilan harga barang pokok dan penting di kabupaten tanggamus	90 persen	36,360,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdaganga	12 Laporan	36,360,000	
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			**89,007,000**	
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			89,007,000	
						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit	64,007,000	
						Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi LegaL Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 kali	25,000,000	
						DINAS PERIKANAN;				

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**2,50 %**	**63,740,700**	
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentse Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil yang menjadi Kewenangan Daerah	100%	63,740,700	
						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	265 Orang	63,740,700	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**2,50 %**	**44,130,000**	
						Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pesentase Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100%	44,130,000	
						Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pengembangan Kapasitas	2 Kelompok	14,130,000	
						Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok	30,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) yang menjadi Kewenangan Daerah	100%	13,920,000	
						Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota	25 Rekomendasi	13,920,000	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	14,140,100	
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	14,140,100	
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	**Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Olahan dalam PDRB**	**DINAS TENAGA KERJA**					
						PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Tingkat Keikutsertaan Transmigrasi**	**0.02%**	**51,000,000**	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	100%	51,000,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25,000,000	
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	26,000,000	
			Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	**Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB**	**DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**					
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			**100,000,000**	
						Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			100,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	100,000,000	
			Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	**Realisasi Investasi PMA dan PMDN**	**DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**					
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah**	**100%**	**360,216,000**	
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	100%	360,216,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	210 Pelaku Usaha	261,996,000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	98,220,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
			Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	**Meningkatnya daya saing dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan**	**DINAS TENAGA KERJA**					
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Pencari Tenaga Kerja Terdaftar yang ditempatkan**	**97%**	**147,649,020**	
						Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelayanan Antar Kerja	100%	147,649,020	
						Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	6500 Orang	147,649,020	
			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	**Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan**	**DINAS PARIWISATA**					
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Peningkatan Pembangunan Fasilitas Destinasi Pariwisata**	**100%**	**508,020,000**	
						Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	463,020,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Unit	463,020,000	
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	45,000,000	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	45,000,000	
	TPB. 9	**Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi**								
			Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	**Persentase Pekon yang Terhubung dengan Pusat Ekonomi dengan Jalan dalam Kondisi Baik**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**					
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Percentase Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten Tanggamus**	**38.82%**	**27,805,600,000**	
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	670 KM	27,805,600,000	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian	2 Dokumen	330,000,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			
						Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	12,293,600,000	
						Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10 KM	13,354,000,000	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 KM	500,000,000	
						Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	25 M	1,328,000,000	
				Luas Lahan yang Teraliri Irigasi	**DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**					
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**100%**	**134,393,000**	
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	134,393,000	
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	134,393,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian**	**100%**	**160,978,000**	
						Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	160,978,000	
						Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	160,978,000	
			Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	**Laju pertumbuhan sektor Industri Pengolahan**	**DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**					
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			**99,420,000**	
						Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			99,420,000	
						Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	99,420,000	
	TPB. 10	**Mengurangi Kesenjangan di Intra dan Antar Negara**								
			Koefisien Gini.	**Indeks Gini Rasio**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**					

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			**438,654,300**	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			59,385,600	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	11,430,500	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	7,946,000	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	11,508,200	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	50 Laporan	27,566,200	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	934,700	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			379,268,700	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	15,470,600	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10 Laporan	180,600,000	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Laporan	14,962,300	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10 Laporan	168,235,800	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			**705,180,000**	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			705,180,000	
						Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	202,250,000	
						Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	202,500,000	
						Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	201,430,000	
						Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	99,000,000	
	TPB. 17	**Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.**								

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
d. Pilar Hukum dan Tata Kelola	**TPB. 16**	**Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**								
		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten / Kota).	**Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah**	**BAGIAN ORGANISASI**						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**175,847,000**	
						Penataan Organisasi	tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah	600 Indeks	175,847,000	
						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20 Dokumen	82,000,000	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Dokumen	93,847,000	
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	**Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**	**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**						
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Presentase Kecukupan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**611,413,300**	
						Administrasi Tata Pemerintahan	Tercapainya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang	9 Dokumen	611,413,300	

4 PILAR UTAMA	NOMOR TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR RPJMD KABUPATEN TANGGAMUS	INSTANSI PELAKSANA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	KET
							Dilaksanakan dengan Baik			
						Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	611,413,300	
			Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**BAGIAN ORGANISASI**					
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**	**WTP**	**166,830,500**	
						Penataan Organisasi	**tercapainya kematangan penataan Perangkat Daerah**	**600 Indeks**	**166,830,500**	
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15 Laporan	72,000,000	
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15 Dokumen	94,830,500	
						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15 Dokumen	69,708,600	

Sumber : Perangkat Daerah Terkait Kabupaten Tanggamus (data diolah), 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Kabupaten Tanggamus dapat di capai.

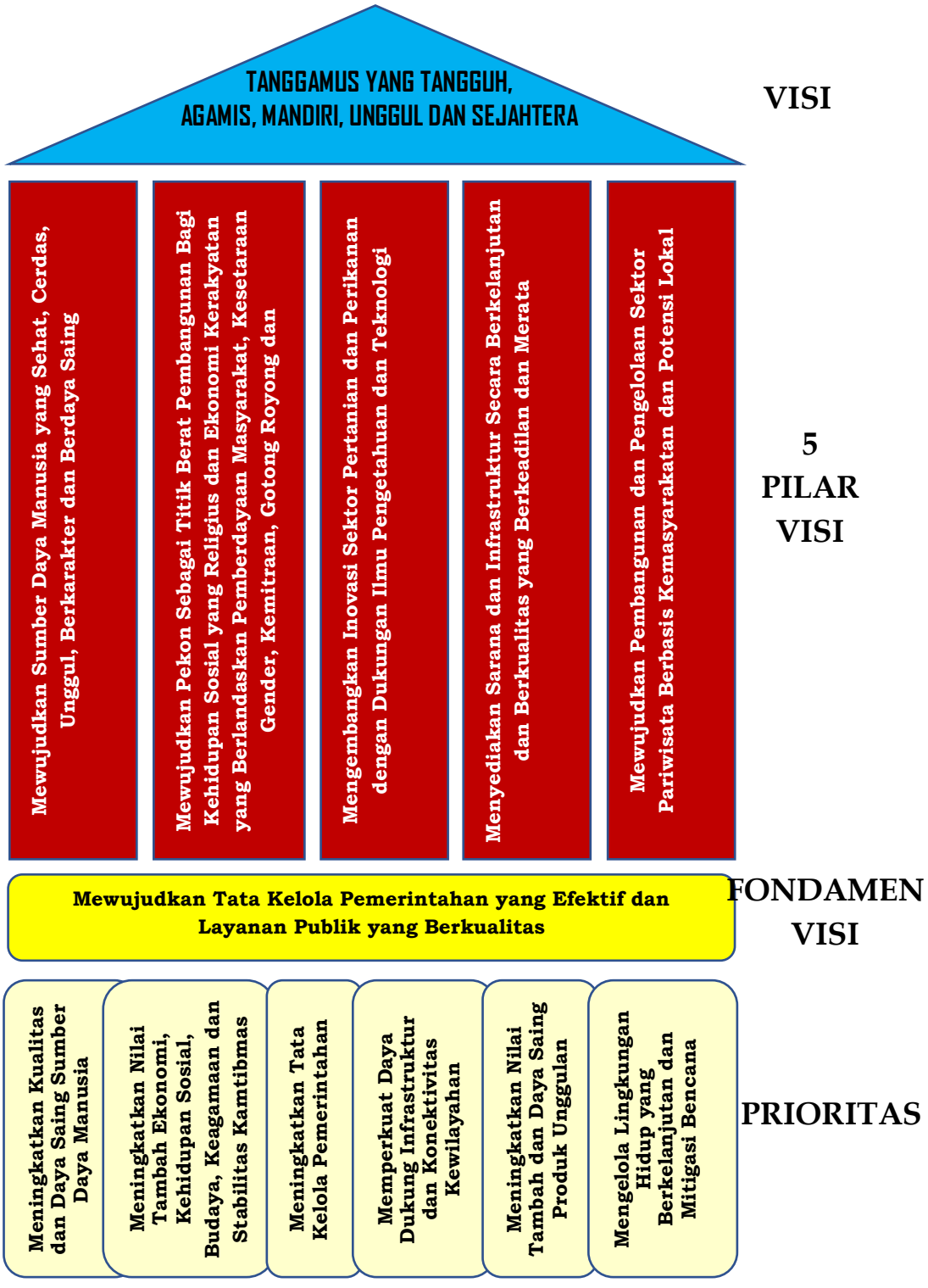
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program outcome terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Dalam RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanggamus terdapat sejumlah indikator yang menjadi acuan pembangunan selama lima tahun kedepan.

Visi RPJMD Kabupaten Tanggamus merupakan kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa 5 (lima) tahun. Visi Kepala Daerah Kabupaten Tanggamus terpilih untuk masa jabatan tahun 2018-2023 yaitu :

“Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul, dan Sejahtera”

Dari uraian dan *logical frame* (kerangka pikir) visi dan misi maka secara visual digambarkan Bangun Visi dan Misi Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

Gambar VI.1 Bangun Visi, Misi, dan Prioritas



Sumber : Analisis Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018-2023

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 maka dirumuskan tujuan yang akan dicapai dalam penerapan visi dan misi tersebut yaitu :

1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
3) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
4) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkualitas;
5) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender;
6) Meningkatkan Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan;
7) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan;
8) Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Sebagai Unggulan Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal.

Mengacu kepada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1) *Misi 1* : *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas,* dengan sasaran :
   a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;
   b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2) *Misi 2* : *Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing*, dengan sasaran :
   a) Meningkatnya Derajat Kesehatan;
   b) Meningkatnya Kualitas Pendidikan.

3) *Misi 3* : *Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan Masyarakat, Kesetaraan Gender, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhinneka Tunggal Ika*, dengan sasaran :
   a) Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;

b) Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Tertib, Tentram, Aman dan Religius;
c) Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat;
d) Meningkatnya Rata-Rata Pendapatan yang Diterima oleh Setiap Penduduk;
e) Meningkatnya Pekon Maju;
f) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4) *Misi 4* : *Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan.

5) *Misi 5* : *Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata*, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten;
b) Meningkatnya Infrastruktur Dasar Wilayah;
c) Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi;
d) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca;
e) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
f) Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.

6) *Misi 6* : *Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal*, dengan sasaran :
a) Meningkatnya Daya Saing Pariwisata yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Budaya Lokal.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maksudnya adalah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan

pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Hasil penetapan indikator kinerja pemerintah dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel VI.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	2018		2019		2020		2021		Target Setelah Perubahan	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
IS.1	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Kategori Penilaian	CC	CC	B	B	B	B	B	B	BB	BB
IS.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	-	72.9389	-	67.8997	-	77.2524	80.0000	72.9398	82.0000	85.0000
IS.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	77.14	77.14	81.00	75.00	85.05	70.93	72.00	86.43	85.00	87.00
IS.4	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.85	68.04	69.10	68.40	70.48	68.56	68.60	68.67	68.65	68.70
IS.5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	-	12.15	-	12.17	-	12.18	12.19	12.19	12.20	12.25
IS.6	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	6.96	6.95	7.21	7.00	7.22	7.23	7.34	7.34	7.35
IS.7	Angka Kemiskinan	Persen	12.48	13.14	12.00	12.05	10.52	11.68	11.31	11.81	10.94	10.80
IS.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.23	2.21	2.22	2.96	2.22	2.96	2.95	2.93	2.90	2.89
IS.9	Indeks Rasa Aman	Angka	0.49	0.49	0.49	0.75	0.50	0.91	0.92	0.66	0.93	0.94
IS.10	Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	13.50	13.50	13.29	13.29	12.84	13.26	13.40	13.41	13.34	13.10

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	2018		2019		2020		2021		Target Setelah Perubahan	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
IS.11	Indeks Gini	Angka	0.276	0.289	0.256	0.314	0.237	0.293	0.292	0.265	0.291	0.290
IS.12	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	Persen	-	7.29	-	6.11	-	(6.95)	4.00	4.43	4.50	5.00
IS.13	Persentase Pekon Maju	Persen	-	2.34	-	8.03	-	13.04	17.06	17.05	18.06	19.06
IS.14	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	-	69.90	-	56.97	-	56.80	56.85	56.39	67.00	67.50
IS.15	Nilai Kabupaten Layak Anak	Angka	0.00	-	75.00	-	77.00	-	565.00	563.95	567.00	570.00
IS.16	Nilai Tukar Petani	Angka	-	147.14	-	140.10	-	71.09	88.03	88.03	91.34	97.06
IS.17	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	74.11	74.11	75.00	83.85	76.00	73.65	83.40	83.50	83.55	83.60
IS.18	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	-	46.65	-	37.64	-	51.88	51.10	51.09	51.50	52.00
IS.19	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	-	53.65	-	54.77	-	56.10	57.00	58.82	60.00	65.00
IS.20	Rasio Elektrifikasi	Persen	89.60	89.60	95.30	96.75	96.10	96.98	97.00	97.98	97.50	98.00
IS.21	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	-	-	-	-	6.00	3.00	6.50	7.00
IS.22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	55.27	55.27	66.00	62.50	66.50	63.76	64.27	63.08	64.92	65.56
IS.23	Indeks Risiko Bencana	Angka	-	135.86	-	132.25	-	129.73	128.00	127.96	125.00	120.00

INDIKATOR SASARAN		SATUAN	2018		2019		2020		2021		Target Setelah Perubahan	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2022	2023
IS.24	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	10.00	10.00	14.00	23.50	18.00	(83.00)	20.00	20.83	25.00	30.00

Sumber : Analisis data diolah, 2022

Tabel VI.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ASPEK KESJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.02	5.03	-1.77	3.2	4	4.05
2	PDRB Perkapita	24,492,707	26,025,543	25,742,248	26,763,352	27,512,154	28,600,000
3	Angka Kemiskinan	13.14	12.05	11.68	11.31	10.94	10.8
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.21	2.96	2.96	2.95	2.9	2.89
	Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pembangunan Manusia	65.67	66.37	66.42	66.48	66.57	66.6
2	Indeks Gini	0.289	0.314	0.293	0.292	0.291	0.29
3	Tingkat Rata-Rata Capaian Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten, Infrastruktur Dasar Wilayah dan Ketahanan Energi	63.3	63.05	68.32	68.37	69.67	71.67
4	Nilai Tukar Petani	147.14	140.1	71.09	88.03	91.34	97.06
5	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	-	-	-	6	6.5	7
6	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB	BB
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72.9389	67.8997	77.2524	80	82	85
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	77.14	75	70.93	72	85	87
9	Angka Harapan Hidup	68.04	68.4	68.56	68.6	68.65	68.7
10	Angka Harapan Lama Sekolah	12.15	12.17	12.18	12.19	12.2	12.25
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.96	7.21	7.22	7.23	7.34	7.35
12	Indeks Rasa Aman	0.49	0.75	0.91	0.92	0.93	0.94
13	Persentase Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	13.5	13.29	13.26	13.4	13.34	13.1
14	Persentase Pertumbuhan PDRB Perkapita	7.29	6.11	-6.95	4	4.5	5
15	Persentase Pekon Maju	2.34	8.03	13.04	17.06	18.06	19.06
16	Indeks Pemberdayaan Gender	69.9	56.97	56.8	56.85	67	67.5
17	Nilai Kabupaten Layak Anak	-	-	-	565	567	570
18	Skor Pola Pangan Harapan	74.11	83.85	73.65	83.4	83.55	83.6
19	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	46.65	37.64	51.88	51.1	51.5	52

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah	53.65	54.77	56.1	57	60	65
21	Rasio Elektrifikasi	89.6	96.75	96.98	97	97.5	98
22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55.27	62.5	63.76	64.27	64.92	65.56
23	Indeks Risiko Bencana	135.86	132.25	129.73	128	125	120
24	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	10	23.5	-83	20	25	30
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
I	**Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar**						
A	**Pendidikan**						
1	APK Pendidikan PAUD	45	47	60	70	75	85
2	APK Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	92	98.58	100	100	100	100
3	APK Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).	92	98.58	100	100	100	100
4	APK Pendidikan Paket A, B, C	52	57	62	65	69	73
5	APM Pendidikan PAUD	49.99	59.79	79.79	79.79	89.79	99.79
6	APM Pendidikan SD	87	87.7	93	94	95	96
7	APM Pendidikan SMP	45	66.86	86.86	86.86	96.86	100
8	APM Pendidikan Paket A, B, C	58	59	62	65	67	70
9	APS (Angka Putus Sekolah) Pendidikan	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2
10	Rata-rata Lama Sekolah	6.59	6.79	6.79	7.21	7.44	8
11	Angka Harapan Lama Sekolah	13.02	13.08	13.08	14.08	15.02	15.05
12	Angka Melek Huruf (AMH)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
13	Angka Melanjutkan (AM)	68	70	76	84	90	100
14	Angka Pendidikan yang lebih tinggi di tamatkan	45	66.86	86.86	86.86	96.86	100
15	Rasio Sekolah berakreditasi SD dan SMP	61	62.26	70	75	80	85
16	Angka Kelulusan SD dan SMP	98	98.79	100	100	100	100
17	Angka Melanjutkan ke SMP	68	70	76	84	90	100
18	Nilau Rata rata US SD/Mi	7.6	7.85	7.82	7.84	7.84	8
19	Nilai Rata rata UN SMP/MTs.	55	56	57	58	59	60
20	Rasio Kelas SD berkondisi Baik	50	61.97	68.97	75.97	82.97	89.97
21	Rasio Kelas SMP berkondisi Baik	50	61.97	68.97	75.97	82.97	89.97

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	Persentase Tenaga Pendidik SD Bersertifikat	45.12	46.89	56.89	66.89	76.89	86.89
23	Persentase Tenaga Pendidik PAUD Berijazah S1	70.04	73.18	83.18	93.18	100	100
24	Persentase Guru Layak SD	60.66	73.19	83.19	93.19	1	1
25	Persentase Tenaga Pendidik SMP Bersertifikat	50	52.82	57.82	62.82	67.82	72.82
26	Persentase Tenaga Pendidik SMP Berijazah S1	30	32.36	42.36	52.36	62.36	72.36
27	Persentase Guru Layak SMP	80.56	84.19	87.19	90.19	93.19	96.19
B	**Kesehatan**						
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	107	26,9	71,8	90	80	70
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	1,3	1,6	0,49	1,2	1	1
3	Prevalensi Balita Stunting	-	29,87	3.5	0.3	0.29	0.28
4	Indeks Keluarga Sehat	-	0,14	0,14	0,4	0,5	0,6
5	Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	-	17	17.3	60	80	100
6	Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	-	100	100	70	80	90
C	**Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**						
1	Percentase Peningkatan Jalan Kabupaten Kondisi Mantab	2.41	5.23	-14.24	4	4	6
2	Percentase Sarana dan Prasana Sumber Daya Air	51.03	51.65	53.74	60	63	66
3	Percentase Pemenuhan Permukiman yang Layak	32.69	35.5	39	44	48	55
4	Percentase Rencana Tata Ruang Wilayah	100	100	100	100	100	100
D	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**						
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	70	64.8	57.85	55	50	45
2	Persentase Penyelesaian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	20	29.21	38.85	50	60	70
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	7	7	7	17	21	24
4	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam waktu tanggap (Response Time)	83	89	89	90	80	83

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar) yang dibentuk dan /atau dibawah Pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0	0	0	0	12	13
6	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	5 kali	1 Kali	7 Kali	20 Kali	25 Kali	30 Kali
7	Skor Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	0.3	0.34	0.37	0.4	0.45	0.5
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	77	80
E	**Sosial**						
1	Persentase Penanganan PMKS	48,64	48,77	69,23	75	80	85
2	Persentase PSKS Yang Aktif	73	75	80	80	82	85
II	**Fokus Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar**						
A	**Tenaga Kerja**						
1	Persentase Pencari Tenaga Kerja yang ditempatkan	-	71,00	59.72	60,00	60.05	60.65
2	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	-	69.67	72.95	71,00	71.56	72.3
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Persentase akseptor Pengguna KB MKJP	30.28	32.79	34.26	36	38	40
2	Persentase peningkatan partisipasi keluarga dalam kelompok BKB	7.24	8.26	11.64	14	16	18
3	Persentase penurunan keluarga pra sejahtera	12.53	12.48	12.05	11.9	11.8	11.7
4	Persentase penangananan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	92	93	94
5	Persentase pencapaian indikator kabupaten layak anak	53	62	73	75	80	85
	Pangan						
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	5	17.2	17.2	5	5	5

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
C	**Lingkungan Hidup**						
1	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian (Afolu)	-	-	-	-	0,24	0.26
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan	-	-	-	-	4,72	5.09
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi dan Transportasi	-	-	-	-	1,18	1.27
4	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri dan Penggunaan Produk	-	-	-	-	0,01	0.01
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengolahan limbah	-	-	-	-	0,35	0.36
6	Indeks Kualitas Air	56	58.97	58.33	59.37	59.47	59.47
7	Indeks Kualitas Udara	80	87.22	83.11	84.21	84.31	84.31
8	Indeks Tutupan Lahan	33	53.36	53.36	38.77	41.37	41.37
9	Persentase Pengelolaan Sampah	9	11,75	15,82	15	15	15
D	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Persentase Penduduk Ber-KTP	86.7	88.7	91.8	95.4	97.6	100
2	Persentase Keluarga Memiliki Kartu Keluarga	88.2	133.2	100	95.62	97	99.54
3	Persentase Penerbitan KIA	5.72	16.5	33.8	25.6	40.2	62.41
4	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kelahiran	92.56	79.3	92.8	95.2	96.4	98.72
5	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Perkawinan	15.73	25.47	54.76	61.72	68.79	85.74
6	Persentase Penerbitan Akta Kutipan Kematian	23.67	34.4	58.74	63.74	75.45	93.74
7	Persentase Peningkatan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	-	5.41	9.73	65.9	74.8	100
E	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
1	Presentase Pekon yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan sesuai regulasi	89,63	99,67	82,61	99	99,99	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintahan Pekon	0	0	0	0	60	65
3	Prentase Kelembagaan Pekon yang Aktif	50	60	70	80	90	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F	**Perhubungan**						
1	Persentase Kendaraaan Angkutan Darat Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	37,6	58.1	49	100	100	100
2	Persentase Angkutan Laut Orang dan Barang yang Memenuhi Standar Keselamatan	-	-	-	100	100	100
G	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Indeks SPBE	1.37	1.37	1.37	2	2.5	3
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	70	70	75	80	85	90
3	Persentase Perangkat daerah yang mengelola Satu Data Statistik Sektoral dengan baik	-	-	-	56	73	80
4	Persentase Sistem Elektronik yang telah menerapkan prinsip Menejemen keamanan Informasi	-	-	-	6	12	18
H	**Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**						
1	Indeks Daya saing Kabupaten Tanggamus terhadap Kabupaten Lain se Provinsi Lampung	0	38.46	55.56	60.71	77.78	87.5
2	Persentase pertumbuhan koperasi sehat	0	0	0	12.37	50.55	55.56
I	**Penanaman Modal**						
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	0	0	0	7.69	7.14	6.67
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasir	16.18	43.47	5.16	1	1	1
3	Persentase Capaian unsur Pelayanan Perizinan yang berkinerja sangat baik	4	.4.24	3.63	4.24	4.45	4.77
J	**Pemuda dan Olahraga**						
1	Persentase Pemuda yang Berprestasi Minimal Tk. Provinsi	.....	.....	.....	33.33	66.67	100
2	Persentase Prestasi Olahraga Minimal Tingkat Provinsi	-	-	-	21.43	35.71	42.86
K	**Perpustakaan dan Kearsipan**						
1	Persentase Perangkat Daearah yang Menerapkan Arsip Statis	-	8	13	14	15	20

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase Peningkatan Pengunjung ke Perpustakaan	4	-8	-30	10	4	5
3	Persentase Perpustakaan Pekon yang di Kelola dengan Baik	14	15	14	13	13	17
III	**Fokus Urusan Layanan Pilihan**						
A	**Perikanan**						
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.2	0.2	0.2	2	2.3	2.5
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	0.2	0.2	0.2	2	2.3	2.5
3	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0.2	0.2	0.2	1.5	1.8	2
B	**Pariwisata**						
1	Jumlah Kunjungan Wisata	458,603	599,891	100,965	700,000	800,000	900,000
2	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan	5	13	17	20	25	30
3	Persentase Cakupan Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	23	0	0	33	37	40
C	**Pertanian**						
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Padi Per Hektar	56.3	57.3	56.96	59	59	59
2	Peresentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura Unggulan	9.5	9.36	24.46	12.6	12.6	12.6
3	Presentase Peningkatan Produksi Perkebunan Unggulan	3	4	5	3	5	6
4	Presentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Unggulan	4	3.5	5	3	5	6
5	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Unggulan	3	3.5	5	2	5	5
6	Presentase Penurunan Kematian Ternak	30	32	35	100	100	100
7	Presentase Pangan Asal Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	100	100	100	100	100	100
D	**Energi dan Sumber Daya Mineral**						
1	Persentase Pertumbuhan Energi Baru dan Terbarukan yang Terbangun	0%	96.75	96.98	95.7	95.89	96,00

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E	**Perdagangan**						
1	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	9.58	10.24	9.7	12.37	25	33.33
2	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Yang Taat Dalam Tertib Niaga	0	0	20	21	23.97	26.67
F	**Perindustrian**						
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	7.07	7.06	6.95	8.25	25	30
G	**Transmigrasi**						
1	Persentase Transmigran meningkat taraf ekonomi dan sosialnya	0	0	0	0,80	0,86	1.02
IV	**Fokus Layanan Urusan Penunjang**						
A	**Perencanaan Pembangunan**						
1	Persentase Kesesuaian Antara Program RPJMD Ke Dalam RKPD	85	90	91	100	100	100
2	Nilai Capaian Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah	85	90	91	92	93	95
B	**Penelitina dan Pengembangan**						
1	Indeks Inovasi Daerah	65	68	70	62.32	70	75
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	-	-	-	-	90	95
C	**Keuangan**						
1	Persentase Kesesuaian Program KUA-PPAS terhadap APBD	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penyerapan Anggaran	90.95	92.5	89.41	100	100	100
3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,261	0,840	0,691	0,866	0,866	0,866
4	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	4.01	4.45	4.7	5.7	6.07	6.44
6	Persentase Barang Milik Daerah yang Teregistrasi	50	60	70	100	100	100
D	**Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**						
1	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	99.37	97.6	99.49	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	49.77	50	65.77	71	73	75
V	**Fungsi Penunjang Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**						
1	Nilai LPPD	2.69	2.69	27,132	2.74	2.74	2.78
2	Indeks Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanggamus	-	-	54.64	54.64	54.64	54.64
3	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah	67.6	67.07	66.63	67.6	67.6	68.28
4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Produk Hukum Daerah Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	85	90	88.06	97	98	100
6	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pelayanan barang jasa)	-	-	-	1	1	2
7	Persentase Peningkatan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang ditindaklanjuti	-	-	-	30	40	50
8	Persentase Perjanjian Kerjasama yang Diimplementasikan	100	100	99.87	100	100	100
9	Indeks Kinerja Organisasi Keagamaan	68	66	77	70	80	80
10	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	97	97	98	100	100	100
11	Persentase Rencana Kebutuhan Barang Unit Sekretariat Daerah yang Terealisasi	74	75	73.24	77	79	80
12	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayaanan Sekretariat DPRD	13	31	71	100	100	100
13	Persentase ASN yang aktif menjadi Anggota Korpri	100	100	100	96,73	93,22	91,85
16	Persentase Event Pengembangan Jiwa Korsa Anggota Korpri	40	40	0	60	60	60
17	Persentase anggota Korpri yang memasuki Purnabhakti yang Memliki Kewirausahaan	-	-	0	60	64	72
18	Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tanggamus	2	3	3	3	3	3
19	IACM (Level Kapabilitas APIP)	2	3	3	3	3	3

NO	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Realisasi			TARGET		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	Persentase Ormas yang berlegalitas dan berkinerja baik	80	85	87	90	93	95
21	Persentase Penurunan Tingkat Kriminalitas	1.5	1.3	1.3	1	1	1

Sumber : Analisis data diolah, 2022

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah dibawah ini.

Tabel VI.3. Sinergisitas Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
I.	**URUSAN PENDIDIKAN**		
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
		Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		Jumlah warga negara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%
		Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,9
		Rata-rata kompetensi numeras SD berdasarkan asesmen nasional	1,8
		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan asesmen Nasional	1,8
		Ratat-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8
		Jumlah Satuan PAUD Yang mendapatkan akreditasi B	63,64
		Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV	69
		Rasio pengawas PAUD	3,2

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
II.	**URUSAN KESEHATAN**		
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Persentase Rumah Sakit Yang Terakreditasi	95%
		Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Rasio TT 1:4:1000 penduduk (sesuai revisi Renstra Kemenkes)
2	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu HamiL. 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10. Pelayanan Kesehatan Orang DenganGangguan Jiwa (ODGJ) Berat 11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan penemuan danpengobatan TBC (*Treatment Coverage*)	90%
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	16%
		Jumlah penurunan kematian ibu	3.274 (Penurunan 22% dari baseline 2019)
		Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	90%
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,3%
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	94,6%
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	83% (berdasarkan transformasi sistem kesehatan)

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Persentase persalinan di fasilitasi pelayanan Kesehatan	93%
		Persentase tatanan yang menerapkan kawasan tanpa rokok	80%
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan UBM	40%
		Annual Parasite Incidence (API) < 1/1000 penduduk	<1/1000
		Persentase posyandu aktif	80%
		Persentase puskesmas dengan Ketersdiaan obat esensial	94%
		Persentase capaian 8 aksi konvergensi penurunan stunting	100%
		Persentase FKTP Terakreditasi	90%
		Jumlah puskesmas yang dibangun di kecamatan yang belum memiliki puskesmas	56 puskesmas (15 kabupaten /kota)
4	Meningkatnya efektivitas dan cakupan pengawasan dan pembinaan dalam pemenuhan ketentuan perizinan pedagang besar farmasi (PBF) cabang, sarana pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) dan industri produk obat tradisional (usaha kecil obat tradisional dan usaha mikro obat tradisional)	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan Perizinan	79%
		Persentase sarana produksi usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	80%
III.	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	14,22%
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan Perpipaan	28,01%
		Presentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%
		Persentase angka BABS ditempat Terbuka	1,49%
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses Sampahyang terkelola dengan baik di perkotaan	92,21% (77,64% penanganan 14,57% pengurangan)
2	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum	Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	97,55%
		Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	86,03% akses layak (termasuk 13% akses aman)
3	Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	110.672 Ha
		Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30.447 Ha

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
4	Terwujudnya konektifitas jalan	Persentae kondisi mantap	73% jalan kabupaten/kota
5	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian materi teknis RTRW	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RTRW 2023 : 43
		Penyelesaian materi teknis RDTR	*Berdasarkan target Bimtek dan/atau usulan daerah **Target Bimtek RDTR 2023 : 189
		Penetapan RTRW	*Berdasarkan target Persub RTRW **Target Persub RTRW 2023 : 43
		Penetapan RDTR	*Berdasarkan target Persub RTRW **Target Persub RDTR 2023 : 132
6	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	6 provinsi, 62 kabupaten/kota
		Pelaksanaan fasilitasi alih fungsi lahan sawah	12 provinsi
		Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang disekitar situ, danau,embung, waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)	6 Daerah Aliran Sungai pada 6 Provinsi, 12 kabupaten/Kota
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dikawasan sekitar situ, danau, embung,waduk (SDEW) pada daerah aliran sungai (DAS)	15 kasus
IV.	**URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
		Persentasewarga negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitasi Penyediaan rumah layak huni	100%

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
2	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang Ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah <10 Ha yang ditangani	1.459 Ha
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	208.764 Unit
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana,dan utilitas umum (PSU)	100%
V.	**URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
1	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada,serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	10 dokumen
		Jumlah Satgas Linmas Kabupaten /Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	1 Dokumen
		Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota	100%
		Persentasanggota Satlin mas yg telah dikukuhkan melalui SK Bupati /wali kota	100%
		Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	100%
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum kabupaten /kota yang ditetapkan	1 Dokumen
		Persentase aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	50%
		Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	100%
		Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat kecamatan	20%
		Jumlah polisi pamong praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang/provinsi7 orang/ kabupaten/kota
		Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%
2	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%
		Jumlah personil TRC yang dikembangkan teknis manajerialnya	20%
		Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE rawan bencana	20%
		Persentase penanganan pasca bencana	100%
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
		Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
3	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pembentukan relawanpemadam kebakaran didesa/kelurahan	50%
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	25%
		Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%
VI.	**URUSAN SOSIAL**		
1	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Jumlah Lembaga di Bidang Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Pelayanan	850
		Jumlah SDM PKH yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	39351
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat	10.000.000
		Jumlahdaerah yang melaksanakan penanaman nilaikepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	34
		Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pendampingan Kewirausahaan Sosial	15.000
		Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial	34
		Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	34
		Jumlah SDM Kesos yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi dan Profesional	38.000
		Jumlah TJSLBU (Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha) yang Mendapatkan Penguatan	200
2	Terpenuhi Kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Bencana Daerah Kabupaten/Kota Darurat	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dansetelah tanggap darurat bencana kab/kota	100
		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang Disediakan	133.000
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	514
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	133.000
		Jumlah Kelompok Rentan yang Mendapatkan Paket Permakanan	1.000
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional /tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	10.230

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.000
3.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Lanjut Usia Terlantar di reunifikasi keluarga	10
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	3.400
		Jumlah penyandang disabiltas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50
		Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di luar panti	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1.360
		Jumlah pekerja Sosial profesional /tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	50.000
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2.720
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	25
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100
		Jumlah Kelompok Masyarakat Di Lokasi Rawan Bencana Yang Mendapatkan Pencegahan Terorisme	250
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	100
		Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68
		Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50
		Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	1700
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	204.330
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di luar panti	136
		Jumlah Anak Terlantar di luar panti yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	340
		Jumlah Anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	680
		Jumlah Lanjut Usia terlantar diluar pantiyang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di luar panti	100
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar Panti	136

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	340
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis di luar panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	25
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar Panti	1
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar Yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan luar panti	1
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1000
		Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3400
4.	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan Kemiskinan	70
		Jumlahlayanan data dan pengaduan yang dimiliki	100
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dikembangkan Kapasitasnya	7.230
		Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.000
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
I.	**URUSAN TENAGA KERJA**		
1.	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	72%
		Jumlah tenaga kerja disektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	1.546.370 orang
2.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	45.000 orang

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	227.500 orang
3.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak – haknya	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak–hak pekerja dan dialog sosial	7.056.010 orang
II.	**URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkat minimal 0,1 poin dari kondisi 2021
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 0,5 poin dari kondisi 2021
		Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO Yang mendapatkan layanan komprehensif	90%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun 2023; Kab/Kota meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2021
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan Komprehensif	75%
III.	**URUSAN PANGAN**		
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Jumlah Cadangan pangan Pemerintah Daerah	Provinsi= 20% x cadangan beras total provinsi Kab/kota= 80% x cadangan beras total provinsi x rasio jumlah penduduk kab/kota
		Persentase daerah rentanrawan Pangan	12%

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
2	Meningkatnya pemanfaatan pangan yang berkualitas serta terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	94
		Persentase pangan segar asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratanmutu dan keamanan Pangan	85%
IV.	**URUSAN PERTANAHAN**		
1.	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	355.157 Bidang
		Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	144.20 Kepala Keluarga
V.	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**		
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48 Poin
2.	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	75% (dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan)
		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha terhadap izin lingkungan izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	20%-30% (dari total usaha yang diawasi)
3.	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persentase pengurangan sampah	27%
		Persentase sampah yang ditangani	72%
VI.	**URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individuyang perceraiannya dilaporkan.	100%
		Pemanfaatan data kependudukan	80%
		Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%
		Persentase cakupan kepemilikan aktake lahiran pada anak usia 0-17 tahun	98%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%
VII.	**URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien	Jumlahaparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	13.494 Orang

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	7.500 Desa
		Jumlah kelembagaan desa yang telah ditata sesuai standar	7.500 Desa
2	Berkembangnya status pembangunan Desa	Jumlah Desa Mandiri	5.444 Desa
		Jumlah Desa Berkembang	58.291 Desa
		Jumlah Desa Tertinggal	11.652 Desa
3	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUMDes bersama (Bumdesma) Berkembang	270 Bumdesma
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	9.000 BUM Desa
VIII.	**URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,19 rata-rata anak per wanita
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/ *modern Contraceptive* (mCPR)	62,92%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	7,7%
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	20 Kelahiran per 1000 WUS 15 19 tahun
		Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun.	2,19 rata-rata anak per wanita
2.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59 Indeks (skala 0 – 100)
IX.	**URUSAN PERHUBUNGAN**		
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88,4 (Nilai)
		On Time Performance Layanan Transportasi	80,26%
2	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0,725 Rasio
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 10 ribu Keberangkatan	26,39
X.	**URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1.	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Persentase (%) masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	2%
		Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis Pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	10 Orang

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
2.	Terlaksananya Layanan Pemerintah secara Digital	Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah	65%
		Persentase (%) aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	100%
3.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Persentase (%) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	80%
		Persentase (%) khalayak yang terpapar informasi terkait Program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema:protokol kesehatan,vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	85%
		Persentase (%)tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah (survei)	74%
		Persentase (%) permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	100%
4.	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase (%) Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah	80%
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200%
5.	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kotacerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten /kota cerdas yang sudah ditetapkan	100%
XI.	**URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**		
1.	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	18%
2.	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	4%
		Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor	70%
		Pertumbuhan Wirausaha	3,5%
XII.	**URUSAN PENANAMAN MODAL**		
1.	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal	Rp 1.200 Triliun

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
XIII.	**URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**		
1.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Atlet yang berasal dari Kabupaten/Kota yang masuk Pelatda	10 orang
2.	Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingka Kabupaten / Kota	1 dokumen
		Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan ditingkat Kabupaten /Kota	100 orang
		Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Kabupaten/Kota	0,5 persen
3.	Meningkatnya partisipasi organisasi Kepramukaan dalam pembangunan bangsa	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab	300 orang
XIV.	**URUSAN STATISTIK**		
1.	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100 %
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Perangkat Daerah Yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	100 %
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	100 %
XV.	**URUSAN PERSANDIAN**		
1	Menguatnya keamanan siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Lulusan Sertifikasi yang mengikuti peningkatankompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	100 orang
		Jumlah Lulusan Peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang
		Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	69,2%
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	3 Daerah
XVI.	**URUSAN KEBUDAYAAN**		
1.	Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.99

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.82
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	58.86
		Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan Seni	36.00
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12.00
2.	Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	0.50
		Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	0.46
XVII	**URUSAN PERPUSTAKAAN**		
1.	Literasi masyarakat Meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14 (Index)
2.	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,3 (Nilai)
XVIII	**URUSAN KEARSIPAN**		
1.	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	411.095 Pengguna
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	8.051 Arsip
2.	Penerapan e-Arsip terintegrasi	Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota	165 provinsi/ kabupaten/kota
3.	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Daerah (Provinsi/Kabupate n/Kota)	Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota	32 provinsi/ kabupaten/kota dengan nilai B ke atas
4.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah kabupaten/kota	123 Rekomendasi
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
I.	**URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
1.	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	8.735.580 Ton
		Produksi Perikanan Budidaya	21.580.000 Ton
2.	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integrative	Operasikapal/ *speedboat* pengawas	100 hari
		Pelaku usaha kelautan dan Perikanan izin Kabupaten/Kota yang diawasi atau diperiksa Kepatuhannya	2.870 Pelaku Usaha

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
II.	**URUSAN PARIWISATA**		
1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	300.000.000 – 315.000.000 perjalanan
		Kontribusi PDB Pariwisata	4,4%
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp1.279.000.000.000
III.	**URUSAN PERTANIAN**		
1	Meningkatnya produktivitas Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung dan Kedelai)	2,36%
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,85%
		Persentasepeningkatan produktivitas perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	2,05%
		Jumlah produksi daging	4.647.800 Ton
		Jumlah produksi susu	986.370 Ton
		Jumlah produksi telur	5.831.500 Ton
2	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rasio luas serangan OPT yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT (tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan)	71,87%
		Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI (Tanaman pangan, Holtikultura dan Perkebunan)	50,20%
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular Strategis	81%
IV.	**URUSAN PERDAGANGAN**		
1	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk/pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah,waktu,harga,mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%
2	Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5.96%-7.86%
3	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib usaha	75-90
4	Terwujudnya implementasi Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang	Pertumbuhan implementasi SRG	*33% **5-15%
5	Meningkatnya kesesuaian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	72%
6	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.9%
7	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan	Inflasi Pangan Bergejolak	3-5%
8	Terwujudnya stabilisasi harga dan	Inflasi Pangan bergejolak	3%-5%

NO	KINERJA	INDIKATOR KABUPATEN/KOTA	TARGET
	ketersediaan Pasokan		
V.	**URUSAN PERINDUSTRIAN**		
1.	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Non migas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	7,70%
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18.3%
3.	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	21,34 Juta Orang
4.	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	USD 160,64 Miliar
5.	TercapainyaPertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non migas (Rp. Triliun)	Rp544,59 Triliun
VI.	**URUSAN TRANSMIGRASI**		
1.	Meningkatnya Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata – rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31 Indeks
		Nilai rata – rata indeks perkembangan 100 kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	44,08 Indeks

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI (data diolah), 2022

Keberhasilan pembangunan Tanggamus dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanggamus. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh inovasi program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Inovasi Daerah.

Inovasi sebagai salah satu daya ungkit bagi penyelenggaraan Pemerintahan terus didorong baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Inovasi Daerah, dimana regulasi ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong sistem inovasi daerah.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah yaitu

inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Berikut beberapa inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2022.

Tabel VI.4. Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
1	**Dinas Lingkungan Hidup**	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Tanggamus, Ramah, Amanah, Tangguh dan Unggul (SIPESTA RATU)	100
		Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga /JAKSTRADA (Jarah Sarung)	91
2	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	100
		WAY PRING	100
		Sistem Informasi Geografis (SIG) Jaringan Jalan	100
		Lahan Tsunami	94
		Penjamu Ice	94
		Tape Baja (Talud Penahan Badan Jalan)	94
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)	95
		Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Online system subsmission wilayah perkotaan Kec.Gisting sebagai pusat Agropolitan Kab.Tanggamus	98
		Program BUDE SAR'I (Bunda Serap Aspirasi dan Inspirasi) di Bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur	100
		SIMASET (Sistem Informasi Manajemen Aset)	102
		SPAM JAPRI	102
		Mba Wati Agung	99
		Bang Batan Wong Kolot	100
		Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	97

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		E-RLTH	97
		BOX CULVERT	96
		Air Abang	94
		SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan)	95
		SIG Road Media Informasi	96
		KOMIR (Komisi Irigasi)	94
		Pejabung Sumur7	92
		Babakan Sukamara	94
		MAKO BRIMOB	92
		SPION (Sistem Pengendalian Internal Berbasis Oniline)	92
		Reklame	92
		Lamban Balak Batu Kramat	92
		Bukit Idaman	92
		Septic Tank Komunal	91
		Penyelenggaraan dan Retribusi Menara	93
		SI-MINAN (Sistem Informasi Pembangunan)	97
		SPAL TANOM	92
		AIR Pa ratu	95
		Way Pa Man	95
		PAM GIBAH	92
		SPAL Pematang sawa	97
		SI GALIH	95
		WAY BELU	95
		UNTA KUSA	95
		RAYOH ILAHAN	95
		HUMARA BALAK	97
3	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan**	Kawasan Kumuh Hilang	97
		Mimpi Indah KKN IPB di Tanggamus	98
		JARLITBANG	96
		Masterplan Agrowisata	97
		Studi Pemetaan Sanitasi Kabupaten Tanggamus	93
		Rencana Induk Sistem Drainase Kawasan Industri Olahan Hasil Pertanian	90
		Musrenbang Film Festival	97
		CSR for Covid	100

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		Tanggamus Award	93
		Inovasi Pemetaan Potensi desa/Pekon di kABUPATEN tANGGAMUS	99
		Inovasi Pemetaan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Kabupaten tanggamus	100
		Sistem Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (SI PAMELA PD)	91
		Integrated Participatory Development and Manahement Irrigation Project (IPDMIP)	90
		Duta Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus	95
		Taman Indah Batu Kramat	101
		Bunga Matahari	97
		Bunga Kertas berwarna	95
		Pemantauan dan Monitoring Pembangunan Daerah	100
		Inovasi Pengembangan Desa Agroindustri di Kabupaten Tanggamus	99
		CSR FOR STUNTING	100
		Begawi Jejama Sunan Kalijaga	109
		Kemilau Musrenbang Exxpo Kabupaten Tanggamus	100
		Identifikasi infrastruktur penyangga Kawasan Strategis Ulu Belu Kabupaten Tanggamus	93
		Rencana Pemetaan Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tanggamus	92
		PROGRAM PAMSIMAS	95
		Roadmap Penyediaan Infrastruktur Penyangga Kawasan Minapolitan	91
		Roadmap Penyediaan infrastruktur Penyangga Kawasan Agropolitan	92
		KLINIK PAK RT	102
		KUWALITAS ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (KAK)	100
4	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	Penanganan Tanggap Darurat Banjir dan Longsor di Wilayah Kecamatan Semaka Kab.Tanggamus 2020	102
		Banjir Di Wonosobo	95
5	**Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah**	Peningkatan Kualitas RISMA (Remaja Islam Mesjid) Kab.Tanggamus melalui Pembinaan RISMA	92
		Peningkatan " MUTU PONDOK PESANTREN " melalui Pendampingan Dana Hibah Keagamaan	91
6	**Kecamatan Kelumbayan Barat**	Pendampingan SMART VILLAGE di Pekon Merbau Kecamatan Kelumbayan Barat	103

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
7	**Bagian Organisasi Sekretariat Daerah**	SABER PEKAN (Sapu Bersih Pelayanan Mengecewakan)	99
		E-SUKMA RATU	99
		E-SAKIP Kab.Tanggamus	99
		PENDAKI (Pendampingan SAKIP 0	92
8	**Dinas Kesehatan**	Kotaagung PINTAR (Program Inovasi Kesehatan Masyarakat)	94
		MOBIL COMBAT PCR (Pemeriksaan Corona Virus menggunakan alat PCR di mobil)	93
		BUMIL CERIA	95
		Lapis kenyal Kotaagung (Pelayanan Pronalis Berkualitas Menjamin Kenyamanan dan Kesehatan Lansia)	94
		POS PATAKA (Posyandu Paud dan taman Kanak-kanak) UPTD Puskesmas Bulok Sukamara	96
		SENJA YANG INDAH	90
		GEMAS CERMAT PAPARAZI (Gerakan Masyarakat Cegah Malnutrisi melalui Papa-papa Sadar Akan Gizi) UPTD Puskesmas Siring Betik	95
		POS GILAS STUNTING (Pos Gizi dan kLEAS sTUNTING) UPTD Puskesmas Ngarip Ulu Belu	98
		Gerakan Saber TB (Sapu Bersih Tuberkulosis) UPTD Puskesmas Rantau Tijang	94
		Pancing Mata Batin (Pencegahan Stunting dengan Makanan Tambahan Tinggi Protein) Puskesmas Pasar simpang	101
		DASASILA UPTD PUSKASMAS GISTING KABUPATEN TANGGAMUS.	97
9	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	GENTA BERAKSI (GenRe Tanggamus Berkarya dan Menginspirasi)	110
		LAGASERA (Lansia Tanggamus Sehat Sejahtera)	93
		GEMPI (Gerakan Pemasangan KB IUD)	102
		PENA BISMA (Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat)	102
		STUNTING CETING (Gerakan Masyarakat Sadar Cegah Stunting)	94
		KAPAS (kALENDER pINTAR bayi Sehat)	96
		KAMPUNG BERAKSI (Kampung KB Berkualitas Aktif Sejahtera Inovatif)	94
		Pelayan Implant Geladi (Gerakan Pelayanan Dinamis)	96
		BKB Germas (Gerakan Menuju anak Sehat)	92
		Keluarga Tak Berencana	106
10	**Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Sekolah Lapangan Petani Meningkatkan Produktivitas Padi dan Sumber Daya Manusia Para Petani di daerah IPDMIP	95
		Peningkatan Pendapatan di Daerah Irigasi Pertanian IPDMIP	95

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		EMPING MELINJO	90
		Pekarangan Pangan Lestari Kabupaten Tanggamus	96
		Penanggulangan dan Pengendalian Terpadu Hama dan Penyakit Pertanian	99
		Keterpaduan Tanaman Genjer, Kacang Hijau dan Ikan mas sebagai teknik PHT yang menjadi kearifan lokal dalam menunjang produktivitas sawah	98
		Rumah Alpukat Tanggamus Unggul	90
		Penggunaan Pupuk Kalium dan Mikro Zn untuk menunjang peningkatan produksi Tanaman Padi	91
		Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui pemanfaatan Kaus bekas sebagai polybag dalam budidaya Melon	90
		Pengelolaan jerami dengan dekomposer sederhana	90
		KIBAS PELAGI	90
		Pemberdayaan kelompok perempuan dalam penumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dibidang Agroindustri pengolahan kopi laos almira di Pekon Tanjung Rejo , Kecamatan Kotaagung Timur kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung	91
11	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**	Buku " Belah Ketupat "	93
		Pembangunan Panggung Kesenian/Pertunjukan di objek wisata Air terjun Way Lalaan	90
		Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Destinasi	90
12	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	PELAKOL	102
		Pelayanan Keliling (Pak Kamling)	102
		Pelayanan Pasca Bencana (Pelayanan Pasben)	102
		Pelayanan Home Service	102
		PAK SEKDA	102
		Adek Cakep	105
		Pelayanan Online	105
		Paket ke Tanggamus	105
13	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	Tata Kelola Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar berbasis IT	99
		Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)	94
		Cuti online PNS berbasis web aplikasi	100
		Penerimaan ASN secara Kabel (Akuntabel dan Transparan)	97
		Digitalisasi Arsip Kepegawaian (DAK) berbasis elektronik	91
		E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara menguunakan Aplikasi berbasis web 9 web based)	93

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		Penerbitan SK PNS dan CPNS secara Otomatis	92
		Ceremonial PANJI (Upacara Pengambilan Sumpah Janji) PNS	94
14	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	PERIKAT RATU	100
		Blanko Perizinan Berhologram	99
		Transformasi Pelayanan (RATU SIKOP)	99
		Implementasi E Signature	99
		ASN WAJIB IMB	99
		Aplikasi System Informasi Perizinan (Tracking System)	98
15	**Dinas Sosial**	Satu Pekon Satu Puskesos	93
		Rehabsos PMKS	91
		TRABAS (Tanggap Reaksi Bencana Alam dan Sosial)	91
16	**Dinas Perhubungan**	Pelayanan Bus Sekolah Gratis	102
		ASISI (Aplikasi Sistem Infiormasi ABSENSI oNLINE)	102
17	**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah**	E-LHP Digital Pengadaan Barang dan Jasa	91
18	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Pelayanan Masyarakat Berbasis Digital (SID)	99
		Pembagian Air bersih dari limbah Pentil Ban dan Ember bekas	107
		Eco Enzym	107
		Pemanfaatan Air untuk Pembangkikt Listrik menggunakan Turbin	107
		Pembuatan Gula Aren Merah dari Nira Aren	102
		Pendampingan Kemitraan Kelompok Tani Porang menerapkan GAP	104
19	**Sekretariat Dewan Pengurus Korpri**	Posko Peduli Covid-19	90
		KORPRI Peduli " Gerakan Seratus Ribu Rupiah "	90
20	**Kecamatan Pulau Panggung**	Rupiah Dipinggir Lapangan	91
21	**Dinas Pendidikan**	Program ASI (Kelas Inspirasi) SD Negeri Banjarsari Kec.Talang Padang	111
		Pemanfaatan Media Pembelajaran " GO OUT COVID " (Google classroom, WhatsApp Group, Virtual Converence, video) dimasa Pandemi Covid-19 pada siswa SMPN 1 Kotaagung	111
		PUSPITAKA (Pungut Sampah Pilah dan Tabungkan) Gerakan SDN 3 Datarajan Peduli Llingkungan	102
		APPEM DITA Mukltifungsi (Alat Peraga Pembelajaran Matematika di Taman Multifungsi) SDN 3 Datarajan Kec.Ulu Belu	90
		DALANG KEBEK (Daur Ulang Kertas Bekas)	102

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		SANDING TUBOKAS (Hiasan Dinding dari Tutup Botol Bekas)	96
		New Senam Tanggamus Sehat Jilid 2	101
		BANSOSE (Bantal Sofa Sederhana SDN 1 Datarajan)	98
		Pembelajaran Maya Sanera (Keberagaman budaya, bahasa dan kuliner nusantara) sebagai bentuk kekayaan Indonesia	108
		JARRUM KOMED (Belajar seru dan menyenangkan dengan komik edukatif)	102
		Pengembangan e-modul Materi kalor untuk menoingkatkan hasil belajar siswa	98
		GUS JAE MERANA (Gula semut jahe menambah pendapatan keluarga masa corona)	98
		Merode KBK (Kompetisi Bermain Kelompok) SDN 1 Sukamernah Gunung Alip Kab.Tanggamus	111
		UMEC (Upaya mencegah penyebaran Covid 19, Guru bagi Masker dengan cara Home Visit	104
		SI PENDIKAR NIRMAWAN (Implentasi Penguatan Pendidikan Karakter Religius melalui Pemotongan Hewan kurban di Sekolah)	109
		Trai segok Bumain Bantal (Tari Tradisional Anak sebagai Sarana Pendidikan dan Promosi Budaya kain etnik Belah Ketupat tanggamus)	105
		Guling Sejuta Benak (Guru Keliling sebagai wujud nyataBerpihak pada Anak)	109
		Guling (Guru Keliling) Alternative Pembelajaran dimasa Pandemi Covid 19	100
		Pelita, Majalahnya Guru Hebat	92
		BUDEWI (Belajar Umum dengan Wisata)	105
		PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF “POP IT UP” (POWER POINT DAN ISPRING SUITE 10 TERINTEGRITAS PORTAL RUMAH BELAJAR DAN WhatsApp) PADA MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SMPN 1 KOTAAGUNG	94
		BDR SAKAI SAMBAYAN (Belajar dari Rumah Sayangi Kawan Kita Saling Membantu dalam Indahnya Kebersamaan)	109
		KELAP-KELIP (KELas APik KEgiatan LIterasi Produktif)	111
		RANBO (Rantang Anyaman Bambu)	99
		SANDING TUBOKAS (Hiasan Dinding dari Tutup Botol Bekas)	102
		SAHIBA SAHITA (SATU HARI MEMBACA SATU HARI BERCERITA) SD NEGERI 1 BABAKAN KECAMATAN PUGUNG	111

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
		GEPENG PAI (Gerakan Pembiasaan Mengaji Pagi Hari) Gerakan Pembiasaan Sebelum Belajar siswa SDN 3 Datarajan Ulubelu	100
		POLAH (PASAR ONLINE SEKOLAH)	107
22	**Bagian Hukum Sekretariat Daerah**	Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	92
23	**Kecamatan Sumberejo**	MABUR (Mata Air Berbau Rupiah)	92
24	**Kecamatan Kotaagung Barat**	Penurunan Stunting di Pekon Gedung Jambu Kecamatan Kotaagung Barat Kab.Tanggamus	92
		WISATA WAY TAHILI ANDESPEN (Air Megalir Anak Desa Pajajaran)	92
25	**Kecamatan Pugung**	WEBPEGUTI (Website Pekon Gunung Tiga)	100
26	**Kecamatan Gunung Alip**	Nikmatnya Berbagi Orang Tua	96
27	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Si Citi buat BAPAK HOTS (Aplikasi Citigov buat BPN dan BPKD HOST to HOST)	100
		Kring Pajak Asik (KIPAS RATU) Call Center pajak	96
		Relaksasi Pajak dan Retribusi di masa Pandemi	90
		OPTIMALISASI PELAYANAN DAN PENGARSIPAN SURAT MENYURAT SECARA CEPAT, TEPAT, EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK e-SIMA (Sistem Informasi Manajemen Arsip) DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS	96
		Membangun Studi Inovasi Langkah Strategis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus (Si-PEKAD)	93
28	**Kecamatan Kotaagung Timur**	Inovasi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian	91
29	**Dinas Tenaga Kerja**	Jeritan Kehidupan	95
30	**Satuan Polisi Pamong Praja**	Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) oleh Sat Pol PP Tangganmus (PPDPCSPP TGM)	91
31	**Inspektorat**	Pojok Berapi (Pojok berintegrasi, Akuntabel, Profesional dan Independen)	90
		Strategi kolaborasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah berbasis Pekon	91
32	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	Penerapan Integrasi Kopi dan Ternak Kambing (INKONAK)	94
		Penerapan Pola Interceroping Kopi dan Lada sambung Malada	91
33	**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah**	SATRIA PRATAMA : Standar Pelayanan Prima Tata Acara dan Tata Tempat Pimpinan	95
		PETAMIN RATU : Pelayanan kepada Tamu Pimpinan Yang Ramah Amanah Tegas dan Unggul	95
34	**Kecamatan**	SATGAS KEBERSIHAN KECAMATAN KOTAAGUNG	91

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	SKOR KEMATANGAN PADA APLIKASI IGA
	Kotaagung		
35	**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**	PAPA KOBRA	91
36	**Kecamatan Gisting**	POSREM (Posyandu Remaja) Harapan Bangsa Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting bersama melawan Pandemi Covid 19	100
		Resepsi di Masa Pandemi Covid 19 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	102
		Perpuskon Digital WODATING (Perpustakaan Pekon Digital Purwodadi Kecamatan Gisting)	102
		REWARD LUNAS PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS	97
		WISSINTING (WISATA VAKSINASI COVID 19 KECAMATAN GISTING	102
		Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Derap Pena (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	99
		Penghargaan Konter (Pekon Terbaik) Kecamatan Gisting	94
		BEDAH APBPekon Kecamatan Gisting	95
37	**Kecamatan Bulok**	KEBUNG THIKAH BELAH KETUPAT	99
38	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	102
		ANTOLOGI INOVASI PUSTAKA	103
39	**Kecamatan Wonosobo**	Setetes Keringat Harapan Anak dan Istri	97
40	**Sekretariat DPRD**	Penyebaran Informasi Kehumasan Kegiatan DPRD	91
41	**Kecamatan Talang Padang**	MONEV APBPEKON KECAMATAN TALANGPADANG	98
42	**Kecamatan Pematangsawa**	PEMATANG SAWA BEBAS STUNTING	102
43	**Kecamatan Air Naningan**	Brantas Stunting dengan TTD (Tablet Tambah Darah) Remaja	93
44	**Kecamatan Semaka**	MATA KEBENARAN	106
45	**Kecamatan Cukuh Balak**	CUKUH BALAK BERDIALOG	92
46	**Kecamatan Kelumbayan**	Cerpen Mas Bayan Berjumpa Berlian	93
47	**Kecamatan Bandar Negeri Semuong**	PAKET (Pemantau Anggaran Kegiatan Tetap Pekon)	100
48	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	Penyelenggaraan Pusat Pengaduan Publik/ SMS Canter	97
49	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	Lamban Helau Para Sang Juara	90

Sumber : Bappelitbang Kabupaten Tanggamus, 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

BAB VII
PENUTUP

PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2022

BAB VII

PENUTUP

Pada akhir 2017 Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dengan menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Terkait dengan penetapan peraturan tersebut, berimplikasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun terutama mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan yang terdapat didalamnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tanggamus dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terutama Pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa :

> *RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*

maka Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyusun RKPD Tahun 2023 yang substansinya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Tanggamus.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai hal tersebut, sinergi kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah perlu untuk dilakukan secara lebih terarah, karena pencapaian pembangunan nasional merupakan agregasi dari upaya dan pencapaian yang dilakukan daerah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyamakan langkah untuk memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, PemerintahPusat dan Daerah perlu berpijak pada kerangka pikir yang sama, yaitu : (i) **Pertumbuhan** (*growth)* yang menyeimbangkan komponen di sisi pengeluaran dan sisi produksi untuk lebih berkualitas dan memberikan efek pengganda yang lebih besar; (ii) **Stabilitas** (*stability)* yang mencakup stabilitas ekonomi, sosial, dan politik; yang perlu di jaga di setiap daerah agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara

efektif dan tanpa gangguan; (iii) **Pemerataan yang Berkeadilan** (*equity)* yang memastikan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (*inclusiveness).*

Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2023 ini, diharapkan perencanaan dan penganggaran dapat lebih efisien, efektif, akuntabel, terukur dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana dapat diantisipasi lebih awal. Dengan demikian hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya dukungan dan komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Tanggamus untuk menjalankan program-program yang telah digariskan sehingga target dan sasarannya dapat tercapai dengan optimal.

RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1) Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2023 dengan menggunakannya sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
2) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai penjabaran RKPD Tahun 2023, dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-PD) dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD).
3) Rencana tindak menurut dimensi pembangunan, bidang-bidang pembangunan, maupun menurut Perangkat Daerah telah disusun dengan mendapatkan masukan dari seluruh Perangkat Daerah menjadi dokumen yang terintegrasi dari RKPD Tahun 2023;
4) Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKPD ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan

pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender.

Kami menyadari RPKD ini masih perlu penyempurnaan, sehingga bersinergi dengan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dan pembangunan nasional tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif masyarakat terutama dalam hal : (i) perumusan peraturan perundang-undangan; (ii) pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan; dan (iii) mobilisasi dan pengelolaan sumber daya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian setelah kita memiliki RKPD, kita punya APBD Tahun 2023, mari kita laksanakan dengan menerapkan prinsip integratif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendaliannya dapat dilakukan dengan baik untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023. Kami mengharapkan kepemimpinan dan manajemen dari semua jajaran pemerintah, untuk memastikan apa yang kita rencanakan secara bersama ini juga bisa dilaksanakan dengan baik. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

